LAPORAN INDUK

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH TAHUN 2025-2030 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur atas kehadirat Allah SWT karena Ridho dan KaruniaNya Dokumen pendahuluan KLHS RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini dapat disusun dengan lancar.

Perlahan mulai disadari bahwa perlu langkah masiv untuk mencegah semakin buruknya dampak pertumbuhan ekonomi terhadap sumberdaya alam dan lingkungan. Proses pembangunan mulai mempertimbangkan metode-metode yang terencana dan rasional dalam pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan, sehingga pembangunan itu sendiri dapat berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan, sejatinya adalah bagaimana upaya pemenuhan kebutuhan generasi saat ini dapat terpenuhi, namun dukungan dan kemampuan generasi selanjutnya dalam memenuhi kebutuhan tidak berkurang.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis memuat telaah terhadap dampak dari suatu kebijakan, rencana, program pembangunan, kondisi dan kecenderungan yang mempengaruhi eksistensi lingkungan. Hasil telaahan ditujukan untuk mengintegrasikan aspek-aspek lingkungan dan konsep pembangunan berkelanjutan ke dalam suatu kebijakan ataupun rencana program pembangunan.

Agar selaras dengan tujuan Pembangunan Berkelanjutan, maka KLHS RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini disusun untuk meningkatkan capaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan melalui pendekatan yang dapat mendeteksi permasalahan pada tingkat kebijakan, rencana, dan/atau program.

Tanjung Jabung Timur, Desember 2023

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Daftar Tabel vi
Daftar Gambar xvi

BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Maksud dan Tujuan I-3
1.3 Ruang Lingkup I-4
1.3.1 Lingkup Kegiatan I-4
1.3.2 Lingkup Wilayah I-5
1.4 Keluaran I-5
1.5 Dasar Hukum I-5

BAB II DASAR TEORI II-1
2.1 Konsep Dasar Lingkungan Hidup II-1
2.2 Pengelolaan Lingkungan Hidup II-4
2.3 KLHS Dalam Pembangunan Berkelanjutan II-5
2.3.1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) II-11
2.3.2 Prinsip Penyelenggaraan KLHS II-15
2.4 Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD) II-16

BAB III KONDISI UMUM DAERAH III-1
3.1 Aspek Geografis dan Demografi Kota III-1
3.1.1 Karakteristik Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur .. III-1
3.1.1.1 Karakteristik Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur III-1
3.1.1.2 Klimatologi dan Curah Hujan III-4
3.1.1.3 Ketinggian Tanah III-5

3.1.1.4 Kemiringan Lahan III-8
3.1.1.5 Geologi III-10
3.1.1.6 Jenis Dan Struktur Tanah III-13
3.1.1.7 Hidrologi III-16
3.1.2 Potensi Lahan Gambut III-21
3.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur III-30
3.1.4 Kondisi Umum Demografi Kabupaten Tanjung Jabung Timur III-37
3.1.4.1 Jumlah Penduduk III-37
3.1.4.2 Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Struktur Usia III-38
3.1.4.3 Kemiskinan III-41
3.1.4.4 Tenaga Kerja III-46
3.1.4.5 Pengangguran III-50
3.2 Penggunaan Lahan III-53
3.2.1 Penggunaan lahan III-53
3.3 Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup III-56
3.3.1 Jasa Layanan Ekosistem III-56
3.4 Aspek Kesejahteraan Masyarakat III-91
3.4.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi III-91
3.4.1.1 Pertumbuhan Ekonomi III-91
3.4.1.2 PDRB Menurut Lapangan Usaha III-91
3.4.1.3 PDRB Menurut Penggunaan III-92
3.4.1.4 Indeks Gini III-96
3.4.2 Aspek Kesejahteraan Sosial III-98
3.4.2.1 Angka Melek Huruf III-98
3.4.2.2 Angka Rata-Rata Lama Sekolah III-99
3.4.2.3 Angka Harapan Lama Sekolah III-100
3.4.2.4 Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni III-101
3.3.2.5 Angka Kelangsungan Hidup III-103
3.5 Aspek Pelayanan Publik III-104
3.5.1 Fokus Layanan Urusan Wajib III-104
3.5.1.1 Pendidikan III-104
3.5.1.2 Kesehatan III-123
3.5.1.3 Aspek Infrastruktur III-140
3.5.1.4 Sistem Persampahan III-146
3.5.1.5 Sistem Jaringan Drainase III-152
3.5.1.6 Sistem Jaringan Evakuasi III-152
3.5.1.7 Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah III-153
3.5.1.8 Penanaman Modal III-154
3.5.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan III-156
3.5.2.1 Holtikultura III-156
3.5.2.2 Pertanian III-158

3.5.2.3 Perkebunan III-160
3.5.2.4 Peternakan III-161
3.5.2.5 Energi dan Sumber Daya Mineral III-164
3.5.2.6 Sistem Jaringan Telekomunikasi III-166
3.5.2.7 Air Bersih III-166
3.5.2.8 Seni Budaya Dan Olahraga III-168
3.6 Aspek Daya Ekonomi dan Keuangan Daerah III-171
3.6.1 Struktur dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah III-171
3.6.1.1 Sektor Ekonomi Basis III-171
3.6.1.2 Analisis Pergeseran Struktur Ekonomi III-173
3.6.1.3 Pengeluaran Konsumsi Makanan dan Bukan Makanan Per Kapita III-175
3.6.1.4 Nilai Tukar Petani III-176
3.6.2 Produktivitas Total Daerah III-178
3.6.3 Perizinan III-178
3.6.4 Jumlah Pajak dan Retribusi Daerah III-179
3.6.5 Perda Yang Mendukung Iklim Usaha III-179
3.7 Gambaran Keuangan Daerah III-180
3.7.1 Kinerja Pelaksanaan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur III-180
3.7.2 Neraca Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur III-196
3.7.3 Kinerja Keuangan Daerah Dalam Pencapaian TPB III-204
3.8 Tinjuan Kebijakan dan Rencana Daerah III-205
3.8.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2005 – 2025 .... III-205
3.8.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 ..... III-232
3.9 Peran Pemangku Kepentingan Dalam Pencapaian TPB III-239

BAB IV ANALISIS CAPAIAN TPB/SDG'S IV-1
4.1. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan IV-2
4.1.1 Dimensi Sosial IV-8
4.1.2 Dimensi Ekonomi IV-10
4.1.3 Dimensi Lingkungan IV-13
4.1.4 Dimensi Hukum dan Tata Kelola IV-16
4.2 Identifikasi Dan Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan ... IV-19
4.2.1 Isu Pembangungan Berkelanjutan (PB) Strategis (Karakteristik Lingkungan Yang Berpotensi Terkena Dampak) IV-19
4.2.1.1 Pelingkupan Isu Pembangunan Berkelanjutan IV-19
4.2.1.2 Pemusatan Isu IV-20
4.2.1.3 Kesetaraan Gender IV-22
4.2.1.4 Sumber Daya Manusia IV-25
4.2.1.5 Kebencanaan IV-28
4.2.1.6 Alih Fungsi Lahan IV-32

4.2.1.7 Permukiman Layak Huni IV-35
4.2.1.8 Investasi dan Permodalan IV-38
4.2.1.9 Pariwisata IV-40
4.2.1.10 Transportasi..... IV-44

BAB V ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR TPB PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH V-1

BAB VI ALTERNATIF SKENARIO DAN REKOMENDASI VI-1
6.1. Alternatif Skenario Dan Rekomendasi Daya Dukung Dan Daya Tampung Daerah..... VI-8
6.1.1 Alternatif dan Rekomendasi Daya Dukung Pangan VI-8
6.1.2 Alternatif dan Rekomendasi Daya Dukung Air VI-9
6.2. Alternatif Skenario Dan Rekomendasi Pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Tpb) Dengan Upaya Tambahan ... VI-11
6.3. Alternatif Skenario Dan Rekomendasi Pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Tpb) Tanpa Upaya Tambahan..... VI-46
6.4. Arahan Visi, Misi dan Ringkasan Arahan Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur..... VI-49

BAB VII KESIMPULAN..... VII-1

LAMPIRAN PENCAPAIAN TPB/SDG's..... 1

DAFTAR TABEL

Tabel II.3.1	Tipe KLHS Menurut Evolusi Paradigma	II-10
Tabel III.1.1	Jumlah Kelurahan/Desa dan Luas Wilayah Administrasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022	III-2
Tabel III.1.2	Suhu Udara dan Kelembaban Udara di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022	III-4
Tabel III.1.3	Luas Wilayah Menurut Ketinggian Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	III-6
Tabel III.1.4	Klasifikasi Kemiringan Lahan dan Luasnya Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	III-8
Tabel III.1.5	Luas Wilayah Menurut Formasi Geologi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	III-11
Tabel III.1.6	Penyebaran Jenis Tanah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	III-14
Tabel III.1.7	Tinggi Muka Air (dalam M + PRL) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	III-18
Tabel III.1.8	Rencana Sistem Perkotaan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2031	III-35
Tabel III.1.9	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Pendudukdi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 – 2022	III-37
Tabel III.1.10	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tahun 2022	III-38
Tabel III.1.11	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tahun 2022	III-38
Tabel III.1.12	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tahun 2022	III-39
Tabel III.1.13	Jumlah Penduduk, Rumah Tangga dan Rata-Rata Anggota Rumah Tangga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tahun 2022	III-40
Tabel III.1.14	Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin (P0), Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kab. Tanjab Timur, 2015-2022	III-41
Tabel III.1.15	Rekap Data P3KE (Desil-1) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022	III-43

Tabel III.1.16 Rekap Data P3KE (Desil-1) Berdasarkan Mata Pencaharian Tahun 2022 ..... III-45
Tabel III.1.17 Indikator Ketenagakerjaan di Kab. Tanjab Timur tahun 2019-2022 . III-47
Tabel III.1.18 Indikator Ketenagakerjaan Serta Sektor Pendukung di Kab. Tanjab Timur tahun 2019-2022 ..... III-47
Tabel III.1.19 Jumlah Angkatan Kerja, Penduduk Bekerja, Pengangguran, TPAK, dan TPT Kab. Tanjab Timur, 2019-2022 ..... III-53
Tabel III.2.1 Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Ha) III-54
Tabel III.3.1 Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan III-57
Tabel III.3.2 Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih III-57
Tabel III.3.3 Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Penyediaan Serat III-58
Tabel III.3.4 Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Penyediaan Energi III-58
Tabel III.3.5 Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Penyediaan Sumberdaya Genetik III-58
Tabel III.3.6 Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Menurut Kecamatan III-58
Tabel III.3.7 Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih Menurut Kecamatan III-59
Tabel III.3.8 Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Penyediaan Serat Menurut Kecamatan III-59
Tabel III.3.9 Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Penyediaan Energi Menurut Kecamatan III-59
Tabel III.3.10 Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Penyediaan Sumberdaya Genetik Menurut Kecamatan III-60
Tabel III.3.11 Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Iklim III-66
Tabel III.3.12 Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih III-66
Tabel III.3.13 Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Bencana III-66
Tabel III.3.14 Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Pemurnian Air III-66
Tabel III.3.15 Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Pengaturan Limbah III-67
Tabel III.3.16 Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Kualitas Udara III-67
Tabel III.3.17 Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Penyerbukan Alami III-67
Tabel III.3.18 Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Pengendalian Hama Penyakit III-67
Tabel III.3.19 Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim Menurut Kecamatan III-68
Tabel III.3.20 Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air Menurut Kecamatan III-68
Tabel III.3.21 Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Pengaturan Bencana Menurut Kecamatan III-68
Tabel III.3.2.22 Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Pemurnian Air Menurut Kecamatan III-69
Tabel III.3.2.23 Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Pengaturan Limbah Menurut Kecamatan III-69
Tabel III.3.2.24 Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Kualitas Udara Menurut

Kecamatan III-69
Tabel III.3.2.25 Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Penyerbukan Alami Menurut Kecamatan III-70
Tabel III.3.2.26 Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Pengendalian Hama Menurut Kecamatan III-70
Tabel III.3.2.27 Distrubisi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Tempat Tinggal III-79
Tabel III.3.2.28 Distrubisi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Rekreasi III-79
Tabel III.3.2.29 Distrubisi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Estetika III-79
Tabel III.3.2.30 Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Tempat Tinggal Menurut Kecamatan III-80
Tabel III.3.2.31 Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Rekreasi Menurut Kecamatan III-80
Tabel III.3.2.32 Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Estetika Menurut Kecamatan III-80
Tabel III.3.2.33 Distrubisi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Tanah III-84
Tabel III.3.2.34 Distrubisi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Siklus Hara III-84
Tabel III.3.2.35 Distrubisi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Produksi Primer III-84
Tabel III.3.2.36 Distrubisi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Biodiversitas III-84
Tabel III.3.2.37 Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Tanah Menurut Kecamatan III-85
Tabel III.3.2.38 Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Siklus Hara Menurut Kecamatan III-85
Tabel III.3.2.39 Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Produksi Primer Menurut Kecamatan III-85
Tabel III.3.2.40 Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Bio Diversitas Menurut Kecamatan III-86
Tabel III.4.1 Nilai PDRB Perkapita Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Juta Rupiah), Tahun 2018-2022) III-93
Tabel III.4.2 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah terhadap PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 – 2022 (Miliar Rupiah) III-94
Tabel III.4.3 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 – 2022 (Miliar Rupiah) III-95
Tabel III.4.4 Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Terhadap PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 – 2022 (Miliar Rupiah) III-96
Tabel III.4.5 Perkembangan Koefisien Gini di Kabupaten Tanjung Jabung timur Tahun 2018 – 2022 ..... III-97
Tabel III.4.6 Perkembangan Angka Melek Huruf di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 – 2022 ..... III-98
Tabel III.4.7 Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Tanjung jabung timur Tahun 2018 – 2022 ..... III-100
Tabel III.4.8 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 – 2022 ..... III-101
Tabel III.4.9 Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi

Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Tanjab TimurTahun 2022-2022 ..... III-102
Tabel III.4.10 Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 – 2022 ..... III-103
Tabel III.5.1 Rasio Sekolah SD (Sekolah Dasar) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) terhadap Penduduk Berusia 7-12 Tahun di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2018-2022 ..... III-104
Tabel III.5.2 Rasio Guru terhadap murid SD di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2018-2022 ..... III-105
Tabel III.5.3 Rasio Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTS) dan Swasta terhadap Penduduk Berusia 13-15 Tahun di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2018-2022 ..... III-106
Tabel III.5.4 Rasio Guru Terhadap Murid SMP dan MTS Negeri dan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2018-2022 ..... III-107
Tabel III.5.5 Rasio Sekolah Menengah Atas (SMA) terhadap Penduduk Berusia 16-18 Tahun di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2018-2022 ..... III-108
Tabel III.5.6 Rasio Guru terhadap murid SMA di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2018-2022 ..... III-108
Tabel III.5.7 Rasio Sekolah Menengah kejuruan (SMK) terhadap Penduduk Berusia 16-18 Tahun di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2018-2022 ..... III-109
Tabel III.5.8 Rasio Guru terhadap murid SMK di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2018-2022 ..... III-110
Tabel III.5.9 Rasio Sekolah Madrasah Aliyah (MA) terhadap Penduduk Berusia 16-18 Tahun di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun ..... 2018-2022 ..... III-110
Tabel III.5.10 Rasio Sekolah Madrasah Aliyah (MA) terhadap Penduduk Berusia 16-18 Tahun di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2018-2022 ..... III-111
Tabel III.5.11 Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 – 2022 ..... III-123
Tabel III.5.12 Jumlah tenaga Kesehatan di Kab. Tanjab Timur tahun 2020-2022 ..... III-123
Tabel III.5.13 Persentase Penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan di Daerah Perkotaan dan Perdesaan menurut Kabupaten/Kota dan jenis Jaminan Kesehatan di Provinsi Jambi Tahun 2022 ..... III-136
Tabel III.5.14 RSE Presentase Rumah Tangga menurut jenis Jaminan Sosial, 2022 III-136
Tabel III.5.15 RSE Presentase Rumah Tangga menurut Jenis Program Perlindungan Sosial yang Diterima, 2022..... III-137
Tabel III.5.16 Persentase Perempuan Berumur 15 - 49 Tahun yang Pernah Melahirkan dengan Penolong Proses Kelahiran Oleh Tenaga Kesehatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 ..... III-137
Tabel III.5.17 Persentase Perempuan Berumur 15 - 49 Tahun Menurut

Karakteristik dan Status Penggunaan Alat/Cara KB di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 ..... III-138
Tabel III.5.18 Persentase Perempuan Berumur 15 - 49 Tahun yang Pernah Kawin di Daerah Perkotaan dan Perdesaan menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Melahirkan Anak Hidup yang Terakhir di Kab. Tanjab Timur tahun 2020-2022 ..... III-138
Tabel III.5.19 Persentase Penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan di Kabupaten Tanjab Timur Tahun 2020-2022 ..... III-139
Tabel III.5.20 Persentase Penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan di Kabupaten Tanjab Timur Tahun 2020-2022 ..... III-139
Tabel III.5.21 Panjang Jalan menurut Jenis permukaan Jalan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (km), 2020–2022 ..... III-141
Tabel III.5.22 Kondisi Jembatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018-2022 ..... III-142
Tabel III.5.23 Trayek dan Jumlah Armada Perusahaan Organda di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tahun 2021 ..... III-143
Tabel III.5.24 Jumlah dan Perkembangan Sektor Dermaga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018-2022 ..... III-144
Tabel III.5.25 Panjang dan Lokasi Sungai di Kabupaten Tanjung Jabung Timur III-145
Tabel III.5.26 Panjang, Kedalaman, dan Lebar Alur Sungai di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2022 ..... III-145
Tabel III.5.27 Area Resiko Persampahan III-149
Tabel III.5.28 Jumlah Keadaan KUD dan Non KUD di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018-2022 ..... III-154
Tabel III.4.29 Jumlah Anggota KUD dan Non KUD di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018-2022 ..... III-154
Tabel III.5.30 Nilai Investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018-2022 ..... III-155
Tabel III.5.31 Luas Panen Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Menurut Kecamatan dan JenisTanaman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Ha), Tahun 2022 ..... III-157
Tabel III.5.32 Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Kwintal),Tahun 2022 ..... III-157
Tabel III.5.33 Luas Panen Tanaman Pangan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Ha), Tahun 2022 ..... III-159
Tabel III.5.34 Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Ha), Tahun 2022 ..... III-160
Tabel III.5.35 Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Ton), Tahun 2022 ..... III-160
Tabel III.5.36 Perkembangan Populasi Ternak Ruminasia Besar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Ha), Tahun 2022 ..... III-162

Tabel III.5.37 Perkembangan Populasi Ternak Ruminasia Kecil di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Ha), Tahun 2022 ..... III-163
Tabel III.5.38 Capaian Lifting Minyak dan Gas Bumi (Migas) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018-2022 ..... III-164
Tabel III.5.39 Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik PT. PLN (Persero) pada Cabang/Ranting PLN Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2022 ..... III-165
Tabel III.5.40 Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2018–2022 ..... III-165
Tabel III.5.41 Capaian Rasio Elektrifikasi (RE) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 20218-2022 ..... III-165
Tabel III.5.42 Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota, Sumber Air Minum Bersih, dan Sumber Air Minum Layak di Kab. Tanjab Timur Tahun 2020-2022 ..... III-166
Tabel III.5.43 Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tahun 2022 ..... III-167
Tabel III.5.44 Jumlah Atlit Olahraga Berdasarkan Cabang Olahraga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 – 2022 ..... III-170
Tabel III.5.45 Jumlah Gedung Olahraga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 – 2022 ..... III-171
Tabel III.6.1 Perhitungan Sektor Ekonomi Basis III-172
Tabel III.6.2 Hasil Perhitungan Analisis Shift Share III-174
Tabel III.6.3 Rata-Rata Pengeluaran Konsumsi Makanan dan Bukan Makanan Perkapita Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 – 2022 ..... III-176
Tabel III.6.4 Persentase Produktivitas Total Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2018-2022 ..... III-178
Tabel III.6.5 Lamanya Proses Perizinan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur III-179
Tabel III.6.6 Jumlah Pajak dan Retribusi Daerah yang Dipungut di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 ..... III-179
Tabel III.7.1 Perbandingan Target dan Realisasi PAD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018-2022 ..... III-181
Tabel III.7.2 Targer dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018-2022 ..... III-187
Tabel III.7.3 Angaran Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018-2022 ..... III-194
Tabel III.7.4 Ratio Likuiditas di Tahun 2018 – 2022 ..... III-198
Tabel III.7.5 Ratio Salvabilitas di Tahun 2018 – 2022 ..... III-199
Tabel III.7.6 Debt Ratio di Tahun 2018 – 2022 ..... III-199
Tabel III.7.7 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 – 2022 ..... III-201
Tabel III.7.8 Nila Neraca Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 – 2022 ..... III-202
Tabel III.7.9 Indikator Urusan Keuangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018-2022 ..... III-205

Tabel III.8.1 Pemangku Kepentingan TPB di Kabupaten Tanjung Jabung Timur III-241
Tabel IV.1.1 Rekapitulasi Status Capaian Indikator Berdasarkan SDGs Nasional Tahun 2022 Kota Jambi..... IV-3
Tabel IV.1.2 Ketercapaian Indikator SDGs/TPB Kabupaten Tanjug Jabung Timur (2022) Dimensi Sosial IV-9
Tabel IV.1.3 Ketercapaian Indikator SDGs/TPB Kabupaten Tanjung Jabung Timur (2022) Dimensi Ekonomi IV-12
Tabel IV.1.4 Ketercapaian Indikator SDGs/TPB Kabupaten Tanjung Jabung Timur (2022) Dimensi Lingkungan..... IV-15
Tabel IV.1.5 Ketercapaian Indikator SDGs/TPB Kabupaten Tanjung Jabung Timur (2022) Dimensi Hukum..... IV-17
Tabel IV.2.1 Longlist Isu PB IV-19
Tabel IV.2.2 Pemusatan Isu PB..... IV-21
Tabel IV.2.3 Angka Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Tanjung Jabung Timur IV-23
Tabel IV.2.4 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kab Tanjab Timur 2021-2022..... IV-24
Tabel IV.2.5 Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin, 2021-2022 IV-25
Tabel IV.2.6 Pembangunan Manusia (IPM) Kab. Tanjab Timur dan Provinsi Jambi Tahun 2018 - 2022 ..... IV-27
Tabel IV.2.7 Perkembangan Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Wilayah Sekitar Kabupaten Tanjung Jabung Timur. IV-27
Tabel IV.2.8 Desa Tangguh Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Timur..... IV-30
Tabel IV.2.9 Luas Panen Tanaman Pangan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Ha), Tahun 2022 ..... IV-33
Tabel IV.2.10 Indikator Perumahan di Kab. Tanjab Timur tahun 2019-2021 ..... IV-35
Tabel IV.2.11 Lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Tanjung Jabung Timur..... IV-36
Tabel IV.2.12 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Milyar Rupiah), 2018-2022 ..... IV-38
Tabel IV.2.13 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Milyar Rupiah), 2018-2022 ..... IV-39
Tabel IV.2.14 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (persen), 2018-2022 ..... IV-40
Tabel IV.2.15 Wisata Yang Berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur..... IV-41
Tabel IV.2.16 Matrik Interaksi dan Analisis Antara Sintesa Isu PB IV-48
Tabel IV.2.17 Tingkat Penting Isu PB..... IV-53
Tabel IV.2.18 Analisis Isu PB Paling Strategis..... IV-57
Tabel V.1 Keterkaitan TPB Terhadap Program Organisasi Perangkat Daerah... V-2
Tabel V.2 Keterkaitan TPB Terhadap Program Organisasi Perangkat Daerah .. V-5
Tabel V.3 Keterkaitan TPB Terhadap Program Organisasi Perangkat Daerah .. V-6

Tabel V.4	Keterkaitan TPB Terhadap Program Organisasi Perangkat Daerah...	V-10
Tabel V.5	Keterkaitan TPB Terhadap Program Organisasi Perangkat Daerah...	V-12
Tabel V.6	Keterkaitan TPB Tujuan 6 Terhadap Program Organisasi Perangkat Daerah	V-14
Tabel V.7	Keterkaitan TPB Tujuan 7 Terhadap Program Organisasi Perangkat Daerah	V-16
Tabel V.8	Keterkaitan TPB Tujuan 8 Terhadap Program Organisasi Perangkat Daerah	V-17
Tabel V.9	Keterkaitan TPB Tujuan 9 Terhadap Program Organisasi Perangkat Daerah	V-18
Tabel V.10	Keterkaitan TPB Tujuan 10 Terhadap Program Organisasi Perangkat Daerah	V-19
Tabel V.11	Keterkaitan TPB Tujuan 11 Terhadap Program Organisasi Perangkat Daerah	V-23
Tabel V.12	Keterkaitan TPB Tujuan 12 Terhadap Program Organisasi Perangkat Daerah	V-26
Tabel V.13	Keterkaitan TPB Tujuan 13 Terhadap Program Organisasi Perangkat Daerah	V-28
Tabel V.14	Keterkaitan TPB Tujuan 16 Terhadap Program Organisasi Perangkat Daerah	V-29
Tabel V.15	Keterkaitan TPB Tujuan 17 Terhadap Program Organisasi Perangkat Daerah	V-35
Tabel V.16	Rekapitulasi Status Capaian Indikator Berdasarkan Target SDGs Nasional Tahun 2022	V-37
Tabel V.17	Kewenangan OPD Dalam Capaian Indikator di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.....	V-38
Tabel V.18	Kondisi Capaian TPB Berdasarkan OPD yang Bertanggung Jawab	V-63
Tabel VI.1	Matriks Keterkaitan Isu PB Strategis dengan Indikator TPB	VI-3
Tabel VI.2	Rekapitulasi Indikator TPB yang Butuh Upaya Tambahan Yang Terkait Dengan Isu PB Strategis	VI-8
Tabel VI.1.1	Alternatif dan Rekomendasi Daya Dukung Pangan	VI-9
Tabel VI.1.2	Alternatif dan Rekomendasi Daya Dukung Air	VI-10
Tabel VI.2.1	Proporsi Penduduk Yang Menerima Program Perlindungan Sosial, Menurut Jenis Kelamin, Untuk Kategori Kelompok Semua Anak, Pengangguran, Lansia, Penyandang Difabilitas, Ibu Hamil/Melahirkan, Korban Kecelakaan Kerja, Kelompok Miskin Dan Rentan	VI-11
Tabel VI.2.2	Keterkaitan TPB Tujuan 1 Terhadap Indikator TPB Yang Berkorelasi Kuat.....	VI-12
Tabel VI.2.3	Sasaran dan Arah Kebijakan TPB Tujuan 1	VI-12
Tabel VI.2.4	Sasaran, Arah Kebijakan dan alternatif rekomendasi skenario.....	VI-13
Tabel VI.2.5	Keterkaitan TPB Tujuan 2 Terhadap Indikator TPB Yang Berkorelasi Kuat.....	VI-14
Tabel VI.2.6	Sasaran dan Arah Kebijakan TPB Tujuan 2	VI-15
Tabel VI.2.7	Sasaran, Arah Kebijakan dan alternatif rekomendasi skenario.....	VI-16

Tabel VI.2.8 Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas Kesehatan VI-17
Tabel VI.2.9 Keterkaitan TPB Tujuan 3 Terhadap Indikator TPB Yang Berkorelasi Kuat VI-18
Tabel VI.2.10 Sasaran dan Arah Kebijakan TPB Tujuan 3 ..... VI-18
Tabel VI.2.11 Sasaran, Arah Kebijakan dan alternatif rekomendasi skenario VI-19
Tabel VI.2.12 Proyeksi Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin. Tahun 2022-2030 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur VI-20
Tabel VI.2.13 Keterkaitan TPB Tujuan 4 Terhadap Indikator TPB Yang Berkorelasi Kuat VI-21
Tabel VI.2.14 Sasaran dan Arah Kebijakan TPB Tujuan 4 ..... VI-21
Tabel VI.2.15 Sasaran, Arah Kebijakan dan alternatif rekomendasi skenario VI-22
Tabel VI.2.16 Keterkaitan TPB Tujuan 5 Terhadap Indikator TPB Yang Berkorelasi Kuat VI-23
Tabel VI.2.17 Sasaran dan Arah Kebijakan TPB Tujuan 5 ..... VI-23
Tabel VI.2.18 Sasaran, Arah Kebijakan dan alternatif rekomendasi skenario VI-24
Tabel VI.2.19 Proyeksi Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air tanah terhadap ketersediaanya VI-25
Tabel VI.2.20 Keterkaitan TPB Tujuan 6 Terhadap Indikator TPB Yang Berkorelasi Kuat VI-26
Tabel VI.2.21 Sasaran dan Arah Kebijakan TPB Tujuan 6 ..... VI-26
Tabel VI.2.22 Sasaran, Arah Kebijakan dan alternatif rekomendasi skenario VI-27
Tabel VI.2.23 Proyeksi Laju pertumbuhan PDB Tahun 2022-2045 perkapita di Kabupaten Tanjung Jabung Timur VI-28
Tabel VI.2.24 Keterkaitan TPB Tujuan 8 Terhadap Indikator TPB Yang Berkorelasi Kuat VI-29
Tabel VI.2.25 Sasaran dan Arah Kebijakan TPB Tujuan 8 ..... VI-29
Tabel VI.2.26 Sasaran, Arah Kebijakan dan alternatif rekomendasi skenario VI-30
Tabel VI.2.27 Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur di Kabupaten Tanjung Jabung Timur VI-31
Tabel VI.2.28 Keterkaitan TPB Tujuan 9 Terhadap Indikator TPB Yang Berkorelasi Kuat VI-32
Tabel VI.2.29 Sasaran dan Arah Kebijakan TPB Tujuan 9 ..... VI-32
Tabel VI.2.30 Sasaran, Arah Kebijakan dan alternatif rekomendasi skenario VI-33
Tabel VI.2.31 Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur di Kabupaten Tanjung Jabung Timur VI-34
Tabel VI.2.32 Keterkaitan TPB Tujuan 10 Terhadap Indikator TPB Yang Berkorelasi Kuat VI-35
Tabel VI.2.33 Sasaran dan Arah Kebijakan TPB Tujuan 10 ..... VI-36
Tabel VI.2.34 Sasaran, Arah Kebijakan dan alternatif rekomendasi skenario VI-37
Tabel VI.2.35 Keterkaitan TPB Tujuan 11 Terhadap Indikator TPB Yang Berkorelasi Kuat VI-38

Tabel VI.2.36 Sasaran dan Arah Kebijakan TPB Tujuan 11 ..... VI-38
Tabel VI.2.37 Sasaran, Arah Kebijakan dan alternatif rekomendasi skenario..... VI-39
Tabel VI.2.38 Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun..... VI-40
Tabel VI.2.39 Keterkaitan TPB Tujuan 16 Terhadap Indikator TPB Yang Berkorelasi Kuat..... VI-41
Tabel VI.2.40 Sasaran dan Arah Kebijakan TPB Tujuan 16 ..... VI-41
Tabel VI.2.41 Sasaran, Arah Kebijakan dan alternatif rekomendasi skenario..... VI-42
Tabel VI.2.42 Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun..... VI-43
Tabel VI.2.43 Keterkaitan TPB Tujuan 17 Terhadap Indikator TPB Yang Berkorelasi Kuat..... VI-44
Tabel VI.2.44 Sasaran dan Arah Kebijakan TPB Tujuan 17 ..... VI-44
Tabel VI.2.45 Sasaran, Arah Kebijakan dan alternatif rekomendasi skenario..... VI-45
Tabel VI.3.1 Alernatif skenario direkomendasikan untuk dipertahankan..... VI-46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1.1	Diagram Persentase Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2022	III-2
Gambar 3.1.2	Peta Administrtasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur	III-3
Gambar 3.1.3	Peta Ketinggian Kabupaten Tanjung Jabung Timur	III-7
Gambar 3.1.4	Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Tanjung Jabung Timur	III-9
Gambar 3.1.5	Peta Geologi Kabupaten Tanjung Jabung Timur	III-12
Gambar 3.1.6	Peta Jenis Tanah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	III-15
Gambar 3.1.7	Peta Sebaran Ketebalan Gambut di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	III-22
Gambar 3.1.8	Peta Kesatuan Hidrologi Kawasan Gambut Nasional di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	III-23
Gambar 3.1.9	Peta Sebaran Hot Spot di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015	III-25
Gambar 3.1.10	Peta Sebaran Hot Spot Lahan Pada Gambut di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015	III-26
Gambar 3.1.11	Sebaran Curah Hujan Tahunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018-2022	III-27
Gambar 3.1.12	Sebaran Curah Hujan Tahunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018-2022	III-28
Gambar 3.1.13	Proses pemadaman api pada kejadian bencana kebakarana hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Tahun 2015	III-29
Gambar 3.1.14	Grafik Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tahun 2022	III-40
Gambar 3.1.15	Grafik Persentase Penduduk Miskin Kab. Tanjab Timur Tahun 2015 - 2022	III-42
Gambar 3.1.16	Rekap Data P3KE (Desil-1) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022	III-43
Gambar 3.1.17	Persentase Data P3KE (Desil-1) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Per Kecamatan, Tahun 2022	III-44
Gambar 3.1.18	Peta Sebaran Sasaran P3KE (Desil-1) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022	III-44

Gambar 3.1.19 Komposisi Mata Pencaharian Penduduk Sasaran P3KE (Desil-1) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 ..... III-45
Gambar 3.1.20 Komposisi Mata Pencaharian Penduduk Sasaran P3KE (Desil-1) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Berdasarkan Kecamatan Tahun 2022 ..... III-46
Gambar 3.1.21 Garfik Pengaruh Tingkat Partisipasi Angka Kerja (TPAK) Terhadap Usia Produktif di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2022 ..... III-48
Gambar 3.1.22 Garfik Tingkat Pengaruh Usia Produktif Terhadap Perkembangan Ekonomi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2022 III-49
Gambar 3.1.23 Grafik Angka Pengangguran di Kab. Tanjab Timur Tahun 2019-2022 ..... III-51
Gambar 3.1.24 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kab. Tanjab Timur Tahun 2019 - 2022 ..... III-52
Gambar 3.1.25 Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Kab. Tanjab Timur III-52
Gambar 3.2.1 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur III-55
Gambar 3.3.1 Peta Jasa Ekosistem Untuk Penyediaan Pangan III-61
Gambar 3.3.2 Peta Jasa Ekosistem Untuk Penyediaan Air Bersih III-62
Gambar 3.3.3 Peta Jasa Ekosistem Untuk Penyediaan Serat III-63
Gambar 3.3.4 Peta Jasa Ekosistem Untuk Penyediaan Energi III-64
Gambar 3.3.5 Peta Jasa Ekosistem Untuk Penyediaan Sumberdaya Genetik III-65
Gambar 3.3.6 Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim III-71
Gambar 3.3.7 Peta Jasa Ekosistem Tata Kelola Air III-72
Gambar 3.3.8 Peta Jasa Ekosistem Bencana III-73
Gambar 3.3.9 Peta Jasa Ekosistem Pemurnian Air III-74
Gambar 3.3.10 Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Limbah III-75
Gambar 3.3.11 Peta Jasa Ekosistem Kualitas Udara III-76
Gambar 3.3.12 Peta Jasa Ekosistem Penyerbukan Alami III-77
Gambar 3.3.13 Peta Jasa Ekosistem Pengendalian Hama Penyakit III-78
Gambar 3.3.14 Peta Jasa Ekosistem Tempat Tinggal III-81
Gambar 3.3.15 Peta Jasa Ekosistem Rekreasi III-82
Gambar 3.3.16 Peta Jasa Ekosistem Estetika III-83
Gambar 3.3.17 Peta Jasa Ekosistem Tanah III-87
Gambar 3.3.18 Peta Jasa Ekosistem Penyerbukan Alami III-88
Gambar 3.3.19 Peta Jasa Ekosistem Produksi Primer III-89
Gambar 3.3.20 Peta Jasa Ekosistem Produksi Primer Peta Jasa Ekosistem Biodiversitas III-90
Gambar 3.4.1 Grafik Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2018-2022 ..... III-97
Gambar 3.4.2 Grafik Perkembangan Koefisien Gini diKabupaten Tanjung Jabung timur Tahun 2018 – 2022 ..... III-99
Gambar 3.4.3 Grafik Persentase Perkembangan Angka Melek Huruf di Kabupaten Tanjung Jabung timur Tahun 2018 – 2022 ..... III-132
Gambar 3.4.4 Grafik Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Tanjung

jabung timur Tahun 2018 – 2022 ..... III-100
Gambar 3.4.5 Grafik Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 – 2022 ..... III-101
Gambar 3.4.6 Grafik Persentase Perbandingan Indek APM Kabupaten Tanjab Timur dengan Provinsi Jambi Tahun 2022 ..... III-102
Gambar 3.4.7 Grafik Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Tanjab Timur dengan Provinsi Jambi Tahun 2022 ..... III-103
Gambar 3.4.8 Grafik Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kab. Tanjab Timur tahun 2018-2022 ..... III-104
Gambar 3.5.1 Grafik Rasio Guru terhadap murid SD di Kab. Tanjab Timur tahun 2018-2022 ..... III-106
Gambar 3.5.2 Grafik Rasio Guru terhadap murid SMP dan MTS di Kab. Tanjab Timur tahun 2018-2022 ..... III-107
Gambar 3.5.3 Grafik Rasio Guru terhadap murid SMA di Kab. Tanjab Timur tahun 2018-2022 ..... III-109
Gambar 3.5.4 Grafik Rasio Guru terhadap murid SMK di Kab. Tanjab Timur tahun 2018-2022 ..... III-110
Gambar 3.5.5 Grafik Rasio Guru terhadap murid MA di Kab. Tanjab Timur tahun 2018-2022 ..... III-111
Gambar 3.5.6 Peta Jumlah Sebaran Fasilitas Pendidian di Kecamatan Berbak ... III-112
Gambar 3.5.7 Peta Jumlah Sebaran Fasilitas Pendidian di Kecamatan Dendang III-113
Gambar 3.5.8 Peta Jumlah Sebaran Fasilitas Pendidian di Kecamatan Geragai .. III-114
Gambar 3.5.9 Peta Jumlah Sebaran Fasilitas Pendidian di Kecamatan Kuala Jambi III-115
Gambar 3.5.10 Peta Jumlah Sebaran Fasilitas Pendidian di Kecamatan Mendahara III-116
Gambar 3.5.11 Peta Jumlah Sebaran Fasilitas Pendidian di Kecamatan Mendahara Ulu III-117
Gambar 3.5.12 Peta Jumlah Sebaran Fasilitas Pendidian di Kecamatan Nipah Panjang III-118
Gambar 3.5.13 Peta Jumlah Sebaran Fasilitas Pendidian di Kecamatan Rantau Rasau III-119
Gambar 3.5.14 Peta Jumlah Sebaran Fasilitas Pendidian di Kecamatan Sabak Barat III-120
Gambar 3.5.15 Peta Jumlah Sebaran Fasilitas Pendidian di Kecamatan Sabak Timur III-121
Gambar 3.5.16 Peta Jumlah Sebaran Fasilitas Pendidian di Kecamatan Sadu III-122
Gambar 3.5.17 Grafik Jumlah Tenaga Kesehatan di Kab. Tanjab Timur tahun 2020-2022..... III-124
Gambar 3.5.18 Peta Jumlah Sebaran Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Berbak .. III-125
Gambar 3.5.19 Peta Jumlah Sebaran Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Dendang III-126
Gambar 3.5.20 Peta Jumlah Sebaran Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Geragai . III-127
Gambar 3.5.21 Peta Jumlah Sebaran Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Kuala Jambi III-128
Gambar 3.5.22 Peta Jumlah Sebaran Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Mendahara III-129
Gambar 3.5.23 Peta Jumlah Sebaran Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Mendahara Ulu III-130
Gambar 3.5.24 Peta Jumlah Sebaran Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Nipah Panjang III-131
Gambar 3.5.25 Peta Jumlah Sebaran Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Rantau

	Rasau	III-132
Gambar 3.5.26	Peta Jumlah Sebaran Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Sabak Barat	III-133
Gambar 3.5.27	Peta Jumlah Sebaran Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Sabak Timur	III-134
Gambar 3.5.28	Peta Jumlah Sebaran Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Sadu	III-135
Gambar 3.5.29	Panjang Jalan menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (km), 2020-2022	III-141
Gambar 3.5.30	Perkembangan Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (km), 2020-2022	III-142
Gambar 3.5.31	Grafik Volume Sampah Pertahun di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015-2021	III-147
Gambar 3.5.32	Peta Area Resiko Persampahan	III-148
Gambar 3.5.33	Diagram Sistem Pengelolaan Persampahan	III-151
Gambar 3.5.34	Realisasi Investasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 - 2022	III-156
Gambar 3.5.35	Grafik luas panen tanaman pangan diKabupaten Tanjung Jabung Timur (Ha), Tahun 20222	III-159
Gambar 3.5.36	Grafik luas panen dan hasil panen tanaman perkebunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Ha), Tahun 2022	III-161
Gambar 3.5.37	Grafik Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota, Sumber Air Minum Bersih, dan Sumber Air Minum Layak di Kab. Tanjab Timur Tahun 2020-2022	III-167
Gambar 3.5.38	Grafik Jumlah Grup Kesenian di Kab. Tanjab Timur tahun 2018-2022	III-168
Gambar 3.6.1	Nilai Tukar Petani Tahun 2018-2022	III-177
Gambar 3.7.1	Grafik Terealisasi Berupa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018-2022	III-184
Gambar 3.7.2	Grafik Terealisasi Berupa Pendapatan Dana Perimbanagan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018-2022	III-185
Gambar 3.7.3	Grafik Terealisasi Berupa Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018-2022	III-185
Gambar 3.7.4	Grafik Rekap Teralisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018-2022	III-186
Gambar 3.7.5	Grafik Terealisasi Belanja Tidak Langsung di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018-2022	III-191
Gambar 3.7.6	Grafik Terealisasi Belanja Langsung di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018-2022	III-192
Gambar 3.7.7	Grafik Rekap Teralisasi Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018-2022	III-192
Gambar 3.7.8	Grafik Netto Angaran Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018-2022	III-196
Gambar 3.7.9	Grafik Ratio Likuiditas di Tahun 2018 – 2022	III-198
Gambar 3.7.10	Ratio Salvabilitas di Tahun 2018 – 2022	III-199

Gambar 3.7.11	Debt Ratio di Tahun 2018 – 2022	III-200
Gambar 3.7.12	Grafik Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 – 2022	III-201
Gambar 4.1.1	Grafik Persentase Capaian Indikator SDGs Kabupaten Tanjung Jabung Timur Terhadap Target Nasional	IV-3
Gambar 4.1.2	Jumlah Indikator Pada Setiap Tujuan Yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target	IV-4
Gambar 4.1.3	Indikator TPB Yang Sudah Dilaksanakan Tetapi Belum Mencapai Target	IV-5
Gambar 4.1.4	Indikator TPB yang sudah dilaksanakan namun perlu perhatian Khusus	IV-6
Gambar 4.1.5	Indikator TPB yang tidak/belum memiliki data	IV-7
Gambar 4.1.6	Grafik Ketercapaian Indikator SDG's/TPB Kabupaten Tanjug Jabung Timur Dimensi Sosial	IV-10
Gambar 4.1.7	Target Realisasi SDGs/TPB Kabupaten Tanjug Jabung Timur Dimensi Sosial	IV-10
Gambar 4.1.8	Ketercapaian Indikator SDGs/TPB Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dimensi Ekonomi	IV-13
Gambar 4.1.9	Target Realisasi SDGs/TPB Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dimensi Ekonomi	IV-13
Gambar 4.1.10	Ketercapaian Indikator SDGs/TPB Kabupaten Tanjung Jabung .... Timur Dimensi Lingkungan	IV-16
Gambar 4.1.11	Target Realisasi SDGs/TPB Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dimensi Lingkungan	IV-16
Gambar 4.1.12	Target Realisasi SDGs/TPB Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dimensi Hukum dan Tata Kelola	IV-18
Gambar 4.1.13	Target Realisasi SDGs/TPB Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dimensi Hukum dan Tata Kelola	IV-18
Gambar 4.2.1	Angka Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	IV-23
Gambar 4.2.2	Grafik Persentase Penduduk yang Bekerja menurut Tingkat Pendidikan Di Kab. Tanjung Jabung Timur, 2017-2021	IV-26
Gambar 4.2.3	Grafik Pembangunan Manusia (IPM) Kab. Tanjab Timur dan Prov. Jambi Tahun 2018 - 2022	IV-27
Gambar 4.2.4	Grafik Perkembangan Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Wilayah Sekitar Kabupaten Tanjung Jabung Timur	IV-28
Gambar 4.2.5	Grafik Bencana Alam yang Terjadi di Kab. Tanjab Timur dan Prov. Jambi Tahun 2018 - 2022	IV-28
Gambar 4.2.6	Peta Rawan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Timur	IV-31
Gambar 4.2.7	Grafik Luas Lahan Sawah Tahun 2019 dan Tahun 2020 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	IV-32
Gambar 4.2.8	Peta sebaran tanaman pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	IV-34
Gambar 4.2.9	Peta sebaran permukiman dan jaringan sanitasi/air bersih	

	di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	IV-37
Gambar 4.2.10	Peta Jaringan Infrastruktur Jalan	IV-47
Gambar 5.1	Grafik Persentase Capaian Indikator SDGs Kabupaten Tanjung Jabung Timur Terhadap Target Nasional	V-37
Gambar 5.2	Grafik Jumlah Indikator Mencapai Terget Pada Perangkat Daerah (PD)	V-64
Gambar 5.3	Grafik Jumlah Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target Pada Perangkat Daerah (PD)	V-65
Gambar 5.4	Grafik Indikator TPB yang sudah dilaksanakan namun perlu perhatian khusus Pada Perangkat Daerah (PD)	V-66
Gambar 5.5	Grafik Indikator TPB yang Tidak Memiliki Data (N/A) Pada Perangkat Daerah (PD)	V-67
Gambar 6.1	Ilustrasi Perumusan Alternatif Rekomendasi Kebijakan	VI-1
Gambar 6.2.1	Proporsi Penduduk Yang Menerima Program Perlindungan Sosial, Menurut Jenis Kelamin, Untuk Kategori Kelompok Semua Anak, Pengangguran, Lansia, Penyandang Difabilitas, Ibu Hamil/Melahirkan, Korban Kecelakaan Kerja, Kelompok Miskin Dan Rentan	VI-11
Gambar 6.2.2	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas Kesehatan	VI-17
Gambar 6.2.3	Grafik Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin	VI-20
Gambar 6.2.4	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air tanah terhadap ketersediaanya	VI-25
Gambar 6.2.5	Grafik Laju pertumbuhan PDB perkapita di Tanjung Jabung Timur	VI-28
Gambar 6.2.6	Grafik Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	VI-31
Gambar 6.2.7	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	VI-34
Gambar 6.2.8	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	VI-40
Gambar 6.2.9	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	VI-43

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mendasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pemerintah wajib menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program termasuk dalam penyusunan perencanaan program pembangunan daerah, salah satunya dokumen RPJMD baik baru maupuan perubahan. Tata cara penyusunan KLHS RPJPD selanjutnya diatur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 serta Permendagri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD dijelaskan bahwa KLHS menjadi bagian dari kaidah perumusan kebijakan rencana pembangunan. Selain itu KLHS juga menjadi dokumen yang terintegrasi ke dalam rencana pembangunan dan salah satu syarat penetapan Peraturan Daerah (Perda) tentang RPJPD dan RPJMD sebagai salah satu instrumen mengintegrasikan pertimbangan lingkungan pada tingkatan pengambilan keputusan yang

bersifat strategis, yakni pada aras kebijakan, rencana dan program pembangunan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda internasional yang menjadi kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium atau Millennium Development Goals (MDGs). SDGs disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan melibatkan 194 negara, civil society, dan berbagai pelaku ekonomi dari seluruh penjuru dunia. Agenda ini dibuat untuk menjawab tuntutan kepemimpinan dunia dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata. SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ditetapkan pada 25 September 2015 dan terdiri dari 17 (tujuh belas) tujuan global yang akan dijadikan tuntunan kebijakan dan pendanaan untuk 15 tahun ke depan dan diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030. Di Indonesia tujuan dan target dalam TPB tersebut dikelompokkan dalam 4 (empat) pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu pilar sosial, pilar ekonomi, pilar lingkungan hidup, serta pilar hukum dan tata kelola. Sebagai tindak lanjut Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan dalam pencapaian TPB melalui Perpres Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Pengintegrasian TPB dilakukan melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB yang diwajibkan bagi pemerintah provinsi dengan dukungan data capaian dari kabupaten/kota. Selanjutnya RAD TPB memberikan masukan untuk kebijakan pembangunan daerah melalui RPJMD maupun RPJPD. Selain itu dalam Permendagri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah mengamanatkan penyusunan KLHS dalam setiap penyusunan RPJMD baik baru maupun perubahan yang di dalamnya menggunakan pendekatan penilaian pencapain TPB daerah untuk mendukung capaian TPB nasional. KLHS yang bertujuan untuk memastikan bahwa aspek pembangunan berkelanjutan telah terintegrasi dalam Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP) yang dalam hal ini adalah RPJMD menggunakan

pendekatan capaian TPB daerah dibandingkan dengan target TPB nasional. Dengan pendekatan tersebut maka diharapkan pencapaian TPB yang belum mencapai target dapat dilakukan percepatan melalui upaya tambahan dalam RPJPD.

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi saat ini berdasarkan hasil evaluasi terhadap RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. maka perlu untuk menindaklanjuti dengan Perubahan RPJPD. Beberapa hal yang mendasari perlunya penyusunan RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. adalah untuk menyeleraskan dinamika kebijakan pembangunan yang terjadi saat ini seperti program-program dalam RPJMN, kebijakan pengelolaan keungan daerah, adanya percepatan dan pemerataan program pembangunan ekonomi kawasan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, adanya pedoman pemerintah tentang klasifikasi, kodefikiasi dan nomenklatur dalam perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Terkait dengan perlunya melakukan RPJMD untuk menyeleraskan dengan dinamika perkembangan pembangunan dan kebijakan pemerintah, sehingga perlu disusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Kegiatan Ini adalah :

1. Secara umum, maksud Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi untuk memastikan bahwa isu strategis, permasalahan dan sasaran strategis dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan termuat dalam Rancangan RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi . Sedangkan tujuannya adalah memberikan masukan ke dalam:
   a. Analisis kondisi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), untuk memberikan gambaran kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (permasalahan, isu strategis) sebagai dasar untuk merumuskan skenario pembangunan berkelanjutan;

b. Perumusan skenario Pembangunan Berkelanjutan (PB), berupa alternatif proyeksi kondisi pencapaian (target pencapaian) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tanpa upaya tambahan dan/atau dengan upaya tambahan sesuai periode RPJPD, dengan tetap memperhatikan masa pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
c. Pengintegrasian hasil dan rekomendasi KLHS ke dalam RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.

1.3 Ruang Lingkup

1.3.1 Lingkup Kegiatan

Lingkup Kegiatan

- Rapat Persiapan/Koordinasi awal dalam rangka penyamaan pandangan, difokuskan kepada diskusi dan mendapatkan umpan balik dari seluruh pihak terkait utamanya adalah pihak OPD dan *stakeholder* kunci lainnya;
- Mengkaji dampak lingkungan atas rencana tata ruang dan Kegiatan/Rencana/Program memberi kesempatan untuk memasukkan aspek LH dalam proses perencanaan pada tahap sangat awal sehingga dapat sepenuhnya memprakirakan dampak lingkungan potensial, termasuk yang bersifat kumulatif jangka panjang dan sinergistik;
- *Forum Group Discussion* dilaksanakan untuk mengelaborasi analisis dampak KRP pada tataran konsep diskusi dengan OPD dan *staleholder* kunci lainnya.
- Dalam pelaksanaan FGD dihadirkan narasumber yang dapat menjelaskan dan menjembatani kegiatan FGD serta memberikan penjelasan tentang tujuan dan maksud penyusunan KLHS ini. Melakukan inventarisasi dan kajian kebijakan yang mempunyai dampak dalam proses pengambilan keputusan di Kabupaten Tanjung jabung Timur;

- Mengkaji daya dukung dan daya tampung Kota Jambi baik itu melalui pendekatan kuantitatif ataupun kualitatif;
- Rapat pembahasan dengan para ahli dan tim yang terlibat dalam penyusunan untuk melakukan kajian tentang isu-isu lingkungan yang mungkin terjadi;
- Melakukan kegiatan Pelaporan dan Tinjauan (*reporting and review*);
- Finalisasi Laporan dan Penyerahan Laporan.

1.3.2 Lingkup Wilayah

Lingkup wilayah administrasi di Provinsi Jambi tepatnya yang menjadi deleniasi KLHS-RPJMD berada di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

1.4 Keluaran

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi menghasilkan output yang terdiri dari:

1) Laporan induk KLHS RPJPD yang disusun sesuai ketentuan peraturan terkait penyusunan KLHS
2) Ringkasan eksekutif KLHS RPJPD yang disusun sesuai ketentuan peraturan terkait penyusunan KLHS

1.5 Dasar Hukum

Peraturan perundangan yang melandasari Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi meliputi :

1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS;
6) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, yang telah diubah menggunakan Keputusan Mendagri Nomor

050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;

10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 TH 2010 tentang Pelaksanaan PP No 8 TH 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

BAB II
DASAR TEORI

2.1 Konsep Dasar Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup, menurut Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009, adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Kebijakan umum tentang lingkungan hidup di Indonesia, telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan ketentuan Undang-Undang payung terhadap semua bentuk peraturan mengenai masalah dibidang lingkungan hidup. Terkait dengan kajian masalah lingkungan hidup, banyak para ahli memberikan definisi atau arti mengenai lingkungan hidup. Tentunya mereka mendefinisikan didasarkan atas latar belakang keilmuan yang mereka miliki.

Prof. Dr. Emil Salim mendifinisikan lingkungan hidup sebagai : "Segala benda, kondisi, keadaan, dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia''[1]

Hal serupa dikemukakan oleh Otto Soemarwoto, namun dalam perspektif yang berbeda, bahwa : "Lingkungan adalah jumlah semua benda kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Secara teoritis ruang itu tdak terbatas jumlahnya, oleh karena misalnya matahari dan bintang termasuk di dalamnya''[2]

Begitu juga Husein yang menyatakan :"Lingkungan hidup mengandung mengandung arti termpat, wadah atau ruang yang ditempati oleh makhluk hidup dan tak hidup yang berhubungan dan saliong pengaruh-mempengaruhi satu sama lain, baik antara makhluk-makhluk itu sendiri maupun antara makhlukmakhluk itu dengan alam sekitarnya"[3]

Prof Dr. Munadjat Danusaputro SH Menurutnya, lingkungan hidup didefinisikan sebagai berikut : "Semua benda dan daya serta kondisi termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup yang lain. dengan demikian, lingkungan hidup mencakup dua lingkungan, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan budaya"[4]

Keberlanjutan (sustainability), konsep keberlanjutan yang digunakan disini berasosiasi dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang diperkenalkan oleh World Commission on Environment and Development sebagaimana tertuang dalam laporan Brundtland: "pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan generasi masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka". Wikipedia mendefinisikan keberlanjutan sebagai karakteristik suatu proses atau kondisi tertentu yang dapat terus bertahan untuk jangka waktu yang tak terbatas. Sementara Partidario (2007) mendefinisikan keberlanjutan sebagai suatu proses atau kondisi tertentu yang dicapai sebagai hasil pembangunan berkelanjutan yang berlangsung dalam jangka panjang waktu yang panjang.

[1] Abdurahman,Op.Cit, hlm 17
[2] Ibid, hlm, 8.
[3] Harum .M.Husein, Lingkungan Hidup Masalah Pengelolaan Dan Penegakan Hukumnya, Bumi Angkasa, Jakarta, 1995 ,hlm. 6
[4] Darsono, 1995

Strategi (s), merupakan konsepsi yang lahir dari ilmu kemiliteran dan umumnya merujuk pada kajian atau perencanaan sarana atau alat-alat untuk pencapaian tujuan suatu kebijakan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 1995),

mendefinisikan strategi sebagai ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu diperang dan damai; atau sebagai rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.

Oxford Dictionary (2005) mendefinisikan strategis sebagai suatu tindakan yang ditempuh dalam tahap perencanaan dengan maksud agar tujuan atau manfaat tertentu dapat dicapai (Oxford Dictionary 2005).

Dapat disimpulkan "strategis" mengandung arti perbuatan atau aktivitas yang dilakukan sejak awal proses pengambilan keputusan yang berakibat signifikan terhadap hasil akhir yang akan diraih. Dalam konteks KLHS, perbuatan dimaksud adalah suatu kajian yang dapat menjamin dipertimbangkannya sejak dini aspek lingkungan hidup dalam proses pengambilan keputusan di aras kebijakan, rencana atau program.

Sejalan dengan pengertian tersebut, pendekatan strategis dalam Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) dengan demikian bukanlah untuk mencari tahu apa yang akan terjadi di masa depan, melainkan untuk merencanakan dan mengendalikan langkah-langkah yang akan ditempuh sedemikian rupa sehingga terbangun atau terbentuk route untuk menuju masa depan yang diinginkan (Partidário 2007).

Kebijakan, Rencana dan Program (KRP), walau atribut yang membedakan ketiga istilah seringkali tidak jelas, namun secara generik perbedaannya adalah sebagai berikut (UNEP 2002: 499; Partidário 2004):

- Kebijakan (Policy) : arah yang hendak ditempuh (road-map) berdasarkan tujuan yang digariskan, penetapan prioritas, garis besar aturan dan mekanisme untuk mengimplementasikan tujuan.
- Rencana (Plan) : desain, prioritas, opsi, sarana dan langkah-langkah yang akan ditempuh berdasarkan arah kebijakan dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kesesuaian sumber daya.
- Program (Programme) : serangkaian komitmen, pengorganisasian aktivitas atau sarana yang akan diimplementasikan pada jangka waktu tertentu dengan berlandaskan pada kebijakan dan rencana yang telah digariskan.

Dalam prakteknya, ketiga definisi tersebut satu sama lain saling bertindih (overlapping) dan berbeda-beda antara satu negara dan negara lain, terutama definisi rencana dan program. Kedua istilah yang terakhir ini dibeberapa negara sering digunakan saling bergantian. Sehingga yang perlu dipahami disini cukup definisi generik saja. Implikasinya, aplikasi KLHS di suatu negara harus disesuaikan dengan definisi KRP yang umum dianut oleh negara yang bersangkutan.

2.2 Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pasal 3 UU No. 32 Th. 2009 dikemukakan bahwa tujuan pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

a) melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
b) menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
c) menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
d) menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
e) mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
f) menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
g) menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
h) mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
i) mengantisipasi isu lingkungan global.

Dari sasaran-sasaran pengelolaan lingkungan hidup di atas, terlihat bahwa kelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan tujuan utama yang dapat diukur.

Kelestarian fungsi lingkungan hidup dapat diukur dengan dua parameter utama, yaitu Baku Mutu Lingkungan Hidup dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup. Dua parameter ini menjadi ukuran/indikator untuk rencana usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak besar dan penting bagi lingkungan hidup.

2.3 KLHS Dalam Pembangunan Berkelanjutan

Strategic Environmental Assessment (SEA) SEA definitions are much like music: minor variations derived from a common theme and compressed into a narrow band width (Sadler 2005: 1). Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau Strategic Environmental Assessment (SEA) adalah instrumen pendukung perencanaan pembangunan berkelanjutan melalui upaya internalisasi kepentingan lingkungan hidup (LH) dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam perencanaan pembangunan tersebut. Upaya pengarusutamaan kepentingan LH dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ini penting karena pelaksanaan pembangunan selama ini selain telah meningkatkan keuntungan ekonomi, juga mengakibatkan kemerosotan kualitas LH dan persoalan-persoalan sosial.[5]

Dalam dua dekade terakhir seiring dengan semakin bertambahnya pengetahuan di bidang kajian lingkungan, telah berkembang aneka definisi KLHS yang merefleksikan perbedaan dalam memaknai tujuan KLHS. Sehingga boleh dikatakan tidak ada definisi KLHS yang secara universal dianut oleh semua pihak. Namun demikian secara umum dijumpai empat jenis definisi KLHS sebagaimana contoh berikut ini.

Sadler dan Verheem (1996): ”KLHS adalah proses sistematis untuk mengevaluasi konsekuensi lingkungan hidup dari suatu usulan kebijakan, rencana, atau program sebagai upaya untuk menjamin bahwa konsekuensi dimaksud telah dipertimbangkan dan dimasukan sedini mungkin dalam proses pengambilan keputusan paralel dengan pertimbangan sosial dan ekonomi”

("SEA is a systematic process for evaluating the environmental consequences of proposed policy, plan or programme initiatives in order to ensure they are fully included and appropriately addressed at the earliest appropriate stage of decision making on par with economic and social considerations")

Therievel et al (1992):

"KLHS adalah proses yang komprehensif, sistematis dan formal untuk mengevaluasi efek lingkungan dari kebijakan, rencana, atau program berikut alternatifnya, termasuk penyusunan dokumen yang memuat temuan evaluasi tersebut dan menggunakan temuan tersebut untuk menghasilkan pengambilan keputusan yang memiliki akuntabilitas publik"

("SEA is the formalised, systematic and comprehensive process of evaluating the environmental effects of a policy, plan or programme (PPPs) and its alternatives, including the preparation of a written report on the findings of that evaluation, and using the findings in publicly accountable decisionmaking")

DEAT dan CSIR (2000):

"KLHS adalah proses mengintegrasikan konsep keberlanjutan dalam pengambilan keputusan yang bersifat strategis"

("SEA is a process of integrating the concept of sustainability into strategic decision-making")

Brown dan Therievel (2000):

"KLHS adalah suatu proses yang diperuntukan bagi kalangan otoritas yang bertanggung jawab atas pengembangan kebijakan (pemrakrasa) (saat formulasi kebijakan) dan pengambil keputusan (pada saat persetujuan kebijakan) dengan maksud untuk memberi pemahaman holistik perihal implikasi sosial dan lingkungan hidup dari rancangan kebijakan, dengan fokus telaahan diluar isu-isu yang semula merupakan faktor pendorong lahirnya kebijakan baru"

("SEA is a process directed at providing the authority responsible for policy development (the 'proponent') (during policy formulation) and the

decision-maker (at the point of policy approval) with a holistic understanding of the environmental and social implications of the policy proposal, expanding the focus well beyond the issues that were the original driving force for new policy")

Dua definisi KLHS yang pertama boleh dikatakan menggunakan kerangka fikir AMDAL yakni menelaah implikasi atau efek dari rancangan kebijakan, rencana atau program terhadap lingkungan hidup. Pendekatan KLHS yang menyerupai AMDAL ini disebut juga sebagai "EIA-based" SEA atau KLHS yang berbasis pendekatan AMDAL (Partidario 1999).[6]

Adapun definisi ketiga dan keempat yang diajukan oleh DEAT dan CSIR (2000) serta Brown dan Therievel (2000) menunjukkan peran KLHS dalam memfasilitasi lahirnya KRP yang berorientasi berkelanjutan (sustainability). Di dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa prinsip-prinsip dan tujuan keberlanjutan dapat diintegrasikan dalam pengambilan keputusan sejak dini. Melalui pendekatan ini dapat difasilitasi terbentuknya kerangka-kerja (framework) untuk berkelanjutan yang dapat digunakan sebagai pemandu untuk rencana dan program dan/atau untuk menelaah rencana atau program yang tengah berjalan. Pendekatan ini boleh dikatakan merefleksikan apa yang disebut oleh Therivel et al (1992) sebagai "sustainability-led" SEA atau KLHS yang dipandu oleh keberlanjutan.

KLHS yang berbasis pendekatan AMDAL (EIA-based SEA) maupun yang berbasis pendekatan keberlanjutan (sustainability-led SEA) pada dasarnya hadir sebagai respon terhadap adanya beragam kebutuhan akan KLHS. KLHS berbasis pendekatan AMDAL muncul untuk mengatasi beberapa kelemahan yang dijumpai dalam AMDAL yang bersifat spesifik proyek; sementara KLHS berbasis keberlanjutan muncul sebagai sarana untuk mengimplementasikan konsep berkelanjutan (Therivel et al 1992). Dalam KLHS yang berbasis pendekatan AMDAL kajian diperluas hingga melampaui aras (level) proyek, yakni mengevaluasi konsekuensi positif dan negatif dari kebijakan, rencana dan program. Sementara dalam KLHS berbasis pendekatan keberlanjutan dapat diformulasikan visi, tujuan dan kerangka-kerja keberlanjutan untuk memandu

pengambilan keputusan KRP yang lebih baik di masa mendatang. Bila KLHS difungsikan sebagai pemandu untuk keberlanjutan, maka implikasinya KLHS tersebut harus dapat mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan biofisik dalam proses KRP (DEAT 2004).

Belakangan KLHS yang berbasis pendekatan berkelanjutan ini berkembang menjadi KLHS untuk Jaminan Keberlanjutan Lingkungan Hidup (SEA for Environmental Sustainability Assurance, ESA).[2] KLHS ini memang berbasis pembangunan berkelanjutan namun sangat berorientasi pada perlindungan lingkungan sehingga diklasifikasikan sebagai dark green. KLHS ini dipromosikan secara meluas oleh International Association for Impact Assessment(IAIA 2002). Manfaatnya tergolong cukup besar, diantaranya adalah lebih relevan dan lebih banyak diterima oleh kalangan pengambil keputusan (Sadler 2005:3)

Dari berbagai perkembangan definisi KLHS tersebut dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, KLHS lebih tepat dipahami sebagai suatu proses generik yang di dalamnya terkandung sekelompok instrumen dan peralatan dengan nama, bentuk dan lingkup aplikasi yang berbeda-beda (Sadler 2005: 2).

Kedua, KLHS untuk Menjamin Keberlanjutan Lingkungan (ESA atau Environmental Appraisal) telah menggeser paradigma KLHS dari yang semula berorientasi menanggulangi pengaruh negatif KRP ke arah yang berorientasi memelihara stok sumber daya alam. Sadler (2005) menggambarkan evolusi paradigma kajian ini pada Tabel II.3.1. Tabel ini juga dapat ditafsirkan sebagai agenda jangka panjang riset dan pengembangan KLHS.

Ketiga, integrasi prinsip-prinsip keberlanjutan pada KRP pada dasarnya baru bermakna bila terlebih dahulu dilakukan evaluasi pengaruh KRP terhadap lingkungan hidup. Hasil evaluasi ini kemudian menjadi dasar bagi integrasi atau kedalaman intervensi prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam KRP. Sejauh ini dapat dikatakan berbagai definisi KLHS yang ada belum secara eksplisit memadukan kedua analisis tersebut. Memperhatikan kondisi sumber daya alam, lingkungan hidup, sosial, ekonomi dan politik, serta kapasitas sumber daya manusia dan institusi di

masa mendatang; maka konstruksi definisi KLHS yang dipandang sesuai untuk Indonesia adalah: Suatu proses sistematis untuk mengevaluasi pengaruh lingkungan hidup dan menjamin diintegrasikannya prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengambilan keputusan yang bersifat strategis.

> *SEA is a systematic process for evaluating the environmental effect of and for ensuring the integration of sustainability principles into strategic decision-making.*

Dalam definisi di atas terkandung tiga proses penting yang perlu ditempuh dalam KLHS di Indonesia:

i) evaluasi pengaruh kebijakan, rencana dan program terhadap lingkungan hidup;

ii) integrasi prinsipprinsip keberlanjutan dalam kebijakan, rencana dan program; dan

iii) proses-proses kelembagaan yang harus ditempuh untuk menjamin prinsip-prinsip keberlanjutan telah diintegrasikan dalam kebijakan, rencana dan program

Tabel II.3.1
Tipe KLHS Menurut Evolusi Paradigma

Paradigma	Karakteristik kunci
KLHS sebagaimana yang umum diaplikasikan (EIA based SEA)	Generasi kedua KLHS: ditujukan ke sumber atau hulu persoalan (berbeda dengan AMDAL yang berorientasi ke symptom atau hilir persoalan); fokus ke usulan kebijakan, rencana, atau program; integrasi pertimbangan lingkungan dalam pengambilan keputusan; mempertimbangkan alternatif dan penanggulangan efek dari implementasi; pemantauan terbatas dan tindak lanjut
KLHS untuk Menjamin Keberlanjutan Lingkungan Hidup atau Penilaian Keberlanjutan Lingkungan (SEA for Environmental Sustainability Assurance, ESA, or Environmental Appraisal)	Semua yang diutarakan di atas plus: penilaian terhadap dampak lingkungan yang timbul vs perlindungan atas stok sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang menipis; jaminan bahwa rusak dan hilangnya sumberdaya dapat dipertahankan dalam batasbatas yang masih dapat ditolerir; kompensasi untuk dampak residual yang sejalan dengan prinsip tidak ada sumberdaya yang hilang – no net loss(keberlanjutan tinggi), atau minimum standar (keberlanjutan moderat); pemantauan sistematis terhadap hasil dan dampak.
Kajian Terpadu untuk Menjamin Keberlanjutan atau Penilaian Keberlanjutan (Integrated Assessment for Sustainability Assurance, ISA, or Sustainability Appraisal)	Semua yang diutarakan di atas plus: identifikasi tujuan sosial dan ekonomi serta batas ambang yang harus dicapai; penilaian terhadap dampak lingkungan yg akan timbul sebagai akibat dari usulan dan alternatif yang diajukan vs triple bottom line (TBL); evaluasi dampak penting vs evaluasi keberlanjutan untuk klarifikasi trade-off dikalangan para pihak; mencari keseimbangan yang paling baik untuk menjamin tercapainya keberlanjutan.

Sadler (1999, 2002, 2005); UNEP (2002)

Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, Pemerintah melalui UU 31/2009 telah menetapkan KLHS sebagai salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Pasal 14). Pada Pasal 15 mengamanatkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program, dengan muata kajian antara lain :

a) kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;

b) perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;

c) kinerja layanan/jasa ekosistem;

d) efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;

e) tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan

f) tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Penerapan KLHS sebagai instrumen untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan ditekankan kembali pada Pasal 17, dimana hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah, dan apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:

a) kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan

b) segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

2.3.1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Menurut *Brundtland* dari PBB, pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dsb) yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan.

Agenda pembangunan berkelanjutan dibuat untuk menjawab tuntutan dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata. Konsep Tujuan Pembangunan Berkelanjutan lahir pada Konferensi Pembangunan Berkelanjutan PBB, dengan menetapkan rangkaian target yang bisa diaplikasikan secara universal serta dapat diukur dalam menyeimbangkan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan; (1) lingkungan, (2) sosial, dan (3) ekonomi.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan agenda internasional yang menjadi kelanjutan dari Tujuan Pembangunan *Milenium atau Millennium Development Goals* (MDGs). SDGs disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan melibatkan 194 negara, civil society, dan berbagai pelaku ekonomi dari seluruh penjuru dunia. Agenda ini dibuat untuk menjawab tuntutan kepemimpinan dunia dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Agenda 2030 telah dideklarasikan pada tanggal 25 September 2015, bertepatan dengan berlangsungnya *United Nations General Assembly* (UNGA) di kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, Amerika Serikat. TPB/ SDGs yang cakupan dan substansinya selaras dengan Nawacita, terdiri atas 17 Tujuan dan 169 Target. Tujuan dan target tersebut menggambarkan visi dan ruang lingkup agenda pembangunan global yang inklusif dan multidimensi, yang akan menjadi panduan bagi komunitas global selama 15 tahun ke depan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat global. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ini terdiri atas 17 tujuan, yaitu:

a) TPB 1 : Tanpa Kemiskinan
   Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun;
b) TPB 2 : Tanpa Kelaparan
   Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
c) TPB 3 : Kehidupan Sehat dan Sejahtera
   Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia;
d) TPB 4 : Pendidikan Berkualitas
   Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;
e) TPB 5 : Kesetaraan Gender

Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan;

f) TPB 6 : Air Bersih dan Sanitasi Layak

Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;

g) TPB 7 : Energi Bersih dan Terjangkau

Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua;

h) TPB 8 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;

i) TPB 9 : Industri, Inovasi, dan Infrastruktur

Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;

j) TPB 10 : Berkurangnya Kesenjangan

Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara;

k) TPB 11 : Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan

Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;

l) TPB 12 : Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;

m) TPB 13 : Penanggulangan Perubahan Iklim

Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;

n) TPB 14 : Ekosistem Laut

Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan;

o) TPB 15 : Ekosistem Darat

Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasim lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati;

p) TPB 16 : Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh

Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan;

q) TPB 17 : Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Divisi Statistik UN-DESA telah mengeluarkan metadata 241 indikator (versi Maret 2016) untuk mengukur pencapaian target TPB/SDGs. Berdasarkan Metadata Indikator SDGs Global tersebut, telah dikembangkan Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia yang meliputi 17 Tujuan, 169 Target dan 319 Indikator. Komitmen pemerintah indonesia terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan ditegaskan melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dimana pencapaian TPB/SDGs sekaligus menjadi tolok ukur tercapainya agenda pembangunan nasional dan daerah. Untuk itu, pemerintah daerah berperan sebagai pelaksana dalam pencapaian TPB/SDGs sebagai bagian dari prioritas nasional dan komitmen internasional sehingga harus terintegrasi ke dalam pembangunan daerah. Tahapan dan proses pencapaian TPB/SDGs di daerah merupakan bagian dari tahapan dan proses pembangunan daerah itu sendiri, karena pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional.

2.3.2 Prinsip Penyelenggaraan KLHS

KLHS bertujuan untuk menjamin bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam melakukan pembangunan. Terdapat tiga nilai penting dalam penyelenggaraan KLHS yang dapat mencerminkan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu keterkaitan (*interdependency*), keseimbangan (*equilibrium*), dan keadilan (*justice*) di antara pilar dan isu di atas.

1. Keterkaitan (*interdependency*)

   Bertujuan supaya penyelenggaraan KLHS dapat menghasilkan kebijakan, rencana, atau program yang mempertimbangkan keterkaitan antar sektor, wilayah, global-lokal. Nilai ini juga mengandung makna dihasilkannya KLHS yang bersifat holistik berkat adanya keterkaitan analisis antar komponen fisik-kimia, biologi, dan sosial-ekonomi.

2. Keseimbangan (*equilibrium*)

   Bertujuan supaya penyelenggaraan KLHS senantiasa dijiwai keseimbangan antara kepentingan sosial-ekonomi dengan kepentingan lingkungan hidup, antara kepentingan jangka pendek dan jangka panjang, antara kepentingan pembangunan pusat dan daerah, dan keseimbangan-keseimbangan lainnya. Implikasinya, usaha pemetaan ragam dan bentuk kepentingan para pihak menjadi salah satu proses dan metode yang penting digunakan dalam KLHS.

3. Keadilan (*justice*)

   Bertujuan supaya penyelenggaraan KLHS dapat menghasilkan kebijakan, rencana, dan program yang tidak mengakibatkan marjinalisasi sekelompokM atau golongan tertentu dalam masyarakat karena adanya pembatasan akses dan kontrol terhadap sumber-sumber alam atau modal atau pengetahuan.

2.4 Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018, KLHS RPJMD adalah analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. KLHS RPJMD disusun sebelum dirumuskannya RPJMD dengan fokus kajian pada pencapaian target TPB/SDGs dan mengakomodir isu strategis TPB/SDGs yang mencakup isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, serta hukum dan tata kelola. Dalam pemanfaatannya, KLHS RPJMD dapat dimanfaatkan untuk penyusunan dokumen RPJMD dan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs.

KLHS RPJMD memuat kajian pembangunan berkelanjutan serta perumusan skenario pembangunan berkelanjutan. Pengkajian pembangunan berkelanjutan dilakukan melalui identifikasi dan analisis data kondisi umum daerah, capaian indikator TPB/SDGs yang relevan, serta pembagian peran antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, filantropi, pelaku usaha, akademisi dan pihak terkait lainnya; sedangkan perumusan skenario pembangunan berkelanjutan disusun berdasarkan alternatif proyeksi untuk pencapaian target dengan dan/atau tanpa upaya tambahan.

Berdasarkan metadata edisi II dalam pencapaian TPB/SDGs sebagai dokumen acuan atas indikator-indikator TPB/SDGs yang merupakan alat ukur pencapaian TPB/SDGs di Indonesia. Kaji ulang metadata dilakukan dengan mengacu pada: pertama, perubahan yang ditetapkan oleh Kantor Statistik Persatuan Bangsa-Bangsa (UN-STAT) di tingkat global yang awalnya pada tahun 2016 berjumlah 241 indikator menjadi 247 indikator pada April 2020 dan meliputi perubahan tingkatan indikator (Tiers), dan redaksional metadata indikator global. Kedua, relevansi indikator dengan Agenda Pembangunan Nasional yang selaras dengan TPB/SDGs.

Pemanfaatan KLHS RPJMD untuk RPJMD dan RAD TPB/SDGs terbagi dalam beberapa tahapan, antara lain tahap pembuatan, pemanfaatan, penelaahan, penjaminan kualitas, pendokumentasian, dan validasi. Untuk masing-masing RPJMD dan RAD TPB/SDGs memiliki pemanfaatan yang berbeda antara satu dengan

lainnya. Secara umum, dalam tahap pembuatan KLHS RPJMD terdapat kegiatan pengkajian dan perumusan skenario.

Dalam pengkajian, kegiatan yang dilakukan adalah melakukan identifikasi, pengumpulan, dan analisis data berupa kondisi umum daerah, capaian indicator TPB/SDGs, dan pembagian peran. Sedangkan dalam perumusan skenario, kegiatan yang dilakukan adalah membuat alternatif proyeksi. Alternatif proyeksi dibagi dalam alternatif proyeksi tanpa upaya tambahan atau BAU (business as usual) dan alternatif proyeksi dengan upaya tambahan. Alternatif proyeksi ini dibuat berdasarkan isu strategis, permasalahan, serta sasaran strategis.

Pemanfaatan untuk RPJMD: KLHS RPJMD dapat dimanfaatkan sebagai gambaran umum, hasil identifikasi permasalahan dan isu strategis, serta penentuan tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Dalam penyusunan RPJMD, KLHS berperan sebagai rancangan teknokratis yang digunakan sebagai rancangan awal. Rancangan awal RPJMD ditelaah kesesuaiannya dengan rancangan teknokratis sebelum menjadi rancangan dokumen rencana daerah (dokrenda). Rancangan dokrenda menjadi instrumen utama yang akan dibahas di musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) daerah. Setelah dokumen mendapat masukkan, kemudian dokumen tersebut ditetapkan sebagai rancangan akhir dan ditetapkan sebagai dokrenda.

Pemanfaatan untuk RAD: Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, RAD TPB/SDGs merupakan dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan di tingkat provinsi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB/SDGs yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah. KLHS untuk RAD TPB/SDGs dimanfaatkan sebagai penentuan usulan program dan kegiatan baik untuk daerah, pemerintah pusat di daerah, maupun untuk non pemerintah. Dalam tahap persiapan, pembuatan, dan pelaksanaan KLHS RPJMD.

Tahapan penyusunan KLHS RPJMD ini mengacu pada Permendagri Nomor 7 Tahun 2018, Pasal 3 dimulai dari tahap persiapan, pembuatan, hingga pelaksanaan.

1. Pembentukan tim pembuat KLHS RPJMD. Tim ini terdiri dari anggota yang memenuhi standar kompetensi berupa kriteria ketepatan keahlian pada isu yang dikaji dan pengalaman di bidang pembuatan dan pelaksanaan KLHS atau kajian sejenis.
2. Pengumpulan data terkait kebutuhan analisis laporan KLHS RPJMD. Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan/Perumusan Isu Strategis. Kajian ini meliputi tahap analisis data, konsultasi publik, dan penetapan isu. Identifikasi isu strategis dilakukan dengan melihat kondisi saat ini dan pencapaiannya terhadap target. Analisis isu biasanya ditinjau dari (namun tidak terbatas) kondisi lingkungan hidup (kajian 6 muatan KLHS, lihat Pasal 13 PP 46/2016), isu strategis RPJMD (dapat berupa rancangan awal/dokumen teknokratik), visi misi kepala daerah, dan capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals.
3. Perumusan Skenario dan Rekomendasi Pembangunan Berkelanjutan. Tahap ini untuk merumuskan alternatif atau proyeksi kondisi capaian di beberapa tahun mendatang serta memberikan rekomendasi kebijakan dan arahan program yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan isu/permasalahan yang ada. Pada tahapan ini juga dilakukan konsultasi publik.
4. Penjaminan Kualitas, Pendokumentasian, dan Validasi. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memastikan telah tepatnya proses pembuatan maupun isi KLHS RPJMD, serta telah diintegrasikannya rekomendasi KLHS ke dalam RPJMD.
5. Tahap penyusunan KLHS RPJMD yang terakhir yaitu tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan, dilakukan berdasarkan pemanfaatannya untuk RPJMD dan RAD TPB/SDGs Provinsi.

BAB III KONDISI UMUM DAERAH

3.1 ASPEK GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFI KOTA

3.1.1 Karakteristik Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

3.1.1.1 Letak Geografi dan Batas Administrasi

Secara geografis, Kabupaten Tanjung Jabung Timur terletak antara 0°53´ Lintang Selatan sampai 1°41´ Lintang Utara atau antara 103°23´-104°31´ Bujur Timur. Disebelah Utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Sementara di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Provinsi Sumatera Selatan, disebelah Timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan, sedangkan di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Batas administrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebagai berikut :

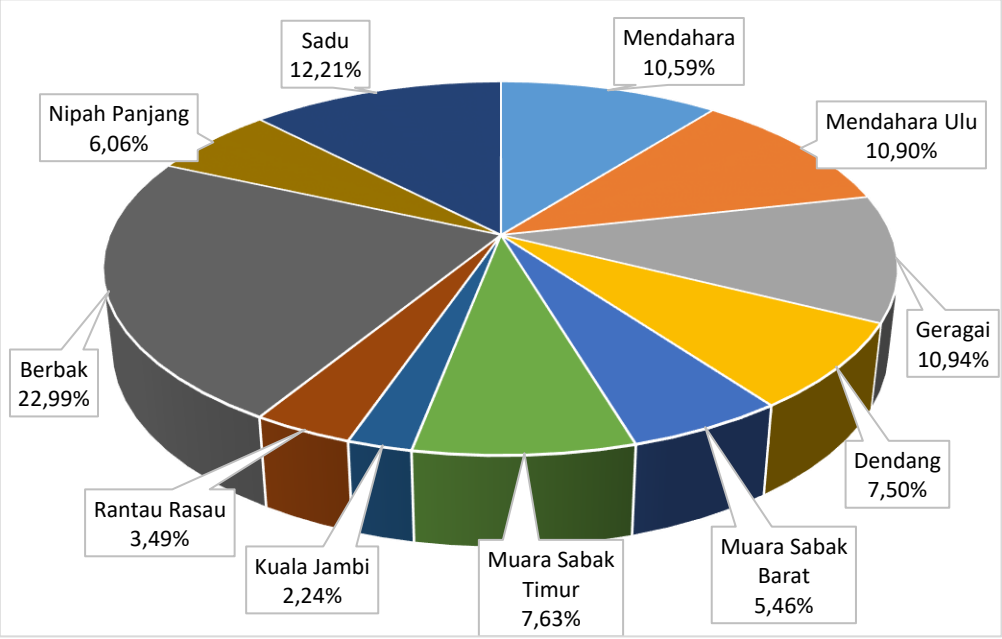
- Sebelah utara : Laut Cina Selatan
- Sebelah selatan : Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Provinsi Sumatra Selatan
- Sebelah barat : Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Muaro Jambi
- Sebelah timur : Laut Cina Selatan

Wilayah administratif Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki luas daratan sekitar 5.085,71 km^2 dan luas perairan (laut) ± 3.560,09 km^2 yang terbagi dalam 11 kecamatan, 20 kelurahan, dan 73 desa, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini.

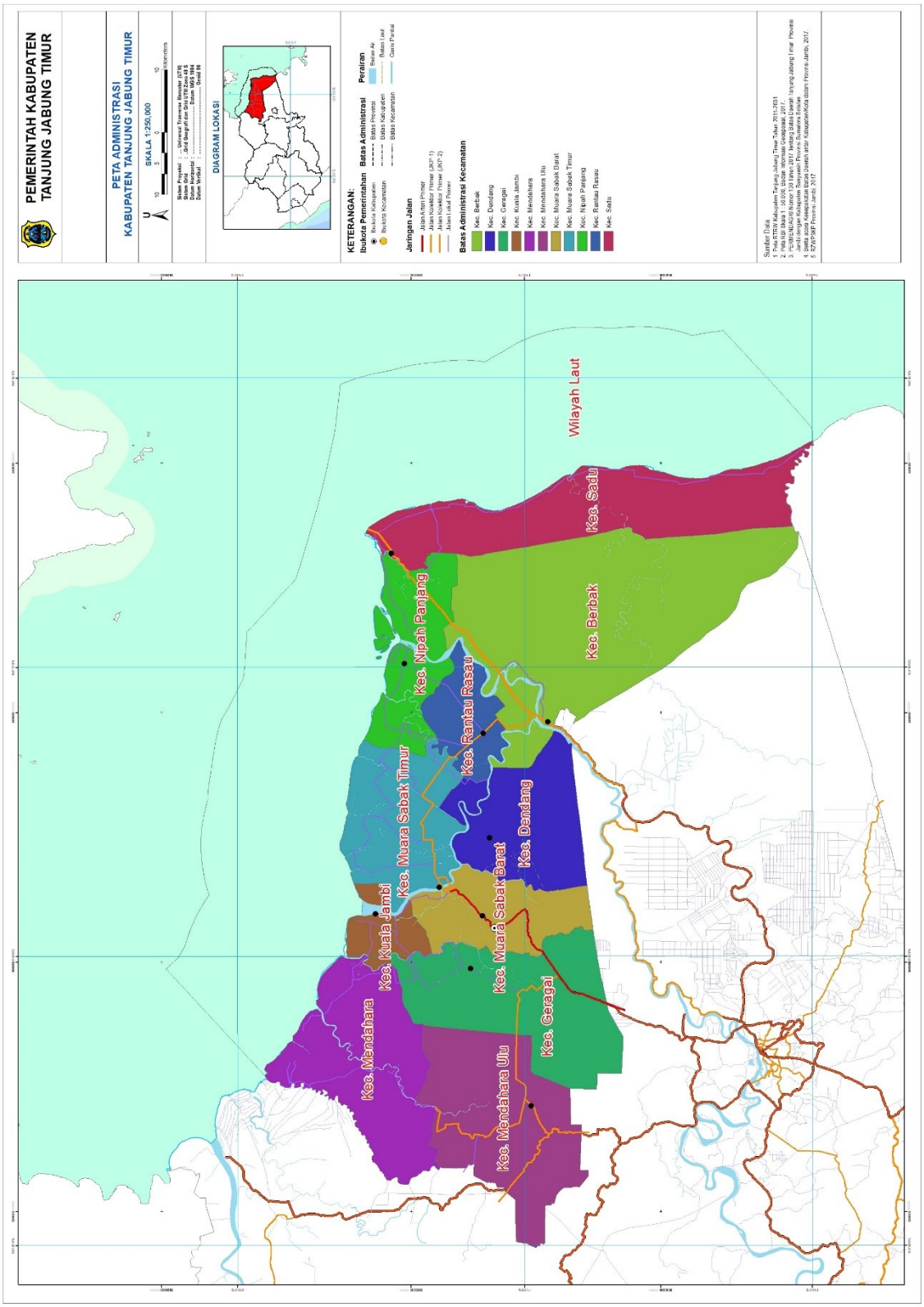
Tabel III.1.1
Jumlah Kelurahan/Desa dan Luas Wilayah Administrasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah		Luas Kecamatan	
		Kelurahan	Desa	Km^2	(%)
1.	Mendahara	1	8	538,58	10,59
2.	Mendahara Ulu	1	6	554,23	10,90
3.	Geragai	1	8	556,30	10,94
4.	Dendang	1	6	381,52	7,50
5.	Muara Sabak Barat	1	6	277,47	5,46
6.	Muara Sabak Timur	1	11	388,06	7,63
7.	Kuala Jambi	1	5	113,95	2,24
8.	Rantau Rasau	1	10	177,55	3,49
9.	Berbak	1	5	1.169,17	22,99
10.	Nipah Panjang	1	9	307,94	6,06
11.	Sadu	1	8	624,57	12,21
Jumlah		**11**	**82**	**5.085,71**	**100,00**

Sumber: Kab. Tanjab Timur Dalam Angka 2023



Gambar 3.1.1
Diagram Persentase Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2022



Gambar 3.1.2
Peta Administrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur

3.1.1.2 Klimatologi Dan Curah Hujan

Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung beriklim tropis dengan dipengaruhi oleh dua musim, yaitu Musim Barat dan Musim Timur. Selama tahun 2022 rata-rata suhu di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berkisar antara 25,86 ˚C – 30,23 ˚C, dengan suhu minimum terjadi pada bulan januari dengan suhu 21,20 ˚C dan suhu maksimum terjadi pada bulan agustus dengan suhu 35,40 ˚C. Kelembaban di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berkisar antara 71,87% - 90,17%, dengan kelembaban maksimum terjadi pada bulan oktober dan desember dengan kelembaban 90%. Adapun kelembaban minimum yang terjadi pada bulan agustus sebesar 44,00%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.1.2
Suhu Udara dan Kelembaban Udara
di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022

No	Bulan	Suhu Udara (˚C)			Kelembaban (%)		
		Minimum	Rata-rata	Maksimum	Minimum	Rata-rata	Maksimum
1	Januari	21,20	28,76	32,40	57,50	72,34	98,00
2	Februari	21,40	27,59	33,60	53,40	75,45	98,00
3	Maret	22,30	30,21	33,40	50,70	82,33	97,80
4	April	21,50	30,23	34,30	50,40	83,44	98,30
5	Mei	21,80	29,77	34,00	48,50	82,34	98,00
6	Juni	22,60	28,90	33,80	48,00	71,87	97,60
7	Juli	23,10	27,99	34,50	46,00	76,92	97,00
8	Agustus	21,40	26,73	35,40	44,00	84,86	98,00
9	September	22,10	26,71	34,70	47,00	85,54	98,00
10	Oktober	21,90	26,17	33,80	56,00	88,77	99,00
11	November	21,90	26,45	34,10	56,00	88,23	98,00
12	Desember	21,60	25,86	32,40	63,00	90,17	99,00

Sumber: Kab. Tanjab Timur Dalam Angka 2023

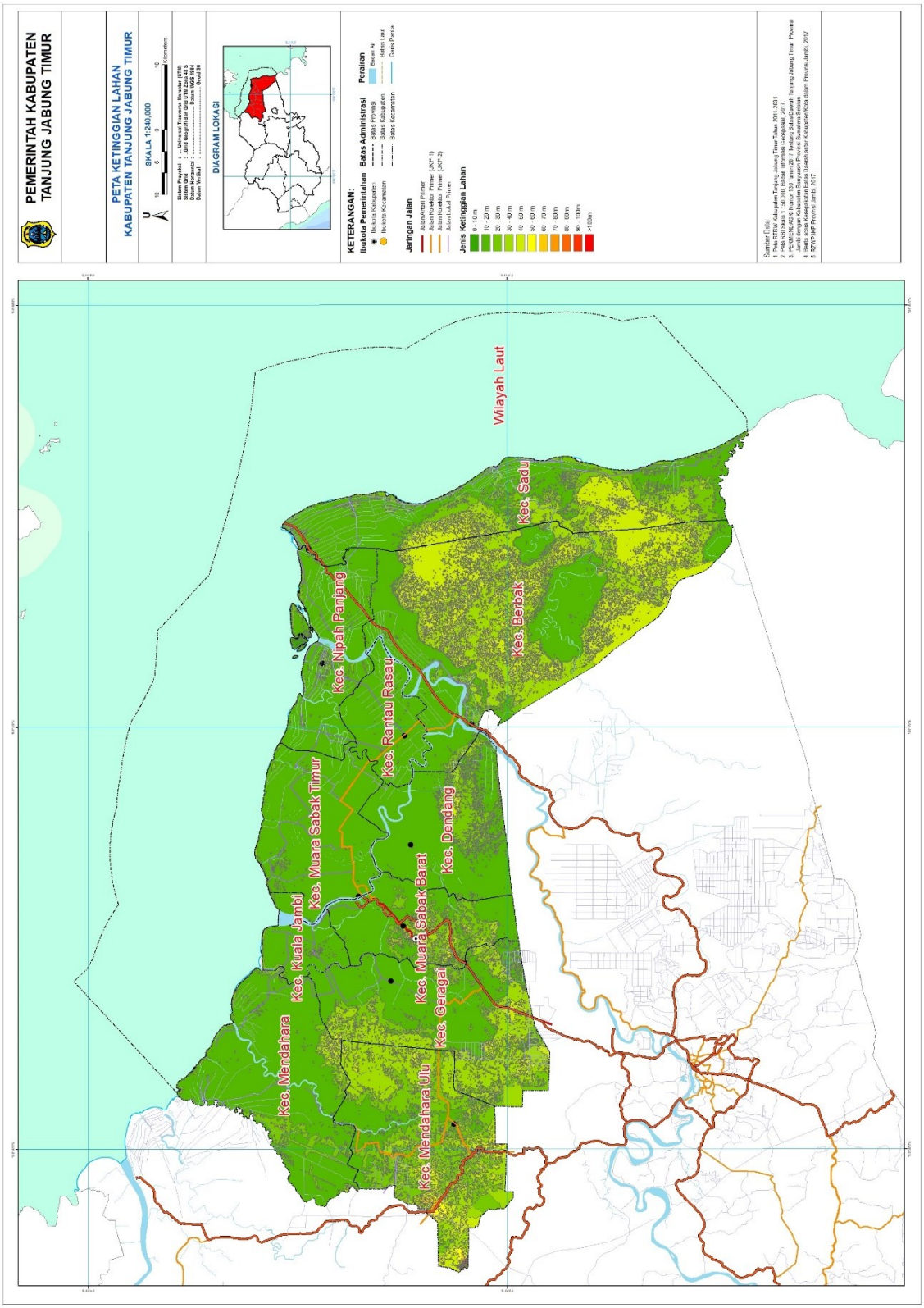
3.1.1.3 Ketinggian Tanah

Ketinggian tanah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sangat bervariasi dari 0 hingga lebih 100 meter, Sebagian besar Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terletak pada ketinggian 10-20 mdpl sekitar 298.232,39 ha atau sekitar 58,64% dari luas wilayah administrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan untuk luas terkecil berada di ketinggian > 100 mdpl sekitar 10,69 ha berada di Kecamatan Sadu Ulu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.1.3
Luas Wilayah Menurut Ketinggian Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

No	Kecamatan	Ketinggian (mdpl)											Jumlah
		0 - 10	10 - 20	20 - 30	30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 - 90	90 - 100	≥ 100	
1	Mendahara	323,84	47.108,84	4.727,26	1.307,07	385,92	5,08	-	-	-	-	-	53.857,99
2	Mendahara Ulu	195,29	9.375,35	19.190,77	20.021,15	5.247,37	1.093,24	199,73	36,94	36,30	16,17	10,69	55.423,00
3	Geragai	21,33	27.794,11	8.640,59	16.675,60	2.498,37	-	-	-	-	-	-	55.630,00
4	Dendang	-	30.729,12	6.315,48	673,39	434,01	-	-	-	-	-	-	38.152,00
5	Muara Sabak Barat	96,17	18.099,57	6.330,77	2.874,64	287,27	49,52	9,06					27.747,00
6	Muara Sabak Timur	241,81	38.058,25	505,94	-	-	-	-	-	-	-	-	38.806,00
7	Kuala Jambi	753,04	10.089,52	526,67	-	-	25,77	-	-	-	-	-	11.395,00
8	Rantau Rasau	-	17.618,95	136,05	-	-	-	-	-	-	-	-	17.755,00
9	Berbak	177,34	39.108,01	6.535,04	36.935,53	34.161,09	-	-	-	-	-	-	116.917,00
10	Nipah Panjang	299,51	28.953,82	1.532,35	8,33	-	-	-	-	-	-	-	30.794,01
11	Sadu	-	31.387,61	12.298,07	9.385,40	9.384,75	1,17	-	-	-	-	-	62.457,00
Jumlah		**2.108,32**	**298.232,39**	**66.648,24**	**87.790,35**	**52.308,04**	**1.174,77**	**208,79**	**36,94**	**36,30**	**16,17**	**10,69**	**508.571,00**
%		**0,41**	**58,64**	**13,11**	**17,26**	**10,29**	**0,23**	**0,04**	**0,01**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**100,00**

Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Tanjab Timur 2011-2031 dan Interpretasi Digitasi Peta Tahun 2022



Gambar 3.1.3
Peta Ketinggian Kabupaten Tanjung Jabung Timur

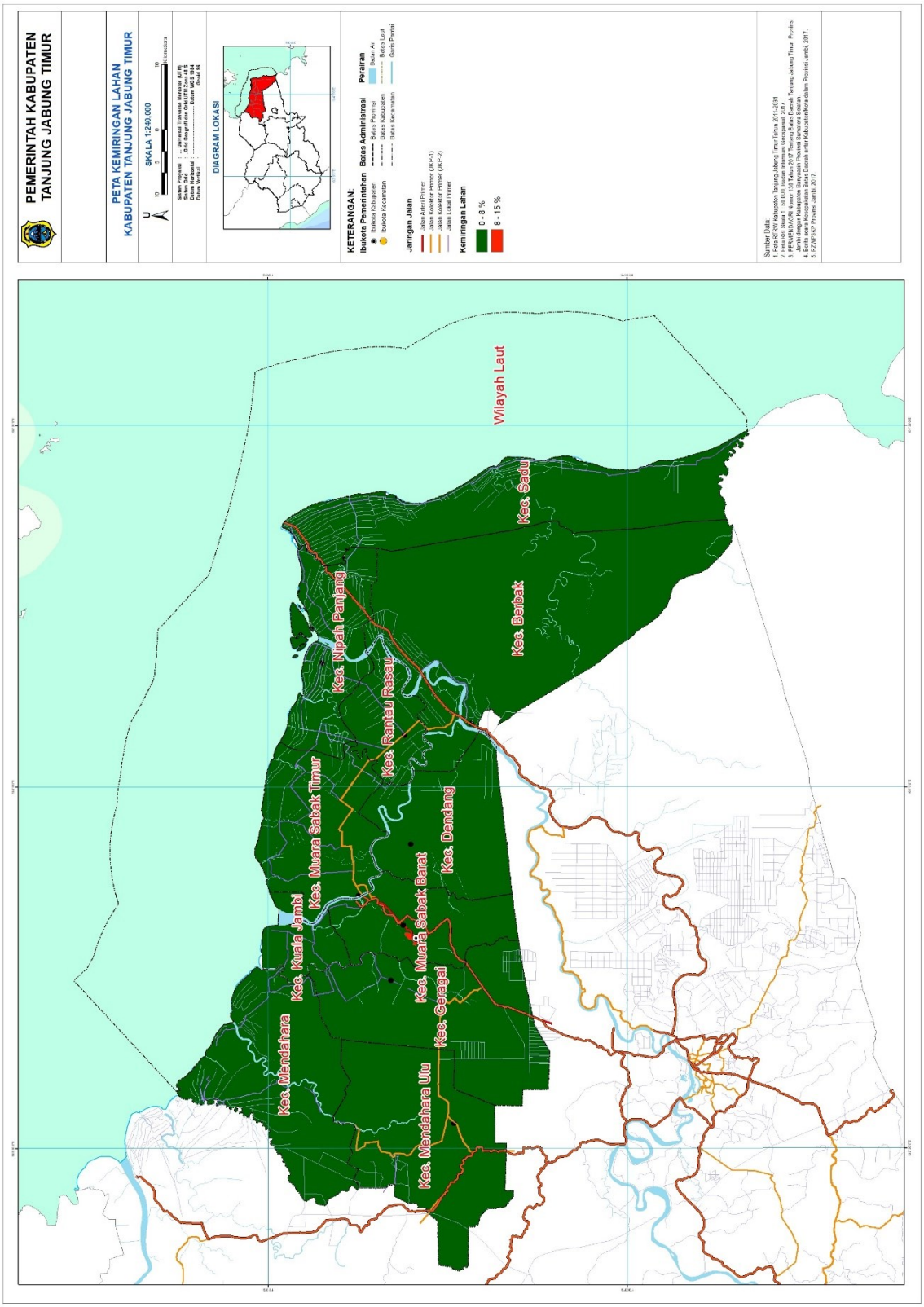
3.1.1.4 Kemiringan Lahan

Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada umumnya datar dengan kemiringan antar 0 – 15 %. Dengan luas terbesar dengan kemiringan lahan sekitar 0 – 8 % sekitar 508.321,17 ha atau sekitar 99,95% dari luas wilayah Kabupaten Tanjab Timur, sedangkan dengan kemiringan 8 – 15% sekitar 249,83 ha atau sekitar 0,05%berada di Kecamatan Sadu Ulu dan Kecamatan Muara Sabak Barat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.1.4
Klasifikasi Kemiringan Lahan dan Luasnya Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

No	Kecamatan	0 - 8 %	8 - 15 %	Jumlah
1	Mendahara	53.858,00	-	53.858,00
2	Mendahara Ulu	55.419,68	3,32	55.423,00
3	Geragai	55.630,00	-	55.630,00
4	Dendang	38.152,00	-	38.152,00
5	Muara Sabak Barat	27.500,49	246,51	27.747,00
6	Muara Sabak Timur	38.806,00	-	38.806,00
7	Kuala Jambi	11.395,00	-	11.395,00
8	Rantau Rasau	17.755,00	-	17.755,00
9	Berbak	116.917,00	-	116.917,00
10	Nipah Panjang	30.794,00	-	30.794,00
11	Sadu	62.457,00	-	62.457,00
Jumlah		**508.321,17**	**249,83**	**508.571,00**
%		**99,95**	**0,05**	**100,00**

Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Tanjab Timur 2011-2031 dan Interpretasi Digitasi Peta Tahun 2022



Gambar 3.1.4
Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Tanjung Jabung Timur

3.1.1.5 Geologi

Berdasarkan pada jenis batuan dan kesarangannya, maka akuifer di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dikelompokkan menjadi dua sistem, yaitu:

1) Sistem akuifer dengan aliran melalui ruang antar butir

   Sistem akuifer ini terdapat pada sedimen lepas, yaitu endapan alluvial dan rawa yang disusun oleh material lepas berukuran lempung sampai kerakal. Permeabilitas pada umumnya bervariasi dari satu tempat ke tempat lain. Material halus pada umumnya mempunyai kelulusan 10-5 s/d 10-2 m/h dan material kasar antara 10-1 s/d 10-2 m/h.

   Sebaran akuifer ini menempati daerah yang luas dengan ketebalan bervariasi mulai 5 s/d 40 m. Dari kondisi tersebut akuifer ini termasuk kedalam akuifer produktif sedang.

2) Sistem akuifer dengan aliran melalui ruang antar butir dan rekahan.

   Batuan yang termasuk dalam sistem akuifer ini dapat dikelompokan menjadi 2 akuifer sebagai berikut :

   a. Satuan batuan vulkanik muda, terdiri atas breksi gunungapi, lava, dan tufa bersusun andesit-basalt. Satuan ini berbentuk morfologi perbukitan bergelombang lemah dengan penyebaran terbatas meliputi daerah Geragai dan sekitarnya; dan

   b. Formasi Muara Enim dan Formasi Air Benakat, terdiri atas batupasir, batulempung, serpih, batulanau dan napal. Dijumpai setempat-setempat dengan luas singkapan relative sempit.

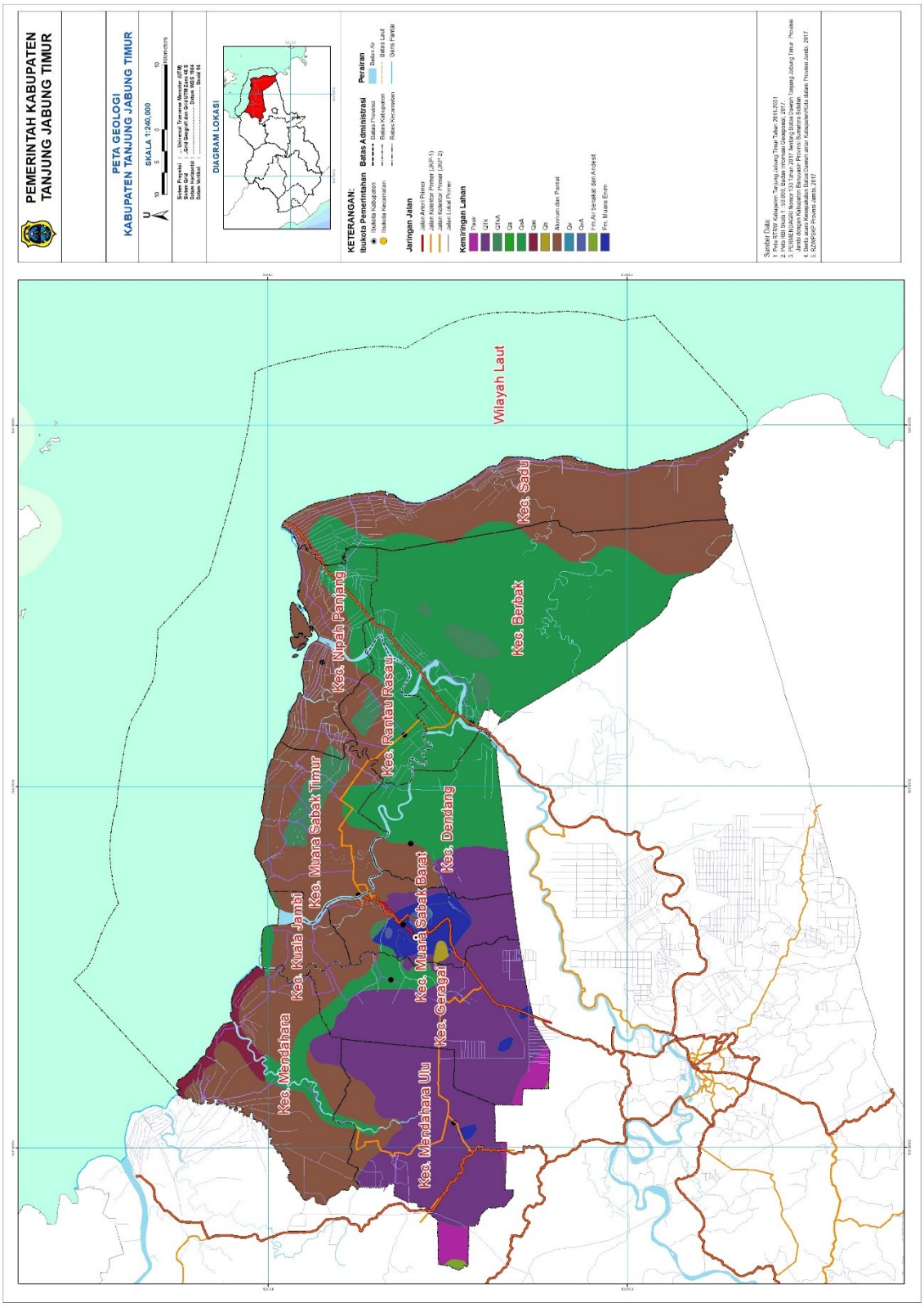
Secara garis besar wilayah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terbentuk dari formasi geologi endapan permukaan alluvium, batuan sediment dengan berbagai formasi serta dari batuan metamorf dan batuan terobosan. Formasi geologi yang terbesar berada di jenis formasi geologi Alluvium dan Pantai sekitar 39,78% dan jenis formasi geologi QaA sekitar 32,35% dari total luas wilayah Kabupaten Tanjab Timur. Sedangkan jenis formasi geologi terkecil berada di Qv

sekitar 0,01% hanya berada di Kecamatan Muara Sabak Barat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.1.5
Luas Wilayah Menurut Formasi Geologi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

No	Kecamatan	Jenis Formasi Geologi												Jumlah
		Pasir	Qa	QaA	Qac	Qb	Aluviumdan Pantai	QTk	QTkA	Qv	QvA	Fm.Air benakat dan Andesit	Fm. Muara Enim	
1	Mendahara	-	-	6.795,72	5.971,95	-	39.049,37	2.040,96	-	-	-	-	-	53.858,00
2	Mendahara Ulu	2.717,26	-	692,66	-	-	6.095,51	45.351,90	-	-	-	205,97	359,70	55.423,00
3	Geragai	2.278,67	59,64	6.034,74	-	17,25	3.904,60	42.326,53	274,47	-	-	46,66	687,44	55.630,00
4	Dendang	-	-	25.148,29	-	-	5.076,17	7.927,55	-	-	-	-	-	38.152,00
5	Muara Sabak Barat	-	-	277,12	-	575,69	8.168,47	8.519,42	647,02	38,57	807,64	-	8.713,08	27.747,00
6	Muara Sabak Timur	-	-	2.624,27	-	-	30.315,50	-	5.866,23	-	-	-	-	38.806,00
7	Kuala Jambi	-	289,65	927,40	-	-	10.177,95	-	-	-	-	-	-	11.395,00
8	Rantau Rasau	-	-	9.782,71	-	-	6.346,54	-	1.625,75	-	-	-	-	17.755,00
9	Berbak	-	-	96.320,21	-	-	16.507,57	-	4.089,21	-	-	-	-	116.917,00
10	Nipah Panjang	-	-	8.834,59	-	-	21.646,63	-	312,78	-	-	-	-	30.794,00
11	Sadu	-	-	7.246,54	-	-	55.210,46	-	-	-	-	-	-	62.457,00
Jumlah		**4.995,93**	**349,30**	**164.502,74**	**5.971,95**	**592,93**	**202.317,28**	**106.166,35**	**12.815,46**	**38,57**	**807,64**	**252,63**	**9.760,22**	**508.571,00**
%		**0,98**	**0,07**	**32,35**	**1,17**	**0,12**	**39,78**	**20,88**	**2,52**	**0,01**	**0,16**	**0,05**	**1,92**	**100,00**

Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Tanjab Timur 2011-2031 dan Interpretasi Digitasi Peta Tahun 2022



Gambar 3.1.5
Peta Geologi Kabupaten Tanjung Jabung Timur

3.1.1.6 Jenis Dan Struktur Tanah

Tanah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada umumnya berkembang dari bahan endapan sungai dan endapan marin, dengan atau tanpa endapan organik di atasnya. Proses pembentukannya selain ditentukan oleh komponen bahan induk juga oleh keadaan vegetasi dan letak tempat yang dipengaruhi oleh air. Tanah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berkembang dari bahan induk endapan sungai berupa campuran liat, debu dan bahan organik. Endapan sungai umumnya terdapat di bagian tanggul sungai (levee) yang topografinya agak tinggi sehingga tanahnya agak kering, sedangkan dibelakang tanggul sungai (backswamp) sedikit agak rendah, selalu tergenang air dan berawa. Endapan organik yang menutupi endapan sungai biasanya terdapat di daerah kubah gambut. Menurut "Key to Soil Taxonomy", (Soil Survey Staff, 1998) dengan nama padanan dari Puslittan (1983), tanah ini diklasifikasikan ke dalam Typic Endoaquepts (Gleiso Distrik) untuk tanah yang mempunyai rejim kelembaban akuik dan telah mengalami perkembangan profil. Tanah yang mempunyai kandungan bahan organik tinggi (Corganik) 12-18 persen dengan ketebalan > 40 cm diklasifikasikan kedalam Haplohemists (OrganosolHemik).

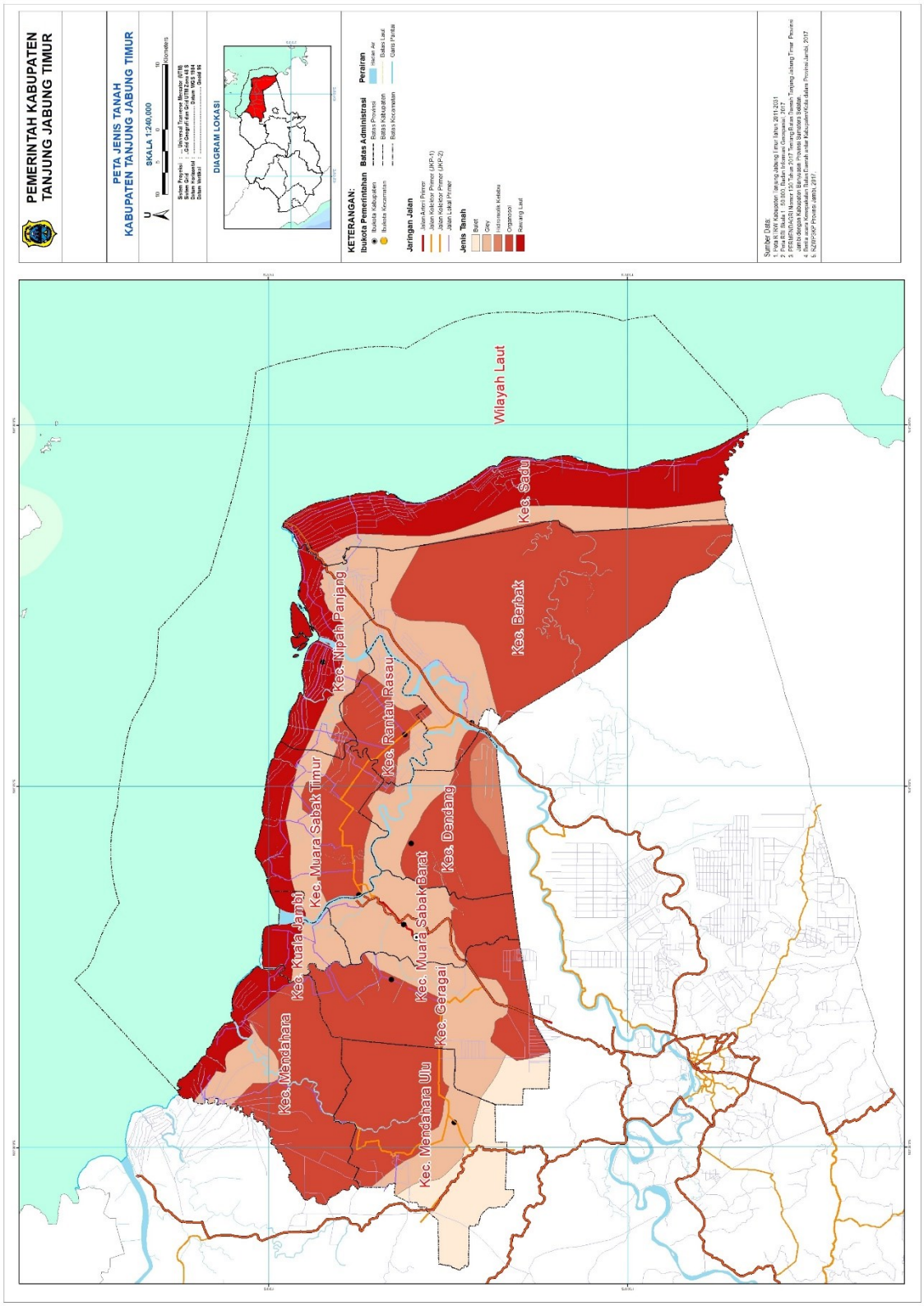
Tanah-tanah yang berkembang dari campuran endapan sungai dan endapan marin, umumnya tanah belum berkembang dan agak melumpur, mengandung bahan sulfidik pada kedalaman <50 cm. diatas permukaan tanah. Menurut "Key to Soil Taxonomy", (Soil Survey Staff, 1998) dengan padanan dari Puslittan (1983), tanah ini diklasifikasikan kedalam Typic (Sulfic) Endoaquepts (Gleisol Tionik) untuk tanah-tanah yang bahan sufidik 50 – 75 cm. di bawah permukaan tanah, sedangkan tanah-tanah yang mengandung bahan sulfidik <50 cm di golongkan kedalam Typic Sulfaquents (GleisolTionik)

Jenis tanah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur didominasi oleh tanah Organosol mencapai sekitar 241.725,07 ha atau sekitar 47,53% dari luas wilayah Kabupaten Tanjab Timur yang tersebar di seluruh Kecamatan, sedangkan jenis tanah yang terkecil berada di Hidromofik Kelabu mencapai 6.230,42 ha atau sekitar 1,23% hanya berada di Kecamatan Dendang. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.1.6
Penyebaran Jenis Tanah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

No	Desa/Kelurahan	Jenis Tanah (Ha)					Jumlah (Ha)
		Bulet	Gley	Hidromofik Kelabu	Organosol	Rawang Laut	
1	Mendahara	-	7.293,77	-	37.195,19	9.369,04	53.858,00
2	Mendahara Ulu	17.713,18	10.568,40	-	27.141,42	-	55.423,00
3	Geragai	5.345,99	19.164,49	-	31.119,51	-	55.630,00
4	Dendang	-	10.008,73	6.230,42	21.912,85	-	38.152,00
5	Muara Sabak Barat	-	20.624,38	-	7.122,62	-	27.747,00
6	Muara Sabak Timur	-	11.730,46	-	17.502,68	9.572,86	38.806,00
7	Kuala Jambi	-	5.634,95	-	37,61	5.722,44	11.395,00
8	Rantau Rasau	-	6.689,88	-	11.065,12	-	17.755,00
9	Berbak	-	30.194,00	-	86.722,92	0,07	116.917,00
10	Nipah Panjang	-	14.715,11	-	1.431,47	14.647,42	30.794,00
11	Sadu	-	15.709,81	-	594,67	46.152,52	62.457,00
Jumlah		**23.059,17**	**152.212,98**	**6.230,42**	**241.725,07**	**85.343,36**	**508.571,00**
% Kabupaten		**4,53**	**29,93**	**1,23**	**47,53**	**16,78**	**100,00**

Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Tanjab Timur 2011-2031 dan Interpretasi Digitasi Peta Tahun 2022



Gambar 3.1.6
Peta Jenis Tanah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

3.1.1.7 Hidrologi

Wilayah timur Provinsi Jambi merupakan bagian dari kawasan pantai timur Sumatera yang ditunjukan dengan ciri-ciri tenggelamnya dataran rendah dibawah permukaan pada zaman QuarterTua oleh sebab itu wilayah ini agak datar dan keadaan tata airnya dikendalikan oleh gradient sangat kecil sehingga drainase terhambat dengan akibat penggenangan yang luas dan bersifat permanen membentuk rawa-rawa.

Bentuk wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Kecamatan Muara Sabak Timur, Rantau Rasau, Berbak, Nipah Panjang dan Kecamatan Sadu) merupakan dataran landai. Wilayah ini merupakan cekungan yang membentuk rawa belakang yang jenuh air sehingga air tidak dapat menembus tanah atau mengalir sebagai run off, sehingga air terjebak berupa rawa. Air permukaan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi masalah terutama pada musim penghujan yang menggenangi areal permukiman dan lahan pertanian.

Berdasarkan bentuk wilayah tersebut Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pola aliran permukaan air menjadi daerah yang tergenang periodik dan selalu tergenang. Berdasarkan daerah tangkapan hujan atau daerah Aliran Sungai (DAS), Kabupaten Tanjung Jabung Timur terbagi atas 5 DAS, yaitu DAS Mendahara, DAS Lagan, DAS Batanghari, DAS Air Hitam dan DAS Benuh, sedangkan wilayah perencanaan termasuk dalam DAS Batanghari dan DAS Benuh.

DAS Batanghari mencakup seluruh Provinsi Jambi. Sungai ini merupakan sungai terbesar dan terpanjang di kawasan pantai timur. Dibagian hilir sungai bercabang dua yaitu Sungai Batanghari yang arahnya ke Muara Sabak dan cabang satu lagi yaitu Sungai Berbak mengarah ke Nipah Panjang. Sungai ini merupakan urat nadi transportasi di Provinsi Jambi maupun di kawasan pantai timur.

Beberapa sungai besar lain yang mengalir di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah Sungai Pamusiran, Sungai Sadu, Sungai Simpang Jelita, Sungai Simpang Datuk sedangkan berdasarkan geometric sungai berbentuk meandering (berkelok-kelok) dan pada sepanjang kedua tanggulnya dimanfaatkan sebagai pemukiman dan lahan pertanian.

1) Pasang Air Laut

Tinggi muka air di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ditentukan oleh pasang surut air laut, air pasang sepanjang pantai Selat Berhala dibedakan atas tipe pasang kecil dan pasang besar.

a. Pasang Kecil (Pasang perbani); dan

b. Pasang Besar (Pasang purnama).

Tinggi muka air di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini ditentukan oleh pasang surut air laut. Selama pasang kecil (pasang perbani, neap-tide) pasang surut di kawasan perencanaan berpola semi diurnal, dengan 2 kali air pasang dan 2 kali air surut setiap harinya, sedangkan selama pasang besar (pasang purnama, spring-tide) pasang surut menjadi diurnal, dengan hanya satu kali pasang dan surut pada setiap hari. Perbedaan elevasi air tertinggi dan air terendah (tidal range) bervariasi antara 2 meter pada pasang kecil sampai 3,5 meter pada pasang besar.

Pada musim hujan, muka air rata-rata di muara sungai adalah 10-30 cm lebih tinggi dari muka air pada musim kemarau. Variasi musiman ini akan bertambah lebih tinggi dari muara ke hulu sungai. Berdasarkan tata air, kawasan perencanaan dapat dibedakan menjadi kawasan tergenang periodik dan tergenang terus-menerus. Sebagian besar wilayah di kawasan perencanaan merupakan kawasan yang tergenang terus-menerus.

2) Fluktuasi Pasang Surut di Sungai dan Saluran

Fluktuasi pasang surut di sungai berangsur-angsur melemah semakin jauh dari pantai. Elevasi air rendah harian bertambah, sedangkan elevasi air tinggi tidak banyak berpengaruh. Selama waktu aliran tinggi (banjir) di Sungai Batanghari hamper tidak ada fluktuasi pasang yang terjadi di sebelah hulu (Simpang).

3) Tinggi Muka Air Banjir

Perkiraan tinggi muka air tertinggi di Sungai Batanghari, Pamusiran, dan Berbak berdasarkan data pengamatan pendek tahun 1995/1996 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.1.7
Tinggi Muka Air (dalam M + PRL) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Sungai & Lokasi	Jarak dr Muara Sungai	Pasang Surut	Musim Hujan				Musim Kemarau			
			Pasang	Rata^2	Surut	Range	Pasang	Rata^2	Surut	Range
Sungai Batanghari										
Pertemuan Berbak	61 km	Purnama	2,5	1,9	1	1,5	2,4	1,5	0,3	2,1
		Rata^2	2,3	1,9	1,2	1,1	2,2	1,5	0,5	1,7
		Perbani	2,2	1,9	1,5	0,7	2,1	1,5	0,9	1,2
Tinggi Banjir Maksimum : + 3,30										
Pertemuan Pamusiran	41 km	Purnama	2,5	1,6	0,2	2,3	2,4	1,3	-0,4	2,8
		Rata^2	2,3	1,6	0,5	1,8	2,2	1,3	-0,1	2,3
		Perbani	2,2	1,6	1	1,2	2,1	1,3	0,5	1,6
Tinggi Banjir Maksimum : + 3,10										
Sungai Pamusiran										
Pamusiran AWLR	31 km	Purnama	2,3	1,5	0	2,3	2,2	1,2	-0,6	2,8
		Rata^2	2,2	1,5	0,3	1,9	2	1,2	-0,3	2,3
		Perbani	2,1	1,5	1,8	1,3	1,9	1,2	0,3	1,6
Tinggi Banjir Maksimum : + 2,80										
Sungai Berbak										
Nipah Panjang	0 km	Purnama	2,5	1,3	-0,8	3,3	2,4	1,1	-0,1	3,5
		Rata^2	2,3	1,3	-0,4	2,7	2,2	1,1	-0,7	2,9
		Perbani	2,2	1,3	0,3	1,9	2,1	1,1	0	2,1

Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Tanjab Timur 2011-2031

4) Kualitas Air dan Rembesan Air Laut

Selama musim kemarau, rembesan air laut mencapai areal Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Sungai Berbak, Sugai Batanghari, dan Sungai Pamusiran serta saluran-saluran drainase/irigasi. Selama hal tersebut berlangsung, air tidak dapat dipergunakan untuk air minum atau untuk air tanaman tetapi air asin tidak berbahaya untuk tanaman yang tidak diirigasi dan juga tidak mempengaruhi air tanaman. Akibat pencucian dan drainase lahan, kualitas air saluran menjadi asam dan berwarna hitam, khususnya di awal musim hujan antara Bulan September-Oktober. Air ini kurang cocok untuk keperluan air minum dan juga tidak baik dipakai untuk irigasi tanaman.

5) Hidro-topografi dan Drainabilitas

Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang sebagian besar wilayahnya berada di Delta Berbak yang dipengaruhi oleh pasang surut dalam pengembangan budidaya pertaniannya, selain jenis tanah yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yaitu tanah alluvial, gleisol, dan organosol dengan tingkat

kesuburan rendah juga sangat dipengaruhi oleh kondisi hidro-topografi dan drainabilitas.

a. Hidro-topografi

Hidro-topografi adalah elevasi keadaan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dikaitkan dengan ketinggian muka air pasang surut disaluran terdekat dengan kawasan ini. Hidro-topografi menetapkan apakah irigasi pasang surut dimungkinkan dikawasan ini atau tidak dan sangat dipengaruhi oleh cara-cara pengelolaan air yang diperoleh di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Terdapat 4 kategori dari hidro-topografi yang dapat dibedakan, yaitu :

Kategori A

Daerah ini terluapi air pasang paling sedikit 4 atau 5 kali selama 14 hari siklus pasang purnama baik musim hujan maupun musim kemarau. Umumnya daerah ini merupakan daerah yang paling rendah yang dekat dengan sungai atau saluran besar. Daerah ini cocok untuk padi sawah. Jika air saluran tidak dipengaruhi intrusi air laut/asin pada musim kemarau, maka kemungkinan dapat bertanam padi sebanyak 2kali.

Kategori B

Sama dengan Kategori A, tetapi daerah ini terluapi air pasang surut hanya pada musim hujan saja, sehingga umumnya tidak mungkin dapat menanam padi 2 kali dalam setahun, karena di musim kemarau akan kekurangan air.

Kategori C

Daerah ini tidak secara tetap terluapi oleh pasang tinggi. Elevasi lahan sampai maksimum 50 cm di atas ketinggian air pasang. Muka air tanah masih dipengaruhi oleh fluktuasi muka air saluran. Daerah ini cukup baik untuk tanaman keras tetapi agak kurang cocok untuk padi.

Kategori D

Daerah ini sama sekali tidak terpengaruh oleh air pasang surut. Paling cocok untuk tanamn keras. Dikarenakan belum adanya data dan peta yang

lengkap mengenai hidro-topografi di kawasan perencanaan, maka Peta Hidro-topografi belum dapat disajikan.

b. Drainabilitas

Drainabilitas adalah kedalaman dibawah permukaan tanah sampai dimana permukaan air tanah dapat di-drain selama musim pertumbuhan (kecuali selama masa curah hujan yang sangat tinggi). Drainabilitas khususnya penting untuk menentukan kesesuaian lahan untuk tanaman lahan kering dan tanaman perkebunan, tetapi padi sawah juga memerlukan drainase dari waktu ke waktu. Ada 3 kelas drainabilitas, yaitu :

- Drainabilitas < 30 cm : drain yang sangat buruk, jika tidak ada peningkatan area ini, maka tidak dapat dipakai untuk pertanian dan padi.
- Drainabilitas 30 – 60 cm : cukup untuk tanaman padi dan palawija, tetapi tidak cukup untuk tanaman perkebunan (kecuali yang ditanam di tanah gundukan).
- Drainabilitas > 60 cm : cukup untuk tanaman padi, palawija, dan tanaman perkebunan.

3.1.2 Potensi Lahan Gambut

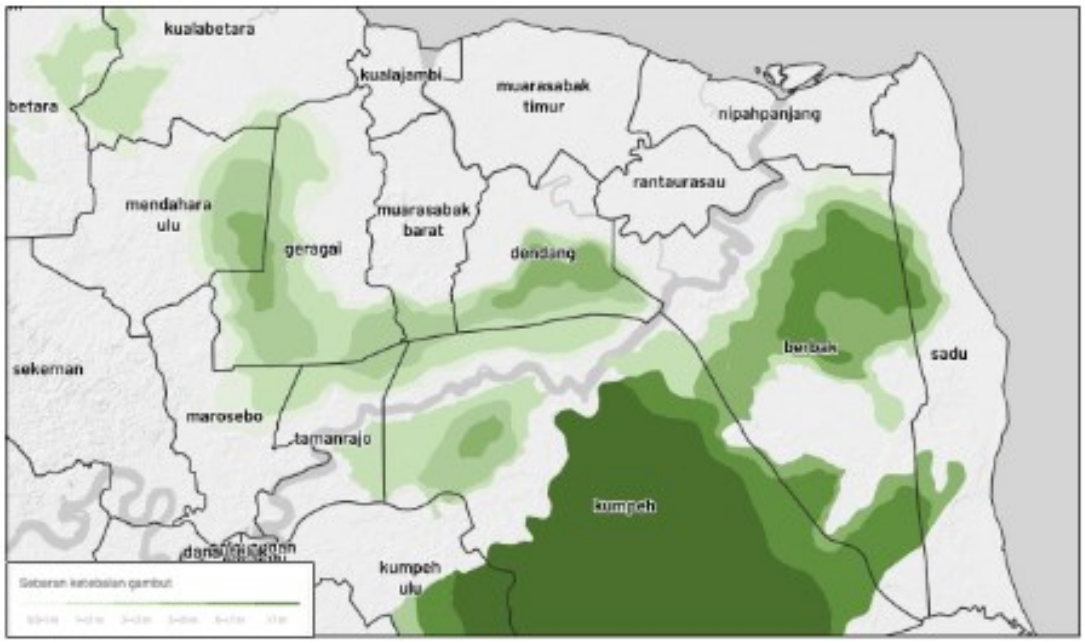
Gambut terbentuk karena pengaruh iklim teruatama curah hujan yang merata sepanjang tahun dan topografi yang tidak merata sehingga terbentuk daerah-daerah cekungan. Pada daerah Pada daerah cekungan dengan genangan air terdapat longgokan bahan organik. Hal ini disebabkan suasana yang langka oksigen menghambat oksidasi bahan organik oleh jasad renik, sehingga proses hancurnya jaringan tanaman berlangsung lebih lambat dari pada proses tertimbunnya, dengan demikian terbentuklah gambut, Sementara itu potensi gambut di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tersebar di dua (2) Kecamatan yaitu Kecamatan Mendahara dan Kecamatan Dendang. Dari hasil penyelidikan diketahui bahwa kandungan kalori gambut berkisar antara 4000-5500 kalori/gram dengan tebal maksimum berkisar antara 5-13 meter. Kandungan abu berkisar antara 2,13-4,19 persen, sedangkan kandungan sulfur berkisar antara 0,270,63 persen.

Tanaman-tanaman yang tumbuh diatas gambut membentuk ekosistem hutan rawa gambut yang mampu menyerap karbondioksida dari atmosfer untuk berfotosintesis dan menambah simpanan karbon dalam ekosistem tersebut. Berdasarkan tempat tumbuhnya, gambut dibedakan dalam tiga jenis yaitu gambut Paya, gambut Rawa dan gambut Bog. Sementara berdasarkan tingkat dekomposisinya, gambut dibedakan dalam empat jenis. Gambut Seratan, gambut Lembaran, gambut Hemik dan gambut Saprik. Gambut memiliki kakateristik yang tidak dimiliki oleh jenis tanah alin. Sifat fisik yang dimiliki adalah mampu menyerap air yang sangat tinggi. Sebaliknya apabila dalam kondisi yang kering (kering berkelanjutan), gambut sangat ringan dengan berat volumeyang sangat rendah (0,1-0,2 g/cm^3) dan mempunyai sifat hidrofobik (sulit) menyerap air dan akan mengambang apabila terkena air. Pada kondisi demikian gambut dapat mengalami amblesan (subsidensi) dan mudah terbakar.

Sedangkan beradasakan sifat kimianya, gambut sangat tergantung pada jenis tumbuhan yang membentuk gambut. Baik itu keadaan tanah dasarnya, maupun pengauh luar, seperti endapan sungai/banjir, endapan vulkanis) dan sebagainya. Ada

dua kriteria utama yang mempengaruhi sifat kimia gambut yaitu sifat dan asal tanaman yang terombak dan kemudian tingkat dekomposisi.

Luas wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah 476.507 ha dan sebesar 38,04% dari luas wilayah Kabupaten Tanjung Jabung merupakan lahan gambut. Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki 181.237 ha lahan gambut yang terdiri atas 3 jenis kedalaman yaitu 100-200 cm, 200-300 cm dan >300 cm. Seluas 53.174 ha padakedalaman 100-200cm , kemudian seluas 89.257 ha pada kedalaman 200-300 cm dan seluas 38.806 ha pada kedalaman lebih dari 300 cm. Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan Kabupaten yang memiliki lahan gambut dengan kedalaman lebih dari 300 cm terluas di Provinsi Jambi. Total keselurahan lahan gambut yang berada di Provinsi Jambi adalah 40.746 ha dan 95,24 % berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Lahan gambut di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terletak di 8 Kecamatan yaitu Kecamatan Mendahara, Kecamatan Mendahara Ulu, Kecamatan Geragai, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kecamatan Dendang, Kecamatan Nipah Panjang, Kecamatan Berbak dan Kecamatan Sadu. Ketebalan gambut di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berkisar antara 0,5 m sampai dengan ketebalan 7 m.

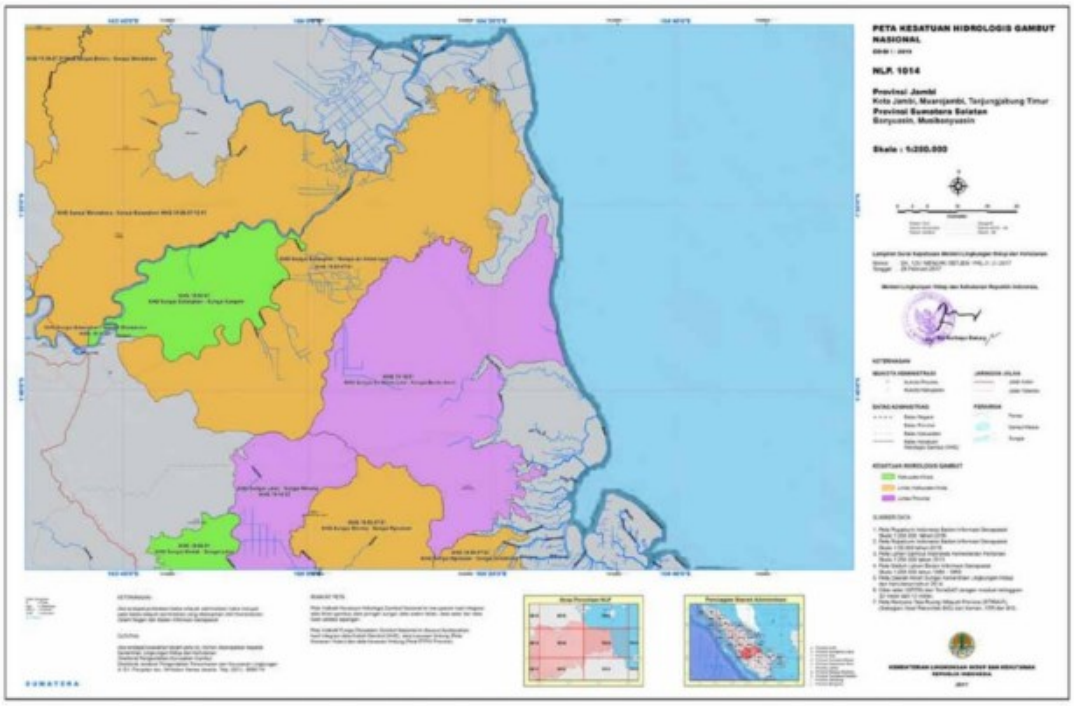


Gambar 3.1.7
Peta Sebaran Ketebalan Gambut di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Dari gambar peta di atas terlihat untuk ketebalan gambu 7 m terdapat di Kecamatan Berbak dan Kecamatan Sadu, sedangkan ketebalan gambut 0,5 m sampai dengan 5 m terdapat pada Kecamatan Dendang, Muara Sabak Barat, Geragai, dan Kecamatan Mendahara Ulu.

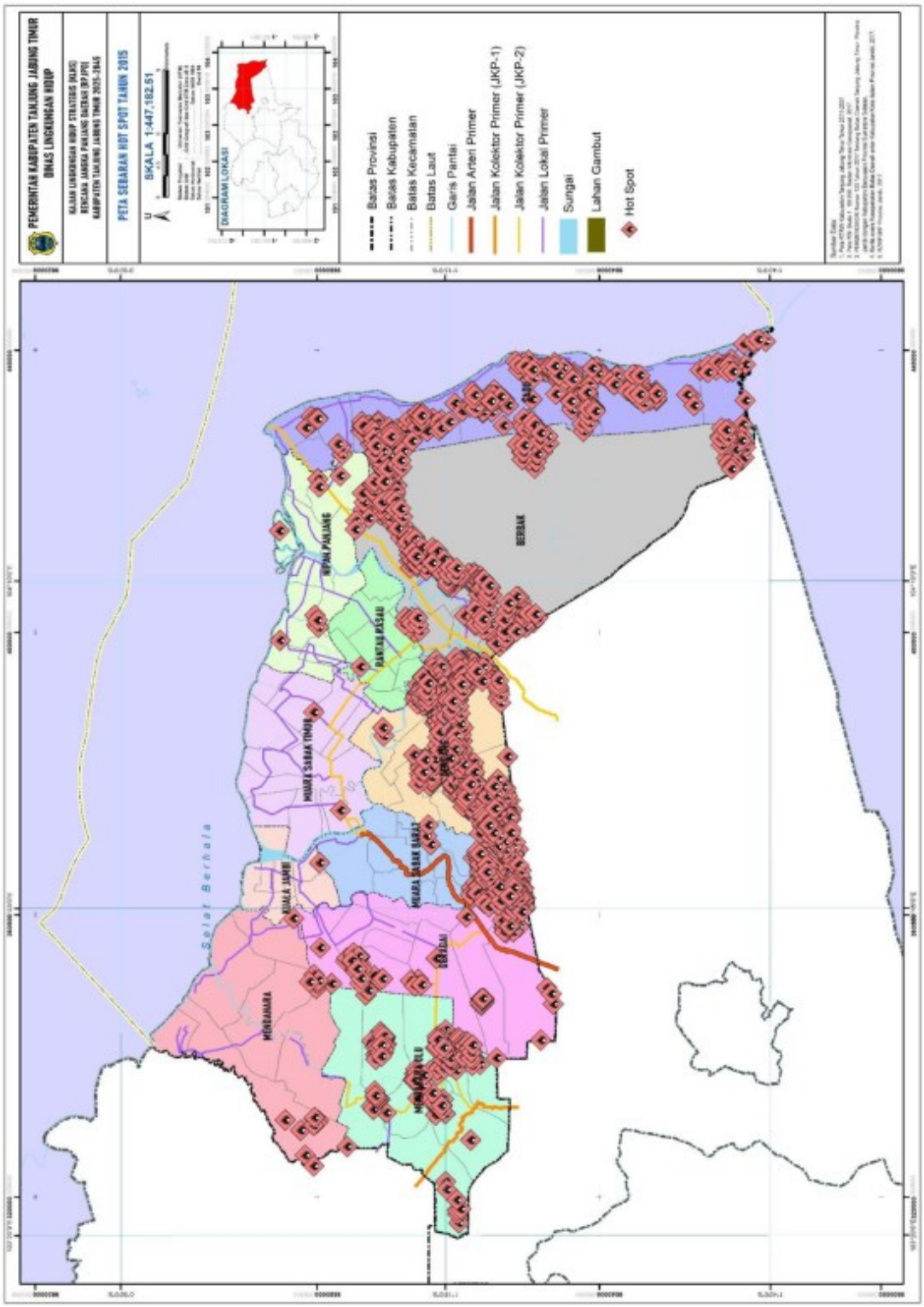
Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 129/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Kesatuan Hidrologi Kawasan Gambut Nasional. Kesatuan Hidrologis Gambut adalah Ekosistem Gambut yang letaknya di antara 2 (dua) sungai, di antara sungai dan laut, dan/atau pada rawa. Dari Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdapat 4 lokasi yang merupakan Kesatuan Hidrologi Kawasan Gambut Nasional, antara lain:

1. KHG Sungai Air Hitam Laut-Sungai Buntu Kecil dengan kode KHG.15-16.01
2. KHG Sungai Batang Hari – Sungai Air Hitam Laut dengan kode KHG.15.05-07.01
3. KHG Sungai Betara - Sungai Mendahara KHG.15.06-07.01
4. KHG Sungai Mendahara - Sungai Batanghari KHG.15.05-07-10.01

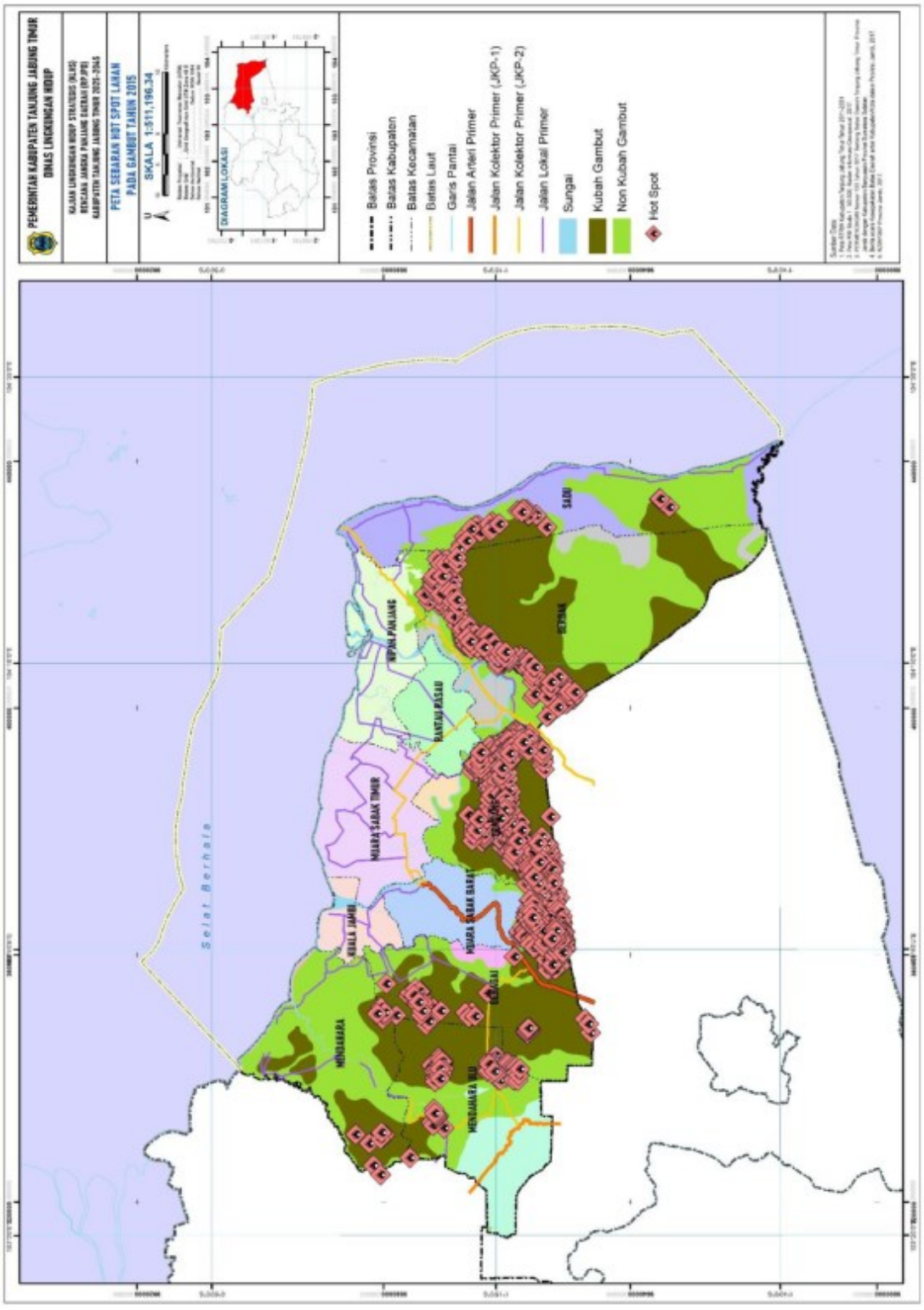


Gambar 3.1.8
Peta Kesatuan Hidrologi Kawasan Gambut Nasional di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Dengan ditetapkannya Kesatuan Hidrologi Kawasan Gambut Nasional di Kabupaten Tanjung Jabung Timur maka hal tersebut merupakan keharusan yang perlu ditindak lanjuti dengan perlindungan dari terjadinya degradasi kawasan gambut terhadap kondisi hidrologis, struktur, dan fungsinya. Kawasan gambut di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pernah mengalami kebakaran yang cukup parah pada tahun tahun 2015 yang menyebabkan kabut asap yang pekat di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta wilayah lainnya di Provinsi Jambi.



Gambar 3.1.9
Peta Sebaran Hot Spot di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015

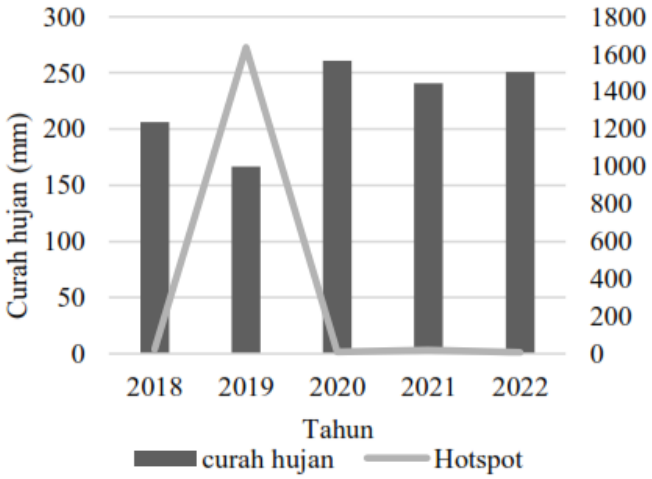


Gambar 3.1.10
Peta Sebaran Hot Spot Lahan Pada Gambut di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015

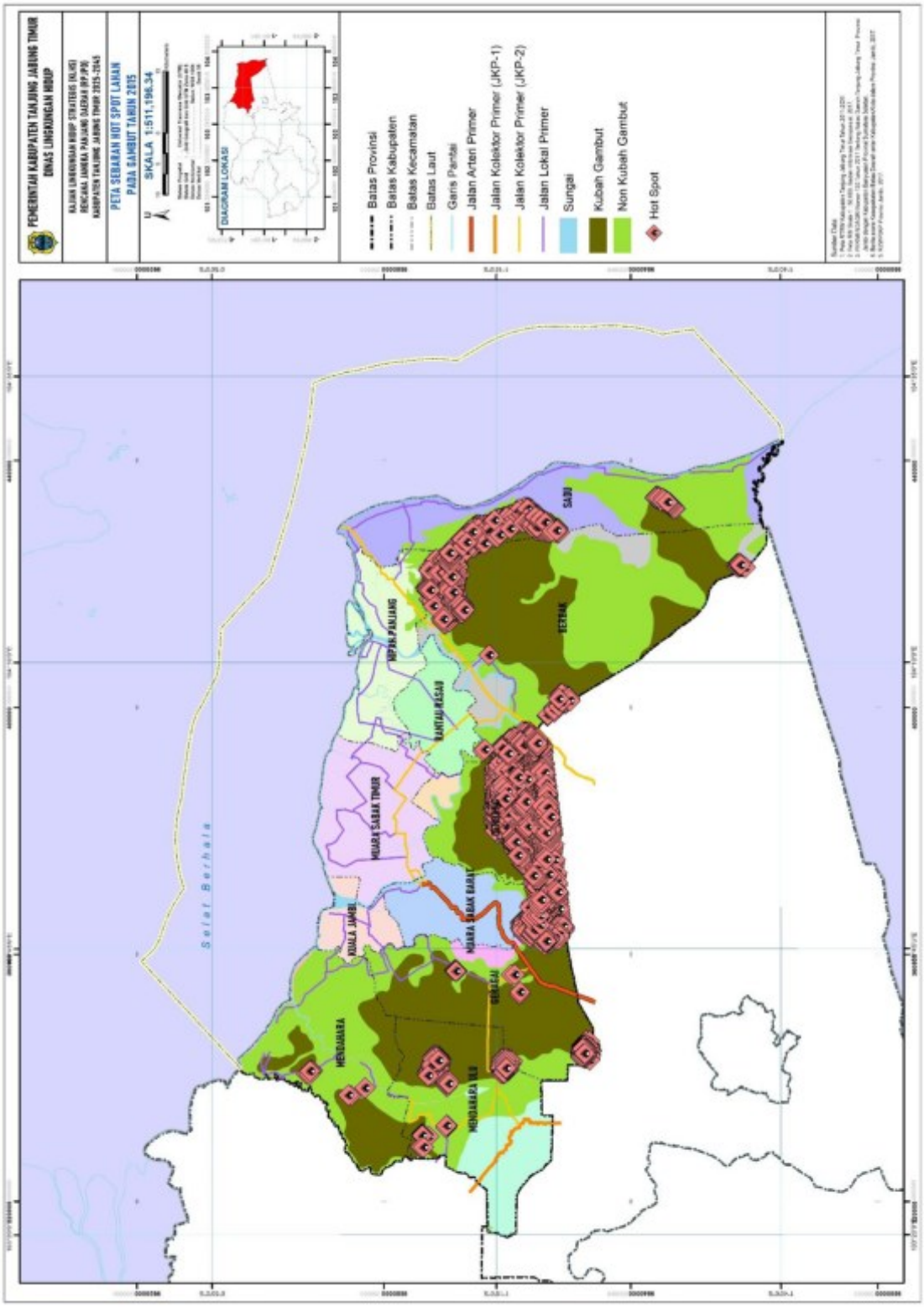
Pada Gambar 3.1.10 di atas terlihat cukup banyak hot spot pada kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2015. Dari semua hot spot tersebut posisi yang terbanyak berada pada kawasan lahan gambut yang terdapat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kondisi inilah yang menyebabkan proses pemadaman api pada lahan gambut membutuhkan waktu yang cukup lama terutama pada ketebalan gambut yang lebih dari 5 m.

Berdasarkan Gambar 3.1.11 di atas bencana kebakaran hutan dan lahan yang melanda Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2015 terdapat lebih kurang 1.717 hot spot yang berada pada kawasan lahan gambut di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2015 khususnya pada lahan gambut sangat dipengaruhi oleh kondisi curah hujan yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bambang Heru Saharjo dan Devia Annisa Effendi (2015) menyimpulkan ada kaitan yang cukup signifikan antara curah hujan dengan hot spot pada kejadian kebakaran hutan dan lahan. Pada saat curah hujan rendah maka jumlah hot spot cenderung meningkat dan pada saat curah hujan tinggi jumlah hot spot cenderung menurun.



Gambar 3.1.11
Sebaran Curah Hujan Tahunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018-2022
Sumber: Jurnal Jurnal Silvikultur Tropika "Pengaruh Curah Hujan Dan Terjadinya Kebakaran Hutan Dan Lahan Gambut Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi oleh Bambang Heru Saharjo dan Devia Annisa Effendi (2015)



Gambar 3.1.12
Sebaran Curah Hujan Tahunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018-2022

Peningkatan hotspot yang sangat signifikan pada bulan Agustus – Oktober di tahun 2019 diikuti dengan rendahnya curah hujan yang ada pada bulan-bulan tersebut. Tahun berikutnya, Indonesia dilansir mengalami fenomena La Nina triple-dip di tahun 2020-2023 yang mempengaruhi pola cuaca yang ada di Indonesia dengan mengalami musim hujan yang lebih awal pada Sebagian wilayahnya (BMKG 2022). Dari gambar grafik di atas juga memperlihatkan kejadian kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2019 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur salah satu faktor penyebabnya adalah rendahnya jumlah curah hujan pada tahun 2019 yang berpotensi meningkatnya hot spot pada hutan dan lahan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2019 terutama pada lahan gambut yang terdapat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pada Gambar 3.1.12 memperlihat hot spot yang cukup banyak pada lahan gambut yang terdapat pada Kecamatan Muara Sabak Barat dan Kecamatan Dendang.



Gambar 3.1.13
Proses pemadaman api pada kejadian bencana kebakarana hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Tahun 2015

Potensi gambut di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tersebar didua (2) Kecamatan yaitu Kecamatan Mendahara dan Kecamatan Dendang. Dari hasil penyelidikan diketahui bahwa kandungan kalori gambut berkisar antara 4.000-5.500 kalori/gram dengan tebal maksimum berkisar antara 5-13 meter. Kandungan abu berkisar antara 2,13-4,19 persen, sedangkan kandungan sulfur berkisar antara 0,27-0,63 persen.

Keppres Nomor 32 tahun 1990, pemanfaatan lahan gambut sebagai sumber energi belum dapat dilaksanakan namun seharusnya dengan makin majunya teknologi ekplorasi dan eksploitasi sumber energi maka berbagai dampak terhadap lingkungan dapat dikurangi dan lahan bekas tambang dapat direklamasi dengan baik dan benar sehingga fungsi-fungsi lingkungan dapat dikembalikan semaksimal mungkin namun demikian manfaat gambut bagi pembangunan nasional, perlu kerjasama yang sinergis dan terpadu antar berbagai sektor terkait dalam pengelolaan lahan gambut. Perlu dilakukan pengelolaan dalam pemanfaatan lahan gambut misalkan, untuk lahan gambut dengan ketebalan kurang dari 1 meter dapat digunakan untuk lahan pertanian dan pemukiman. Sementara untuk lahan gambut yang memiliki ketebalan antara 1 hingga 2 meter, dapat dipakai untuk perkebunan tanaman keras dan yang memiliki ketebalan lebih dari 2 meter dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya energi dan bahan baku industri.

3.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Pembangunan fisik suatu daerah tentunya akan memberikan keuntungan yang tidak sedikit, seperti peningkatan taraf hidup masyarakat maupun pendapatan asli daerah namun demikian setiap pembangunan mempunyai keterbatasan sumber daya alam dan kendala harus ditanggulangi sedini mungkin oleh karenanya sangat diperlukan informasi geologi baik berupa sumber daya geologi, seperti ketersediaan air, bahan galian golongan c, lokasi yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang pengembangan wilayah, maupun potensi bahaya lingkungan beraspek geologi seperti gerakan tanah, erosi, abrasi, banjir dan kegempaan, yang dapat dijadikan

bahan pertimbangan sebagai faktor penunjang dan pembatas dalam perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Secara alamiah sudah mulai mempunyai beberapa wilayah sebagai pusat-pusat pertumbuhan dimana masing-masing memiliki tingkat pelayanan tersendiri yang didukung dengan keberadaan kawasan *hinterland*. Perbedaan tingkat pelayanan tersebut dilihat dari aspek jumlah penduduk, ketersediaan fasilitas, aktifitas ekonomi, serta aspek lainnya.

Sistem perkotaan di dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur harus mempertimbangkan kebijakan pengembangan sistem perkotaan yang berada di atasnya (RTRWN, RTRW Pulau, RTRW Provinsi, maupun RTR KSP). Sistem perkotaan adalah suatu sistem yang menggambarkan sebaran perkotaan, fungsi perkotaan dan hierarki fungsional perkotaan yang terkait dengan pola transportasi dan prasarana wilayah lainnya dalam ruang wilayah.

Pada intinya penentuan sistem perkotaan ini guna mendukung aksesibilitas global wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ke jaringan perkotaan poros perekonomian regional, nasional bahkan dunia dalam rangka menyongsong era pasar bebas. Oleh karena itu untuk 20 tahun ke depan sistem perkotaan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur direncanakan sebagai berikut :

1. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) berada di Kawasan Perkotaan Muara Sabak Barat yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kabupaten, pusat perdagangan dan jasa regional, pelayanan transportasi, industri pengolahan, pusat pendidikan, pusat kesehatan, dan pusat peribadatan.
2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi :
    a) Perkotaan Nipah Panjang di Kecamatan Nipah Panjang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, perdagangan dan jasa sub regional, sentra pertanian, pusat kesehatan, pusat rekreasi, olahraga dan wisata, pusat pendidikan, dan simpul transportasi;
    b) Perkotaan Mendahara Ilir di Kecamatan Mendahara berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, perdagangan dan jasa sub regional,

perkebunan, pusat kesehatan, pusat rekreasi, olahraga dan wisata, pusat pendidikan, pusat peribadatan, dan simpul transportasi;

c) Perkotaan Pandan Jaya di Kecamatan Geragai berfungsi sebagai pusat sumber daya energi, industri pertanian, simpul transportasi, pusat industri pengolahan, dan pariwisata;

d) Perkotaan Muara Sabak Timur di Kecamatan Muara Sabak Timur berfungsi sebagai pusat industri perikanan, sentra pengolahan hasil pertanian, perdagangan, pusat pendidikan dan olahraga, wisata perhubungan laut, sentra perikanan, minapolitan, dan simpul transportasi.

3. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi :

a) Perkotaan Pematang Rahim di Kecamatan Mendahara Ulu berfungsi sebagai industri pertanian, simpul transportasi, dan pusat industri pengolahan;

b) Perkotaan Kampung Laut di Kecamatan Kuala Jambi berfungsi sebagai industri pertanian, perikanan, rekreasi dan wisata,simpul transportasi, dan pusat industri pengolahan;

c) Perkotaan Rantau Indah di Kecamatan Dendang berfungsi sebagai industri pertanian, simpul transportasi, dan pariwisata skala lokal;

d) Perkotaan Sungai Lokan di Kecamatan Sadu berfungsi sebagai industri perikanan, perhubungan laut, sentra pertanian, pusat rekreasi dan wisata, dan sentra perikanan (minapolitan);

e) Perkotaan Simpang Desa, Kecamatan Berbak berfungsi sebagai industri pertanian, simpul transportasi, budidaya perikanan, pariwisata skala lokal dan regional;

f) Perkotaan Lambur Luar di Kecamatan Muara Sabak Timur sebagai pusat pertanian dan sentra perikanan (minapolitan); dan

g) Perkotaan Bandar Jaya di Kecamatan Rantau Rasau berfungsi sebagai industri pertanian, simpul transportasi, pusat pendidikan dan olahraga, dan pusat industri pengolahan.

4. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yaitu Perkotaan Kotabaru KTM Geragai berfungsi sebagai simpul transportasi, sentra pengolahan hasil pertanian, perdagangan dan jasa.

Pengembangan kawasan perkotaan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengikuti hirarki fungsional yang ditetapkan dalam rencana struktur ruang dan sistem pusat permukiman. Adapun pengembangan sistem perkotaan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur diarahkan sebagai berikut :

1. Pengembangan PKW diarahkan sebagai berikut :
   a) Pelayanan transportasi, perdagangan, distribusi dan koleksi barang dan jasa;
   b) Pengembangan wilayah ini dilaksanakan dengan intensitas yang lebih tinggi untuk memacu pertumbuhan ekonomi wilayah;
   c) Sebagai pintu gerbang utama distribusi barang ekspor kabupaten terhadap wilayah segitiga pertumbuhan Singapura, Batam dan Johor;
   d) Pemantapan keterkaitan antar wilayah dengan kota-kota utama di Provinsi Jambi, Sumatera dan Jawa, melalui peningkatan sarana prasarana transportasi jalan, dan laut;
   e) Penyediaan prasarana perkotaan sesuai dengan fungsi perkotaanya; dan
   f) Peningkatan peranan swasta dalam pembangunan sarana-prasarana perkotaan
2. Pengembangan PKL diarahkan sebagai berikut :
   a) Pusat pertumbuhan wilayah sekitarnya;
   b) Pusat pemerintahan, perdagangan dan pengumpul serta untuk pengembangan aktifitas sekunder dan tersier dengan skala pelayanan regional;
   c) Pemantapan keterkaitan antar PKL dengan daerah sekitarnya melalui peningkatan sarana prasarana transportasi jalan dan sungai;
   d) Penyediaan prasarana permukiman sesuai dengan fungsinya; dan
   e) Peningkatan peranan swasta dalam pembangunan sarana-prasarana permukiman.

3. Pengembangan PPK diarahkan sebagai berikut :
   a) Pusat pertumbuhan wilayah sekitarnya;
   b) Pusat pemerintahan, perdagangan dan pengumpul serta untuk pengembangan aktivitas sekunder dan tersier dengan skala pelayanan lokal;
   c) Pemantapan keterkaitan antar PPK dengan daerah sekitarnya melalui peningkatan sarana prasarana transportasi jalan dan sungai; dan
   d) Penyediaan prasarana permukiman sesuai dengan fungsinya.
4. Pengembangan PPL diarahkan sebagai berikut :
   a) Pusat pelayanan antar desa;
   b) Pusat pelayanan setiap desa; dan
   c) Pusat pelayanan pada setiap dusun atau kelompok permukiman.

Tabel III.1.8
Rencana Sistem Perkotaan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2011-2031

No	Hierarki Pelayanan	Lokasi	Fungsi	Infrastruktur Pendukung
1	Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	Perkotaan Muara Sabak	- Pusat pemerintahan - Kabupaten Pusat perdagangan dan jasa regional - Pelayanan transportasi Industri pengolahan - Pusat pendidikan - Pusat kesehatan - Pusat peribadatan	- Simpul transportasi skala regional - Pasar induk regional - Perbankan regional dan/atau nasional - Rumah sakit umum tipe B - Permukiman perkotaan - Perguruan tinggi - Fasilitas perkantoran dan peribadatan - Fasilitas olahraga skala regional - Industri pengolahan - Lembaga penelitian
2	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Perkotaan Nipah Panjang	- Pusat pemerintahan kecamatan - Perdagangan dan jasa sub regional - Sentra pertanian - Pusat kesehatan - Pusat rekreasi, - olahraga dan wisata - Pusat pendidikan - Simpul transportasi	- Simpul transportasi skala lokal Pasar induk lokal - Perbankan lokal dan/atau regional - Rumah sakit umum tipe C/Puskesmas rawat inap - Pendidikan menengah keatas - Permukiman perkotaan - Industri pengolahan
		Perkotaan Mendahara Ilir	- Pusat pemerintahan kecamatan - Perdagangan dan jasa sub regional - Perkebunan - Pusat kesehatan - Pusat rekreasi olahraga dan wisata - Pusat pendidikan - Pusat peribadatan, - Simpul transportasi	
		Perkotaan Pandan Jaya	- Pusat sumber daya energy - Industri pertanian - Simpul transportasi - Pusat industry pengolaha - Pariwisata	
		Perkotaan Muara Sabak Timur	- Pusat industry perikanan - Sentra pengolahan hasil pertanian - Perdagangan	

No	Hierarki Pelayanan	Lokasi	Fungsi	Infrastruktur Pendukung
			- Pusat pendidikan dan olahraga, wisata - Perhubungan laut - Sentra perikanan - Minapolitan - Simpul transportasi	
3	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	Perkotaan Pematang Rahim	- Industri pertanian - Simpul transportasi - Pusat industry pengolahan	- Simpul transportasi skala kawasan - Pasar induk tradisional - Perbankan lokal - Rumah sakit umum tipe C/Puskesmas rawat inap - Pendidikan menengah pertama - Permukiman perkotaan
		Perkotaan Kampung Laut	- Industri pertanian - Perikanan - Rekreasi dan wisata - Simpul transportasi - Pusat industry pengolahan	
		Perkotaan Rantau Indah	- Industri pertanian - Simpul transportasi - Pariwisata skala lokal	
		Perkotaan Sungai Lokan	- Industri perikanan - Perhubungan laut - Sentra pertanian - Pusat rekreasi dan wisata - Sentra perikanan (minapolitan)	
		Perkotaan Simpang Desa	- Industri pertanian - Simpul transportasi - Budidaya perikanan - Pariwisata skala lokal dan regional	
		Perkotaan Lambur Luar	- Pusat pertanian - Sentra perikanan (minapolitan)	
		Perkotaan Bandar Jaya	- Industri pertanian - Simpul transportasi - Pusat pendidikan dan olahraga - Pusat industri pengolahan -	
4	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	Perkotaan Kotabaru KTM Geragai	- Simpul transportasi - Sentra pengolahan hasil pertanian - Perdagangan dan jasa	- Simpul transportasi skala local - Pasar induk lokal

Sumber : Revisi RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2011-2031

3.1.4 Kondisi Umum Demografi Kabupaten Tanjung Jabung Timur

3.1.4.1 Jumlah Penduduk

Penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama kurun waktu tahun 2020 - 2022 mengalami kenaikan yang mana pada tahun 2022 jumlah penduduk Kabupaten Tanjab Timur sekitar 234.164 jiwa mengalami kenaikan sekitar 1,03% dari tahun 2021 sekitar 23.772 jiwa, dengan laju pertumbuhan per tahun sekitar 0,94%. Penduduk terbanyak berada di Kecamatan Muara Sabak Timur mencapai sekitar 33.036 jiwa, dan terkecil berada di Kecamatan Sadu sekitar 13.638 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.1.9
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk
di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 – 2022

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk					Laju Pertumbuhan Penduduk				
		2018	2019	2020	2021	2022	2017-2018	2018-2019	2010-2020	2020-2021	2021-2022
1	Mendahara	26.348	26.443	26.675	26.902	27.000	0,40	0,36	1,14	0,64	0,61
2	Mendahara Ulu	18.468	19.001	16.676	16.818	17.032	2,96	2,89	1,14	0,64	1,06
3	Geragai	23.193	23.435	26.202	26.425	26.953	1,12	1,04	1,14	0,64	1,42
4	Dendang	15.058	15.078	16.485	16.626	16.774	0,16	0,13	1,14	0,64	0,87
5	Muara Sabak Barat	17.789	18.092	21.409	21.591	22.248	1,78	1,70	1,14	0,64	1,94
6	Muara Sabak Timur	31.415	31.475	32.606	32.886	33.036	0,23	0,19	1,14	0,64	0,66
7	Kuala Jambi	14.671	14.755	14.485	14.608	14.651	0,60	0,57	1,14	0,64	0,57
8	Rantau Rasau	23.667	23.831	24.780	24.991	25.245	0,69	0,69	1,14	0,64	0,93
9	Berbak	9.924	9.939	10.591	10.681	10.753	0,17	0,15	1,14	0,64	0,76
10	Nipah Panjang	25.624	25.660	26.503	26.729	26.834	0,17	0,14	1,14	0,64	0,62
11	Sadu	12.256	12.276	13.401	13.515	13.638	0,20	0,16	1,14	0,64	0,88
Jumlah		**218.413**	**219.985**	**229.813**	**231.772**	**234.164**	**0,75**	**0,72**	**1,14**	**0,64**	**0,94**

Sumber: Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Angka 2023

Untuk kepadatan penduduk yang terbesar yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berada di Kecamatan Rantau Rasau mencapai 142,19 jiwa/km^2, sedangkan yang terkecil berada di Kecamatan Berbak sekitar 9,20 jiwa/km^2. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.1.10
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tahun 2022

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km^2)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk
1	Mendahara	538,58	27.000	50,13
2	Mendahara Ulu	554,23	17.032	30,73
3	Geragai	556,30	26.953	48,45
4	Dendang	381,52	16.774	43,97
5	Muara Sabak Barat	277,47	22.248	80,18
6	Muara Sabak Timur	388,06	33.036	85,13
7	Kuala Jambi	113,95	14.651	128,57
8	Rantau Rasau	177,55	25.245	142,19
9	Berbak	1.169,17	10.753	9,20
10	Nipah Panjang	307,94	26.834	87,14
11	Sadu	624,27	13.638	21,96
Jumlah		**5.085,71**	**234.164**	**46,04**

Sumber: Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Angka 2023

3.1.4.2 Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Struktur Usia

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 memiliki rasio jenis kelamin 104,33 dengan jumlah penduduk kurang lebih 234.164 jiwa, dengan jumlah penduduk laki – laki sekitar 119.467 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sekitar 114.697 jiwa.

Rasio jenis kelamin tertinggi berada di Kecamatan Sadu Ulu yang mencapai 108,14 orang dan rasio jenis kelamin terendah berada di Kecamatan Muara Sabak Timur mencapai 102,36 orang dengan jumlah penduduk sekitar 32.886 jiwa. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.1.11
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tahun 2022

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
1	Mendahara	13.775	13.225	27.000	104,23
2	Mendahara Ulu	8.690	8.342	17.032	108,14
3	Geragai	13.751	13.202	26.953	105,82
4	Dendang	8.558	8.216	16.774	103,95
5	Muara Sabak Barat	11.351	10.897	22.248	103,22
6	Muara Sabak Timur	16.855	16.181	33.036	102,36
7	Kuala Jambi	7.475	7.176	14.651	106,54
8	Rantau Rasau	12.880	12.365	25.245	103,52
9	Berbak	5.486	5.267	10.753	106,45
10	Nipah Panjang	13.690	13.144	26.834	102,48
11	Sadu	6.958	6.680	13.638	105,35
Jumlah		**119.467**	**114.697**	**234.164**	**104,33**

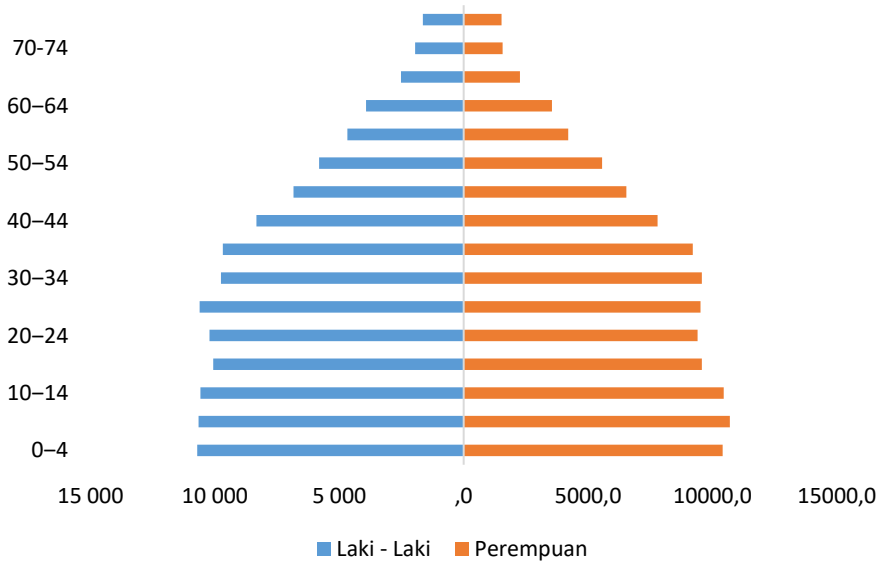
Sumber: Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Angka 2023

Jumlah penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Tanjung Jabung Timur di dominasi oleh usia produktif dengan interval usia 20 – 54 berjumlah 124.208 jiwa, untuk usia anak sekolah dengan interval usia 5 – 19 tahun berjumlah 56.459 jiwa dan disusul oleh usia balita sebanyak 17.524 jiwa dan terakhir disusul dengan penduduk usia lanjut berjumlah 35.973 jiwa. Lebih lanjut dapat di lihat pada tabel dibawah ini.

Tabel III.1.12
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tahun 2022

Kelompok Umur	Penduduk (orang)		
	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
0–4	8.800	8.724	17.524
5–9	9.585	9.405	18.990
10–14	9.586	9.197	18.783
15–19	9.547	9.139	18.686
20–24	9.880	9.367	19.247
25–29	9.607	9.192	18.799
30–34	9.896	9.619	19.515
35–39	9.919	9.243	19.162
40–44	8.969	8.691	17.660
45–49	8.198	7.962	16.160
50–54	6.991	6.674	13.665
55–59	5.712	5.355	11.067
60–64	4.372	4.214	8.586
65-69	3.316	3.170	6.486
70-74	2.526	2.547	5.073
75+	2.464	2.297	4.761
Jumlah	**119.368**	**114.796**	**234.164**

Sumber: Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Angka 2023



Gambar 3.1.14
Grafik Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tahun 2022

Rata–rata anggota rumah tangga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur rata-rata anggota keluarga 4,01 jiwa dengan jumlah penduduk 234.164 jiwa, sedangkan jumlah rumah tangga mencapai 58.356 KK. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.1.13
Jumlah Penduduk, Rumah Tangga dan
Rata-Rata Anggota Rumah Tangga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Rumah Tangga (KK)	Rata-Rata Rumah Tangga
1	Mendahara	27.000	6.870	3,93
2	Mendahara Ulu	17.032	3.505	4,86
3	Geragai	26.953	6.479	4,16
4	Dendang	16.774	4.509	3,72
5	Muara Sabak Barat	22.248	5.045	4,41
6	Muara Sabak Timur	33.036	8.559	3,86
7	Kuala Jambi	14.651	3.480	4,21
8	Rantau Rasau	25.245	6.805	3,71
9	Berbak	10.753	3.004	3,58
10	Nipah Panjang	26.834	6.725	3,99
11	Sadu	13.638	3.376	4,04
Jumlah		**234.164**	**58.356**	**4,01**

Sumber: Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Angka 2023

3.1.4.3 Kemiskinan

A. Persentase Penduduk Miskin

Kemiskinan secara umum dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi memenuhi kebutuhan makanan maupun non-makanan. Kemiskinan ini akan terasa semakin mengimpit masyarakat ketika semua barang-barang kebutuhan dasar.

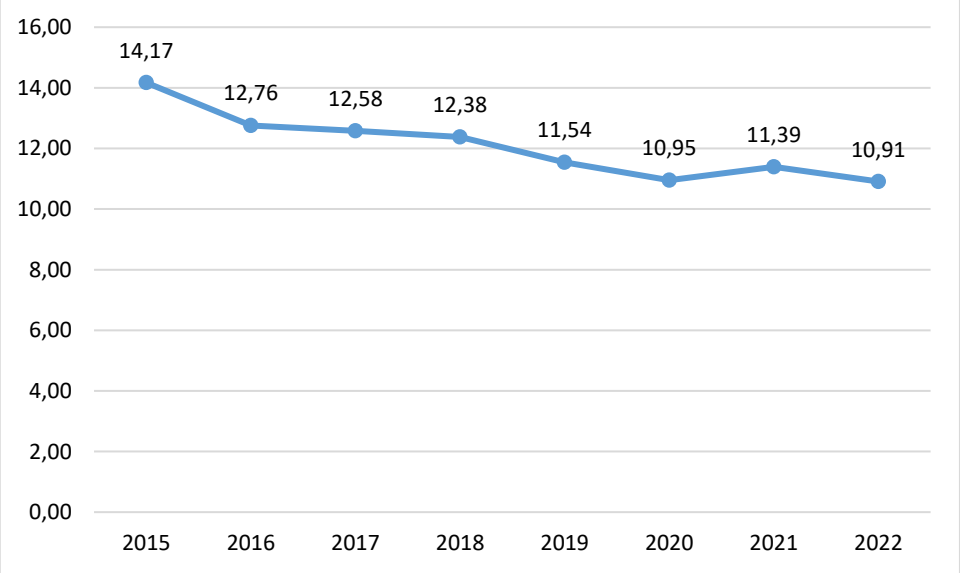
Angka kemiskinan Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2022 mencapai 10,91%. Hal ini dapat diartikan bahwa ada sekitar 10,91% penduduk Tanjung Jabung Timur masih berada di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan Tanjung Jabung Timur pada tahun 2022 sebesar 469.201 ribu rupiah perkapita perbulan. Bila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Jambi yaitu 7,62 persen, tingkat kemiskinan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih cukup tinggi.

Selama periode 2015-2022, indeks kedalaman kemiskinan terus mengalami perubahan. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin berkembang mengikuti garis kemiskinan. Hal ini juga diikuti dengan indeks keparahan kemiskinan yang semakin berfluktuasi. Perubahan nilai P2 menunjukkan bahwa ketimpangan di antara penduduk miskin semakin meningkat.

Tabel III.1.14
Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin (P0), Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kab. Tanjab Timur, 2015-2022

No	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Persentase Penduduk Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
1	2015	30.180	301.563	14,17	1,98	0,45
2	2016	27.420	322.389	12,76	2,00	0,56
3	2017	27.220	338.963	12,58	2,98	1,05
4	2018	26.990	361.574	12,38	2,19	0,56
5	2019	25.350	374.735	11,54	1,75	0,47
6	2020	24.230	392.778	10,95	1,45	0,31
7	2021	24.420	406.772	11,39	2,07	0,61
8	2022	23.420	469.201	10,91	1,37	0,31

Sumber: Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Angka 2023



Gambar 3.1.15
Grafik Persentase Penduduk Miskin Kab. Tanjab Timur Tahun 2015 - 2022

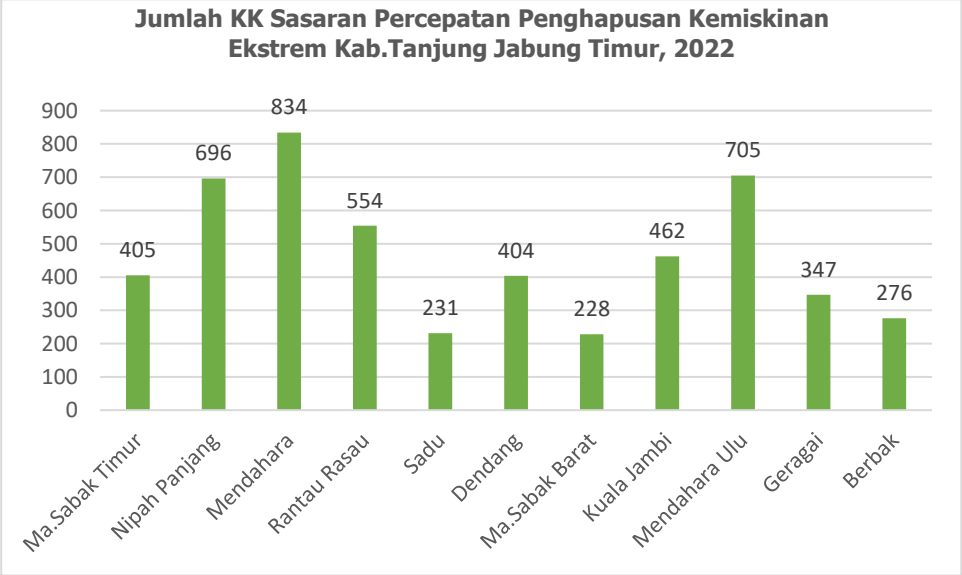
B. Kemiskinan Berdasarkan P3KE

Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) adalah kumpulan informasi dan data keluarga serta individu anggota keluarga hasil pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia (Pendataan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional/PK-BKKBN 2021) di setiap wilayah pemutakhiran (RT) dan setiap tingkatan wilayah administrasi (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pusat) yang tersimpan dalam file elektronik dan sudah divalidasi NIK oleh DUKCAPIL serta memiliki status kesejahteraan (Desil).

Tabel III.1.15
Rekap Data P3KE (Desil-1) Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022

Kecamatan	Jumlah KK Desil 1	%
Ma.Sabak Timur	405	7,88%
Nipah Panjang	696	13,54%
Mendahara	834	16,22%
Rantau Rasau	554	10,77%
Sadu	231	4,49%
Dendang	404	7,86%
Ma.Sabak Barat	228	4,43%
Kuala Jambi	462	8,98%
Mendahara Ulu	705	13,71%
Geragai	347	6,75%
Berbak	276	5,37%
Jumlah	5.142	100,00%

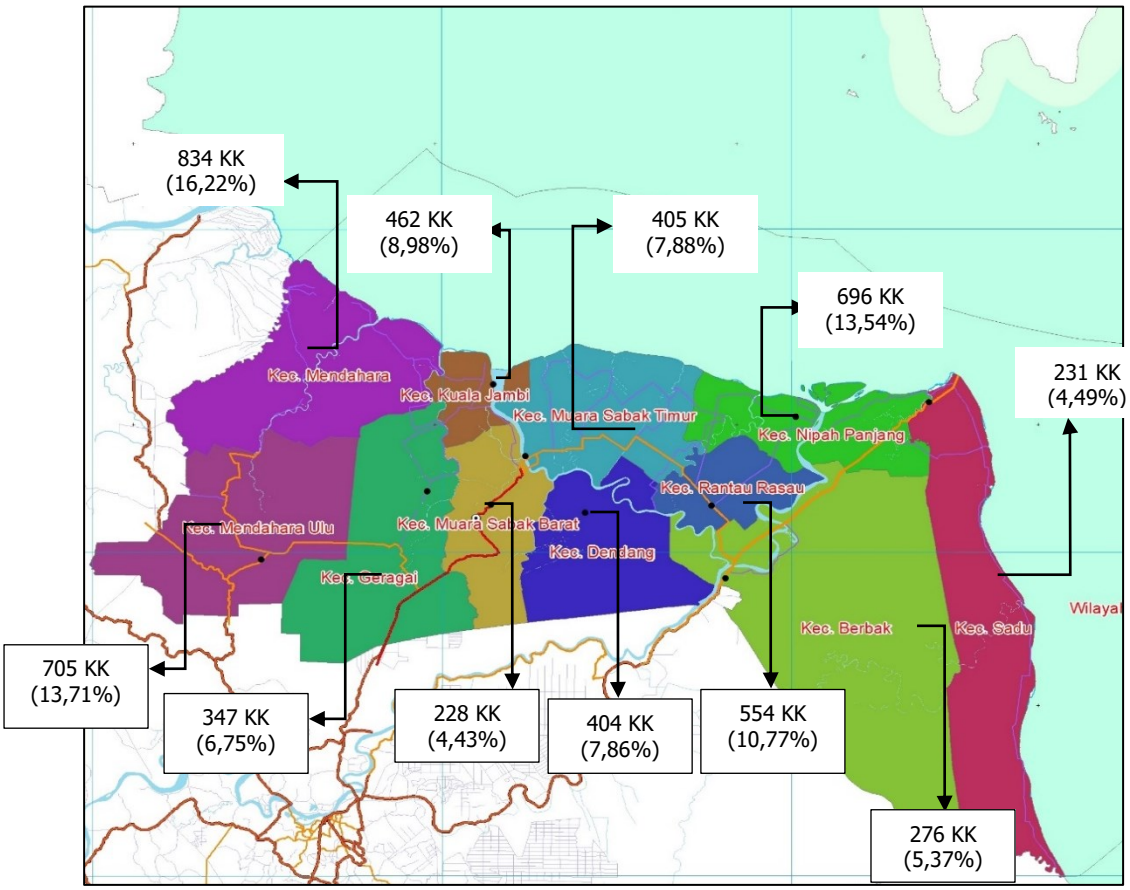
Sumber: Data P3KE Kabupaten Tanjung Jabung Timur



Gambar 3.1.16
Rekap Data P3KE (Desil-1) Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022



Gambar 3.1.17
Persentase Data P3KE (Desil-1) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Per Kecamatan, Tahun 2022

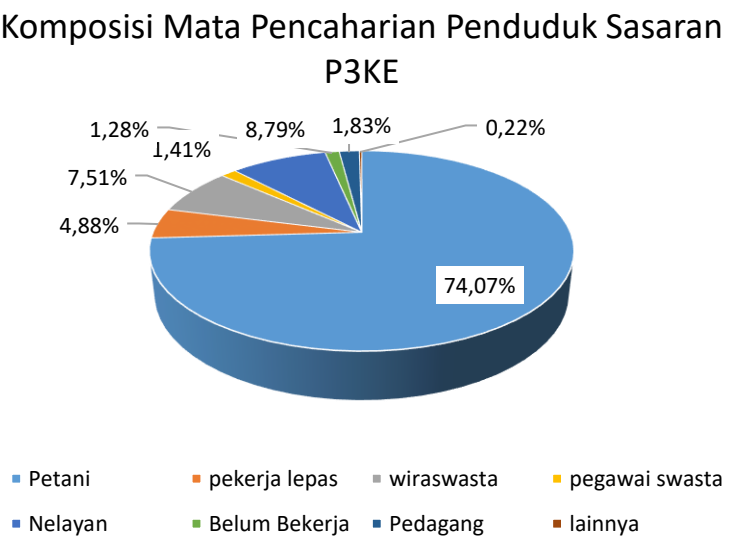


Gambar 3.1.18
Peta Sebaran Sasaran P3KE (Desil-1) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022

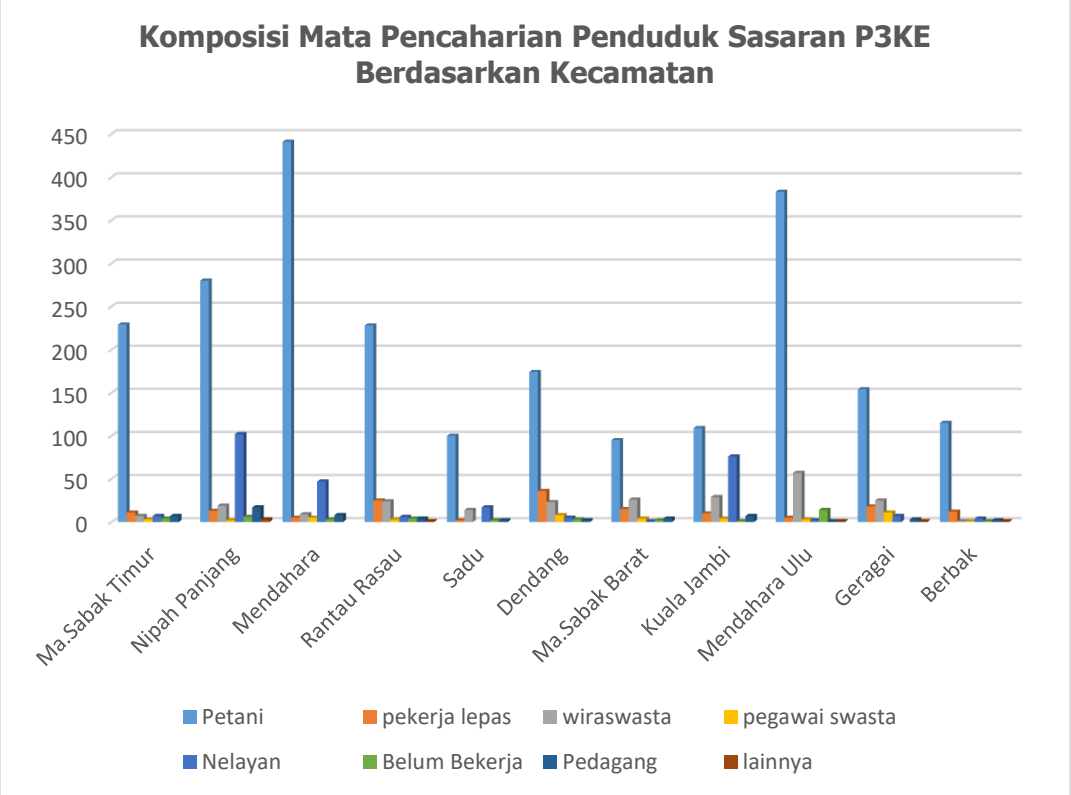
Tabel III.1.16
Rekap Data P3KE (Desil-1) Berdasarkan Mata Pencaharian
Tahun 2022

Kecamatan	Mata Pencaharian							
	Petani	pekerja lepas	wiraswasta	pegawai swasta	Nelayan	Belum Bekerja	Pedagang	lainnya
Ma.Sabak Timur	229	11	7	3	7	4	7	
Nipah Panjang	280	13	19	2	102	6	17	3
Mendahara	441	5	9	5	47	3	8	
Rantau Rasau	228	25	24	3	6	4	4	1
Sadu	100	2	14		17	2	2	
Dendang	174	36	23	8	5	3	2	
Ma.Sabak Barat	95	15	26	4	1	2	4	
Kuala Jambi	109	10	29	4	76	1	7	
Mendahara Ulu	383	5	57	3	2	14	1	1
Geragai	154	18	25	11	7		3	1
Berbak	115	12	1	1	4	1	2	1
Jumlah	2.308	152	234	44	274	40	57	7
%	74,07%	4,88%	7,51%	1,41%	8,79%	1,28%	1,83%	0,22%

Sumber: Data P3KE Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022



Gambar 3.1.19
Komposisi Mata Pencaharian Penduduk Sasaran P3KE (Desil-1)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022



Gambar 3.1.20
Komposisi Mata Pencaharian Penduduk Sasaran P3KE (Desil-1)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Berdasarkan Kecamatan
Tahun 2022

3.1.4.4 Tenaga Kerja

Jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) di Tanjung Jabung Timur pada tahun 2022 sebanyak 142.894 jiwa, jumlah angkatan kerja sebanyak 120.684 jiwa dan jumlah bukan angkatan kerja sebanyak 44.988 jiwa. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) tercatat mencapai 72,85 persen dari total penduduk usia kerja. Angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan TPAK pada tahun 2021 yang mencapai 71,22 persen. Dari jumlah angkatan kerja tersebut, 98,68 persen diantaranya sudah bekerja. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka meningkat dari tahun sebelumnya, menjadi $\leq$ 1,32%.

Tabel III.1.17
Indikator Ketenagakerjaan di Kab. Tanjab Timur tahun 2019-2022

No	Indikator Ketenagakerjaan	2019	2020	2021	2022
1	Bekerja (jiwa)	113.773	119.896	115.517	119.088
2	Pengangguran Terbuka (jiwa)	1.984	1.710	1.832	1.596
3	Angkatan Kerja (jiwa)	115.757	121.606	117.349	120.684
4	Bukan Angkatan Kerja (jiwa)	49.409	42.327	47.415	44.988
5	T P A K	70,09	74,18	71,22	72,85
6	T P T	1,71	1,41	1,56	1,32

Sumber: https://tanjabtimkab.bps.go.id/indicator/6/88/1/indikator-ketenagakerjaan,

Sebagian besar pekerja di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2021 masih memilih bekerja di sektor pertanian. Hal ini dapat dilihat dari luasnya lahan pertanian yang terdapat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Tabel III.1.18
Indikator Ketenagakerjaan Serta Sektor Pendukung
di Kab. Tanjab Timur tahun 2019-2022

No	Uraian	2019	2020	2021	2022
1	T P A K	70,09	74,18	71,22	72,85
2	T P T	1,71	1,41	1,56	1,32
3	Bekerja	98,22	98,59	98,44	98,68
4	Sektor Pertanian	70,35	71,15	69,52	*
5	Sektor Industri	2,49	2,42	2,47	*
6	Sektor Perdagangan	14,01	12,98	13,48	*
7	Sektor Jasa	7,19	7,67	8,35	*
8	Sektor Lainya	5,96	5,77	6,17	*

Sumber: https://tanjabtimkab.bps.go.id/indicator/6/88/1/indikator-ketenagakerjaan,
Statistik Daerah kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022, dan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Angka 2022

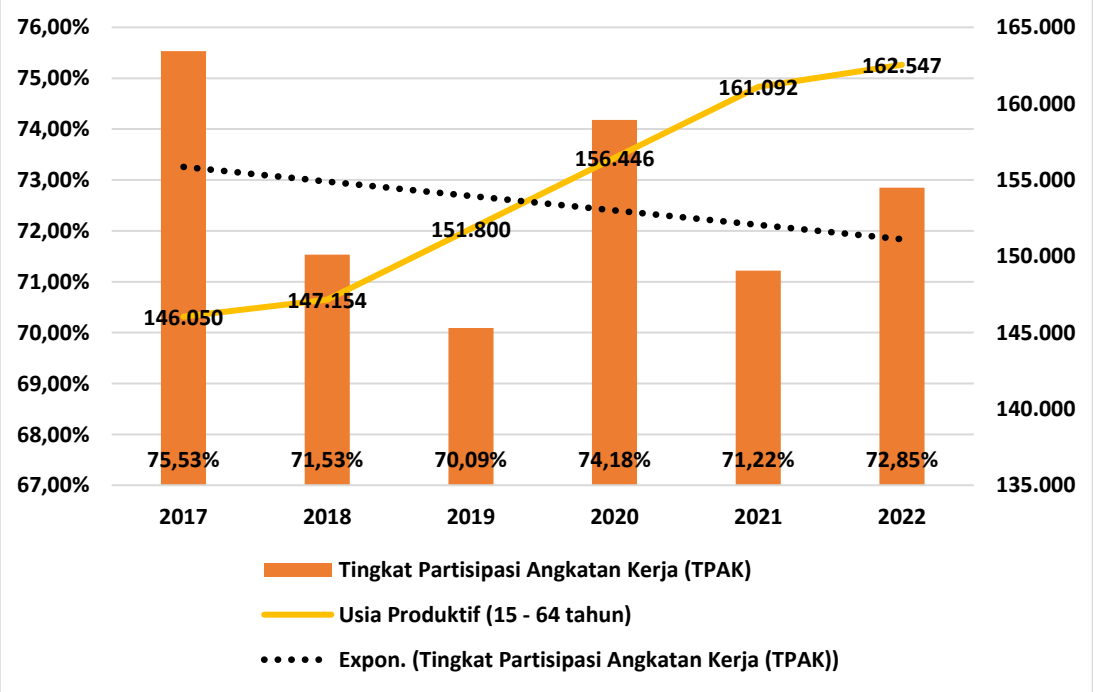
Berdasarkan perbandingan empat sektor utama, pilihan bekerja di sektor pertanian masih mendominasi pasar kerja di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yaitu dengan persentase sebesar 71,15 persen pada tahun 2021. Kemudian diikuti oleh sektor perdagangan sebesar 12,98 persen dan 7,67persen untuk sektor jasa.

Tantangan terkait isu ketenagakerjaan yang selalu perlu untuk menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pembangunan adalah dinamika bonus demografi yang perlu diimbangi dengan pengembangan sektor-sektor ekonomi untuk dapat menjawab kebutuhan lapangan pekerjaan.

Bonus demografi adalah suatu kondisi dimana populasi masyarakat akan didominasi oleh individu-individu dengan usia produktif. Usia produktif yang

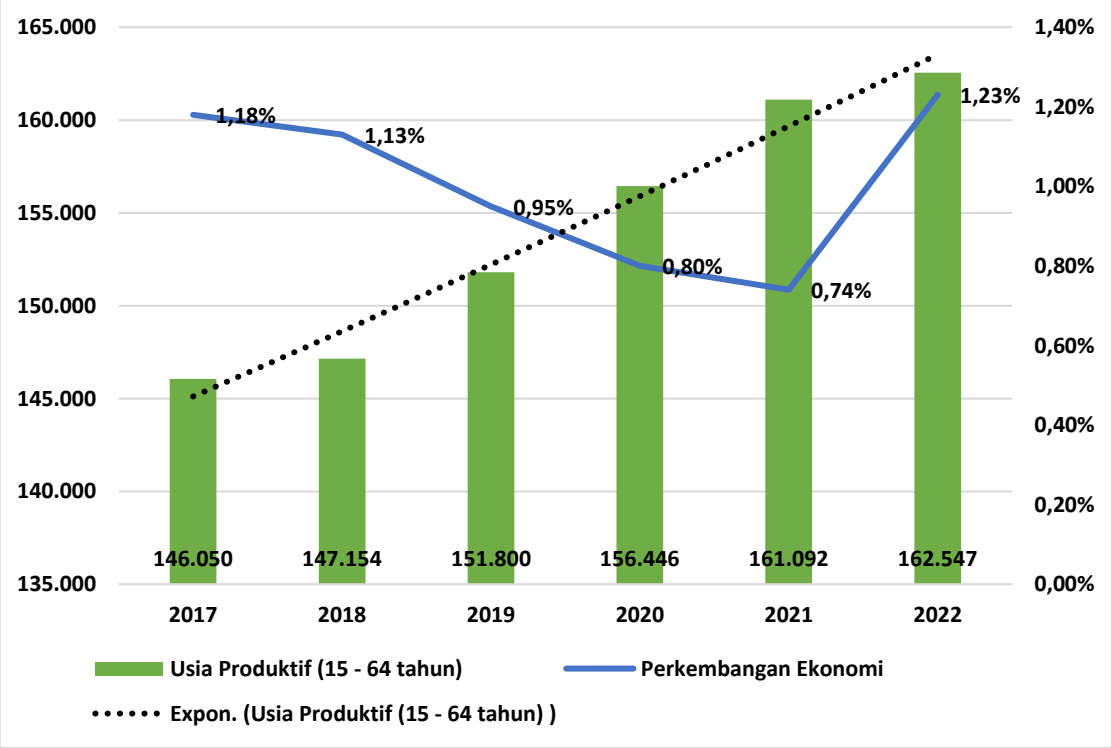
dimaksud adalah rentang usia 15 hingga 64 tahun. Bonus demografi penduduk akan mempengaruh terhadap perkembangan ekonomi khususnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Tingkat Partisipasi Angka Kerja (TPAK) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari tahun 2017 hingga 2022 mengalami turun naik dalam perkembangannya, dari tahun 2021 sekitar 71,22% mengalami kenaikan pada tahun 2022 sekitar 72,85%. Usia produktif di Kabupaten Tanjung Jabung Timur antar 15 hingga 64 tahun, melihat perkembangan dari tahun 2017 hingga 2022 tingkat Usia produktif tiap tahunnya mengalami kenaikan dari 2017 sekitar 146.050 orang pada tahun 2022 sekitar 162.547 orang.



Gambar 3.1.21
Garfik Pengaruh Tingkat Partisipasi Angka Kerja (TPAK) Terhadap Usia Produktif di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2022

Untuk perkembangan ekonomi khususnya di Kabupaten Janjung Jabung Timur mengalami turun naik, tahun 2017 tingkat perkembangan ekonomi sekitar 1,18% dan mengalami penurunan hingga tahun 2021 sekitar 0,74%, dan mulai bangkit lagi pada tahun 2022 mencapai 1,23% perkembangan ekonominya.



Gambar 3.1.22
Garfik Tingkat Pengaruh Usia Produktif Terhadap Perkembangan Ekonomi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2022

Berdasarkan grafik diatas bahwa bonus demografi penduduk akan mempengaruhi terhadap perkembangan ekonomi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di pengaruhi dengan membuka peluang tenaga kerja dapat mempengaruhi dampak positif bonus demografi. Selain itu yang dapat mempengaruhi perkembangan bonus demografi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur antara lain:

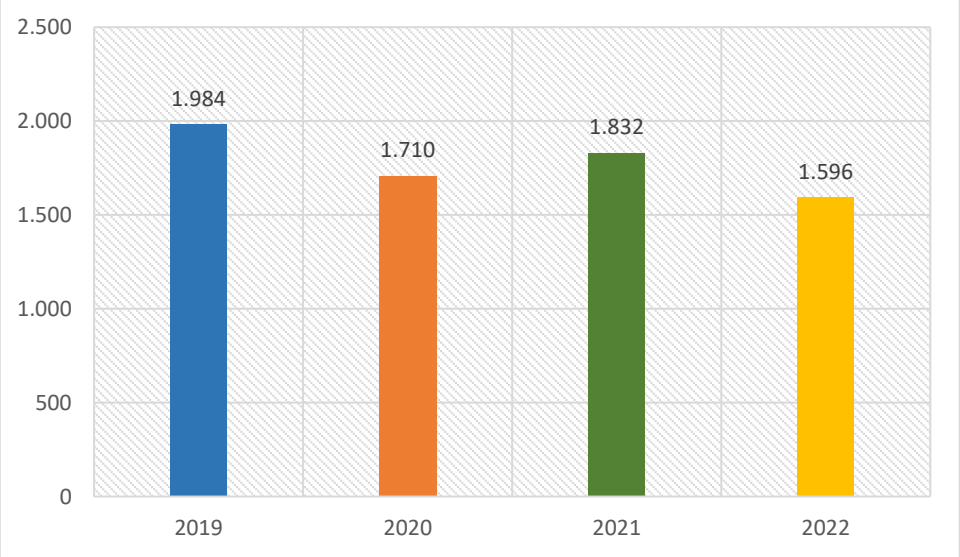
a. Kualitas penduduk dengan tingakat SDM dan pendidikan yang baik
b. Lapangan kerja
c. Kualitas pendidikan tinggi
d. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang mendukung untuk meningkatkan perkembangan bonus demografi.
e. Dapat mengendalikan jumlah penduduk
f. Tingkatkan pelayanan kesehatan dalam menghasilkan generasi yang baik.
g. Mendorong wirausaha dan investasi

Bonus Demografi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi baik secara dampak positif maupun negative

1. Dampak positif
    a. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi;
    b. Meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
    c. Membentuk generasi muda/usia produktif yang dapat kreatif, bekerja dan mampu berkeasi dalam perkembangan ekonomi;
    d. Meningkatkan taraf hidup; dan
    e. Memiliki SDM yang produktif dan berkualitas.
2. Dampak Negatif
    a. Meningkatnya pengangguran;
    b. Meningkatnya kemiskinan;
    c. Lapangan kerja makin terbatas dan tingkat persaingan yang tinggi; dan
    d. Munculnya masalah sosial dan lingkungan yakni kriminalitas tinggi

3.1.4.5 Pengangguran

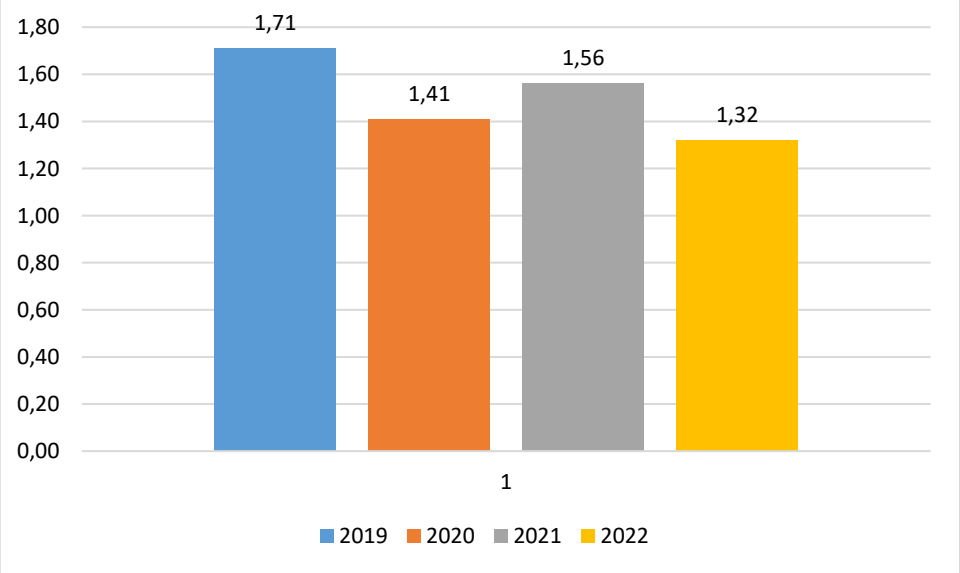
Pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedangkan mencari pekerjaan, mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan atau mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum bekerja atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian, karena dengan adanya pengangguran produktivitas dan pendapatan masyarakat berkurang, sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan masalah sosial lainnya.



Gambar 3.1.23
Grafik Angka Pengangguran di Kab. Tanjab Timur Tahun 2019 - 2022

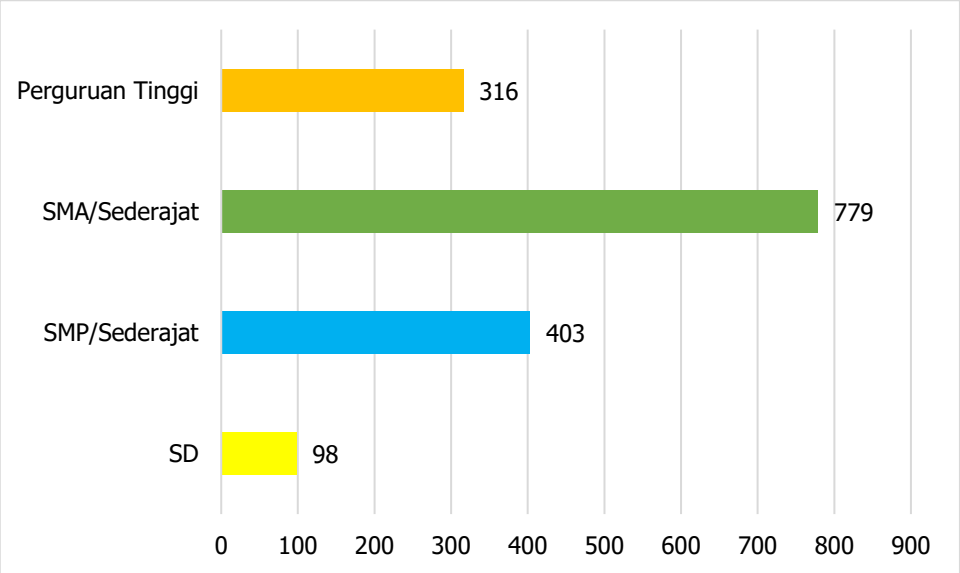
Pengangguran di Kabupaten Tanjab Timur pada tiga tahun terakhir ini (2019-2022) mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 mencapai 1.984 orang pengangguran di Kabupaten Tanjab Timur memiliki angka tertinggi dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Tahun 2021 mengalami kenaikan dari tahun sebelum nya mencapai 1.832 orang dan mengalami penurunan kembali angka pengangguran pada tahun 2022 sekitar 1.596, yang artinya bahwa banyaknya angkatan kerja beralih ke bukan angkatan kerja, itu berarti banyaknya lapangan pekerjaan terbuka lebar di Kabupaten Tanjab Timur.

Indikator utama ketenagakerjaan yang sering digunakan sebagai indikasi keberhasilan dalam menangani masalah pengangguran di Kabupaten Tanjab Timur adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), selain itu TPT merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran terhadap jumlah angka kerja, angka TPT tahun 2019 sekitar 1,71% mengalami penurunan hingga tahun 2022 sekitar 1,32%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 3.1.24
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kab. Tanjab Timur Tahun 2019 - 2022

Berdasarkan data menunjukan bahwa sebagian besar pengangguran di Kabupaten Tanjab Timur adalah lulusan SMA/Sederajat sebanyak 779 orang. Jika dibandingkan dengan SMP/Sederajat jauh lebih kecil sekitar 403 orang. Pengangguran yang lulusan perguruan tinggi posisi paling banyak dibandingkan dengan pengangguran lulusan SD sekitar 98 orang.



Gambar 3.1.25
Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi
Yang Ditamatkan di Kab. Tanjab Timur

Secara keseluruhan dari segi jumlah angkatan kerja, bekerja dan tingkat partisipasi kerja dantingkat pengangguran yang ada di Kabupaten Tanjab Timur dapat dilihat lebih jelas pada tabel berikut ini.

Tabel III.1.19
Jumlah Angkatan Kerja, Penduduk Bekerja, Pengangguran, TPAK, dan TPT Kab. Tanjab Timur, 2019-2022

No	Indikator Ketenagakerjaan	2019	2020	2021	2022
1	Bekerja (jiwa)	113.773	119.896	115.517	119.088
2	Pengangguran Terbuka (jiwa)	1.984	1.710	1.832	1.596
3	Angkatan Kerja (jiwa)	115.757	121.606	117.349	120.684
4	Bukan Angkatan Kerja (jiwa)	49.409	42.327	47.415	44.988
5	T P A K	70,09	74,18	71,22	72,85
6	T P T	1,71	1,41	1,56	1,32

Sumber: https://tanjabtimkab.bps.go.id/indicator/6/88/1/indikator-ketenagakerjaan,

3.2 PENGGUNAAN LAHAN

3.2.1 Penggunaan Lahan

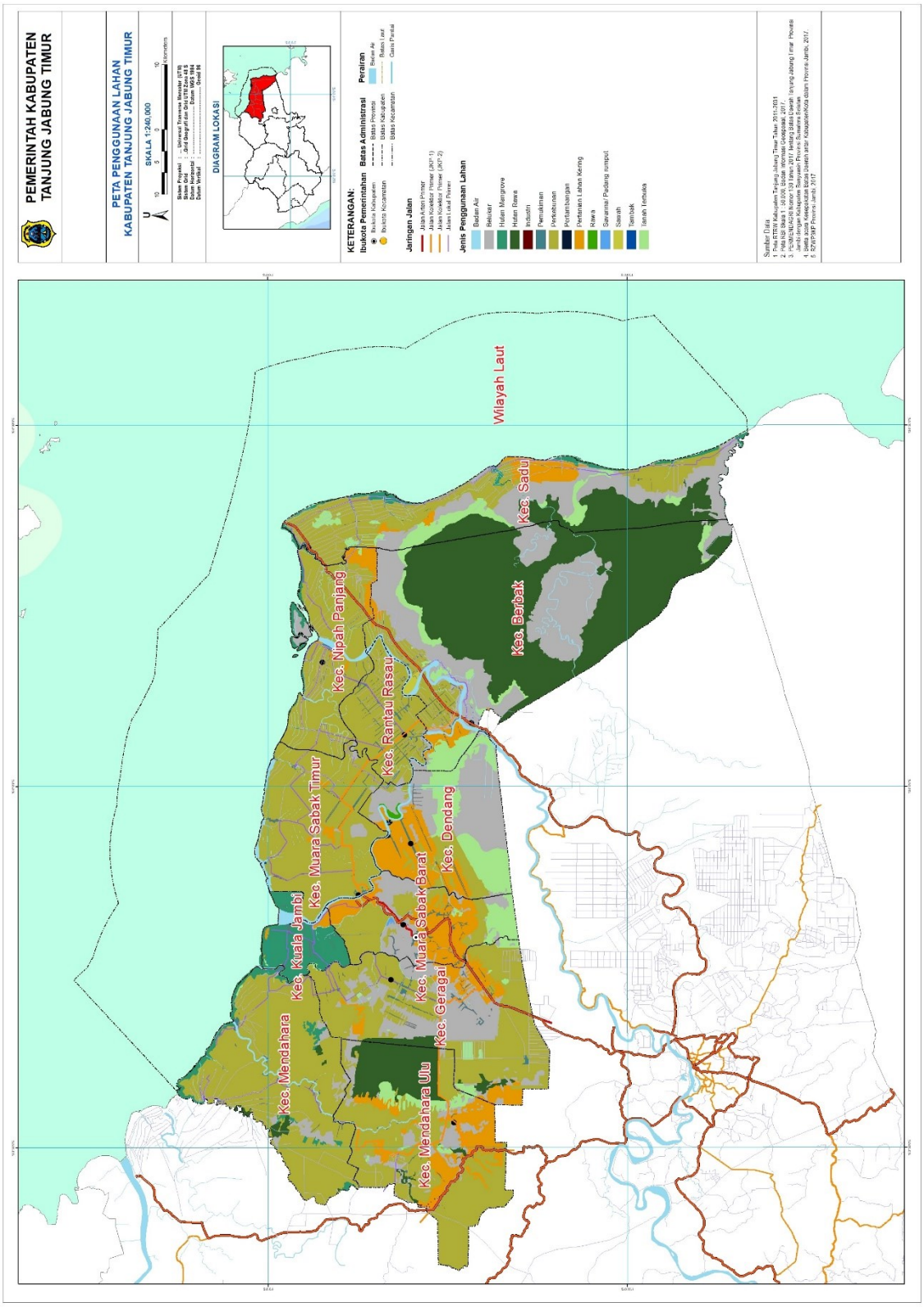
Seiring dengan dinamika perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat pola penggunaan tanah telah mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Dan dinamika penggunaan lahan pertanian selain terkait dengan fluktuasi harga berbagai komoditi hasil pertanian di pasar domestik dan internasional juga berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan lahan untuk berbagai penggunaan lainnya seperti pembangunan areal pemukiman penduduk, gedung perkantoran, pertokoan, dan infrastruktur jalan.

Pola penggunaan lahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan Revisi RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2013-2033, bahwa untuk yang lebih besar luas lahannya yakni pada penggunaan lahan perkebunan sekitar 219.961,61 ha atau sekitar 43,25% dari luas wilayah Kabupaten Tanjab Timur dan penggunaan lahan hutan rawa sekitar 96.844,02 ha atau sekitar 19,04%. Dan penggunaan lahan terkecil berada di tambak sekitar 9,24 ha atau sekitar 0,002%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.2.1
Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Ha)

No	Jenis Kegiatan	Luas (Ha)	Presentasi (%)
1	Badan Air	8.474,87	1,67
2	Belukar	90.154,68	17,73
3	Hutan Mangrove	17.028,41	3,35
4	Hutan Rawa	96.844,02	19,04
5	Industri	21,37	0,004
6	Pemukiman	8.233,08	1,62
7	Perkebunan	219.961,61	43,25
8	Pertambangan	79,26	0,02
9	Pertanian Lahan Kering	40.240,20	7,91
10	Rawa	285,56	0,06
11	Savanna/ Padang rumput	84,84	0,02
12	Sawah	442,80	0,09
13	Tambak	9,24	0,002
14	Tanah Terbuka	26.711,05	5,25
Jumlah		**508.571,00**	**100,00**

Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Tanjab Timur 2011-2031 dan Interpretasi Digitasi Peta Tahun 2022



Gambar 3.2.1
Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

3.3 DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP

3.3.1 Jasa Layanan Ekosistem

Ekosistem adalah entitas yang kompleks yang terdiri atas komunitas tumbuhan, binatang dan mikro organisme yang dinamis beserta lingkungan abiotiknya yang saling berinteraksi sebagai satu kesatuan unit fungsional (MA, 2005). Fungsi ekosistem adalah kemampuan komponen ekosistem untuk melakukan proses alam dalam menyediakan materi dan jasa yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung (De Groot, 1992).

Jasa ekosistem adalah keuntungan yang diperoleh manusia dari ekosistem (MA, 2005). Jasa ekosistem dikategorikan menjadi empat, yaitu meliputi jasa penyediaan (provisioning), jasa pengaturan (regulating), jasa budaya (cultural), dan jasa pendukung (supporting) (MA, 2005). Berdasarkan empat kategori ini dikelaskan ada 23 kelas klasifikasi jasa ekosistem, yaitu (De Groots, 2002) :

a) Jasa penyediaan :
   1) bahan makanan,
   2) air bersih,
   3) serat, bahan bakar dan bahan dasar lainnya,
   4) materi genetik,
   5) bahan obat dan biokimia,
   6) spesies hias.

b) Jasa Pengaturan :
   7) Pengaturan kualitas udara,
   8) Pengaturan iklim,
   9) Pencegahan gangguan,
   10) Pengaturan air,
   11) Pengolahan limbah,
   12) Perlindungan tanah,
   13) Penyerbukan,
   14) Pengaturan biologis,
   15) Pembentukan tanah.

c) Budaya :

16) Estetika,

17) Rekreasi,

18) Warisan dan indentitas budaya,

19) Spiritual dan keagamaan,

20) Pendidikan.

d) Pendukung :

21) Habitat berkembang biak,

22) Perlindungan plasma nutfah

A. Jasa Penyediaan

Dari hasil perhitungan interval tersebut didapatkan distribusi kondisi jasa ekosistem di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang diuraikan melalui tabel dan gambar peta berikut ini.

Tabel III.3.1
Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan

EKOREGION	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Dataran Aluvial	1.153,146	0,227	8,826	0,002	22.527,886	4,434	26,424	0,005	7.619,459	1,500
Lembah Antar Perbukitan	-	-	-	-	58,040	0,011	-	-	-	-
Dataran Fluviomarin	-	-	-	-	18,613	0,004	9,110	0,002	-	-
Lahan Gambut (Peat Land)	6.851,882	1,349	66,262	0,013	418.224,276	82,315	10.238,385	2,015	24.315,221	4,786
Pesisir (Coast)	260,389	0,051	-	-	9.709,989	1,911	6.663,699	1,312	329,271	0,065
Total	8.265,417	1,627	75,088	0,015	450.538,804	88,675	16.937,618	3,334	32.263,951	6,350

Sumber : Hasil Analisa 2019

Tabel III.3.2
Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih

EKOREGION	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Dataran Aluvial	1.161,972	0,229	288,773	0,057	27.850,500	5,482	2.008,072	0,395	26,424	0,005
Lembah Antar Perbukitan		-		-	58,040	0,011		-		-
Dataran Fluviomarin		-		-	18,613	0,004	6,600	0,001	2,510	0,000
Lahan Gambut (Peat Land)	6.918,144	1,362	6.747,617	1,328	401.421,075	79,007	37.954,999	7,470	6.654,191	1,310
Pesisir (Coast)	260,389	0,051	76,455	0,015	9.884,807	1,946	4.385,215	0,863	2.356,482	0,464
Total	8.340,505	1,642	7.112,845	1,400	439.233,035	86,449	44.354,886	8,730	9.039,607	1,779

Sumber : Hasil Analisa 2019

Tabel III.3.3
Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Penyediaan Serat

EKOREGION	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Dataran Aluvial	1.153,146	0,227	35,250	0,007	1.748,864	0,344	7.893,379	1,554	20.505,102	4,036
Lembah Antar Perbukitan		-		-		-		-	58,040	0,011
Dataran Fluviomarin		-	2,510	0,000	18,613	0,004		-	6,600	0,001
Lahan Gambut (Peat Land)	6.851,882	1,349	6.729,742	1,325	43.763,599	8,614	160.080,843	31,507	242.269,960	47,683
Pesisir (Coast)	260,389	0,051	2.357,543	0,464	1.184,762	0,233	347,037	0,068	12.813,617	2,522
Total	8.265,417	1,627	9.125,045	1,796	46.715,838	9,195	168.321,259	33,129	275.653,319	54,254

Sumber : Hasil Analisa 2019

Tabel III.3.4
Distrubisi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Penyediaan Energi

EKOREGION	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Dataran Aluvial	1.441,919	0,284	9.079,550	1,787	20.779,022	4,090	8,826	0,002	26,424	0,005
Lembah Antar Perbukitan		-		-	58,040	0,011		-		-
Dataran Fluviomarin		-	18,613	0,004	6,600	0,001		-	2,510	0,000
Lahan Gambut (Peat Land)	13.608,788	2,678	60.879,077	11,982	378.487,708	74,494	66,262	0,013	6.654,191	1,310
Pesisir (Coast)	337,905	0,067	1.359,580	0,268	12.909,381	2,541		-	2.356,482	0,464
Total	15.388,612	3,029	71.336,820	14,040	412.240,751	81,137	75,088	0,015	9.039,607	1,779

Sumber : Hasil Analisa 2019

Tabel III.3.5
Distrubisi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Penyediaan Sumberdaya Genetik

EKOREGION	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Dataran Aluvial	1.161,972	0,229	288,773	0,057	27.576,580	5,428	2.034,496	0,400	273,920	0,054
Lembah Antar Perbukitan		-		-	58,040	0,011		-		-
Dataran Fluviomarin		-	2,510	0,000	18,613	0,004		-	6,600	0,001
Lahan Gambut (Peat Land)	6.918,144	1,362	6.747,617	1,328	266.098,290	52,373	40.572,870	7,986	139.359,105	27,429
Pesisir (Coast)	260,389	0,051	76,455	0,015	9.943,978	1,957	2.356,482	0,464	4.326,044	0,851
Total	8.340,505	1,642	7.115,355	1,400	303.695,501	59,773	44.963,848	8,850	143.965,669	28,335

Sumber : Hasil Analisa 2019

Tabel III.3.6
Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Menurut Kecamatan

Kercamatan	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
BERBAK	541,302	0,107		-	108.169,553	21,290	2.727,734	0,537	7.968,487	1,568
DENDANG	714,752	0,141	66,262	0,013	24.635,377	4,849	551,585	0,109	8.324,483	1,638
GERAGAI	1.355,878	0,267		-	46.516,354	9,155	140,183	0,028	3.169,503	0,624
KUALA JAMBI	315,597	0,062		-	9.572,382	1,884	1.729,830	0,340	337,483	0,066
MENDAHARA	474,745	0,093		-	48.309,722	9,508	3.670,477	0,722	77,604	0,015
MENDAHARA ULU	369,552	0,073	8,826	0,002	58.750,907	11,563	201,779	0,040	13,907	0,003
MUARA SABAK BARAT	1.027,155	0,202		-	18.318,732	3,605	531,997	0,105	8.750,429	1,722
MUARA SABAK TIMUR	953,897	0,188		-	37.002,623	7,283	1.855,683	0,365	688,522	0,136
NIPAH PANJANG	450,069	0,089		-	24.472,500	4,817	1.806,083	0,355	2.561,189	0,504
RANTAU RASAU	1.659,766	0,327		-	17.644,046	3,473	713,622	0,140	328,980	0,065
SADU	402,704	0,079		-	57.146,608	11,248	3.008,645	0,592	43,364	0,009
Total	**8.265,417**	**1,627**	**75,088**	**0,015**	**450.538,804**	**88,675**	**16.937,618**	**3,334**	**32.263,951**	**6,350**

Sumber : Hasil Analisa 2019

Tabel III.3.7
Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih Menurut Kecamatan

Kercamatan	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
BERBAK	541,302	0,107	668,935	0,132	115.031,254	22,640	464,792	0,091	2.700,793	0,532
DENDANG	781,014	0,154	966,168	0,190	31.993,692	6,297		-	551,585	0,109
GERAGAI	1.355,878	0,267	344,317	0,068	34.857,585	6,861	14.483,955	2,851	140,183	0,028
KUALA JAMBI	315,597	0,062	52,490	0,010	9.857,375	1,940	767,799	0,151	962,031	0,189
MENDAHARA	474,745	0,093		-	40.806,416	8,031	10.538,900	2,074	712,487	0,140
MENDAHARA ULU	378,378	0,074	2.618,501	0,515	43.200,909	8,503	13.005,397	2,560	141,786	0,028
MUARA SABAK BARAT	1.027,155	0,202	310,433	0,061	25.760,323	5,070	998,405	0,197	531,997	0,105
MUARA SABAK TIMUR	953,897	0,188		-	37.680,795	7,416	55,475	0,011	1.810,558	0,356
NIPAH PANJANG	450,069	0,089	179,876	0,035	26.853,813	5,285	1.202,695	0,237	603,388	0,119
RANTAU RASAU	1.659,766	0,327		-	17.973,026	3,537		-	713,622	0,140
SADU	402,704	0,079	1.972,125	0,388	55.217,847	10,868	2.837,468	0,558	171,177	0,034
Total	**8.340,505**	**1,642**	**7.112,845**	**1,400**	**439.233,035**	**86,449**	**44.354,886**	**8,730**	**9.039,607**	**1,779**

Sumber : Hasil Analisa 2019

Tabel III.3.8
Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Penyediaan Serat Menurut Kecamatan

Kercamatan	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
BERBAK	541,302	0,107	2.700,793	0,532	6.481,527	1,276	105.334,888	20,732	4.348,566	0,856
DENDANG	714,752	0,141	617,847	0,122	8.615,527	1,696	13.973,817	2,750	10.370,516	2,041
GERAGAI	1.355,878	0,267	140,183	0,028	1.653,744	0,325	4.536,333	0,893	43.495,780	8,561
KUALA JAMBI	315,597	0,062	962,031	0,189	101,988	0,020	337,483	0,066	10.238,193	2,015
MENDAHARA	474,745	0,093	712,487	0,140	2.468,808	0,486	596,628	0,117	48.279,880	9,502
MENDAHARA ULU	369,552	0,073	150,612	0,030	7.888,533	1,553	10.650,765	2,096	40.285,509	7,929
MUARA SABAK BARAT	1.027,155	0,202	531,997	0,105	923,081	0,182	11.342,523	2,232	14.803,557	2,914
MUARA SABAK TIMUR	953,897	0,188	1.820,908	0,358	872,426	0,172	678,183	0,133	36.175,311	7,120
NIPAH PANJANG	450,069	0,089	603,388	0,119	1.178,572	0,232	2.778,475	0,547	24.279,337	4,779
RANTAU RASAU	1.659,766	0,327	713,622	0,140	151,788	0,030	336,800	0,066	17.484,438	3,441
SADU	402,704	0,079	171,177	0,034	16.379,844	3,224	17.755,364	3,495	25.892,232	5,096
Total	**8.265,417**	**1,627**	**9.125,045**	**1,796**	**46.715,838**	**9,195**	**168.321,259**	**33,129**	**275.653,319**	**54,254**

Sumber : Hasil Analisa 2019

Tabel III.3.9
Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Penyediaan Energi Menurut Kecamatan

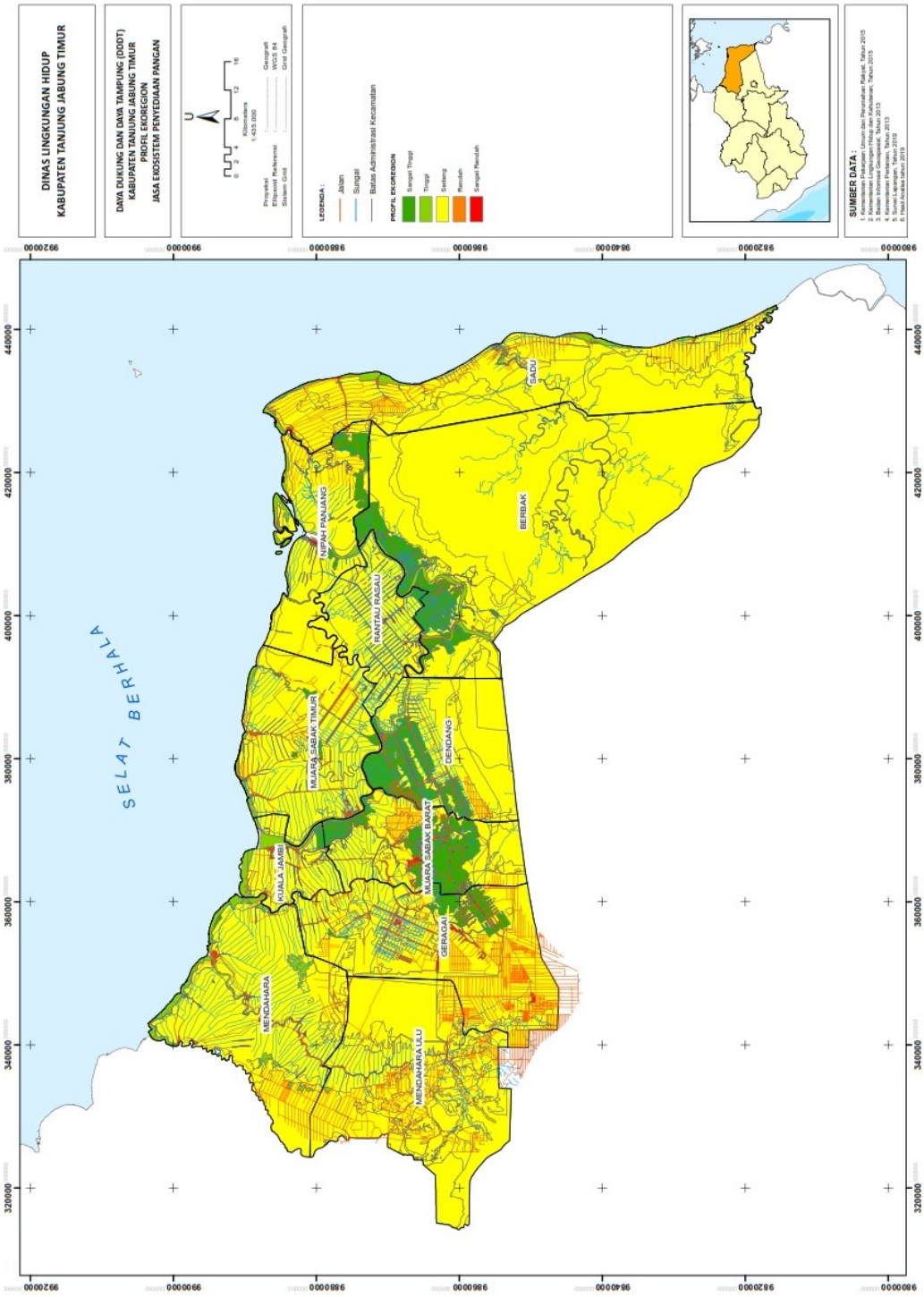
Kercamatan	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
BERBAK	1.210,237	0,238	13.343,228	2,626	102.152,818	20,106		-	2.700,793	0,532
DENDANG	1.680,920	0,331	15.973,842	3,144	16.019,850	3,153	66,262	0,013	551,585	0,109
GERAGAI	1.700,195	0,335	4.478,930	0,882	44.862,610	8,830		-	140,183	0,028
KUALA JAMBI	368,087	0,072	386,981	0,076	10.238,193	2,015		-	962,031	0,189
MENDAHARA	474,745	0,093	2.469,475	0,486	48.875,841	9,620		-	712,487	0,140
MENDAHARA ULU	2.988,053	0,588	5.278,953	1,039	50.927,353	10,023	8,826	0,002	141,786	0,028
MUARA SABAK BARAT	1.337,588	0,263	9.363,077	1,843	17.395,651	3,424		-	531,997	0,105
MUARA SABAK TIMUR	964,247	0,190	1.550,598	0,305	36.175,322	7,120		-	1.810,558	0,356
NIPAH PANJANG	629,945	0,124	3.559,885	0,701	24.496,623	4,821		-	603,388	0,119
RANTAU RASAU	1.659,766	0,327	480,768	0,095	17.492,258	3,443		-	713,622	0,140
SADU	2.374,829	0,467	14.451,083	2,844	43.604,232	8,582		-	171,177	0,034
Total	**15.388,612**	**3,029**	**71.336,820**	**14,040**	**412.240,751**	**81,137**	**75,088**	**0,015**	**9.039,607**	**1,779**

Sumber : Hasil Analisa 2019

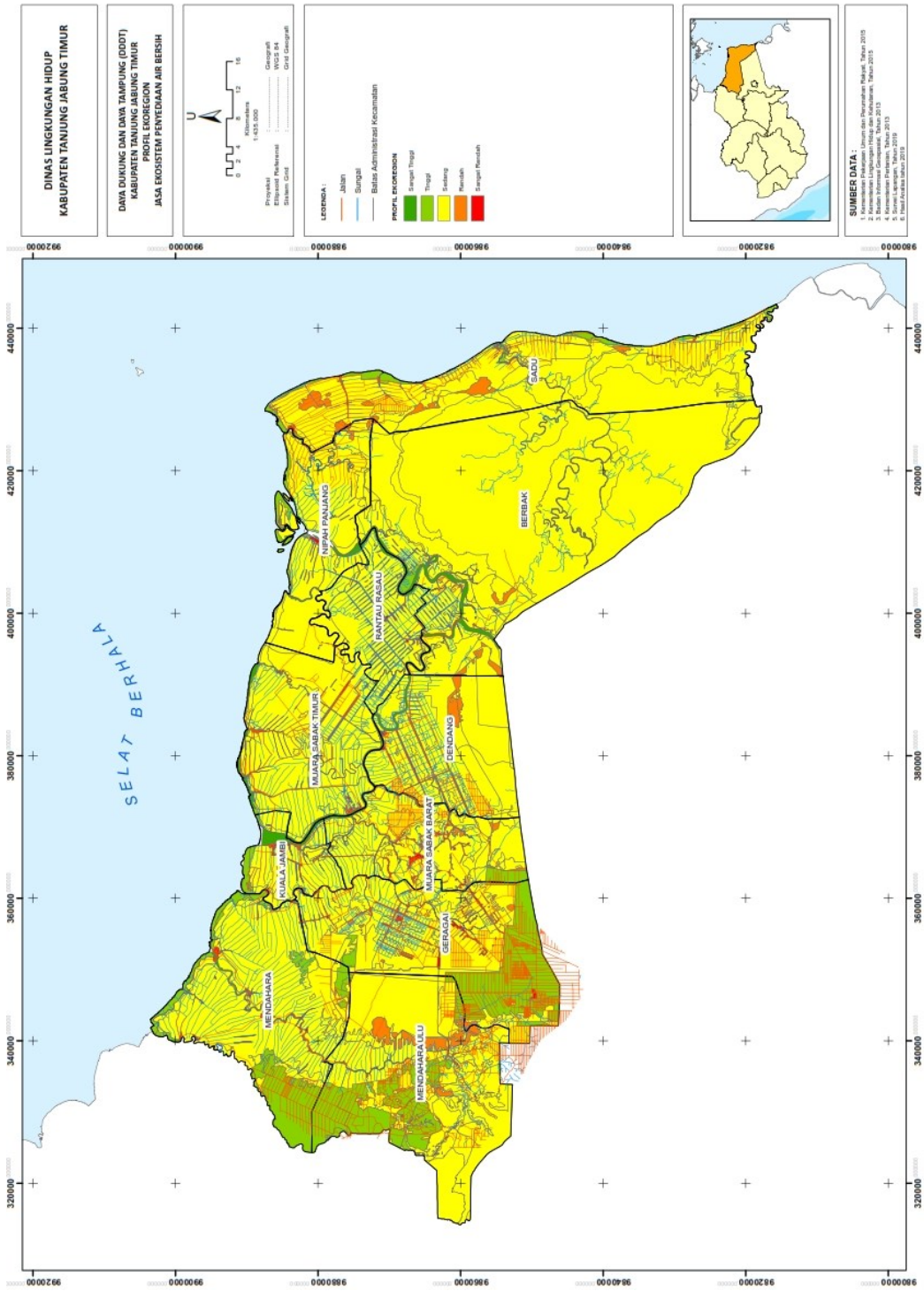
Tabel III.3.10
Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Penyediaan Sumberdaya Genetik Menurut Kecamatan

Kercamatan	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
BERBAK	541,302	0,107	668,935	0,132	18.102,704	3,563	2.700,793	0,532	97.393,342	19,169
DENDANG	781,014	0,154	966,168	0,190	26.344,358	5,185	551,585	0,109	5.649,334	1,112
GERAGAI	1.355,878	0,267	344,317	0,068	33.490,755	6,592	14.624,138	2,878	1.366,830	0,269
KUALA JAMBI	315,597	0,062	52,490	0,010	9.857,375	1,940	962,031	0,189	767,799	0,151
MENDAHARA	474,745	0,093		-	40.364,329	7,944	8.216,460	1,617	3.477,014	0,684
MENDAHARA ULU	378,378	0,074	2.618,501	0,515	32.569,037	6,410	13.082,204	2,575	10.696,851	2,105
MUARA SABAK BARAT	1.027,155	0,202	310,433	0,061	23.168,229	4,560	1.530,402	0,301	2.592,094	0,510
MUARA SABAK TIMUR	953,897	0,188		-	37.691,134	7,418	1.810,558	0,356	45,136	0,009
NIPAH PANJANG	450,069	0,089	179,876	0,035	26.636,527	5,243	603,388	0,119	1.419,981	0,279
RANTAU RASAU	1.659,766	0,327		-	17.965,206	3,536	713,622	0,140	7,820	0,002
SADU	402,704	0,079	1.972,125	0,388	37.505,847	7,382	171,177	0,034	20.549,468	4,045
Total	**8.340,505**	**1,642**	**7.112,845**	**1,400**	**303.695,501**	**59,773**	**44.966,358**	**8,850**	**143.965,669**	**28,335**

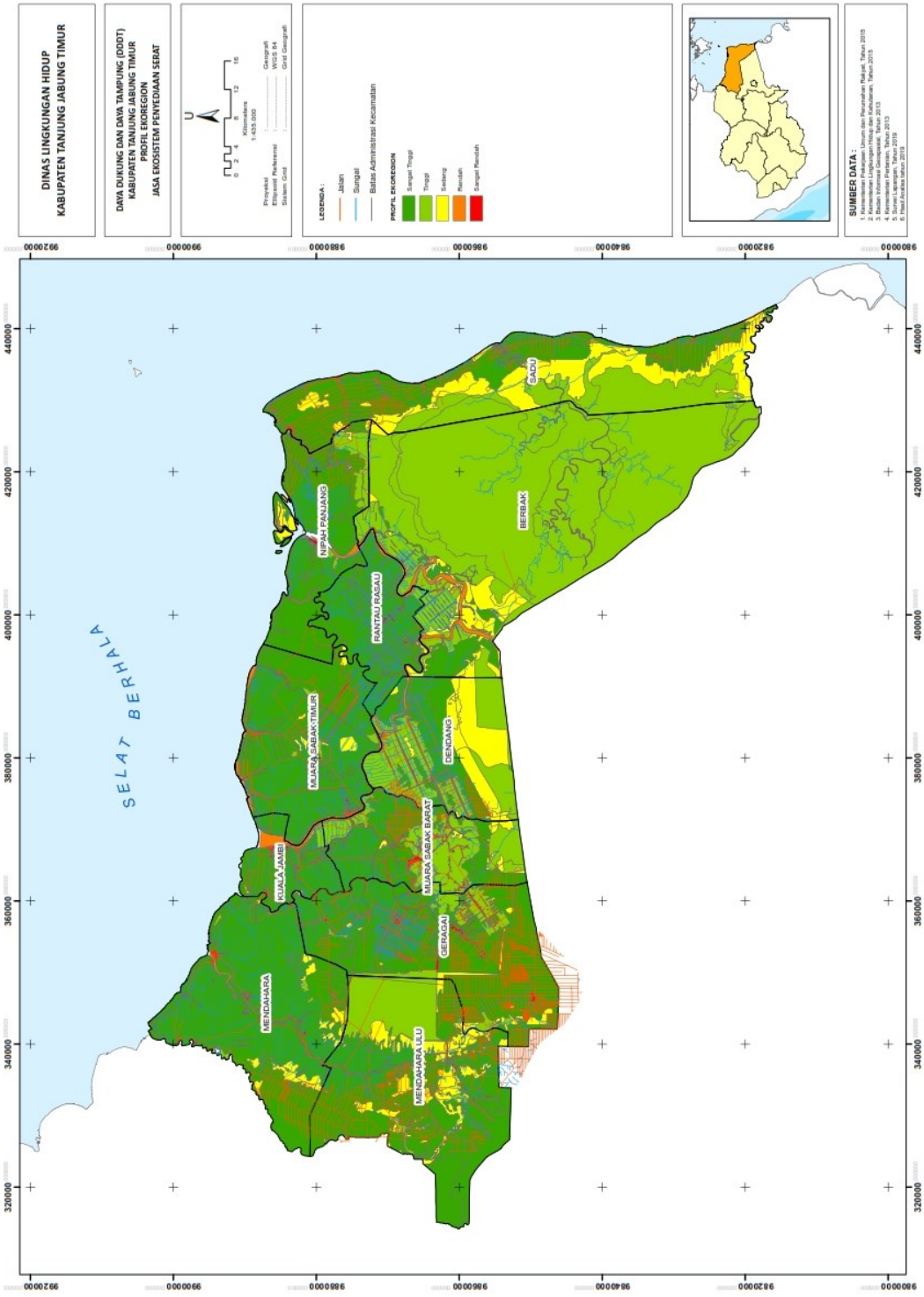
Sumber : Hasil Analisa 2019



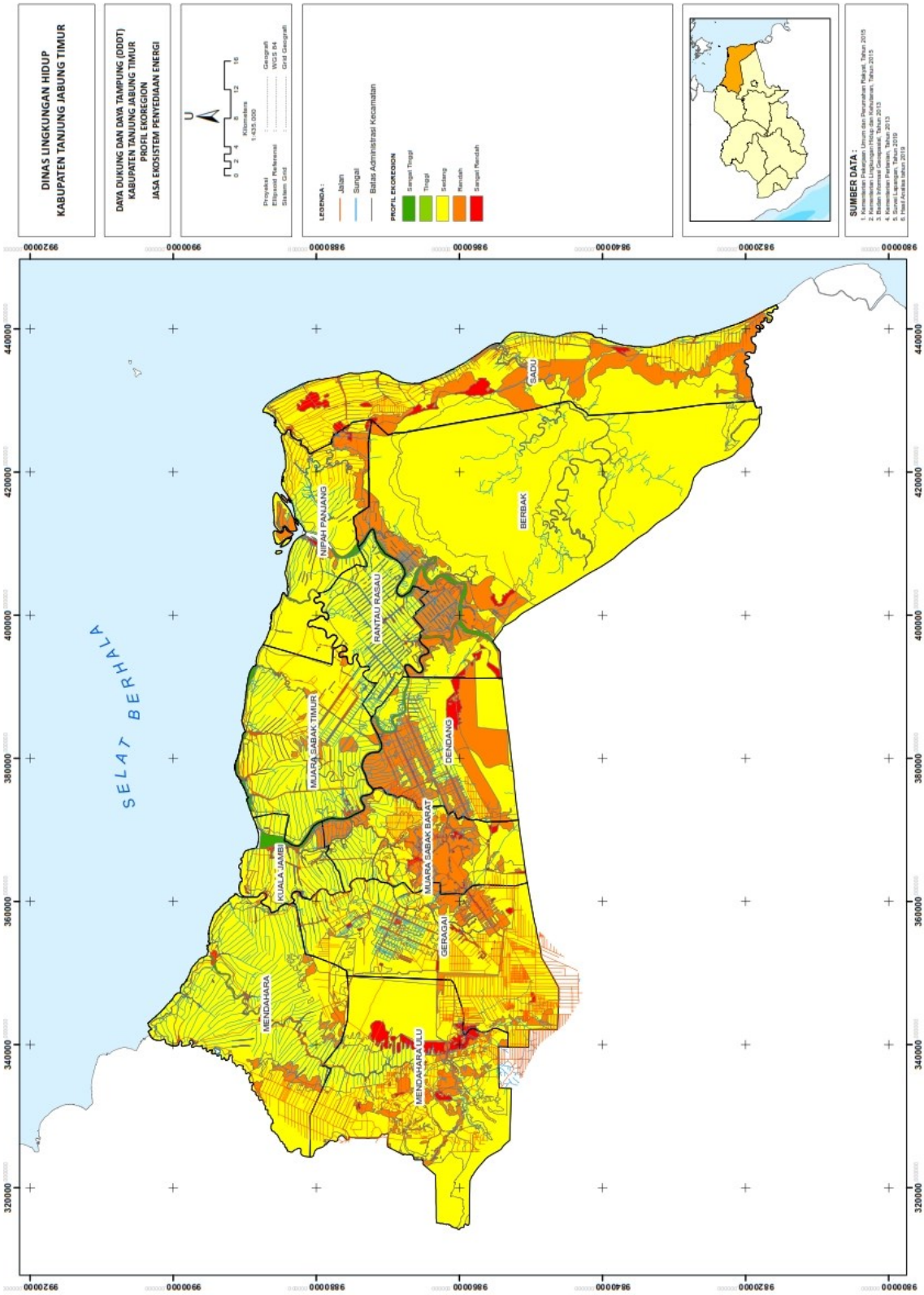
Gambar 3.3.1
Peta Jasa Ekosistem Untuk Penyediaan Pangan



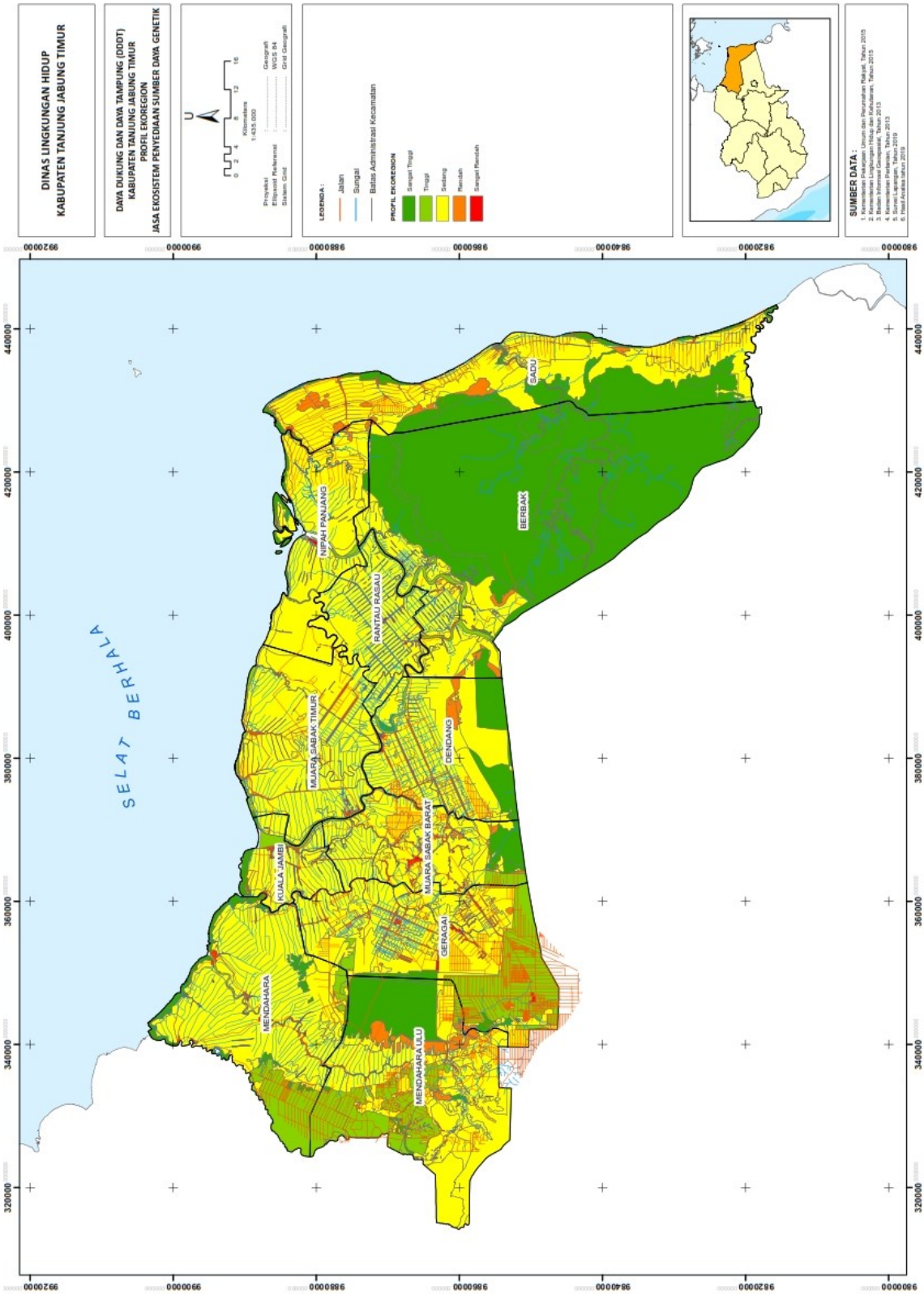
Gambar 3.3.2
Peta Jasa Ekosistem Untuk Penyediaan Air Bersih



Gambar 3.3.3
Peta Jasa Ekosistem Untuk Penyediaan Serat



Gambar 3.3.4
Peta Jasa Ekosistem Untuk Penyediaan Energi



Gambar 3.3.5
Peta Jasa Ekosistem Untuk Penyediaan Sumberdaya Genetik

B. Jasa Pengaturan

Dari hasil perhitungan interval tersebut didapatkan distribusi kondisi jasa ekosistem di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang diuraikan melalui tabel dan gambar peta berikut ini.

Tabel III.3.11
Distrubisi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Iklim

EKOREGION	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Dataran Aluvial	1.161,972	0,229	315,197	0,062	27.576,580	5,428	2.008,072	0,395	273,920	0,054
Lembah Antar Perbukitan		-		-	58,040	0,011		-		-
Dataran Fluviomarin		-	2,510	0,000	18,613	0,004		-	6,600	0,001
Lahan Gambut (Peat Land)	6.918,144	1,362	13.411,097	2,640	266.089,001	52,371	33.918,679	6,676	139.359,105	27,429
Pesisir (Coast)	260,389	0,051	2.433,998	0,479	9.942,917	1,957		-	4.326,044	0,851
Total	8.340,505	1,642	16.162,802	3,181	303.685,151	59,771	35.926,751	7,071	143.965,669	28,335

Sumber : Hasil Analisa 2019

Tabel III.3.12
Distrubisi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Tata Kelola Air dan Banjir

EKOREGION	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Dataran Aluvial	1.161,972	0,229	288,773	0,057	27.576,580	5,428	2.008,072	0,395	300,344	0,059
Lembah Antar Perbukitan		-		-	58,040	0,011		-		-
Dataran Fluviomarin		-		-	18,613	0,004		-	9,110	0,002
Lahan Gambut (Peat Land)	6.918,144	1,362	6.747,617	1,328	265.646,164	52,284	34.361,516	6,763	146.022,585	28,740
Pesisir (Coast)	260,389	0,051	76,455	0,015	9.865,980	1,942	76,937	0,015	6.683,587	1,315
Total	8.340,505	1,642	7.112,845	1,400	303.165,377	59,669	36.446,525	7,173	153.015,626	30,116

Sumber : Hasil Analisa 2019

Tabel III.3.13
Distrubisi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Bencana

EKOREGION	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Dataran Aluvial	8,826	0,002	1.441,919	0,284	27.576,580	5,428	2.034,496	0,400	273,920	0,054
Lembah Antar Perbukitan		-		-	58,040	0,011		-		-
Dataran Fluviomarin		-		-	18,613	0,004	2,510	0,000	6,600	0,001
Lahan Gambut (Peat Land)	66,262	0,013	13.599,499	2,677	266.098,290	52,373	40.572,870	7,986	139.359,105	27,429
Pesisir (Coast)		-	336,844	0,066	9.943,978	1,957	2.356,482	0,464	4.326,044	0,851
Total	75,088	0,015	15.378,262	3,027	303.695,501	59,773	44.966,358	8,850	143.965,669	28,335

Sumber : Hasil Analisa 2019

Tabel III.3.14
Distrubisi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Pemurnian Air

EKOREGION	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Dataran Aluvial	1.161,972	0,229	288,773	0,057	27.576,580	5,428		-	2.308,416	0,454
Lembah Antar Perbukitan		-		-	58,040	0,011		-		-
Dataran Fluviomarin		-		-	18,613	0,004		-	9,110	0,002
Lahan Gambut (Peat Land)	6.918,144	1,362	6.747,617	1,328	266.089,001	52,371	9,289	0,002	179.931,975	35,414
Pesisir (Coast)	260,389	0,051	76,455	0,015	9.942,917	1,957	1,061	0,000	6.682,526	1,315
Total	8.340,505	1,642	7.112,845	1,400	303.685,151	59,771	10,350	0,002	188.932,027	37,185

Sumber : Hasil Analisa 2019

Tabel III.3.15
Distrubisi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Pengaturan Limbah

EKOREGION	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Dataran Aluvial	1.161,972	0,229	288,773	0,057	29.584,652	5,823		-	300,344	0,059
Lembah Antar Perbukitan		-		-	58,040	0,011		-		-
Dataran Fluviomarin		-		-	18,613	0,004		-	9,110	0,002
Lahan Gambut (Peat Land)	6.918,144	1,362	6.747,617	1,328	299.574,132	58,962	442,837	0,087	146.013,296	28,738
Pesisir (Coast)	260,389	0,051	76,455	0,015	9.867,041	1,942	76,937	0,015	6.682,526	1,315
Total	8.340,505	1,642	7.112,845	1,400	339.102,478	66,742	519,774	0,102	153.005,276	30,114

Sumber : Hasil Analisa 2019

Tabel III.3.16
Distrubisi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Kualitas Udara

EKOREGION	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Dataran Aluvial	1.161,972	0,229	288,773	0,057	9.105,974	1,792	20.505,102	4,036	273,920	0,054
Lembah Antar Perbukitan		-		-		-	58,040	0,011		-
Dataran Fluviomarin		-		-	21,123	0,004		-	6,600	0,001
Lahan Gambut (Peat Land)	6.918,144	1,362	6.747,617	1,328	67.542,557	13,294	239.128,603	47,065	139.359,105	27,429
Pesisir (Coast)	260,389	0,051	76,455	0,015	3.717,123	0,732	8.583,337	1,689	4.326,044	0,851
Total	8.340,505	1,642	7.112,845	1,400	80.386,777	15,822	268.275,082	52,802	143.965,669	28,335

Sumber : Hasil Analisa 2019

Tabel III.3.17
Distrubisi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Penyerbukan Alami

EKOREGION	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Dataran Aluvial	31,307	0,006	1.445,862	0,285		-	29.584,652	5,823	273,920	0,054
Lembah Antar Perbukitan		-		-		-	58,040	0,011		-
Dataran Fluviomarin		-	2,510	0,000		-	18,613	0,004	6,600	0,001
Lahan Gambut (Peat Land)	75,551	0,015	20.253,690	3,986		-	300.007,680	59,047	139.359,105	27,429
Pesisir (Coast)	1,061	0,000	2.693,326	0,530		-	9.942,917	1,957	4.326,044	0,851
Total	107,919	0,021	24.395,388	4,801	-	-	339.611,902	66,842	143.965,669	28,335

Sumber : Hasil Analisa 2019

Tabel III.3.18
Distrubisi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Pengendalian Hama Penyakit

EKOREGION	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Dataran Aluvial	31,307	0,006	1.445,862	0,285	9.079,550	1,787	20.505,102	4,036	273,920	0,054
Lembah Antar Perbukitan		-		-		-	58,040	0,011		-
Dataran Fluviomarin		-	2,510	0,000	18,613	0,004		-	6,600	0,001
Lahan Gambut (Peat Land)	66,262	0,013	20.262,979	3,988	60.879,077	11,982	239.128,603	47,065	139.359,105	27,429
Pesisir (Coast)		-	2.694,387	0,530	1.359,580	0,268	8.583,337	1,689	4.326,044	0,851
Total	97,569	0,019	24.405,738	4,804	71.336,820	14,040	268.275,082	52,802	143.965,669	28,335

Sumber : Hasil Analisa 2019

Tabel III.3.19
Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim Menurut Kecamatan

Kercamatan	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
BERBAK	541,302	0,107	3.369,728	0,663	18.102,704	3,563		-	97.393,342	19,169
DENDANG	781,014	0,154	1.517,753	0,299	26.344,358	5,185		-	5.649,334	1,112
GERAGAI	1.355,878	0,267	484,500	0,095	33.490,755	6,592	14.483,955	2,851	1.366,830	0,269
KUALA JAMBI	315,597	0,062	1.014,521	0,200	9.857,375	1,940		-	767,799	0,151
MENDAHARA	474,745	0,093	712,487	0,140	40.364,329	7,944	7.503,973	1,477	3.477,014	0,684
MENDAHARA ULU	378,378	0,074	2.760,287	0,543	32.569,037	6,410	12.940,418	2,547	10.696,851	2,105
MUARA SABAK BARAT	1.027,155	0,202	842,430	0,166	23.168,229	4,560	998,405	0,197	2.592,094	0,510
MUARA SABAK TIMUR	953,897	0,188	1.820,908	0,358	37.680,784	7,416		-	45,136	0,009
NIPAH PANJANG	450,069	0,089	783,264	0,154	26.636,527	5,243		-	1.419,981	0,279
RANTAU RASAU	1.659,766	0,327	713,622	0,140	17.965,206	3,536		-	7,820	0,002
SADU	402,704	0,079	2.143,302	0,422	37.505,847	7,382		-	20.549,468	4,045
Total	**8.340,505**	**1,642**	**16.162,802**	**3,181**	**303.685,151**	**59,771**	**35.926,751**	**7,071**	**143.965,669**	**28,335**

Sumber : Hasil Analisa 2019

Tabel III.3.20
Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air Menurut Kecamatan

Kercamatan	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
BERBAK	541,302	0,107	668,935	0,132	17.664,853	3,477	437,851	0,086	100.094,135	19,700
DENDANG	781,014	0,154	966,168	0,190	26.344,358	5,185		-	6.200,919	1,220
GERAGAI	1.355,878	0,267	344,317	0,068	33.490,755	6,592	14.483,955	2,851	1.507,013	0,297
KUALA JAMBI	315,597	0,062	52,490	0,010	9.857,375	1,940		-	1.729,830	0,340
MENDAHARA	474,745	0,093		-	40.287,392	7,929	7.580,910	1,492	4.189,501	0,825
MENDAHARA ULU	378,378	0,074	2.618,501	0,515	32.564,051	6,409	12.945,404	2,548	10.838,637	2,133
MUARA SABAK BARAT	1.027,155	0,202	310,433	0,061	23.168,229	4,560	998,405	0,197	3.124,091	0,615
MUARA SABAK TIMUR	953,897	0,188		-	37.680,784	7,416		-	1.866,044	0,367
NIPAH PANJANG	450,069	0,089	179,876	0,035	26.636,527	5,243		-	2.023,369	0,398
RANTAU RASAU	1.659,766	0,327		-	17.965,206	3,536		-	721,442	0,142
SADU	402,704	0,079	1.972,125	0,388	37.505,847	7,382		-	20.720,645	4,078
Total	**8.340,505**	**1,642**	**7.112,845**	**1,400**	**303.165,377**	**59,669**	**36.446,525**	**7,173**	**153.015,626**	**30,116**

Sumber : Hasil Analisa 2019

Tabel III.3.21
Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Pengaturan Bencana Menurut Kecamatan

Kercamatan	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
BERBAK		-	1.210,237	0,238	18.102,704	3,563	2.700,793	0,532	97.393,342	19,169
DENDANG	66,262	0,013	1.680,920	0,331	26.344,358	5,185	551,585	0,109	5.649,334	1,112
GERAGAI		-	1.700,195	0,335	33.490,755	6,592	14.624,138	2,878	1.366,830	0,269
KUALA JAMBI		-	368,087	0,072	9.857,375	1,940	962,031	0,189	767,799	0,151
MENDAHARA		-	474,745	0,093	40.364,329	7,944	8.216,460	1,617	3.477,014	0,684
MENDAHARA ULU	8,826	0,002	2.988,053	0,588	32.569,037	6,410	13.082,204	2,575	10.696,851	2,105
MUARA SABAK BARAT		-	1.337,588	0,263	23.168,229	4,560	1.530,402	0,301	2.592,094	0,510
MUARA SABAK TIMUR		-	953,897	0,188	37.691,134	7,418	1.810,558	0,356	45,136	0,009
NIPAH PANJANG		-	629,945	0,124	26.636,527	5,243	603,388	0,119	1.419,981	0,279
RANTAU RASAU		-	1.659,766	0,327	17.965,206	3,536	713,622	0,140	7,820	0,002
SADU		-	2.374,829	0,467	37.505,847	7,382	171,177	0,034	20.549,468	4,045
Total	**75,088**	**0,015**	**15.378,262**	**3,027**	**303.695,501**	**59,773**	**44.966,358**	**8,850**	**143.965,669**	**28,335**

Sumber : Hasil Analisa 2019

Tabel III.3.22
Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Pemurnian Air Menurut Kecamatan

Kercamatan	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
BERBAK	541,302	0,107	668,935	0,132	18.102,704	3,563		-	100.094,135	19,700
DENDANG	781,014	0,154	966,168	0,190	26.344,358	5,185		-	6.200,919	1,220
GERAGAI	1.355,878	0,267	344,317	0,068	33.490,755	6,592		-	15.990,968	3,147
KUALA JAMBI	315,597	0,062	52,490	0,010	9.857,375	1,940		-	1.729,830	0,340
MENDAHARA	474,745	0,093		-	40.364,329	7,944		-	11.693,474	2,301
MENDAHARA ULU	378,378	0,074	2.618,501	0,515	32.569,037	6,410		-	23.779,055	4,680
MUARA SABAK BARAT	1.027,155	0,202	310,433	0,061	23.168,229	4,560		-	4.122,496	0,811
MUARA SABAK TIMUR	953,897	0,188		-	37.680,784	7,416	10,350	0,002	1.855,694	0,365
NIPAH PANJANG	450,069	0,089	179,876	0,035	26.636,527	5,243		-	2.023,369	0,398
RANTAU RASAU	1.659,766	0,327		-	17.965,206	3,536		-	721,442	0,142
SADU	402,704	0,079	1.972,125	0,388	37.505,847	7,382		-	20.720,645	4,078
Total	**8.340,505**	**1,642**	**7.112,845**	**1,400**	**303.685,151**	**59,771**	**10,350**	**0,002**	**188.932,027**	**37,185**

Tabel III.3.23
Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Pengaturan Limbah Menurut Kecamatan

Kercamatan	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
BERBAK	541,302	0,107	668,935	0,132	17.664,853	3,477	437,851	0,086	100.094,135	19,700
DENDANG	781,014	0,154	966,168	0,190	26.344,358	5,185		-	6.200,919	1,220
GERAGAI	1.355,878	0,267	344,317	0,068	47.974,710	9,442		-	1.507,013	0,297
KUALA JAMBI	315,597	0,062	52,490	0,010	9.857,375	1,940		-	1.729,830	0,340
MENDAHARA	474,745	0,093		-	47.791,365	9,406	76,937	0,015	4.189,501	0,825
MENDAHARA ULU	378,378	0,074	2.618,501	0,515	45.504,469	8,956	4,986	0,001	10.838,637	2,133
MUARA SABAK BARAT	1.027,155	0,202	310,433	0,061	24.166,634	4,756		-	3.124,091	0,615
MUARA SABAK TIMUR	953,897	0,188		-	37.691,134	7,418		-	1.855,694	0,365
NIPAH PANJANG	450,069	0,089	179,876	0,035	26.636,527	5,243		-	2.023,369	0,398
RANTAU RASAU	1.659,766	0,327		-	17.965,206	3,536		-	721,442	0,142
SADU	402,704	0,079	1.972,125	0,388	37.505,847	7,382		-	20.720,645	4,078
Total	**8.340,505**	**1,642**	**7.112,845**	**1,400**	**339.102,478**	**66,742**	**519,774**	**0,102**	**153.005,276**	**30,114**

Sumber : Hasil Analisa 2019

Tabel III.3.24
Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Kualitas Udara Menurut Kecamatan

Kercamatan	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
BERBAK	541,302	0,107	668,935	0,132	16.044,021	3,158	4.759,476	0,937	97.393,342	19,169
DENDANG	781,014	0,1537184	966,168	0,1901603	16.525,427	3,252519	10.370,516	2,0411152	5.649,334	1,1118966
GERAGAI	1.355,878	0,2668626	344,317	0,0677681	4.619,113	0,9091295	43.495,780	8,5607985	1.366,830	0,2690182
KUALA JAMBI	315,597	0,062	52,490	0,010	1.349,012	0,266	9.470,394	1,864	767,799	0,151
MENDAHARA	474,745	0,093		-	3.181,962	0,626	45.398,827	8,935	3.477,014	0,684
MENDAHARA ULU	378,378	0,074	2.618,501	0,515	5.420,739	1,067	40.230,502	7,918	10.696,851	2,105
MUARA SABAK BARAT	1.027,155	0,202	310,433	0,061	9.895,074	1,948	14.803,557	2,914	2.592,094	0,510
MUARA SABAK TIMUR	953,897	0,188		-	3.371,506	0,664	36.130,186	7,111	45,136	0,0088836
NIPAH PANJANG	450,069	0,089	179,876	0,035	4.163,273	0,819	23.076,642	4,542	1.419,981	0,2794793
RANTAU RASAU	1.659,766	0,327		-	1.194,390	0,235	17.484,438	3,441	7,820	0,0015391
SADU	402,704	0,079	1.972,125	0,388	14.622,260	2,878	23.054,764	4,5376169	20.549,468	4,0445269
Total	8.340,505	1,642	7.112,845	1,400	80.386,777	15,822	268.275,082	52,802	143.965,669	28,335

Sumber : Hasil Analisa 2019

Tabel III.3.25
Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Penyerbukan Alami Menurut Kecamatan

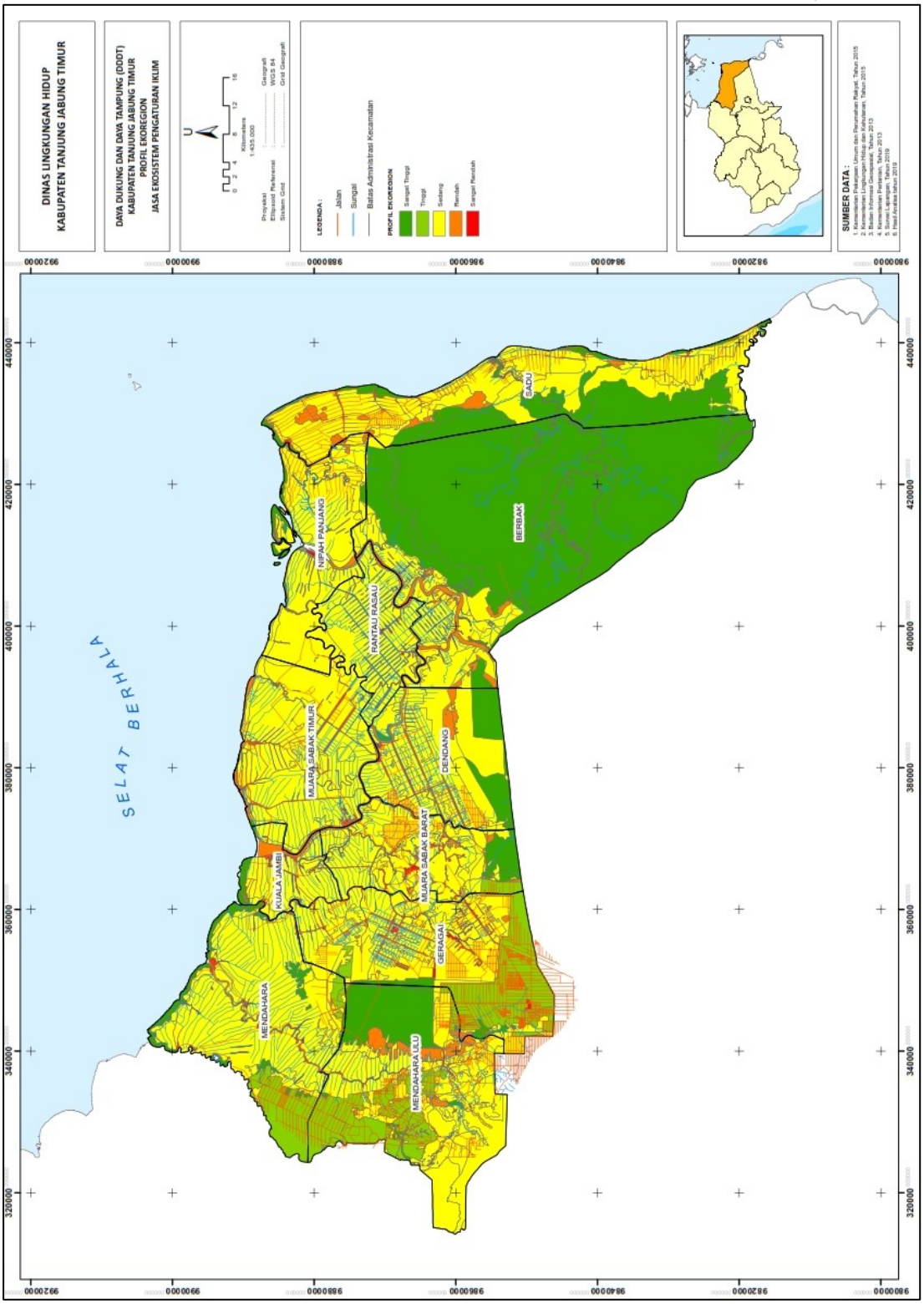
Kercamatan	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
BERBAK		-	3.911,030	0,770		-	18.102,704	3,563	97.393,342	19,169
DENDANG	66,262	0,0130416	2.232,505	0,4393995		0	26.344,358	5,1850717	5.649,334	1,1118966
GERAGAI		0	1.840,378	0,3622215		0	47.974,710	9,4423372	1.366,830	0,2690182
KUALA JAMBI		-	1.330,118	0,262		-	9.857,375	1,940	767,799	0,151
MENDAHARA		-	1.187,232	0,234		-	47.868,302	9,421	3.477,014	0,684
MENDAHARA ULU	31,307	0,006	3.107,358	0,612		-	45.509,455	8,957	10.696,851	2,105
MUARA SABAK BARAT		-	1.869,585	0,368		-	24.166,634	4,756	2.592,094	0,510
MUARA SABAK TIMUR	10,350	0,002	2.764,455	0,544		-	37.680,784	7,416	45,136	0,0088836
NIPAH PANJANG		-	1.233,333	0,243		-	26.636,527	5,243	1.419,981	0,2794793
RANTAU RASAU		-	2.373,388	0,467		-	17.965,206	3,536	7,820	0,0015391
SADU		-	2.546,006	0,501		-	37.505,847	7,3818655	20.549,468	4,0445269
Total	107,919	0,021	24.395,388	4,801	-	-	339.611,902	66,842	143.965,669	28,335

Sumber : Hasil Analisa 2019

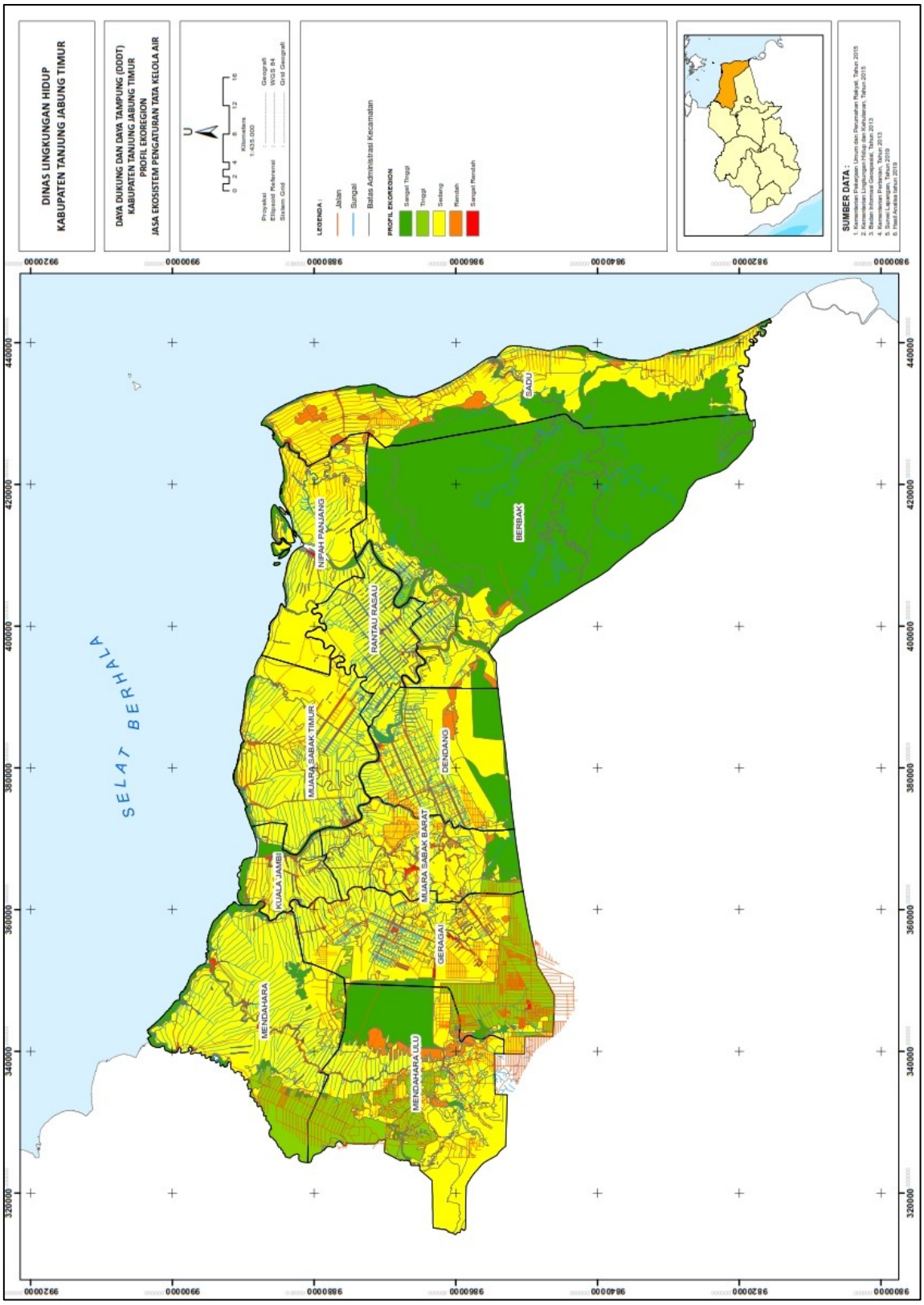
Tabel III.3.26
Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Pengendalian Hama Menurut Kecamatan

Kercamatan	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
BERBAK		-	3.911,030	0,770	13.343,228	2,626	4.759,476	0,937	97.393,342	19,169
DENDANG	66,262	0,0130416	2.232,505	0,4393995	15.973,842	3,1439565	10.370,516	2,0411152	5.649,334	1,1118966
GERAGAI		0	1.840,378	0,3622215	4.478,930	0,8815388	43.495,780	8,5607985	1.366,830	0,2690182
KUALA JAMBI		-	1.330,118	0,262	386,981	0,076	9.470,394	1,864	767,799	0,151
MENDAHARA		-	1.187,232	0,234	2.469,475	0,486	45.398,827	8,935	3.477,014	0,684
MENDAHARA ULU	31,307	0,006	3.107,358	0,612	5.278,953	1,039	40.230,502	7,918	10.696,851	2,105
MUARA SABAK BARAT		-	1.869,585	0,368	9.363,077	1,843	14.803,557	2,914	2.592,094	0,510
MUARA SABAK TIMUR		-	2.774,805	0,546	1.550,598	0,305	36.130,186	7,111	45,136	0,0088836
NIPAH PANJANG		-	1.233,333	0,243	3.559,885	0,701	23.076,642	4,542	1.419,981	0,2794793
RANTAU RASAU		-	2.373,388	0,467	480,768	0,095	17.484,438	3,441	7,820	0,0015391
SADU		-	2.546,006	0,501	14.451,083	2,844	23.054,764	4,5376169	20.549,468	4,0445269
Total	97,569	0,019	24.405,738	4,804	71.336,820	14,040	268.275,082	52,802	143.965,669	28,335

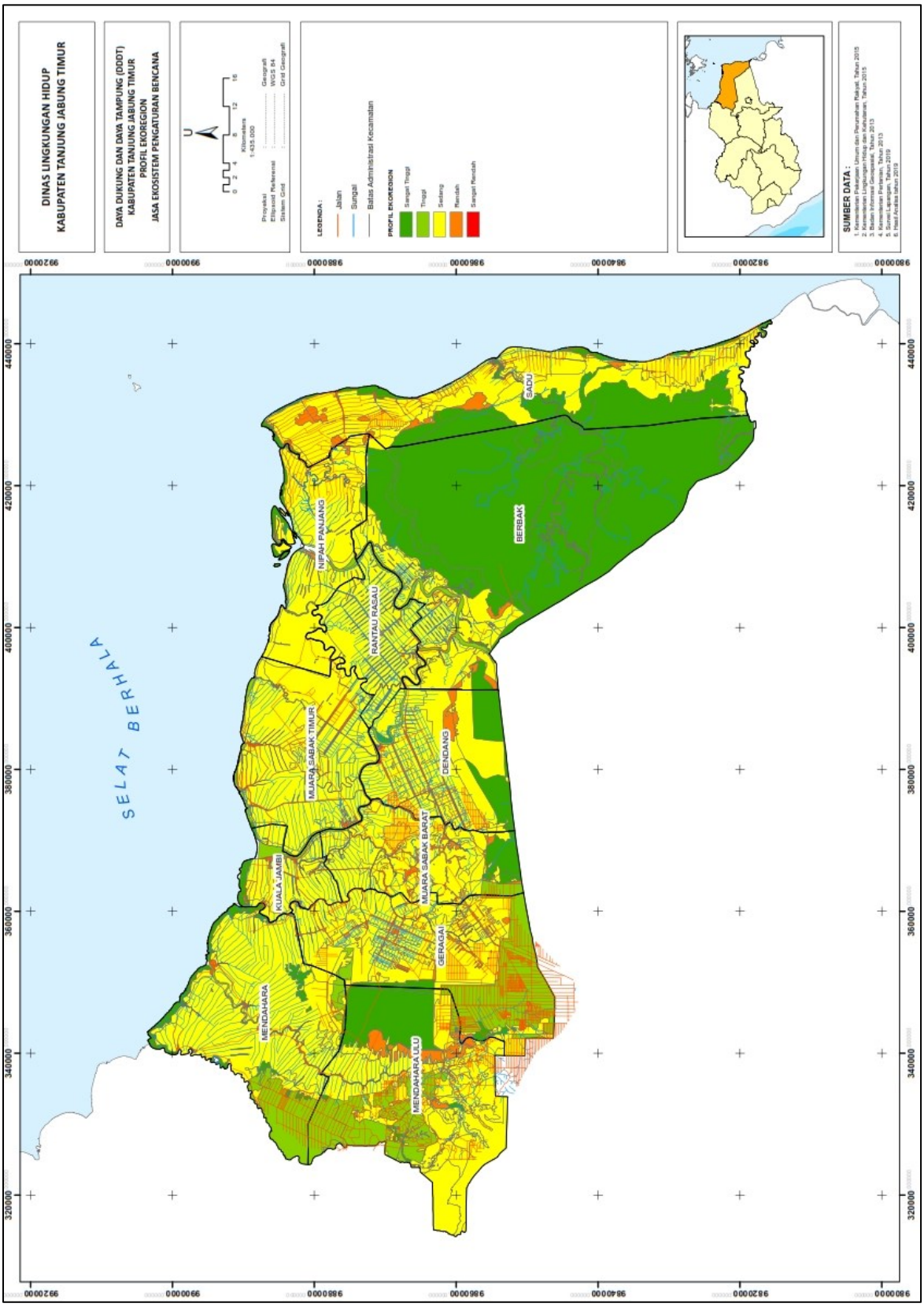
Sumber : Hasil Analisa 2019



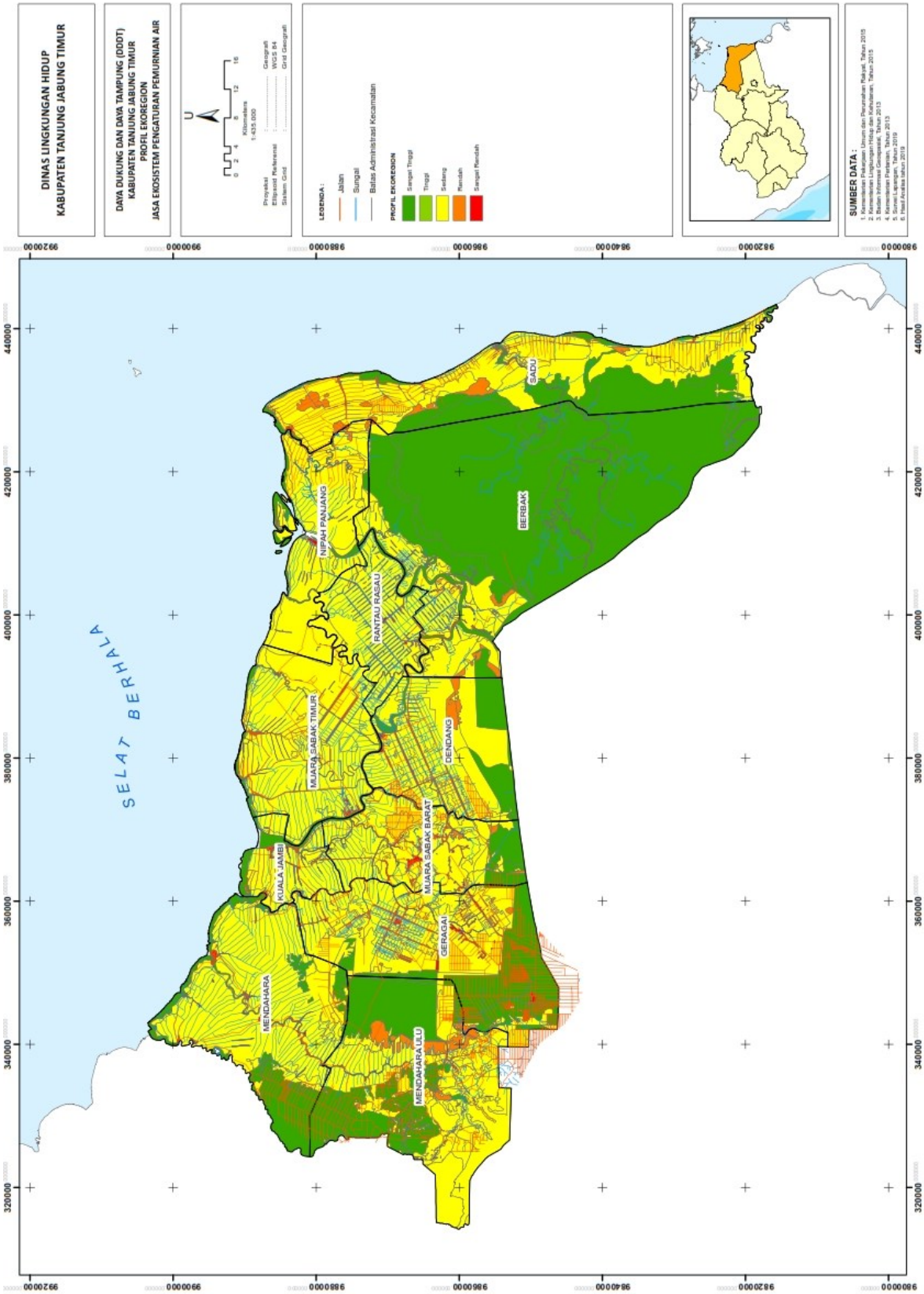
Gambar 3.3.6
Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim



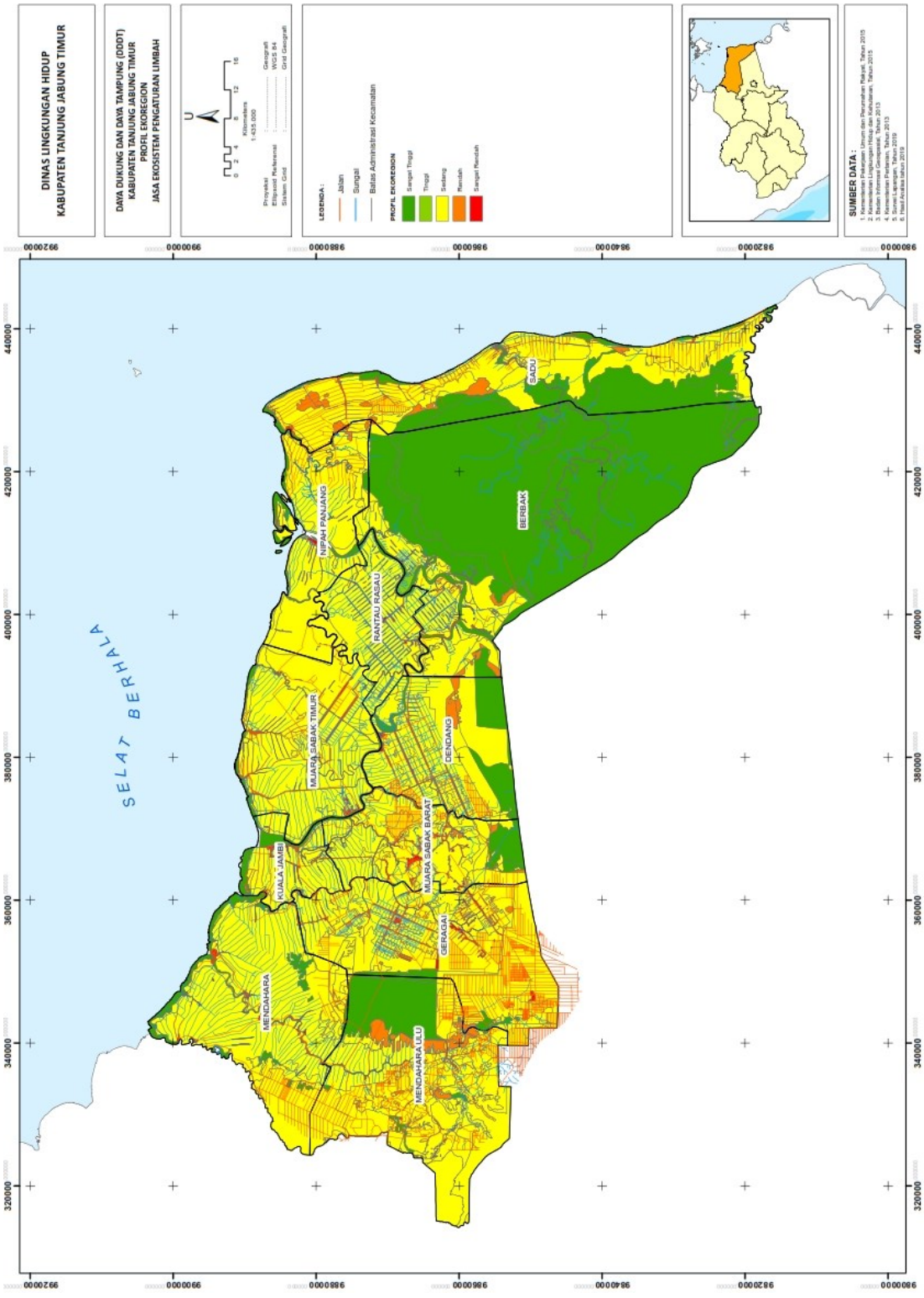
Gambar 3.3.7
Peta Jasa Ekosistem Tata Kelola Air



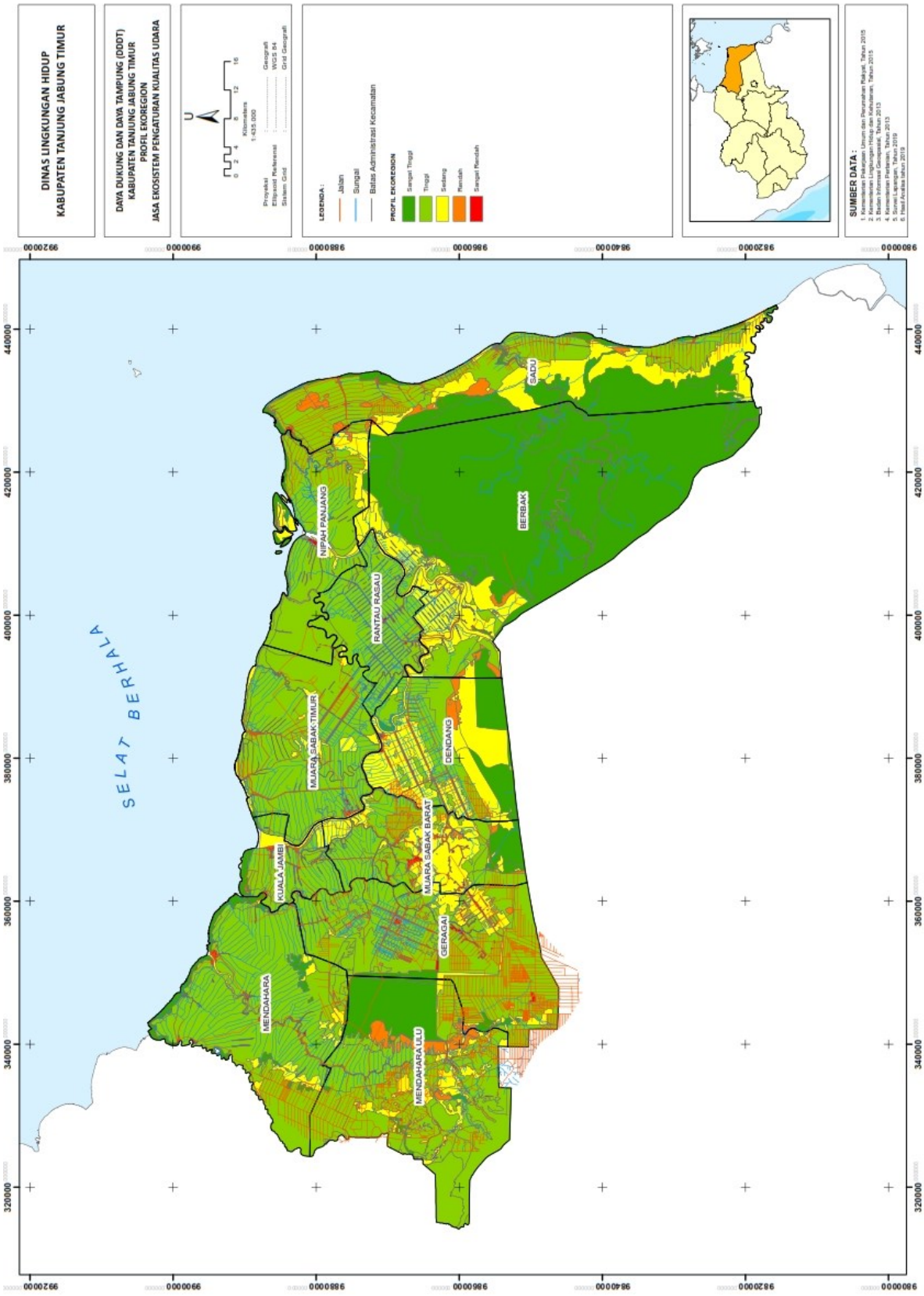
Gambar 3.3.8
Peta Jasa Ekosistem Bencana



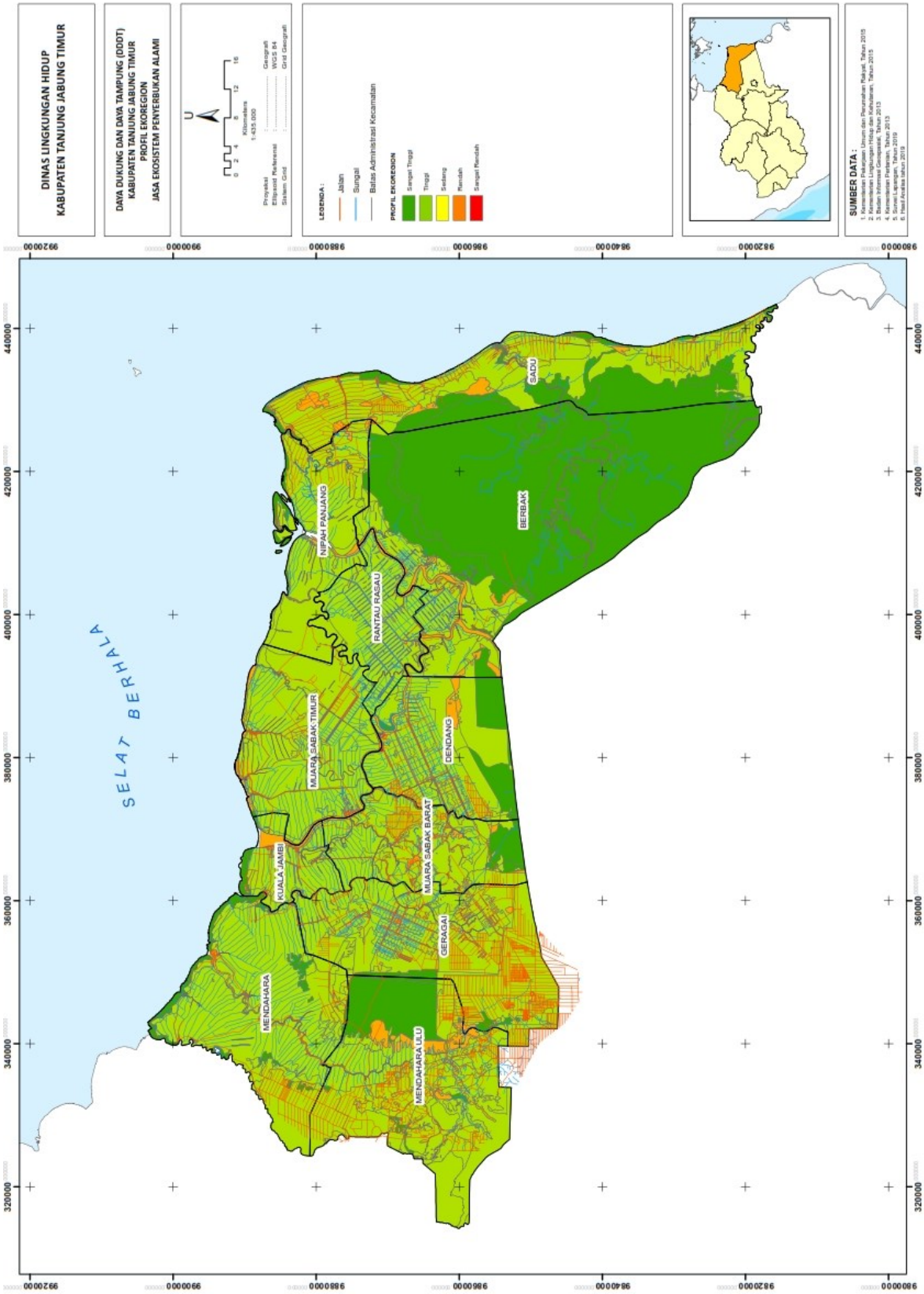
Gambar 3.3.9
Peta Jasa Ekosistem Pemurnian Air



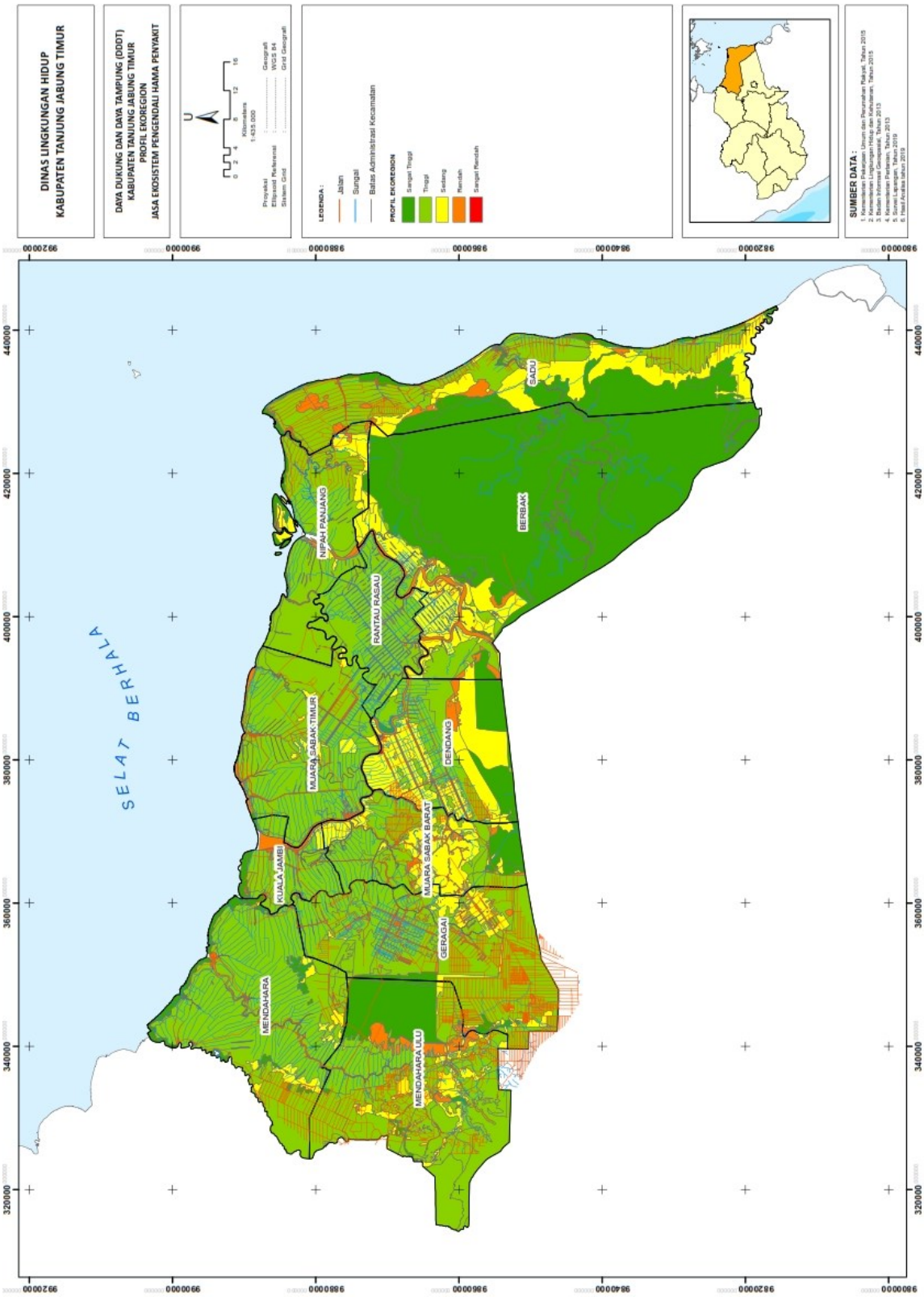
Gambar 3.3.10
Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Limbah



Gambar 3.3.11
Peta Jasa Ekosistem Kualitas Udara



Gambar 3.3.12
Peta Jasa Ekosistem Penyerbukan Alami



Gambar 3.3.13
Peta Jasa Ekosistem Pengendalian Hama Penyakit

C. Jasa Budaya

Dari hasil perhitungan interval tersebut didapatkan distribusi kondisi jasa ekosistem di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang diuraikan melalui tabel dan gambar peta berikut ini.

Tabel III.3.27
Distrubisi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Tempat Tinggal

EKOREGION	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Dataran Aluvial	8,826	0,002	1.748,864	0,344	20.827,927	4,099	7.619,459	1,500	1.130,665	0,223
Lembah Antar Perbukitan		-		-	58,040	0,011		-		-
Dataran Fluviomarin		-	25,213	0,005	2,510	0,000		-		-
Lahan Gambut (Peat Land)	66,262	0,013	47.357,082	9,321	381.557,705	75,098	23.863,095	4,697	6.851,882	1,349
Pesisir (Coast)		-	5.493,040	1,081	10.958,646	2,157	251,273	0,049	260,389	0,051
Total	75,088	0,015	54.624,199	10,751	413.404,828	81,366	31.733,827	6,246	8.242,936	1,622

Sumber : Hasil Analisa 2019

Tabel III.3.28
Distrubisi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Rekreasi

EKOREGION	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Dataran Aluvial	1.757,690	0,346	29.255,226	5,758	22,481	0,004	273,920	0,054	26,424	0,005
Lembah Antar Perbukitan		-	58,040	0,011		-		-		-
Dataran Fluviomarin	18,613	0,004		-		-		-	9,110	0,002
Lahan Gambut (Peat Land)	43.829,861	8,627	269.410,032	53,025		-	136.217,748	26,810	10.238,385	2,015
Pesisir (Coast)	1.184,762	0,233	9.019,123	1,775		-	95,764	0,019	6.663,699	1,312
Total	46.790,926	9,209	307.742,421	60,570	22,481	0,004	136.587,432	26,883	16.937,618	3,334

Sumber : Hasil Analisa 2019

Tabel III.3.29
Distrubisi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Estetika

EKOREGION	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Dataran Aluvial	1.757,690	0,346	29.255,226	5,758	22,481	0,004	273,920	0,054	26,424	0,005
Lembah Antar Perbukitan		-	58,040	0,011		-		-		-
Dataran Fluviomarin	18,613	0,004		-		-		-	9,110	0,002
Lahan Gambut (Peat Land)	43.829,861	8,627	269.410,032	53,025		-	136.217,748	26,810	10.238,385	2,015
Pesisir (Coast)	1.184,762	0,233	9.019,123	1,775		-	95,764	0,019	6.663,699	1,312
Total	46.790,926	9,209	307.742,421	60,570	22,481	0,004	136.587,432	26,883	16.937,618	3,334

Sumber : Hasil Analisa 2019

Tabel III.3.30
Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Tempat Tinggal Menurut Kecamatan

Kercamatan	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
BERBAK		-	6.508,468	1,281	104.826,670	20,632	7.530,636	1,482	541,302	0,107
DENDANG	66,262	0,0130416	8.615,527	1,6956999	16.571,435	3,2615742	8.324,483	1,6384169	714,752	0,1406768
GERAGAI		0	1.653,744	0,3254883	45.002,793	8,8574073	3.169,503	0,6238186	1.355,878	0,2668626
KUALA JAMBI		-	869,787	0,171	10.432,425	2,053	337,483	0,066	315,597	0,062
MENDAHARA		-	5.426,798	1,068	46.630,338	9,178	0,667	0,000	474,745	0,093
MENDAHARA ULU	8,826	0,002	7.948,526	1,564	51.031,627	10,044	8,921	0,002	347,071	0,068
MUARA SABAK BARAT		-	923,081	0,182	17.927,648	3,529	8.750,429	1,722	1.027,155	0,202
MUARA SABAK TIMUR		-	927,901	0,183	37.940,755	7,467	678,172	0,133	953,897	0,1877451
NIPAH PANJANG		-	2.381,267	0,469	23.897,316	4,703	2.561,189	0,504	450,069	0,0885822
RANTAU RASAU		-	151,788	0,030	18.205,880	3,583	328,980	0,065	1.659,766	0,3266736
SADU		-	19.217,312	3,782	40.937,941	8,057	43,364	0,0085349	402,704	0,0792598
Total	75,088	0,015	54.624,199	10,751	413.404,828	81,366	31.733,827	6,246	8.242,936	1,622

Sumber : Hasil Analisa 2019

Tabel III.3.31
Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Rekreasi Menurut Kecamatan

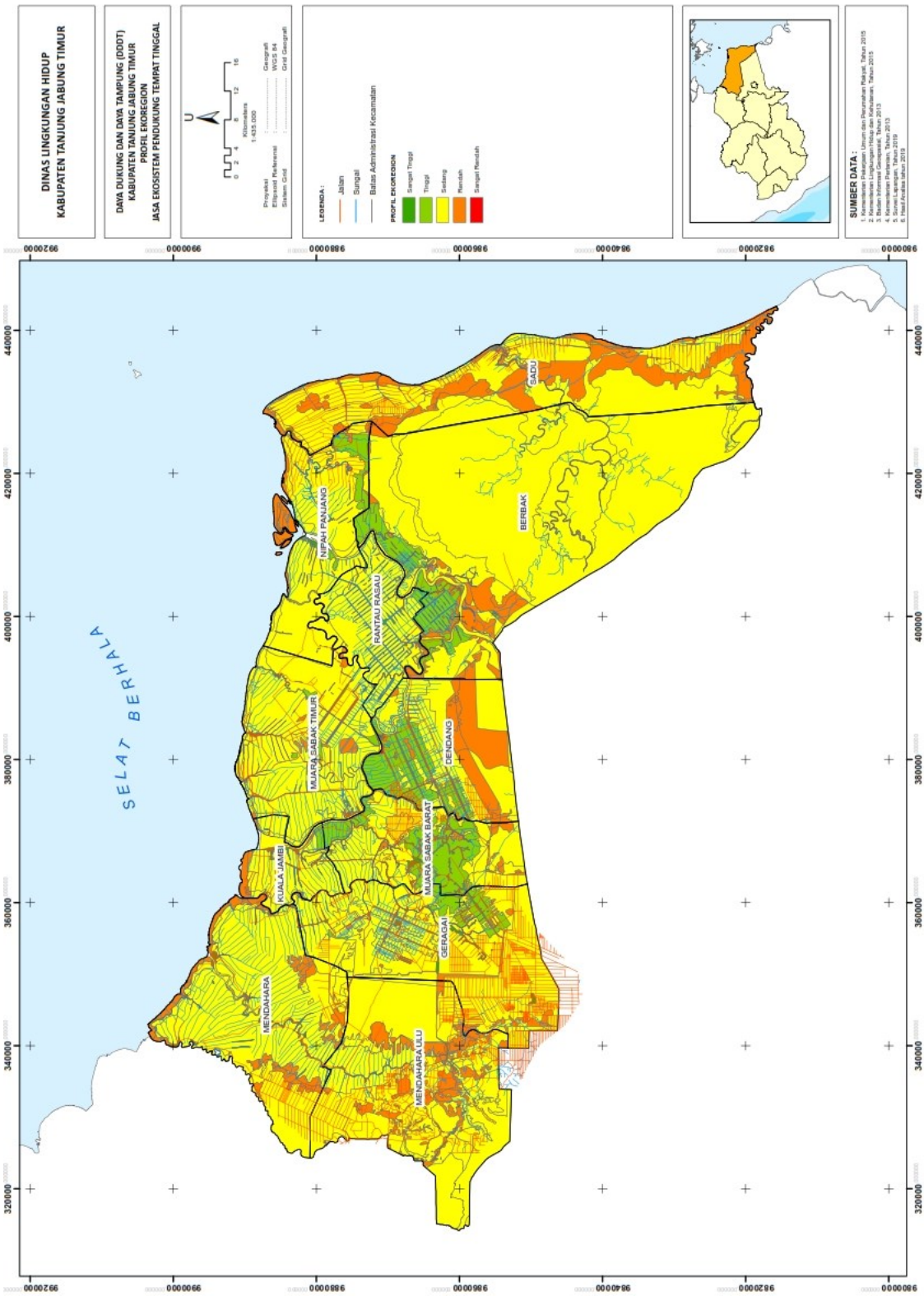
Kercamatan	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
BERBAK	6.481,527	1,276	12.393,563	2,439		-	97.804,252	19,250	2.727,734	0,537
DENDANG	8.681,789	1,7087415	19.409,751	3,8202089		0	5.649,334	1,1118966	551,585	0,1085624
GERAGAI	1.653,744	0,3254883	48.021,161	9,4514797		0	1.366,830	0,2690182	140,183	0,0275907
KUALA JAMBI	101,988	0,020	10.123,474	1,992		-		-	1.729,830	0,340
MENDAHARA	2.468,808	0,486	45.797,302	9,014	22,481	0,004	595,961	0,117	3.670,477	0,722
MENDAHARA ULU	7.897,359	1,554	40.581,508	7,987		-	10.641,844	2,095	201,779	0,040
MUARA SABAK BARAT	923,081	0,182	24.581,141	4,838		-	2.592,094	0,510	531,997	0,105
MUARA SABAK TIMUR	872,426	0,172	37.772,605	7,434		-	0,011	0,000	1.855,683	0,3652338
NIPAH PANJANG	1.178,572	0,232	26.087,900	5,135		-	217,286	0,043	1.806,083	0,3554716
RANTAU RASAU	151,788	0,030	19.473,184	3,833		-	7,820	0,002	713,622	0,1404544
SADU	16.379,844	3,224	23.500,832	4,625		-	17.712,000	3,4860592	3.008,645	0,5921587
Total	46.790,926	9,209	307.742,421	60,570	22,481	0,004	136.587,432	26,883	16.937,618	3,334

Sumber : Hasil Analisa 2019

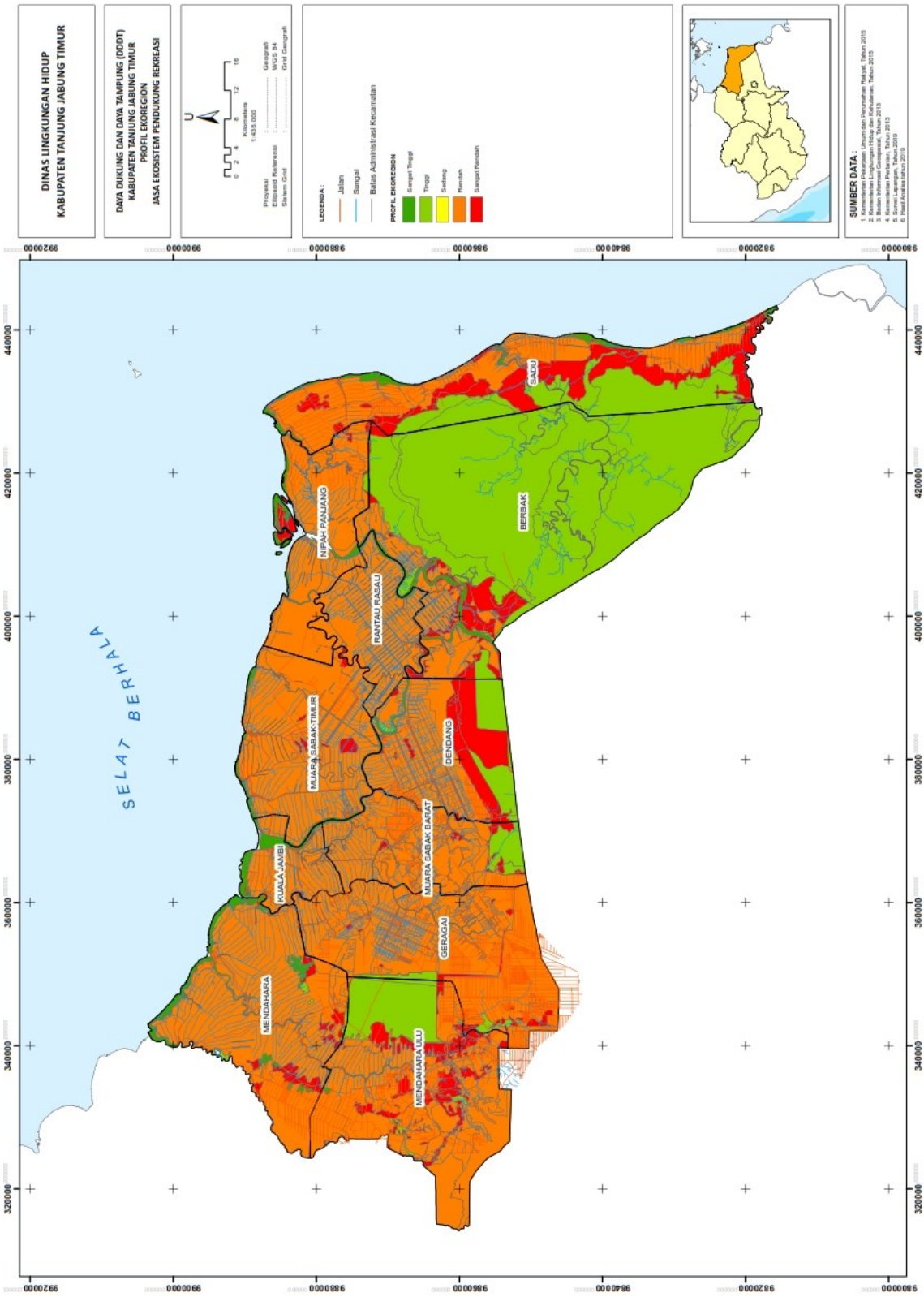
Tabel III.3.32
Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Estetika Menurut Kecamatan

Kercamatan	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
BERBAK	6.481,527	1,276	12.393,563	2,439		-	97.804,252	19,250	2.727,734	0,537
DENDANG	8.681,789	1,7087415	19.409,751	3,8202089		0	5.649,334	1,1118966	551,585	0,1085624
GERAGAI	1.653,744	0,3254883	48.021,161	9,4514797		0	1.366,830	0,2690182	140,183	0,0275907
KUALA JAMBI	101,988	0,020	10.123,474	1,992		-	-	-	1.729,830	0,340
MENDAHARA	2.468,808	0,486	45.797,302	9,014		-	595,961	0,117	3.670,477	0,722
MENDAHARA ULU	7.897,359	1,554	40.581,508	7,987	22,481	0,004	10.641,844	2,095	201,779	0,040
MUARA SABAK BARAT	923,081	0,182	24.581,141	4,838		-	2.592,094	0,510	531,997	0,105
MUARA SABAK TIMUR	872,426	0,172	37.772,605	7,434		-	0,011	0,000	1.855,683	0,3652338
NIPAH PANJANG	1.178,572	0,232	26.087,900	5,135		-	217,286	0,043	1.806,083	0,3554716
RANTAU RASAU	151,788	0,030	19.473,184	3,833		-	7,820	0,002	713,622	0,1404544
SADU	16.379,844	3,224	23.500,832	4,625		-	17.712,000	3,4860592	3.008,645	0,5921587
Total	46.790,926	9,209	307.742,421	60,570	22,481	0,004	136.587,432	26,883	16.937,618	3,334

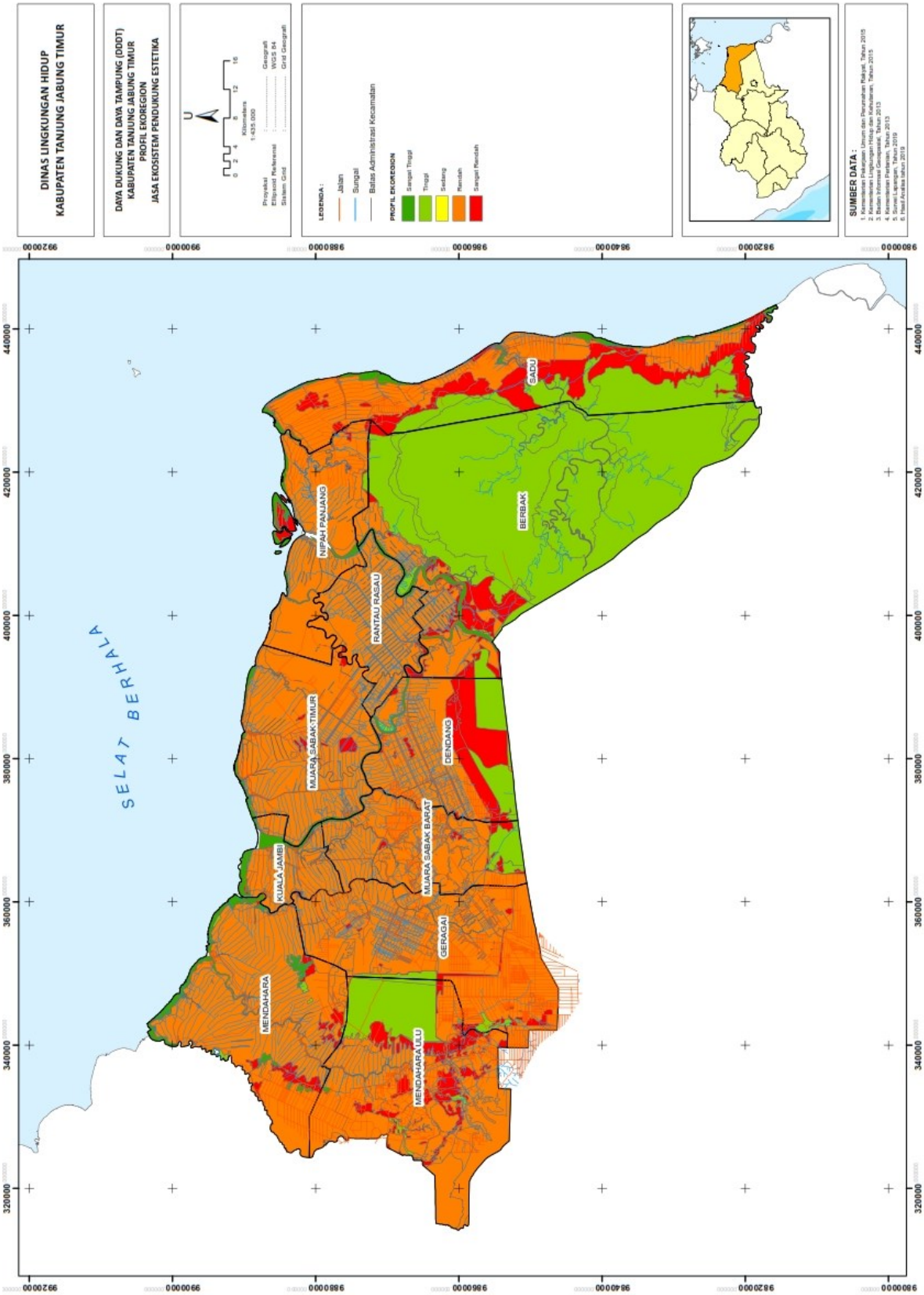
Sumber : Hasil Analisa 2019



Gambar 3.3.14
Peta Jasa Ekosistem Tempat Tinggal



Gambar 3.3.15
Peta Jasa Ekosistem Rekreasi



Gambar 3.3.16
Peta Jasa Ekosistem Estetika

D. Jasa Pendukung

Dari hasil perhitungan interval tersebut didapatkan distribusi kondisi jasa ekosistem pendukung di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang diuraikan melalui tabel dan gambar peta berikut ini.

Tabel III.3.33
Distrubisi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Tanah

EKOREGION	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Dataran Aluvial	1.161,972	0,229		-	7.934,656	1,562	21.965,193	4,323	273,920	0,054
Lembah Antar Perbukitan		-		-		-	58,040	0,011		-
Dataran Fluviomarin		-		-	2,510	0,000	25,213	0,005		-
Lahan Gambut (Peat Land)	6.918,144	1,362	9,289	0,002	37.264,903	7,334	279.728,779	55,056	135.774,911	26,723
Pesisir (Coast)	260,389	0,051	1,061	0,000	2.684,210	0,528	13.998,861	2,755	18,827	0,004
Total	8.340,505	1,642	10,350	0,002	47.886,279	9,425	315.776,086	62,151	136.067,658	26,781

Sumber : Hasil Analisa 2019

Tabel III.3.34
Distrubisi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Siklus Hara

EKOREGION	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Dataran Aluvial	1.161,972	0,229	288,773	0,057	27.576,580	5,428	2.008,072	0,395	300,344	0,059
Lembah Antar Perbukitan		-		-	58,040	0,011		-		-
Dataran Fluviomarin		-		-	18,613	0,004		-	9,110	0,002
Lahan Gambut (Peat Land)	6.918,144	1,362	6.747,617	1,328	265.655,453	52,286	34.361,516	6,763	146.013,296	28,738
Pesisir (Coast)	260,389	0,051	76,455	0,015	9.867,041	1,942	76,937	0,015	6.682,526	1,315
Total	8.340,505	1,642	7.112,845	1,400	303.175,727	59,671	36.446,525	7,173	153.005,276	30,114

Sumber : Hasil Analisa 2019

Tabel III.3.35
Distrubisi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Produksi Primer

EKOREGION	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Dataran Aluvial	1.161,972	0,229	288,773	0,057	27.576,580	5,428	2.034,496	0,400	273,920	0,054
Lembah Antar Perbukitan		-		-	58,040	0,011		-		-
Dataran Fluviomarin		-		-	18,613	0,004	2,510	0,000	6,600	0,001
Lahan Gambut (Peat Land)	6.918,144	1,362	6.747,617	1,328	266.098,290	52,373	40.572,870	7,986	139.359,105	27,429
Pesisir (Coast)	260,389	0,051	76,455	0,015	9.943,978	1,957	2.356,482	0,464	4.326,044	0,851
Total	8.340,505	1,642	7.112,845	1,400	303.695,501	59,773	44.966,358	8,850	143.965,669	28,335

Sumber : Hasil Analisa 2019

Tabel III.3.36
Distrubisi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Biodiversitas

EKOREGION	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Dataran Aluvial	1.161,972	0,229	18.785,803	3,697	9.079,550	1,787	2.034,496	0,400	273,920	0,054
Lembah Antar Perbukitan		-	58,040	0,011		-		-		-
Dataran Fluviomarin		-		-	18,613	0,004	2,510	0,000	6,600	0,001
Lahan Gambut (Peat Land)	6.918,144	1,362	211.514,704	41,630	61.331,203	12,071	40.572,870	7,986	139.359,105	27,429
Pesisir (Coast)	260,389	0,051	8.582,855	1,689	1.437,578	0,283	2.356,482	0,464	4.326,044	0,851
Total	8.340,505	1,642	238.941,402	47,028	71.866,944	14,145	44.966,358	8,850	143.965,669	28,335

Sumber : Hasil Analisa 2019

Tabel III.3.37
Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Tanah Menurut Kecamatan

Kercamatan	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
BERBAK	541,302	0,107		-	10.900,364	2,145	10.599,009	2,086	97.366,401	19,164
DENDANG	781,014	0,1537184		0	9.842,236	1,9371396	18.019,875	3,5466548	5.649,334	1,1118966
GERAGAI	1.355,878	0,2668626		0	3.654,003	0,7191774	44.805,207	8,8185187	1.366,830	0,2690182
KUALA JAMBI	315,597	0,062		-	1.352,004	0,266	10.287,691	2,025	-	-
MENDAHARA	474,745	0,093		-	713,154	0,140	50.825,625	10,003	519,024	0,102
MENDAHARA ULU	378,378	0,074		-	2.769,208	0,545	45.560,527	8,967	10.636,858	2,094
MUARA SABAK BARAT	1.027,155	0,202		-	9.592,859	1,888	15.416,205	3,034	2.592,094	0,510
MUARA SABAK TIMUR	953,897	0,188	10,350	0,002	2.488,730	0,490	37.047,737	7,292	0,011	2,165E-06
NIPAH PANJANG	450,069	0,089		-	3.344,453	0,658	25.278,033	4,975	217,286	0,042766
RANTAU RASAU	1.659,766	0,327		-	1.042,602	0,205	17.636,226	3,471	7,820	0,0015391
SADU	402,704	0,079		-	2.186,666	0,430	40.299,951	7,9317984	17.712,000	3,4860592
Total	8.340,505	1,642	10,350	0,002	47.886,279	9,425	315.776,086	62,151	136.067,658	26,781

Sumber : Hasil Analisa 2019

Tabel III.3.38
Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Siklus Hara Menurut Kecamatan

Kercamatan	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
BERBAK	541,302	0,107	668,935	0,132	17.664,853	3,477	437,851	0,086	100.094,135	19,700
DENDANG	781,014	0,1537184	966,168	0,1901603	26.344,358	5,1850717		-	6.200,919	1,220459
GERAGAI	1.355,878	0,2668626	344,317	0,0677681	33.490,755	6,5916189	14.483,955	2,8507184	1.507,013	0,2966089
KUALA JAMBI	315,597	0,062	52,490	0,010	9.857,375	1,940		-	1.729,830	0,340
MENDAHARA	474,745	0,093		-	40.287,392	7,929	7.580,910	1,492	4.189,501	0,825
MENDAHARA ULU	378,378	0,074	2.618,501	0,515	32.564,051	6,409	12.945,404	2,548	10.838,637	2,133
MUARA SABAK BARAT	1.027,155	0,202	310,433	0,061	23.168,229	4,560	998,405	0,197	3.124,091	0,615
MUARA SABAK TIMUR	953,897	0,188		-	37.691,134	7,418		-	1.855,694	0,3652359
NIPAH PANJANG	450,069	0,089	179,876	0,035	26.636,527	5,243		-	2.023,369	0,3982376
RANTAU RASAU	1.659,766	0,327		-	17.965,206	3,536		-	721,442	0,1419935
SADU	402,704	0,079	1.972,125	0,388	37.505,847	7,382		-	20.720,645	4,0782178
Total	8.340,505	1,642	7.112,845	1,400	303.175,727	59,671	36.446,525	7,173	153.005,276	30,114

Sumber : Hasil Analisa 2019

Tabel III.3.39
Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Produksi Primer Menurut Kecamatan

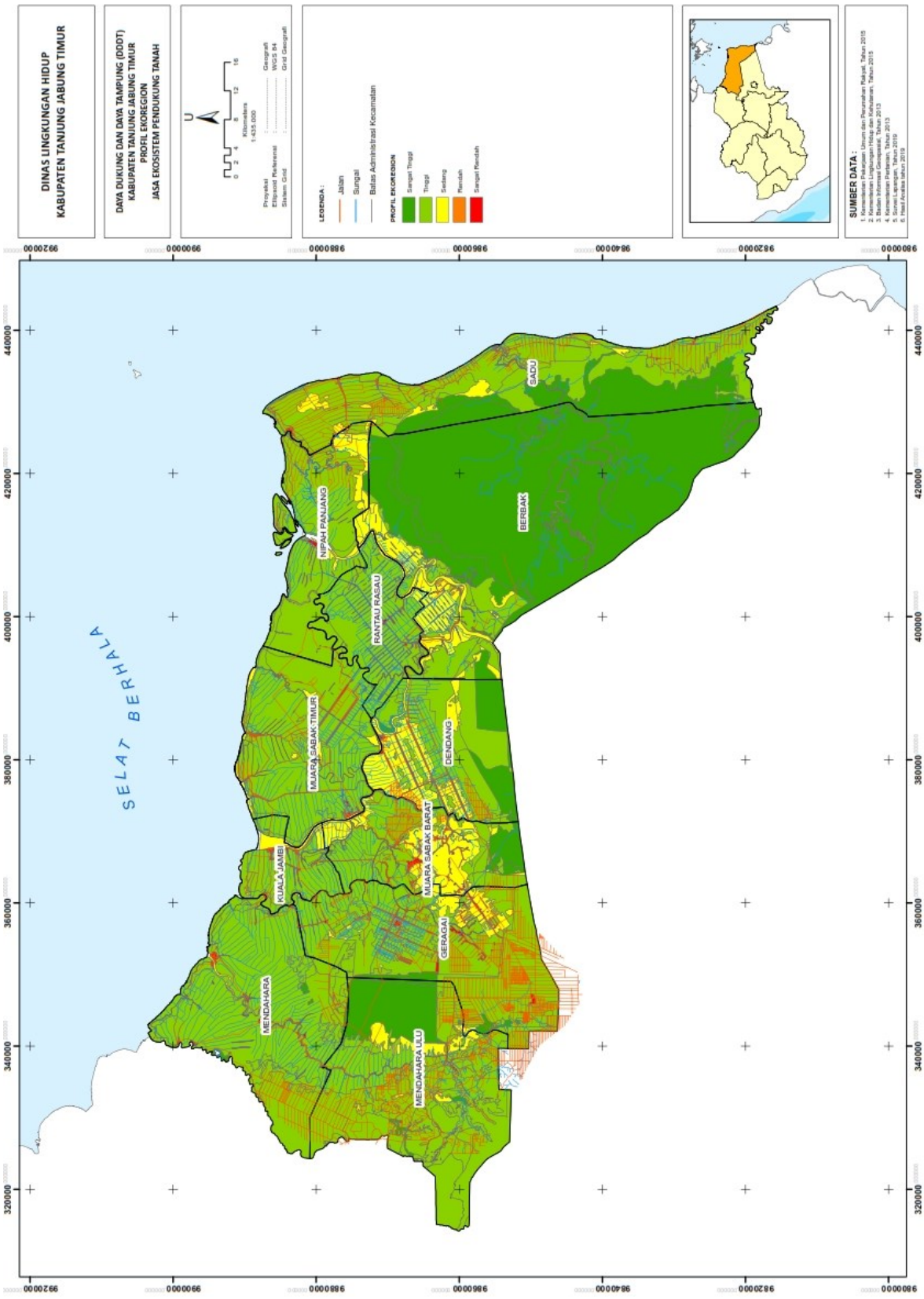
Kercamatan	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
BERBAK	541,302	0,107	668,935	0,132	18.102,704	3,563	2.700,793	0,532	97.393,342	19,169
DENDANG	781,014	0,1537184	966,168	0,1901603	26.344,358	5,1850717	551,585	0,1085624	5.649,334	1,1118966
GERAGAI	1.355,878	0,2668626	344,317	0,0677681	33.490,755	6,5916189	14.624,138	2,8783091	1.366,830	0,2690182
KUALA JAMBI	315,597	0,062	52,490	0,010	9.857,375	1,940	962,031	0,189	767,799	0,151
MENDAHARA	474,745	0,093		-	40.364,329	7,944	8.216,460	1,617	3.477,014	0,684
MENDAHARA ULU	378,378	0,074	2.618,501	0,515	32.569,037	6,410	13.082,204	2,575	10.696,851	2,105
MUARA SABAK BARAT	1.027,155	0,202	310,433	0,061	23.168,229	4,560	1.530,402	0,301	2.592,094	0,510
MUARA SABAK TIMUR	953,897	0,188		-	37.691,134	7,418	1.810,558	0,356	45,136	0,0088836
NIPAH PANJANG	450,069	0,089	179,876	0,035	26.636,527	5,243	603,388	0,119	1.419,981	0,2794793
RANTAU RASAU	1.659,766	0,327		-	17.965,206	3,536	713,622	0,140	7,820	0,0015391
SADU	402,704	0,079	1.972,125	0,388	37.505,847	7,382	171,177	0,0336909	20.549,468	4,0445269
Total	8.340,505	1,642	7.112,845	1,400	303.695,501	59,773	44.966,358	8,850	143.965,669	28,335

Sumber : Hasil Analisa 2019

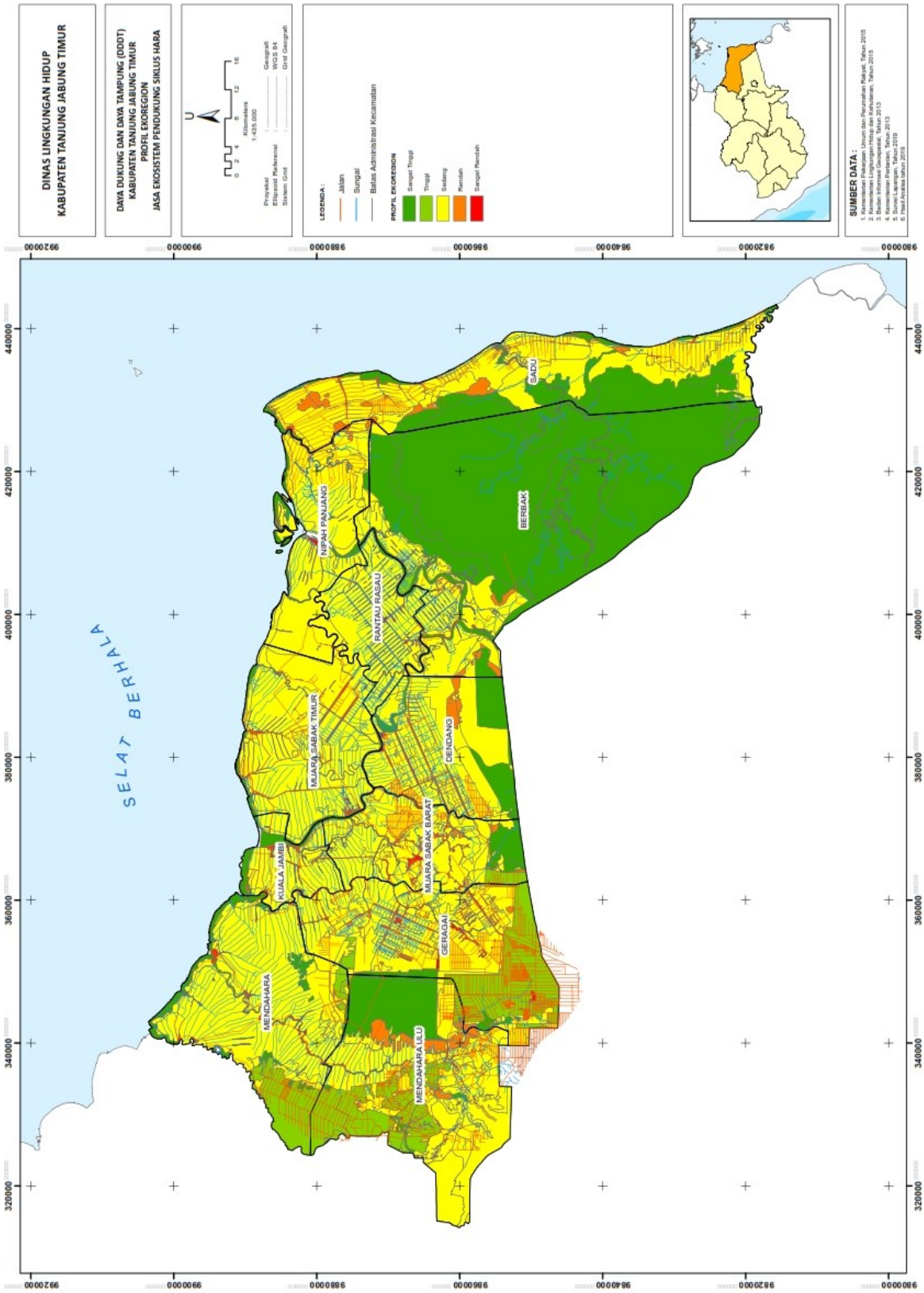
Tabel III.3.40
Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Bio Diversitas Menurut Kecamatan

Kercamatan	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
BERBAK	541,302	0,107	4.990,560	0,982	13.781,079	2,712	2.700,793	0,532	97.393,342	19,169
DENDANG	781,014	0,1537184	11.336,684	2,2312755	15.973,842	3,1439565	551,585	0,1085624	5.649,334	1,1118966
GERAGAI	1.355,878	0,2668626	29.356,142	5,7778482	4.478,930	0,8815388	14.624,138	2,8783091	1.366,830	0,2690182
KUALA JAMBI	315,597	0,062	9.522,884	1,874	386,981	0,076	962,031	0,189	767,799	0,151
MENDAHARA	474,745	0,093	37.817,917	7,443	2.546,412	0,501	8.216,460	1,617	3.477,014	0,684
MENDAHARA ULU	378,378	0,074	29.903,599	5,886	5.283,939	1,040	13.082,204	2,575	10.696,851	2,105
MUARA SABAK BARAT	1.027,155	0,202	14.115,585	2,778	9.363,077	1,843	1.530,402	0,301	2.592,094	0,510
MUARA SABAK TIMUR	953,897	0,188	36.130,186	7,111	1.560,948	0,307	1.810,558	0,356	45,136	0,0088836
NIPAH PANJANG	450,069	0,089	23.256,518	4,577	3.559,885	0,701	603,388	0,119	1.419,981	0,2794793
RANTAU RASAU	1.659,766	0,327	17.484,438	3,441	480,768	0,095	713,622	0,140	7,820	0,0015391
SADU	402,704	0,079	25.026,889	4,926	14.451,083	2,844	171,177	0,0336909	20.549,468	4,0445269
Total	8.340,505	1,642	238.941,402	47,028	71.866,944	14,145	44.966,358	8,850	143.965,669	28,335

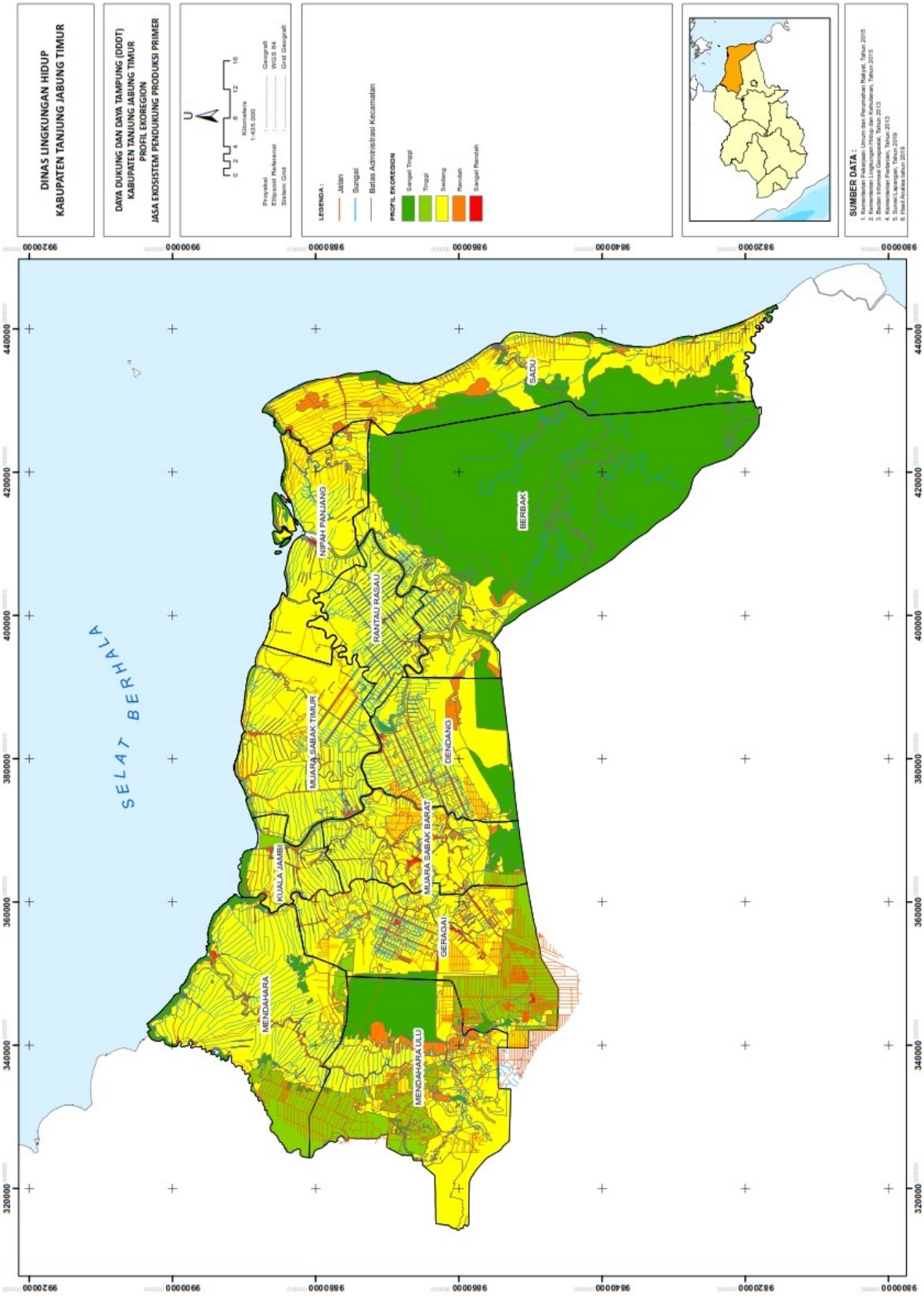
Sumber : Hasil Analisa 2019



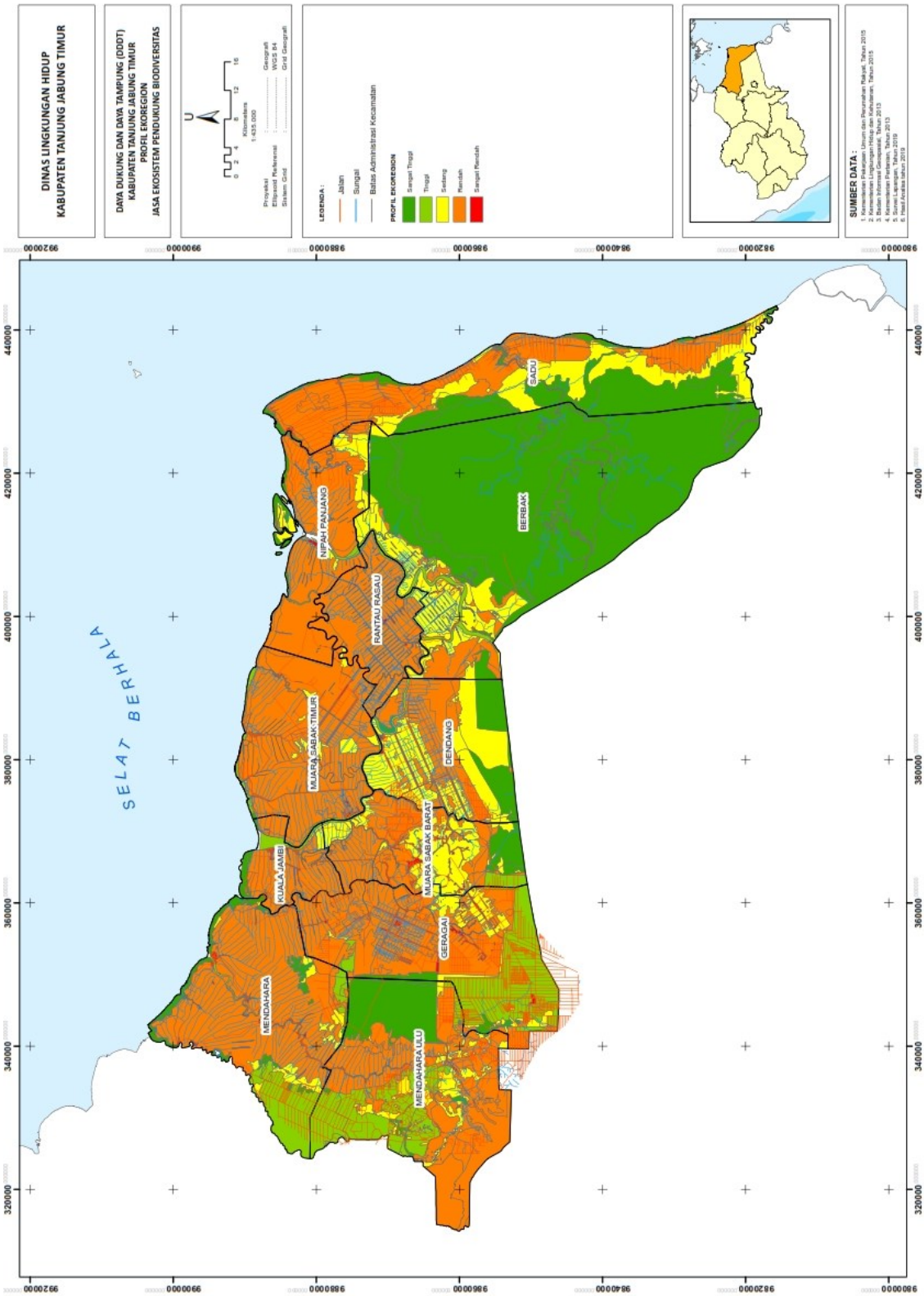
Gambar 3.3.17
Peta Jasa Ekosistem Tanah



Gambar 3.3.18
Peta Jasa Ekosistem Siklus Hara



Gambar 3.3.19
Peta Jasa Ekosistem Produksi Primer



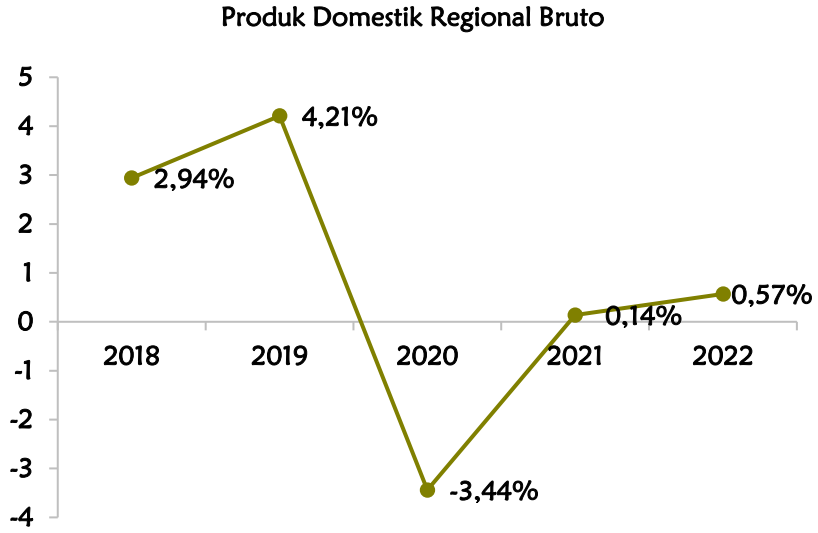
Gambar 3.3.20
Peta Jasa Ekosistem Produksi Primer Peta Jasa Ekosistem Biodiversitas

3.4 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

3.4.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

3.4.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2021 mencapai rata-rata 0,14%, mengalami kenaikan pada tahun 2022 rata-rata sekitar 0,57% per tahun. Pertumbuhan ekonomi yang terbesar berada di bidang jasa perusahaan sekitar 10,23%, dan terkecil berada di bidang kesehatan sekitar -1,29%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut.



Gambar 3.4.1
Grafik Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2018-2022

3.4.1.2 PDRB Menurut Lapangan Usaha

Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggi merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap daerah. Namun manfaat tersebut harus juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, aspek pemerataan juga menjadi pertimbangan penting dalam keberhasilan pembangunan.

PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas dasar harga berlaku tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 25.606,10 Milyar Rupiah. Sedangkan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas dasar harga konstan 2021 adalah sebesar Rp. 21.881,32 Milyar Rupiah.

Sektor tertinggi dalam Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2022 berada pada sektor Pertambangan dan Penggalian dengan nilai sekitar 43,02%, dan di sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan nilai sekitar 21,44%. Lalu sektor terendah terdapat pada sektor Pengadaan Listrik dan Gas dengan nilai sekitar 0,02% dan sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dengan nilai sekitar 0,08%.

3.4.1.3 PDRB Menurut Penggunaan

Salah satu indikator makro tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah, dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. Trend PDRB per kapita Kabupaten Tanjung Jabung Timur sejak tahun 2018 hingga 2022 cederung mengalami perubahan yang signifikan, PDRB per kapita Kabupaten Tanjung Jabung Timur menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Tanjung Jabung Timur rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai per kapita di masing-masing tahun tersebut. Akan tetapi pada tahun 2020 terjadi penurunan sebagai dampak dari pandemi Covid-19. PDRB perkapita menurut ADHB maupun ADHK sama-sama mengalami penurunan. PDRB perkapita ADHB pada 2020 sebesar 84.851,249 juta rupiah, menurun bila dibandingkan dengan tahun 2019 yang sudah sebesar 112.196,695 juta rupiah. Sementara PDRB perkapita ADHK pada tahun 2020 mencapai 75.115,420 juta rupiah, juga mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019 yang sudah sebesar 81.676,478 juta rupiah. Lebih rinci PDRB perkapita Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.4.1
Nilai PDRB Perkapita Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Juta Rupiah), Tahun 2018-2022

Nilai PDRB (Miliar Rupiah)	2018	2019	2020	2021	2022
ADHB	24.101,72	24.681,59	19.499,92	21.881,32	25.606,10
ADHK	17.241,19	17.967,60	17.262,50	17.284,92	17.471,91
PDRB per Kapita (Ribu Rupiah)					
ADHB	110.349,292	112.196,695	84.851,249	94.408,816	109.351,139
ADHK	78.938,479	81.676,478	75.115,420	74.577,257	74.613,988
Jumlah Penduduk (ribu orang)	218.413	219.985	229.813	231.772	234.164
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (%)	0,75	0,72	1,14	0,64	0,94

Sumber : Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Angka, 2023; dan Hasil Analisa Tahun 2023
BPS Kabupaten Tanjung jabung Timur,2023 dan Pengolahan Data Tahun 2023

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah adalah nilai seluruh jenis output pemerintah dikurangi nilai output untuk pembentukan modal sendiri dikurangi nilai penjualan barang/jasa (baik yang harganya signifikan dan tdk signifikan secara ekonomi) ditambah nilai barang/jasa yang dibeli dari produsen pasar untuk diberikan pada RT secara gratis atau dengan harga yang tidak signifikan secara ekonomi (*social transfer in kind-purchased market production*).

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang & jasa maupun aktivitas investasi.

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki kecenderungan meningkat untuk dasar harga berlaku dimana total pengeluaran pemerintah atas dasar harga berlaku mencapai 1.343,38 milyar tahun 2022 dibandingkan atas dasar harga berlaku pada tahun 2018 yakni sebesar 1.231,63 milyar. Keadaan ini berbanding terbalik dengan total pengeluaran pemerintah atas dasar harga konstan, pengeluaran pemerintah atas dasar harga kontan pada rentang waktu 2018-2022 mengalami fluktuasi pada tahun 2018 atas dasar harga konstan dari pengeluaran pemerintah sebesar 782,15 milyar mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar 822,93 milyar, terjadi penurunan kembali pada tahun 2020 sebesar

780,41 milyar hingga total pengeluaran terakhir pemerintah terajadi peningkatan kemabli tahun 2022 sebesar 805,57 milyar.

Persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB atas dasar harga beralaku sebesar 5,11% tahun 2018 dan meningkat menjadi 5,25% Untuk tahun 2022. Adapun untuk pengeluaran pemerintah terhadap dasar harga konstan sebesar, 4,54% pada tahun 2018, 4,58% pada tahun 2019 dan meningkat sebesar 4,61% pada tahun 2022. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.4.2
Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah terhadap PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 – 2022 (Miliar Rupiah)

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
PDRB						
1	Atas Dasar Harga Berlaku	24.101,72	24.681,59	19.499,92	21.881,32	25.606,10
2	Atas Dasar Harga Konstan	17.241,19	17.967,60	17.262,50	17.284,92	17.471,91
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah						
1	Atas Dasar Harga Berlaku	1.231,63	1.295,14	1.268,46	1.304,56	1.343,38
2	Atas Dasar Harga Konstan	782,15	822,93	780,41	794,73	805,57
Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Terhadap PDRB						
1	Atas Dasar Harga Berlaku	5,11	5,25	6,50	5,96	5,25
2	Atas Dasar Harga Konstan	4,54	4,58	4,52	4,60	4,61

Sumber : Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Angka, 2023; dan Hasil Analisa Tahun 2023
BPS Kabupaten Tanjung jabung Timur,2023 dan Pengolahan Data Tahun 2023

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga memiliki peranan yang besar terhadap angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) total kabupaten/kota. komponen pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan pengeluaran terbesar kedua setelah ekspor atas barang dan jasa yang tersedia. Dari data menunjukan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagian masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga.

Berdasarkan data dari BPS komponen pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga periode 2018-2022 menunjukan peningkatan yang signifikan baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Atas dasar harga berlaku dari Rp 5.772,84 milyar pada tahun 2018 hingga mencapai Rp 7.066,91 milyar pada tahun 2022, begitu pula pengeluaran konsumsi akhir rumah tanggas atas dasar harga konstan dari Rp 4.055,18 milyar pada tahun 2018 meningkat hingga tahun 2022 mencapai Rp 4.497,77 milyar.

Membaiknya kinerja konsumsi rumah tangga sejalan dengan membaiknya kinerja beberapa lapangan usaha. Hal ini didukung oleh perbaikan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat. Adapun dampak rambatan kenaikan harga energi diperkirakan relatif terbatas dan kebijakan insentif pemulihan ekonomi yang masih dipertahankan diperkirakan mampu menjaga daya beli masyarakat. beberapa daerah diprakirakan dapat mendorong akselerasi pertumbuhan konsumsi rumah tangga seiring meningkatnya aktivitas bisnis dan sosial di masyarakat. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.4.3
Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap PDRB
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 – 2022 (Miliar Rupiah)

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
PDRB						
1	Atas Dasar Harga Berlaku	24.101,72	24.681,59	19.499,92	21.881,32	25.606,10
2	Atas Dasar Harga Konstan	17.241,19	17.967,60	17.262,50	17.284,92	17.471,91
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga						
1	Atas Dasar Harga Berlaku	5.772,84	6.164,29	6.209,01	6.528,38	7.066,91
2	Atas Dasar Harga Konstan	4.055,18	4.195,09	4.189,76	4.332,57	4.497,77
Persentase Pengeluaran Pemerintah Terhadap PDRB						
1	Atas Dasar Harga Berlaku	23,95	24,98	31,84	29,84	27,60
2	Atas Dasar Harga Konstan	23,52	23,35	24,27	25,07	25,74

Sumber : Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Angka, 2023; dan Hasil Analisa Tahun 2023
BPS Kabupaten Tanjung jabung Timur,2023 dan Pengolahan Data Tahun 2023

Data Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menjadi pendekatan nilai investasi dalam penghitungan PDRB Pengeluaran sehingga menjadi salah satu indikator ekonomi yang menjadi acuan pemerintah dalam melihat perkembangan investasi. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Persediaan merupakan faktor penting dalam mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. PMTB merupakan investasi fisik yang menunjukkan penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. PMTB bisa diklasifikasikan menurut jenis barang modal, sektor institusi, dan lapangan usaha/industri.

Berdasarkan tabel PMTB Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas dasar harga berlaku memiliki kecenderungan meningkat dari Rp3.342 milyar pada tahun 2018

menjadi Rp 4.151,67 milyar pada tahun 2022. Adapun untuk PMTB atas dasar harga konstan juga mengalami peningkatan dari Rp 2.403,58 milyar pada tahun 2018 meningkat hingga tahun 2022 menjadi Rp 2.648,91 milyar. Pertumbuhan investasi/PMTB merupakan bentuk bertambahnya bahan modal dalam satu tahun berupa investasi kategori bangunan, kendaraan, peralatan, dan perlengkapan yang tahan lama.Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.4.4
Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Terhadap PDRB
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 – 2022 (Miliar Rupiah)

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
PDRB						
1	Atas Dasar Harga Berlaku	24.101,72	24.681,59	19.499,92	21.881,32	25.606,10
2	Atas Dasar Harga Konstan	17.241,19	17.967,60	17.262,50	17.284,92	17.471,91
Pembentukan Modal Tetap Bruto						
1	Atas Dasar Harga Berlaku	3.342,07	3.619,65	3.616,09	3.907,53	4.151,67
2	Atas Dasar Harga Konstan	2.403,58	2.517,75	2.512,80	2.636,52	2.648,91
Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Terhadap PDRB						
1	Atas Dasar Harga Berlaku	13,87	14,67	18,54	17,86	16,21
2	Atas Dasar Harga Konstan	13,94	14,01	14,56	15,25	15,16

Sumber : Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Angka, 2023; dan Hasil Analisa Tahun 2023
BPS Kabupaten Tanjung jabung Timur,2023 dan Pengolahan Data Tahun 2023

3.4.1.4 Indeks Gini

Nilai rasio Gini atau koefisien Gini diukur pada skala 0 hingga 1 poin, rasio Gini bernilai 0 poin menunjukkan kesetaraan sempurna, yang berarti seluruh penduduk memiliki pengeluaran per kapita yang sama. Sedangkan koefisien Gini bernilai 1 poin menunjukkan ketimpangan sempurna. Hal itu menggambarkan, hanya satu penduduk saja yang memiliki pengeluaran per kapita dan yang lainnya tidak sama sekali.

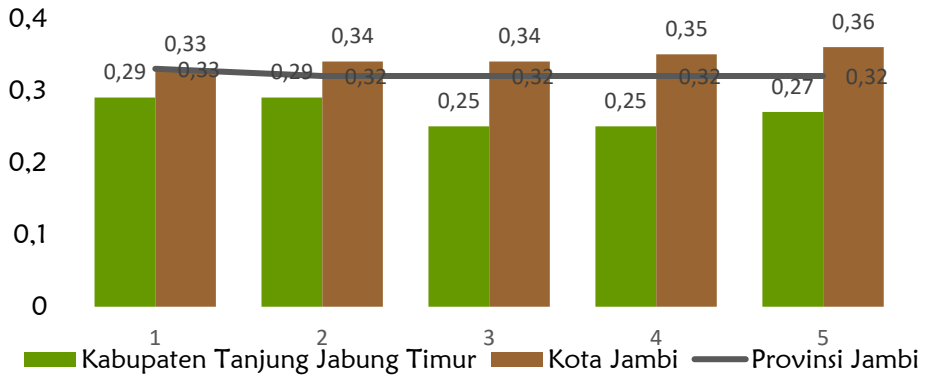
Berdasarakan data dari BPS Kabupaten tanjung Jabung Timur tahun 2018 – 2022 rasio gini terjadi secara fluktuasi dari rasio gini 0,29 pada tahun 2018 menurun hingga 0,25 pada tahun 2020 dan terjadi peningkatan pada tahun 2022 dengan rasio gini sebesar 0,27. Koefisien gini tertinggi yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencapai 0,29 pada tahun 2018 yang berarti pengeluaran penduduk dibawah skala 1 poin di atas skala 0 dengan pemerataan pendapatannya sedang dibandingkan

dengan Provinsi Jambi yang memiliki rasio gini sebesar 0,33 pada tahun 2018 dan rasio gini di Provinsi Jambi dari tahun 2019-2022 cenderung stabil tidak terjadi perubahan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.4.5
Perkembangan Koefisien Gini di
Kabupaten Tanjung Jabung timur Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	0,29	0,29	0,25	0,25	0,27
2	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	0,33	0,34	0,34	0,35	0,36
3	Provinsi Jambi	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32

Sumber : Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Angka, 2023



Gambar 3.4.2
Grafik Perkembangan Koefisien Gini di
Kabupaten Tanjung Jabung timur Tahun 2018 – 2022

3.4.2 Aspek Kesejahteraan Sosial

3.4.2.1 Angka Melek Huruf

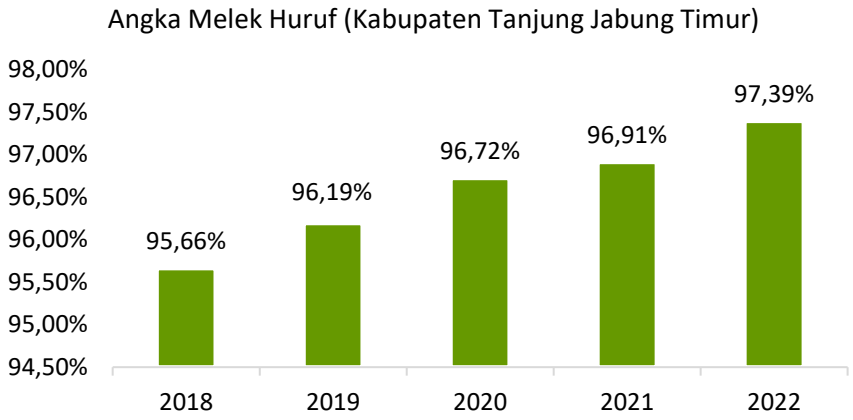
Pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. Tingkat melek huruf yang tinggi menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajaran.

Perkembangan angka melek huruf di kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rentang waktu 2018-2022 mengalami peningkatan untuk penduduk pada usias diatas 15 tahun. Data perkembangan angka melek huruf tahun 2022 mencapai 97,39%, angka ini dikategorikan dalam kondisi baik tinggal 2,61% untuk mencapai angka 100%. Secara parsial angka melek huruf berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebanyak 23.420 Jiwa penduduk miskin pada tahun 2022. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi nilai angka melek huruf maka akan berdampak terhadap semakin rendah jumlah penduduk miskin. Untuk lebih jelas mengenai perkembangan angka melek huruf di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.4.6
Perkembangan Angka Melek Huruf di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 – 2022

Kelompok Umur	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas	162.994	164.985	174.394	176.353	178.867
Jumlah Penduduk Usia diatas 15 Tahun yang bisa membaca dan Menulis	155.920	158.699	168.673	170.904	174.198
Angka Melek Huruf (Kabupaten Tanjung Jabung Timur)	95,66%	96,19%	96,72%	96,91%	97,39%

Sumber : Statistik Kesejahteraan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2019 – 2023, Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2019 – 2023, BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2023, dan Pengolahan Data Tahun 2023



Gambar 3.4.3
Grafik Persentase Perkembangan Angka Melek Huruf di Kabupaten Tanjung Jabung timur Tahun 2018 – 2022

3.4.2.2 Angka Rata-Rata Lama Sekolah

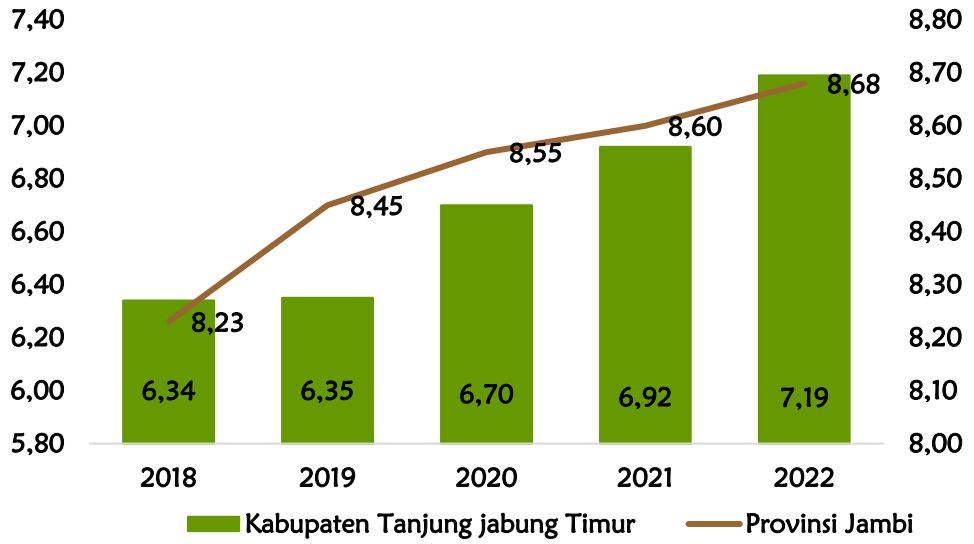
Komponen yang diperhitungkan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari dimensi pendidikan adalah angka harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS). RLS penduduk Kabupaten Tanjung jabung Timur pada tahun 2022 mencapai 7,19. Angka tersebut tumbuh sebesar 0,27 dibandingkan pada tahun 2021 sebesar 6,92. Melihat trennya, RLS di Kabupaten Tanjung jabung Timur mengalami fluktuasi, angka RLS terendah terjadi pada tahun 2018 sebesar 6,34.

Sementara RLS di Provinsi Jambi lebih tinggi dibandingkan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, RLS tertinggi di Provinsi Jambi mencapai 8,68 pada tahun 2022 dan terjadi peningkatan sebesar 0,08 dengan angka RLS tahun 2021 sebesar 8,60. Adanya peningkatan terhadap angka RLS menunjukkan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat dan RLS merupakan jumlah tahun yang digunakan penduduk dalam menjalani Pendidikan formal, dimana nilai minimum 0 tahun dan nilai maksimum 15 tahun. Perkembangan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel III.4.7
Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Tanjung jabung timur Tahun 2018 – 2022

Kelompok Umur	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Rata-Rata Lama Sekolah	6,34	6,35	6,70	6,92	7,19
Kabupaten Tanjung jabung Timur	**6,34**	**6,35**	**6,70**	**6,92**	**7,19**
Provinsi Jambi	**8,23**	**8,45**	**8,55**	**8,60**	**8,68**

Sumber : Statistik Kesejahteraan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2019 – 2023,
Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2019 – 2023,
BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2023, dan Pengolahan Data Tahun 2023



Gambar 3.4.4
Grafik Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Tanjung jabung timur Tahun 2018 – 2022

3.4.2.3 Angka Harapan Lama Sekolah

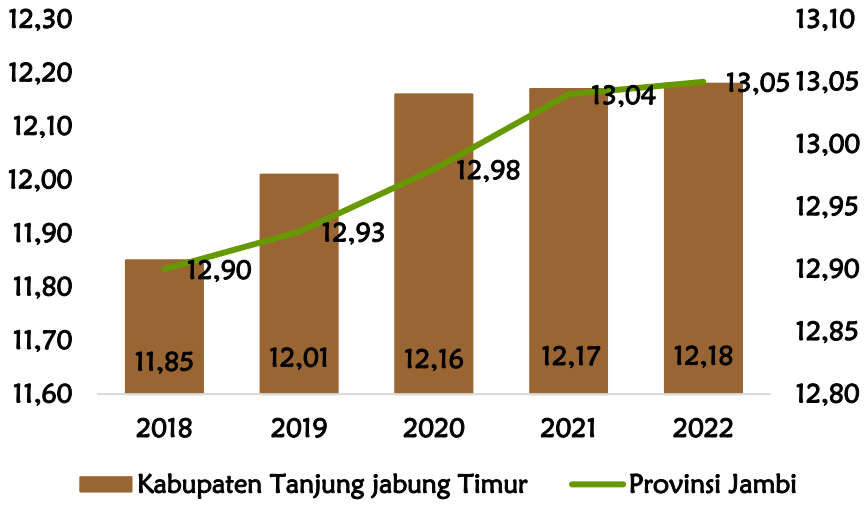
Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di kabupaten Tanjung Jabung Timur Pada Periode Tahun 2018 – 2022 terus mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2018 sebesar 11,85 tahun meningkat menjadi 12,18 tahun pada tahun 2012. Peningkatan persentase Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam kurun Tahun 2018–2022 mengalami peningkatan dengan rata-rata 1,20 persen setiap tahunnya. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2022 sebesar 12,18 tahun. Artinya, secara rata-rata anak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki

peluang untuk bersekolah selama 12,18 tahun atau setara dengan SLTA kelas 3 (menamatkan SLTA).

Tabel III.4.8
Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 – 2022

Kelompok Umur	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Rata-Rata Lama Sekolah	11,85	12,01	12,16	12,17	12,18
Kabupaten Tanjung jabung Timur	**11,85**	**12,01**	**12,16**	**12,17**	**12,18**
Provinsi Jambi	**12,90**	**12,93**	**12,98**	**13,04**	**13,05**

Sumber : Statistik Kesejahteraan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2019 – 2023,
Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2019 – 2023,
BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2023, dan Pengolahan Data Tahun 2023



Gambar 3.4.5
Grafik Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 – 2022

3.4.2.4 Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni

Salah satu indikator terhadap angka partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK), bahwa di Kabupaten Tanjab Timur untuk APM tingkat pendidikan SD/Sederajal mengalami penurunan pada tahun 2021 sekitar 99,41%, pada tahun 2022 menjadi 99,47%, untuk tingkat pendidikan SMP/Sederajal mengalami penurunan pada tahun 2021 sekitar 82,24%, pada tahun 2022 menjadi 81,89%. Untuk tingkat pendidikan SMA/SMK/Sederajal mengalami kenaikan pada

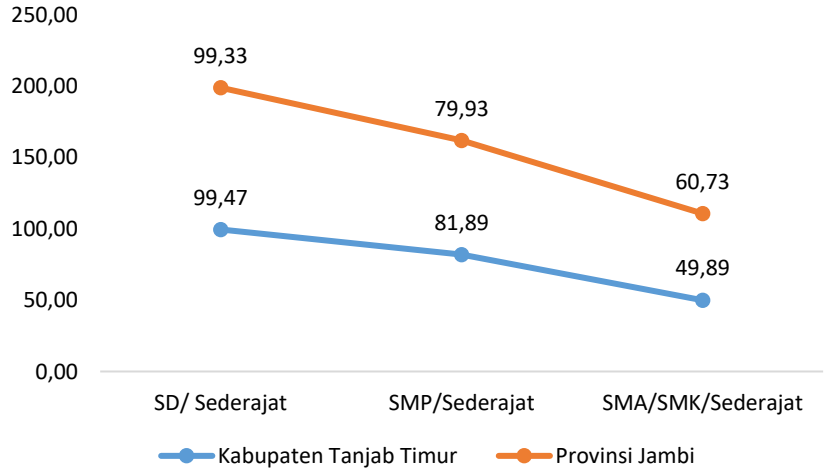
tahun 2021 sekitar 61,56%, pada tahun 2022 menjadi 60,73%, itu berarti terdapat permasalahan APK terhadap tingkat pendidkan SMA/SMK/Sederajal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel d ibawah ini.

Tabel III.4.9
Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) dan
Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan
Kabupaten Tanjab TimurTahun 2022-2022

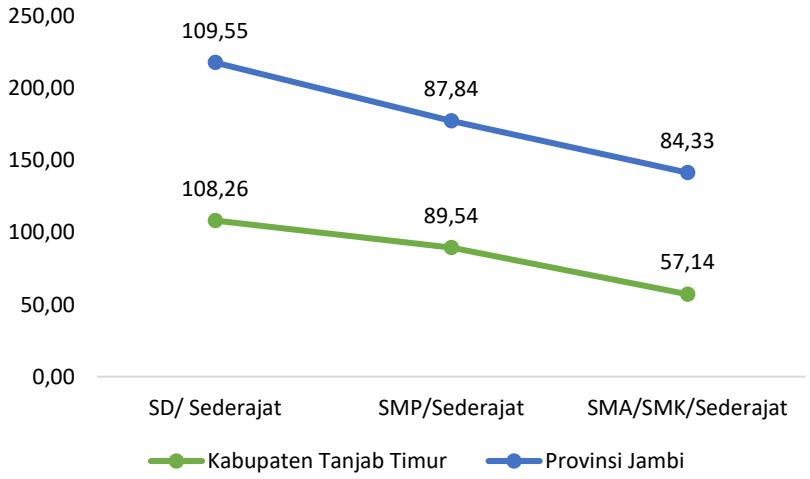
No	Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) (%)			Angka Partisipasi Kasar (APK) (%)		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	SD/ Sederajat	99,18	99,45	99,47	108,29	109,20	108,26
2	SMP/Sederajat	81,87	82,24	81,89	91,63	93,25	89,54
3	SMA/SMK/Sederajat	49,36	48,80	49,89	56,79	57,05	57,14

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2023

Perbandingan APM Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Provinsi Jambi untuk tahun 2022 terdapat peningkatan terhadap tingkat pendidikan SD/Sederajal dan SMP/Sederajat, sedangan untuk APM tingkat pendidikan SMA/SMK/Sederajat mengalami penurunan sekitar 10,84%. Untuk perbandingan APK Kabupaten Tanjab Timur dengan Provinsi Jambi untuk tahun 2022 terdapat penurunan tingkat pendidikan SD/Sederajal sekitar 1,29% dan tingkat pendidikan SMA/SMK/Sederajat sekitar 27,19%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.4.6
Grafik Persentase Perbandingan Indek APM
Kabupaten Tanjab Timur dengan Provinsi Jambi Tahun 2022



Gambar 3.4.7
Grafik Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK)
Kabupaten Tanjab Timur dengan Provinsi Jambi Tahun 2022

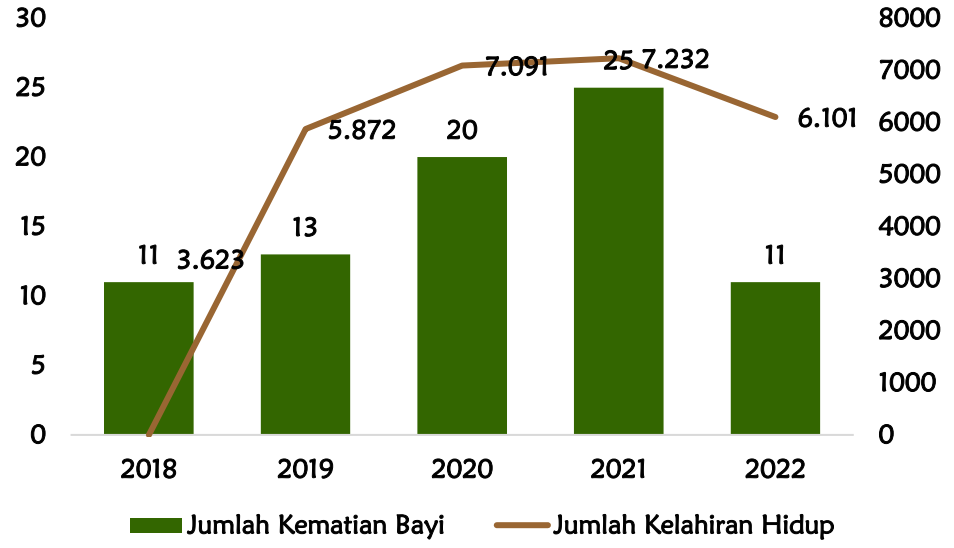
3.4.2.5 Angka Kelangsungan Hidup

Kasus kematian bayi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2018 sampai 2022 berfluktuasi, pada tahun 2018 kasus kematian bayi berjumlah 11 kasus dari 3.623 kelahiran hidup (AKB 3,03 KLH) mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga tahun 2021, dimana tahun 2019 sebanyak 13 kasus bayi dari 5.782 kelahiran hidup (AKB 2,2/1000 KLH), pada tahun 2020 sebanyak 20 kasus dari 7.091 kelahiran hidup (AKB 2,82/1000 KLH) dan pada tahun 2021 sebanyak 25 kasus dari 7.232 kelahiran hidup (AKB 3,4/1000 KLHJ). Kasus kematian bayi dan angka kelahiran hidup disebabkan oleh beberapa faktor seperti BBLR (Berat Badan Lahir Rendah), kurangnya pemerataan pelayanan Kesehatan dan fasilitas, status ekonomi masyarakat dan adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020-2021. Untuk lebih jelas mengenai angka kelangsungan hidup bayi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.4.10
Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Kematian Bayi	11	13	20	25	11
2	Jumlah Kelahiran Hidup	3.623	5.872	7.091	7.232	6.101

Sumber : Statistik Kesejahteraan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2019 – 2023, dan BPS Provinsi tahun 2023 dan Pengolahan Data Tahun 2023



Gambar 3.4.8
Grafik Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kab. Tanjab Timur tahun 2018-2022

3.5 ASPEK PELAYANAN PUBLIK

3.5.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

3.5.1.1 Pendidikan

Sarana pendidikan yang ada di Kab. Tanjab Timur untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sampai perguruan tinggi, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI)

Rasio Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) terhadap penduduk berusia 7-12 tahun dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.5.1
Rasio Sekolah SD (Sekolah Dasar) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) terhadap Penduduk Berusia 7-12 Tahun di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Gedung SD dan MI	227	230	231	231	223
Jumlah Penduduk 7-12 Tahun	26.192	24.108	24.642	24.800	24.563
Rasio Sekolah	86,67	95,40	93,74	93,15	90,79

Sumber: Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Angka 2023, RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur,Tahun 2021 dan Pengolahan Data Tahun 2023

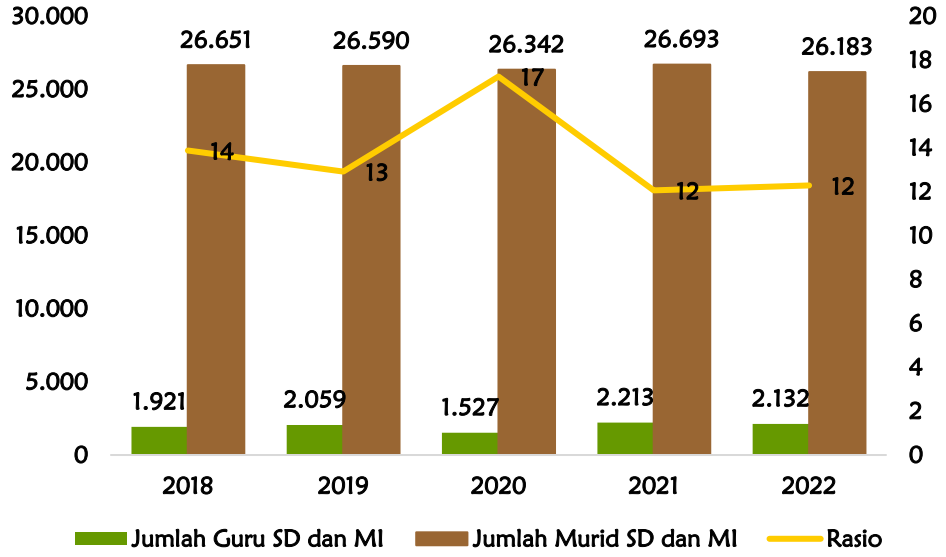
Bahwa berdasarkan pada tabel diatas rata rata rasio sekolah di Kab. Tanjab Timur berfluktuasi dimana rasio sekolah pada tahun 2018 sebesar 86,87, pada tahun 2019 sebesar 95,40 dan keadaan ini terjadi penurunan hingga 90,79 pada tahun 2022 disebabkan karena jumlah bangunan yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berkurang dari tahun 2019-2021 bangunan gedung SD sebanyak 206 bangunan dan menjadi 198 bangunan pada tahun 2022. Nilai rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Dimana semakin tinggi nilai rasio maka semakin baik kesempatan belajar bagi penduduk usia pendidikan dasar.

Sementara rasio guru terhadap murid SD selama periode 2018-2022 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur rata-rata sebesar 14, dengan rasio tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 17 dan rasio terendah terjadi pada tahun 2021-2022 sebesar 12. Menurut Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru menyebutkan bahwa pada jenjang SD,SMP,SMA idealnya satu guru bertanggung jawab terhadap 20 murid. Artinya rasio yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2022 lebih dari ideal. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.5.2
Rasio Guru terhadap murid SD di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Guru SD dan MI	1.921	2.059	1.527	2.213	2.132
2	Jumlah Murid SD dan MI	26.651	26.590	26.342	26.693	26.183
3	Rasio	14	13	17	12	12

Sumber: Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Angka 2023, RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur,Tahun 2022 dan Pengolahan Data Tahun 2023



Gambar 3.5.1
Grafik Rasio Guru terhadap murid SD di Kab. Tanjab Timur tahun 2018-2022

2. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTS)

Rasio Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah) terhadap penduduk berusia 13-15 tahun dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.5.3
Rasio Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTS) dan Swasta terhadap Penduduk Berusia 13-15 Tahun di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Gedung	78	78	78	78	81
2	Jumlah Penduduk 13-15 Tahun	11.598	10.949	11.862	11.938	12.001
3	Rasio Sekolah	67,25	71,24	65,76	65,34	67,49

Sumber: Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Angka 2023, RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur,Tahun 2022 dan Pengolahan Data Tahun 2023

Bahwa berdasarkan pada tabel diatas rasio sekolah di Kab. Tanjab Timur berfluktuasi dimana rasio sekolah pada tahun 2018 sebesar 67,25%, pada tahun 2019 sebesar 71,24% dan keadaan ini terjadi penurunan hingga 67,49% pada tahun 2022 disebabkan karena jumlah penduduk pada rentang 2018-2022 tidak terlalu signifikan

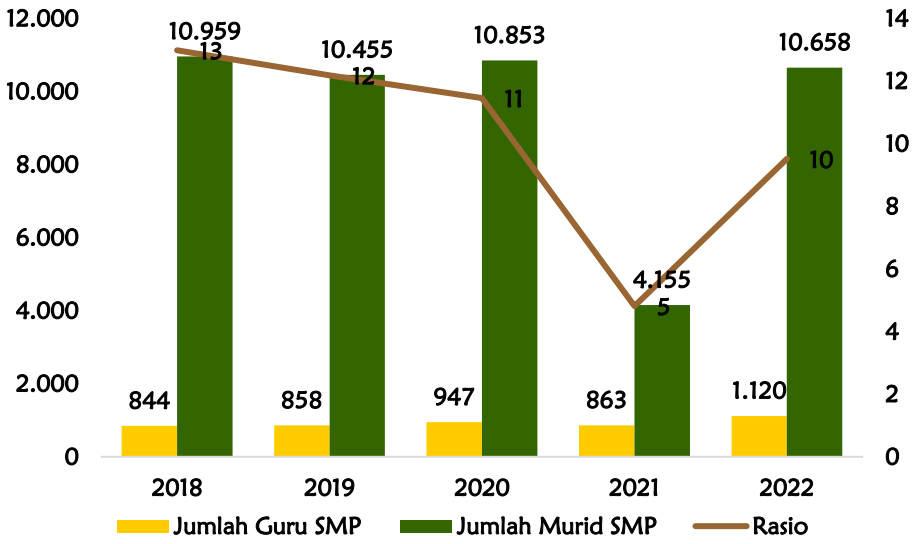
perkembanagan nya dan pada tahun 2022 terjadi penambahan gedung sekolah, dengan jumlah penambahan gedung SMP menjadi 49 unit dari 45 unit.

Selama periode 5 tahun (2018-2022) rasio guru terhadap murid SMP/MTS di Kabupaten Tanjung Jabung Timur rata-rata sebesar 10. Artinya rasio yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2022 lebih dari ideal. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.5.4
Rasio Guru Terhadap Murid SMP dan MTS Negeri dan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Guru SMP	844	858	947	863	1.120
2	Jumlah Murid SMP	10.959	10.455	10.853	4.155	10.658
3	Rasio	13	12	11	5	10

Sumber: Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Angka 2023, RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur,Tahun 2022 dan Pengolahan Data Tahun 2023



Gambar 3.5.2
Grafik Rasio Guru terhadap murid SMP dan MTS di Kab. Tanjab Timur tahun 2018-2022

3. Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)

Rasio Sekolah Menengah Pertama (SMA) terhadap penduduk berusia 16-18 tahun dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.5.5
Rasio Sekolah Menengah Atas (SMA) terhadap Penduduk Berusia 16-18 Tahun di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Gedung	12	12	12	12	12
2	Jumlah Penduduk 16-18 Tahun	10.628	10.633	11.344	11.262	11.212
3	Rasio Sekolah	11,29	11,29	10,58	10,66	10,70

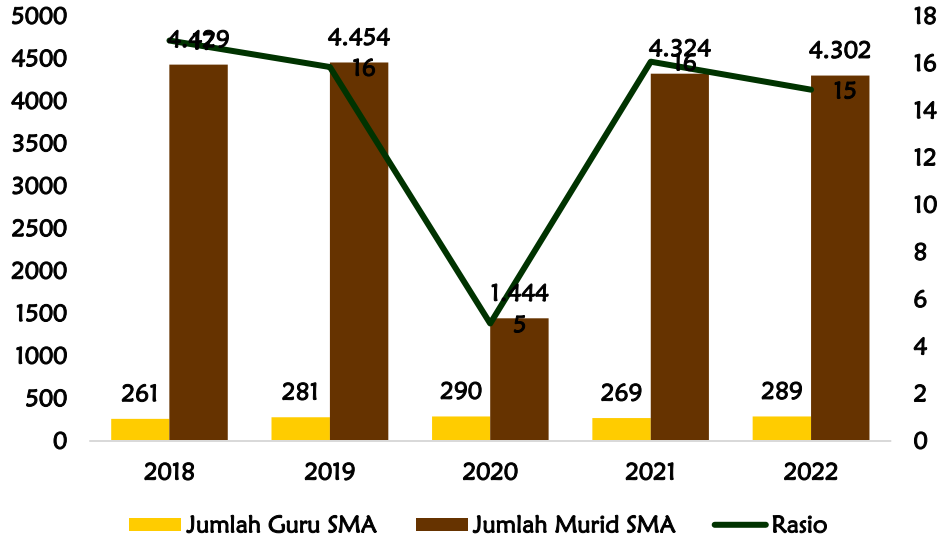
Sumber: Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Angka 2023, RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur,Tahun 2022 dan Pengolahan Data Tahun 2023

Rasio Sekolah Menengah Atas (SMA) pada tahun 2018-2019 sebesar 11,29%, dan keadaan ini terjadi penurunan hingga 10,70% pada tahun 2022. Adapun untuk rasio guru terhadap murid SMA selama periode 5 tahun (2018-2022) rasio guru terhadap murid SMA di Kabupaten Tanjung Jabung Timur rata-rata sebesar 14, dengan rasio tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 17 dan rasio terkecil terjadi pada tahun 2020 sebesar 5. Artinya rasio guru terhadap murid SMA yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2022 lebih dari ideal karena rasio yang terjadi tidak melebihi angka 20. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.5.6
Rasio Guru terhadap murid SMA di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Guru SMA	261	281	290	269	289
2	Jumlah Murid SMA	4.429	4.454	1.444	4.324	4.302
3	Rasio	17	16	5	16	15

Sumber: Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Angka 2023, RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur,Tahun 2022 dan Pengolahan Data Tahun 2023



Gambar 3.5.3
Grafik Rasio Guru terhadap murid SMA di Kab. Tanjab Timur tahun 2018-2022

4. Sarana Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Rasio Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) terhadap penduduk berusia 16-18 tahun dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.5.7
Rasio Sekolah Menengah kejuruan (SMK) terhadap Penduduk Berusia 16-18 Tahun di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Gedung	7	7	7	7	7
2	Jumlah Penduduk 16-18 Tahun	10.628	10.633	11.344	11.262	11.212
3	Rasio Sekolah	6,59	6,58	6,17	6,22	6,24

Sumber: Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Angka 2023, RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur,Tahun 2022 dan Pengolahan Data Tahun 2023

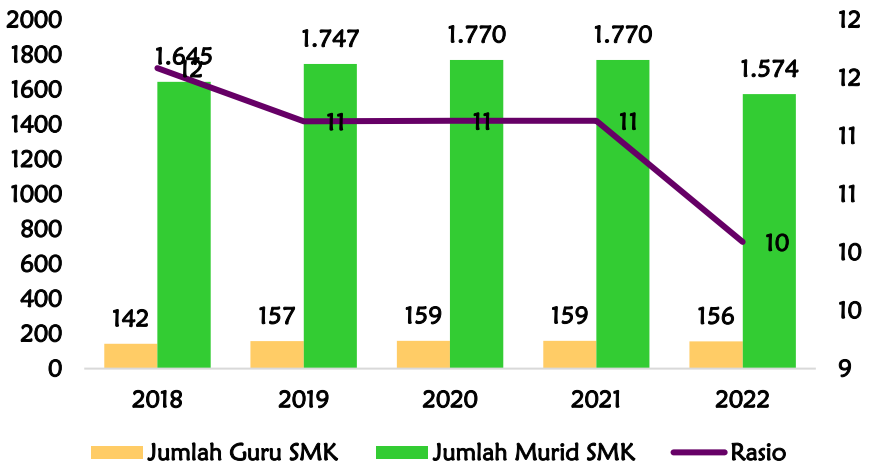
Rasio Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pada tahun 2018 sebesar 6,59%, dan keadaan ini terjadi penurunan hingga 6,24% pada tahun 2022, kecilnya nilai rasio sekolah dapat disebabkan oleh berbagai faktor misalnya jumlah bangunan sekolah yang tidak banyak. Adapun untuk rasio guru terhadap murid SMA selama periode 5 tahun (2018-2022) rasio guru terhadap murid SMK di Kabupaten Tanjung Jabung Timur rata-rata sebesar 11, dengan rasio tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 18 dan rasio terkecil terjadi pada tahun 2022 sebesar 10. Artinya rasio guru terhadap murid SMK yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2022 lebih

dari ideal karena rasio yang terjadi tidak melebihi angka 15. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.5.8
Rasio Guru terhadap murid SMK di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Guru SMK	142	157	159	159	156
2	Jumlah Murid SMK	1.645	1.747	1.770	1.770	1.574
3	Rasio	12	11	11	11	10

Sumber: Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Angka 2023, RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur,Tahun 2022 dan Pengolahan Data Tahun 2023



Gambar 3.5.4
Grafik Rasio Guru terhadap murid SMK di Kab. Tanjab Timur tahun 2018-2022

5. Sarana Pendidikan Madrasah Aliyah (MA)

Rasio Sekolah Madrasah Aliyah (MA) terhadap penduduk berusia 16-18 tahun dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.5.9
Rasio Sekolah Madrasah Aliyah (MA) terhadap Penduduk Berusia 16-18 Tahun di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Gedung	22	24	24	24	26
2	Jumlah Penduduk 16-18 Tahun	10.628	10.633	11.344	11.262	11.212
3	Rasio Sekolah	20,70	22,57	21,16	21,31	23,19

Sumber: Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Angka 2023, RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur,Tahun 2022 dan Pengolahan Data Tahun 2023

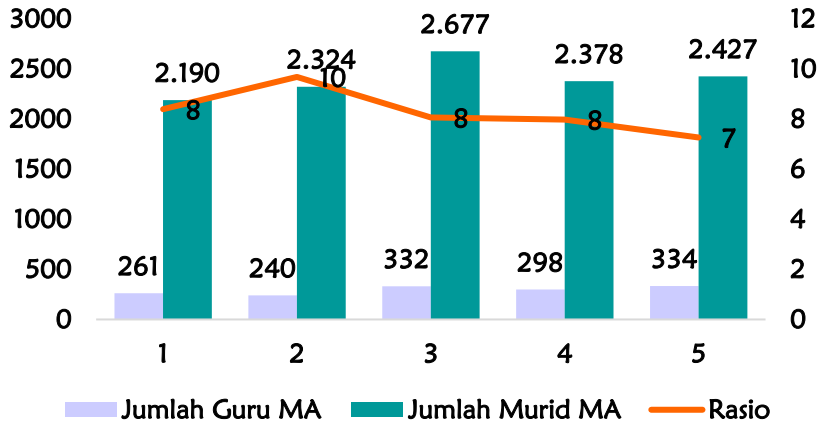
Bahwa berdasarkan pada tabel diatas rata rata rasio sekolah di Kab. Tanjab Timur berfluktuasi dimana rasio sekolah pada tahun 2018 sebesar 20,70% pada tahun 2019 sebesar 22,57% dan keadaan ini terjadi peningkatan pada tahun 2022 sebesar 23,19%. Terjadinya peningkatan rasio sekolah karena pertambahnya jumlah gedung dari 24 unit pada tahun 2018-2021 menjadi 26 unit pada tahun 2022. Nilai rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia 16-18 tahun. Dimana semakin tinggi nilai rasio maka semakin baik kesempatan belajar bagi penduduk usia pendidikan.

Sementara rasio guru terhadap murid MA selama periode 2018-2022 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur rata-rata sebesar 8, dengan rasio tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 10 dan rasio terendah terjadi pada tahun 2022 sebesar 7. Artinya rasio yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2022 lebih dari ideal. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

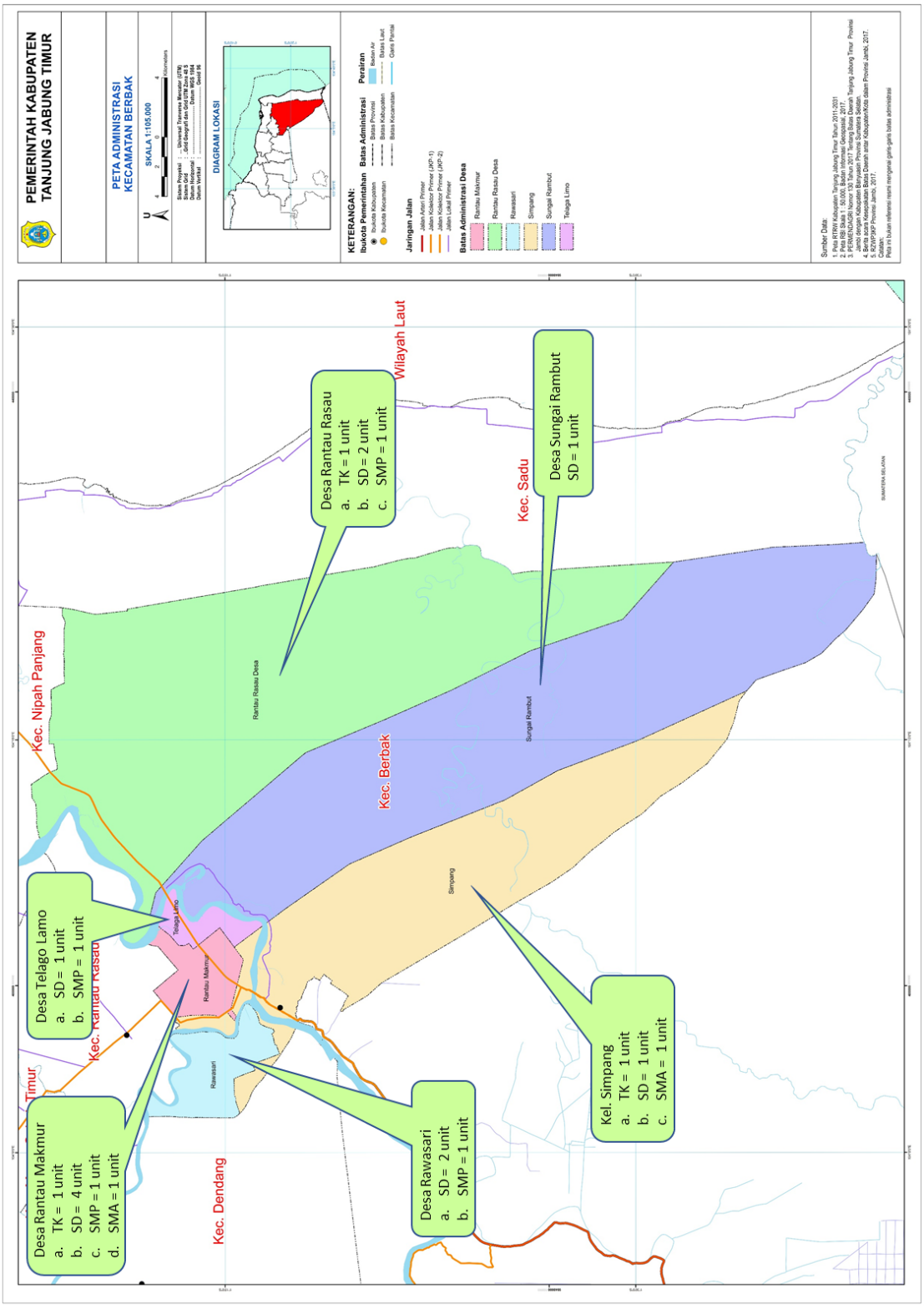
Tabel III.5.10
Rasio Sekolah Madrasah Aliyah (MA) terhadap Penduduk Berusia 16-18 Tahun di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Guru MA	261	240	332	298	334
2	Jumlah Murid MA	2.190	2.324	2.677	2.378	2.427
3	Rasio	8	10	8	8	7

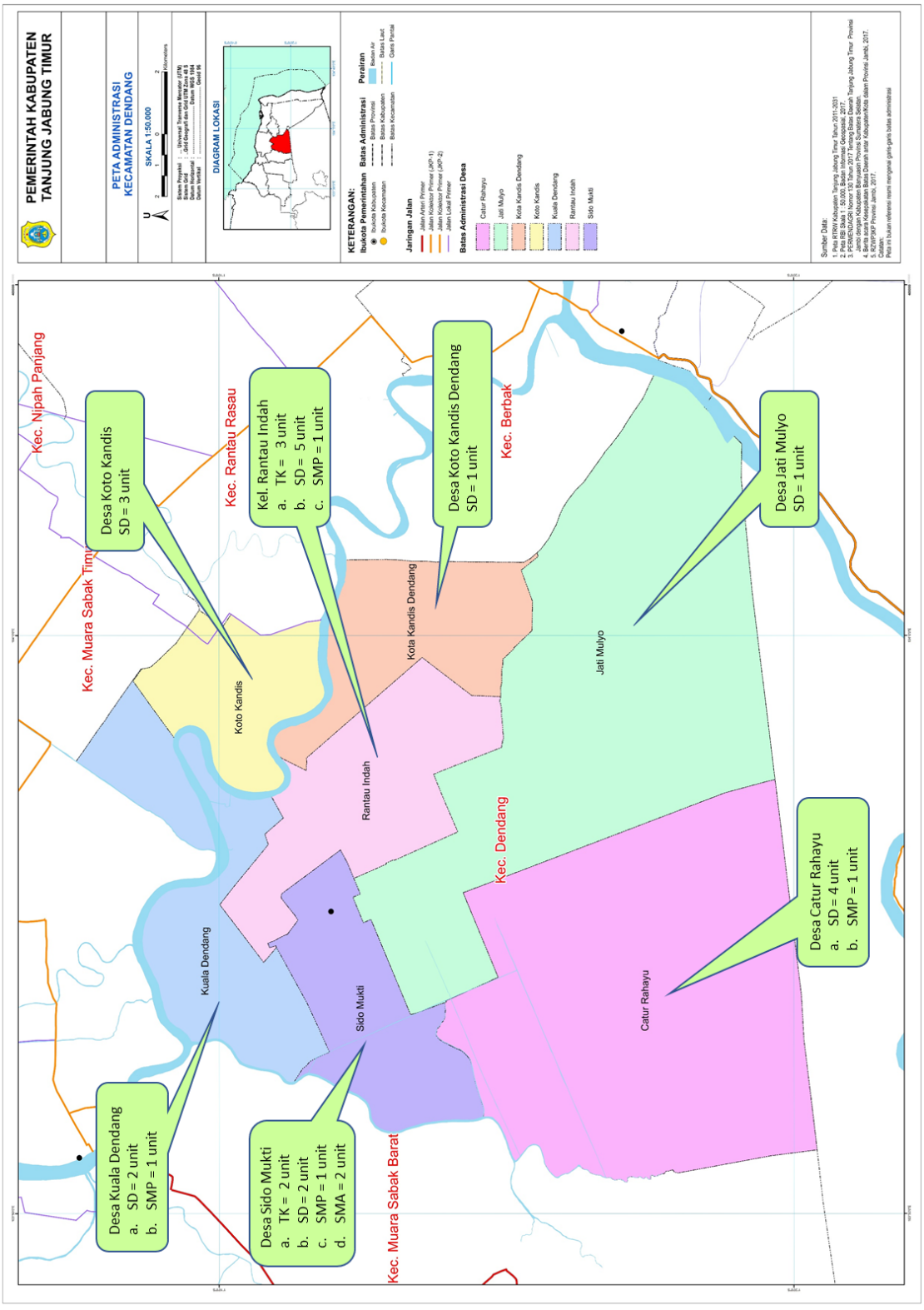
Sumber: Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Angka 2023, RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur,Tahun 2022 dan Pengolahan Data Tahun 2023



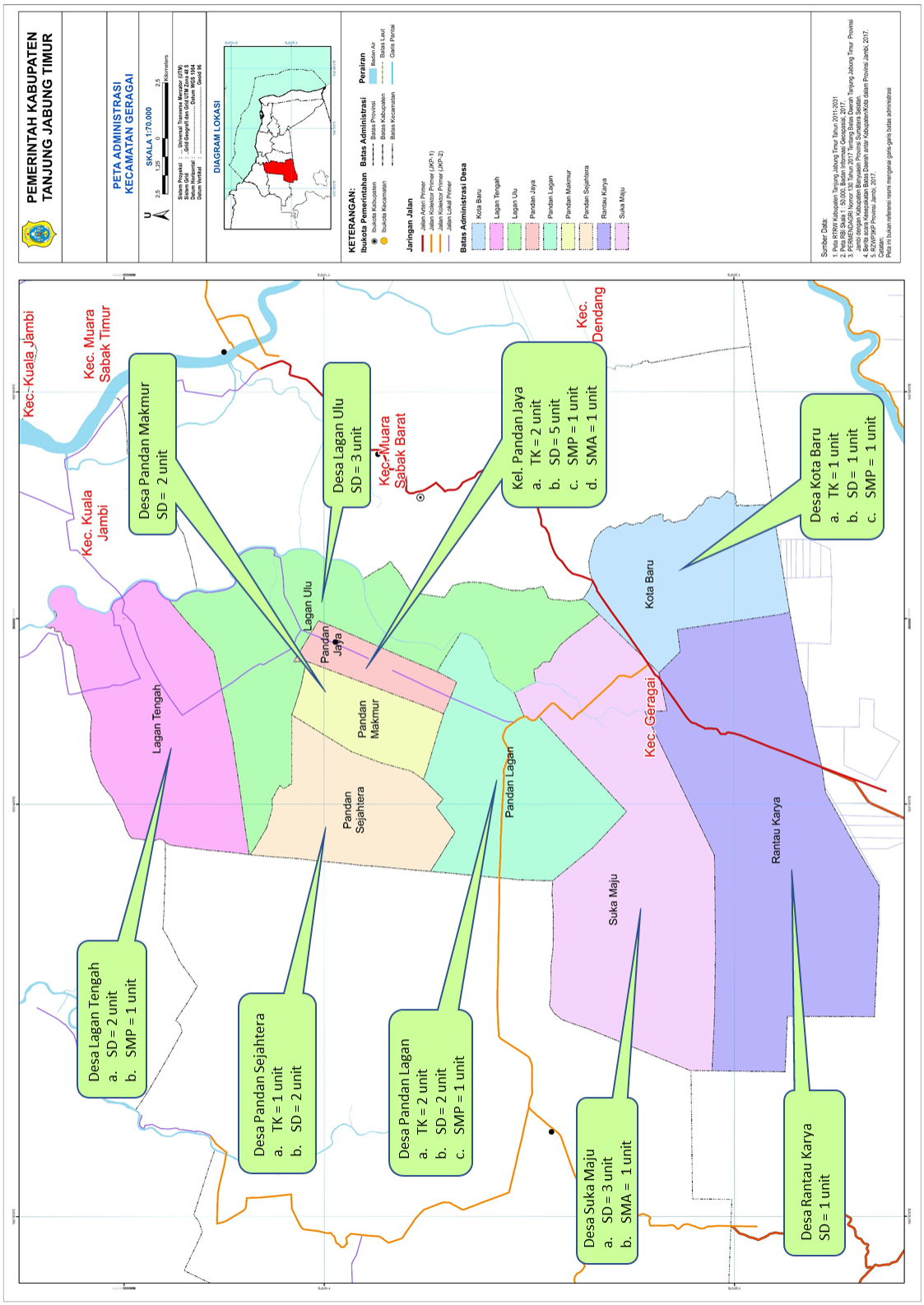
Gambar 3.5.5
Grafik Rasio Guru terhadap murid MA di Kab. Tanjab Timur tahun 2018-2022



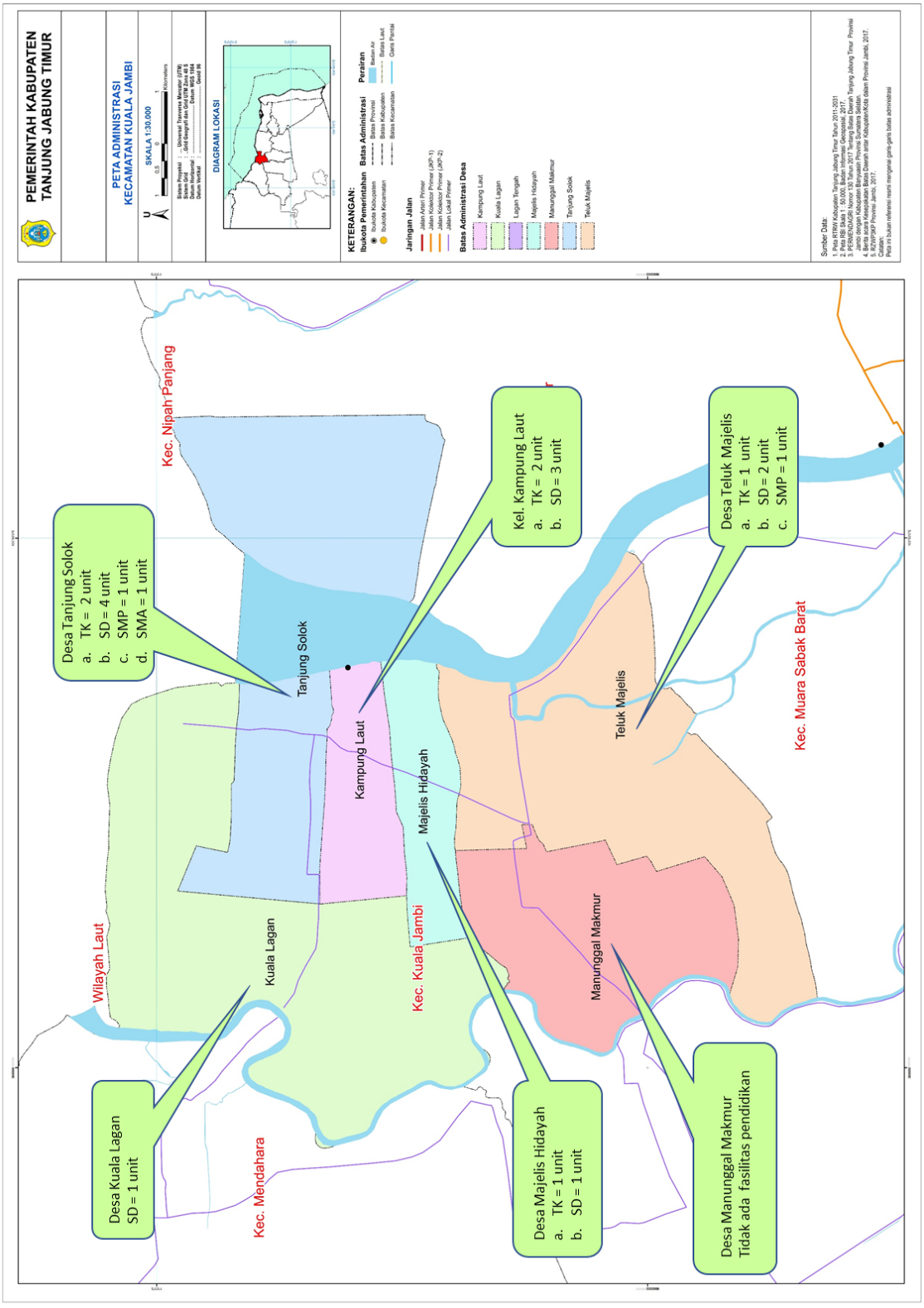
Gambar 3.5.6
Peta Jumlah Sebaran Fasilitas Pendidian di Kecamatan Berbak



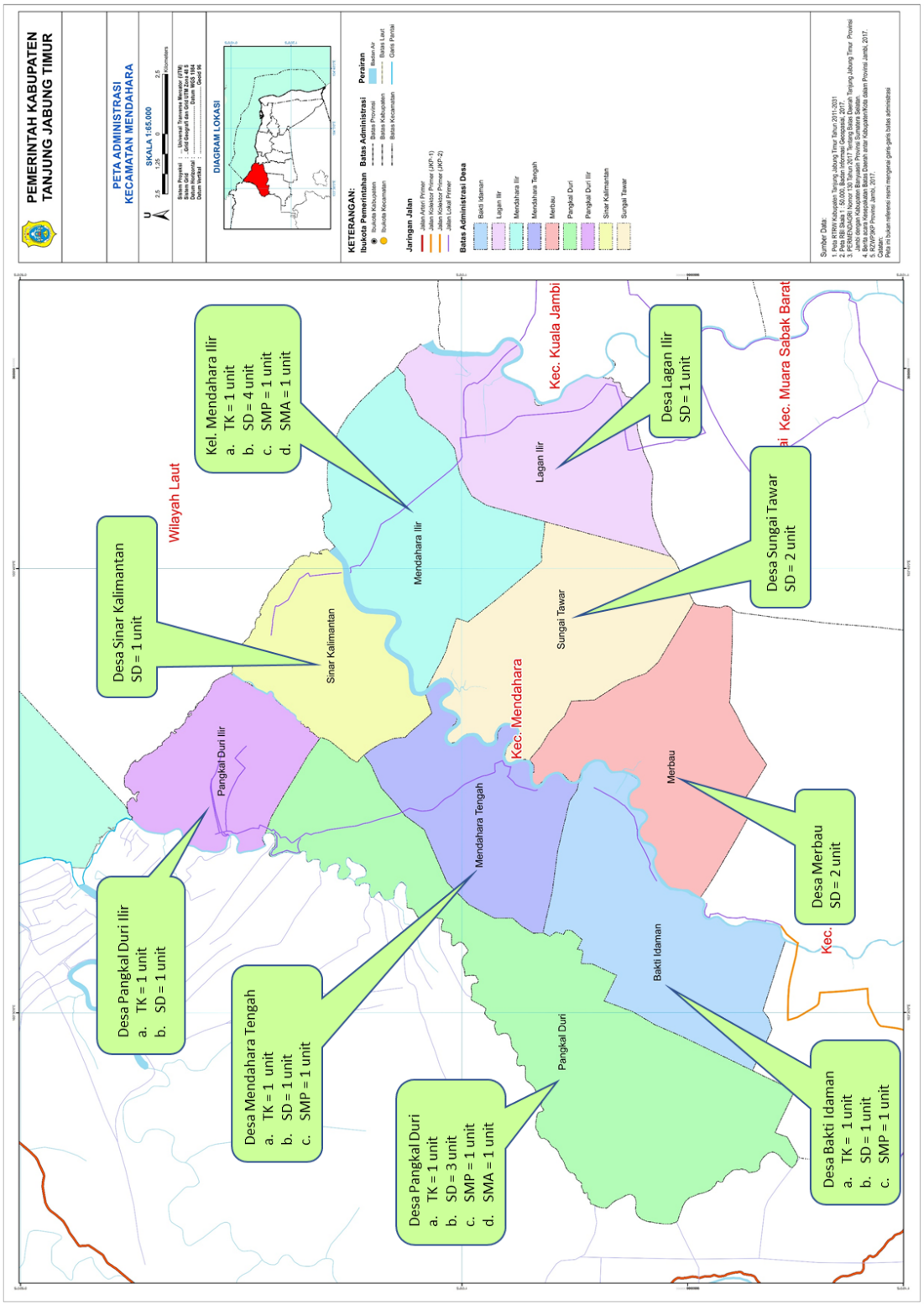
Gambar 3.5.7
Peta Jumlah Sebaran Fasilitas Pendidian di Kecamatan Dendang



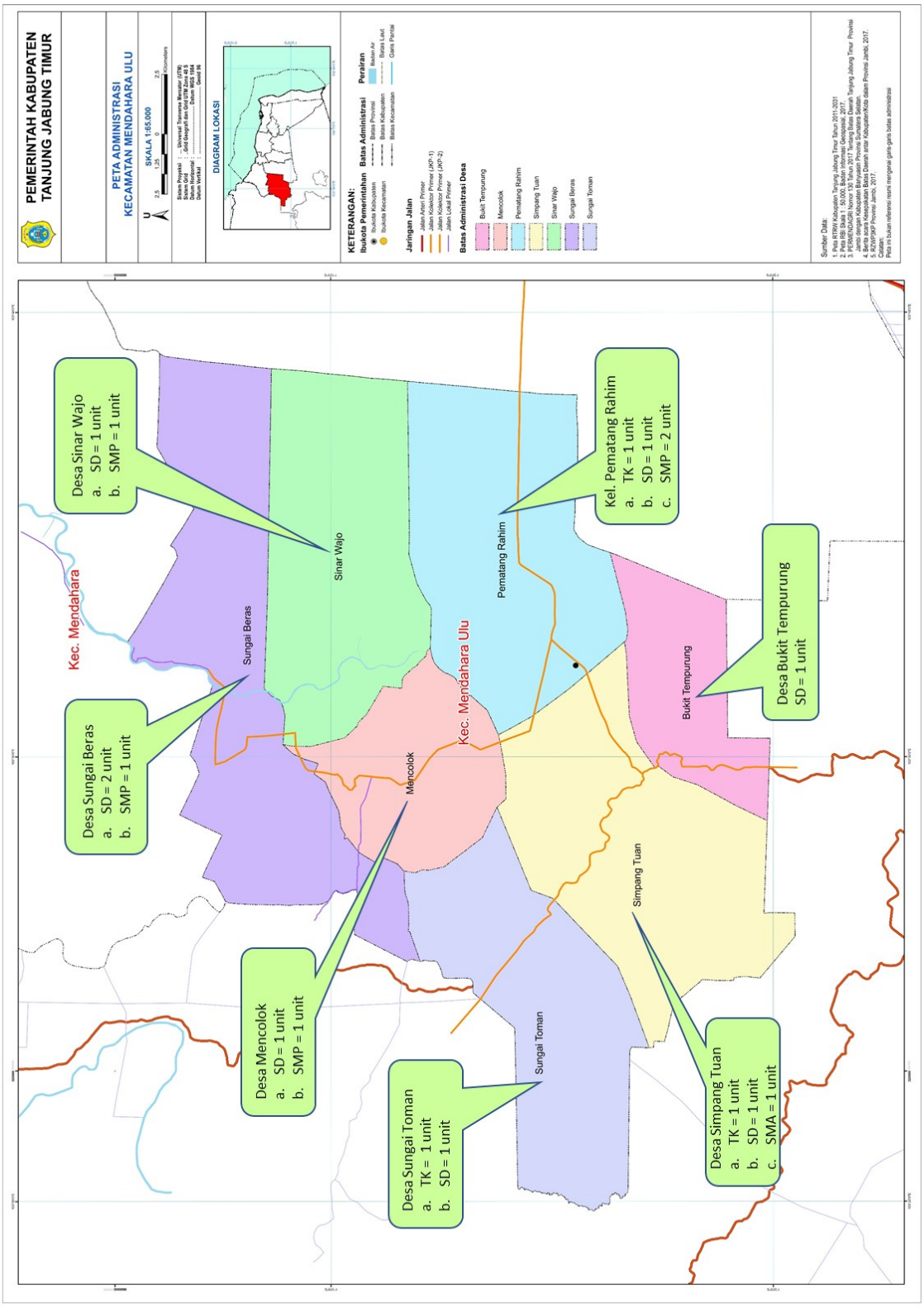
Gambar 3.5.8
Peta Jumlah Sebaran Fasilitas Pendidian di Kecamatan Geragai



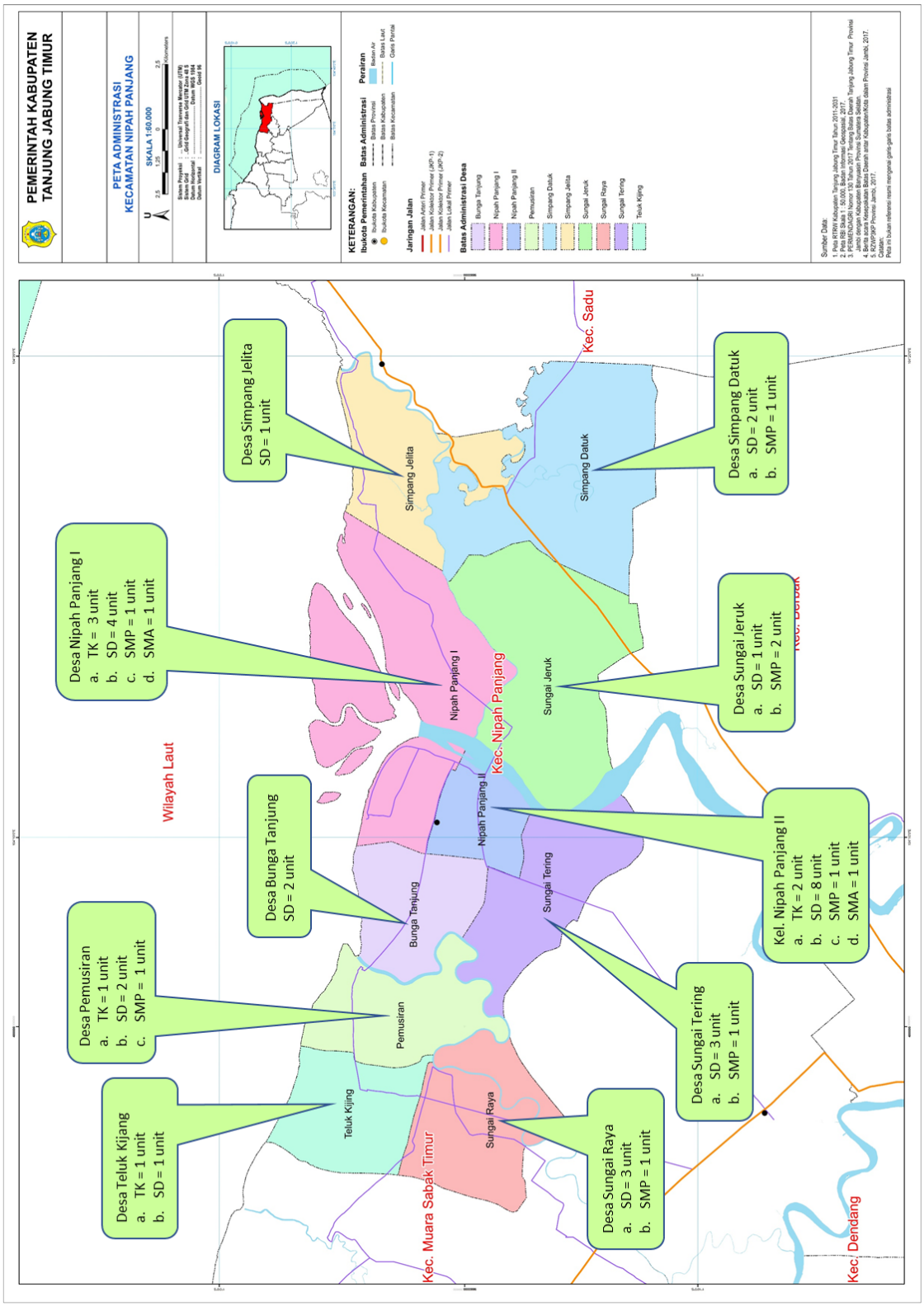
Gambar 3.5.9
Peta Jumlah Sebaran Fasilitas Pendidian di Kecamatan Kuala Jambi



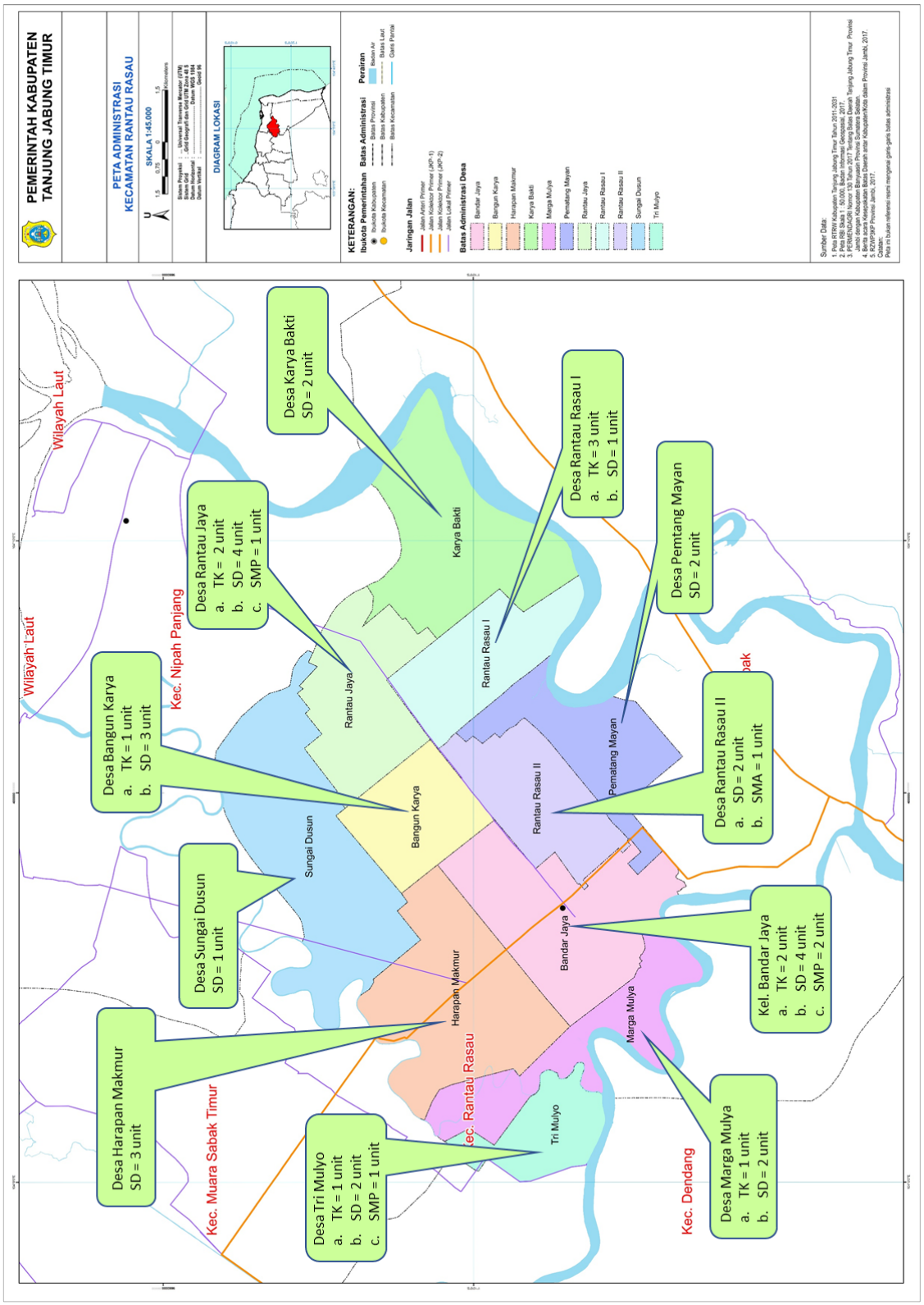
Gambar 3.5.10
Peta Jumlah Sebaran Fasilitas Pendidian di Kecamatan Mendahara



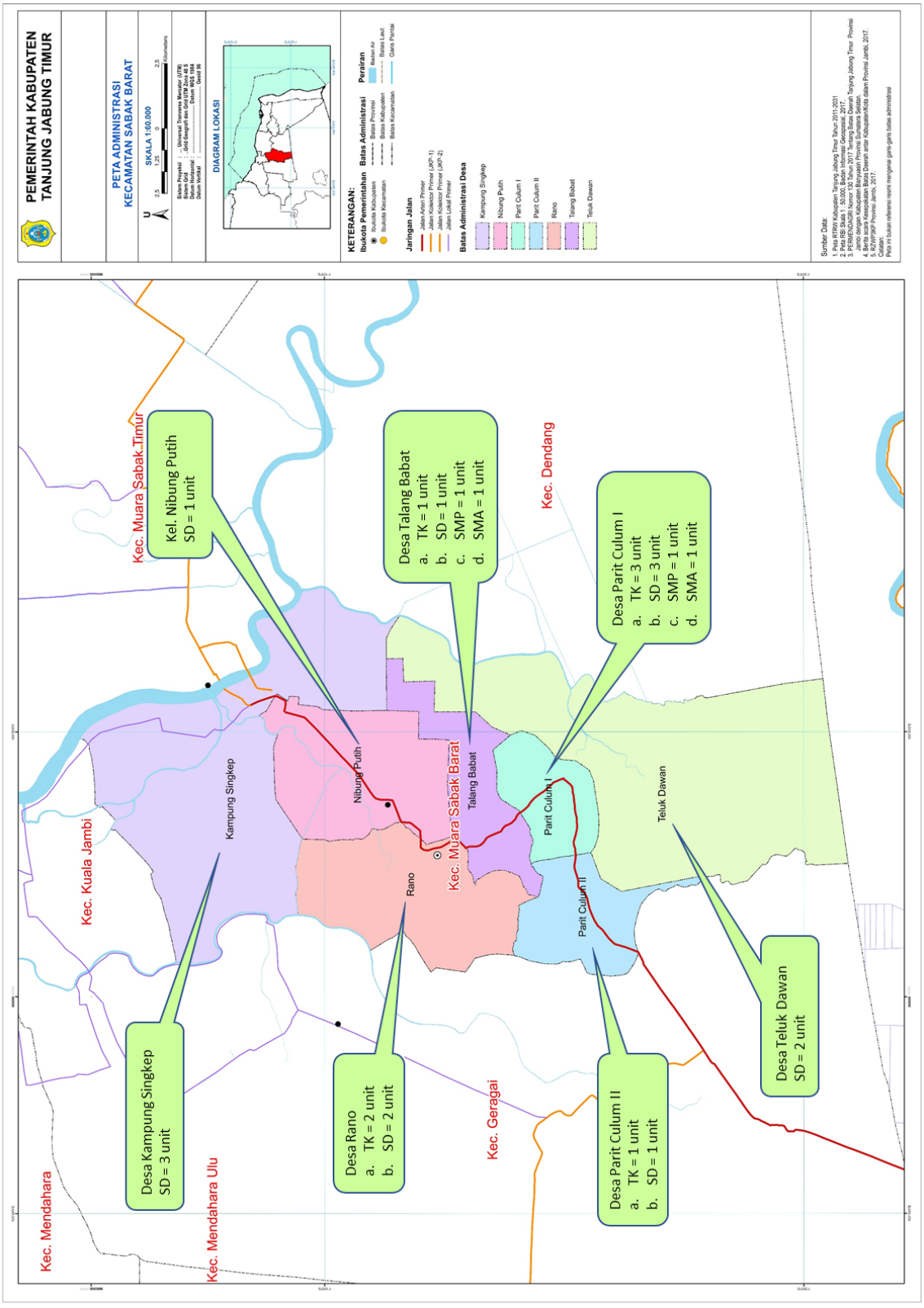
Gambar 3.5.11
Peta Jumlah Sebaran Fasilitas Pendidian di Kecamatan Mendahara Ulu



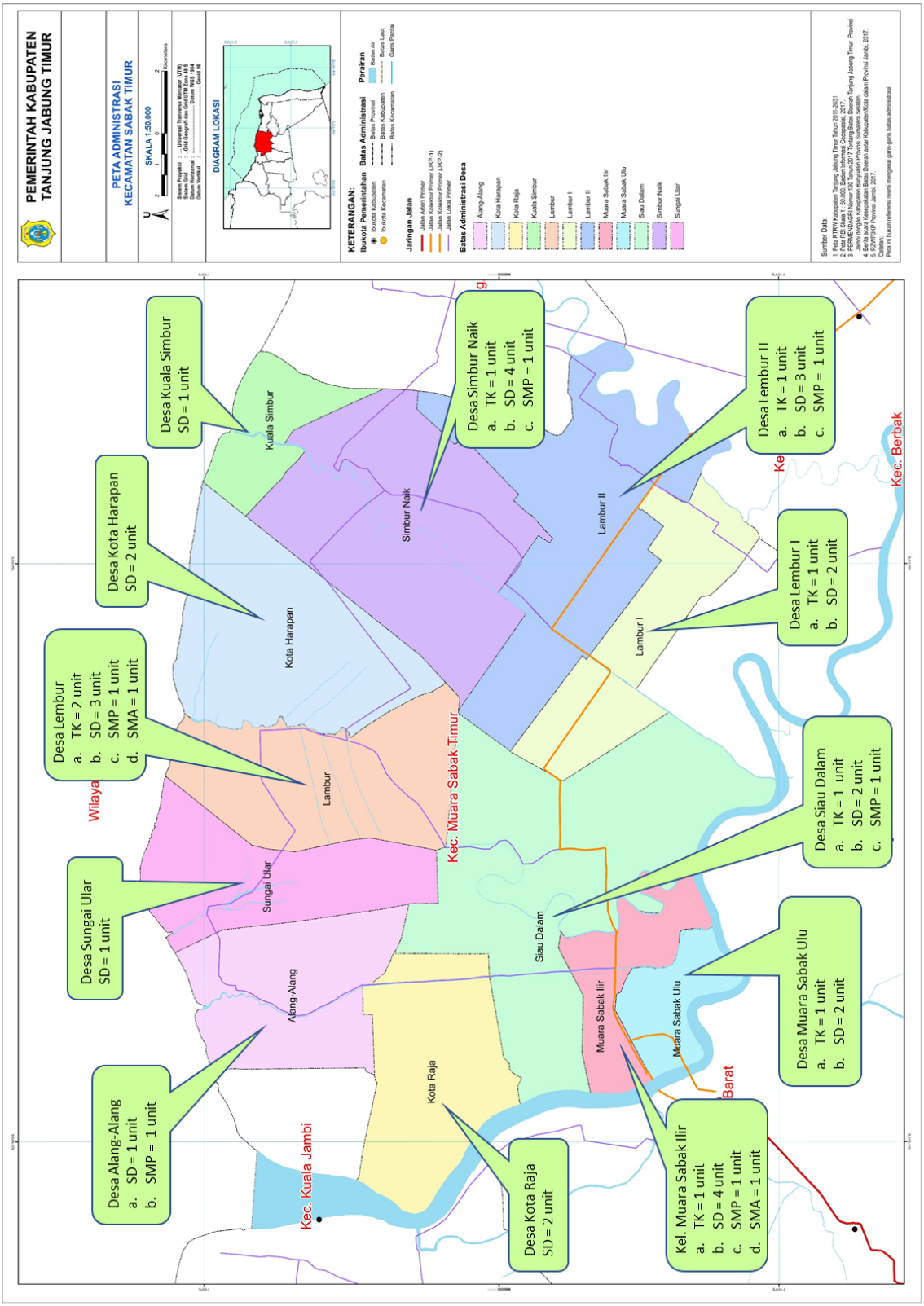
Gambar 3.5.12
Peta Jumlah Sebaran Fasilitas Pendidian di Kecamatan Nipah Panjang



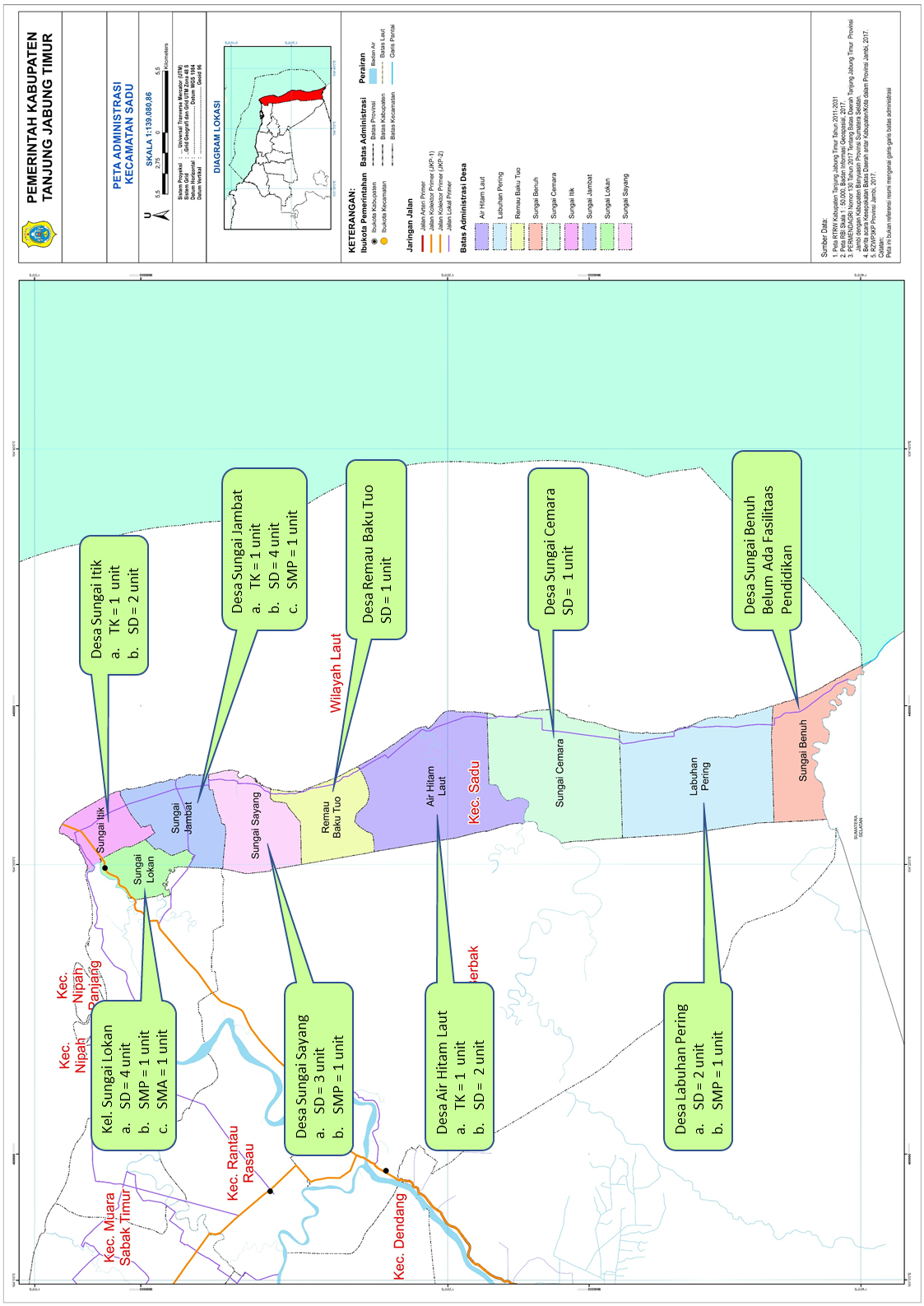
Gambar 3.5.13
Peta Jumlah Sebaran Fasilitas Pendidian di Kecamatan Rantau Rasau



Gambar 3.5.14
Peta Jumlah Sebaran Fasilitas Pendidian di Kecamatan Sabak Barat



Gambar 3.5.15
Peta Jumlah Sebaran Fasilitas Pendidian di Kecamatan Sabak Timur



Gambar 3.5.16
Peta Jumlah Sebaran Fasilitas Pendidian di Kecamatan Sadu

3.5.1.2 Kesehatan

Salah satu indikator perkembangan kondisi kesehatan masyarakat pada satu kurun waktu yang diukur dipengaruhi oleh angka kematian. Tingginya angka kematian dapat menggambarkan kondisi sarana kesehatan berupa pelayanan kesehatan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, disamping kondisi ekonomi juga menggambarkan tingkat keberhasilan pembangunan kesehatan pada suatu daerah dalam satu tahun. Salah satu capaian bidang kesehatan adalah menurunnya angka kematian bayi per 1.000 KH. Angka kematian bayi Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami fluktuatif, pergerakan data angka kematian bayi tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.5.11
Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Kematian Bayi	11	13	20	25	11
2	Jumlah Kelahiran Hidup	3.623	5.872	7.091	7.232	6.101

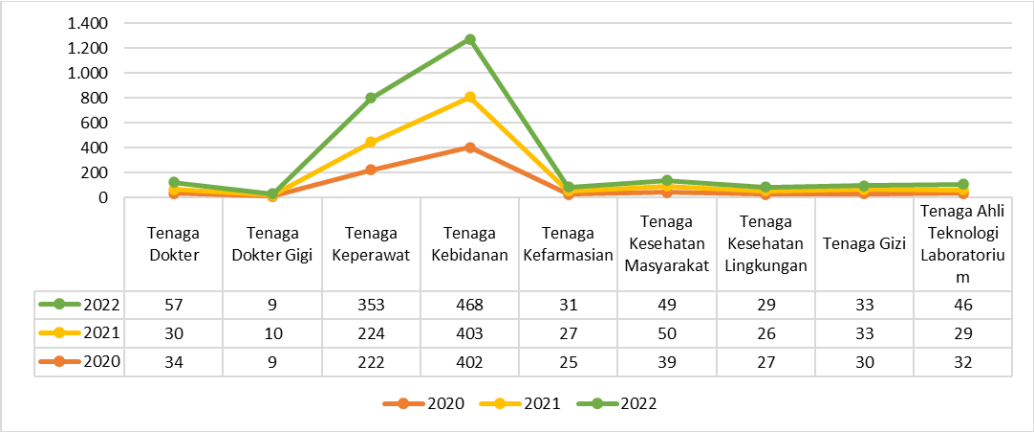
Sumber: Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Angka 2023, RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur,Tahun 2022 dan BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur,2023

Sarana kesehatan yang berada di Kab. Tanjab Timur cukup lengkap, dimana terdapat 1 rumah sakit umum. Sedangkan tenaga kesehatan yang berada di Kab. Tanjab Timur antara lain tenaga medis sebanyak 57, perawat sebanyak 353, tenaga kefarmasian sebanyak 31 dan 157 tenaga kesehatan lainnya pada tahun 2022.

Tabel III.5.12
Jumlah tenaga Kesehatan di Kab. Tanjab Timur tahun 2020-2022

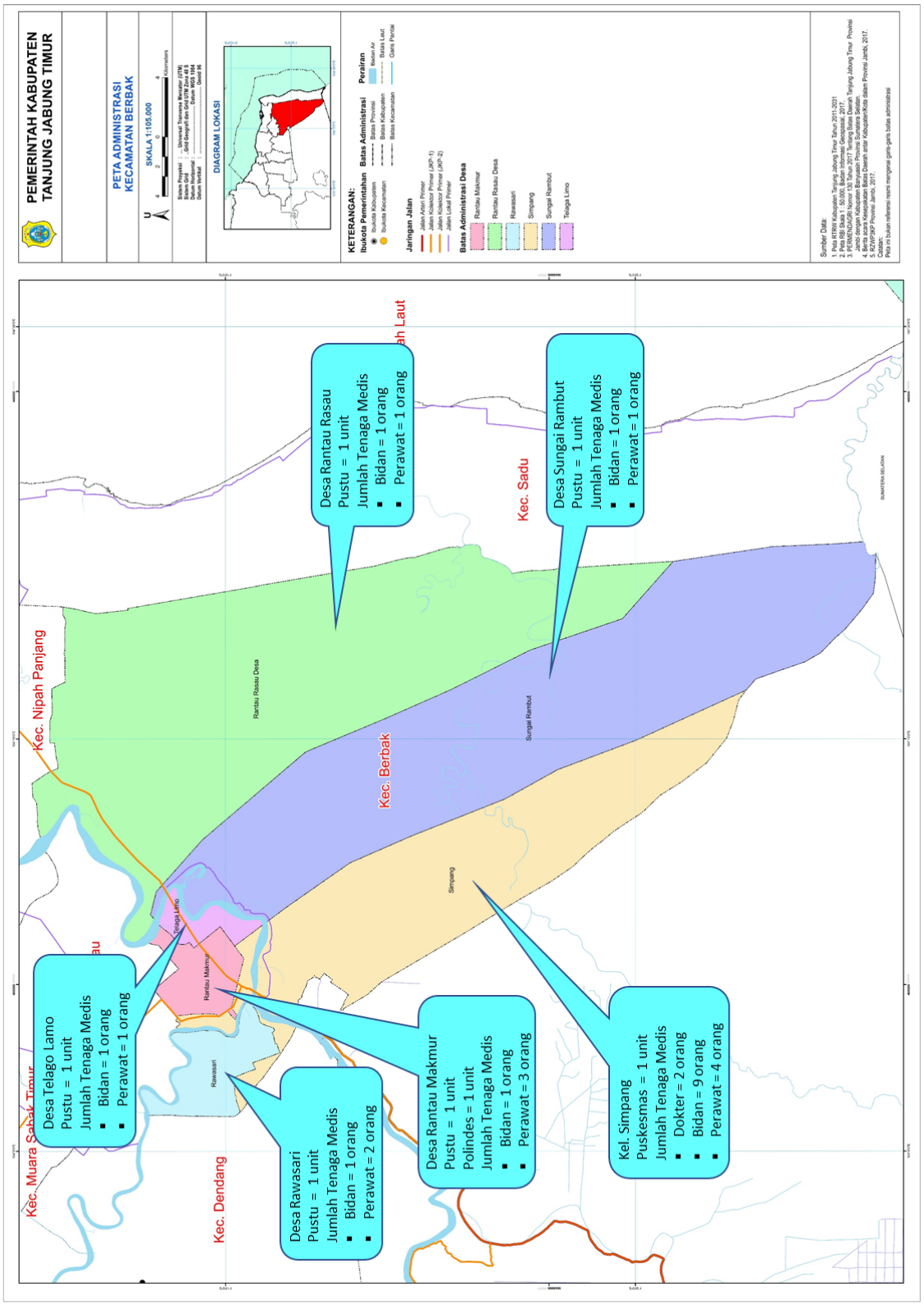
No	Tenaga Kesehatan	2020	2021	2022
1	Tenaga Dokter	34	30	57
2	Tenaga Dokter Gigi	9	10	9
3	Tenaga Keperawat	222	224	353
4	Tenaga Kebidanan	402	403	468
5	Tenaga Kefarmasian	25	27	31
6	Tenaga Kesehatan Masyarakat	39	50	49
7	Tenaga Kesehatan Lingkungan	27	26	29
8	Tenaga Gizi	30	33	33
9	Tenaga Ahli Teknologi Laboratorium	32	29	46
Jumlah		**820**	**832**	**1.075**

Sumber: Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Angka 2023

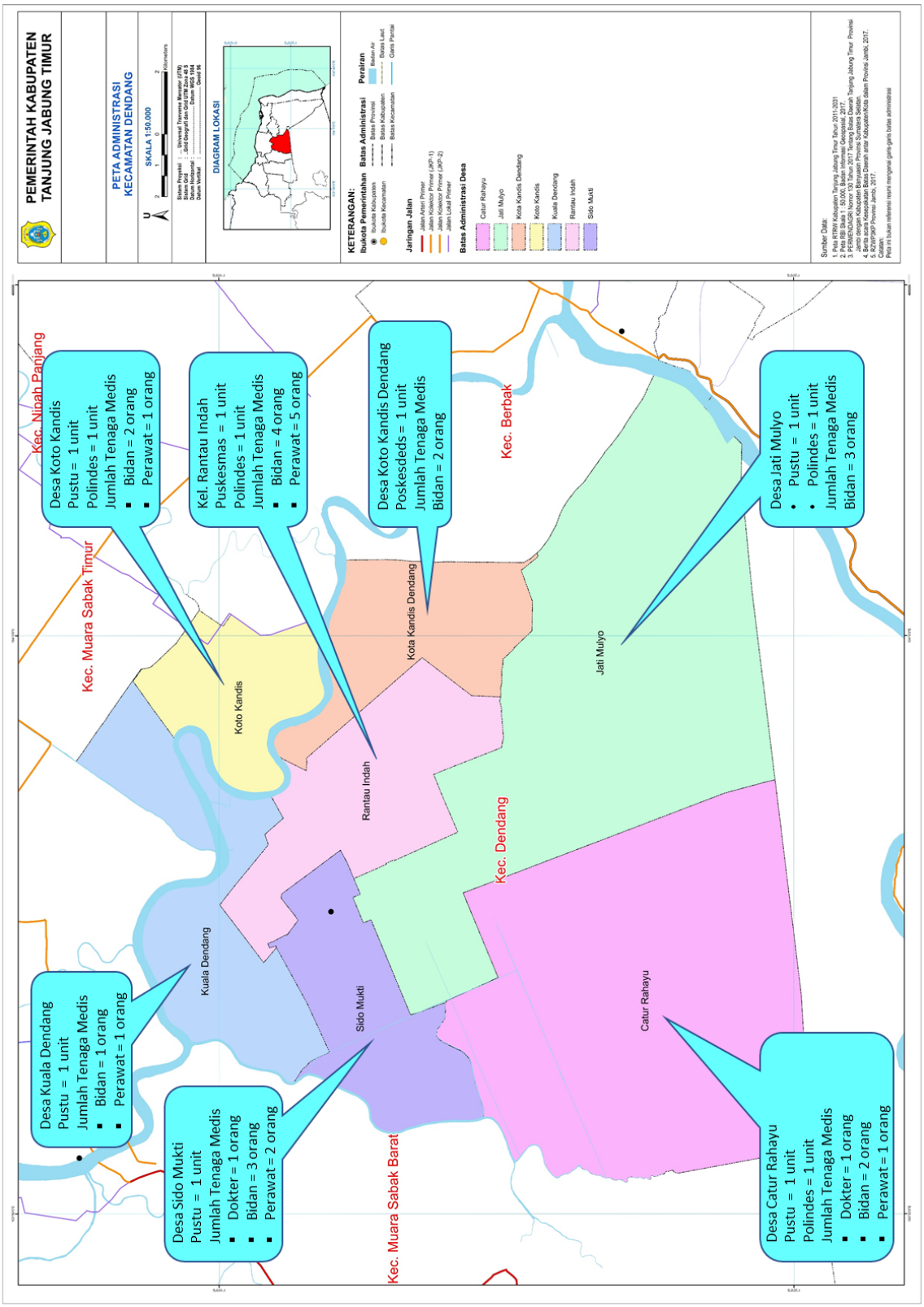


	Tenaga Dokter	Tenaga Dokter Gigi	Tenaga Keperawat	Tenaga Kebidanan	Tenaga Kefarmasian	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Tenaga Kesehatan Lingkungan	Tenaga Gizi	Tenaga Ahli Teknologi Laboratorium
2022	57	9	353	468	31	49	29	33	46
2021	30	10	224	403	27	50	26	33	29
2020	34	9	222	402	25	39	27	30	32

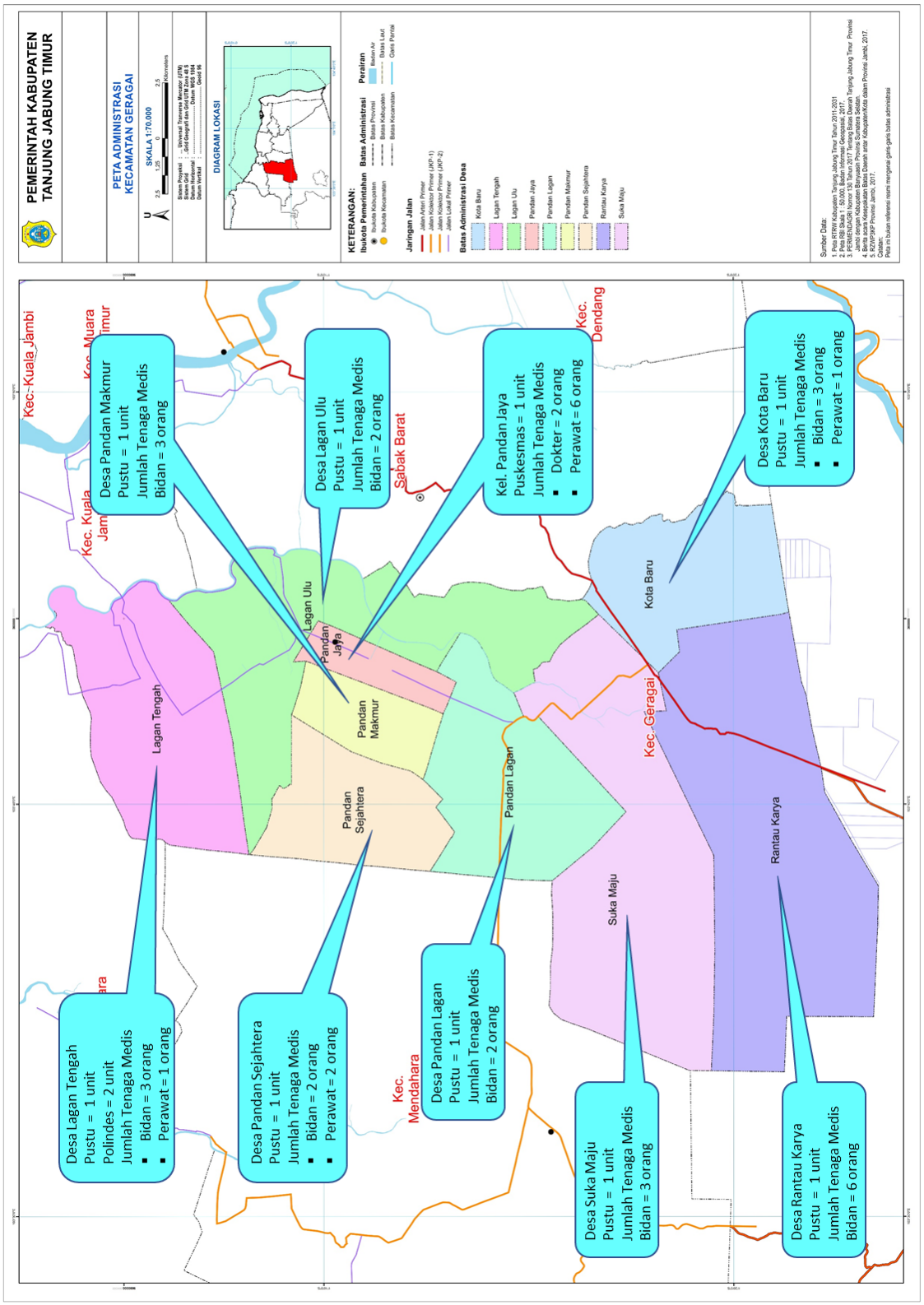
Gambar 3.5.17
Grafik Jumlah Tenaga Kesehatan di Kab. Tanjab Timur tahun 2020-2022



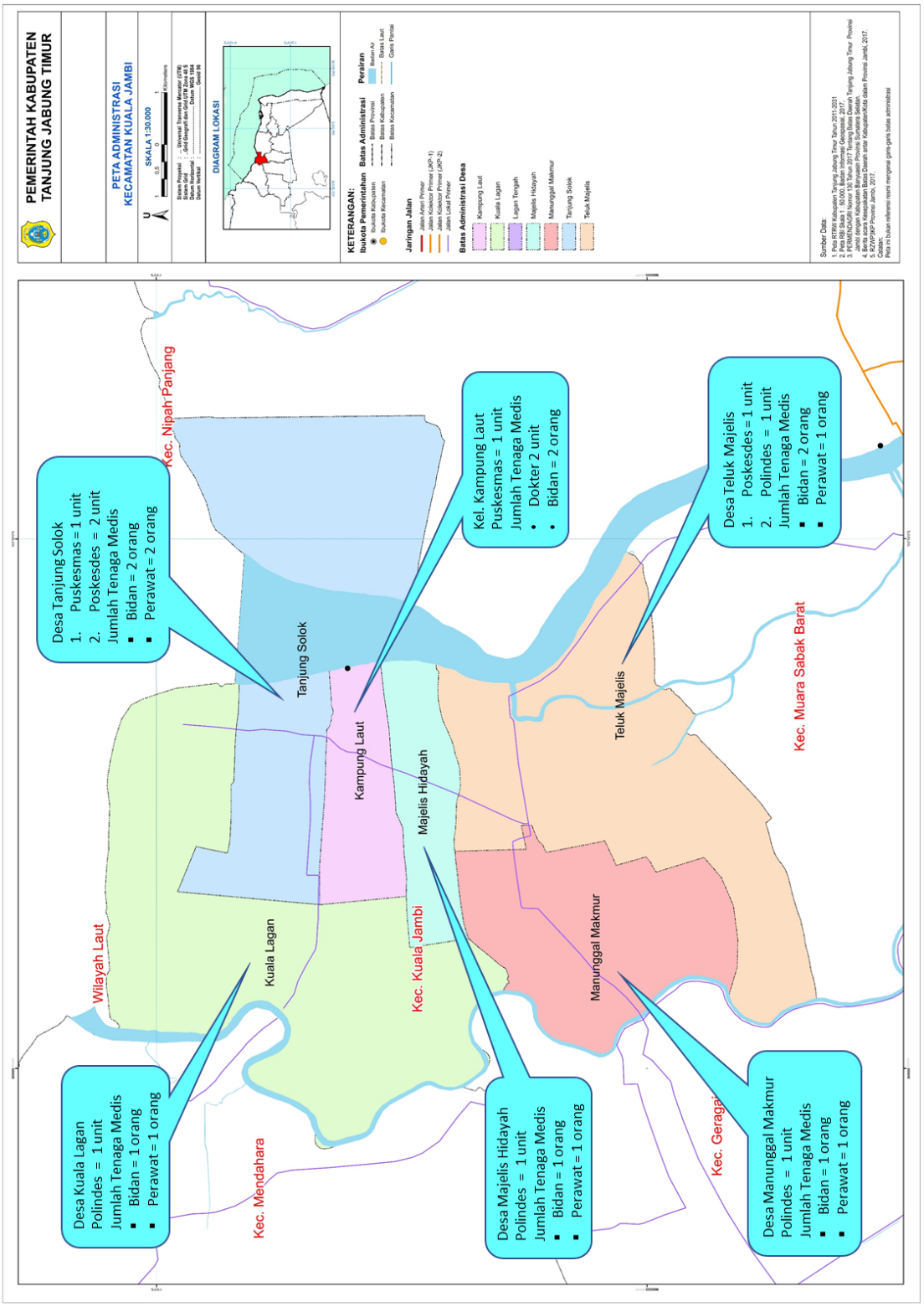
Gambar 3.5.18
Peta Jumlah Sebaran Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Berbak



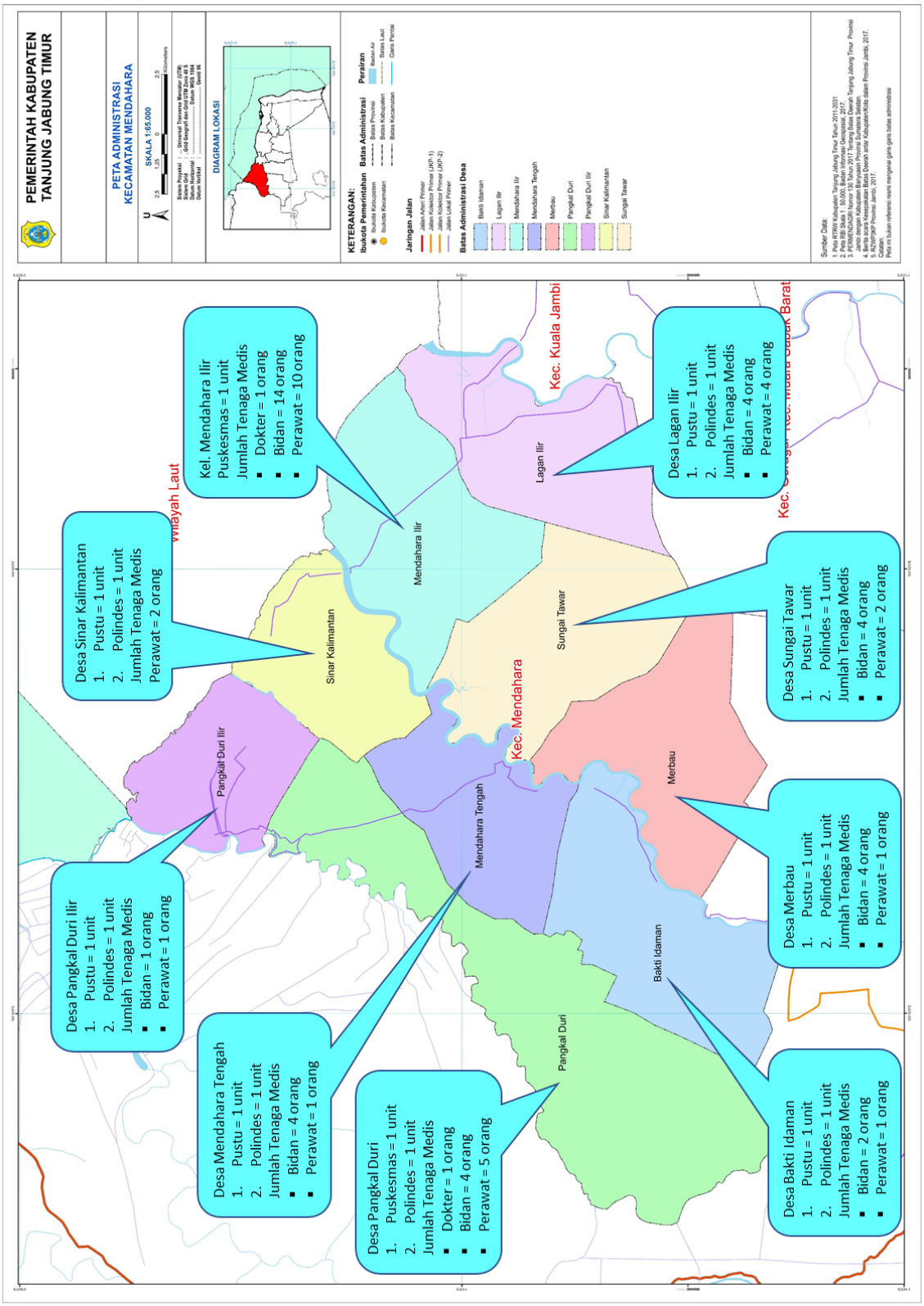
Gambar 3.5.19
Peta Jumlah Sebaran Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Dendang



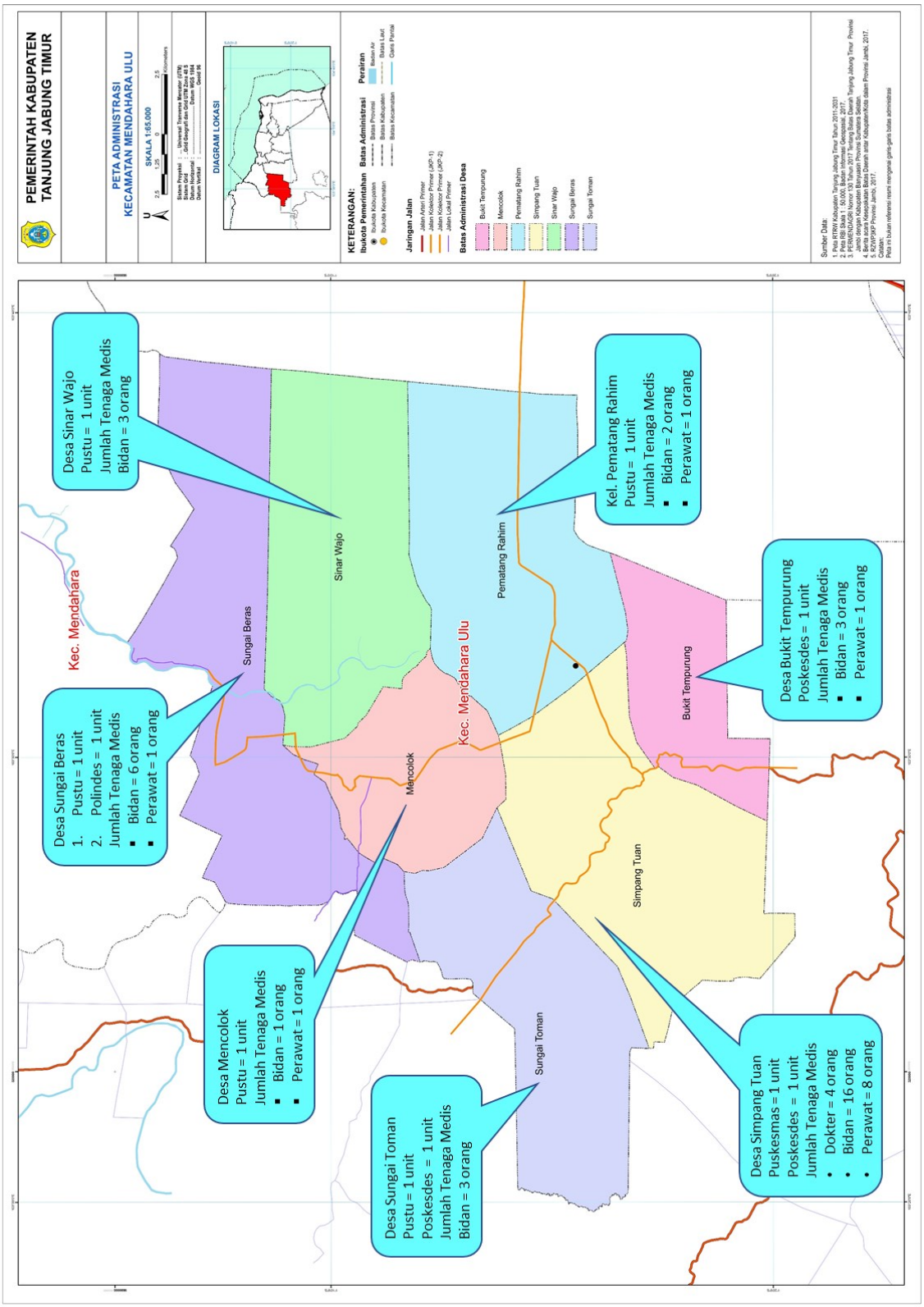
Gambar 3.5.20
Peta Jumlah Sebaran Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Geragai



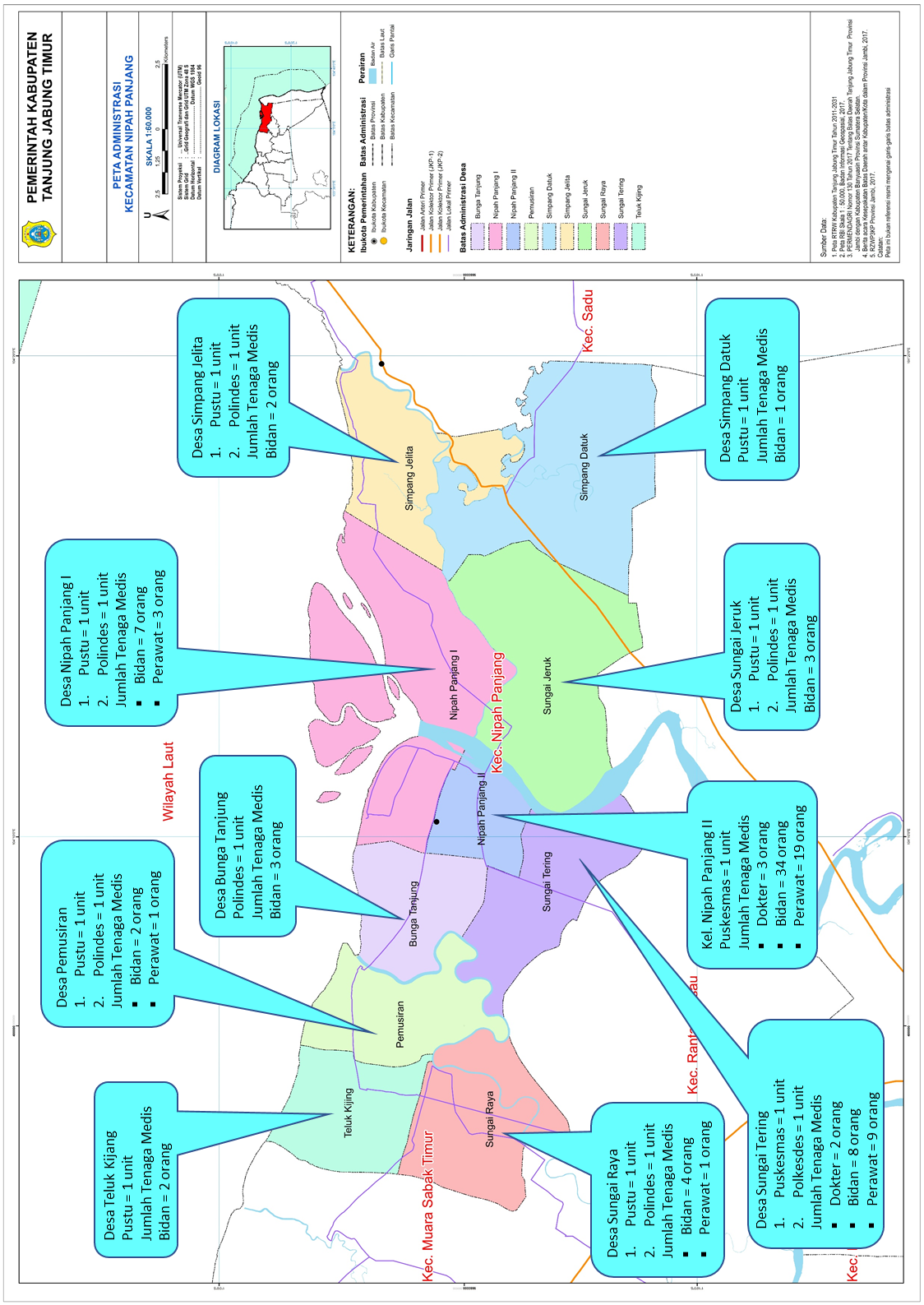
Gambar 3.5.21
Peta Jumlah Sebaran Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Kuala Jambi



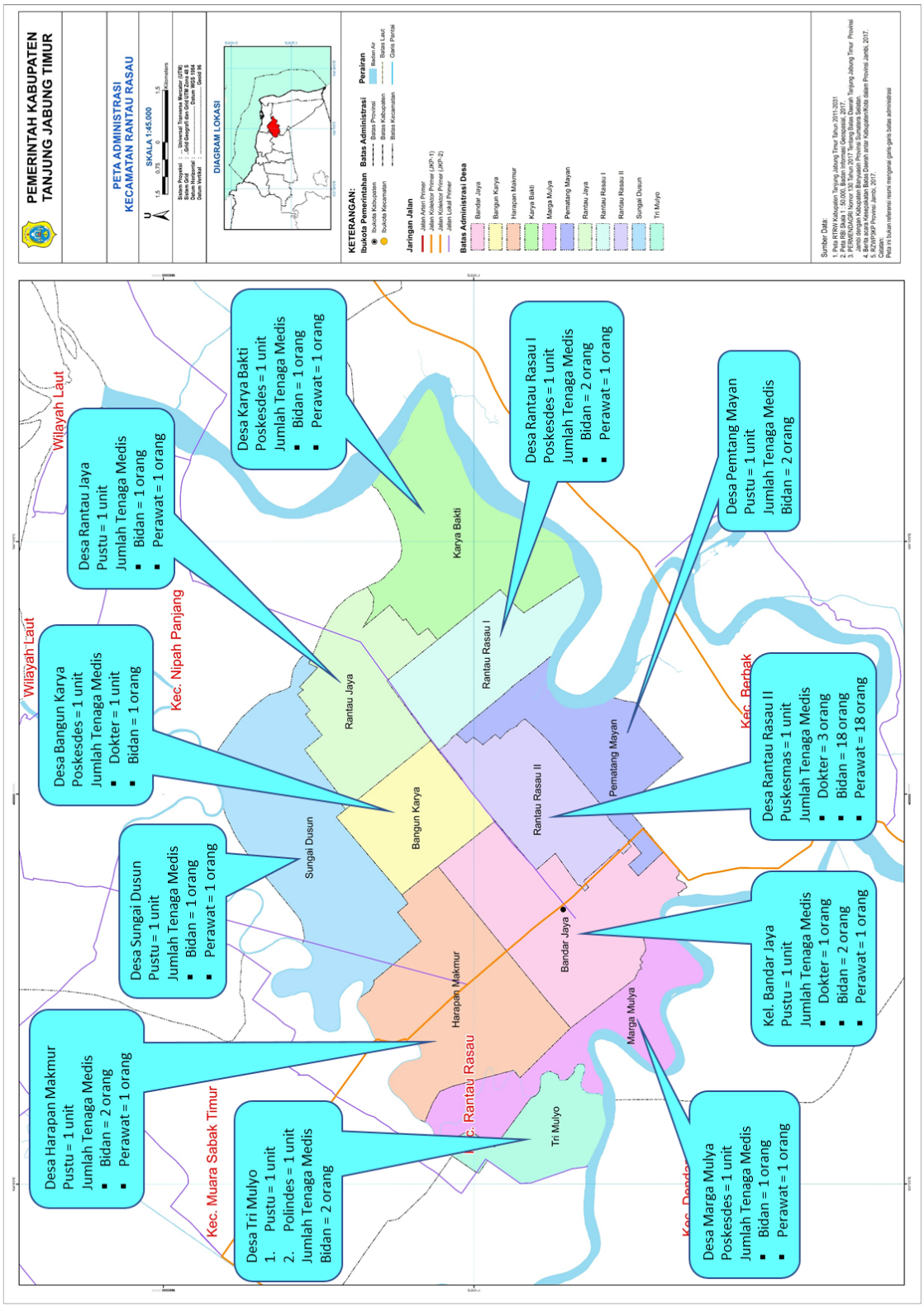
Gambar 3.5.22
Peta Jumlah Sebaran Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Mendahara



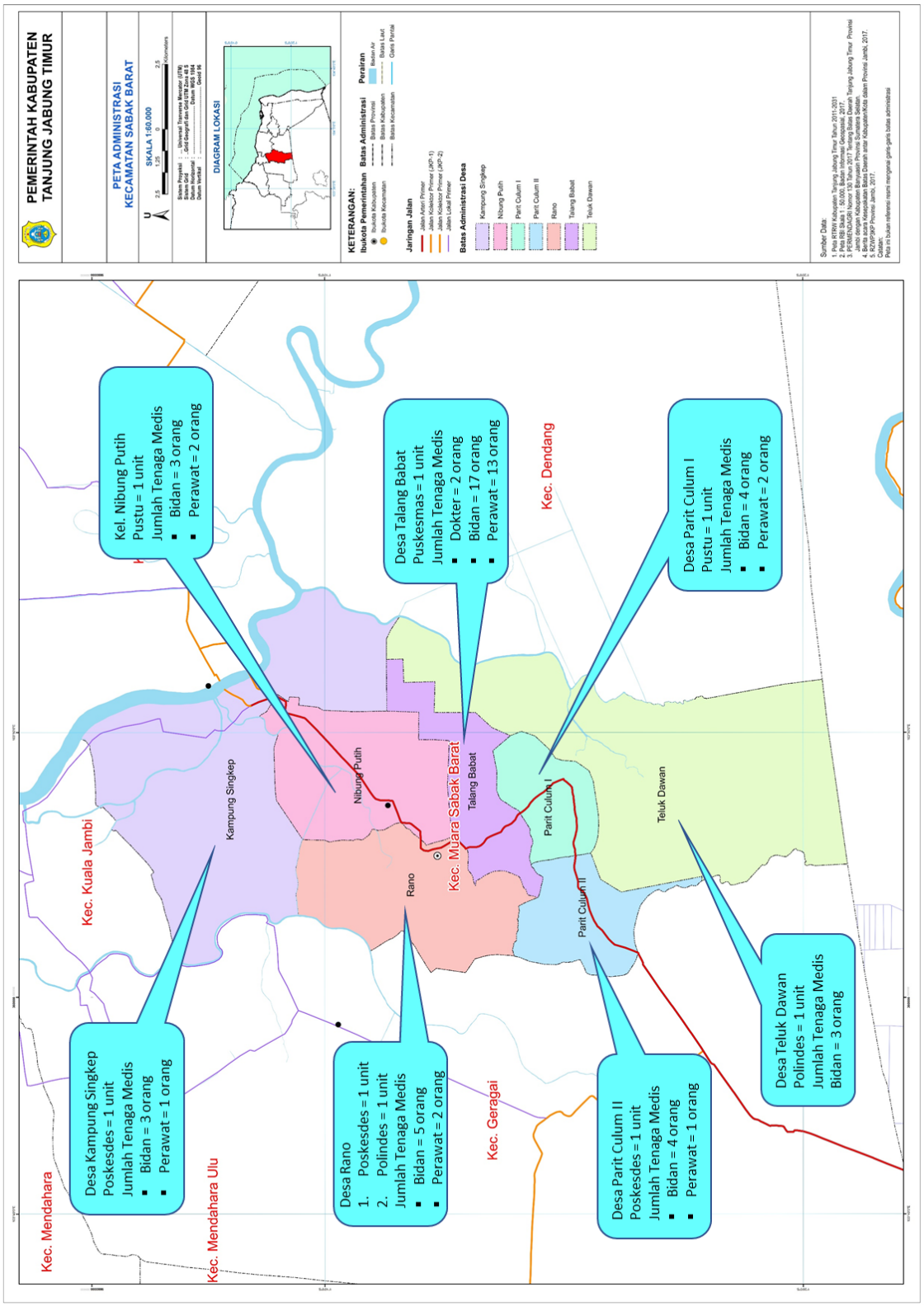
Gambar 3.5.23
Peta Jumlah Sebaran Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Mendahara Ulu



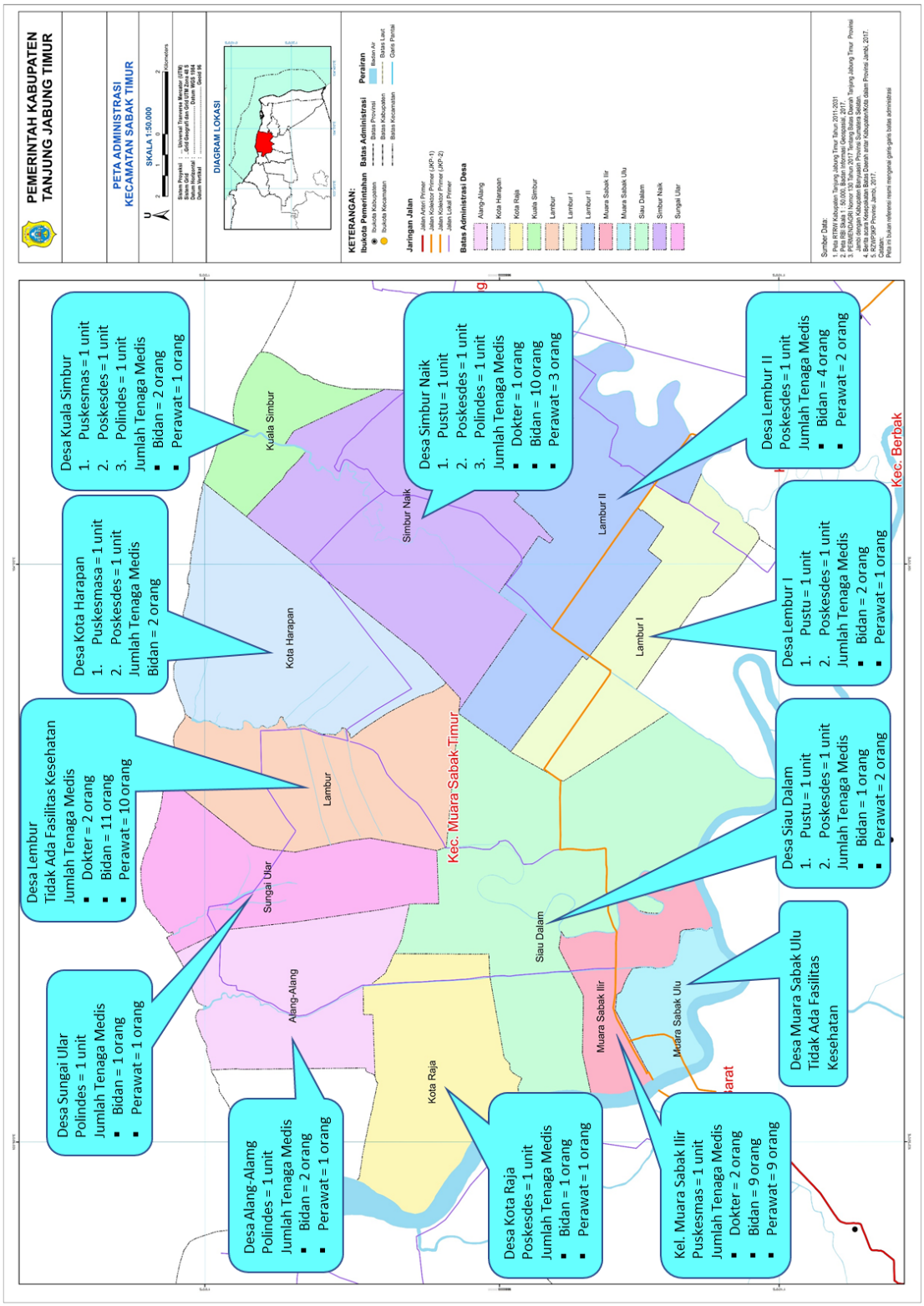
Gambar 3.5.24
Peta Jumlah Sebaran Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Nipah Panjang



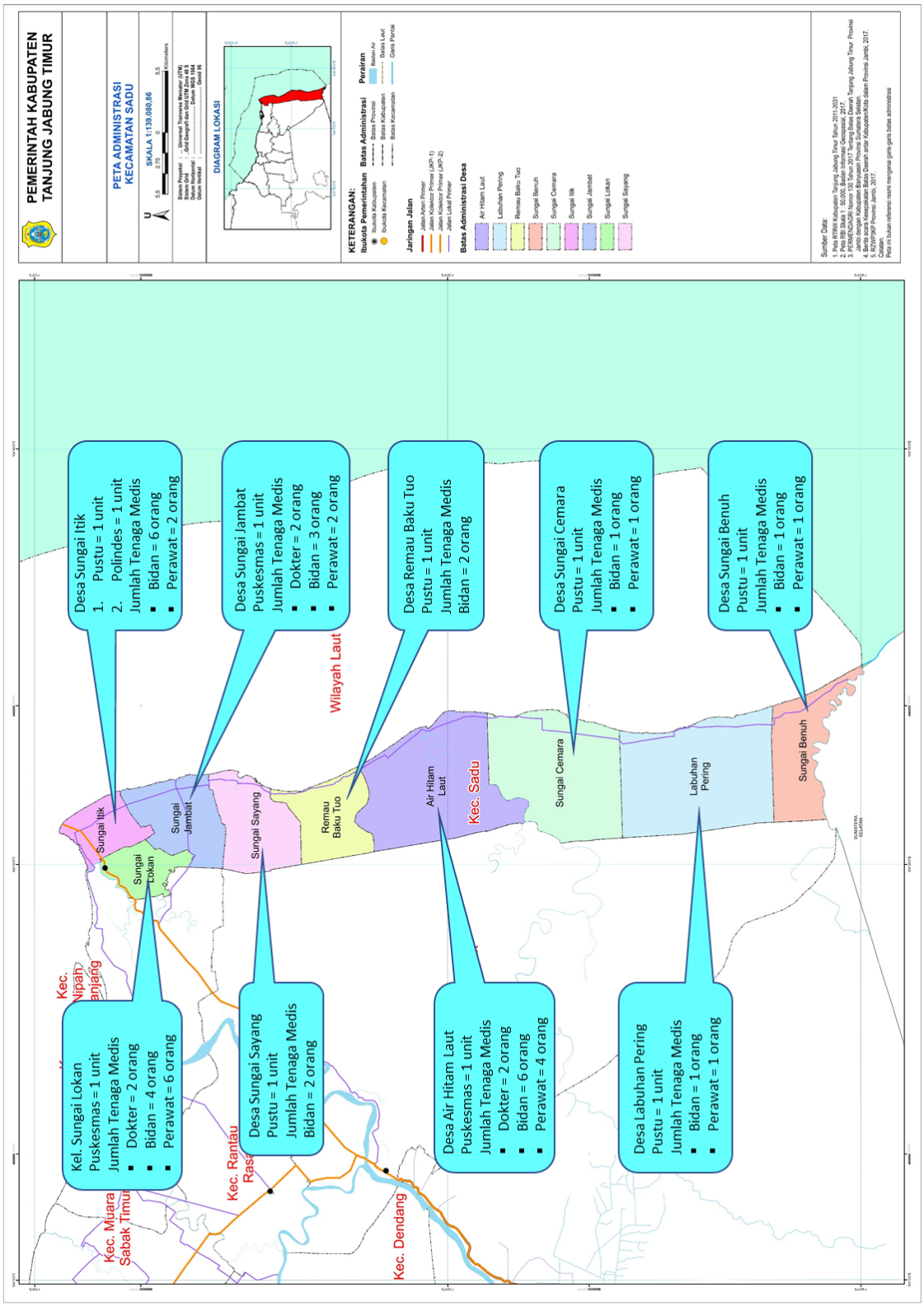
Gambar 3.5.25
Peta Jumlah Sebaran Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Rantau Rasau



Gambar 3.5.26
Peta Jumlah Sebaran Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Sabak Barat



Gambar 3.5.27
Peta Jumlah Sebaran Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Sabak Timur



Gambar 3.2.28
Peta Jumlah Sebaran Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Sadu

Jumlah kepemilikikan jaminan kesehatan jenis Jaminan Kesehatan pada penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur di tahun 2019 cenderung mengalami peningkatan. Kepemilikikan jaminan kesehatan jenis Jaminan Kesehatan pada tahun 2016 sebesar 11.94% kemudian di tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 32,93.

Untuk kepemilikikan jaminan sosial hari tua dan/atau pemutusan hubungan kerja bagi penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur di tahun 2022 sebesar 6,04%.

Tabel III.5.13
Persentase Penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan di Daerah Perkotaan dan Perdesaan menurut Kabupaten/Kota dan jenis Jaminan Kesehatan di Provinsi Jambi Tahun 2022

Kabupaten/ Kota	Jenis Jaminan Kesehatan (%)				
	BPJS Kesehatan	Jamkesda	Asuransi Swasta	Perusahaan/ Kantor	Tidak Punya
Kerinci	38,42	0,41	0,25	0,78	60,34
Merangin	42,57	0,21	0,06	0,46	56,74
Sarolangun	53,63	1,76	0,03	1,54	43,19
Batang Hari	63,04	2,24	0,79	2,73	31,21
Muaro Jambi	50,09	0,35	0,08	3,24	46,64
Tanjung Jabung Timur	**41,60**	**50,16**	**0,00**	**0,34**	**10,83**
Tanjung Jabung Barat	42,77	0,26	0,00	1,80	55,16
Tebo	38,97	0,00	0,00	0,29	60,74
Bungo	41,97	1,22	0,09	1,56	55,19
Kota Jambi	69,44	1,37	0,97	3,14	25,44
Kota Sungai Penuh	74,85	0,85	0,46	0,74	23,10
Provinsi Jambi	50,46	3,74	0,28	1,75	44,09

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jambi 2022

Tabel III.5.14
RSE Presentase Rumah Tangga menurut jenis Jaminan Sosial, 2022

Jenis Jaminan Sosial	Presentase Rumah Tangga
Jaminan Pensiun/hari tua*	2,05
Asuransi/PHK**	1,28

* Jaminan pensiun/hari tua terdiri dari: Jaminan pensiun dan Jaminan hari tua
** Asuransi/PHK terdiri dari: Asuransi kematian, Jaminan kecelakaan kerja, & Pesangon PHK

Sementara itu, jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2022 sebanyak 8,60%.

Tabel III.5.15
RSE Presentase Rumah Tangga menurut Jenis Program Perlindungan Sosial yang Diterima, 2022

Jenis Program Perlindungan Sosial	Presentase Rumah Tangga yang Menerima
Bantuan Pangan (BPNT/Program Sembako)	14,99
Program Indonesia Pintar (PIP)	4,64
Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)	12,71
Program Keluarga Harapan (PKH)	8,60

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kab. Tanjung Jabung Timur 2022

Sementara itu, Proporsi kelahiran yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.5.16
Persentase Perempuan Berumur 15 - 49 Tahun yang Pernah Melahirkan dengan Penolong Proses Kelahiran Oleh Tenaga Kesehatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Penolong Proses Kelahiran Terakhir (%)
Kelompok Pengeluaran	
40% terbawah	93,43
40% tengah	100,00
20% teratas	82,40
Pendidikan Tertinggi	
SD ke bawah	100,00
SMP ke atas	90,02
Tanjung Jabung Timur	93,04

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kab.Tanjung Jabung Timur 2022

Demi menjaga keselamatan dan kesehatan ibu dan anak maka proses persalinan diharuskan berada pada fasilitas-fasilitas kesehatan yang sudah disediakan oleh pemerintah. Berdasarkan data Statistik Kesejahteraan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022, persentase perempuan pernah kawin berusia 15-49 tahun yang proses kelahiran ditolong tenaga Kesehatan adalah sebesar 93,04%.

Tabel III.5.17
Persentase Perempuan Berumur 15 - 49 Tahun Menurut Karakteristik dan Status Penggunaan Alat/Cara KB di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Status Penggunaan Alat KB (%)		
	Pernah Menggunakan	Sedang Menggunakan	Tidak Pernah Menggunakan
Kelompok Pengeluaran			
40% terbawah	13,08	67,01	`19,91
40% tengah	8,62	62,68	28,70
20% teratas	10,94	53,17	35,89
Pendidikan Tertinggi			
SD ke bawah	10,60	63,72	25,68
SMP ke atas	11,09	61,22	27,69
Tanjung Jabung Timur	**10,87**	**62,35**	**26,78**

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kab.Tanjung Jabung Timur 2022

Sebagian besar sarana pelayanan di puskesmas dipersiapkan untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi kunjungan rawat jalan, sedangkan rumah sakit yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas disamping memberikan pelayanan pada kasus rujukan untuk rawat inap juga melayani kunjungan rawat jalan. Demi menjaga keselamatan dan kesehatan ibu dan anak maka proses persalinan diharuskan berada pada fasilitas-fasilitas kesehatan yang sudah disediakan oleh pemerintah. Berdasarkan data Susenas Provinsi Jambi Tahun 2022, persentase perempuan pernah kawin berusia 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya di fasilitas kesehatan sebesar 55,91% mengalami kenaikan dari tahun 2021 sebesar 47,65%. Namun persentase perempuan berumur 15 – 49 tahun yang pernah kawin dan melahirkan anak hidup paling besar pada tahun 2022 proses kelahirannya bertempat dirumah sebesar 44,09% mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar 52,35%.

Tabel III.5.18
Persentase Perempuan Berumur 15 - 49 Tahun yang Pernah Kawin di Daerah Perkotaan dan Perdesaan menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Melahirkan Anak Hidup yang Terakhir di Kab. Tanjab Timur tahun 2020-2022

No	Tempat Melahirkan Anak Lahir Hidup Yang Terakhir	Kabupaten Tanjab Timur			Provinsi Jambi		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Fasilitas Kesehatan	72,20	47,65	55,91	89,88	73,07	81,14
2	Rumah	27,80	52,35	44,09	9,98	26,10	18,60
3	Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,14	0,83	0,26
Jumlah		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jambi 2022

Jumlah kepemilikikan jaminan kesehatan jenis Jaminan Kesehatan pada penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur di tahun 2022 cenderung mengalami peningkatan. Kepemilikikan jaminan kesehatan jenis Jaminan Kesehatan pada tahun 2020 sebesar 33,12% kemudian di tahun 2022mengalami peningkatan menjadi 41,60%.

Tabel III.5.19
Persentase Penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan
di Kabupaten Tanjab Timur Tahun 2020-2022

No	Jenis Jaminan Kesehatan	Kabupaten Tanjab Timur			Provinsi Jambi		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	BPJS Kesehatan	33,12	31,69	41,60	60,45	48,58	50,46
2	Jamkesda	4,80	0,00	50,16	0,93	0,65	3,74
3	Asuransi Swasta	0,00	0,04	0,00	0,58	0,41	0,28
4	Perusahaan/Kantor	2,34	1,24	0,34	4,88	2,76	1,75
5	Tidak Punya	60,14	67,07	10,83	33,83	48,02	44,09

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jambi 2022

Indikator Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun. merupakan proksi untuk memonitor pelaksanaan Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) WHO di Indonesia, dimana prevalensi tinggi penduduk yang merokok dapat berisiko terhadap kondisi kesehatan masyarakat. Pada tahun 2022 persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merokok sebesar 27,52%.

Tabel III.5.20
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Merokok dan Rata-rata Batang Rokok yang Dihisap per Minggu menurut Karakteristikdi Kabupaten Tanjab Timur Tahun 2022

Karakteristik	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Merokok	Rata-Rata Batang Rokok yang Dihisap per Minggu
Kelompok Pengeluaran		
40 persen terbawah	22,99	130,55
40 persen tengah	27,35	145,21
20 persen teratas	35,68	137,22
Pendidikan tertinggi		
SD Ke bawah	28,44	137,50
SMP Ke atas	26,71	139,02
Kab. Tanjab Timur	**27,52**	**138,28**

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kab. Tanjung Jabung Timur 2022

3.5.1.3 Aspek Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur merupakan aspek penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipisahkan dengan ketersediaan infrastruktur. Perannya sebagai penggerak di sektor perekonomian akan mampu menjadi pendorong berkembangnya sektor-sektor lain yang terkait. Selain itu, ketersediaan infrastruktur juga sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat. Pembangunan sarana dan prasarana fisik di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang belum merata disetiap daerah terutama jalan-jalan poros menuju desa-desa yang mengakibatkan terhambatnya pembangunan infrastruktur di perdesaan. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar wilayah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berawa-rawa dan dataran rendah sehingga memerlukan biaya yang tinggi serta memerlukan penanganan konstruksi secara khusus dengan akses transportasi material yang didatangkan dariluar daerah dalam pembangunannya.

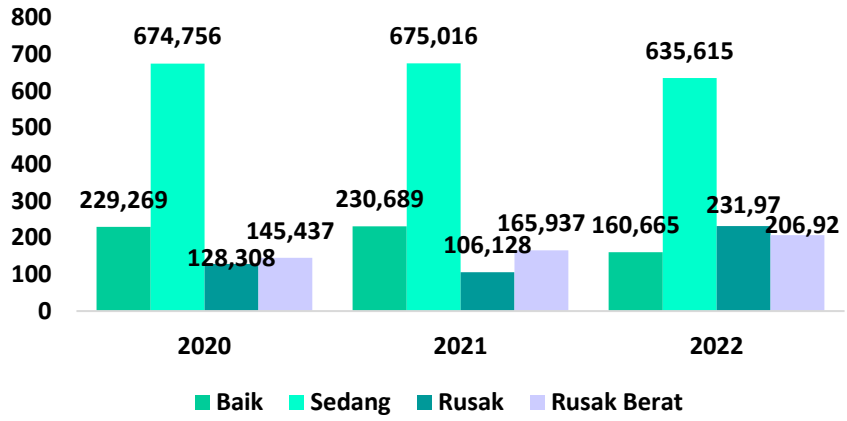
A. Jaringan Jalan

Berlangsungnya kegiatan transportasi didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana antara lain jaringan jalan dan jumlah kendaraan. Kondisi jalan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2022 dengan jenis permukaan jalan Aspal/Beton sepanjang 160,665 km, kerikil sepanjang 635,615 km, tanah sepanjang 231,970 km dan jalan lainnya sepanjang 206,920 km. Kondisi jalan baik yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sepanjang 160,665 km atau 13,08% dari total keseluruhan kondisi jalan, kondisi sedang 635,615 km atau 51,45% dari total keseluruhan kondisi jalan, Adapun kondisi jalan rusak sepanjang 231,97 km atau 18,78% dari total keseluruhan kondisi jalan dan jalan dengan kondisi rusak berat sepanjang 206,92 km atau 16,75% dari total keseluruhan kondisi jalan . Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.5.21
Panjang Jalan menurut Jenis permukaan Jalan
di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (km), 2020–2022

Jenis Permukaan Jalan	2018	2019	2020	2021	2022
Aspal	489,99	528,46	229,269	230,689	160,665
Kerikil	366,32	375,38	674,756	675,016	635,615
Tanah	221,49	178,08	128,308	106,128	231,970
Lainnya	99,98	95,86	145,437	165,937	206,920
Jumlah	**1.177,77**	**1,177,77**	**1.177,77**	**1.177,77**	**1.235,17**

Sumber Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten tanjong jabung Timur, 2023



Gambar 3.5.29
Panjang Jalan menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (km), 2020-2022

Penanganan jalan menjadi sangat sentral apabila tidak mampu dilaksanakan yang berakibat pada aktivitas barang dan orang akan terhambat, kondisi jalan harus mantap. Tingkat kemantapan jalan ditentukan oleh dua kriteria yakni mantap secara konstruksi dan mantap dalam layanan lalu lintas, sedangkan yang termasuk dalam kondisi ini adalah jalan dengan kondisi baik dan sedang (Kepmenkimpraswil No.534/KPTS/M/2001).

B. Jembatan

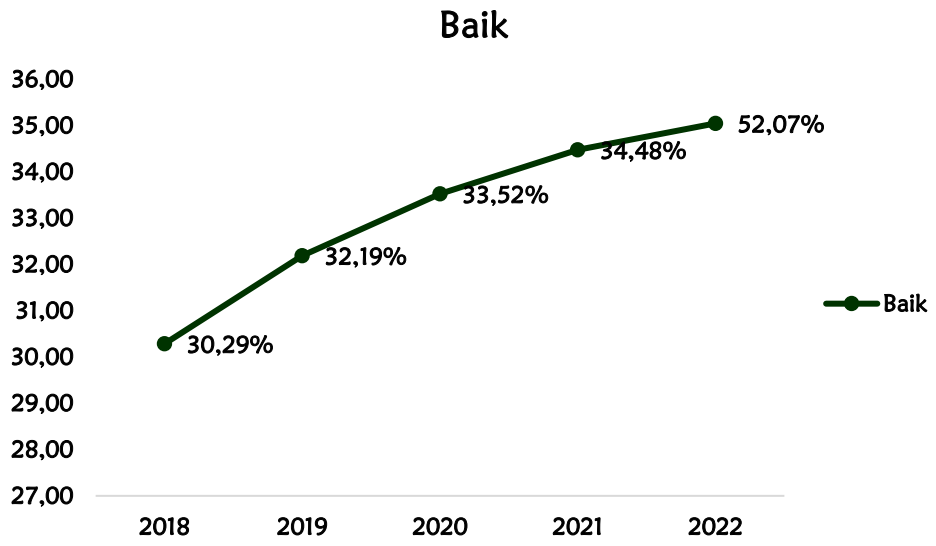
Kondisi jembatan dari tahun 2018 - 2022 yang telah dibangun mengalami perubahan dimana sebanyak 525 unit pada tahun 2018-2021 menjadi 482 unit pada tahun 2022. Pekerjaan yang dilaksanakan hanya peningkatan kualitas jembatan yang telah dibangun. Pada tahun 2018 hanya terdapat 159 unit jembatan dalam kondisi

baik dan pada tahun 2022 kondisi jembatan dalam kondisi baik menjadi sebanyak 251 unit, sehingga ada penurunan angka kondisi jembatan dalam kondisi rusak dari tahun 2018 sebanyak 366 unit menjadi 231 unit pada tahun 2022. Secara persentase jembatan dalam Kondisi baik sebesar 50,07% dan dengan kondisi rusak sebesar 47,92% pada tahun 2022.

Tabel III.5.22
Kondisi Jembatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018-2022

No	Kondisi Jalan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Baik	159	169	176	181	251
2	Rusak	366	356	349	344	231
Jumlah		**525**	**525**	**525**	**525**	**482**

Sumber Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten tanjong jabung Timur, 2023



Gambar 3.5.30
Perkembangan Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (km), 2020-2022

C. Transportasi Air

Berdasarkan kondisi Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang wilayahnya berada pada DAS Batanghari serta kondisi tanahnya yang sebagian besar merupakan kawasan rawa, maka segala kegiatan masyarakatnya sangat tergantung kepada sungai dan saluran besar . Begitu pula dengan penggunaan transportasi sungai yang sangat dominan dalam menghubungkan antar kecamatan di kabupaten Tanjung

jabung Timur, alat transportasi yang dipergunakan berupa kapal motor, pompon dan *speed boat.*

Sungai Batanghari dan Sungai Berbak yang melewati Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilewati kapal-kapal besar dan sebagai pintu masuk kegaiatan ekspor-impor Provinsi Jambi. Pendukung kegiatan terdiri dari dermaga penyeberangan yang berada di Perkotaan Muara Sabak dan dermaga samudera yang berada di Desa Singkep, untuk Kawasan perencanaan sarana transportasi hanya terdapat beberapa dermaga yang masih sederhana di Desa Puding, Rantau Makmur dan Desa Rantau Rasau. Untuk lalu lintas air, sungai-sungai yang dapat digunakan adalah :

1. Batanghari dan Batang Berbak dapat dilalui kapal dengan tonase kurang dari 25 ton;
2. Sungai Pemusiran sering dilalui kapal motor sampai Selat Berhala dengan muatan kurang dari 10 ton;
3. Sungai-sungai lainnya dan parit-parit atau saluran terutama yang lebar juga dimanfaatkan untuk mengangkut hasil-hasil kebun dan pertanian dari penduduk sekitar.

Tabel III.5.23
Trayek dan Jumlah Armada Perusahaan Organda di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tahun 2021

No	Nama Perusahaan	Trayek/Rute	Jumlah Armada
1	PO. Putra Nipah	Nipah Panjang – Jambi	8
2	PO. Lintas Jaya Abadi	Nipah Panjang – Jambi	10
3	PO. Pribadi Koala Jambi	Kampung Laut – Jambi	11
4	PO. Pribadi Mendahara	Mendahara – Jambi	7
5	PO. Mendahara Ulu	Mendahara Ulu – Jambi	6
6	PO. Pribadi Sabak	Sabak – Jambi	7

Sumber : Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Angka,2022

Perkembangan sektor dermaga tiap tahunnya mengalami peningkatan dari tahun 2018 s.d tahun 2022. Pada Tahun 2018 jumlah dermaga sebanyak 107 unit, terus meningkat sampai tahun 2022 menjadi 118 unit. Selain kuantitas, Pemerintah Daerah juga memperhatikan kualitas dermaga. Perkembangan dermaga dalam kondisi baik dan rusak pada periode 2018 – 2022 terjadi fluktuasi dimana dermaga pada kondisi baik pada tahun 2018 sebesar 37 dan terjadi peningkatan hingga tahun

2021 sebesar 54, akan tetapi pada tahun 2022 terjadi penurunan menjadi 52. Adapun persentase kondisi baik tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 45,76%, kulaitas dermaga ini menurun hingga mencapai 44,06% pada tahun 2022. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.5.24
Jumlah dan Perkembangan Sektor Dermaga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018-2022

No	Kondisi	2018	2019	2020	2021	2022
Dermaga Konstruksi						
1	Kayu	70	70	70	69	69
2	Besi	27	31	31	36	36
3	Beton	10	10	11	13	13
Jumlah						
Kondisi Dermaga						
1	Baik	37	41	42	54	52
2	Rusak	70	70	70	64	66
Persentase kondisi baik		**34,58%**	**36,94%**	**37,50%**	**45,76%**	**44,06%**

Sumber: Kabupaten Tanjung jabung Timur Dalam Angka, 2023, RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2022, Dinas Perhubungan,2022 dan Pengolahan Data Tahun 2023

Sungai merupakan salah satu akses yang digunakan sebagai jalur perdagangan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dimana Panjang sungai tertinggi melewati Sungai Kampung Laut- Muara Sabak sepanjang 10 Km yang berada di Kecamatan Muara Sabak Barat. Rata-rata Panjang sungai yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah 2,5 Km. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.5.25
Panjang dan Lokasi Sungai di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

No	Sungai	Panjang Sungai	Lokasi
1	Ambang Luar - Kampung Laut	1,5	Kec. Ka.Jambi
2	Kampung Laut - Ma.Sabak	10	Kec. Ma.Sabak Barat
3	Ma.Sabak Barat - Sei.Dendang	2	Kec. Dendang
4	Sei.Dendang - Sei.Siau	2,5	Kec. Sabak Timur
5	Sei.Siau - Sei.Lambur	2,5	Kec. Sabak Timur
6	Sei.Lambur - Tjg.Blamboran	2,5	Kec. Sabak Timur
7	Tjg.Blamboran - Rt.Sembilan	2	Kec. Dendang
8	Rt.Sembilan - Koto Kandis	2,5	Kec. Dendang
9	Koto Kandis - Sei.Pemusiran	1,5	kec. Nipah Panjang
10	Sei.Pemusiran - Tjg.Keladi	1,5	Kec. Rantau Rasau
11	Tjg.Keladi - Tlk.Pendaro	1,5	Kec. Rantau Rasau
12	Tlk.Pendaro - Sei.Klemak	1,5	Kec. Rantau Rasau
13	Sei.Klemak - Proyek Pelita	2	Kec. Rantau Rasau
14	Proyek Pelita - Sei.Air Hitam	2	Kec. Rantau Rasau
15	Sei.Air Hitam - Kampung Tuo	1,5	Kec.Berbak
16	Kampung Tuo - Kramat Kayo Hitam	2,5	Kec.Berbak

Sumber: Kabupaten Tanjung jabung Timur Dalam Angka, 2023, dan Dinas Perhubungan,2023

Keadaaan sungai meleputi Panjang, kedalaman serta lebar alur sungai yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan alur Sungai Batanghari yang dapat dilewati/diakses sepanjang 1.440 Km dengan Panjang alur 1.740 Km, kedalaman alur sebesar 4-12 meter dan lebar maksimal alur sebesar 200 meter. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.5.26
Panjang, Kedalaman, dan Lebar Alur Sungai di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2022

No	Alur Sungai	Dapat Dilewati	Panjang Alur	Kedalaman Alur	Lebar Alur	
					Maksimal	Minimal
1	Batanghari	1.440	1.740	4-12	200	70
2	Batang Berbak	42	42	8-10	80	50
3	Mendahara	70	112	6-7	120	70
4	Sadu	35	35	5-6	30	20
5	Lagan	25	30	5-6	65	25
6	Air Hitam Laut	25	50	8-10	90	60
7	Pemusiran	46	46	4-10	45	25

Sumber: Kabupaten Tanjung jabung Timur Dalam Angka, 2023, dan Dinas Perhubungan,2023

3.5.1.4 Sistem Persampahan

Sistem jaringan persampahan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur meliputi:

1. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah regional di Kecamatan mendahara Ulu dengan metode lahan urug saniter (*sanitary landfill)* dengan daerah pelayanan meliputi kecamatan Mendahara Ulu , sebagian Kecamatan Geragai dan Kecamatan Mendahara Ilir;
2. Tempat pemrosesan Akhir (TPA) sampah di Kelurahan Parit Culum I dengan metode lahan urug saniter (*sanitary landfill)* di Kecamatan Muara Sabak Barat melayani Kecamatan Dendang, Kecamatan Muara Sabak Barat, Sebagian Kecamatan Geragai, Kecamatan Kuala Jambi, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kecamatan Rantau Rasau dan Kecamatan Nipah Panjang;
3. Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) di seluruh Kecamatan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Proses Pengelolaan sampah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara umum belum tertangani dengan baik, terlihat dengan masih kurangnya jumlah TPS dan tong-tong sampah rumah tangga yang menghiasi jalan-jalan permukiman warga di perkotaan maupun di perdesaan. Berikut kondisi pengelolaan persampahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 sebagai berikut.

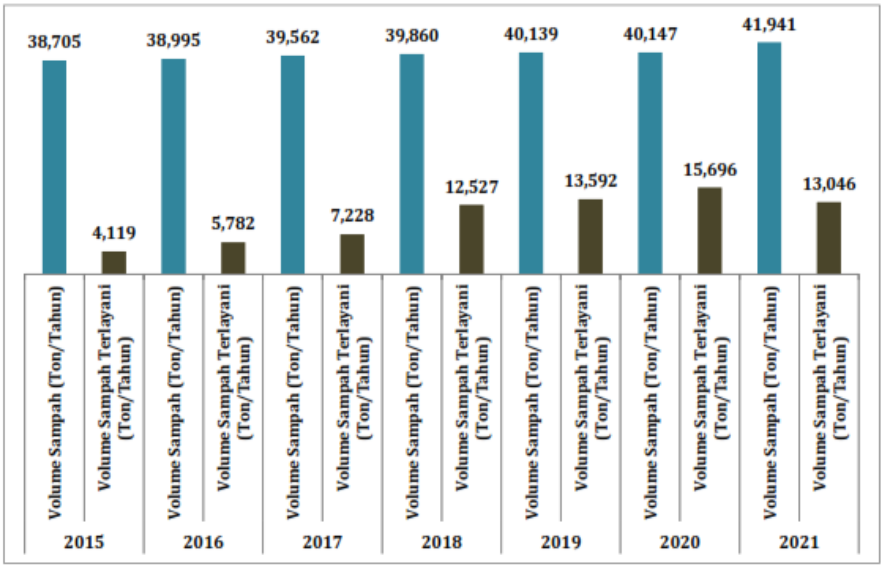
1. Pengumpulan
   - Gerobak Motor : 12 unit (kapasitas angkut total 18m^3)
   - Pick Up : 1 unit (kapasitas angkut total 4m^3)
   - Ritase : 1 Rit/hari
2. Penampungan Sementara dan Pengangkutan
   - Jumlah TPS : 24 unit (kapasitas 4m^3)
   - Jumlah Kontainer : 25 unit (kapasitas 4m^3)
   - Jumlah Tong Sampah Pejalan Kaki: 40 unit (kapasitas 1m^3)
   - Jumlah Arm Roll Truck : 3 unit (kapasitas 18m^3)
3. Pemrosesan Akhir
   - Lokasi TPA : Kel. Parit Culum I Kec. Muara Sabak

Barat

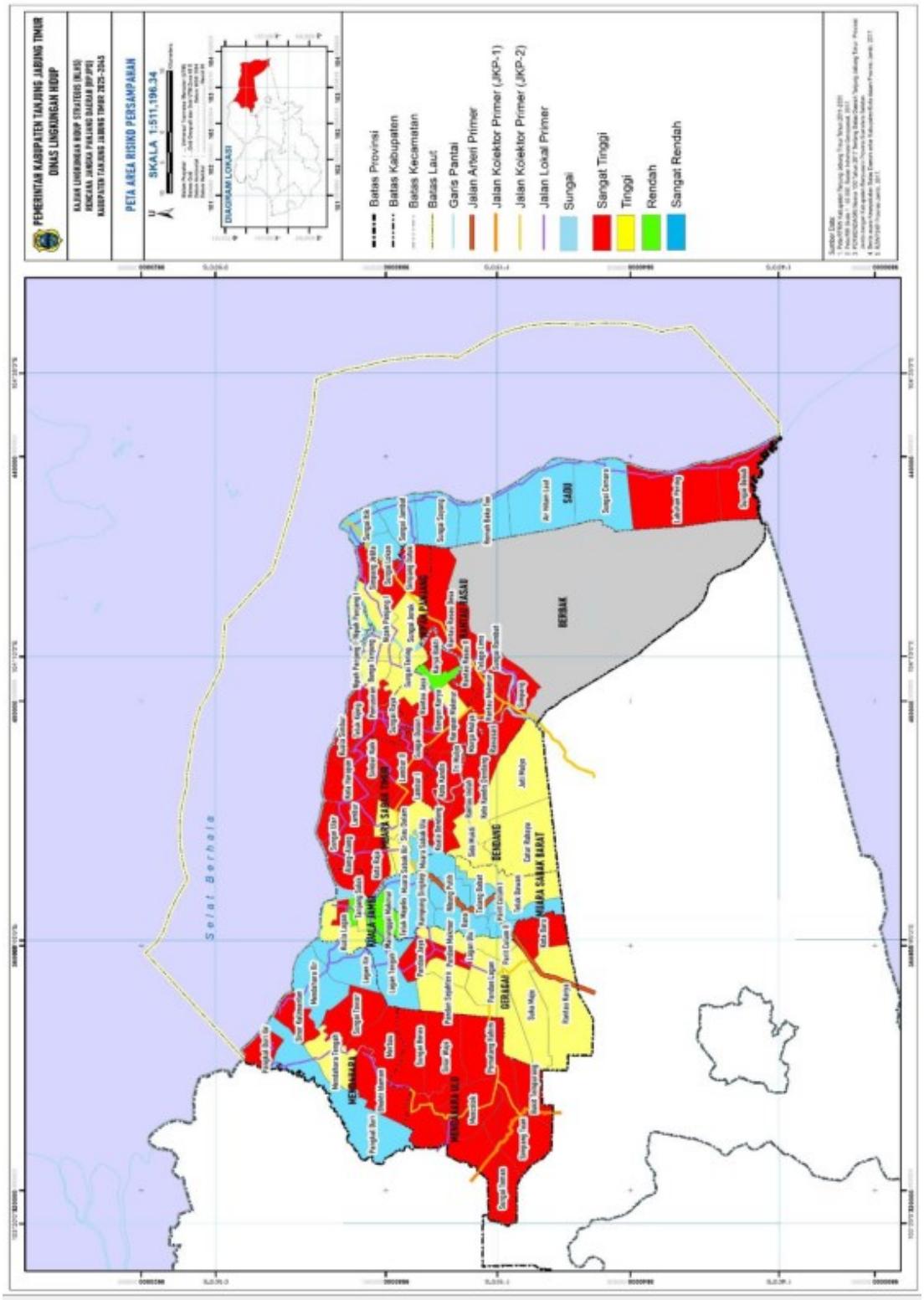
- Tahun Pembangunan : 2016
- Luas Lahan Efektif Landfill Tersedia: 8,1 Ha
- Sistem TPA : controlled landfill
- Jumlah sampah yang ditimbun di TPA: 43 ton/hari

Pada berikut tabel dan gambar di bawah ini akan menjabarkan area beresiko sanitasi Persampahan yang di analisa melalui instrumen SSK tahun 2022, profil sanitasi di anlisa berdasarkan dari hasil studi environmental health risk assessment, data sekunder OPD, dan persepsi OPD sehingga di dapatkan wilayah Prioritas pelayanan Bidang Persampahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Volume sampah yang ditimbulkan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur cenderung meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pada tahun 2015 volume sampah yang ditimbulkan sebanyak 38.705 ton/pertahun sedangkan volume sampah yang terlayani pada tahun 2015 sebanyak 4.119 ton/tahun. Volume timbulan sampah meningkat pada tahun 2021 yaitu 41.941 ton/tahun dengan volume sampah yang terlayani sebanyak 13.046 ton/tahun. Perkembangan volume sampah yang ditimbulan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat pada Gambar 3.2.11 di bawah ini.



Gambar 3.5.31
Grafik Volume Sampah Pertahun di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015-2021
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023



Gambar 3.5.32
Peta Area Resiko Persampahan

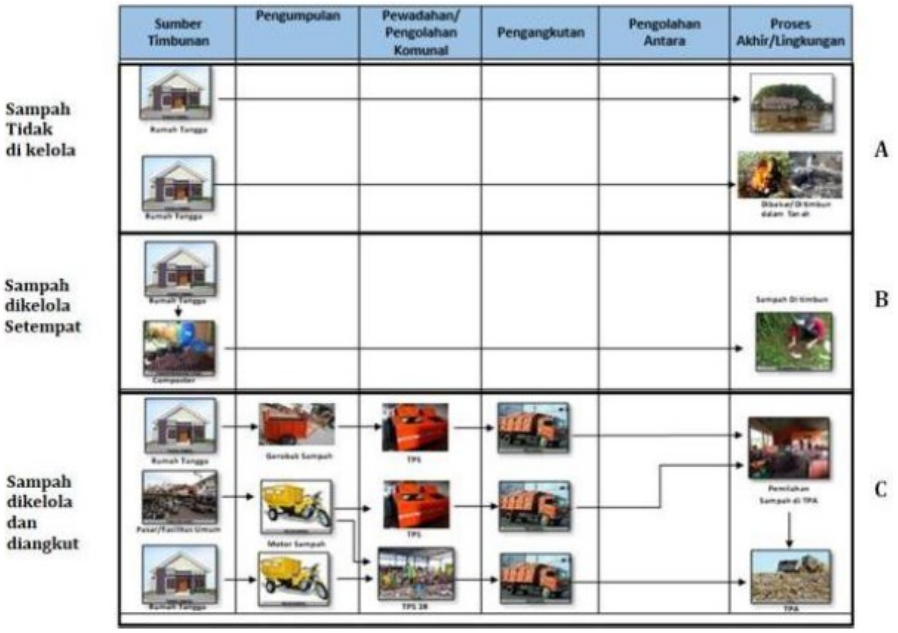
Tabel III.5.27
Area Resiko Persampahan

No	Kecamatan	Wilayah Prioritas Penanganan		
		Desa/kelurahan	Resiko	Skala Penanganan
1	Mendahara	Bhakti Idaman	4	Prioritas 1
		Merbau	4	
		Sungai Tawar	4	
		Sinar Kalimantan	4	
		Pangkal Duri Ilir	4	
2	Mendahara Ulu	Bukit Tempurung	4	Prioritas 1
		Sungai Toman	4	
		Simpang Tuan	4	
		Pematang Rahim	4	
		Sinar Wajo	4	
		Sungai Beras	4	
		Mencolok	4	
3	Geragai	Kota Baru	4	Prioritas 1
		Lagan Tengah	4	
4	Dendang	Kuala Dendang	4	Prioritas 1
		Rantau Indah	4	
		Kuto Kandis Dendang	4	
		Kota Kandis	4	
5	Muara Muara Sabak Timur	Lambur II	4	Prioritas 1
		Lambur I	4	
		Kota Raja	4	
		Alang Alang	4	
		Sungai Ular	4	
		Lambur	4	
		Kota Harapan	4	
		Simbur Naik	4	
		Kuala Simbur	4	
6	Kuala Jambi	Tanjung Solok	4	Prioritas 1
7	Rantau Rasau	Bangun Karya	4	Prioritas 1
		Bandar Jaya	4	
		Sungai Dusun	4	
		Harapan Makmur	4	
		Marga Mulya	4	
		Karya Bhakti	4	
		Pematang Mayan	4	
		Tri Mulya	4	
8	Berbak	Simpang	4	Prioritas 1
		Rawasari	4	
		Rantau Makmur	4	
		Telaga Limo	4	
		Sungai Rambut	4	
		Rantau Rasau Desa	4	
9	Nipah Panjang	Sungai Raya	4	Prioritas 1
		Teluk Kijing	4	
		Pemusiran	4	
		Simpang Datuk	4	
		Simpang Jelita	4	
		Sungai Jeruk	4	

No	Kecamatan	Wilayah Prioritas Penanganan		
		Desa/kelurahan	Resiko	Skala Penanganan
10	Sadu	Sungai Benuh	4	Prioritas 1
11	Mendahara	Mendahara Tengah	3	Prioritas 2
12	Geragai	Rantau Karya	3	Prioritas 2
		Pandan Lagan	3	
		Suka Maju	3	
		Pandan Makmur	3	
		Pandan Sejahtera	3	
		Lagan Ulu	3	
13	Dendang	Catur Rahayu	3	Prioritas 2
		Jati Mulyo	3	
		Sido Mukti	3	
14	Muara Sabak Barat	Parit Culum II	3	Prioritas 2
15	Muara Sabak Timur	Muara Sabak Ilir	3	Prioritas 2
		Siau Dalam	3	
16	Kuala Jambi	Kuala Lagan	3	Prioritas 2
		Majelis Hidayah	3	
17	Rantau Rasau	Rantau Rasau II	3	Prioritas 2
		Rantau Jaya	3	
18	Nipah Panjang	Nipah Panjang I	3	Prioritas 2
		Nipah Panjang II	3	
		Bunga Tanjung	3	
		Sungai Tering	3	
19	Kuala Jambi	Teluk Majelis	2	Prioritas 3
		Kampung Laut	2	
20	Rantau Rasau	Rantau Rasau I	2	Prioritas 3

Sumber: SSK Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022.

Pengurangan timbulan sampah dengan cara dibakar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dilakukan oleh seluruh tatanan, baik tatanan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, sarana kesehatan dan tempat-tempat umum sehingga pengurangan timbulan sampah yang ada sangat besar. Dari masing-masing tatanan tersebut mengumpulkan sampah organik maupun anorganik di halaman sekitar yang masih luas dan membakarnyasehingga menimbulkan polusi udara dan resiko kesehatan lingkungan, yaitu dapat menyebabkan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Sistem pengelolaan persampahan di masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dijelaskan pada gambar Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Persampahan berikut ini.



Gambar 3.5.33

Sumber : SSK Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2021

Keterangan :

Dari diagram terlihat :

a. *Sampah tidak dikelola, langsung di buang ke sungai/tanah atau dikumpulkan disuatu tempat kemudian dibakar/dikubur di dalam tanah.*
b. *Sampah sudah dikelola secara mandiri atau setempat (on site) tetapi hanya sebagian kecil masyarakat*
c. *di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang sudah mengelola secara mandiri seperti pemilahan, pengumpulan barang layak jual, dan pengomposan/mengolah sampah anorganik menjadi kompos menggunakan composter (pengomposan).*

Sampah dikumpulkan jadi satu di tong sampah kemudian langsung dibuang ke TPS, yang sudah dipilah dibawa ke TPS3R/Bank Sampah atau sampah yang dikumpulkan dari beberapa Rumah Tangga dibantu pengangkutannya menuju TPS/TPS3R/Bank Sampah menggunakan gerobak/motor sampah, kemudian sampah di TPS atau sisa sampah hasil pengelolaan di TPS3R/Bank Sampah yang tidak bisa dimanfaatkan lagi diangkut oleh truk sampah menuju TPA.

3.5.1.5 Sistem Jaringan Drainase

Sistem jaringan drainase di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur meliputi:

1. Jaringan drainase primer berupa sub DAS pada sungai utama;
2. Jaringan drainase sekunder meliputi saluran yang menghubungkan perkotaan atau permukiman dengan sub DAS;
3. Jaringan drainase tersier berupasaluran yang menghubungkan saluran sekunder.

3.5.1.6 Sistem Jaringan Evakuasi

Sistem jaringan evakuasi bencana di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berupa:

1. Jalur evakuasi bencana banjir meliputi pengembangan ruas jalan yang terdapat di Kecamatan Muara Sabak timur, Kecamatan Berbak dan Kecamatan Dendang;
2. Jalur evakuasi bencana kebakaran hutan dan laahn meliputi pengembangan ruas jalan yang terdapat di Kecamatan Muara Sabak Timur, Kecamatan Nipah Panjang, Kecamatan Mendahara Timur, Kecamatan Rantau Raasau, Kecamatan Sadu, Kecamatan Dendang, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kecamatan Mendahara Ulu, Kecamatan Geragai dan Kecamatan Berbak;
3. Jalur evakuasi bencana gelombang pasang dan banjir ROB meliputi pengembangan ruas jalan yang terdapat di Kecamatan Muara Sabak Timur, Kecamatan Kuala Jambi, Kecamatan Nipah Panjang, Kecamatan Mendahara, dan Kecamatan Sadu;
4. Jalur evakuasi bencana abrasi meliputi pengembangan ruas jalan yang terdapat di Kecamatan Berbak, Kecamatan Mendahara, Kecamatan Muara Sabak Timur dan Kecamatan Kuala Jambi;
5. Ruang evakuasi bencana berupa bangunan publik dan/atau ruang terbuka sebagai tempat evakuasi bencan.

3.5.1.7 Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang turut mendukung pembangunan ekonomi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur salah satunya dengan adanya koperasi. Koperasi juga memberlakukan prinsip-prinsip yang berlaku pada badan usaha, seperti prinsip efisiensi dan mencari laba. Sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berorientasi pada keterlibatan rakyat banyak, sehingga aktivitas ekonomi (produksi dan distribusi) harus sebesar besarnya dilaksanakan oleh rakyat atau melibatkan rakyat banyak sehingga rakyat dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Pada periode tahun 2018-2022, jumlah Koperasi Unit Desa (KUD) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebanyak 41 Unit. Sementara jumlah Koperasi Non KUD cenderung menurun yaitu dari 270 unit pada tahun 2018 menjadi 265 unit pada tahun 2022. Data KUD dan Non KUD yang aktif maupun tidak aktif di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada periode tahun 2018 -2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.5.28
Jumlah Keadaan KUD dan Non KUD di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018-2022

Tahun	Koperasi		Aktif		Tidak Aktif	
	KUD	NON KUD	KUD	NON KUD	KUD	NON KUD
2018	41	270	2	93	39	147
2019	41	273	2	96	39	177
2020	41	273	1	99	40	174
2021	41	238	1	87	40	151
2022	41	265	1	118	40	147

Sumber: Provinsi Jambi Dalam Angka, Tahun 2023, RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur,Tahun 2022

Tabel III.5.29
Jumlah Anggota KUD dan Non KUD di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018-2022

Tahun	Anggota	
	KUD	NON KUD
2018	9.252	17.126
2019	9.252	17.216
2020	9.252	17.628
2021	9.352	16.103
2022	9.352	17.268

Sumber: Provinsi Jambi Dalam Angka, Tahun 2023, RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur,Tahun 2022,

KUD di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama kurun tahun 2018 sampai dengan 2022 cenderung stagnan berjumlah 41 unit KUD, dengan KUD aktif sebanyak 1 unit KUD terjadi pengurangan KUD aktif dimana pada rentang 2018-2019 KUD aktif berjumlah 2 unit KUD, hingga tahun 2022 KUD tidak aktif sebanyak 40 unit KUD. Akan tetapi, jumlah anggota KUD meningkat menjadi sebanyak dari 9.252 pada tahun 2018-2019 menjadi 9.352 anggota pada tahun 2021-2022 peningkatan terjadi sebanyak 100 orang anggota atau 50,26%. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan koperasi non KUD yang selalu meningkat setiap tahunnya, baik dari jumlah, kondisi maupun jumlah anggotanya.

3.5.1.8 Penanaman Modal

Investasi memiliki *multiplier effect* terhadap pembangunan di berbagai sector sebagai unsur penggerak ekonomi. Upaya peningkatan nilai investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Melalui Program Pengendalian

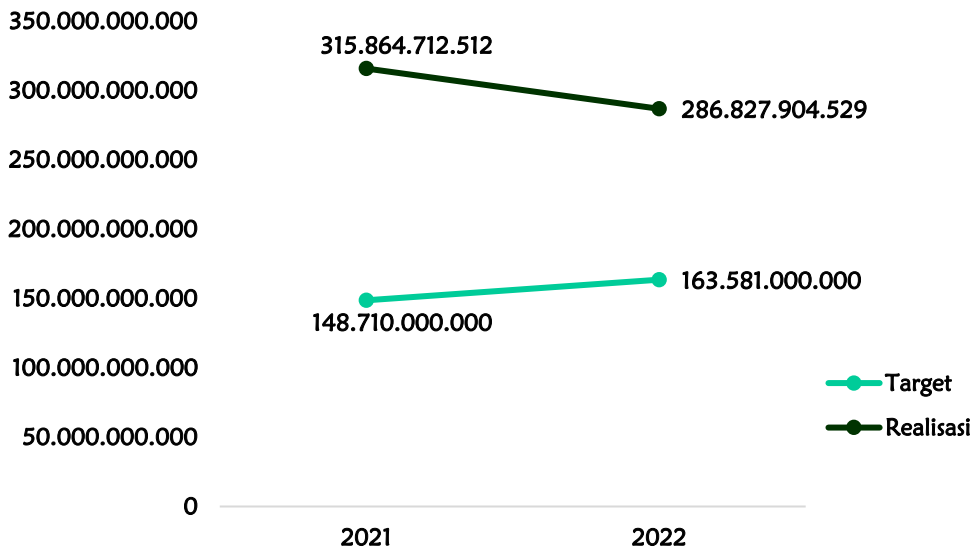
Pelaksanaan Penanaman Modal, Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal melakukan pemantauan langsung.

Nilai investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam kurun waktu tahun 2018 – 2022 mengalami fluktuasi dengan nilai investasi terbesar terjadi pada tahun 2018 yaitu Rp.760.847.999.000 sedangkan nilai investasi terkecil terjadi pada tahun 2020 sebesar Rp.157.638.000.000 dan nilai investasi pada tahun 2022 sebesar Rp.286.827.904.529 nilai investasi tersebut terdiri dari Rp.22.583.436.325,- Penanaman Modal Asing (PMA) dan Rp. 264.244.468.204,- Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) nilai tersebut diperoleh dari data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dengan jumlah 233 Pelaku Usaha yang melaporkan LKPM pada tahun 2022, Jika dibandingkan dengan tahun 2021 Pelaku Usaha yang belaporkan LKPM mengalami peningkatan 26,63% dengan jumlah 184 pelaku usaha yang melaporkan LKPM pada tahun 2021. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.5.30
Nilai Investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018-2022

Tahun	Nilai Investasi	Pertumbuhan (%)
2018	760.847.999.010	
2019	671.610.263.197	-11,73
2020	157.638.000.000	-76,53
2021	315.864.712.512	100,37
2022	286.827.904.529	-47,59

Sumber: RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur,Tahun 2022, dan DPMPTSP, 2023



Gambar 3.5.34
Realisasi Investasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 - 2022

Realisasi investasi dari 2021 sampai dengan 2022. Dari grafik tersebut terlihat adanya sedikit penurunan realisi investasi pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021, pada tahun 2021 realisasi investasi mencapai 212,4% dari target yang ditetapkan sedangkan pada tahun 2022 realisai investasi sebesar 175,34% atau kurang 37.06% dari realisasi investasi Tahun 2021.

3.5.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

3.5.2.1 Holtikultura

Berdasarkan angka sementara statistik pertanian hortikultura BPS, Luas panen terluas tanaman hortikultura di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2022 adalah tanaman semangka, yaitu seluas 85 hektar. Luas panen tanaman cabai terbesar berada di Kecamatan Nipah Panjang dengan luas panen sebesar 31 hektar. Semangka merupakan tanaman dengan produksi terbesar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2022, yaitu sebesar 8.732 Kuintal. Di mana kecamatan yang paling produktif ialah Mendahara Ulu yaitu sebesar 3.000 kuintal. Tanjung Jabung Timur hanya memiliki satu jenis tanaman hias, yaitu tanaman anggrek dengan luas panen sebesar 22 meter persegi. Tanaman ini berada di Kecamatan Berbak terjadi

penurunan total produksi tanaman hortikultura dari tahun 2021 hingga 2022 sebesar 37,198%.

Subsektor hortikulutra meliputi beberapa komoditas seperti sayuran dan buah-buahan. Kelompok sayur-sayuran yang banyak ditemukan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur antara lain: kacang panjang, cabai keriting, cabai rawit,kangkung, ketimun,bayam dan lain-lain dan jenis buah yang ditemukan yaitu melon dan semangka. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.5.31
Luas Panen Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Menurut Kecamatan dan JenisTanaman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Ha), Tahun 2022

No	Kecamatan	Bayam	Cabe Rawit	Cabe Keriting	Kacang Panjang	Kangkung	Ketimun	Melon	Semangka
1	Mendahara	-	22	-	1	-	-	-	3
2	Mendahara Ulu	-	4	16	-	-	-	4	20
3	Geragai	-	7	14	16	7	9	-	1
4	Dendang	8	4	6	7	11	4	5	11
5	Muara Sabak Barat	4	3	1	5	7	4	-	5
6	Muara Sabak Timur	-	11	8	5	2	-	3	10
7	Kuala Jambi	-	3	-	-	-	-	-	-
8	Rantau Rasau	-	-	1	2	4	-	1	-
9	Berbak	-	1	31	4	-	-	-	3
10	Nipah Panjang	7	4	3	6	9	4	2	31
11	Sadu	-	-	-	-	1	-	-	1
Jumlah		**19**	**59**	**78**	**46**	**41**	**21**	**19**	**85**

Sumber: Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Angka 2023

Tabel III.5.32
Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Kwintal),Tahun 2022

No	Kecamatan	Bayam	Cabe Rawit	Cabe Keriting	Kacang Panjang	Kangkung	Ketimun	Melon	Semangka
1	Mendahara	-	291	-	11	-	-	-	780
2	Mendahara Ulu	-	73	380	-	-	-	520	3.000
3	Geragai	-	659	952	2 753	734	2 419	-	60
4	Dendang	676	629	670	1.015	1.115	649	1.005	2.707
5	Muara Sabak Barat	9	16	2	22	143	24	-	124
6	Muara Sabak Timur	-	295	284	255	44	-	258	1.300
7	Kuala Jambi	-	107	-	-	-	-	-	-
8	Rantau Rasau	-	-	2	45	55	-	20	-
9	Berbak	-	6	434	563	-	-	-	360
10	Nipah Panjang	49	47	28	45	50	31	20	361
11	Sadu	-	-	-	-	23	-	-	40
Jumlah		**734**	**2.123**	**3.752**	**4.709**	**2.164**	**3.123**	**1.823**	**8.732**

Sumber: Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Angka 2023

Dari tabel di atas diketahui luas panen pada tahun 2022 terbesar yaitu 85 Ha dengan jenis tanaman semangka dengan penghasil terbesar berasal dari Kecamatan Mendahara Ulu yakni 20 Ha dan kecamatan dengan penghasil terkecil berada di Kecamatan Geragai dan Kecamaatan Sadu Yakni 1 Ha, diikuti pula pada jenis tanaman cabe keriting seluas 78 Ha dengan penghasil terbesar berada di Kecamatan Mendahara Ulu yakni 16 Ha dan penghasil terkecil berada di Kecamatan Berbak. Adapun jenis tanaman dengan luas panen terkecil yaitu Bayam dan Melon dengan luas panen sebesar 19 Ha.

Produksi yang dihasilkan pada tahun 2022 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tebesar dengan jenis tanaman semangka menghasilkan 8.732 kwintal diikuti dengan jenis tanaman ketimun sebesar 3.123 kwintal dan produksi terkecil yang dihasilkan dengan jenis tanaman bayam sebesar 734 kwintal.

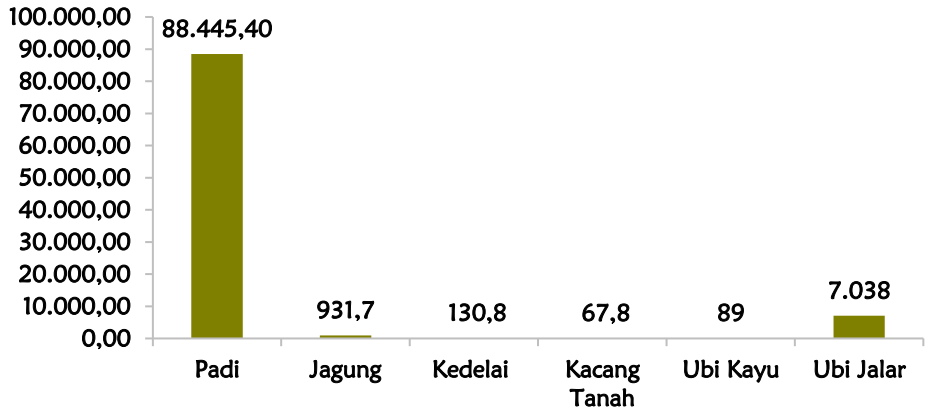
3.5.2.2 Pertanian

Subsektor tanaman bahan makanan merupakan salah satu subsektor pada sektor pertanian yang mencakup tanaman padi (padi sawah dan padi ladang), jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah dan kedelai. Data produksi tanaman pangan (padi dan palawija) merupakan salah satu indikator ketersediaan pangan nasional. Penyediaan data produksi tanaman pangan secara berkesinambungan diharapkan mampu menyediakan informasi yang akurat dan terkini bagi kebutuhan pemerintah dan masyarakat umum. Data pokok yang dikumpulkan untuk penghitungan produksi tanaman pangan adalah luas panen dan produktivitas (hasil per hektar). Produksi tanaman pangan merupakan hasil perkalian antara luas panen dengan produktivitas tanaman pangan. Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Padi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel III.5.33
Luas Panen Tanaman Pangan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Ha), Tahun 2022

No	Kecamatan	Padi	Jagung	Kedelai	Kacang Tanah	Ubi Kayu	Ubi Jalar
1	Mendahara	0	20	0	0	4	4
2	Mendahara Ulu	0	0	0	0	0	0
3	Geragai	439,8	0	12	6	19	19
4	Dendang	1.008,1	254	21	17	11	11
5	Muara Sabak Barat	301,5	37	0	0	0	0
6	Muara Sabak Timur	936,9	79	0	16	30	30
7	Kuala Jambi	0	0	0	0	0	0
8	Rantau Rasau	1.668,2	182,9	93,8	27,8	16	16
9	Berbak	1.789,9	358,8	4	1	2	2
10	Nipah Panjang	2.701	0	0	0	4	4
11	Sadu	0	0	0	0	3	3
Jumlah		**8.8445,4**	**931,7**	**130,8**	**67,8**	**89**	**7.038**

Sumber: Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Angka 2023



Gambar 3.5.35
Grafik luas panen tanaman pangan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Ha), Tahun 2022

Berdasarkan tabel dan grafik di atas diketahui bahwa luas panen pada tahun 2022 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan luas panan terbesar pada tanaman pangan dengan jenis tanaman padi sebesar yakni 8.844,5 Ha diikuti oleh tanaman Ubi Jalar sebesar 7.038 Ha. Adapun luas panen terkecil berada pada jenis tanaman kacang tanah sebesar 67,8 Ha.

3.5.2.3 Perkebunan

Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki potensi untuk pengembangan perkebunan khususnya perkebunan kelapa sawit, dimana merupakan usaha bidang perkebunan yang paling dominan perkembangannya. Hal ini terlihat dari jumlah luas areal perkebunan dan jumlah produksi yang cukup besar. Tanaman perkebunan utama di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2022 adalah kelapa sawit dan tanaman karet serta kelapa. untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.5.34
Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Ha), Tahun 2022

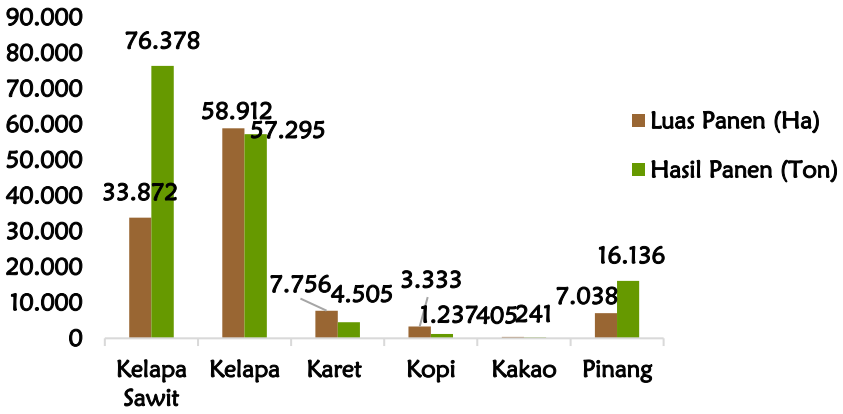
No	Kecamatan	Kelapa Sawit	Kelapa	Karet	Kopi	Kakao	Pinang
1	Mendahara	2.075	21.604	-	2.044	222	2.706
2	Mendahara Ulu	12.400	751	3.099	130	18	612
3	Geragai	4.405	4.560	403	39	6	264
4	Dendang	5.597	435	170	29	16	267
5	Muara Sabak Barat	1.289	629	1.408	84	29	819
6	Muara Sabak Timur	1.575	9.628	295	459	-	295
7	Kuala Jambi	42	7.379	-	391	-	783
8	Rantau Rasau	3.083	954	1.667	53	28	214
9	Berbak	829	146	453	3	12	116
10	Nipah Panjang	1.305	7.262	261	59	54	380
11	Sadu	1.272	5.564	-	42	-	582
Jumlah		**33.872**	**58.912**	**7.756**	**3.333**	**405**	**7.038**

Sumber: Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Angka 2023

Tabel III.5.35
Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Ton),Tahun 2022

No	Kecamatan	Kelapa Sawit	Kelapa	Karet	Kopi	Kakao	Pinang
1	Mendahara	4.450	20.672	-	823	111	4.454
2	Mendahara Ulu	28.341	705	1.164	72	10	1.036
3	Geragai	9.097	3.968	281	7	9	268
4	Dendang	15.177	489	116	7	12	280
5	Muara Sabak Barat	2.115	549	804	36	2	1.094
6	Muara Sabak Timur	3.290	10.125	248	152	10	5.745
7	Kuala Jambi	113	6.052	-	78	-	1.557
8	Rantau Rasau	7.492	1.044	1.206	8	20	254
9	Berbak	1.468	189	492	3	8	160
10	Nipah Panjang	2.445	7.597	194	32	59	681
11	Sadu	2.390	5.905	-	19	-	607
Jumlah		**76.378**	**57.295**	**4.505**	**1.237**	**241**	**16.136**

Sumber: Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Angka 2023



Gambar 3.5.36
Grafik luas panen dan hasil panen tanaman perkebunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Ha), Tahun 2022

Berdasarkan data luas areal perkebunan tersebesar berasal dari perkebunan Kelapa seluas 58.912 Ha dengan hasil produksi sebesar 57.295 Ton Kecamatan penghasil produksi terbanyak yaitu Kecamatan Mendahara sebesar 20.672 Ton. Sedangkan untuk produksi penghasil terbesar berasal dari komoditi tanaman kelapa sawit sebanyak 76.378 Ha dengan luas arel perkebunan 33.872 Ha, potensi inovasi pengolahan tanaman Kelapa menjadi beragam produk yang bernilai tambah bisnis dan ekonomi (*added value*). Tanaman kelapa memiliki multifungsi yang dapat meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat. Adapun untuk luas areal terkecil dan jumlah produksi yang dihasilkan terkecil berasal dari komoditi perkebunan kopi dengan luas tanam sebesar 405 Ha dan jumlah produksi yang dihasilkan sebesar 241 Ton.

3.5.2.4 Peternakan

Keberadaan ternak sapi dan kerbau sejak dulunya tidak dapat dipisahkan dari masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Hal ini disebabkan karena tenak kerbau maupun sapi dimanfaatkan sebagi sumber pendapatan, selain itu pula daging sapi maupun kerbau menjadi sumber protein hewani yang digemari oleh masyarakat. Bahkan pada acara-acara tertentu seperti acara keagamaan atau perkawinan, daging sapi maupun kerbau merupakan menu yang wajib dihidangkan pada sebagian

masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sehingga pada saat tersebut permintaan daging kerbau cukup tinggi.

Ternak kerbau memiliki banyak keunggulan seperti yang dinyatakan oleh Direktorat Jenderal Peternakan (2007) antara lain; 1) ternak kerbau bersifat progresif, yaitu dapat tumbuh, yaitu sebagai ternak kerja sekaligus penghasil daging; serta 4) ternak kerbau bersifat disperse, yaitu tersebar luas di berbagai daerah atau wilayah. berkelanjutan tanpa menimbulkan efek negatif terhadap kualitas lingkungan; 2) ternak kerbau bersifat artikulatif, yaitu memiliki keterkaitan antar subsektor bahkan antar wilayah, dan memiliki multiplier impact yang tinggi; dan 3) ternak kerbau bersifat komplementer.

Tabel III.5.36
Perkembangan Populasi Ternak Ruminasia Besar
di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Ha), Tahun 2022

NO	Sapi		Kerbau	
	2021	2022	2021	2022
1	65	64	-	-
2	1.062	1.064	17	16
3	4.576	4.589	6	10
4	2.647	2.666	-	-
5	2.310	2.268	38	30
6	449	410	-	-
7	119	109	-	4
8	5.373	5.748	19	19
9	2.552	2.575	-	-
10	1.427	1.416	-	-
11	894	920	-	2
Jumlah	**21.474**	**21.829**	**80**	**81**

Sumber: Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Angka 2023

Perkembangan populasi ternak ruminansia besar (ternak sapi dan kerbau) pada periode 2021-2022 cenderung meningkat khususnya pada ternak sapi. Populasi ternak sapi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari 21.474 ekor pada tahun 2021 menjadi 21.829 ekor pada tahun 2022 atau rata-rata tumbuh sebesar 1,32 % per tahun. Menurut Yusdja dan Ilham (2004) Laju pertumbuhan populasi sapi nasional berdasarkan data sekunder tersedia dalam 30 tahun terakhir hanya 1,44 %. Pertumbuhan populasi ternak sapi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tersebut

dinilai lambat tetapi masih lebih baik daripada nasional, dan bahkan beberapa wilayah produksi jumlah sapi mengalami penurunan.

Sedangkan untuk ternak kerbau tidak mengalami peningkatan dari 80 ekor pada tahun 2021 menjadi 81 ekor pada tahun 2022. Kecilnya potensi ternak kerbau karena sistem pemeliharaan yang masih ekstensif atau tradisional menjadi model umum pemeliharaan oleh peternak, maka perlu sentuhan teknologi baik bibit maupun pakan. Cukup tingginya daya adaptasi ternak kerbau dan dengan pola usaha tani yang ada serta keterkaitannya dengan budidaya setempat menjadikan ternak kerbau sangat erat keterkaitannya dengan kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Selain adanya perkembangan ternak ruminansia besar (ternak sapi dan kerbau di Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga terjadi perkembangan ternak ruminansia kecil (ternak kambing dan domba) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2022 terjadi perubahan kenaikan mapun penurunan yang tidak stabil . Populasi ternak kambing di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 44.951 ekor pada tahun 2021 dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 yang berjumlah 45.514 ekor. Sedangkan ternak domba juga meningkat dari 53 ekor pada tahun 2021 menjadi 62 ekor pada tahun 2022 . Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.5.37
Perkembangan Populasi Ternak Ruminasia Kecil
di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Ha), Tahun 2022

NO	Kambing		Domba	
	2021	2022	2021	2022
1	2238	2368	-	-
2	2491	2544	13	14
3	3516	3688	-	-
4	6892	6874	-	-
5	2491	2538	2	2
6	8593	8574	14	16
7	2191	2346	-	-
8	5651	5688	9	12
9	5072	5029	15	18
10	3530	3534	-	-
11	2286	2331	-	-
Jumlah	**44951**	**45514**	**53**	**62**

Sumber: Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Angka 2023

3.5.2.5 Energi dan Sumber Daya Mineral

Sumber daya alam mineral dan energi adalah cadangan bahan galian bumi yang tidak terbarukan (*unrenewable resources*) , memiliki nilai yang tinggi serta bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Jumlahnya sumber daya tersebut sangat terbatas dan proses pembentukan serta pemulihannya membutuhkan waktu lama. Untuk itu, pemanfaatannya harus digunakan seefektif dan seefisien mungkin.

Lifting migas adalah produksi migas yang siap jual. Besaran lifting ini bisa berbeda dengan besaran produksi karena tidak semua produksi migas yang baru keluar dari dalam bumi bisa langsung dijual. Dalam beberapa kasus, produksi migas masih harus diproses atau diangkut sebelum menjadi lifting. Istilah lifting juga kerap dipakai untuk menggambarkan proses penyerahan migas dari produsen kepada pembeli. Pada proses inilah penerimaan negara dari kegiatan hulu migas terealisasi.

Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki kandungan minyak bumi dan gas yang cukup besar. Pada saat ini ada 2 perusahan asing, yaitu PETRONAS dari Malaysia dan PETROCHINA dari China, yang melakukan eksplorasi gas dan minyak bumi di wilayah ini. Petronas masih dalam tahap eksplorasi di lepas pantai, sedangkan Petrochina sudah eksploitasi. Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki cadangan Minyak Bumi ± 250 juta Barrel sedangkan Gas Alam Cair potensinya 2 Milyard Feet Cubic Gas sebagai potensi sumberdaya non hayati. Untuk periode Tahun 2022 lifting minyak bumi Petrochina Jabung Ltd. mencapai 734.984 Bbls. Sedangkan lifting gas alam Petrochina Jabung Ltd. Pada periode yang sama mencapai 6.430.640 ribu MMBTU.

Tabel III.5.38
Capaian Lifting Minyak dan Gas Bumi (Migas) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Lifting Minyak Bumi (Barrel)	866.653	989.319	562.335	308.150	734.984
2	Lifting Gas Bumi (MMBTU)	9.581.386	9.031.182	3.583.802	3.251.530	6.430.640

Sumber: https://tanjabtimkab.go.id/download/2023/06/21/11profil-daerah-2022.pdf,
RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur,Tahun 2022 dan pengolahan data tahun 2023

Penggunaan listrik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebagai sarana penerangan untuk kegiatan rumah tangga, perdagangan dan jasa,

pemerintahan serta fasilitas sosial maupun penerangan umum di layani oleh PT. PLN (Persero). Sebagian besar listrik yang digunakan oleh masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur disuplai oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan sisanya diusahakan sendiri oleh masyarakat dengan tenaga diesel. Pada tahun 2021 , PLN telah mampu menjangkau seluruh kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan jumlah pelanggan mencapai 65.075 rumah tangga dengan daya terpasang sebanyak 93.535.410 pada tahun 2021. untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.5.39
Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik PT. PLN (Persero) pada Cabang/Ranting PLN Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2022

No	Uraian	2020	2021	2022
1	Produksi Listrik (KWh)	105.436.996	114.283.374	114.674.000
2	Listrik Terjual (KWh)	88.184.644	93.535.410	98.568.718
3	Dipakai sendiri (KWh)	94.893	1.072.839	278.209
4	Susut/Hilang (KWh)	12.917.699	14.723.581	11.658.990

Sumber : Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Angka,2023

Tabel III.5.40
Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2018–2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Pelanggan	53.952	57.744	61.229	65.075	67.677

Sumber : Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Angka,2023

Tabel III.5.41
Capaian Rasio Elektrifikasi (RE) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 20218-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	RE Kecamatan (%)	100%	100%	100%	100%	100%
2	RE Desa/Kelurahan (%)	91,40%	95,70%	96,77%	100%	100%
3	RE Rumah Tangga (%)	91,45%	93,07%	99,06%	92,63%	90,23%

Sumber : Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Angka,2023, RKPD Tanjung Jabung Timur,2022 dan Pengolahan data, 2023

Berdasarkan tabel Rasio elektrifikasi adalah perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan baik dari listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun listrik non-PLN dengan jumlah rumah tangga. Adapun capaian rasio elektrifikasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur sampai dengan tahun 2022 telah

mencapai 100 persen untuk Rasio Elektrifikasi Kecamatan dan Rasio Elektrifikasi Desa/Kelurahan sedangkan rasio capaian rumah tangga menurun dari 92,63 persen hingga 90,23 persen.

3.5.2.6 Sistem Jaringan Telekomunikasi

Sistem jaringan telekomunikasi merupakan sistem jaringan pemberian informasi dan komunikasi jarak jauh. Kapasitas pelayanan komunikasi penting dalam aspek prasarana. Kapasitas yang harus dimiliki harus mencukupi penduduk yang menggunakannya.

Untuk sarana tower/Menara telekomunikasi, saat ini terdapat 44 menara telekomunikasi yang tersebar pada 11 Kecamatan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

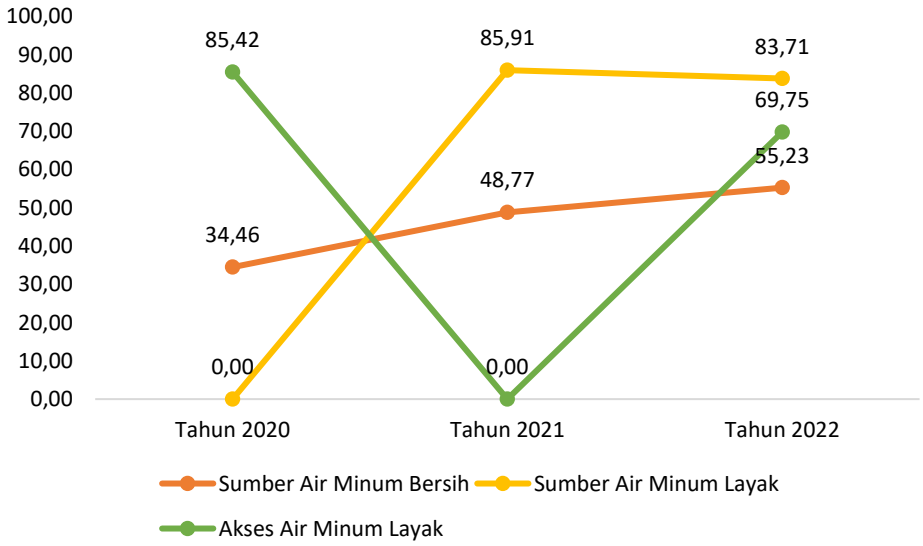
3.5.2.7 Air Bersih

Berdasarkan data dari Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jambi Tahun 2022, Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum bersih dan air minum layak di Tanjung Jabung Timur pada Tahun 2022 sebesar 83,71% mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar 85,91%. Pada Tahun 2022 pada program penyediaan dan pengelolaan air baku cakupan rumah tangga dengan layanan air bersih sebesar 55,23%. Sedangkan proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan sebesar 69,75%.

Tabel III.5.42
Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota, Sumber Air Minum Bersih, dan Sumber Air Minum Layak di Kab. Tanjab Timur Tahun 2020-2022

No	Jenis Keterangan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Sumber Air Minum Bersih	34,46	48,77	55,23
2	Sumber Air Minum Layak	-	85,91	83,71
3	Akses Air Minum Layak	85,42	-	69,75

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jambi 2022



Gambar 3.5.37
Grafik Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota, Sumber Air Minum Bersih, dan Sumber Air Minum Layak di Kab. Tanjab Timur Tahun 2020-2022

Tabel III.5.43
Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tahun 2022

No	Kecamatan	Pelanggan	Air Disalurkan (m^3)	Nilai (Rp)
1	Mendahara	-	-	-
2	Mendahara Ulu	3.072	13.140	51.157.250
3	Geragai	1.488	20.354	53.609.750
4	Dendang	23.388	219.721	499.991.500
5	Muara Sabak Barat	2.712	2.232	18.039.750
6	Muara Sabak Timur	4.476	43.829	116.606.000
7	Kuala Jambi	-	-	-
8	Rantau Rasau	21.528	253.004	653.661.000
9	Berbak	-	-	-
10	Nipah Panjang	8.304	84.733	254.123.250
11	Sadu	8.076	82.398	237.391.500
Jumlah		**73.044**	**719.411**	**1.884.580.000**

Sumber: Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Angka 2023

Berdasarkan tabel di atas penggunaan air bersih yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berjumlah 73.044 pelanggan, dimana pelanggan yang paling banyak terdapat di Kecamatan Dendang 23.388 pelanggan, diikuti oleh Kecamatan Rantau Rasau sebanyak 21.528 Pelanggan, adapun untuk Kecamatan Mendahara dan Kecamatan Berbak belum tersalurkannya air bersih. Air yang disalurkan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebanyak 719.411 M^3.

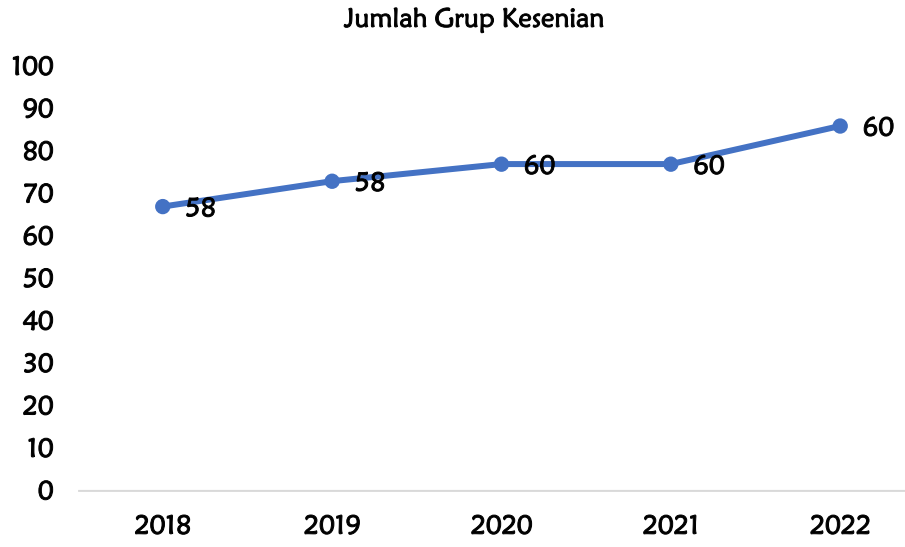
3.5.2.8 Seni Budaya Dan Olahraga

A. Seni Budaya

Nilai sosial budaya yang berkembang dalam tatanan kehidupan masyarakat lokal merupakan asset pembangunan yang sangat tinggi nilainya, sedang atraksi budaya dan objek wisata merupakan modal dasar untuk pengembangan perekonomian kerakyatan dimasa mendatang.

1. Kesenian

Keahlian mengekspresikan ide-ide dan pemikiran estetika, termasuk mewujudkan kemampuan akan benda, suasana, atau karya yang dapat menimbulkan rasa indah sehingga menciptakan peradaban yang lebih maju merupakan bagian dari kesenian. Kesenian terbentuk dari berbagai grup, jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami peningkatan sejak tahun 2018. Pada tahun 2018 terdapat 58 grup kesenian per 10.000 penduduk kesenian per 10.000 penduduk naik menjadi sebanyak 60 grup kesenian per 10.000 penduduk kesenian di tahun 2020-2022. Untuk lebih jelas mengenai jumlah grup kesenian dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3.5.38
Grafik Jumlah Grup Kesenian di Kab. Tanjab Timur tahun 2018-2022
Sumber : BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur,2019-2023, BPS Provinsi tahun 2023 dan Pengolahan Data Tahun 2023

B. Olahraga

1. Jumlah Atlet Olahraga

Jumlah atlet olahraga di Kabupaten Tanjung Timur selama priode 2018-2022 meningkat dari 436 orang pada tahun 2018 menjadi 454 pada tahun 2022yang tersebar dari 27 cabang olahraga. Jumlah atlet olahraga terbanyak berada pada cabang olahraga Taekwondo sebanyak 32 orang periode tahun 2018-2022. Adapun cabang olahraga dengan jumlah atlet terendah berada pada cabang olahraga balap sepeda sebanyak 4 orang pada tahun 2022, dan Cabang olahraga yang mengalami pengurangan atlet berada pada cabang olahraga drum band sebanyak 28 orang pada tahun 2022, angkat berat sebanyak 16 orang pada tahun 2022 dan cabang olahraga panjat tebing sebanyak 6 orang. untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.5.44
Jumlah Atlit Olahraga Berdasarkan Cabang Olahraga
di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Cabang Olahraga		Orang	Orang	Orang	Orang	Orang
1	Bulu Tangkis	14	14	14	16	16
2	Karate	24	24	24	24	24
3	Pencak Silat	20	20	20	22	22
4	Tenis Meja	8	8	8	8	8
5	Bola Voli	28	28	28	28	32
6	Bola Basket	21	21	21	25	25
7	Drum Band	30	30	30	28	28
8	Atletik	17	17	17	17	19
9	Kempo	9	9	9	9	9
10	Gulat	23	23	23	23	23
11	Bilyard	8	8	8	8	8
12	Balap Sepeda	4	4	4	4	4
13	Taekwondo	32	32	32	32	33
14	Angkat Berat	16	16	16	17	16
15	Tarung Derajat	19	19	19	21	21
16	Tenis Lapangan	6	6	6	6	6
17	Balap Motor	6	6	6	6	6
18	Dayung	10	10	10	10	10
19	Panahan	14	14	14	15	15
20	Sepak Takraw	30	30	30	30	30
21	Sepeeda Bola	26	26	26	26	26
22	Panjat Tebing	7	7	7	6	6
23	Wushu	12	12	12	12	12
24	Tinju	7	7	7	7	7
25	Renang	23	23	23	25	25
26	Bridge	9	9	9	11	11
27	Catur	13	13	13	12	12
Jumlah		**436**	**436**	**436**	**448**	**454**

Sumber: Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Angka 2023, RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur,Tahun 2022

2. Gedung Olahraga

Gedung olahraga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur cenderung tidak ada perubahan selama periode 2018-2022 dimana jumlah Gedung olahraga sebanyak 17 gedung. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.5.45
Jumlah Gedung Olahraga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Gedung Olahraga	17	17	17	17	17
2	Pertumbuhan (%)	0	0	0	0	0

Sumber: Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Angka 2023, RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur,Tahun 2021 dan Pengolahan Data Tahun 2023

3.6 ASPEK DAYA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.6.1 Struktur dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi biasanya digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan yang berupa proses peningkatan suatu output dari setiap periode. Pertumbuhan ekonomi mengakibatkan terjadinya perubahan struktur perekonomian. Perubahan struktur perekonomian diakibatkan oleh adanya interaksi akumulasi modal dan konsumsi masyarakat yang merupakan salah satu pembetuk Pendapat Domestik Regional Bruto (PDRB).

3.6.1.1 Sektor Ekonomi Basis

Sektor ekonomi basis dapat diketahui dengan menggunakan metode *Location Quotient* (LQ). Metode LQ bertujuan untuk mengidetifikasi komoditas unggulan dalam suatu wilayah. Analisis ini dilakukan dengan melihat perbandingan antara sektor ekonomi sudatu daerah terhadap sektor ekonomi yang sama pada cakupan administratif yang lebih besar. Data yang digunakan pada analisis ini yaitu PDRB atas dasar harga konstan dengan tujuan untuk melihat perkembangan perekonomian secara riil yang pertumbuhannya tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan harga atau inflasi/deflasi. Analisis LQ digunakan untuk menentikan kategori suatu sektor termasuk dalam sektor bepotensi unggulan atau bukan unggulan, dengan rumus:

$$LQ = \frac{Sik/PDRBK}{Sip/PDRBP}$$

Keterangan:

Sik	= sumbangan sektor i studi k (kabupaten)
PDRBK	= PDRB total daerah k (kabupaten)
Sip	= sumbangan sektor i daerah refernesi (provinsi)
PDRBP	= PDRB total referensi (provinsi)

Hasil analisis tersebut menghasilkan 3 kemungkinan dimana:

1. LQ = 1, artinya sektor ekonomi di daerah i memiliki laju pertumbuhan yang sama dengan perekonomian di daerah referensi (provinsi) pada sektor yang sama;
2. LQ > 1, artinya sektor ekonomi di daerah i memiliki laju pertumbuhan yang lebih besar dari daerah referensi (provinsi) atau dapat dikatakan sebagai sektor unggulan; dan
3. LQ < 1, artinya artinya sektor ekonomi di daerah i memiliki laju pertumbuhan yang lebih kecil dari daerah referensi (provinsi) atau sektor ekonomi tersebut tergolong sektor non basis.

Tabel III.6.1
Perhitungan Sektor Ekonomi Basis

Kategori menurut Lapangan Usaha	LQ Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Hasil	Keterangan
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,60	LQ < 1	Non Basis
Pertambangan dan Penggalian	2,37	LQ > 1	Basis
Industri Pengolahan	0,67	LQ < 1	Non Basis
Pengadaan Listrik dan Gas	0,25	LQ < 1	Non Basis
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,46	LQ < 1	Non Basis
Konstruksi	0,63	LQ < 1	Non Basis
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,58	LQ < 1	Non Basis
Transportasi dan Pergudangan	0,35	LQ < 1	Non Basis
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,30	LQ < 1	Non Basis
Informasi dan Komunikasi	0,38	LQ < 1	Non Basis
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,32	SLQ < 1	Non Basis
Real Estate	0,38	SLQ < 1	Non Basis
Jasa Perusahaan	1,01	LQ > 1	Basis
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,51	LQ < 1	Non Basis
Jasa Pendidikan	0,85	LQ < 1	Non Basis
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,40	LQ < 1	Non Basis
Jasa lainnya	0,28	LQ < 1	Non Basis

Sumber: Hasil analisis, Tahun 2023

Berdasarkan hasil analisis LQ pada tabel diatas , Dari 17 sektor yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan 2 sektor basis dan 15 sektor non basis. Sektor basis yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdiri dari sektor Pertambangan dan Penggalian dengan nilai LQ 2,37 atau LQ>1 dan sektor basis lainnya berasal dari sektor jasa perusahaan dengan nilai LQ 1,01 atau LQ>1, dari 2 sektor ini berpotensi untuk dikembangkan oleh Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang dapat memenuhi kebutuhan Kabupaten dan luar daerah. Sektor lainnya merupakan sektor non basis yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebanyak 15 sektor sehingga produksinya hanya dapat memenuhi kebutuhan Kabupaten Tanjung Jabung Timur saja.

3.6.1.2 Analisis Pergeseran Struktur Ekonomi

Analisis pergeseran struktur ekonomi biasanya menggunakan analisis *shift share*. Analisis *shift share* merupakan salah satu pendekatan uang menjelaskan perubahan ekonomi yang dipengaruhi oleh sektor secara nasional, regional, maupun lokal. Penggunaan analisis *shift share* yaitu untuk menggambarkan tren pertumbuhan, memperkirakan pertumbuhan wilayah, dan menganalisis efek dari inisiatif kebijakan serta mengembangkan perencanaan strategis bagi suatu wilayah maupun komunitas. Terdapat beberapa komponen dalam analisis *shift share* diantaranya:

a. *Proportional Shift*, dilakukan untuk menilai pertumbuhan sektor i lokal dibandingkan dengan sektor i secara wilayah atau nasional.
    1. PP > 0 (bernilai positif), menunjukkan bahwa sektor tersebut tumbuh secara pesat dalam lingkup nasional/regional
    2. PP < 0 (bernilai negatif), menunjukkan bahwa sektor tersebut tumbuh secara lambat dalam lingkup nasional/regional
b. *Differential shift*, dilakukan untuk menilai pertumbuhan sektor i lokal dibanding dengan seluruh sektor lokal.
    1. PPW > 0 (bernilai positif, menunjukkan bahwa sektor tersebut memiliki keunggulan kompetitif di daerah tersebut

2. PPW < 0 (bernilai negatif), menunjukkan bahwa sektor tersebut tidak dapat bersaing

c. Pergeseran bersih, merupakan penjumlahan dari proportiolan shift dan differential shift.

1. PP+PPW = PB > 0, menunjukkan bahwa sektor tersebut berkembang progresif
2. PP+PPW = PB < 0, menunjukkan bahwa sektor tersebut mengalami kemunduran

Tabel III.6.2
Hasil Perhitungan Analisis *Shift Share*

Kategori Menurut Lapangan Usaha	PP	PPW	PB	Keterangan
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,01	-0,04	-0,05	Terbelakang
Pertambangan dan Penggalian	-0,02	-0,16	-0,18	Terbelakang
Industri Pengolahan	-0,06	-0,04	-0,10	Terbelakang
Pengadaan Listrik dan Gas	0,12	0,00	0,12	Tumbuh Cepat dan Berdaya Saing
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,07	0,10	Tumbuh Cepat dan Berdaya Saing
Konstruksi	0,09	-0,08	0,01	Cenderung Berpotensi
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,08	-0,11	-0,03	Cenderung Berpotensi
Transportasi dan Pergudangan	-0,15	0,22	0,07	Berkembang
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-0,04	-0,04	-0,08	Terbelakang
Informasi dan Komunikasi	0,15	0,02	0,17	Tumbuh Cepat dan Berdaya Saing
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,05	-0,10	-0,05	Berkembang
Real Estate	0,02	-0,02	0,00	Terbelakang
Jasa Perusahaan	-0,06	0,03	-0,04	Berkembang
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,08	-0,01	-0,09	Terbelakang
Jasa Pendidikan	0,04	-0,07	-0,03	Terbelakang
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,27	-0,25	0,02	Cenderung Berpotensi
Jasa lainnya	-0,05	0,02	-0,04	Perkembang

Sumber: Hasil analisis, Tahun 2023

Proportional Sift:

Berdasarkan tabel diatas terdapat 6 sektor yang tumbuh relatif lebih cepat di Kabupaten Tanjung jabung Timur, diataranya

1. sektor pengadaan listrik dan gas;
2. sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang;

3. sektor konstruksi;
4. sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor;
5. sektor informasi dan komunikasi;
6. sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Differential Shift:

Berdasarkan tabel diatas terdapat 7 sektor yang memiliki keunggulan lokasi yang sangat baik atau tumbuh lebih cepat daripada industri yang sama ditempat lain, diantaranya:

1. sektor pengadaan listrik dan gas;
2. sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang;
3. sektor informasi dan komunikasi;

3.6.1.3 Pengeluaran Konsumsi Makanan dan Bukan Makanan Per Kapita

Kesejahteraan penduduk salah satunya dapat diukur melalui perkembangan tingkat konsumsi. Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Pengeluaran untuk konsumsi makanan dihitung selama seminggu terakhir, sedangkan konsumsi bukan makanan dihitung sebulan dan setahun terakhir. Baik konsumsi makanan maupun bukan makanan selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata-rata sebulan. Angka konsumsi/pengeluaran rata-rata per kapita yang disajikan dalam publikasi ini diperoleh dari hasil bagi jumlah konsumsi seluruh rumah tangga (baik mengonsumsi makanan maupun tidak) terhadap jumlah penduduk. Rata-rata pengeluaran konsumsi makanan dan bukan makanan perkapita di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2017 – 2021 dapat dilihat pada Tabel halaman Berikut.

Tabel III.6.3
Rata-Rata Pengeluaran Konsumsi Makanan dan Bukan Makanan Perkapita Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Konsumsi Makanan per Kapita	557138	518552	593818	688884	792.024
2	Konsumsi Bukan Makanan Perkapita	398306	400958	413910	470539	495.785
Jumlah		**955444**	**919.510**	**1007728**	**1159423**	**1287809**

Sumber: BPS Statistik Kesejahteraan Rakyat,2023 dan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung timur,2022

3.6.1.4 Nilai Tukar Petani

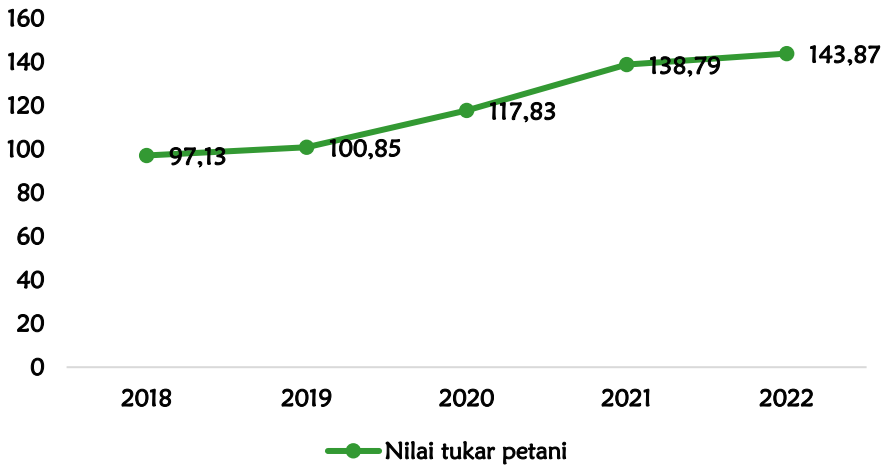
Guna melihat keberhasilan pembangunan pertanian, maka selain melihat kontribusi dan pertumbuhan sektor tersebut juga diperlukan tingkat kesejahteraan petani. Salah satu indicator pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani adalah Nilai Tukar Petani (NTP).

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan/rasio antara Indeks Harga Yang Diterima Petani (It) dengan Indeks Harga Yang Dibayar Petani (Ib). Hubungan Nilai Tukar Petani (NTP) dengan tingkat kesejahteraan petani sebagai produsen secara nyata terlihat dari posisi It yang berada pada pembilang (enumerator) dari angka NTP. Bila harga barang/produk pertanian naik, dengan asumsi volume produksi tidak berkurang, maka penerimaan/pendapatan petani dari hasil panennya juga akan bertambah. Perkembangan harga yang ditunjukkan It, merupakan sebuah indikator tingkat kesejahteraan petani produsen dari sisi pendapatan.

Dari sisi perkembangan jumlah pengeluaran atau pembelanjaan petani baik untuk kebutuhan konsumsi maupun untuk produksi, maka petani sebagai produsen dan konsumen dihadapkan kepada pilihan dalam mengalokasikan pendapatannya yaitu: Pertama, untuk memenuhi kebutuhan pokok (konsumsi) demi kelangsungan hidup petani beserta keluarganya. Kedua, pengeluaran untuk produksi/budidaya pertanian yang merupakan ladang penghidupannya yang mencakup biaya operasional produksi dan investasi atau pembentukan barang modal. Unsur kedua ini hanya mungkin dilakukan apabila kebutuhan pokok petani telah terpenuhi. Investasi dan pembentukan barang modal merupakan faktor penentu bagi tingkat kesejahteraan petani.

Melalui perbandingan antara kedua perkembangan harga tersebut dalam NTP, maka dapat diketahui apakah peningkatan pengeluaran untuk kebutuhan petani dapat dikompensasi dengan pertambahan pendapatan petani dari hasil produksinya. Sebaliknya apakah kenaikan harga panen dapat menambah pendapatan petani yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan petani. NTP juga merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam menentukan arah kebijakan pertanian.

Nilai NTP tidak dihitung sampai dengan Kabupaten/Kota, oleh karena itu NTP Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengacu pada NTP Provinsi Jambi. NTP Provinsi Jambi terdiri dari NTP untuk subsektor tanaman pangan, subsektor perkebunan dan subsektor peternakan. Fluktuasi NTP ini mengindikasikan bahwa kebijakan pertanian yang selama ini dilaksanakan belum mampu meningkatkan kesejahteraan petani karena ketidakstabilan harga ditingkat petani dan pola konsumsi petani. Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Jambi April 2022 sebesar 143,87 atau naik 1,04 persen. Kenaikan NTP dikarenakan Indeks Harga yang diterima petani naik sebesar 1,63 persen, sedangkan Indeks harga yang dibayar petani mengalami kenaikan sebesar 0,58 persen. Capaian ini cukup memberikan harapan bahwa kebijakan pembangunan pertanian yang dilaksanakan tidak hanya untuk meningkatkan produktivitas dan kestabilan harga jual namun juga meningkatkan keberdayaan petani dalam mengelola usaha taninya.



Gambar 3.6.1
Nilai Tukar Petani Tahun 2018-2022

3.6.2 Produktivitas Total Daerah

Produktivitas total daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas tiap sektor per Angkatan kerja yang meninjukan seberapa produktif tiap Angkatan kerja dalam mendorog ekonomi daerah per sektor. Produktivitas total daerah dapat diketahui dengan menghitung produktivitas daerah per sektor yang merupakan jumlah PDRB dari setiap sektor dibagi dengan jumlah angkatan kerja dalam sektor yang bersangkutan. Sektor dalam PDRB diklasifikasikan menjadi 3 sektor diantaranya:

a. sektor pertanian = pertanian
b. sektor industri = pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, air, gas, dan konstruksi
c. sektor jasa = perdagangan, angkutan, pergudangan, keuangan, jasa perusahaan, dan jasa kemasyarakatan

Berdasarkan hasil perhitungan, sektor industri merupakan sektor yang memiliki produktivitas tertinggi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur meskipun terjadi fluktuasi dari tahun 2018-2022 yaitu sebesar 59,36% pada tahun 2028 menjadi 51% pada tahun 2022 sedangkan produktivitas terendah berada pada sektor jasa yaitu sebesar 7,09%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.6.4
Persentase Produktivitas Total Daerah
di Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2018-2022

Sektor	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian	17,76	18,31	24,27	23,32	21,44
Indsutri	59,36	57,2	44,3	47,03	51
Jasa	5,83	6,3	8,31	7,74	7,09

Sumber: BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 dan BPS Provinsi Jambi Tahun 2023

3.6.3 Perizinan

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2008, tentang OTK Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 44 tahun 2008 tentang pelimpahan wewenang kepada kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dimana KPPT memiliki wewenang pelayanan perizinan secara terpadu. Melalui KPPT tersebut, waktu, tempat dan proses pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman

modal lebih terpadu dan teratur. Waktu lamanya proses perizinan bervariatif antara 2 hingga 8 hari pengurusan dengan catatan persyaratan lengkap. Lama pengurusan perizinan terlama pada izin mendirikan bangunan selama 8 hari. Untuk lebih jelasnya lamanya proses perizinan perjenis izin dapat dilihat pada Tabel Berikut.

Tabel III.6.5
Lamanya Proses Perizinan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

No	Pajak Daerah	2021	2022
1	Surat Izin Perdagangan (SIUP)	2 Hari	2 Hari
2	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	2 hari	2 hari
3	Izin Usaha Industri (IUI)	5 hari	5 hari
4	Tanda Daftar Indutri (TDI)	2 hari	2 hari
5	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	8 hari	8 hari

Sumber: DPMPTT Kab. Tanjung Jabung Timur

3.6.4 Jumlah Pajak dan Retribusi Daerah

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah maka pemerintah Tanjung Jabung Timur memiliki kewenangan memungut pajak dan retribusi daerah sebanyak 11 jenis pajak dan 16 jenis retribusi. Adapun kelima jenis pajak dan empat jenis retribusi daerah yang dipungut oleh Provinsi Jambi dimuat ke dalam tabel berikut ini.

Tabel III.6.6
Jumlah Pajak dan Retribusi Daerah yang Dipungut di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022

No	Pajak Daerah	No	Retribusi Daerah
1	Konsumsi Makanan per Kapita	1	Jasa Umum Sebanyak 8 Jenis retribusi
		2	Jasa Usaha sebanyak 6 jenis retribusi
		3	Jasa Perizinan Tertentu sebanyak 2 jenis retribusi
Jumlah : 11 Jenis Pajak		**Jumlah : 16 Jenis Retribusi**	

Sumber: BPS Kabupaten Tanjung jabung Timur,2023

3.6.5 Perda Yang Mendukung Iklim Usaha

Untuk menumbuhkembangkan iklim usaha yang kondusif maka diperlukan peraturan daerah yang mendukung iklim tersebut. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menilai pentingnya dukungan pemerintah terhadap penciptaan iklim usaha yang kondusif di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Untuk itu, telah ditetapkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 12 tahun 2013

tentang penyelenggaraan pelayanan publik kepada pengusaha dan masyarakat yang memerlukan pelayanan publik yang prima dan memenuhi standar pelayanan minimum.

3.7 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.7.1 Kinerja Pelaksanaan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Kinerja pelaksanaan keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terutama dilihat dari pendapatan asli daerah dan belanja daerah uang menunjukan tingkat kemandirian daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Dalam kurun waktu Tahun 2018-2022

A. Pendapatan Daerah

Jumlah anggaran Pendapatan TA 2022 sebesar Rp1.112.594.730.184,19 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022. Realisasi Pendapatan Daerah TA 2022 adalah sebesar Rp1.130.664.106.392,07 atau 101,62% dari anggaran, jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan TA 2021 sebesar Rp1.163.129.937.038,75, turun sebesar Rp32.465.830.646,68 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel berikut.

Tabel III.7.1
Perbandingan Target dan Realisasi PAD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018-2022

No	Jenis Pendapatan	Tahun 2018			Tahun 2019		
		Target	Realisasi	Terealisasi (%)	Target	Realisasi	Terealisasi (%)
1	**Pendapatan Asli Daerah**						
	1.1 Pajak Daerah	17.453.350.000,00	17.705.729.232,42	101,45	17.913.350.000,00	16.647.635.508,94	92,93
	1.2 Retribusi Daerah	1.698.020.000,00	1.174.130.455,14	69,15	1.817.020.000,00	1.586.254.225,29	87,30
	1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kakayaan Daerah yang Disahkan	6.300.000.000,00	6.393.385.881,15	101,48	6.600.000.000,00	6.644.336.146,09	100,67
	1.4 Lain-lain PAD yang Sah	20.095.027.039,00	24.333.856.491,32	121,09	28.039.872.233,45	29.041.076.152,88	103,57
Total A		**45.546.397.039,00**	**49.607.102.060,03**	**108,92**	**54.370.242.233,45**	**53.919.302.033,20**	**99,17**
2	**Pendapatan Transfer**						
	2.1 Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	905.488.095.447,00	905.488.095.447,00	100,00	967.523.345.242,31	959.088.814.692,00	99,13
	2.2 Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	88.863.548.000,00	88.863.548.000,00	100,00	114.390.649.000,00	81.410.049.000,00	71,17
	2.3 Transfer Pemerintah Provinsi	49.312.150.448,41	49.312.150.448,41	100,00	60.568.076.516,27	69.451.007.286,90	114,67
Total B		**1.043.663.793.895,41**	**1.043.663.793.895,41**	**100,00**	**1.142.482.070.758,58**	**1.109.949.870.978,90**	**97,15**
3	**Lain-lain Pendapatan Yang Sah**						
	3.1 Pendapatan Hibah	229.615.000,00	229.615.000,00	100	31.878.600.000,00	31.878.600.000,00	100
	3.2 Pendapatan Lainnya	0	0	0	0	0	0
Total C		**229.615.000,00**	**229.615.000,00**	**100**	**31.878.600.000,00**	**31.878.600.000,00**	**100**
Jumlah A + B + C		**1.089.439.805.934,41**	**1.093.500.510.955,44**	**100,37**	**1.228.730.912.992,03**	**1.195.747.773.012,10**	**97,32**

Lanjutan Tabel diatas.....

No	Jenis Pendapatan	Tahun 2020			Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Terealisasi (%)	Target	Realisasi	Terealisasi (%)
1	**Pendapatan Asli Daerah**						
	1.1 Pajak Daerah	17.173.312.712,50	15.859.280.136,99	92,35	19.776.698.793,50	19.776.698.793,50	100
	1.2 Retribusi Daerah	2.239.621.000,00	1.775.339.753,00	79,27	1.836.406.808,43	1.836.406.808,43	100
	1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kakayaan Daerah yang Disahkan	6.794.487.721,66	6.731.659.232,59	99,08	7.088.808.214,73	7.088.808.214,73	100
	1.4 Lain-lain PAD yang Sah	29.469.449.911,97	25.280.232.390,27	85,78	52.899.558.085,09	52.899.558.085,09	100
Total A		**55.676.871.346,13**	**49.646.511.512,85**	**89,17**	**19.936.141.834,30**	**81.601.471.901,75**	**409,31**
2	**Pendapatan Transfer**						
	2.1 Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	835.509.454.753,40	833.566.346.360,00	99,77	887.564.206.912,00	887.564.206.912,00	203,1047541
	2.2 Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	81.939.776.000,00	81.939.776.000,00	100,00	106.563.874.980,00	106.563.874.980,00	237,4730055
	2.3 Transfer Pemerintah Provinsi	49.814.993.333,06	50.491.406.078,16	101,36	55.961.278.245,00	55.961.278.245,00	283,2973407
Total B		**967.264.224.086,46**	**965.997.528.438,16**	**99,87**	**1.050.089.360.137,00**	**1.050.089.360.137,00**	**100,00**
3	**Lain-lain Pendapatan Yang Sah**						
	3.1 Pendapatan Hibah	37.460.100.000,00	36.961.230.000,00	98,67	31.439.105.000,00	31.439.105.000,00	206,9234487
	3.2 Pendapatan Lainnya	0	0	0	0	0	196,7402631
Total C		**37.460.100.000,00**	**36.961.230.000,00**	**98,67**	**31.439.105.000,00**	**31.439.105.000,00**	**100**
Jumlah A + B + C		**1.060.401.195.432,59**	**1.052.605.269.951,01**	**99,26**	**1.101.464.606.971,30**	**1.163.129.937.038,75**	**106**

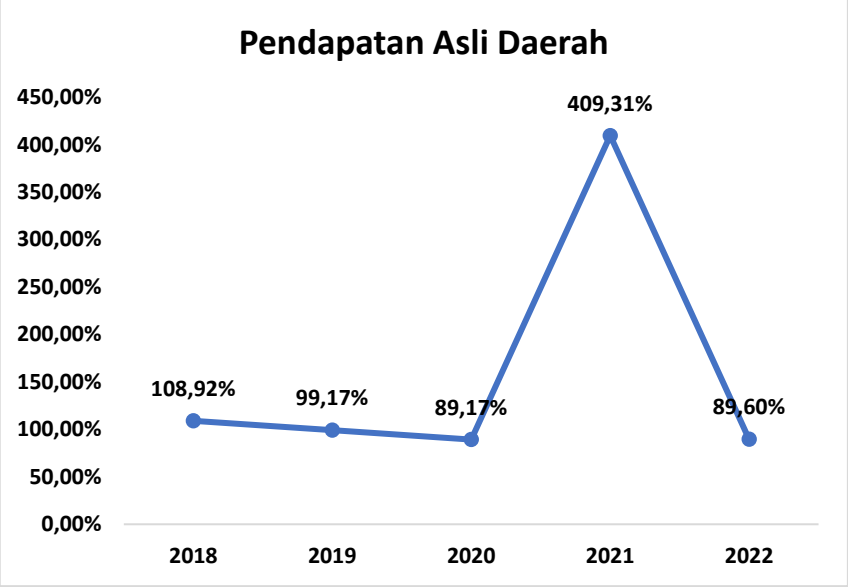
Lanjutan Tabel diatas.....

No	Jenis Pendapatan	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Terealisasi (%)
1	**Pendapatan Asli Daerah**			
	1.1 Pajak Daerah	23.314.813.984,00	23.152.323.336,80	99,3
	1.2 Retribusi Daerah	1.954.705.840,00	1.331.496.540,00	68,12
	1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kakayaan Daerah yang Disahkan	8.000.000.000,00	8.078.242.319,72	100,98
	1.4 Lain-lain PAD yang Sah	32.811.250.506,19	26.646.300.425,55	81,21
Total A		**66.080.770.330,19**	**59.208.362.622,07**	**89,60**
2	**Pendapatan Transfer**			
	2.1 Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	904.548.578.405,00	927.142.786.023,00	102,50
	2.2 Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	80.938.218.000,00	80.938.218.000,00	100,00
	2.3 Transfer Pemerintah Provinsi	61.027.163.449,00	63.374.739.747,00	103,85
Total B		**1.046.513.959.854,00**	**1.071.455.743.770,00**	**102,38**
3	**Lain-lain Pendapatan Yang Sah**			
	3.1 Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0
	3.2 Pendapatan Lainnya	0	0	0
Total C		**0,00**	**0,00**	**0**
Jumlah A + B + C		**1.112.594.730.184,19**	**1.130.664.106.392,07**	**101,62**

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tahun 2018;
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tahun 2019;
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tahun 2020;
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tahun 2021;
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tahun 2022;
BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 (tentang Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018); dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022.

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa untuk hasil teralisasi pada tahun 2018 hingga 2022 pada jenis pendapatan daerah meliputi:

1. Jenis Pendapatan berupa Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kakayaan Daerah yang Disahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. Realisai Pendapatan Daerah mengalami fluktuasi dimana tahun 2018 sekitar 108,92%, mengalami penurunan pada tahun 2019 sekitar 99,17%. Pada tahun 2020 mengalami penurunan sekitar 89,17%, dan mengalami kenaikan pada tahun 2021 sekitar 409,31%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 3.7.1
Grafik Terealisasi Berupa Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018-2022

2. Jenis Pendapatan berupa Pendapatan Transfer ini mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2018 mencapai 100 % mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2022 mencapai 102,38% . Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3.7.2
Grafik Terealisasi Berupa Pendapatan Dana Perimbanagan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018-2022

3. Jenis Pendapatan berupa lain-lain pendapatan yang sah mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2018 mencapai 100% terjadi penurunan pada tahun 2020 mencapai 98,67% dan mengalami penurunan pada tahun 2022 mencapai 0%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 3.7.3
Grafik Terealisasi Berupa Lain-Lain Pendapatan Yang Sah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018-2022



	2018	2019	2020	2021	2022
Pendapatan Asli Daerah	108,92	99,17	89,17	409,31	89,60
Pendapatan Transfer	100,00	97,15	99,87	100,00	102,38
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	100,00	100,00	98,67	100,00	0,00

Gambar 3.7.4
Grafik Rekap Teralisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018-2022

B. Belanja Daerah

Perwujudan pelayanan publik di daerah tentunya berkorelasi erat dengan kebijakan belanja daerah. Anggaran Belanja Daerah akan mempunyai peran riil dalam peningkatan kualitas layanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian daerah apabila terealisasi dengan baik. Dengan demikian, secara ideal seharusnya Belanja Daerah dapat menjadi komponen yang cukup berperan dalam peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber daya ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Belanja Daerah merupakan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mendanai seluruh program/kegiatan yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan publik di daerah. Program/kegiatan dimaksud dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah, pemerataan pendapatan, serta pembangunan di berbagai sektor. Komponen yang mengindikasikan aktivitas dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah Belanja Daerah. Komponen ini merupakan pengeluaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan pelaksanaan pembangunan daerah yang

diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja yang pengeluarannya disesuaikan dengan kemampuan dan potensi fiskal daerah. Arah kebijakan belanja daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran yang berbasis kinerja, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, prioritas pembangunan sesuai potensi dan permasalahannya, serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun depan.

Target Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sampai dengan Perubahan APBD Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 8.87.643.640.201 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 829.633.367.449,60 (94,20%) yang terdiri dari:

1) Belanja Operasi; dan
2) Belanja Modal.

Tabel berikut menunjukkan target dan realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran dari 2018 hingga tahun 2022.

Tabel III.7.2
Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018-2022

No	raian Belanja	Tahun 2018			Tahun 2019		
		Target	Realisasi	Terealisasi (%)	Target	Realisasi	Terealisasi (%)
1	**Belanja Operasi**	**682.456.762.109,60**	**682.456.762.109,60**	**100,00**	**740.177.515.180,73**	**705.588.822.490,04**	**95,33**
	1.1 Belanja Pegawai	417.665.164.640,01	417.665.164.640,01	100,00	461.299.577.088,54	440.374.941.862,24	95,46
	1.2 Belanja Barang	240.755.129.469,59	240.755.129.469,59		259.797.738.092,19	246.360.130.627,80	
	1.3 Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4 Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.5 Belanja Hibah	23.956.568.000,00	23.956.568.000,00	100,00	18.980.200.000,00	18.793.750.000,00	99,02
	1.6 Belanja Bantuan Sosial	79.900.000,00	79.900.000,00	100,00	100.000.000,00	60.000.000,00	60,00
	1.7 Belanja Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Belanja Modal**	**312.956.563.764,00**	**312.956.563.764,00**	**100,00**	**375.843.077.414,00**	**328.872.997.320,00**	**87,50**
	2.1 Belanja Tanah	3.021.738.750,00	3.021.738.750,00	100,00	907.000.600,00	903.595.700,00	99,62
	2.2 Belanja Peralatan dan Mesin	32.518.430.444,00	32.518.430.444,00	100,00	47.823.248.659,00	35.288.842.645,00	73,79
	2.3 Belanja Gedung dan Bangunan	43.376.958.118,00	43.376.958.118,00	100,00	67.229.733.336,00	49.059.897.368,00	72,97
	2.4 Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	233.187.686.452,00	233.187.686.452,00	100,00	259.476.844.819,00	243.215.343.807,00	93,73
	2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya	851.750.000,00	851.750.000,00	100,00	406.250.000,00	405.317.800,00	99,77
	2.6 Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Daerah		**995.413.325.873,60**	**995.413.325.873,60**	**100,00**	**1.116.020.592.594,73**	**1.034.461.819.810,04**	**92,69**

Lanjutan Tabel diatas.....

No	Uraian Belanja	Tahun 2020			Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Terealisasi (%)	Target	Realisasi	Terealisasi (%)
1	**Belanja Operasi**	**514.651.334.492,17**	**682.285.896.838,60**	**132,57**	**673.630.420.585,05**	**673.630.420.585,05**	**100,00**
	1.1 Belanja Pegawai	456.445.987.668,95	441.480.445.891,00	96,72	407.563.061.948,00	407.563.061.948,00	0,00
	1.2 Belanja Barang	3.141.231.623,22	189.124.900.747,60		242.128.766.226,37	242.128.766.226,37	
	1.3 Belanja Bunga	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4 Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.5 Belanja Hibah	52.594.115.200,00	50.228.050.200,00	95,50	22.809.147.410,68	22.809.147.410,68	100,00
	1.6 Belanja Bantuan Sosial	1.470.000.000,00	1.452.500.000,00	98,81	1.129.445.000,00	1.129.445.000,00	100,00
	1.7 Belanja Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Belanja Modal**	**242.487.205.872,04**	**229.225.479.692,59**	**94,53**	**229.947.374.962,13**	**229.947.374.962,13**	**100,00**
	2.1 Belanja Tanah	785.759.615,00	764.880.000,00	97,34	433.812.965,00	433.812.965,00	100,00
	2.2 Belanja Peralatan dan Mesin	58.304.061.025,04	53.299.679.648,00	91,42	51.406.129.983,00	51.406.129.983,00	100,00
	2.3 Belanja Gedung dan Bangunan	37.730.723.144,00	37.434.428.683,00	99,21	47.749.272.485,93	47.749.272.485,93	100,00
	2.4 Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	143.856.735.938,00	135.927.576.811,59	94,49	126.096.460.538,20	126.096.460.538,20	100,00
	2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya	1.809.926.150,00	1.798.914.550,00	99,39	4.261.698.990,00	4.261.698.990,00	100,00
	2.6 Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Daerah		**757.138.540.364,21**	**911.511.376.531,19**	**120,39**	**903.577.795.547,18**	**903.577.795.547,18**	**100,00**

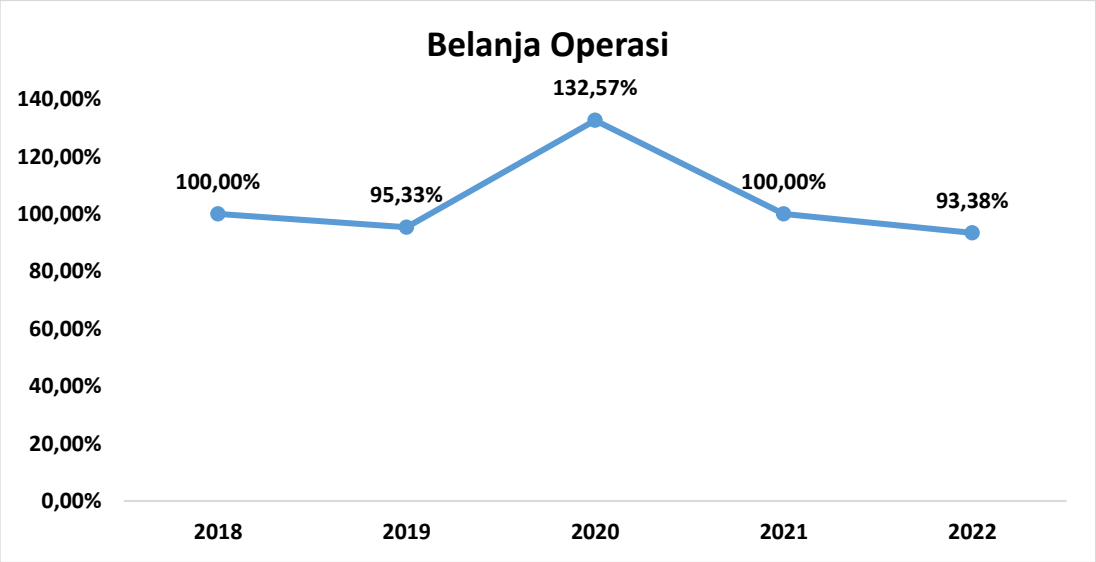
Lanjutan Tabel diatas.....

No	Uraian Belanja	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Terealisasi (%)
1	**Belanja Operasi**	**800.193.904.234,00**	**747.252.319.461,00**	**93,38**
	1.1 Belanja Pegawai	411.481.690.953,00	394.088.274.533,00	0,00
	1.2 Belanja Barang	360.700.989.081,00	325.599.113.650,00	
	1.3 Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
	1.4 Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
	1.5 Belanja Hibah	27.518.644.200,00	27.228.571.278,00	98,95
	1.6 Belanja Bantuan Sosial	492.580.000,00	336.360.000,00	68,29
	1.7 Belanja Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa	0,00	0,00	0,00
2	**Belanja Modal**	**310.485.765.189,00**	**290.561.403.375,02**	**93,58**
	2.1 Belanja Tanah	731.000.000,00	636.221.000,00	87,03
	2.2 Belanja Peralatan dan Mesin	34.506.457.963,00	31.447.159.821,00	91,13
	2.3 Belanja Gedung dan Bangunan	52.212.278.004,00	50.297.667.167,60	96,33
	2.4 Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	218.799.564.810,00	204.369.092.804,42	93,40
	2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya	4.236.464.412,00	3.811.262.582,00	89,96
	2.6 Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Daerah		**1.110.679.669.423,00**	**1.037.813.722.836,02**	**93,44**

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tahun 2018;
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tahun 2019;
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tahun 2020;
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tahun 2021;
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tahun 2022;
BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 (tentang Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018); dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 20

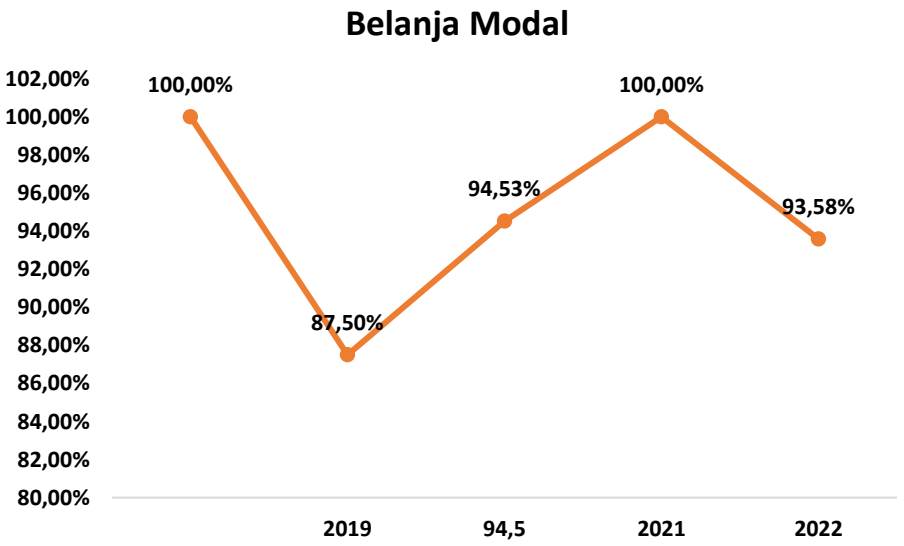
Melihat pada tabel diatas bahwa terhadap belanja daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari tahun 2018 hingga 2022 mengalami fluktuasi antara lain:

1. Untuk belanja operasi yang teralisasi mengalami fluktuasi dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Pada tahun 2018 sekitar 100% (atau sekitar Rp. 682.456.762.109) mengalami fluktuasi hingga tahun 2022 sekitar 93,38% (atau sekitar Rp. 747.252.319.461). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

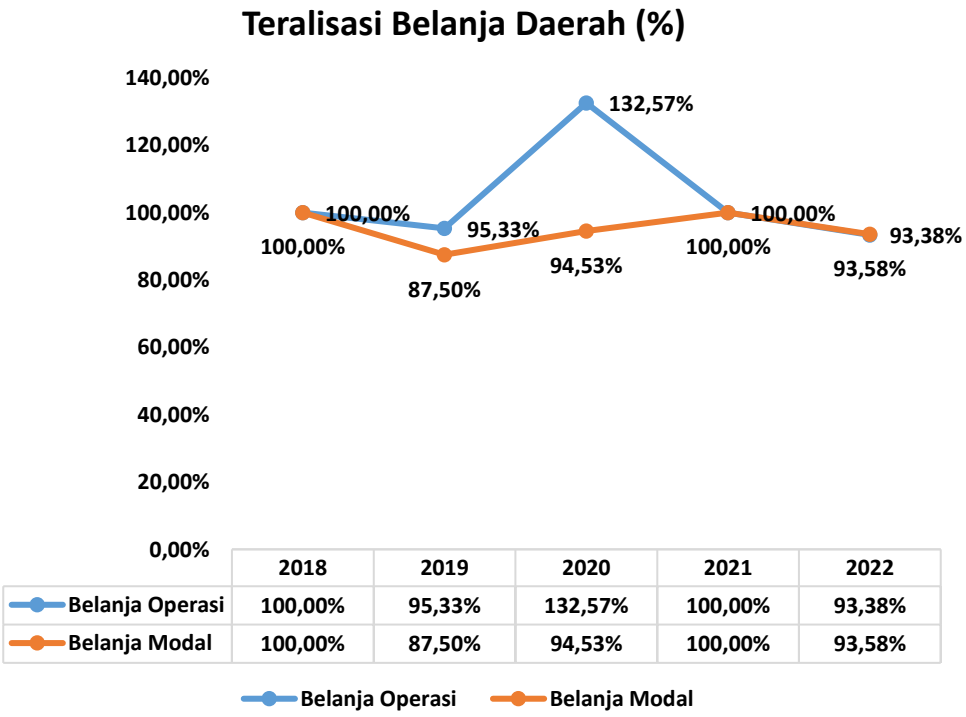


Gambar 3.7.5
Grafik Terealisasi Belanja Tidak Langsung di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018-2022

2. Untuk Modal yang teralisasi mengalami fluktuasi dari tahun 2018 sekitar 100 % (atau sekitar Rp. 312.956.563.764) hingga tahun 2022 sekitar 93,28% (atau sekitar Rp. 290.561.403.375,02). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 3.7.6
Grafik Terealisasi Belanja Langsung di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018-2022



Gambar 3.7.7
Grafik Rekap Teralisasi Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018-2022

C. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah terdiri penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya (SILPA), dan Pengeluaran pembiayaan.

Realisasi pembiayaan daerah apabilia dibandingkan dengan anggaran yang telah ditentukan terjadi defisit anggaran pada tahun 2019 sekitar 0,07% (sekitar -Rp. 50.685.000), dan terus terjadi hingga tahun 2022 mencapai 0,002% (sekitar -Rp. 3.329.007) Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.7.3
Angaran Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun 2018				Tahun 2019			
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Lebih (Kurang) (Rp)	(%)	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Lebih (Kurang) (Rp)	(%)
	Pembiayaan Daerah								
1	**Penerimaan Pembiayaan**								
	1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	119.148.747.825,70	119.148.747.825,70	0,00	0,00	77.182.228.911,54	77.182.228.911,54	0	0,00
	1.2 Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.685.000,00	(50.685.000)	0,00
	1.3 Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**119.148.747.825,70**	**119.148.747.825,70**	**0,00**	**0,00**	**77.182.228.911,54**	**77.232.913.911,54**	**(50.685.000)**	**0,00**
2	**Pengeluaran Pembiayaan**								
	2.1 Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0	0,00
	2.2 Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**2.000.000.000,00**	**2.000.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000.000,00**	**2.000.000.000,00**	**0**	**0,00**
	Pembiayaan Netto	**117.148.747.825,70**	**117.148.747.825,70**	**0,00**	**0,00**	**75.182.228.911,54**	**75.232.913.911,54**	**(50.685.000)**	**(0,07)**
	Surplus/(Defisit)	**(39.966.518.914,16)**	**(39.966.518.914,16)**	**0,00**	**0,00**	**(75.182.228.911,54)**	**6.892.356.281,06**	**50.685.000,00**	**0,07**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	**77.182.228.911,54**	**77.182.228.911,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.125.270.192,60**	**(82.125.270.193)**	**(100,00)**

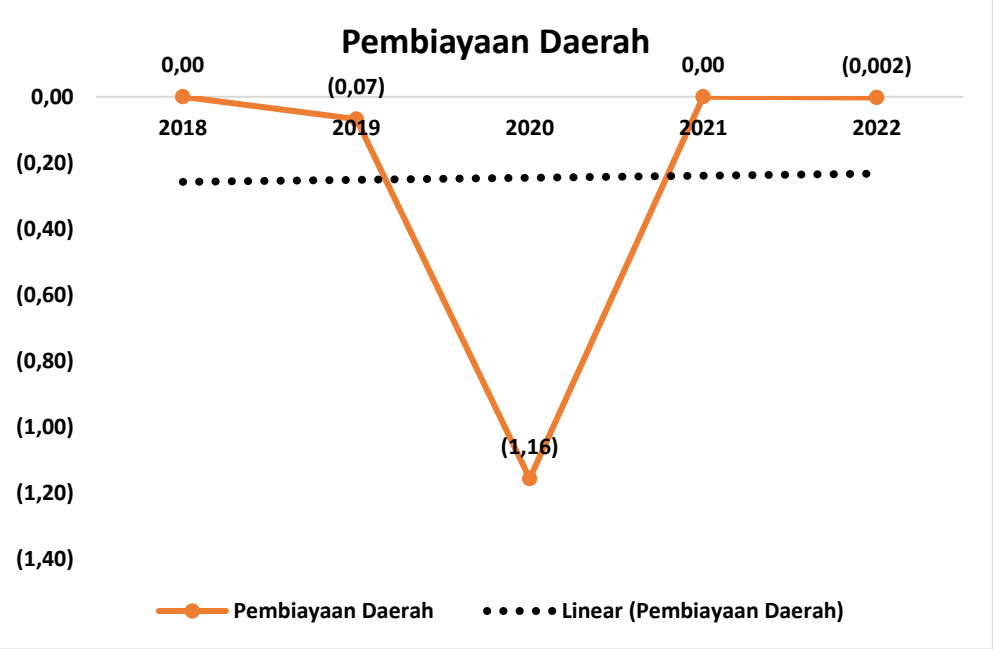
Lanjutan Tabel diatas.....

No	Uraian	Tahun 2020				Tahun 2021			
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Lebih (Kurang) (Rp)	(%)	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Lebih (Kurang) (Rp)	(%)
	Pembiayaan Daerah								
1	**Penerimaan Pembiayaan**								
	1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	82.125.270.192,60	82.125.270.192,60	0,00	0,00	38.295.047.966,24	38.295.047.966,24	0,00	0,00
	1.2 Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	26.261.150,00	(26.261.150,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3 Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	900.000.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**82.125.270.192,60**	**83.051.531.342,60**	**(926.261.150,00)**	**(1,13)**	**38.295.047.966,24**	**38.295.047.966,24**	**0,00**	**0,00**
2	**Pengeluaran Pembiayaan**								
	2.1 Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	499.643.000,00	499.643.000,00	0,00	0,00
	2.2 Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**2.000.000.000,00**	**2.000.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**499.643.000,00**	**499.643.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Pembiayaan Netto	**80.125.270.192,60**	**81.051.531.342,60**	**(926.261.150,00)**	**(1,16)**	**37.795.404.966,24**	**37.795.404.966,24**	**0,00**	**0,00**
	Surplus/(Defisit)	**(78.125.270.192,60)**	**(42.756.381.587,16)**	**926.261.150,00**	**1,16**	**(37.295.761.966,24)**	**(37.295.761.966,24)**	**0,00**	**0,00**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	**2.000.000.000,00**	**38.295.149.755,44**	**(36.295.149.755)**	**(94,78)**	**499.643.000,00**	**499.643.000,00**	**0**	**0,00**

Lanjutan Tabel diatas.....

No	Uraian	Tahun 2022			
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Lebih (Kurang) (Rp)	(%)
	Pembiayaan Daerah				
1	**Penerimaan Pembiayaan**				
	1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	151.720.237.630,81	151.723.566.637,81	(3.329.007)	(0,002)
	1.2 Penerimaan Pinjaman Daerah	55.409.096.000,00	55.409.096.000,00	0	0,00
	1.3 Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya				
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**207.129.333.630,81**	**207.132.662.637,81**	**(3.329.007)**	**(0,0016)**
2	**Pengeluaran Pembiayaan**				
	2.1 Penyertaan Modal Daerah	4.000.000.000,00	3.486.000.000,00	0	0,00
	2.2 Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**73.000.000.000,00**	**73.000.000.000,00**	**0**	**0,00**
	Pembiayaan Netto	**134.129.333.630,81**	**134.132.662.637,81**	**(3.329.007)**	**(0,002)**
	Surplus/(Defisit)	**(130.129.333.630,81)**	**(130.646.662.637,81)**	**3.329.007,00**	**0,00**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	**0,00**	**98.828.692.083,86**	**(98.828.692.084)**	**(100,00)**

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tahun 2018;
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tahun 2019;
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tahun 2020;
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tahun 2021;
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tahun 2022;
BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 (tentang Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018); dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022.



Gambar 3.7.8
Grafik *Netto* Angaran Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018-2022

3.7.2 Neraca Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Perkembangan neraca daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, analisis rasio likuiditas, analisis rasio solvabilitas dan analisis rasio aktivitas.

Rasio Likuiditas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan/entitas ekonomi untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi, atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih. Secara umum untuk menghitung Rasio Likuditas dilakukan dengan menghitung current ratio dan quick ratio.

Current Ratio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau hutang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Dengan kata lain, seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo. Maka berdasarkan tabel nilai *Current Ratio* Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 2,24% di tahun 2018, yang berarti setiap 1 rupiah hutang lancar dijamin Rp. 0,02 aktiva lancar yang dimiliki. Tahun 2019 *current ratio* sebesar 37,77%, yang berarti setiap 1 rupiah hutang lancar dijamin Rp. 0,37 aktiva lancar yang dimiliki.

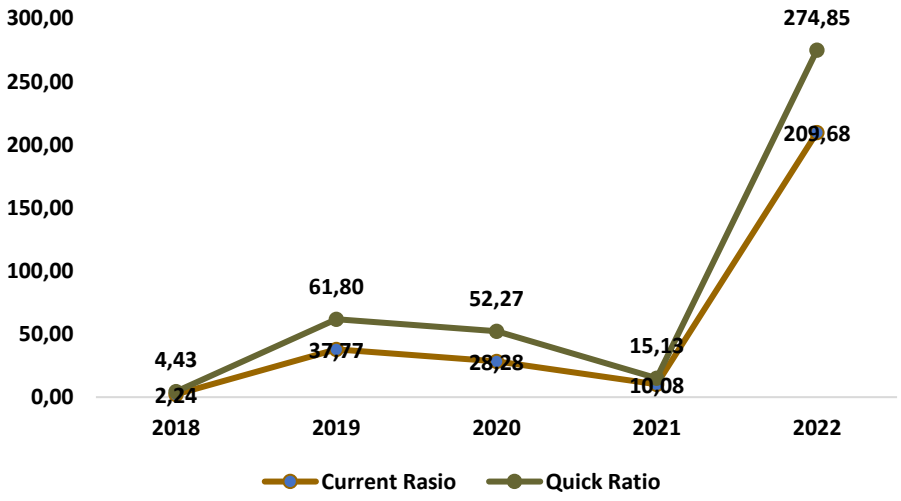
Tahun 2020 *current ratio* sebesar 28,28%, yang berarti setiap 1 rupiah hutang lancar dijamin Rp. 0,28 aktiva lancar yang dimiliki. Tahun 2021 current ratio sebesar 10,08%, yang berarti setiap 1 rupiah hutang lancar dijamin Rp. 0,10 aktiva lancar yang dimiliki. Dan tahun 2022 current ratio sebesar 209,68%, yang berarti setiap 1 rupiah hutang lancar dijamin Rp. 2,09 aktiva lancar yang dimiliki yang secara rata-rata mencapai 57,61%. Berdasarkan data di atas kemampuan Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk dapat melunasi hutangnya masih bisa ditoleransi karena pada tiap rupiah kewajiban jangka pendek dijamin dengan aktiva lancar lebih dari 1% sedangkan peningkatan *current ratio* pada tahun 2022 cukup besar mencapai 209,68% dibanding tahun sebelumnya. Artinya Kabupaten Tanjung Jabung Timur dikategorikan kurang mampu mengelola aktiva lancar sehingga rasio pembayaran kewajiban kurang mencukupi standar yang ideal. Atau kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau hutang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan kurang baik.

Quick Ratio merupakan perbandingan antara (aktiva lancar – persediaan) dengan hutang lancar. Rasio ini lebih tajam dari *current ratio*, karena hanya membandingkan aktiva lancar yang sangat likuid (mudah dicairkan) dengan hutang lancar. Artinya dalam menghitung *quick ratio* tidak memperhitungkan persediaan yang ada. Karena persediaan memerlukan waktu yang lebih lama untuk direalisasikan menjadi kas. Standar umum rata-rata adalah 100% (1:1) atau 1,5 kali dimana keadaan daerah lebih baik dari daerah lain. Berdasarkan Tabel quick ratio di Kabupaten Tanjung Jabung Timur rata-rata sebesar 80,55% atau 0,80 kali atau di atas standar umum (100% atau 1 kali). Maka dapat disimpulkan bahwa *quick ratio* Kabupaten Tanjung Jabung Timur berada pada kategori kurang baik dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau hutang lancar (hutang jangka pendek) dengan aktiva lancar tanpa mempertimbangkan nilai persediaan dibandingkan daerah lain.

Tabel III.7.4
***Ratio Likuiditas* di Tahun 2018 – 2022**

No	Tahun	Current Rasio	Quick Ratio
1	2018	2,24	4,43
2	2019	37,77	61,80
3	2020	28,28	52,27
4	2021	10,08	15,13
5	2022	209,68	274,85
Rata-rata		**57,61**	**81,70**

Sumber: LKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 - 2022



Gambar 3.7.9
***Grafik Ratio Likuiditas* di Tahun 2018 – 2022**

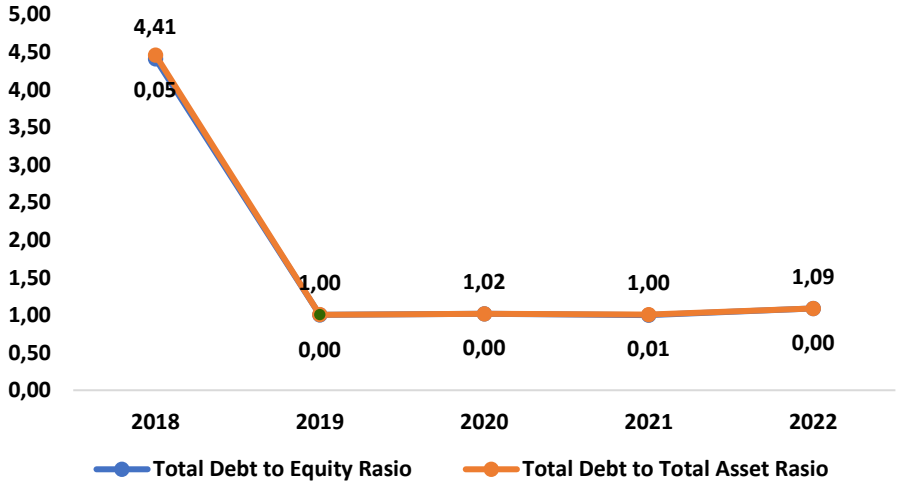
Ratio Solvabilitias adalah kemampuan sebuah entitas organisasi (pemerintah/perusahaan) untuk memenuhi segala kewajiban finansialnya apabila sekiranya perusahaan tersebut pada saat itu dilikuidasikan. Rasio ini mengukur likuiditas jangka panjang perusahaan/entitas perekonomian dan dengan demikian memfokuskan pada sisi kanan neraca.

Secara umum besarnya nilai *rasio solvabilitas* baik menggunakan Total *debt to equity ratio* dengan nilai rata-rata sekitar 1,70, sedangkan Total *debt to total asset ratio* dengan nilai rata-rata sekitar 0,01, yang artinya Pemeritah Kabupaten Tanjung Timur sangat bisa menutupi hutang dari nilai aseynya.

Tabel III.7.5
***Ratio Salvabilitas* di Tahun 2018 – 2022**

No	Uraian	Tahun					Rata-Rata
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	*Total Debt to Equity Rasio*	4,41	1,00	1,02	1,00	1,09	1,70
2	*Total Debt to Total Asset Rasio*	0,05	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01

Sumber: LKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur,2018-2023



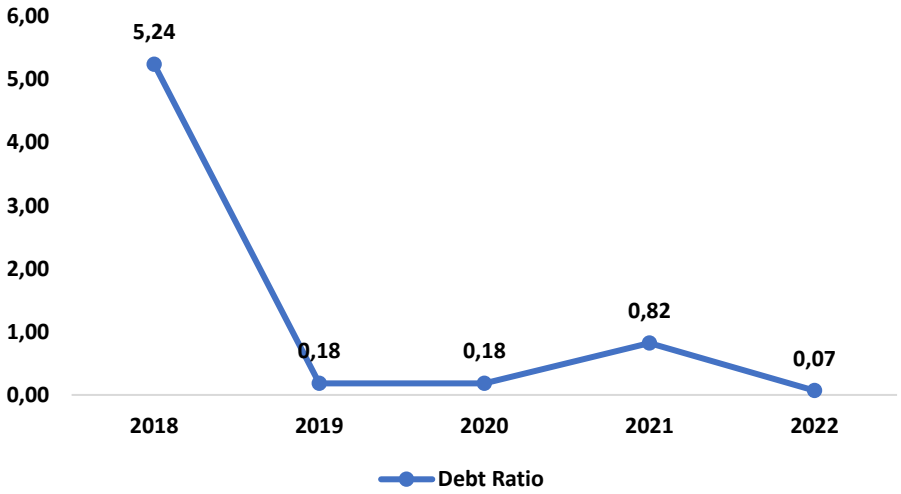
Gambar 3.7.10
***Ratio Salvabilitas* di Tahun 2018 – 2022**

Debt Ratio menunjukan sejauh mana hutang dapat ditutupi oleh aktiva. Secara umum besarnya nilai kewajiban hutang masih sangat kecil dibandingkan dengan nilai aset Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan kecenderungan rata-rata sekitar 1,30%, yang artinya kewajiban hutang masih kecil dibandingkan dengan aset Kabupaten Tanjung Jabung Timur miliki.

Tabel III.7.6
***Debt Ratio* di Tahun 2018 – 2022**

No	Tahun	Rasio	%
1	2018	0,05	5,24
2	2019	0,00	0,18
3	2020	0,00	0,18
4	2021	0,01	0,82
5	2022	0,00	0,08
Rata-rata		**0,01**	**1,30**

Sumber: LKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 - 2022



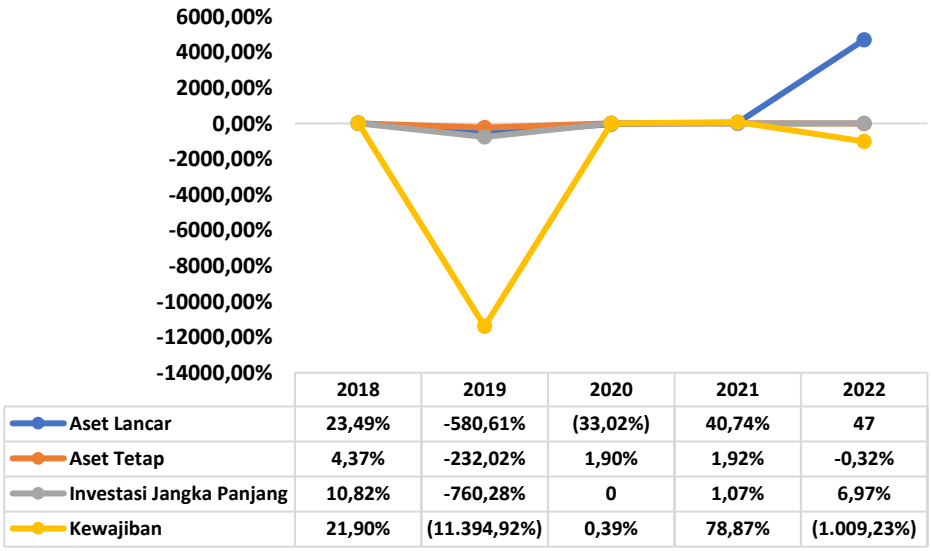
Gambar 3.7.11
***Debt Ratio* di Tahun 2018 – 2022**

Apabila dilihat dari rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah, nilai Aset terus mengalami fluktuasi per tahun nya yaitu dengan rata-rata sebesar -4,56% per tahun nya. Dari komponennya, Aset Lancar Kabupaten Tanjung Timur pertumbuhannya fluktuasi dengan nilai rata-rata pertahun nya sekitar 8,30%. Sedangkan untuk nilai aset tetap mengalami penurunan dengan nilai pertumbuhan rata-rata sebesar -0,45% pertahun. Untuk nilai Investasi Jangka Panjang mengalami fluktuasi yang cukup signifikan yaitu dengan nilai pertumbuhan rata-rata pertahun sekitar -1,48%. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan nilai Kewajiban maka pertumbuhan rata-rata pertahun sekitar -24,61%. Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat ditingkatkan dengan memperbaiki kinerja pengelolaan aset, termasuk dalam pengelolaan aset investasi jangka panjang dan penyusunan strategi agar aset Kabupaten Tanjung Jabung Timur memberikan pengaruh positif terhadap pendapatan daerah, pelayanan publik, serta pertumbuhan ekonomi Kabupaten. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.7.7
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	Tahun					Rata-Rata
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Aset Lancar	23,49	-580,61	(33,02)	40,74	47	-131,56
2	Aset Tetap	4,37	-232,02	1,90	1,92	-0,32	-57,13
3	Investasi Jangka Panjang	10,82	-760,28	2	1,07	6,97	-187,46
4	Kewajiban	21,90	(11.394,92)	0,39	78,87	(1.009,23)	-3081,22

Sumber: LKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 - 2022



Gambar 3.7.12
Grafik Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 – 2022

Tabel III.7.8
Nila Neraca Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 – 2022

No	Ref	Uraian	Rata-Rata Pertumbuhan (%)					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	5.3.1	**ASET**						
2	5.3.1.1	**ASET LANCAR**						
3	5.3.1.1.1	Kas di Kas Daerah	398.585.189.396,56	634.661.025.171,00	74.649.872.609,25	35.585.153.648,12	118.887.935.575,20	85.856.744.907,42
4	5.3.1.1.2	Kas di Bendahara Penerimaan	102.067.000,00	4.138.000,00	0,00	181.674.750,00	4.075.000,00	0,00
5	5.3.1.1.4	Kas di Bendahara Pengeluaran	351.550,00	353.036.515,00	0,00	539.726.014,00	902.094.167,00	0,00
6	5.3.1.1.5	Kas di BLUD	36.175.461.224,80	31.793.654.294,32	2.781.324.171,88	1.915.928.379,45	31.470.438.283,97	12.219.935.040,80
7	5.3.1.1.6	Kas di Bendahara Dana BOS	22.208.901.711,00	4.468.963.908,00	4.694.073.411,47	72.666.963,87	9.352.394,00	172.632,00
8	5.3.1.1.7	Kas Lainnya	43.790.957.011,30	45.899.624.074,46	1.631.961.018,00	35.187.315,00	35.187.315,00	0,00
9	5.3.1.1.9	Piutang Pajak	51.991.300,00	51.991.300,00	2.664.859.394,00	3.216.926.184,45	4.211.897.439,00	5.156.602.744,00
10	5.3.1.1.10	Piutang Retribusi	976.568.000,00	967.656.500,00	123.192.388,00	18.316.188,00	18.316.188,00	18.316.188,00
11	5.3.1.1.11	Piutang Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	2.873.306.945,00	6.644.336.146,09	6.731.659.232,59	7.088.808.214,73	8.078.242.319,72	8.343.002.417,00
12	5.3.1.1.12	Piutang Dana Bagi Hasil	0,00	25.368.502.726,71	45.358.155.976,16	18.146.761.294,00	9.645.344.331,00	24.165.647.810,00
13	5.3.1.1.13	Piutang Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	30.113.164.327,18	0,00	0,00
14	5.3.1.1.14	Piutang Lainnya	7.452.488.000,00	7.465.388.000,00	887.766.749,00	1.011.634.599,00	981.069.599,00	953.309.599,00
15	5.3.1.1.15	Penyisihan Piutang	-3.528.931.411,90	(8.500.078.414.81)	-2.223.473.263,44	-2.056.650.224,40	-2.509.030.754,38	-3.317.040.380,92
16	5.3.1.1.16	Belanja Dibayar di Muka	1.252.163.261,20	843.812.812,51	373.460.607,29	247.551.747,84	280.034.296,33	240.420.211,81
17	5.3.1.1.17	Persediaan	251.536.105.814,48	236.520.682.507,89	8.554.866.298,78	13.814.989.175,62	13.480.140.109,22	18.566.394.891,69
18		**Jumlah Aset Lancar (No 3 sd 17)**	**761.476.619.802,44**	**995.246.618.335,62**	**146.227.718.592,98**	**109.931.838.576,86**	**185.495.096.263,06**	**347.821.323.016,48**
19	5.3.1.2	**Investasi Jangka Panjang**						
20	5.3.1.2.1	Investasi Non Permanen	17.297.176.950,39	17.348.983.569,62	900.000.000,00	0,00	0,00	0,00
21		Penyisihan KUPEM tak tertagih	-5.274.825.643,94	-5.151.916.263,98	0,00	0,00	0,00	0,00
22	5.3.1.2.2	Investasi Permanen	332.572.104.276,50	374.189.973.893,67	44.014.357.000,00	46.014.357.000,00	46.514.000.000,00	50.000.000.000,00
23		**Jumlah Investasi Jangka Panjang (No 20 dan 24)**	**344.594.455.582,95**	**386.387.041.199,31**	**44.914.357.000,00**	**46.014.357.000,00**	**46.514.000.000,00**	**50.000.000.000,00**
24	5.3.1.3	**Aset Tetap**						
25	5.3.1.3.1	Tanah	755.588.163.101,47	782.603.827.388,47	24.795.794.656,28	26.023.325.856,28	33.749.633.091,11	36.317.904.971,11
26	5.3.1.3.2	Peralatan dan Mesin	1.059.612.798.143,19	1.276.370.389.402,12	359.081.793.268,39	407.505.117.601,39	454.529.592.665,39	484.113.851.142,24
27	5.3.1.3.3	Gedung dan Bangunan	1.309.278.538.420,19	1.422.186.530.462,79	648.727.480.168,33	703.198.595.324,33	760.746.879.483,26	823.716.048.054,86
28	5.3.1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.447.316.543.350,08	6.953.653.854.201,34	2.987.682.992.363,37	3.120.506.271.939,07	3.255.254.520.870,27	3.482.447.047.409,52
29	5.3.1.3.5	Aset Tetap Lainnya	409.861.419.365,05	458.019.324.660,14	14.178.269.863,00	14.373.249.017,00	14.439.964.017,00	14.526.878.242,00
30	5.3.1.3.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	59.944.575.231,99	60.307.829.961,00	22.645.579.162,83	21.714.082.359,73	23.174.411.233,73	27.999.826.165,40



No	Ref	Uraian	Rata-Rata Pertumbuhan (%)					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
31	5.3.1.3.7	Akumulasi Penyusutan	(4.171.809.307.675,49)	(4.815.122.619.297,82)	(2.208.439.744.092,94)	(2.408.909.792.005,79)	(2.620.543.397.634,53)	(2.953.990.121.365,24)
32	**Jumlah Aset Tetap (No 24 sd 31)**		**5.869.792.729.936,48**	**6.138.019.136.778,04**	**1.848.672.165.389,26**	**1.884.410.850.092,01**	**1.921.351.603.726,23**	**1.915.131.434.619,89**
33	**5.3.1.4**	**Aset Lainnya**						
34	5.3.1.4.1	Tuntutan Ganti Rugi	165.725.500,00	156.062.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	5.3.1.4.2	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	189.742.089.055,00	189.742.089.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	5.3.1.4.3	Aset Tak Berwujud	11.167.077.438,66	9.532.845.680,46	2.615.346.000,00	2.782.342.500,00	2.782.342.500,00	2.782.342.500,00
37	5.3.1.4.4	Aset Lain-Lain	734.679.084.488,30	793.799.303.969,51	154.965.016.124,12	155.733.178.886,89	155.550.678.886,89	171.018.200.762,89
38	5.3.1.4.5	Akumulasi Amortisasi	(6.448.141.373,80)	(6.861.088.450,47)	(1.988.591.600,00)	(2.174.485.300,00)	(63.111.871.871,67)	(63.111.871.871,67)
39	5.3.1.4.6	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya – Aset LainLain	-11.032.779.863,29	-10.189.424.738,85	-62.543.170.016,18	-63.111.871.871,67	-2.405.082.500,00	-2.587.002.500,00
40	**Jumlah Aset Lainnya (No 36 sd 41)**		**918.273.055.244,87**	**976.179.787.515,65**	**93.048.600.507,94**	**93.229.164.215,22**	**92.816.067.015,22**	**108.101.668.891,22**
41	**JUMLAH ASET**		**7.894.136.860.566,74**	**8.495.832.583.828,62**	**2.132.862.841.490,18**	**2.133.586.209.884,09**	**2.246.176.767.004,51**	**2.421.054.426.527,59**
42	**5.3.2**	**KEWAJIBAN**						
43	**5.3.2.1**	**Kewajiban Jangka Pendek**						
44	5.3.2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	5.3.2.1.2	Utang Kepada Pihak Ketiga	43.790.957.011,30	45.899.624.074,46	0,00	35.187.315,00	93.912.995,00	0,00
46	5.3.2.1.3	Utang Belanja	1.705.840.898,00	1.810.228.744,00	3.538.827.790,00	3.065.719.162,16	18.305.919.260,12	1.658.796.792,67
47	5.3.2.1.4	Utang Jangka Pendek Lainnya	302.099.859.303,90	397.334.470.376,66	332.833.600,00	786.075.948,00	0,00	0,00
48	**Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (No 44 sd 47)**		**347.596.657.213,20**	**445.044.323.195,12**	**3.871.661.390,00**	**3.886.982.425,16**	**18.399.832.255,12**	**1.658.796.792,67**
49	**5.3.3**	**JUMLAH EKUITAS**	**7.575.361.823.497,54**	**1.927.548.956.975,39**	**2.128.952.278.775,18**	**2.101.151.030.419,41**	**2.247.506.897.336,15**	**2.227.797.223.982,27**

Sumber: LKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 - 2022

3.7.3 Kinerja Keuangan Daerah Dalam Pencapaian TPB

Dalam hal ini melihat perkembahangan terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terutama dilihat dari pendapatan asli daerah yang menunjukkan tingkat kemandirian daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Dalam kurun waktu tahun 2018-2022, persentase kontribusi PAD terhadap total APBD dari sebesar 47,65% pada tahun 2018 meningkat menjadi sebesar 47,86% pada tahun 2022. Besaran PAD terhadap target PAD dari tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi dari 100,37% pada tahun 2018 mengalami peningkatan mencapai 105,60% pada tahun 2021 Dan terjadi penurunan pada tahun 2022 sebesar 101,61%. Selama ini ada dua sektor yang memberikan kontribusi terbesar bagi penerimaan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu Sektor Pajak Daerah: PPJU, Parkir dan PBB, serta lain-lain PAD yang sah. Adapun kendala yang dihadapi dalam peningkatan PAD yaitu kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah dan retribusi daerah secara mandiri masih rendah sehingga perlu peran aktif petugas pajak daerah untuk melakukan pengawasan dan penagihan.

Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menunjukkan kinerja yang baik. Meskipun demikian penerapan manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis accrual dirasa belum optimal. Berdasarkan hasil audit BPK, laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memperoleh status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 5 tahun berturut-turut. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka mempertahankan status tersebut yaitu menindaklanjuti temuan pengecualian atas LKPD. Penyusunan Peraturan Bupati dan Surat Edaran Bupati sebagai pedoman perangkat daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, dan rekonsiliasi angka dalam laporan.

Tabel III.3.7.9
Indikator Urusan Keuangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018-2022

No	Indikator	Capaian Kinerja Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Belanja Langsung terhadap total APBD (%)	32,67	31,64	34,74	32,59	34,46
2	Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD (Realisasi) (%)	47,65	46,38	46,41	43,72	47,86
3	Rasio SILPA terhadap total belanja tahun sebelumnya (%)	64,78	106,40	46,63	1,30	65,14
4	Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja (%)	100,00	92,69	120,39	100,00	93,44
5	Rasio realisasi PAD terhadap target PAD (%)	100,37	97,32	99,26	105,60	101,62
6	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7	Rasio Belanja Modal dibanding Total Belanja Daerah	100,00	31,79	25,15	25,45	28,00
8	Rasio Belanja Pegawai Tidak Langsung dibanding Total Belanja Daerah (%)	41,96	42,57	48,43	45,11	37,97
9	Persentase penyusunan APBD tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tahun 2018;
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tahun 2019;
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tahun 2020;
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tahun 2021;
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tahun 2022;
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 Hingga Tahun 2023
BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 (tentang Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018)
Survei Statistik Keuangan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 hingga tahun 2022
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024

3.8 TINJAUAN KEBIJAKAN DAN RENCANA DAERAH

3.8.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2005 – 2025

A. Visi Daerah

Visi Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur:

"Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang MAJU, ADIL, SEJAHTERA DAN LESTARI"

Visi Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Visi Pembangunan Nasional dan Visi Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional dan Provinsi Jambi. Visi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tersebut harus diukur untuk dapat mengetahui Tingkat kemajuan, keadilan, kesejahteraan dan kelestarian yang ingin dicapai.

Tingkat kemajuan dan kesejahteraan suatu daerah dapat dinilai berdasarkan berbagai indikator. Ditinjau dari tingkat perkembangan ekonomi,

kemajuan suatu daerah dapat diukur dari tingkat kemakmurannya yang tercermin pada tingkat pendapatan dan distribusinya. Tingginya tingkat pendapatan rata-rata yang diiringi dengan distribusi yang merata pada suatu daerah, maka dapat dikatakan daerah tersebut makmur. Dengan demikian dapat dikategorikan sebagai daerah yang maju dan sejahtera. Daerah yang maju juga daerah yang tingkat kontribusi sektor industri dan sektor jasanya terus meningkat. Peran sektor industri sebagai penggerak utama laju pertumbuhan makin meningkat, baik dilihat dari segi kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto maupun dalam penyerapan tenaga kerja. Disamping itu, proses produksi berkembang keterkaitan antar sektor, terutama sektor industri, sektor pertanian dan sektor jasa-jasa; serta pemanfaatan sumber alam secara rasional, efisien dan berwawasan lingkungan. Pranata ekonomi telah tersusun dan tertata, dan berfungsi dengan baik sehingga mendukung perekonomian yang efisien dengan produktivitas yang tinggi. Daerah yang maju umumnya adalah daerah yang perekonomiannya stabil.

Tingkat kemajuan dan kesejahteraan daerah juga diukur berdasarkan berbagai indikator sosial yang pada umumnya berkaitan dengan kualitas sumebr daya manusianya. Daerah maju bila makin tinggi tingkat Pendidikan penduduknya, yang tercermin dari semakin tingginya rata-rata tingkat pendidikan penduduk, tingkat pertisipasi pendidikan dan jumlah tenaga ahli serta profesional yang dihasilkan oleh sistem pendidikan, laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil;angka harapan hidup yang lebih tinggi; dan kualitas pelayanan sosial yang lebih baik.

Selain indikator sosial ekonomi, daerah yang maju juga ditandai dengan sistem dan kelembagaan politik, dan hukum yang mantap. Lembaga politik dan kemasyarakatan telah berfungsi. Daerah yang maju juga ditandai oleh peran serta masyarakat secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan, baik ekonomi, hukum, sosial, politik maupun keamanan dan ketertiban. Dalam aspek politik, daerah yang maju pada umumnya adalah yang telah memiliki budaya

demokrasi, warganya tejamin hak-haknya, serta juga terjamin keamanan dan ketentramannya.

Kemajuan dan kesejahtreraan suatu daerah tidak hanya dicerminkan dari perkembangan ekonomi semata, tetapi mencakup aspek yang lebih luas. Kemajuan dan kesejahteraan juga tercermin dalam keseluruhan aspek kehidupan, dalam kelembagaan, pranata-pranata, dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan politik dan sosial.

Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur bukan hanya untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan, tetapi juga untuk mewujudkan keadilan. Sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan sekaligus objek pembangunan, rakyat mempunyai hak baik dalam melaksanakan maupun dalam menikmati hasil pembangunan. Pembangunan haruslah dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Oleh karena itu, masalah keadilan merupakan ciri yang menonjol pula dalam pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Keadilan ini harus tercermin pada semua aspek kehidupan. Semua rakyat mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidupnya dan memperoleh lapangan pekerjaan, mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan, mengemukakan pendapat dan melaksanakan hak politiknya, serta perlindungan dan persamaan di depan hukum, tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun baik antar individu, gender dan wilayah.

Disamping itu, pembangunan daerah juga dapat menjamin keberlanjutan pembangunan itu sendiri melalui kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Kelestarian tersebut diperlukan agar pembangunan daerah tidak menimbulkan malapetaka di kemudian hari terutama bagi generasi penerus dimasa datang. Oleh karena itu, dalam membangun perlu memperhatikan aspek kelestarian sehingga terjamin kelestarian dan terjaga ekosistem sumber daya alam dan lingkungan hidup. Keberhasilan pelestarian ini tergambar dari tidak adanya kerusakan lingkungan hidup dan terjaminnya kesediaan sumber daya alam sekarang dan masa mendatang.

B. Misi Daerah

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan tersebut ditempuh melalui 4 Misi Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah:

1. Mewujudkan daerah yang maju dengan daya saing ekonomi yang tinggi dan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi dan distribusi. Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis agribisnis dengan SDM berkualitas dan berdaya saing;Meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek. Membangun infrastruktur yang baik dan lengkap serta mampu mendukung kegiatan perekonomian dan pengembangan daerah secara terpadu.
2. Mewujudkan Pembangunan yang Berkeadilan dengan mengurangi kesenjangan sosial, menyediakan akses bagi masyarakat terhadap pelayanan sosial dan ekonomi, dan menghapuskan diskriminasi gender.
3. Mewujudkan Masyarakat yang sejahtera, berbudaya dan taat hukum melalui peningkatan kelembagaan ekonomi dan budaya. Memperkuat peran ekonomi masyarakat. Memperkuat budaya lokal dan tatanan hukum daerah. Melakukan pembenahan kelembagaan sosial ekonomi dan budaya; meningkatkan budaya taat hukum guna menciptakan kondisi yang aman, tertib dan tentram bagi masyarakat dan daerah.
4. Mewujudkan Pembangunan yang berkelestarian dengan menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan keberlanjutan SDA dan lingkungan hidup, menjaga fungsi, daya dukung dan kenyamanan dalam kehidupan di masa kini dan masa datang. Memanfaatkan ruang yang serasi antara penggunaan untuk pemukiman, kegiatan sosial dan ekonomi dan melakukan konservasi. Pemanfaatan ekonomi SDA dan llingkungan yang berkesinambungan.

A. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

1. Arah Kebijakan Untuk Mewujudkan Daerah yang Maju dan Berdayasaing

Guna mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang maju dan mempunyai daya saing yang tinggi, maka pembangunan ekonomi dan infrastruktur harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi antar daerah dan pelaku ekonomi. Oleh karena itu, arah pembangunan juga disasarankan kepada kedua target tersebut. Arah pembangunan ekonomi dan infrastruktur tersebut ditujukan kepada:

1. Peningkatan aktivitas perekonomian diarahkan untuk memperkuat perekonomian daerah yang berorientasi pasar. Untuk itu dilakukan transformasi bertahap dari perekonomian berbasis keunggulan komparatif menjadi perekonomian berbasis keunggulan kompetitif melalui keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan prima.
2. Pengembangan perekonomian diarahkan kepada:
    1. Prinsip demokrasi ekonomi sehingga terjamin kesempatan berusaha danbekerja bagi seluruh masyarakat dan mendukung penanggulangan kemiskinan.
    2. Pengelola perekonomian harus memperhatikan dinamika pasar dan mengutamakan kelompok masyarakat yang masih lemah dan perekonomian daerah.
3. Peningkatan ekonomi daerah diarahkan untuk:
    1. Peningkatan kualitas UMKM dan koperasi.
    2. Peningkatan kapasitas kewirausahaan pelaku ekonomi.
4. Pengembangan struktur perekonomian daerah diarahkan kepada:
    1. Upaya mendudukkan sektor industri berbasis agribisnis sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas, kelautan, dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk secara efisien,modern, dan berkelanjutan.
    2. Menerapkan praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik, agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh.

5. Pengembangan kelembagaan ekonomi diarahkan kepada:
    1. Dinamika kemajuan ekonomi dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik didalam meyusun kerangka regulasi dan perijinan yang efisien, efektif dan non-diskriminatif.
    2. Menjaga persaingan usaha secara sehat dan meningkatkan perlindungan konsumen, daya saing; merumuskan strategi dan kebijakan pengembangan, penguasaan dan penerapan teknologi sesuai dengan kebutuhan pengembangan perekonomian daerah.
    3. Meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sehingga menjadi bagian integral dari keseluruhan kegiatan ekonomi daerah serta memperkuat basis ekonomi.
6. Peningkatan peran pemerintah daerah diarahkan sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator pembangunan untuk meningkatkan efisiensi dan keefektifan pelayanan publik, terciptanya lingkungan usaha yang berdaya saing, serta terjaganya mekanisme pasar.
7. Peningkatan produktivitas daerah diarahkan untuk penguasaan, penyebaran,penerapan, dan penciptaan menuju ekonomi berbasis IPTEK pengelolaan yang berkelanjutan kelembagaan ekonomi dengan transparan dan bersih.
8. Peningkatan produktivitas dan inovasi yang berkelanjutan diarahkan kepada:
    1. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya prodktif dan penguasaan teknologi.
    2. Pengembangan pasar, produk dan diversifikasi produk industri perkebunan dan pertanian.
    3. Pengembangan keunggulan kompetitif di sektor khususnya agroindustri.
9. Peningkatan investasi diarahkan untuk:
    1. Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi dan berkualitas melalui iklim investasi yang kondusif.

2. Mendorong penanaman modal dalam negeri dan asing bagi peningkatan daya saing perekonomian daerah.
3. Serta meningkatkan kapasitas infrastriuktur fisik dan sarana pendukung lainnya.

10. Pengembangan produk unggulan sesuai dengan potensi daerah diarahkan kepada:
    1. Pemanfaatan keunggulan komparatif dan kompetitif melalui pengembangan pasar, meningkatkan akses permodalan, perluasan jaringan dan keterkaitan, pemanfaatan riset dan teknologi serta pengembangan kelembagaan.
    2. Pengembangan potensi perkebunan dan kelautan serta parawisata daerah dengan menerapkan manajamen modern, dan juga menumbuhkan lembaga pendukung pembangunan berbasis kelautan.
11. Peningkatan efisiensi dan nilai tambah hasil pertanian diarahkan pula untuk:
    1. Peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan melalui pengembangan agribisnis dan industri perikanan yang melibatkan partisipasi aktif petani dan nelayan.
    2. Pengembangan SDM pelaku usaha agar mampu meningkatkan daya saing melalui peningkatan produktivitas serta merespon permintaan pasar dan memanfaatkan peluang usaha.
    3. Peningkatan pendapatan masyarakat pedesaan pada umumnya melalui penciptaan diversifikasi perekonomian pedesaan yang pada gilirannya meningkatkan perekonomian daerah.
12. Peningkatan efisiensi dan nilai tambah diarahkan kepada:
    1. Sektor primer terutama sektor pertanian dan pertambangan mampu bersaing di pasar lokal, regional dan internasional.
    2. Memperkuat basis produksi sektor primer di daerah untuk mendorong pembangunan pedesaan, pengentasan kemiskinan dan keterbelakangan , dan ketahanan pangan.

13. Pembangunan industri diarahkan untuk:
    1. Mewujudkan agroindustri yang berdayasaing baik dipasar lokal, regional maupun internasional dan mendorong perkembangan ekonomi daerah melalui optimalisasi penggunaan bahan baku lokal dan tenaga kerja lokal.
    2. Penguatan industri melalui penguasaan usaha yang sehat dengan meniadakan praktik-praktik monopoli dan berbagai distorsi pasar lainnya.
14. Pengembangan agroindustri yang berdayasaing diarahkan untuk:
    1. Meningkatkan keunggulan komparatif daerah.
    2. Membangun landasan pertanian yang kokoh melalui pengembangan subsistem agrobisnis.
    3. Mengembangkan subsistem usaha tani melalui pemberdayaan masyarakat pertanian dalam pemanfaatan teknologi yang unggul dan berkelanjutan.
    4. Mengembangkan subsistem agribisnis hilir yang dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan perikanan.
    5. Mengembangkan subsistem pemasaran yang dapat menunjang peningkatan penjualan, pendayagunaan sistem informasi pasar.
    6. Mengembangkan sistem jasa penunjang sehingga dapat mendukung penigkatan produk pertanian terutama yang berorientasi ekspor.
15. Peningkatan daya saing perekonomian global melalui pembangunan agroindustri dilandaskan kepada penciptaan lingkungan usaha mikro yang dapat merangsang tumbuhnya industri yang sehat melalui:
    1. Pengembangan rantai pertambahan nilai melalui diversifikasi produk, penguatan struktur industri secara menyeluruh.
    2. Penguatan hubungan antar industri yang terkait secara horizontal termasuk industri komplemennya.

3. Penyediaan infrastruktur untuk penigkatan kapasitas industri yang meliputi infrastruktur transportasi, komunikasi, energi serta teknologi, pengukuran,standardisasi, pengujian dan pengendalian kualitas.

16. Peningkatan lapangan kerja diarahkan untuk:
    1. Peningkatan lapangan kerja formal dan informal serta penigkatan kesejahtaraan pekerja.
    2. Peningkatan pasar kerja yang kompetitif, hubungan industrial yang harmonis dengan perlindingan yang layak, keselamatan kerja yang memadai, serta penyelesaian masalah industrial.
    3. Peningkatan produktivitas yang tinggi sehingga dapat bersaing serta menghasilkan nilai tambah yang tinggi melalui pelatihan efektifitas dan efisiensi.
    4. Penigkatan kompetensi profesi sesuai kebutuhan industri dan persaingan regional dan global.
17. Pengembangan perdagangan luar negeri diarahkan untuk mendukung perekonomian daerah agar mampu meningkatkan ekspor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui:
    1. Peningkatan daya saing dan akses pasar ekspor.
    2. Pengembangan produk lokal, standar produk barang yang berkualitas ekspor.
18. Pengembangan perdagangan antar daerah diarahkan untuk memperkokoh sistem distribusi yang efisien dan efektif serta menjamin kepastian berusaha melalui:
    1. Pengembangan kelembagaan perdagangan yang efektif dengan perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat.
    2. Peningkatan perekonomian daerah dan terbangun nya kesadaran penggunaan produksi local.
    3. Peningkatan perdagangan antar daerah dan terjaminnya ketersediaan bahan pokok dengan harga yang terjangkau.
19. Pengembangan ekonomi daerah diarahkan untuk:

1. Pengembangan ekonomi daerah agar mampu mendukung secara efektif peningkatan produksi dan daya saing regional dan global.
2. Mendukung kepentingan strategis didalam pengembangan SDM daerah dan keprofesian tertentu.
3. Mendukung pengentasan kemiskinan dan pengembangan kegiatan perekonomian pedesaan.

20. Pengembangan perbankan dan Lembaga Keuangan Mikro daerah diarahkan untuk:
    1. Mendukung perekonomian daerah, melalui peningkatan kontribusi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dalam penguatan permodalan.
    2. Penganekaragaman lembaga keuangan guna memberikan alternatif pendanaan lebih bayak bagi masyarakat.
21. Peningkatan pengelolaan keuangan daerah diarahkan kepada:
    1. Peningkatan kemampuan fiscal daerah yang didukung dengan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan efektif.
    2. Peningkatan sistem pengawasan keuangan daerah
    3. Pendayagunaan keuangan daerah yang berpihak pada kebutuhan masyarakat.
22. Pengembangan pariwisata daerah diarahkan untuk:
    1. Mendukung kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra daerah.
    2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat local, serta perluasan kesempatan kerja.
    3. Pengembangan kepariwisataan memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan keragaman pesona keindahan alam dan potensi budaya daerah.
23. Pengembangan UMKM dan Koperasi diarahkan untuk:
    1. Menjadi pelaku ekonomi yang berbasis agribisnis dan berdayasaing dalam penyediaan barang dan jasa.
    2. Memberikan kontribusi yang signifikan dalam perubahan structural dan memperkuat perekonomian daerah.

3. Meningkatkan kompetensi perkuatan kewirausahaan dan produkivitas.
4. Meningkatkan adaptasi pasar, pemanfaatan dan penerapan teknologi tepat.
5. Mendukung ketahanan pangan, serta perkuatan daya saing industri melalui pengembangan agroindustri dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

24. Pembangunan Transportasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan daerah. Oleh karena itu, pembangunan transportasi daerah diarahkan untuk:
    1. Membangun sistem transportasi yang memberikan pelayanan pendistribusian produk hasil produksi industri kecil maupun menengah.
    2. Membangun jaringan transportasi inter antar angkutan melalui pembangunan prasarana dan sarana transportasi.
    3. Meningkatkan pemerataan pembangunan guna melayani kebutuhan transportasi masyarakat di perkotaan maupun pedesaan.
    4. Meningkatkan peranan pemerintah daerah sebagai regulator terhadap pelayanan transportasi kepada masyarakat.
    5. Meningkatkan kualitas pelayanan jasa transportasi yang berkualitas, aman dan nyaman serta ramah lingkungan sesuai dengan standar pelayananm minimun transportasi.
    6. Membuka isolasi sentra produksi yang potensial guna mendorong ekonomi daerah.
    7. Membangun dermaga penyeberangan untuk memperlancar pergerakan muatan barang dan penumpang bagi angkutan sungai.
    8. Meningkatkan pemeliharaan bagi jalan-jalan yang sudah ada serta memelihara daerah milik jalan dan rambu-rambu lalu lintas.

25. Peningkatan transportasi jalan bertujuan untuk mendukung pembangunan daerah dan melayani mobilitas manusia maupun distribusi barang. Pembangunan jalan dan jembatan diarahkan untuk:
    1. Pembangunan dan pemeliharaan jalan-jalan arteri primer dan strategis di daerah perkotaan.
    2. Memprioritaskan pembangunan dan perbaikan jalan yang kondisinya rusak berat dan rusak ringan khususnya di sentra produksi.
    3. Meningkatkan keterpaduan sistem jaringan jalan dengan rencana tata ruang daerah.
    4. Memprioritaskan pembangunan jembatan yang dapat mendorong pengembangan daerah dan membuka daerah yang terisolir. Meningkatnya daya dukung, kapasitas maupun kualitas pelayanan prasarana jalan untuk daerah pusat pertumbuhan.
    5. Meningkatkan kinerja pembangunan prasarana jalan melalui optimalisasi potensi untuk pembangunan preasarana jalan dengan pemanfaatan teknologipengembangan jalan.
    6. Meningkatkan profesionalisme dan kemandirian institusi penyelenggara prasarana jalan, baik teknis maupun administratif. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan pembangunan jalan.
26. Pembangunan transportasi laut diarahkan untuk:
    1. Membangun pelabuhan Samudera di Ujung Jabung untuk peningkatan aktivitas ekspor dan impor daerah dan kawasan.
    2. Meningkatkan peran Pelabuhan Muara Sabak menjadi pelabuhan nasional untuk angkutan dalam negeri.
    3. Pengembangan sistem informasi tentang kelayak- lautan kapal serta peningkatan Sumber Daya Manusia melalui pelatihan dan verifikasi kelayak- lautan kapal.

4. Meningkatkan standar pelayanan guna memenuhi keselamatan pelayaran baik selama pelayaran maupun pada saat berlabuh dan bongkar muat barang di pelabuhan.

27. Pembangunan perumahan ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat perkotaan dan pedesaan. Pembangunan perumahan diarahkan pada:
    1. Pembangunan perumahan dan lahan bagi masyarakat berpendapatan rendah minimal untuk Rumah Sederhana Sehat (RSS).
    2. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana perumahan dan pemukiman, meliputi air minum yang bersih dan sanitasi yang sehat.
    3. Pengembangan Lembaga Pembiayaan bagi pembangunan perumahan dan pemukiman dengan biaya murah.
    4. Peningkatan iklim yang kondusif guna menarik investor maupun pengembang untuk membangun fasilitas perumahan yang sehat dan asri di perkotaan.
    5. Peningkatan penataan, peremajaan, dan revitalisasi bagi daerah pemukiman yang tidak layak huni guna pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana dasar bagi masyarakat.
    6. Peningkatan kualitas lingkungan, fasilitas umum dan kondisi rumah pada desa tradisional, desa nelayan dan desa eks-transmigrasi.
    7. Meningkatkan kualitas pelayanan prasarana dan sarana lingkungan pada desa tertinggal dan daerah pesisir/desa nelayan.
    8. Peningkatan kepastian hukum bagi pemilik rumah dan pengembang perumahan melalui stimulasi pembangunan perumahan yang menarik.
28. Pembangunan Sarana Air Bersih diarahkan untuk:
    1. Meningkatkan ketersediaan air minum yang sehat, bersih dan layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat perkotaan dan pedesaan.
    2. Menigkatkan pembangunan Bangunan Pengolahan Air Bersih dan Bangunan Penyimpanan Cadangan Air Bersih.

3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum perpipaan melalui peningkatan kapasitas produksi dan pelayanan air minum.
4. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air bagi rumah tangga, pemukiman, pertanian dan industri dengan prioritas utama untuk kebutuhan rumah tangga.
5. Peningkatan pengendalian penggunaan air tanah dan mencegah terjadinya pencemaran air.
6. Meningkatkan kesadaran seluruh masyarakat terhadap pemakaian yang efisien terhadap air minum.
7. Peningkatan tata-kelola dan konservasi sungai dan sumber air lainnya guna mewujudkan irigasi, rawa, dan pengairan lainnya yang mendukung program ketahanan pangan.
8. Meningkatkan kinerja selaku BUMD pengelola air minum PDAM melalui pengembangan teknologi dan efisiensi pengelolaan perusahaan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.
9. Mengurangi tingkat kebocoran dan inefisiensi baik teknis maupun nonteknnis hingga mencapai ambang batas normal sebesar 20%.
10. Meningkatkan kualitas pengelola air minum melalui pendidikan dan pelatihan agar menjadi tenaga yang profesional, baik untuk karyawan, direksi dan dewan pengawas.
11. Peningkatan pemberdayaan petani pemakai air terutama dalam pengelolaan jaringan irigasi dan bangunan penampung air untuk peningkatan pendapatan hasil pertanian.

29. Pembangunan Kelistrikan diarahkan kepada peningkatan kemampuan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik daerah dan kemampuan pelayanannya. Peningkatan kemampuan kebutuhan listrik diarahkan kepada:
    1. Peningkatan jaringan infrastruktur listrik sampai pelosok pedesaan untuk peningkatan kemampuan jangkauan pelayanan

kebutuhan listrik untuk kepentingan industri maupun untuk rumah tangga.

2. Peningkatan investasi swasta, pemerintah daerah, koperasi dan masyarakat dalam menyediakan infrastruktur ketenagalistrikan daerah.
3. Peningkatan sumber energi listrik yang potensial untuk dibangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro pedesaan.
4. Peningkatan kapasitas pembangkit listrik yang sudah ada maupun pembangunan pembangkit baru dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan penggunaan bahan bakar.
5. Peningkatan penyediaan energi listrik yang dapat dinikmati bagi setiap individu penduduk sesuai dengan kebutuhan minimal standar Nasional.
6. Peningkatan fungsi kelembagaan, mutu sumber daya manusia dan penguasaan teknologi dan partisipasi masyarakat untuk hidup hemat energi.

30. Peningkatan pengelolaan persampahan dan drainase diarahkan untuk:
    1. Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pelayanan persampahan, tidak hanya dibidang transportasinya tapi juga dalam pengelolaan tempat pembuangan akhir.
    2. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya peningkatan pengelolaan dan pelayanan persampahan dan drainase.
    3. Meningkatkan kualitas pengelola persampahan melalui pendidikan, pelatihan dan perbaikan pelayanan kesehatan serta Sanitary Landfill.
    4. Terbebasnya saluran drainase dari sampah dan meningkatkan fungsi saluran drainase sebagai saluran air hujan dan berkurangnya genangan air.
31. Pengembangan tata ruang diarahkan pada:

1. Peningkatan pemanfaatan daerah diarahkan pada Rencana Tata Ruang daerah yang memperhatikan keberadaan suku atau daerah terpencil dalam suatu kawasan.
2. Pengembangan tata ruang guna memperluas dan mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru sebagai pusat kegiatan sentra produksi dan pengembangan sistem transportasi.
3. Pembangunan fisik daerah terpencil melalui peningkatan dan pengembangan infrastruktur transportasi dan komunikasi mengurangi keterisoliran daerah dan penduduknya.
4. Peningkatan pemanfaatan daerah diarahkan pada orientasi Rencana Tata Ruang daerah yang memperhatikan keberadaan suku atau daerah yang terpencil dalam suatu kawasan.

32. Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru dilakukan dengan mewujudkan keterkaitan sosial ekonomi yang serasi dan seimbang antar daerah melalui:
    1. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia untuk pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya.
    2. Pengembangan infrastruktur penunjang kegiatan produksi antar daerah dalam upaya menciptakan keterkaitan fisik, sosial dan ekonomi yang saling komplementer dan saling menguntungkan.
    3. Peningkatan akses informasi dan pemasaran, lembaga keuangan, kesempatan kerja dan teknologi.
    4. Pengembangan perkotaan dan pedesaan dalam suatu kerangka pembangunan daerah yang terpadu dan saling menguntungkan.
33. Pembangunan telematika diarahkan pada
    1. Peningkatan informasi yang seluas-luasnya bagi masyarakat guna pemerataan informasi yang seimbang antara masyarakat desa dan perkotaan.
    2. Peningkatan jaringan komunikasi dan informasi yang menjangkau seluruh daerah guna menghapus daerah yang terisolir.

3. Peningkatan informasi yang cepat, tepat, benar dan transparan terhadap kejadian guna menghindari interpretasi yang berbeda olehh masyarakat.
4. Peningkatan arus globalisasi dan informasi dengan berteknologi tinggi untuk peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat.
5. Peningkatan jaringan dan saluran komunikasi, baik berupa saluran telepon kabel dan telepon non-kabel dan bekerjasama dengan swasta.
6. Peningkatan mutu pendidikan formal dan non-formal melalui siaran radio dan televisi sehingga akan meningkatkan pengetahuan masyarakat.
7. Peningkatan pemanfaatan aplikasi berbasis teknologi informasi dengan metode tepat guna.

2. Arah Kebijakan Untuk Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkeadilan

Pembangunan yang berkeadilan ini akan dapat mengurangi konflik sosial dan ekonomi baik secara vertikal maupun horizontal. Untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkeadilan tersebut, maka pembangunan diarahkan kepada:

1. Pembangunan desa terpencil, sangat terpencil dan sangat-sangat terpencil melalui:
   a) Pengembangan agropolitan dikawasan potensial pengembangan.
   b) Pengembangan agroindustri pedesaan.
   c) Peningkatan kapasitas SDM pedesaan.
   d) Pengembangan jaringan infrastruktur penunjang kegiatan produksi pedesaan.
   e) Peningkatan akses informasi dan pemasaran lembaga keuangan, kesempatan kerja dan teknologi tepat guna.
   f) Pengembangan potensi masyarakat.

2. Pemberdayaan masyarakat desa terpencil, sangat terpencil dan sangat-sangat tepencil diarahkan kepada:
   a) Peningkatan ketrampilan dan akses terhadap modal usaha.
   b) Pemberian kesempatan luas untuk menyampaikan aspirasi.
   c) Peningkatan kesempatan dan kemampuan untuk mengelola usaha ekonomi produktif.
3. Pembangunan daerah potensial untuk maju dan berkembang diarahkan untuk:
   a) Percepatan pembangunan infrastruktur dasar.
   b) Pemberdayaan masyarakat dengan melakukan penguatan akses terhadap permodalan, pelatihan IPTEK dan penguatan kelembagaan masyarakat.
   c) Menciptakan keterkaitan yang erat antar kegiatan ekonomi dengan daerah strategis dalam satu sistem wilayah pengembangan ekonomi.
4. Peningkatan keterkaitan dan keserasian ekonomi pekerkotaan dengan ekonomi diarahkan untuk aktivitas produksi pedesaan merupakan keterkaitan dari kegiatan ekonomi di perkotaan kedalam suatu sistem keterpaduan pengembangan ekonomi. Peningkatan keterkaitan tersebut berdampak terhadap aktivitas ekonomi dan perdagangan di pedesaan yang terkait denga pasar di perkotaan.
5. Sistem ketahanan pangan diarahkan untuk menjamin ketahanan dan kemandirian pangan daerah dengan mengembangkan kemampuan produksi local yang didukung kelembagaan ketahanan pangan. Disamping itu, menjamin pemenuhan kebutuhan pangan secara merata dan cukup ditingkat rumah tangga.
6. Peningkatan kualitas hidup, peran perempuan dan perlindngan anak diarahkan untuk:
   a) Penurunan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
   b) Penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender.
7. Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan untuk:

a) Mengurangi jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) melalui peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan bagi PMKS.
b) Peningkatan penyediaan infrastruktur pelayanan sosial yang baik.

8. Pembangunan UMKM dan koperasi diarahkan untuk:
   a) Penigkatan daya saing dan efisiensi kolektif para anggotanya.
   b) Pemberdayaan usaha mikro kecil, menengah dan koperasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat berpendapatan rendah guna mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan.
9. Pengentasan kemiskinan diarahkan untuk:;
   a) Pemenuhan dan perwujudan hak-hak dasar rakyat secara bertahap tanpa diskriminasi.
   b) Peningkatan mutu penyelenggaraan dan pelayanan pemerintahan untuk pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin.
10. Peningkatan pemerataan pembangunan SDM diarahkan untuk:
    a) Pemberdayaan masyarakat miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT).
    b) Penyediaan sarana pelayanan sosial yang memadai bagi kelompok masyarakat PMKS.
11. Peningkatan pembangunan perumahan yang merata diarahkan pada:
    a) Pembangunan perumahan yang berkelanjutan, layak dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.
    b) Pembangunan perumahan harus mampu meningkatkan potensi pembiayaan menciptakan lapangan kerja dan pembangunan.
    c) Pembangunan perumahan harus memperhatikan fungsi keseimbangan lingkungan hidup.

3. Arah Kebijakan Untuk Mewujudkan Masyarakat Daerah yang Sejahtera, Berbudaya dan Taat Hukum

Untuk mewujudkan masyarakat daerah yang sejahtera, berbudaya dan taat hukum maka pembangunan sosial,budaya, politik, hukum dan keamanan diarahkan kepada;

1. Pembangunan pendidikan diarahkan kepada:
   a) Peningkatan kamampuan akademik, kemandirian, keahlian dan daya saing.
   b) Peningkatan pelayanan pendidikan yang mencakup semua jalur , jenis dan jenjang pendidikan yang bermutu dan terjangkau.
   c) Penyediaan pelayanana pendidikan disesuaikan dengan potensi daerah, kebutuhan pembangunan sosial ekonomi daerah di masa depan melaluin pendalaman pengadaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
   d) Meningkatkan kualitas hidup dan produktifitas penduduk usia produktif melalui penyediaan pendidikan dan latihan yang sesuai kebutuhannya.
2. Peningkatan kualitas pendidikan diarahkan untuk:
   a) Peningkatan mutu pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan, peningkatan kualitas dan kapasitas lembaga pendidikan, peningkatan kualitas, tenaga pendidik.
   b) Peningkatan pembinaan pendidikan formal, pendidikan non-formal dan pendidikan keluarga.
   c) Peningkatan kemampuan adaptif dan kompetitif satuan pendidikan.
   d) Pengembangan sistem informasi pendidik untuk dinas/instansi informal.
3. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk:
   a) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan manajemen Kesehatan

b) Mengembangkan budaya hidup sehat dilakukan melalui peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat melalui upaya promotif, preventif dan pendidikan kesehatan.

4. Peningkatan jangkauan dan kualitas layanan kesehatan melalui:
   a) Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur kesehatan yang baik.
   b) Peningkatan kemampuan paramedik dan penunjang medik.
   c) Peningkatan ketersediaan obat-obatan yang berkualitas dan terjamin ketersediaannya dengan harga yang murah.
   d) Peningkatan kualitas sistem jaminan kesehatan dan terutama bagi desa tertinggal dan penduduk miskin.
5. Pembangunan kehidupan beragama diarahkan untuk peningkatan keimanan dan ketakwaan serta penigkatan aktuallisasi moralitas agama sebagai kekuatan pendorong guna mencapai kemajuan dalam pembangunan daerah guna memantapkan kerukunan inter dan antar umat beragama.
6. Pembangunan pemuda dan olahraga diarahkan kepada:
   a) Peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan terutama dibidang IPTEK, ekonomi, sosial budaya dan politik.
   b) Peningkatan budaya olahraga yang berorientasi pada prestasi olahraga.
7. Peningkatan pembinaan kesejahteraan keluarga sebagai unsur kelompok masyarakat terkecil, guna mencapai keluarga yang sejahtera melalui pembentukan moral dan etika keluarga dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.
8. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk diarahkan pada pengurangan laju pertumbuhan penduduk dan penataan persebaran dan mobilitas penduduk yang lebih seimbang melalui:
   a) Pengurangan laju pertumbuhan penduduk melalui peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau dan bermutu.

b) Penataan persebaran dan mobilitas penduduk yang lebih seimbang dilakukan melalui pemerataan pembangunan ekonomi dan daerah.

c) Penataan sistem administrasi kependudukan yang didukung oleh sistemm perencanaan dan pelaksanaan kependudukan yang modern.

9. Peningkatan penguasaan dan pemanfaatan IPTEK diarahkan untuk:

a) Meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan IPTEK untuk meningkatkan nilai tambah produk.

b) Meningkatkan kapasitas SDM, IPTEK dan sarana

c) prasarana IPTEK serta jaringan IPTEK melalui peningkatan penelitian daerah.

d) Menumbuhkembangkan budaya IPTEK di masyarakat daerah.

e) Meningkatkan pemanfaatan teknologi hasil penelitian dan rekayasa IPTEK untuk meningkatkan daya saing daerah.

f) Mendukung ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas pertanian dengan bantuan teknologi tepat guna.

g) Mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pelayanan publik yang prima.

10. Pembangunan politik diarahkan pada terciptanya tata pemerintahan masyarakat yang demokratis , menghargai perbedaan dan HAM melalui:

a) Peningkatan tata kelola politik yang dititikberatkan pada proses pengalokasian kekuasaan yang terlihat pada; (1) peningkatan kualitas proses dan mekanisme seleksi publik yang lebih terbuka aspiratif dan adil bagi para pejabat politik dan pejabat publik; (2) peningkatan komitmen politik yang tegas terhadap kebebasan media massa, keleluasaan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat setiap warga berdasarkan aspirasi politiknya masing-masing.

b) Pengembangan budaya politik dititikberatkan pada proses penanaman nilai demokrasi melalui penghormatan terhadap nilai HAM, anti kekerasan, serta nilai toleransi.

c) Peningkatan peranan komunikasi dan informasi ditekankan pada proses pencerdasan masyarakat dalam kehidupan politik melalui; (1) peningkatan kebebasan pers yang bertanggungjawab dan menjamin hak masyarakat untuk berpendapat dan mengontrol jalan nya penyelenggaraan pemerintah daerah, (2) peningkatan pemerataan informasi yang lebih luas melalui jaringan teknologi informasi dan komunikasi, (3) peningkatan jaringan informasi yang lebih bersifat interaktif antara masyarakat dan pengambil keputusan politik.

11. Pembangunan pemerintahan daerah diarahkan pada terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih, melalui:
    a) Peningkatan profesionalisme aparatur, pemberian pelayanan prima, serta terhindar tindak pidana korupsi.
    b) Penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik pada semua tingkat pemerintahan.
    c) Peningkatan intensitas dan efektifitas pengawasan aparatur melalui pengawasan internal, pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.
    d) Peningkatan etika birokrasi dan budaya kerja serta pengetahuan dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip ketatapemerintahan yang baik.
12. Pembangunan hukum diarahkan pada upaya mewujudkan sistem hukum daerahyang mampu berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan ketertiban, keadilan dan kesejahteraan melalui:
    a) Pembentukan materi hukum dengan memperhatikan nilai sosial budaya, kepentingan masyarakat dan menjamin terciptanya kepastian, keadilan, kemanfaatan dan perlindungan hak asasi manusia.
    b) Pembangunan struktur hukum ditujukan untuk mendukung terlaksananya perlindungan dan pelayanan serta tegaknya hukum secara pasti dan terjamin.

c) Pengembangan budaya hukum guna terciptanya ketaatan dan penghormatan terhadap hukum dan HAM melalui (1) penyuluhan hukum dan pengembangan hukum adat, keteladanan tokoh publik, (2) pelaksanaan dan pelayanan hukum yang adil, (3) penegakan hukum yang manusiawi dan (4) kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

13. Pembangunan perundang-undangan dan peraturan daerah diarahkan untuk:
    a) Terwujudnya pembangunan ekonomi yang berkualitas, mengatur dunia usaha serta terciptanya kepastian hukum,terutama penegakan dan perlindungan hukum.
    b) Meniadakan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai sosial, adat istiadat, agama dan kepentingan masyarakat luas serta dapat menjamin terciptanya kepastian, keadilan, kemanfaatan dan perlindungan HAM.
14. Pembangunan keamanan dan ketertiban diarahkan pada peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat, tegaknya hukum, serta terciptanya situasi yang kondusif bagi pembangunan daerah melalui penataan sistem keamanan yang handal, peningkatan kualitas aparat keamanan dan peningkatan partisipasi masyarakat.

4. Arah Kebijakan Untuk Mewujudkan Pembangunan Daerah yang

Berkelestarian Sumber Daya Alam merupakan modal dasar dalam daya saing daerah dan basis bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ini berarti, pengelolaan Sumber Daya Alam yang lestari akan menjamin tersedianya sumber daya yang berkelanjutan bagi pembangunan daerah. Untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur maju, adil, sejahtera dan lestari, maka sumber daya alam dan lingkungan hidup harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan daerah. Agar pemanfaatan Sumber Daya Alam lestari, maka pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah diarahkan kepada:

1. Pemanfaatan sumber daya alam terbarukan, seperti; pertanian dalam arti luas (pertanian,peternakan, perikanan dan kehutanan), dan pengelolaannya dilakukan secara rasional dan sesuai daya dukungnya. Hasil yang diperoleh dari pemanfaatan sumber daya alam tersebut harus diinvestasikan kembali untuk rehabilitasi latihan kritis demi pelestarian ekosistem.
2. Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terbarukan diarahkan kepada:
   a) Peningkatan intensitas eksplorasi untuk akurasi penaksiran cadagan bahan tambang guna di eksploitasi dimasa datang.
   b) Menerapkan Good-Mining Practice di lokasi tambang yang sudah ada
   c) Usaha pertambangan dikelola dengan melaksanakan Coorporate Social Responsinility melalui program pengembangan masyarakat sekitarnya.
   d) Perolehan pendapatan hasil usaha tambang diperuntukkan untuk memacum percepatan pertumbuhan ekonomi dan konservasi.
3. Penigkatan daya saing produk pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan diarahkan kepada:
   a) Peningkatan pasca panen dan pengolahan hasil, sistem standar mutu dan keamanan pangan, perlindungan petani dan nelayan dari persaingan yang tidak sehat.
   b) Penguatan sistem pemasaran dan manajemen usaha pertanian serta mendukung pengembangan agroindustri.
4. Peningkatan produksi dan daya saing produk perikanan diarahkan kepada:
   a) Pemanfaatan sumber daya perikanan dalam mendukung ekonomi dan kelestarian alam melalui (1) Perbaikan lingkungan perikanan budidaya, (2) Pengembangan industri perikanan dak kegiatan ekonomi masyarakat pesisir, (3) Kualitas pengelolaan sumber daya perikanan tangkap, (4) penigkatan peran aktif masyarakat dan swasta dalam

pengelolaan sumberdaya perikanan, (5) Penigkatan kualitas pengolahan dan nilai tambah produk perikanan, (6) Peningkatan kemampuan SDM dan penyuluh perikanan.

b) Pengembangan usaha perikanan dengan pendekatan kewilayahan terpadu melalui konsep pengembangan agribisnis guna meningkatkan kelayakan dalam pengembangan/skala ekonomi.

5. Peningkatan kemampuan petani/nelayan dan penguatan lembaga pendukungnya, diarahkan untuk:
   a) Merevitalisasi penyuluhan dan pendampingan bagi peternak/petani dan nelayan.
   b) Memperkuat lembaga pertanian dan pedesaan untuk meningkatkan akses petani dan nelayan guna meningkatkan skala usaha dan posisi tawar petani dan nelayan.
6. Peningkatan Sistem Ketahanan Pangan (food reliance) dan kemanan pangan diarahkan untuk:
   a) Penigkatan produksi beras yang surplus dari kebutuhan melalui; (1) Pengamanan lahan sawah yang subur dan produksi yang berkualitas, (2)Rehabilitasi sarana irigasi serta pencetakan sawah baru, (3) Pemberian insentif harga (subsidi output) untuk hasil pertanian.
   b) Peningkatan keterlibatan swasta untuk bermitra dengan petani dan nelayan/kelompok tani dan nelayan melalui penyediaan infrastruktur, budidaya, processing, pergudangan dan pemasaran hasil.
   c) Peningkatan ketersediaan pangan ternak/ikan melalui; (1) Optimalisasi pemanfaatan pakan, (2) Pemberdayaan peternak, (3) Perbaikan infrastruktur dan produksi pangan hewani
   d) Peningkatan diversifikasi pangan untuk menurunkan ketergantungan pada beras melalui rekayasa sosial terhadap pola konsumsi masyarakat.

e) Peningkatan peran kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga yang cukup dan baik kualitasnya.

7. Pemanfaatan hutan diarahkan kepada diversifikasi usaha dan mendukung produksi pangan melalui optimalisasi pemanfaatan hutan alam dan pengembangan hutan tanaman dan hasil hutan non kayu. Kebijakan-kebijakan tersebut diarahkanm kepada:
   a) Peningkatan nilai tambah dan niali hasil hutan kayu.
   b) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan hutan tanaman dan pengelolaan SDA yang berkelanjutan.
   c) Peningkatan produksi hasil hutan non kayu untuk kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.
8. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup diarahkan kepada:
   a) Peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan pengelola sumber daya alam dan lingkungan.
   b) Peningkatan nilai dan etika lingkungan dalam kehidupan masyarakat dan pendidikan formal pada semua tingkatan.
   c) Peningkatan kesadaran masyarakt terhadap pentingya pemanfaatan sumber daya alam berkelestarian.
9. Pelestarian sumber daya air diarahkan untuk menjamin ketersediaan dan daya dukungnya guna menjaga kelestarian daerah tangkapan air dan keberadaaan air tanah melalui:
   a) Pendekatan permintaan yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan dan konsumsi air.
   b) Pendekatan ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan keandalan pasokan air dan kelembagaan sumber saya air guna meningkatkan kualitas pelayanan air kepada masyarakat.
10. Peningkatan nilai tambah atas pemanfaatan sumber daya alam tropis yang unik dan khas diarahkan kepada:

a) Inovasi pengolahan hasil sumber daya alam tropis harus terus dikembangkan agar mampu menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai tambah yang tinggi dan berdaya saing.

b) Peningkatan keterlibatan masyarakat lokal agar mempunyai akses untuk dapat menikmati hasil dari pemanfaatan sumber daya alam disekitarnya.

3.8.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

1. Visi Daerah

Visi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah ‘Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tanjung Jabung Timur (MERAKYAT)”

Adapun deskripsi dari visi tersebut adalah:

MERAKYAT mencerminkan kepribadian seorang pemimpin yang dekat dengan rakyatnya, tidak ekslusif, peduli dengan permasalahan rakyat, sehingga dapat mengetahui dan memahami kondisi dan kebutuhan masyarakat yang harus dilayani, karena hakekatnya pemimpin itu adalah pelayan masyarakat. EKONOMI MERAKYAT mengartikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai harus berpihak kepada rakyat. Capaian pertumbuhan ekonomi harus dapat memperluas lapangan kerja bagi rakyat dan menurunkan angka kemiskinan

2. Misi Daerah

Misi Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah :

1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Yang Bertumpu Pada Sektor Pertanian dan Perikanan;

   Ketersediaan sumberdaya pertanian dan perikanan yang melimpah menjadikan karakter masyarakat sebagian besar adalah petani dan nelayan yang ditandai dengan 15,51 Persen distribusi PDRB ditopang dari pertanian, dan perikanan, kondisi inimenjadikan sektor ini menjadi jati diri dan motor penggerak perekonomian daerah. Potensi lahan pangan produktif saat ini dengan luas tanam 9.851 hektar dengan produksi mencapai 41.670

ton/tahun sehingga menjadikan sektor ini potensial untuk ditingkatkan. Begitu juga dengan sektor perkebunan dengan komoditas terbesar kelapa sawit dengan potensi 38.129 hektar perkebunan sawit masyarakat dan produktivitasnya saat ini masih 2 ton/hektar dan produksi CPO di wilayah kita baru terlayani sebesar 50 persen. Begitu pula dengan komoditas kelapa dalam dengan luas tanam mencapai 58.505 hektar, namun masih terjadi disparitas harga sebesar 16,6%, dan Kopi Liberika dengan potensi saat 1.259 Hektar.Potensi peternakan dengan populasi ternak sapi sebanyak 20.480 ekor atau 248,8 ton. Dengan tingginya permintaan daging sapi serta daya dukung yangmelimpah, sangat mungkin untuk ditingkatkan perkembangbiakannya. Sumberdaya perikanan yang terkandung mencapai 23.886 ton untuk perikanan laut dan 249 ton perikanan darat akan terus ditingkatkan produksi dan pemasarannya. Disamping potensi yang tersedia, juga akan mengembangkan potensi-potensi lainnya sesuai dengan tren yang sedang booming saat ini seperti peternakan lebah madu dan penangkaran burung berkicau.

2. Membangun Sumberdaya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing;

   Publik tentu sepakat bahwa keberhasilan pembangunan sangat ditentukan dengan kualitas sumber daya yang tersedia, dan sumber daya manusia merupakan faktor yang menentukan keberhasilan tersebut dengan catatan SDM tersebut harus unggul dan berdaya saing. Untuk mencetak SDM yang unggul dan berdaya saing tersebut tentu perlu dilakukan upaya sistematis dan komprehensif dengan memfokuskan 3 sasaran yaitu penyiapan kualitas pendidikan, kualitas kesehatan dan kualitas tenaga kerja.

   Pendidikan merupakan gerbang peradaban dan kunci keberhasilan pembangunan. Untuk itu, dibutuhkan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan, untuk itu akan menargetkan : 1) menyiapkan tenaga pendidik yang cukup dan berkompeten; 2) menjamin fasilitas belajar dan mengajar yang layak dan nyaman, 3) meningkatkan aksesibilitas yang layak. Sedangkan untuk penyiapan tenaga kerja, akan dilakukan peningkatan

kompetensi bagi angkatan kerja untuk berdaya saing dan siap kerja. Sedangkan untuk sasaran kesehatan, akan mencukupi kebutuhan sarana prasarana fasilitas kesehatan, peningkatan sanitasi masyarakat, kapasitas tenaga kesehatan, ketersediaan air bersih, penciptaan lingkungan sehat, dan upaya promotif dan preventif kesehatan lainnya. Kondisi sehat dan cerdas tentunya belum cukup jika tidak dibarengi dengan mental, moral dan perilaku yang beradab sebagaimana kita ketahui bersama bahwa cepatnya perkembangan teknologiinformasi saat ini telah menjadikan banyaknya kemudahan - kemudahan, namun sisi lain kemajuan teknologi ini berimplikasi terhadap pergaulan bebas hingga merusak norma - norma agama, Pendidikan keagamaan merupakan salah satu cara untuk mencegah hal negatif tersebut terjadi. Untuk itu, akan ditingkatkan peran institusi pendidikan keagamaan yang ada dan tentunya disesuaikan dengan kaidah hukum serta kewenangan yang ada. Dengan adanya kualitas pendidikan dan penguatan sistem kesehatan tentu akan melahirkan generasi yang berkualitas, bermoral dan berdaya saing dengan meningkatkan keterampilan kerja pada penduduk Angkatan kerja khususnya pada jenjang tamatan pendidikan SLTP dan SLTA yang bekerja pada sektor industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran dan sektor jasa.

3. Meningkatkan Investasi Daerah yang Kompetitif dan Lestari;

   Untuk membangun sebuah daerah dibutuhkan pendanaan yang cukup, untuk itu segala sumber pendanaan harus dioptimalkan tidak saja bergantung pada APBD, investasi sangat dibutuhkan untuk menggerakkan perekonomian daerah. Untuk itu, perlu dilakukan stimulan kepada pelaku usaha untuk datang berinvestasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan bersama-sama mengelola sumber daya alam dikelola dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Seperti sektor Kelapa Sawit yang memiliki potensi lahan rakyat seluas 38.129 Hektar namun faktanya, cashflow yang timbul masih belum optimal, secara data menunjukan terjadi kehilangan perputaran uang akibat penjualan CPO di luar Kabupaten yang mencapai 50

persen. Coconut oil resources dengan potensi 58 ribu hektar yang dimiliki Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki potensi luar biasa di tengah kebijakan nasional terkait Pengolahan kelapa menjadi bio-energi dengan pasar ekspor ke Jepang, menjadi peluang untuk berpacu meningkatkan produksi dan kualitas kepala yang dimiliki untuk mampu bersaing dipasar global.

Oleh karenanya, kedepan akan memfokuskan pada investasi di sektor tanaman pangan, perkebunan, perikanan, otomotif, UKM/IKM dan jasa perdagangan.

Peningkatan investasi daerah tentu membuka peluang di sektor ketenagakerjaan,

untuk itu, akan dilakukan penyiapan calon tenaga kerja produktif yang berasal dari putra dan putri Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mampu bersaing di pasar kerja dan akan dilakukan penambahan volume program padat karya serta mambangun kemandirian sebagai upaya membuka lapangan kerja baru dalam rangka mensukseskan Program Pemulihan Ekonomi Nasional akibat Pandemi COVID-19.

Komitmen untuk meningkatkan investasi daerah tentu tidak serta merta menabrak prinsip pembangunan berkelanjutan, ramah lingkungan dan lestari, untuk itu komitmen melaksanakan pembangunan dengan memperhatikan kaidah- kaidah yang berlaku terlebih lagi karena 62,98 persen luas wilayah kita adalah gambut yang harus dijaga dan lestarikan.

4. Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Meningkatkan Pelayanan Publik dalam Tatanan Kehidupan Yang Nyaman dan Harmonis;

   Untuk mewujudkannya tentu harus ditopang dengan kemampuan birokrat yang mumpuni dan mampu bertransformasi dengan kondisi dinamis. Untuk itu, penguatan birokrasi menjadi komitmen kedepan yang artinya birokrasi yang dibangun harus punya kemampuan melakukan perubahan, kemampuan meningkatkan pelayanan publik yang bersih, berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien. Dengan pencapaian tersebut, diharapkan

berimplikasi pada terciptanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan yang bersih dan bebas KKN sehingga masyarakat dapat menjalani kehidupannya dengan nyaman, aman, dan harmonis.

3. Tujuan Pembangunan Daerah

Agar visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 lebih terarah dalam implementasinya ke depan, maka visi dan misi tersebut dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran, disertai dengan indicator kinerjanya. Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 meliputi 9 (sembilan) tujuan dan 31 (tiga puluh satu) sasaran. Adapun Tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 diuraikan sebagai berikut:

1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan;
2) Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat;
3) Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas;
4) Menciptakan Tenaga Kerja yang Berdaya Saing ;
5) Meningkatkan Nilai Investasi Daerah ;
6) Meningkatkan Daya Serap Tenga Kerja;
7) Menjamin Keberlangsungan Pembangunan Berwawasan Lingkungan;
8) Membangun Birokrasi yang Tangguh, Terampil dan Berintegritas; dan
9) Menciptakan Kondisi Daerah yang Aman, Nyaman dan Harmonis.

4. Sasaran Pembangunan Daerah

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan diatas, maka Kabupaten Tanjung Jabung Timur menetapkan 31 (tiga puluh satu) sasaran pokok pembangunan berdasarkan pada kebutuhan untuk dilaksanakan yakni:

1) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan;
2) Peningkatan Produksi Perkebunan
3) Peningkatan Populasi Hewan Ternak;
4) Peningkatan Produksi Hasil Perikanan;
5) Peningkatan Infrastruktur Penunjang Pertanian dan Perikanan
6) Peningkatan Daya Saing Pertanian dan Perikanan;

7) Peningkatan Daya Saing UKM/IKM sektor Pertanian dan Perikanan**;**
8) Peningkatan Agrowisata dan Wisata Bahari
9) Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan (Puskesmas dan Pustu);
10) Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman;
11) Peningkatan Perbaikan Sanitasi Masyarakat;
12) Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Dasar;
13) Peningkatan Peran Serta Pesantren dan Madrasah Diniyah;
14) Peningkatan Keahlian dan Keterampilan Angkatan Kerja;
15) Peningkatan Pelaksanaan Studi Kerja/Magang;
16) Peningkatan Pelayanan Perizinan Mendukung Investasi Daerah
17) Pengembangan Aksesibilitas dan Sarana Prasarana;
18) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
19) Penyediaan Data dan Informasi Digital Potensi Investasi Daerah;
20) Fasilitasi Pendirian Pabrik;
21) Penyediaan Informasi Lapangan Kerja Berbasis Elektronik;
22) Fasilitasi Permodalan Usaha dan Peralatan Kerja;
23) Pelayanan Administrasi Ketenagakerjaan Berbasis Elektronik;
24) Pengelolaan Lingkungan Hidup;
25) Pengendalian Tata Ruang;
26) Penataan Kelembagaan dan Organisasi;
27) Peningkatan SDM Aparatur dan Penataan Peraturan Perundang-undangan;
28) Peningkatan Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan;
29) Peningkatan Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur;
30) Terciptanya Kohesi Sosial Masyarakat; dan
31) Peningkatan Rasa Aman Bagi Ssemua Lapisan Masyarakat.

5. Sasaran Pembangunan Daerah

Adapun isu strategis RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2021-206 sebagai berikut:

1) Infrastruktur masih menjadi faktor penghambat dalam upaya mendorong pertumbuhan investasi daerah, mendorong tumbuhnya sektor pertanian serta pelayanan dasar guna peningkatan Sumber Daya Manusia;
2) Pertanian sebagai sektor yang menyerap lebih dari 60 persen tenaga kerja belum mampu berkontribusi lebih dalam pertumbuhan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Tanjung Jabung Timur;
3) Perlunya optimalisasi hilirisasi sektor industri olahan khususnya dari sector pertanian sebagai alat untuk upaya meningkatkan harga komoditi pertanian, sekaligus alat multiplayer effect pertumbuhan ekonomi;
4) Tingkat kemiskinan yang meskipun mengalami penurunan setiap tahunnya akan tetapi masih diatas rata-rata Provinsi Jambi;
5) Indek Pembangunan Manusia sebagai indikator keberhasilan pembangunan manusia di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang masih dibawah rata-rata Provinsi Jambi sangat berkolerasi terhadap daya saing masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
6) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan yang paling rendah di Provinsi Jambi yang artinya banyak angkatan kerja yang terserap akan tetapi kualitas dari tenaga kerja tersebut masih belum berdaya saing dengan tenaga kerja diluar Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
7) Era digitalisasi sebagai peluang daerah untuk membangunan sistem digital yang mendukung percepatan kemajuan daerah;
8) Terjadinya perlambatan pada penerimaan daerah khususnya dari sumber pendapatan asli daerah sehingga diperlukan strategi khusus baik intensifikasi maupun ekstensifikasi;
9) Terjadinya kerusakan tutupan hutan, ancaman bencana banjir dan kebakaran hutan dan lahan, serta abrasi pantai yang semakin besar; dan
10) Penyelenggaraan pelayanan publik yang mengacu kepada asas kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik, kemampuan meningkatkan Inovasi dan

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta penyiapan portal pengelolaan pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan publik.

3.9 PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENCAPAIAN TPB

Untuk melaksanakan SDGs, Kabupaten Tanjung jabung Timur menjalankan prinsip partisipasi yang inklusif dengan melibatkan 4 platform partisipasi yang terdiri atas: (1) Pemerintah dan Parlemen; (2) Akademisi dan Pakar; (3) Filantropi dan Pelaku Usaha; serta (4) Organisasi Masyarakat Sipil dan Media.

Organisasi perangkat daerah yang terlibat dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) pada disagresi Kabupaten diantaranya Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Dinas PUPR Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Dinas Pemadam kebakaran,Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Dinas Petanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Polres Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan BNN Kabupaten Tanjung Jabung Timur,

Berdasarkan tabel di bawah ini, dari sekian banyak para pihak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, memang masih sedikit yang masih aktif dan berkontribusi untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dalam konteks ini, aktif yang dimaksud adalah masih melakukan aktifitas program dan kegiatan secara rutin sesuai bidangnya. Secara normatif bentuk program dan anggaran yang dijalankan oleh para pihak belum sepenuhnya dapat terukur akuntabilitasnya. Hal ini disebabkan belum adanya kebijakan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang mengatur lebih lanjut peran para pihak yang terlibat dalam aktivitas tersebut.

Terdapat 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dicapai oleh para pihak dengan perannya masing-masing yang berkontribusi untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang terdiri dari berbagai macam bidang dan latar belakang seperti ormas/LSM, perbankan, dan lain-lain. Kontribusi dari masing-masing para pihak tersebut juga merupakan bagian dari indikator Tujuan Pembangunan Bereklanjutan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Itu artinya, para pihak ini sudah berkontribusi dan membantu Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Akan tetapi, masih banyak urusan-urusan atau indikator yang dapat dilakukan oleh para pihak selain organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat memberdayakan para pihak yang saat ini keberadannya kurang aktif dengan cara membangkitkan kembali para pihak yang sudah tidak aktif dengan cara memberikan arahan program dan kegiatan untuk membantu Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam upaya pelaksanaan dan pencapaian indikator TPB.

Tabel III.8.1
Pemangku Kepentingan TPB di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

No	Nama Stakeholder	Peran	Bidang
Stakeholder Aktif			
1	PKK Kabupaten Tanjung Jabung Timur	kader perempuan membantu dalam pelaksanaan prograam-program pemerintah	perempuan, kesetaraan gender
2	Bank Sampah Kartini	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah	sampah, lingkungan
3	PT. Petrochina Internasional	Penyedia Dana CSR	
4	PT. Pertamina	Penyedia Dana CSR	
5	Bank Jambi	Penyedia Dana Kesehatan	
Asosiasi/FORUM/Ormas/LSM			
1	Nahdhatul Ulama (NU)		Sosial
2	Muhamaddiyah Kabupaten Tanjung Jabung Timur		Sosial
3	Komite Nasional Pemuda Indonesia(KNPI)		Sosial
4	MPC Pemuda Pancasila Tanjabtim		Sosial
5	Himpunan Perusahaana Online Internasional (HIPO)		Ekonomi
5	Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-PKK)		Sosial dan Hukum
7	Persaudaraan Muslimah (SALIMAH)		Sosial
8	Laskar Merah Putih		Sosial
9	Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi		Sosial dan Hukum
10	Badan Musyawarah Antar gereja Lembaga Keagamaan Kristen Indonesia (BAMAG LKK INDONESIA)		Sosial
11	Senkom Mitra Polri (Sentra Komunikasi Mitra Polri)		Hukum
12	LSM ABRI		Hukum
13	Paguyuban Seni Bela Diri Pernapasan Tapak Wali Indonesia		Sosial
14	Persekutuan Gereja-Gereja Pantekostan Indonesia (PGPI)		Sosial
15	Kesatuan Pembaharu mahasiswa (KAPEMA)		Sosial
16	Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)		Sosial

No	Nama Stakeholder	Peran	Bidang
17	LSM Transaparan Mandiri Indonesia		Sosial
18	Badan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (BPPK – RI)		Sosial dan Hukum
19	LSM Elang Rawa		Sosial
20	LSM Lubung Informasi Masyarakat (LIMA)		Sosial
21	Anti Korupsi Nepotisme Terhadap Aset Negara (Akontan)		Hukum dan Ekonomi
22	Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 (Laki Pejuang 45)		Hukum dan Ekonomi
23	LSM Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI)		Hukum
24	Pejuang Siliwangi Indonesia		Sosial
25	Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)		Sosial
26	Perkumpulan Keluarga Pesisir Selatan (PKPS)		Sosial
27	Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP)		Sosial
28	Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI)		Sosial
29	Restorasi Lingkungan Hijau		Lingkungan
30	Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor)		Sosial
31	Ikatan Keluarga Minang		Sosial
32	Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI)		Sosial
33	Pergerakan Mahasiswa Islam Di Indonesia (PMII)		Sosial
	Perguruan Tinggi		
1	STIE Syaria'ah Al-Mujaddid		Pendidikan
2	Universitas Jambi Kampus Muara Sabak		Pendidikan
3	Kampus II Bustanul Ulum		Pendidikan
	Rumah Sakit		
1	RSUD Nurdin Hamzah		Kesehatan
	Perseroan		
1	PT. PT. Petrochina Internasional		
2	PT Pertamina		
3	PDAM Muara Sabak ilir		

No	Nama Stakeholder	Peran	Bidang
3	PT Telkom Tanjabtim		
Organisasi Profesi			
1	Ikatan Dokter Indonesia (IDI)		Kesehatan
2	Persatuan Dokter Gigi Indinesia (PDGI)		Kesehatan
3	Ikatan Guru Indonesia (IGI)		Pendidikan
5	Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI)		Kesehatan
6	Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI)		Tenaga Kerja

BAB IV
ANALISIS CAPAIAN TPB/SDG'S



Pada bagian ini akan dipaparkan capaian tujuan dan sasaran pembangunan berkelanjutan per tujuan. Setiap tujuan terdiri atas indikator – indikator capaian yang disepakati oleh Pemerintah Daerah dengan merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2020 tersebut. Daftar indikator yang dituangkan dalam substansi ini adalah indikator yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten. Pembagian indikator yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten tersebut didasarkan kepada buku metadata TPB Indonesia dan juga berdasarkan dengan hasil koordinasi dengan Sekretarian SDGs Bappenas.

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) bertujuan guna menjaga keberlanjutan kehidupan sosial, peningkatan kesejahteraan ekonomi Masyarakat

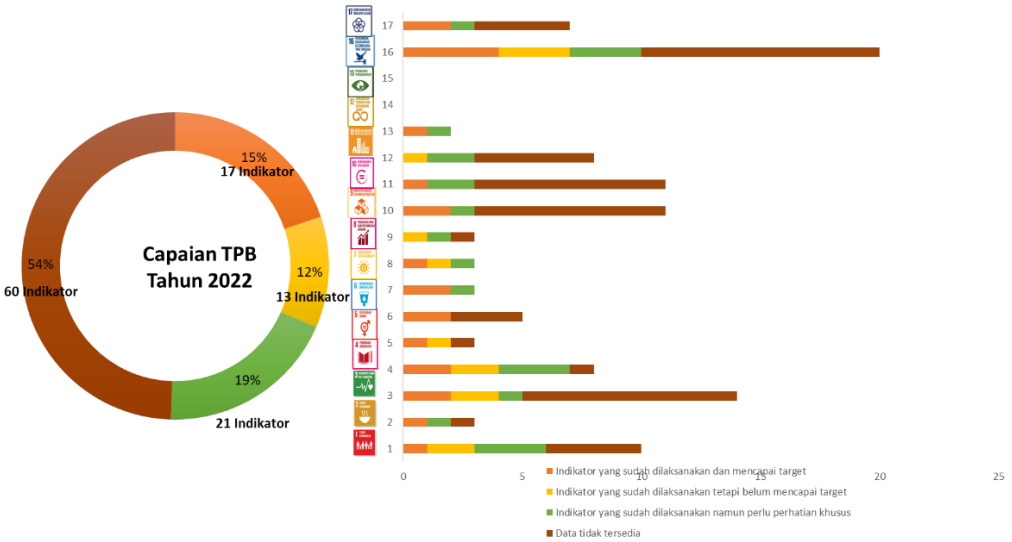
secara berkesinambungan, menjaga kualitas lingkungan hidup serta menjaga terlaksananya hukum dan tata kelola yang mampu meningkatkan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang terdiri dari 17 tujuan kemudian dikelompokan menjadi 4 (empat) pilar, yaitu: pilar Pembangunan sosial, pilar Pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan hidup dan pilar pembangunan hukum dan tata kelola.

4.1 CAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Dari proses *updating* capaian indikator TPB Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ditargetkan sampai dengan Tahun 2022 diketahui masih banyak indikator yang perlu ditingkatkan untuk memenuhi target dan beberapa indikator belum ditargetkan sebelumnya didalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Rekapitulasi yang menggambarkan ketercapaian indikator dari masing-masing Tujuan TPB yang merupakan kewenangan Kabupaten, dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut:

Tabel IV.1.1
Rekapitulasi Status Capaian Indikator Berdasarkan Target SDGs Nasional
Tahun 2022

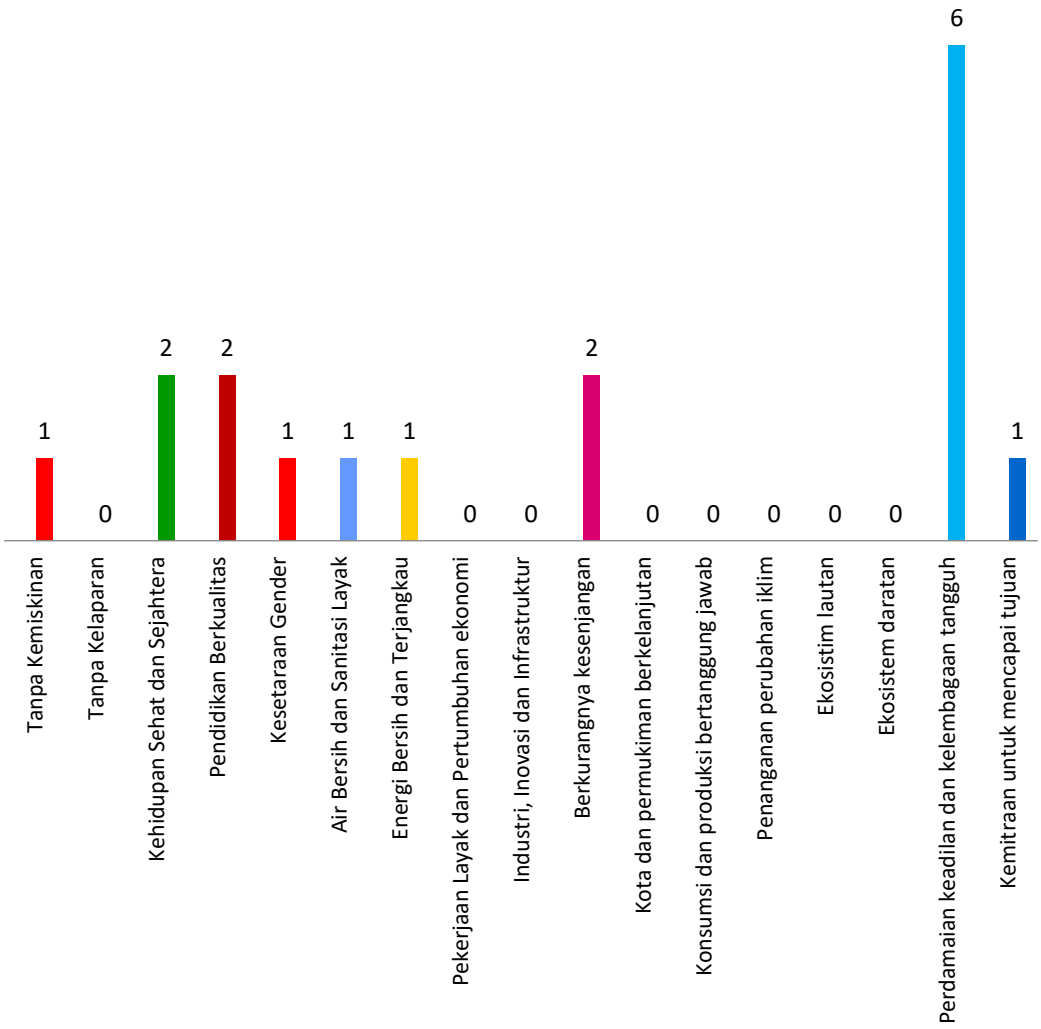
No	Tujuan PB	Jumlah Indikator			
		Indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target	Indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target	Indikator yang sudah dilaksanakan namun perlu perhatian khusus	Data tidak tersedia
1	Tanpa Kemiskinan	1	3	3	3
2	Tanpa Kelaparan	0	0	1	2
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	2	2	2	8
4	Pendidikan Berkualitas	2	2	3	1
5	Kesetaraan Gender	1	0	1	1
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	1	1	2	1
7	Energi Bersih dan Terjangkau	1	2	0	0
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan ekonomi	0	0	3	0
9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	0	1	1	1
10	Berkurangnya kesenjangan	2	0	1	8
11	Kota dan permukiman berkelanjutan	0	0	1	10
12	Konsumsi dan produksi bertanggung jawab	0	0	0	8
13	Penanganan perubahan iklim	0	0	0	2
14	Ekosistim lautan	0	0	0	0
15	Ekosistem daratan	0	0	0	0
16	Perdamaian keadilan dan kelembagaan tangguh	6	1	1	12
17	Kemitraan untuk mencapai tujuan	1	1	2	3
Jumlah		**17**	**13**	**21**	**60**



Gambar 4.1.1
Grafik Persentase Capaian Indikator SDGs Kabupaten Tanjung Jabung Timur Terhadap Target Nasional

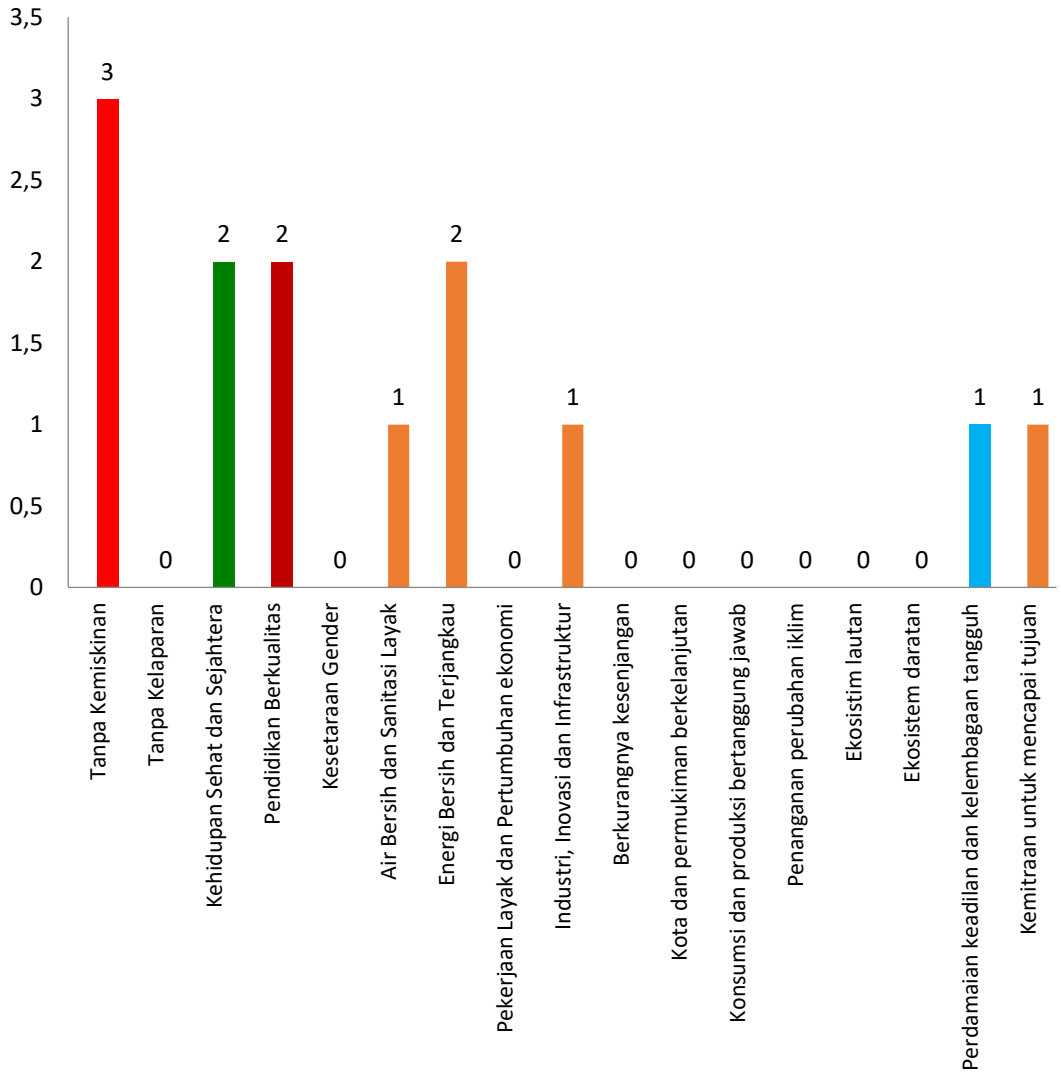
Adapun kategori capaian TPB terbagi menjadi 4 (empat) kategori :

1. Indikator TPB yang sudah mencapai target



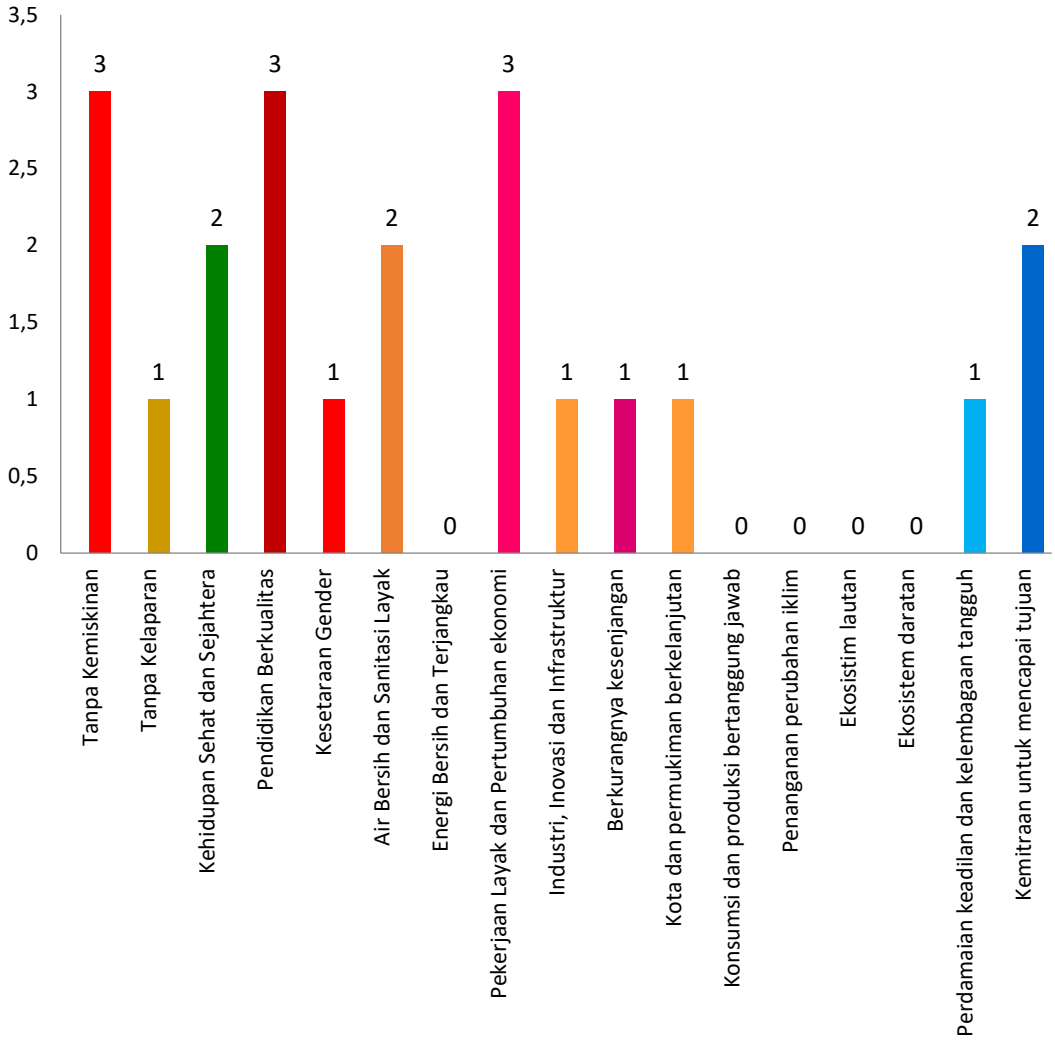
Gambar 4.1.2
Jumlah Indikator Pada Setiap Tujuan Yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target

2. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target



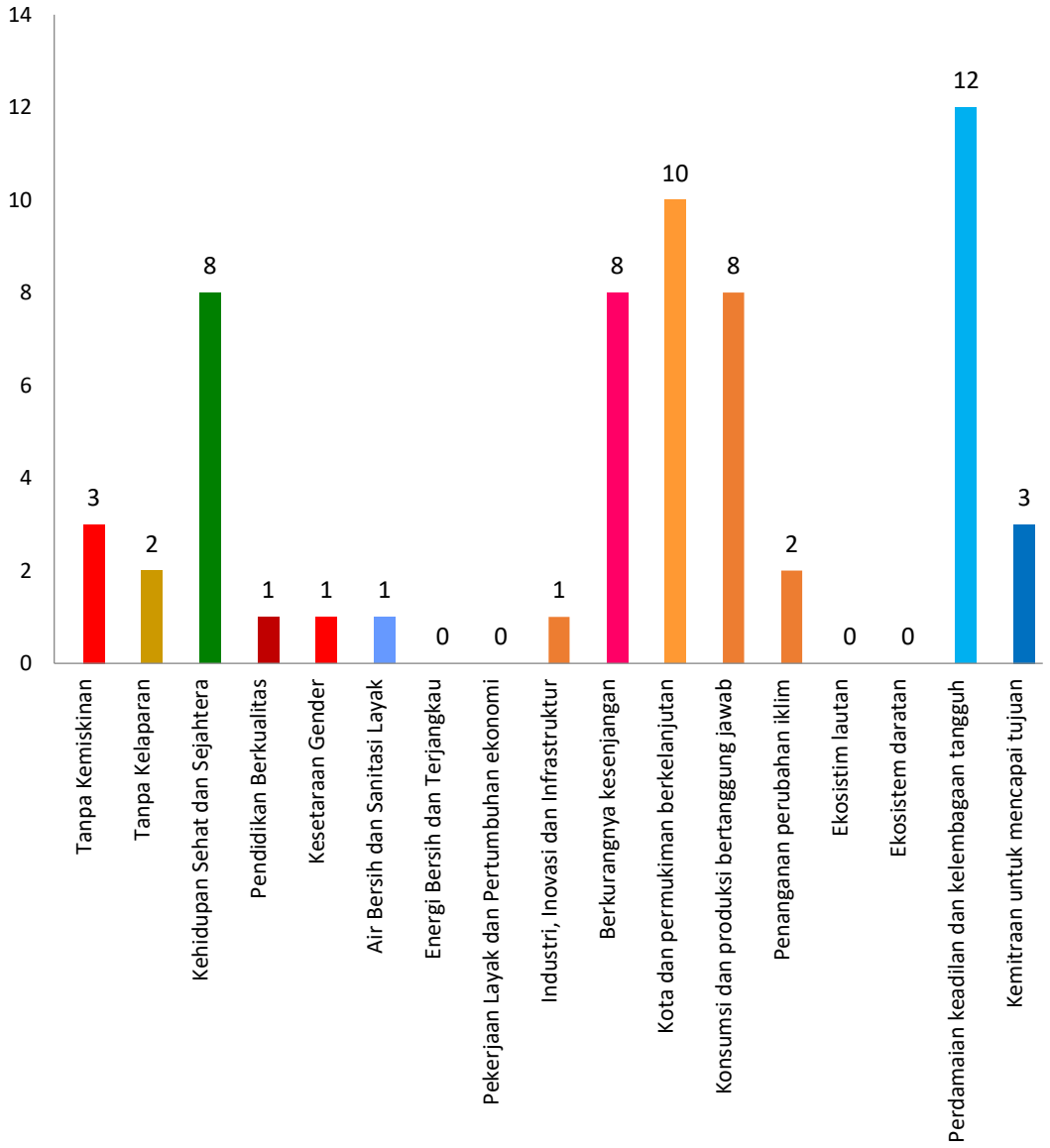
Gambar 4.1.3
Indikator TPB Yang Sudah Dilaksanakan Tetapi Belum Mencapai Target

3. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan namun perlu perhatian khusus



Gambar 4.1.4
Indikator TPB yang sudah dilaksanakan namun perlu perhatian khusus

4. Indikator TPB yang tidak/belum memiliki data



Gambar 4.1.5
Indikator TPB yang tidak/belum memiliki data

Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2022 dalam sub bab ini diuraikan berdasarkan empat dimensi dalam TPB/SDGs sebagaimana dijelaskan sebagai berikut.

Secara umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih menghadapi tantangan yang cukup panjang dalam menghadapi pencapaian indikator TPB. Hal ini didasarkan atas capaian jumlah indikator yang telah mencapai target nasional. Berdasarkan hasil perhitungan dan pengolahan data menunjukan bahwa indikator TPB di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang telah dilaksanakan dan mancapai target nasional baru mencapai 15,32% (17 indikator) dari total 111 indikator yang menjadi kewenangan Kabupaten.

4.1.1 Dimensi Sosial

Dalam Metadata SDGs/TPB, dimensi sosial memiliki 5 tujuan (tujuan 1,2,3,4, dan 5) yang terdiri dari dari 38 indikator yang disagregasi di Wilayah Kabupaten termuat dalam lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2020. Ketercapaian Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam SDGs/TPB diukur dengan cara membandingkan sasaran target SDGs/TPB yang tertuang RPJMD Kabupaten, RPJMN dan Rencana Strategis masing-masing OPD dengan data capaian indikator SDGs/TPB Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Hasil identifikasi dan penelaahan pada data-data yang tersedia, menunjukan bahwa program-program yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah mend ukung upaya ketercapaian SDGs/TPB meskipun ada beberapa tujuan, target-target dan indikator dalam SDGs belum dikaji lebih lanjut karena mempertimbangkan kondisi dan kemampuan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam mewujudkannya.

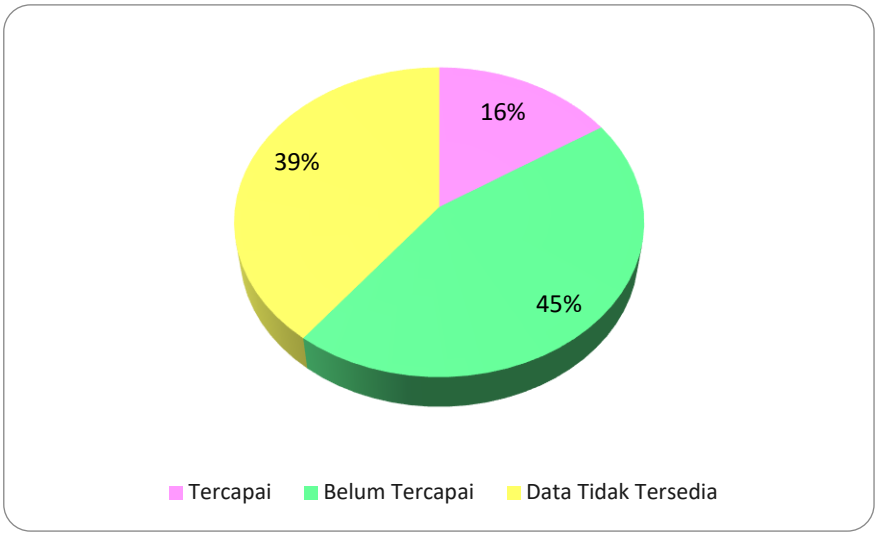
Jika diperinci berdasarkan indikator SDGs yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2020, ketersediaan data di TPB/SDGs belum sepenuhnya mendukung ketercapaian indikator SDGs/TPB karena hanya terdapat 61% dari 38 indikator SDGs yang tersedia datanya. Dari 38 indikator TPB/SDGs jumlah data indikator yang tercapai sebanyak 6 indikator (16%), data indikator yang belum tercapai sebanyak 17 indikator (45%) dan indikator yang tidak ada

data sebanyak 15 indikator (39%). Dari 38 indikator tersebut, terdapat 17 (45%) indikator yg sebelumnya belum ditargetkan didalam target nasional. Berikut adalah tabel yang menunjukan ketercapaian Kabupaten Tanjug Jabung Timur dalam memujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan berdasarkan dimensi sosial.

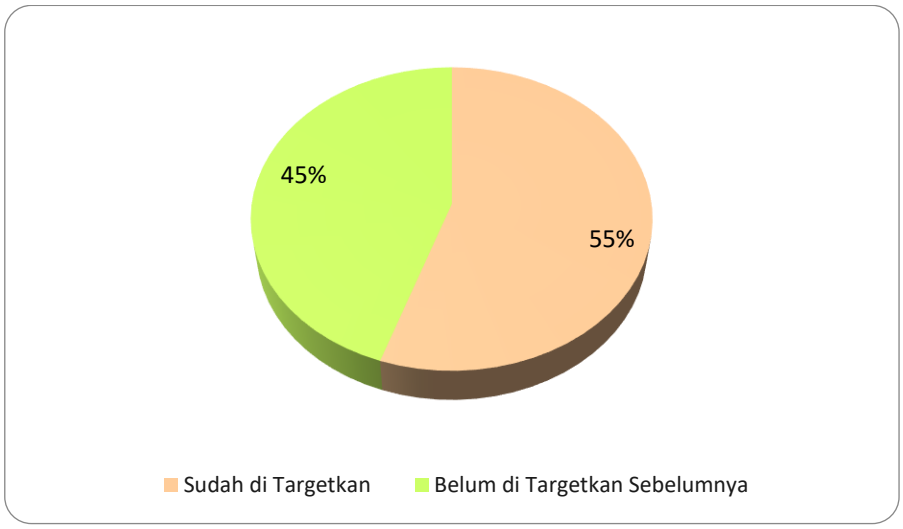
Tabel IV.1.2
Ketercapaian Indikator SDGs/TPB Kabupaten Tanjug Jabung Timur (2022) Dimensi Sosial

No	Tujaun	Indikator SDGs/TPB	Pecapaian Indikator SDGs/TPB			Target	
			Tercapai	Belum Tercapai	Data Tidak Tersedia	Sudah di Targetkan	Belum di Targetkan Sebelumnya
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	10	1	6	3	5	5
2	Menghilangkan Kelaparan, Mecapai Ketahanan pangan dan Gizi Yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	3	0	1	2	0	3
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan meningkatkan kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	14	2	4	8	9	5
4	Menjamin Kualitas Pendidikan Yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	8	2	5	1	7	1
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memperdayakan kaum Perempuan	3	1	1	1	0	3
Total		**38**	**6**	**17**	**15**	**21**	**17**

Sumber : Hasil Analisa 2023



Gambar 4.1.6
Grafik Ketercapaian Indikator SDG's/TPB Kabupaten Tanjug Jabung Timur Dimensi Sosial



Gambar 4.1.7
Target Realisasi SDGs/TPB Kabupaten Tanjug Jabung Timur Dimensi Sosial

4.1.2 Dimensi Ekonomi

Dalam Metadata SDGs, dimensi ekonomi memiliki 5 tujuan (7,8,9,10,17) yang terdiri dari 27 indikator yang disagregasi di Wilayah Kabupaten termuat dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Keterca paian Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam SDGs/TPB diukur dengan cara membandingkan sasaran target SDGs/TPB yang tertuang RPJMD Kabupaten, RPJMN

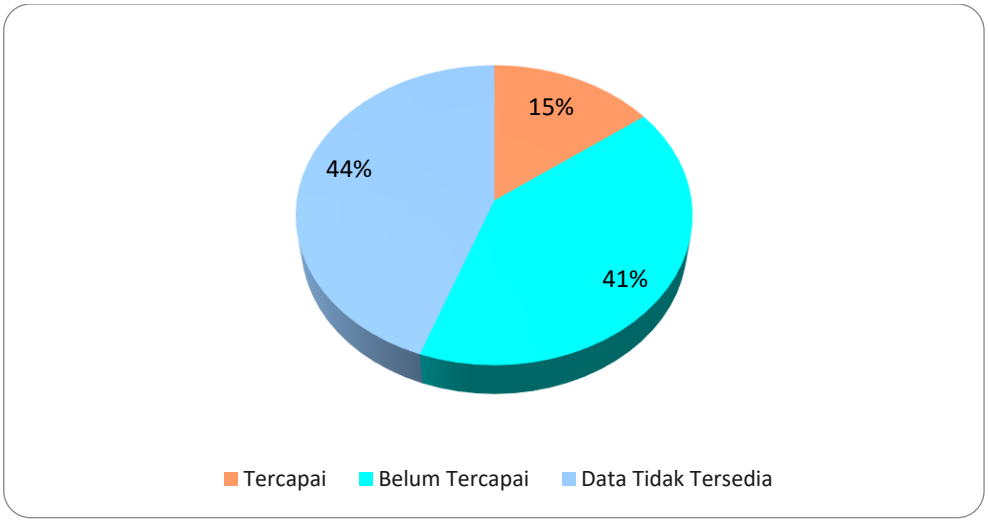
dan Rencana Strategis masing-masing OPD dengan data capaian indikator SDGs/TPB Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Hasil identifikasi dan penelaahan pada data-data yang tersedia, menunjukan bahwa program-program yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Tanjug Jabung Timur telah mendukung upaya ketercapaian SDGs/TPB meskipun ada beberapa tujuan, target-target dan indikator dalam SDGs belum dikaji lebih lanjut karena mempertimbangkan kondisi dan kemampuan Kabupaten Tanjug Jabung Timur dalam mewujudkannya. Beberapa tujuan SDGs yang belum dikaji di dalam RAD SDGs Kabupaten Tanjung Jabung Timur meliputi tujuan 7 yaitu Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua.

Jika diperinci berdasarkan indikator SDGs yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018. Dari 27 indikator TPB/SDGs jumlah data indikator yang tercapai sebanyak 4 indikator (15%), data indikator yang belum tercapai sebanyak 11 indikator (41%) dan indikator yang datanya tidak tersedia sebanyak 12 indikator (44%). Dilihat dari target yang direalisasikan, terdapat 12 (44%) indikator yang sudah ditargetkan dan 15 (56%) indikator yang sebelumnya belum ditargetkan didalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Berikut adalah tabel yang menunjukan ketercapaian Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam memujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan berdasarkan dimensi ekonomi.

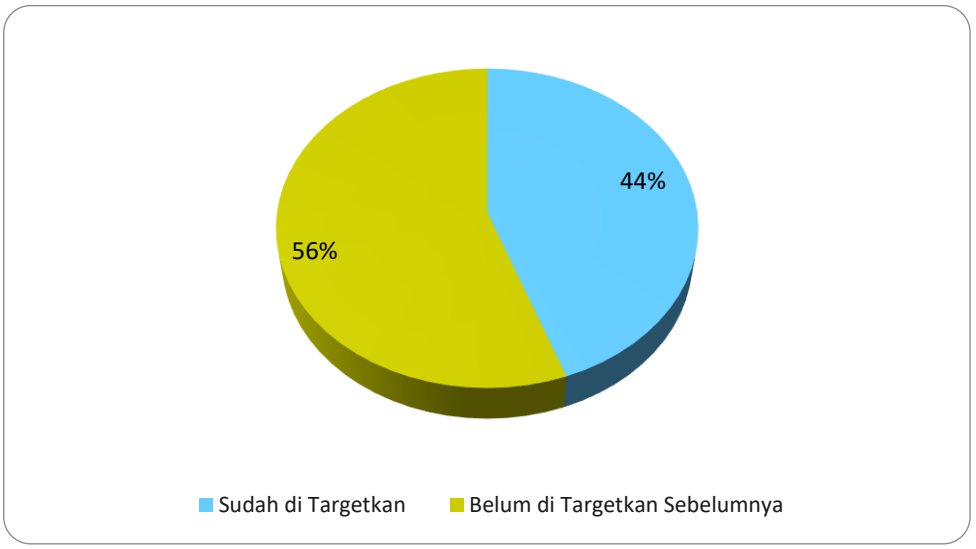
Tabel IV.1.3
Ketercapaian Indikator SDGs/TPB Kabupaten Tanjung Jabung Timur (2022) Dimensi Ekonomi

Tujuan	Tujaun	Indikator SDGs/TPB	Pecapaian Indikator SDGs/TPB			Target	
			Tercapai	Belum Tercapai	Data Tidak Tersedia	Sudah di Targetkan	Belum di Targetkan Sebelumnya
7	Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua	3	1	2	0	2	1
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, kesemoatan kerja yang Produktif dan menyeluruh, Serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	3	0	3	0	1	2
9	Membangun Infrastruktur yang Tanggung, meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi	3	0	2	1	2	1
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antar Negara	11	2	1	8	3	8
17	Menguatkan Sarana pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	7	1	3	3	4	3
Total		**27**	**4**	**11**	**12**	**12**	**15**

Sumber : Hasil Analisa 2023



Gambar 4.1.8
Ketercapaian Indikator SDGs/TPB Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dimensi Ekonomi



Gambar 4.1.9
Target Realisasi SDGs/TPB Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dimensi Ekonomi

4.1.3 Dimensi Lingkungan

Dalam Metadata SDGs, dimensi lingkungan memiliki 6 tujuan (6,11,12,13,14 dan 15) yang terdiri dari 29 indikator yang termuat dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Ketercapaian Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam SDGs/TPB diukur dengan cara membandingkan sasaran target SDGs/TPB

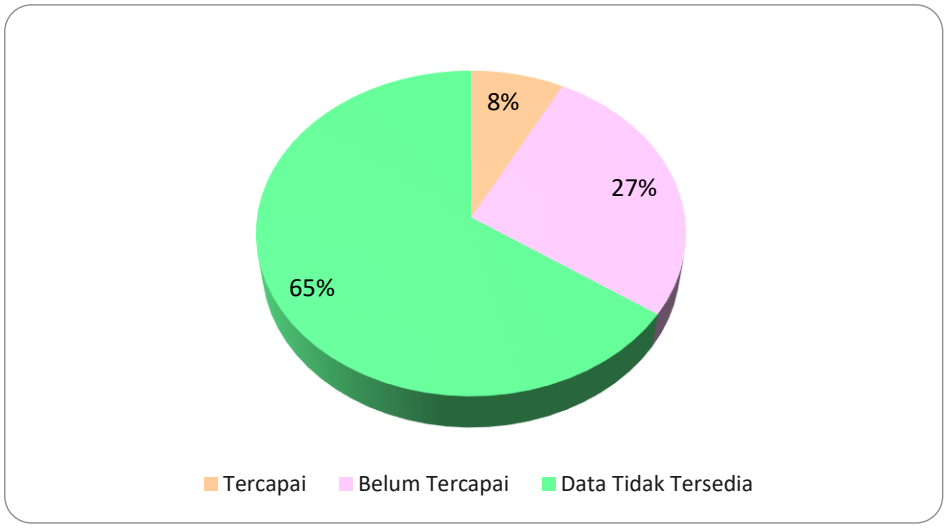
yang tertuang RPJMD Kabupaten, RPJMN dan Rencana Strategis masing-masing OPD dengan data capaian indikator SDGs/TPB Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Hasil identifikasi dan penelaahan pada data-data yang tersedia, menunjukan bahwa program-program yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah mendukung upaya ketercapaian SDGs/TPB meskipun ada beberapa tujuan, target-target dan indikator dalam SDGs belum dikaji lebih lanjut karena mempertimbangkan kondisi dan kemampuan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam mewujudkannya. Beberapa tujuan SDGs yang belum dikaji meliputi tujuan 13 (Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya), tujuan 14 (Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudra untuk Pembangunan Berkelanjutan), dan tujuan 15 (Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, Serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati).

Jika diperinci berdasarkan indikator SDGs yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018, terdapat 26 indikator TPB/SDGs jumlah data indikator yang tercapai sebanyak 2 indikator (8%), data indikator yang belum tercapai sebanyak 7 indikator (27%) dan indikator yang datanya tidak tersedia sebanyak 17 indikator (65%). Dilihat dari target yang direalisasikan, terdapat 16 (62%) indikator yang sudah ditargetkan dan 10 (38%) indikator yang sebelumnya belum ditargetkan didalam target nasional. Berikut adalah tabel yang menunjukan ketercapaian Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam memujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan berdasarkan dimensi lingkungan.

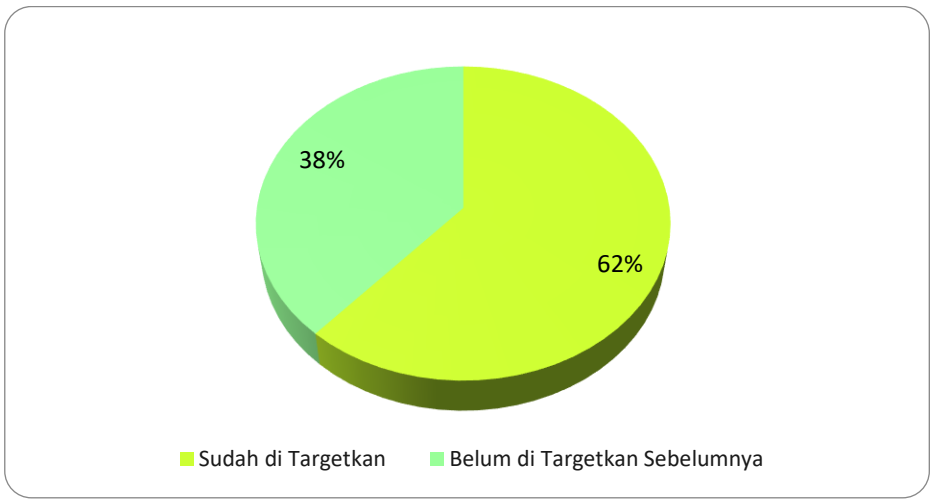
Tabel IV.1.4
Ketercapaian Indikator SDGs/TPB Kabupaten Tanjung Jabung Timur (2022)
Dimensi Lingkungan

Tujuan	Tujaun	Indikator SDGs/TPB	Pecapaian Indikator SDGs/TPB			Target	
			Tercapai	Belum Tercapai	Data Tidak Tersedia	Sudah di Targetkan	Belum di Targetkan Sebelumnya
6	Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Yang Berkelanjutan untuk Semua	5	1	3	1	1	4
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	11	1	4	6	9	2
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	8	0	0	8	6	2
13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	2	0	0	2	0	2
14	Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudra untuk Pembangunan Berkelanjutan	0	0	0	0	0	0
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, Serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	0	0	0	0	0	0
Total		**26**	**2**	**7**	**17**	**16**	**10**

Sumber : Hasil Analisa 2023



Gambar 4.1.10
Ketercapaian Indikator SDGs/TPB Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dimensi Lingkungan



Gambar 4.1.11
Target Realisasi SDGs/TPB Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dimensi Lingkungan

4.1.4 Dimensi Hukum dan Tata Kelola

Dalam Metadata SDGs, dimensi kelembagaan hanya memiliki 1 tujuan yaitu tujuan 16 yang terdiri dari 20 indikator yang termuat dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Ketercapaian Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam SDGs/TPB diukur dengan cara membandingkan sasaran target SDGs/TPB yang tertuang RPJMD Kabupaten, RPJMN dan Rencana Strategis masing-masing OPD

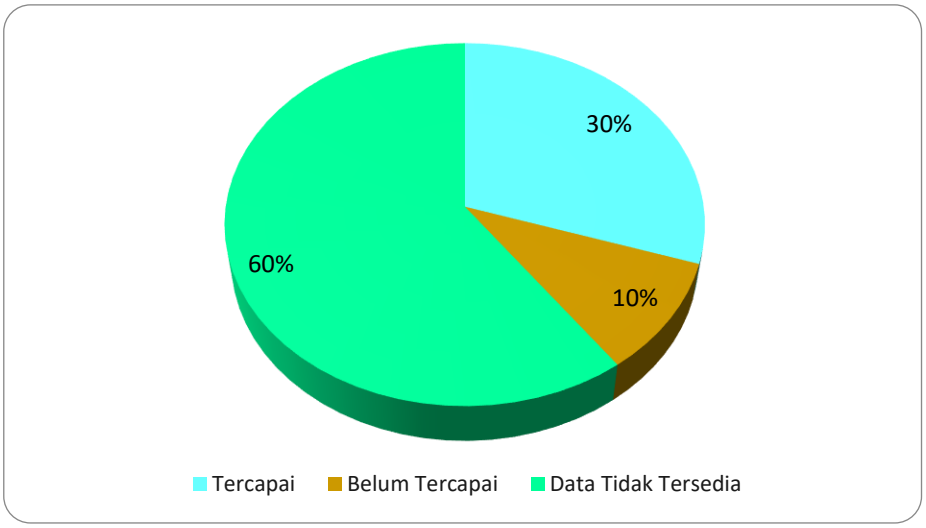
dengan data capaian indikator SDGs/TPB Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Hasil identifikasi dan penelaahan pada data-data yang tersedia, menunjukan bahwa program-program yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah mendukung upaya ketercapaian SDGs/TPB meskipun ada beberapa tujuan, target-target dan indikator dalam SDGs belum dikaji lebih lanjut karena mempertimbangkan kondisi dan kemampuan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam mewujudkannya.

Jika diperinci berdasarkan indikator SDGs yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018, Dari 20 indikator TPB/SDGs jumlah data indikator yang tercapai sebanyak 19 indikator (31,57%), indikator yang datanya tidak tersedia sebanyak 11 indikator (57,89%) dan indikator yang belum ditargetkan sebelumnya sebanyak 5 indikator (26,31%). Berikut adalah tabel yang menunjukan ketercapaian Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam memujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan berdasarkan dimensi hukum dan tata kelola.

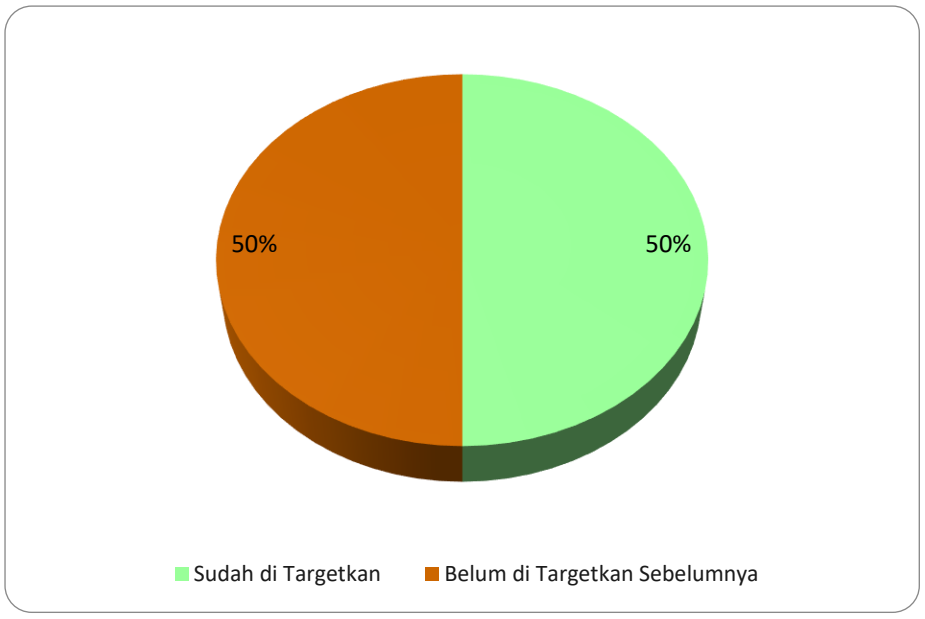
Tabel IV.1.5
Ketercapaian Indikator SDGs/TPB Kabupaten Tanjung Jabung Timur (2022)
Dimensi Hukum

Tujuan	Tujaun	Indikator SDGs/TPB	Pecapaian Indikator SDGs/TPB			Target	
			Tercapai	Belum Tercapai	Data Tidak Tersedia	Sudah di Targetkan	Belum di Targetkan Sebelumnya
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	20	6	2	12	10	10

Sumber : Hasil Analisa, 2023



Gambar 4.1.12
Target Realisasi SDGs/TPB Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dimensi Hukum dan Tata Kelola



Gambar 4.1.13
Target Realisasi SDGs/TPB Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dimensi Hukum dan Tata Kelola

4.2 IDENTIFIKASI DAN PERUMUSAN ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

4.2.1 Isu Pembangungan Berkelanjutan (PB) Strategis (Karakteristik Lingkungan Yang Berpotensi Terkena Dampak)

4.2.1.1 Pelingkupan Isu Pembangunan Berkelanjutan

Identifikasi dan Pelingkupan Isu Strategis dilakukan dalam sebuah lokakarya yang melibatkan pemangku kepentingan. Tim Kerja KLHS mempelajari berbagai data dan informasi terkait kondisi fisik, lingkungan, kependudukan, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya untuk keperluan penyusunan pra pelingkupan. Diskusi dengan metode *brainstorming* dilakukan untuk mengkonfirmasi hasil prapelingkupan dan menggali isu-isu lain yang belum tercantum pada hasil prapelingkupan tersebut.

Tabel IV.2.1
Longlist Isu PB

No.	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Sumber Rumusan Isu
1	Beralihnya lahan pertanian ke lahan perkebunan dan perumahan	Dinas PUPR Bidang Tata Ruang
2	Lahan sawah yang tidak diperuntukan sebagai lahan pangan	Dinas PUPR Bidang Tata Ruang
3	Hubungan antara izin penataan ruang dengan OSS yang masih belum disosialikan kepada masyarakat	Dinas PUPR Bidang Tata Ruang
4	Banyaknya masyarakat lokal yang melakukan transaksi ekonomi di luar wilayah Kabupaten	Dinas PUPR Bidang Tata Ruang
5	Belum adanya investasi untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang merupakan daerah penyangga di provinsi jambi	Dinas PUPR Bidang Tata Ruang
6	Metode yang digunakan dalam penyusunan KLHS-RPJMD di 5 tahun kedepan mengikuti aturan yang berlaku	Dinas PUPR Bidang Tata Ruang
7	Adanya Desa yang termasuk kedalam kawasan KHG	Dinas PUPR Bidang Tata Ruang
8	Banyaknya masyarakat yang masuk Batas kawasan hutan Produksi	Dinas PUPR Bidang Tata Ruang
9	Belum optimalnya perbaikan infrastruktur	Dinas PUPR Bidang Tata Ruang
10	Belum optimalnya kualitas jalan mantap dalam kondisi baik	Dinas PUPR Bidang Tata Ruang
11	Melemahnya transformasi PDRB	Dinas PUPR Bidang Tata Ruang
12	Belum adanya penetapan Harga kopi dan pinang yang dapat membantu peningkatan ekonomi masyarakat	Dinas Perkebunan
13	Belum tersedianya produk akhir (pabrik) dalam pengolahan kopi dan pinang	Dinas Perkebunan
14	pemanfaatan energi terbarukan dari nabati kelapa sawit belum maksimal	Dinas Perkebunan
15	Kebakaran hutan dan lahan	BPBD

No.	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Sumber Rumusan Isu
16	Kesadaran masyarakat untuk relokasi dari kawasan rawan bencana masih kurang	BPBD
17	Terbatasnya akses nelayan terhadap permodalan	Dinas Perikanan
18	Terbatasnya Kualitas SDM nelayan	Dinas Perikanan
19	Belum optimalnya penerapan teknologi budidaya ikan air laut dan air tawar	Dinas Perikanan
20	Tingkat kemiskinan nelayan masih tinggi	Dinas Perikanan
21	Banyaknya alat tangkap nelayan dalam kondisi rusak sehingga mengakibatkan berkurangnya produktivitas nelayan	Dinas Perikanan
22	Minimnya tenaga ahli dan terampil di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Dinas Nakertrans
23	Sanitasi di kabupaten tanjung jabung timur masih belum merata	Dinas Lingkungan Hidup
24	Distribusi Air Bersih di beberapa daerah belum merata	Dinas Lingkungan Hidup
25	Tingginya kandungan asam di kawasan dermaga sehingga merusak infrastruktur	Dinas Lingkungan Hidup
26	Minimnya tenaga ahli di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Dinas Lingkungan Hidup
27	Minimnya Pemberdayaan SDM	Dinas Nakertrans
28	Terdapat beberapa daerah rawan kecelakaan karena minimnya infrastruktur	DISHUB
29	Jumlah dermaga di Kabupaten masih kurang memadai secara infrastruktur	DISHUB
30	Belum adanya kerjasama produk UMKM dengan investor pendirian indomaret dan alfamart dan kesepakatan berapa persen yang akan didistribusikan	Dinas Koperasi dan Umkm
31	Belum optimalnya kesetaraan Gender di Tanjung Jabung Timur	Dinas Sosial PPA
32	Pementasan kawasan permukiman kumuh	Dinas Perkim
33	Minimnya kunjungan wisatawan akibat rusaknya infrastruktur wisata di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Dinas pariwisata

Sumber : FGD Pelingkupan Isu tahun 2023

4.2.1.2 Pemusatan Isu

Setelah proses pra-pelingkungan dilakukan, tahap berikutnya adalah proses pemusatan terhadap isu strategis pembangunan berkelanjutan. Pada tahap ini dilakukan seleksi atau pemilihan terhadap isu strategis pembangunan berkelanjutan yang paling prioritas. Proses pelingkungan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Memeriksa duplikasi terhadap berbagai isu strategis yang diidentifikasi pada tahap pra-pelingkupan. Hal ini dilakukan sebagai satu langkah awal sebelum memeriksa isu-isu ini menggunakan kriteria strategis.

- Memilih isu strategis yang paling signifikan berdasarkan kriteria strategis yang ditetapkan, yaitu: (1) karakteristik; (2) tingkat penting dampak; (3) potensi dampak kumulatif & efek ganda; serta (4) penyebab; (5) bersifat lintas sektor. Setiap isu strategis yang diidentifikasi diberi nilai berdasarkan kriteria untuk mendapatkan isu prioritas.
- Memilih isu yang memiliki dimensi keruangan untuk dianalisis lebih jauh.

Tabel IV.2.2
Pemusatan Isu PB

Kelompok Isu	Isu PB Sejenis	Isu PB Strategis
Sosial Budaya	Kesetaraan Gender (LH1)	Belum optimalnya kesetaraan Gender di Tanjung Jabung Timur
	Sumber Daya Manusia (LH2)	Terbatasnya Kualitas SDM nelayan
		Minimnya tenaga ahli dan terampil di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
		Minimnya tenaga ahli di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
		Minimnya Pemberdayaan SDM
		Tenaga kesehatan belum tersedia merata
Lingkungan	Resiko Rawan Bencana (LH3)	Kebakaran hutan dan lahan
		Kesadaran masyarakat untuk relokasi dari kawasan rawan bencana masih kurang
	Alih fungsi Lahan (LH4)	Beralihnya lahan pertanian ke lahan perkebunan dan perumahan
		Lahan sawah yang tidak diperuntukan sebagai lahan pangan
		Banyaknya masyarakat yang masuk Batas kawasan hutan Produksi
		Adanya Desa yang termasuk kedalam kawasan KHG
		Banyaknya masyarakat yang masuk Batas kawasan hutan Produksi
	Permukiman Layak Huni (LH5)	Pementasan kawasan permukiman kumuh
		Sanitasi di kabupaten tanjung jabung timur masih belum merata
		Distribusi Air Bersih di beberapa daerah belum merata
Ekonomi	Investasi dan Permodalan (LH6)	Hubungan antara izin penataan ruang dengan OSS
		Belum adanya investasi untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang merupakan daerah penyangga
		Hubungan antara izin penataan ruang dengan OSS yang masih belum disosialikan kepada masyarakat
		Belum adanya kerjasama produk UMKM dengan investor pendirian indomaret dan alfamart
		Belum adanya investasi untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang merupakan daerah penyangga di provinsi jambi
		Melemahnya transformasi PDRB
		Belum adanya penetapan Harga kopi dan pinang yang dapat membantu peningkatan ekonomi masyarakat
		Belum tersedianya produk akhir (pabrik) dalam pengolahan kopi dan pinang
		Terbatasnya akses nelayan terhadap permodalan
		Belum optimalnya penerapan teknologi budidaya ikan air laut dan air tawar
		Tingkat kemiskinan nelayan masih tinggi
		Banyaknya alat tangkap nelayan dalam kondisi rusak sehingga mengakibatkan berkurangnya produktivitas nelayan

Kelompok Isu	Isu PB Sejenis	Isu PB Strategis
		Banyaknya masyarakat lokal yang melakukan transaksi ekonomi di luar wilayah Kabupaten
	Pariwisata (LH7)	Minimnya kunjungan wisatawan akibat rusaknya infrastruktur wisata di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
	Transportasi (LH8)	Jumlah dermaga di Kabupaten masih kurang memadai secara infrastruktur
		Belum optimalnya perbaikan infrastruktur
		Belum optimalnya kualitas jalan mantap dalam kondisi baik
		Tingginya kandungan asam di kawasan dermaga sehingga merusak infrastruktur
		Terdapat beberapa daerah rawan kecelakaan karena minimnya infrastruktur
		Jumlah dermaga di Kabupaten masih kurang memadai secara infrastruktur

Sumber : Plingkupan Isu, Tahun 2023

4.2.1.3 Kesetaraan Gender

Gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan. Gender adalah pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat.

Gender tidak sama dengan kodrat. Kodrat adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Tuhan YME, sehingga manusia tidak mampu untuk merubah atau menolak. Sementara itu, kodrat bersifat universal, misalnya melahirkan, menstruasi dan menyusui adalah kodrat bagi perempuan, sementara mempunyai sperma adalah kodrat bagi laki-laki.

Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari pada sistem tersebut. Laki-laki dan perempuan berbeda hanya karena kodrat antara laki-laki dan perempuan berbeda. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis.

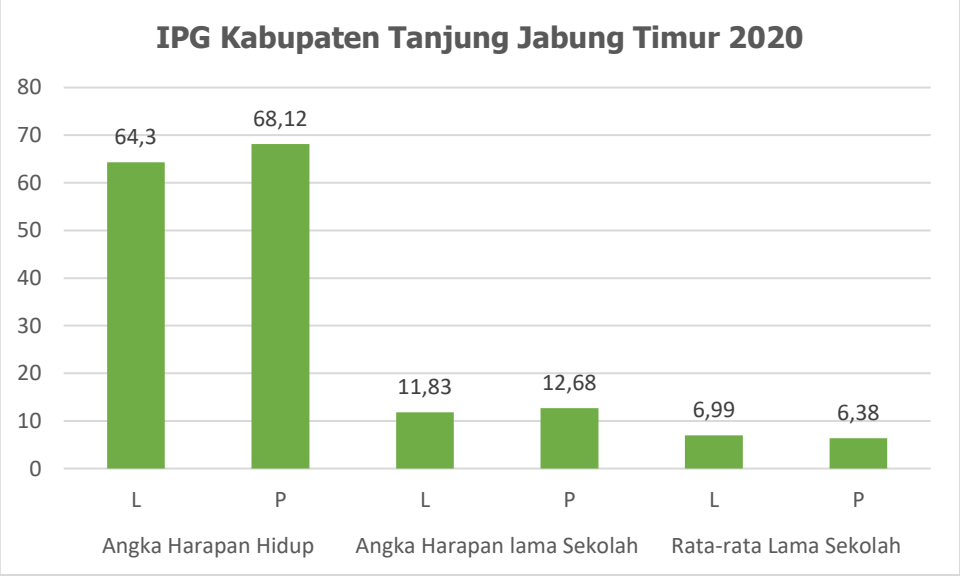
Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari pada sistem tersebut. Laki-laki dan perempuan berbeda hanya karena kodrat antara laki-laki dan perempuan berbeda. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di

mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis. Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.2.3
Angka Indeks Pembangunan Gender
di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

No	Uraian	Jenis Kelamin	Tahun			
			2017	2018	2019	2020
1	Angka Harapan Hidup	L	63,7	63,87	64,08	64,3
		P	65,57	67,75	67,97	68,12
2	Angka Harapan Lama Sekolah	L	11,48	11,49	11,5	11,83
		P	11,98	12,37	12,67	12,68
3	Rata-Rata Lama Sekolah	L	6,79	6,84	6,85	6,99
		P	6,01	6,02	6,03	6,38
4	Pengeluaran Perkapita Yang Sudah Disesuaikan	L	13.695	14.206	14.872	14.594
		P	5.939	6.191	6.387	6.263
Indeks Pembangunan Gender			**85,56**	**87,3**	**87,86**	**87,5**

Sumber: BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2021



Gambar 4.2.1
Angka Indeks Pembangunan Gender
di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Informasi mengenai kesetaraan gender di Kabupaten Tanjung Timur di sektor formal dapat juga dilihat dari jumlah pegawai negeri sipil dan anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil

Perempuan diposisi kepemimpinan seperti pemerintah di tingkat eksekutif, legislatif, peradilan dan penegak hukum, serta perusahaan milik publik atau swasta. Jabatan manajer menurut Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI) dan berdasarkan data BPS tahun 2023 meliputi: Pimpinan Eksekutif, Pejabat Tinggi Pemerintah dan Pejabat Pembuat Peraturan Perundang-undangan, Manajer Administrasi dan Komersial ; Manajer Produksi dan Pelayanan Khusus ; dan Manajer Jasa Perhotelan, Perdagangan, dan Jasa Lainnya. Perempuan di posisi kepemimpinan pemerintah (Menteri, Gubernur, pemerintah (Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota, Eselon I-II) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk tahun 2021 sebanyak 4.296 orang mengalami penurunan pada tahun 2022 sebanyak 3.893 orang.

Tabel IV.2.4
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kab Tanjab Timur 2021-2022

No	Partai Politik	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Fungsional Tertentu	771	1.285	2.056	841	1.327	2.168
2	Fungsional Umum	612	403	1.015	593	394	987
3	Struktural	427	186	613	275	94	369
4	Eselon V	-	-	0	-	-	0
5	Eselon IV	273	160	433	111	64	175
6	Eselon III	119	25	144	130	28	158
7	Eselon II	34	1	35	34	2	36
8	Eselon I	-	-	0	-	-	0
Jumlah		**2.236**	**2.060**	**4.296**	**1.984**	**1.909**	**3.893**

Sumber: Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Angka 2023

2. Keterwakilan Perempuan

Perempuan diposisi kepemimpinan seperti pemerintah di tingkat eksekutif, legislatif, peradilan dan penegak hukum, serta perusahaan milik publik atau swasta. Jabatan

Setiap partai politik harus mengisi kuota perempuan minimal 30 orang, hal ini terangkum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 7/2013 pasal 27 ayat (1) huruf b menyangkut kuota 30 persen keterwakilan calon legislatif (caleg) perempuan di setiap daerah pemilihan (dapil). Ketentuan 30 persen caleg harus perempuan ini dimaksudkan untuk memberikan akses yang memadai bagi kaum

perempuan agar dapat berpartisipasi dalam proses politik dan bernegara. Berdasarkan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam Angka 2022, jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Menurut Partai Politik yaitu, jumlah keikutsertaan perempuan dalam partai politik PAN sebanyak 17 orang, Golkar sebanyak 4 orang dan PDIP sebanyak 3 orang sehingga total dari partai politik sebanyak 30 orang.

Tabel IV.2.5
Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin, 2021-2022

No	Partai Politik	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	PAN	12	5	17	12	5	17
2	GOLKAR	2	2	4	2	2	4
3	PDIP	2	1	3	2	1	3
4	PBB	3	-	3	1	-	1
5	GERINDRA	-	-	0	2	-	2
6	HANURA	3	-	3	1	-	1
7	NASDEM	-	-	0	2	-	2
Jumlah		**22**	**8**	**30**	**22**	**8**	**30**

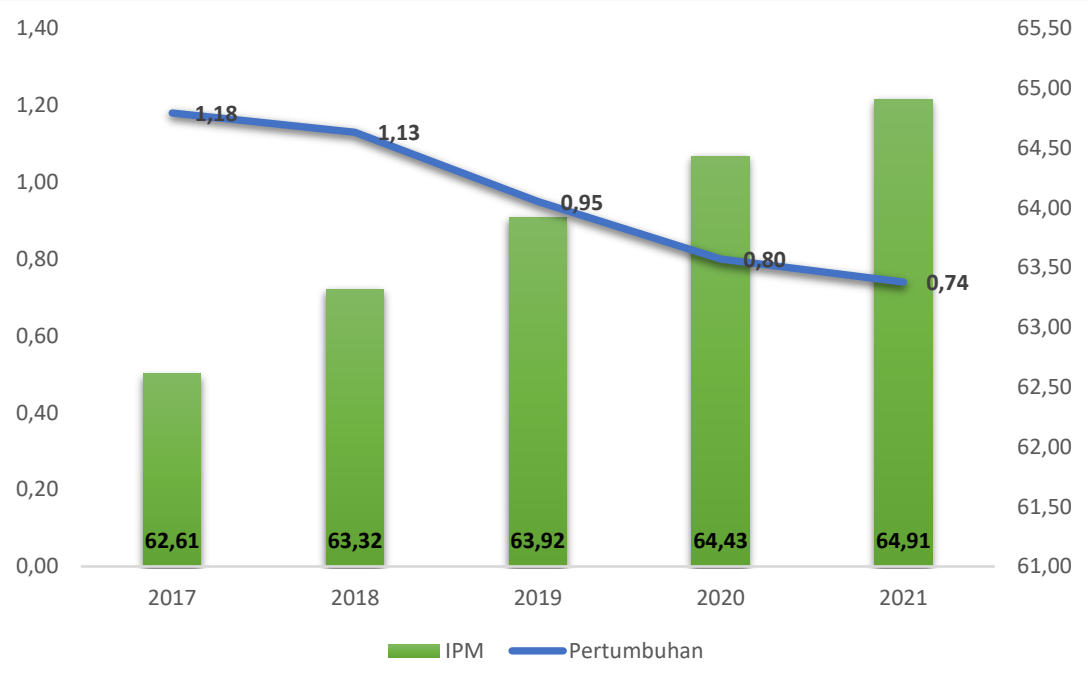
Sumber: Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Angka 2023

4.2.1.4 Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari IPM di suatu daerah, Human Development Index (HDI), yang dimaknai sebagai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), merupakan suatu ukuran gabungan tiga dimensi tentang pembangunan manusia, yaitu : panjang umur dan menjalani hidup sehat (diukur dari usia harapan hidup), terdidik (diukur dari tingkat kemampuan baca tulis orang dewasa dan tingkat pendaftaran di sekolah dasar, lanjutan dan tinggi) serta standar hidup yang layak (diukur dari paritas daya beli).

Pembangunan manusia merupakan suatu proses manusia agar mampu memiliki pendapatan, kesehatan, pendidikan, lingkungan fisik, dan sebagainya yang lebih baik. Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan dengan melihat perkembangan indeks pembangunan manusia (IPM) yang mencerminkan pencapaian kemajuan dibidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. IPM Kabupaten Tanjung

Jabung Timur tahun 2021 tercatat sebesar 64,91. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat 64,43.



Sumber: Statistik Daerah kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022

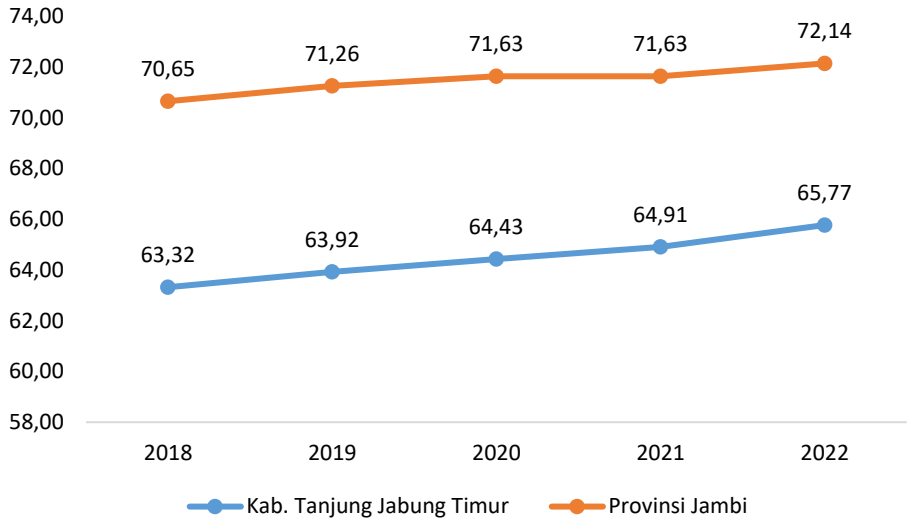
Gambar 4.2.2
Grafik Persentase Penduduk yang Bekerja menurut Tingkat Pendidikan
Di Kab. Tanjung Jabung Timur, 2017-2021

IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah daerah adalah daerah maju, daerah berkembang atau daerah terbelakang. Selain itu pula untuk mengukur pengaruh dari kebijakan pembangunan terhadap kualitas hidup. IPM Kab. Tanjab Timur meningkat dari tahun 2018 hingga 2022. Nilai IPM Kab. Tanjab Timur pada tahun 2022 mencapai 65,77%.

Tabel IV.2.6
Pembangunan Manusia (IPM) Kab. Tanjab Timur dan Provinsi Jambi
Tahun 2018 - 2022

No	Wilayah	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kab. Tanjung Jabung Timur	63,32	63,92	64,43	64,91	65,77
2	Provinsi Jambi	70,65	71,26	71,63	71,63	72,14

Sumber: Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Angka 2023



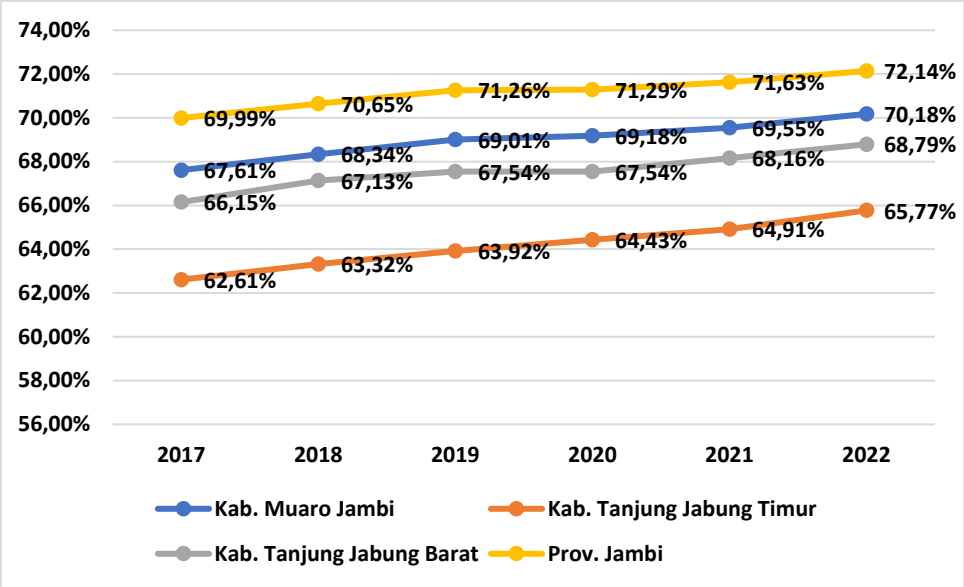
Gambar 4.2.3
Grafik Pembangunan Manusia (IPM)
Kab. Tanjab Timur dan Prov. Jambi Tahun 2018 - 2022

Jika dibandingkan dengan IPM Provinsi Jambi, nilai IPM Kab. Tanjab Timur dari tahun ke tahun selalu menurun dan masih di bawah IPM Provinsi Jambi sebagaimana ditunjukkan pada grafik di atas. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Kab. Tanjab Timur memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakatnya di Kab Tanjab Timur.

Tabel IV.2.7
Perkembangan Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
di Wilayah Sekitar Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia IPM (%)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kab. Muaro Jambi	67,61%	68,34%	69,01%	69,18%	69,55%	70,18%
Kab. Tanjung Jabung Timur	62,61%	63,32%	63,92%	64,43%	64,91%	65,77%
Kab. Tanjung Jabung Barat	66,15%	67,13%	67,54%	67,54%	68,16%	68,79%
Prov. Jambi	69,99%	70,65%	71,26%	71,29%	71,63%	72,14%

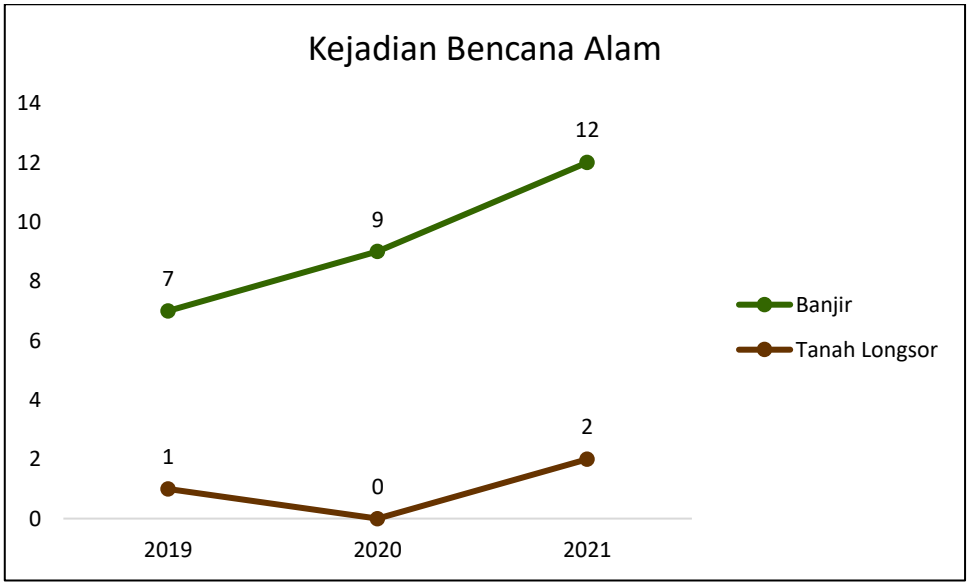
Sumber: Provinsi Jambi Dalam Angaka Tahun 2023



Gambar 4.2.4
Grafik Perkembangan Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Wilayah Sekitar Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

4.2.1.5 Kebencanaan

Berdasarkan karakteristik wilayah dengan kondisi saat ini, maka bencana yang rawan terjadi bencana di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ada 2 (dua) jenis yaitu bencana banjir dan tanah longsor. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Angka, 2023

Gambar 4.2.5
Grafik Bencana Alam yang Terjadi di Kab. Tanjab Timur dan Prov. Jambi Tahun 2018 - 2022

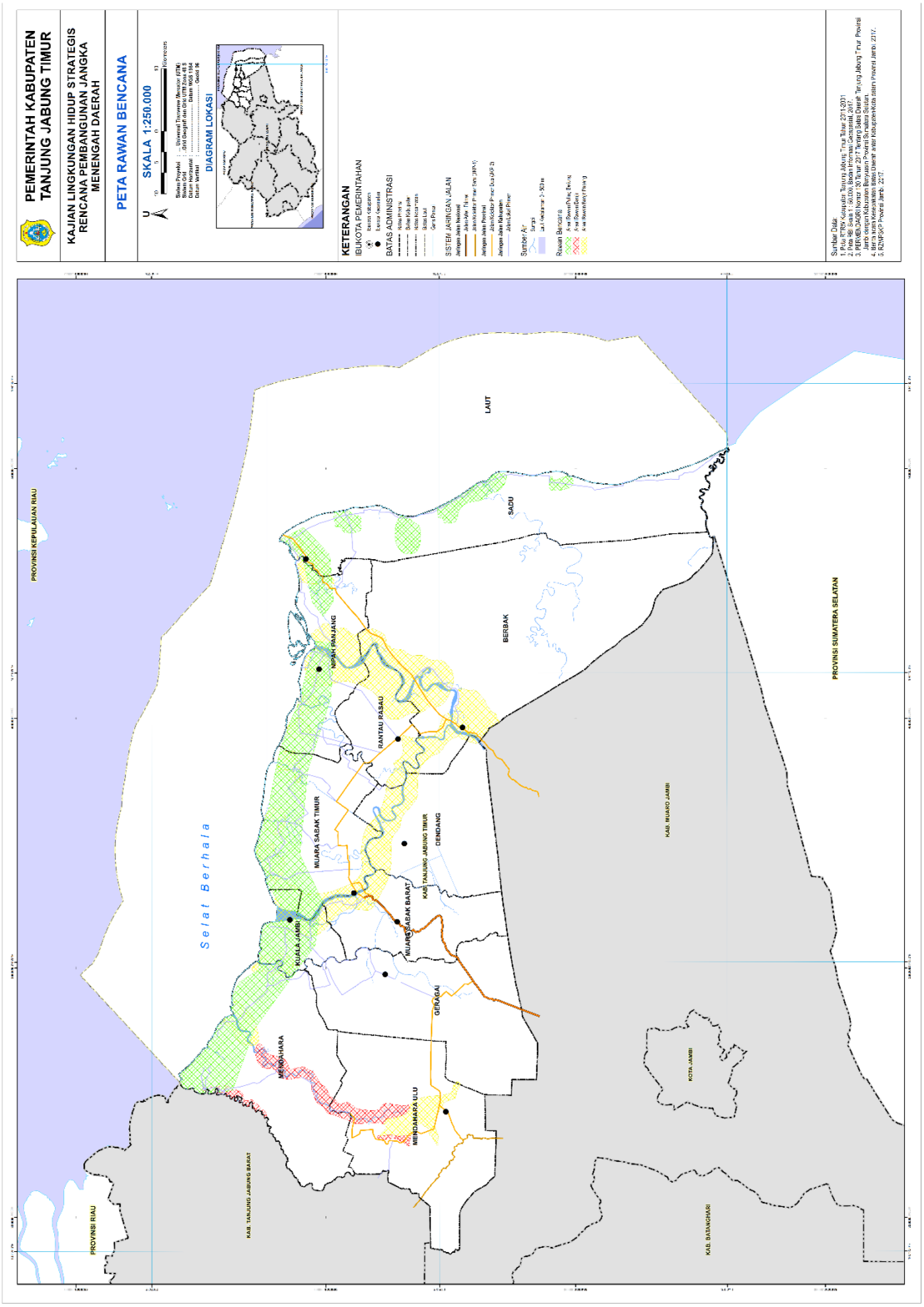
Berdasarkan tabel mengenai kejadian bencana alam di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari tahun 2019-2021 mengalami peningkatan pada bencana banjir dimana pada tahun 2019 terjadi sebanyak 7 kali bencana banjir pada Desa Mendahara Ulu dan Desa Kecamatan Geragai, keadaan ini meningkat pada tahun 2020 sebanyak 9 kali bencana banjir yang melanda 4 Desa/Kelurahan meliputi Desa Mendahara Ulu, Desa Geragai, Desa Dendang, serta Desa Berbak dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan dengan 12 kali bencana banjir yang melanda 3 Desa/Kelurahan. Bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dipicu beberapa faktor seperti Kawasan yang dilewati aliran sungai, musim hujan yang terjadi pada beberapa wilayah dengan intensitas tinggi serta kontur daerah yang agak landai.

Selain bencana banjir yang melanda Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bencana tanah longsor terjadi sebanyak 2 kali pada tahun 2021 tepatnya di Desa/ Kelurahan Mendahara.

Salah satu strategi dalam memitigasi bencana di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah dengan meningkatkan keswadayaan masyarakat, salah satunya dengan membentuk desa tangguh bencana.

Tabel IV.2.8
Desa Tangguh Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Timur

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Tahun Pembentukan	Jumlah Anggota	Sumber
1	Kec. Berbak	Desa Rantau Makmur	2015	30	APBN
		Desa Rawasari	2015	30	APBN
2	Kec. Mendahara	Desa Lagan Ilir	2015	10	APBD KAB
		Kel. Mendahara	2016	10	APBD KAB
3	Kec. Kuala Jambi	Desa Majelis Hidayah	2015	10	APBD KAB
		Kel. Kampung Laut	2016	10	APBD KAB
		Kel. Tanjung Solok	2017	10	APBD PROV
4	Kec. Muara Sabak Timur	Desa Lambur Luar	2015	10	APBD KAB
		Desa Simbur Naik	2016	10	APBD KAB
		Desa Lambur	2017	10	APBD KAB
		Desa Kuala Simbur	2017	10	APBD KAB
		Kel. Teluk Dawan	2019	10	APBD KAB
5	Kec. Geragai	Desa Pandan Sejahtera	2016	30	APBD KAB
		Desa Rantau Karya	2016	30	APBD KAB
		Desa Pandan Makmur	2019	25	PETRO
		Desa Pandan Lagan	2019	25	PETRO
		Desa Kota Baru	2019	10	APBD KAB
		Desa Suka Maju	2019	10	APBD KAB
6	Kec. Dendang	Desa Catur Rahayu	2016	30	APBD KAB
		Desa Jati Mulyo	2019	40	APBD PROV
7	Kec. Mendahara Ulu	Desa Pematang Rahim	2017/2019	25	PETRO
8	Kec. Nipah Panjang	Desa Simpang Datuk	2018	10	APBD KAB
9	Kec. Sadu	Desa Remau Baku Tuo	2018	10	APBD KAB
		Desa Sungai Cemara	2018	10	APBD KAB
JUMLAH				**415**	

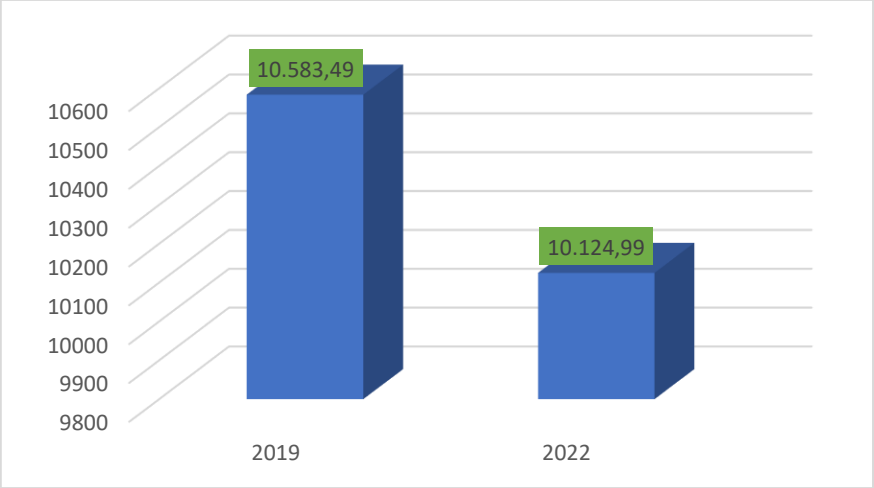


Gambar 4.2.6
Peta Rawan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Timur

4.2.1.6 Alih Fungsi Lahan

Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan salah satu lumbung pangan Provinsi Jambi. Sentra padi yang berada dikawasan permukiman transmigrasi Kecamatan rantau rasau dan Nipah Panjang ini dikembangkan dengan harapan dapat meningkatkan efektifitas penggunaan lahan, agar dapat berproduksi 2 kali dalam setahun. Sentra padi yang berada dikawasan transmigrasi Kecamatan Rantau Rasau dan Nipah Panjang.

Luas Lahan sawah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2019 berdasarkan SK Menteri ATRBPN 686-SK_PG-03_03-XII-2019 mencapai 10.583,49 Hektar pada tahun 2022 terjadi alih fungsi lahan, sebagian lahan pertanian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur beralih fungsi menjadi perkebunan dan permukiman. Luas lahan sawah berdasarkan data Lahan Sawah Dilindungi (LSD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2022 seluas 10.124,99 Hektar. Berdasarkan penjelasan sebelumnya diketahui terdapat penurunan luas lahan sawah seluas 458,5 hektar.



Gambar 4.2.7
Grafik Luas Lahan Sawah Tahun 2019 dan Tahun 2020
di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

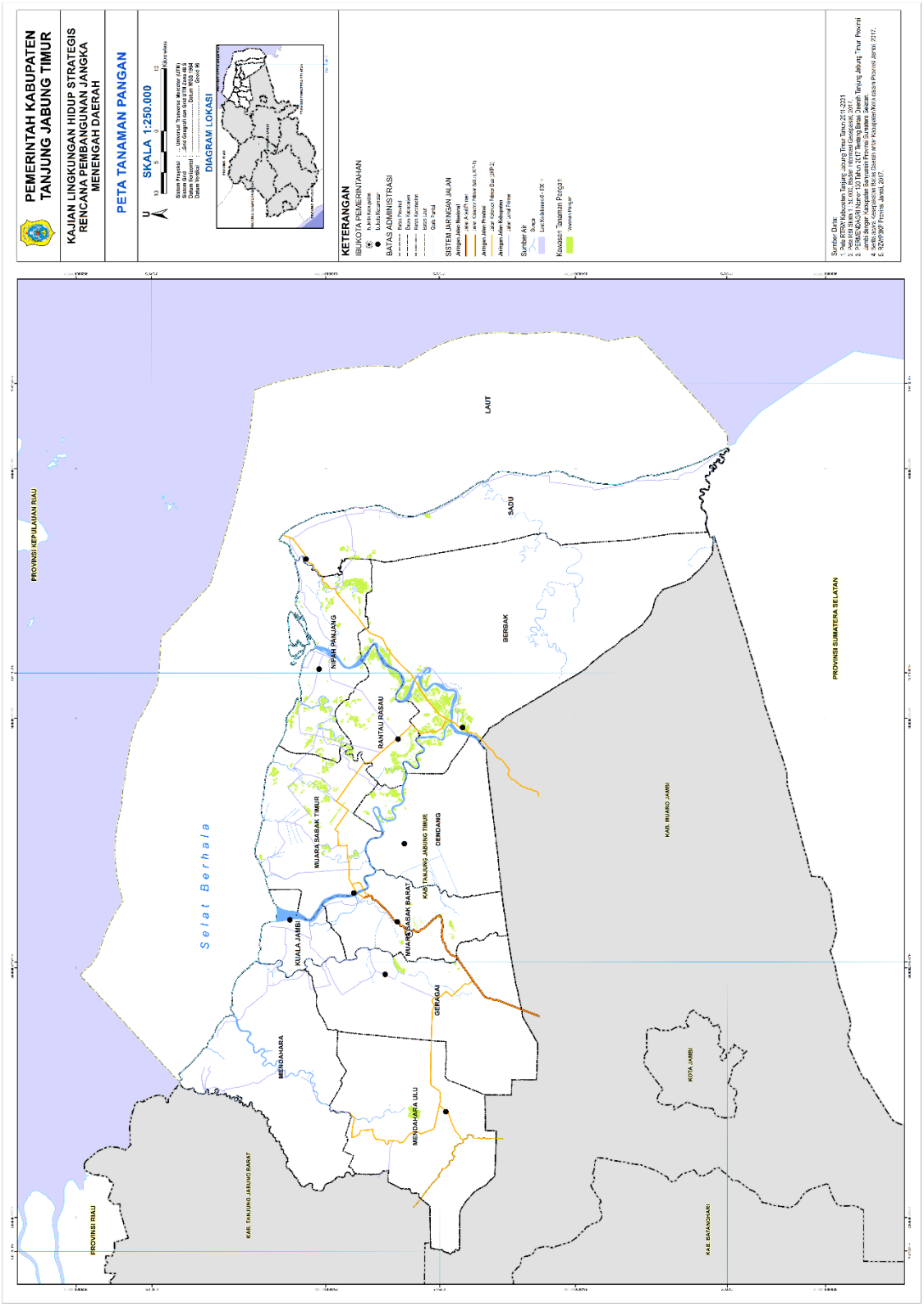
Luas panen padi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2010 seluas 31.274 Ha, sedangkan pada tahun 2022 luas panen terbesar pada tanaman pangan dengan jenis tanaman padi sebesar yakni hanya 8.844,5 Ha, hal ini menunjukkan bahwa terjadi

penurunan yang signifikan terhadap kawasan tanaman pangan yang disebabkan oleh berbagai macam faktor, salah satunya adalah adanya alih fungsi lahan.

Tabel IV.2.9
Luas Panen Tanaman Pangan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Ha), Tahun 2022

No	Kecamatan	Padi	Jagung	Kedelai	Kacang Tanah	Ubi Kayu	Ubi Jalar
1	Mendahara	0	20	0	0	4	4
2	Mendahara Ulu	0	0	0	0	0	0
3	Geragai	439,8	0	12	6	19	19
4	Dendang	1.008,1	254	21	17	11	11
5	Muara Sabak Barat	301,5	37	0	0	0	0
6	Muara Sabak Timur	936,9	79	0	16	30	30
7	Kuala Jambi	0	0	0	0	0	0
8	Rantau Rasau	1.668,2	182,9	93,8	27,8	16	16
9	Berbak	1.789,9	358,8	4	1	2	2
10	Nipah Panjang	2.701	0	0	0	4	4
11	Sadu	0	0	0	0	3	3
Jumlah		**8.8445,4**	**931,7**	**130,8**	**67,8**	**89**	**7.038**

Sumber: Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Angka 2023



Gambar 4.2.8
Peta sebaran tanaman pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

4.2.1.7 Permukiman Layak Huni

Wilayah timur Provinsi Jambi merupakan bagian dari kawasan pantai timur Sumatera yang ditunjukan dengan ciri-ciri tenggelamnya dataran rendah dibawah permukaan pada zaman QuarterTua oleh sebab itu wilayah ini agak datar dan keadaan tata airnya dikendalikan oleh gradient sangat kecil sehingga drainase terhambat dengan akibat penggenangan yang luas dan bersifat permanen membentuk rawa-rawa.

Bentuk wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Kecamatan Muara Sabak Timur, Rantau Rasau, Berbak, Nipah Panjang dan Kecamatan Sadu) merupakan dataran landai. Wilayah ini merupakan cekungan yang membentuk rawa belakang yang jenuh air sehingga air tidak dapat menembus tanah atau mengalir sebagai run off, sehingga air terjebak berupa rawa. Air permukaan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi masalah terutama pada musim penghujan yang berpotensi menggenangi areal permukiman.

Layak tidaknya keadaan perumahan untuk menjadi tempat hunian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat dari kondisi air minum, sanitasi, kecukupan luas lantai hunian, penerangan, serta jenis bahan bangunan yang digunakan baik untuk lantai, dinding, maupun atap (durability of housing).

Tabel IV.2.10
Indikator Perumahan di Kab. Tanjab Timur tahun 2019-2021

No	Uraian	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)
Rumah Tangga Menurut Kualitas Perumahanan Luas Lantai <36 m^2				
Rumah Layak Huni				
1	Luas Lantai Perkapita > 7,2 m^2	96,11	98,90	97.49
2	Air Minum Layak	32,78	85,42	85,91
3	Penerangan Layak	90,99	95,44	99,46
4	*Durability of Housing*			
	Atap Layak	98,90	98,48	99,50
	Dinding Layak	97,57	99,99	100
	Jenis Lantai Layak	98,74	98,44	99,23

Sumber: Statistik Daerah kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Angka 2022

Pada tahun 2021, persentase indikator kecukupan luas lantai hunian (97,49 persen); air minum layak (85,91 persen), serta penerangan layak (99,46 persen).

Mayoritas luas lantai rumah tangga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur seluas 50-99 meter persegi, yaitu sebesar 52,97 persen di tahun 2021. Sedangkan sumber air minum utama yang digunakan penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu Air Hujan sebesar 47,39 persen. Diikuti oleh Air Kemasan Bermerk/Isi Ulang sebesar 43,58 persen; Sumur Bor/Pompa (2,76 persen); Sumur Terlindung (2,90 persen); Sumur Tak Terlindung (2,16 persen); serta Mata Air Terlindung/Tak Terlindung (0,10 persen).

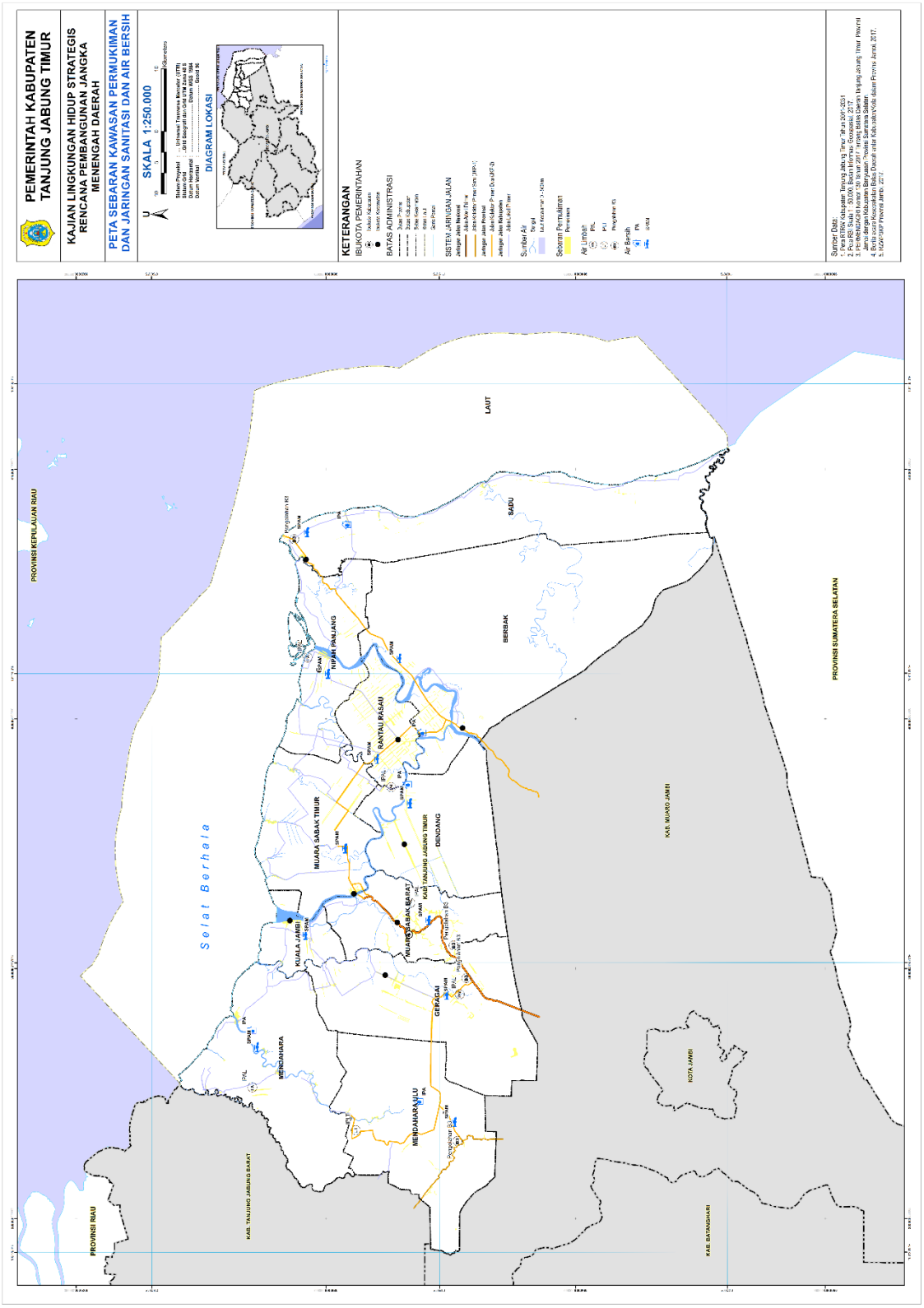
Sementara untuk sanitasi, berdasarkan data LKPJ Dinas perumahan dan permukiman Tanjung Jabung Timur tahun 2022. Capaian program Dinas perumahan dan permukiman Tanjung Jabung Timur tahun 2022 pada program Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah terdapat indikator presentase sanitasi layak dengan target 73,29% dan realisasi pada tahun 2022 sebesar 47,50%.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur 472 Tahun 2014 tentang penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Tanjung Jabung Timur lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berada di 4 (empat) Kecamatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV.2.11
Lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh
di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Rumah Tangga (2019)	Tingkat Kumuh
Nipah Panjang	Nipah Panjang II	2.230	Kumuh Berat
Mendahara	Mendahara ilir	2.156	Kumuh Berat
Geragai	Pandan Jaya	1.880	Kumuh Berat
Muara Sabak Timur	MSI	915	Kumuh Berat
	MSU	763	Kumuh Berat
Kuala Jambi	Kampung Laut	1045	Kumuh Berat
	Tanjung Solok	1116	Kumuh Berat
Total		**10.105**	

Sumber : SK Bupati Tanjung Jabung Timur 472 Tahun 2014



Gambar 4.2.9
Peta sebaran permukiman dan jaringan sanitasi/air bersih di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

4.2.1.8 Investasi dan Permodalan

Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggi merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap daerah. Namun manfaat tersebut harus juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, aspek pemerataan juga menjadi pertimbangan penting dalam keberhasilan pembangunan.

PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas dasar harga berlaku tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 25.606,10 Milyar Rupiah. Sedangkan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas dasar harga konstan 2021 adalah sebesar Rp. 21.881,32 Milyar Rupiah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.2.12
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Milyar Rupiah), 2018-2022

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.281,99	4.519,19	4.733,25	5.102,20	5.489,65
B	Pertambangan dan Penggalian	12.586,05	12.380,38	6.882,58	8.482,18	11.015,37
C	Industri Pengolahan	1.726,57	1.738,73	1.754,33	1.801,77	2.043,81
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,14	4,43	4,69	5,03	5,60
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13,90	14,83	16,00	16,83	18,23
F	Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran;	1.022,92	1.123,41	1.147,41	1.260,86	1.316,06
G	Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.669,03	1.810,79	1.794,79	1.889,78	2.164,46
H	Transportasi dan Pergudangan	283,27	302,19	290,11	311,24	365,19
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	89,53	95,05	87,78	92,06	99,84
J	Informasi dan Komunikasi	357,28	405,99	435,49	459,12	489,35
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	184,20	198,66	206,40	216,30	228,40
L	Real Estate	128,98	154,24	155,49	164,82	176,90
M,N	Jasa Perusahaan	299,07	329,67	334,17	344,22	416,50
0	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	535,50	578,00	580,00	602,50	605,51
P	Jasa Pendidikan	733,17	819,20	852,20	888,33	930,22
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	120,38	133,95	151,65	167,75	157,39
R,S,T,U	Jasa lainnya	65,74	72,88	73,58	76,33	83,62
Produk Domestik Regional Bruto		**24.101,72**	**24.681,59**	**19.499,92**	**21.881,32**	**25.606,10**

Sumber: Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Angka 2023

Tabel IV.2.13
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Milyar Rupiah), 2018-2022

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.674,73	2.753,59	2.829,63	2.852,30	2.897,87
B	Pertambangan dan Penggalian	9.931,89	10.366,87	9.592,37	9.457,76	9.463,67
C	Industri Pengolahan	1.216,71	1.220,11	1.235,32	1.228,22	1.256,07
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,13	2,20	2,32	2,46	2,67
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,71	10,24	10,94	11,47	11,98
F	Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran;	745,36	801,53	800,78	855,83	854,61
G	Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	938,18	996,23	966,23	990,95	1.039,32
H	Transportasi dan Pergudangan	176,60	185,78	182,23	195,21	213,50
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	57,36	58,76	54,50	56,70	60,59
J	Informasi dan Komunikasi	222,33	239,44	257,94	271,21	289,81
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	119,77	124,38	126,52	130,06	129,63
L	Real Estate	90,60	98,87	98,69	101,52	102,94
M,N	Jasa Perusahaan	177,67	183,59	173,77	178,04	195,16
0	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	285,34	298,33	297,33	302,52	297,96
P	Jasa Pendidikan	468,38	496,62	498,62	503,29	515,01
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	76,92	81,59	86,59	97,19	89,03
R,S,T,U	Jasa lainnya	47,51	49,47	48,72	50,19	52,09
Produk Domestik Regional Bruto		**17.241,19**	**17.967,60**	**17.262,50**	**17.284,92**	**17.471,91**

Sumber: Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Angka 2023

Sektor tertinggi dalam Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2022 berada pada sektor Pertambangan dan Penggalian dengan nilai sekitar 43,02%, dan di sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan nilai sekitar 21,44%. Lalu sektor terendah terdapat pada sektor Pengadaan Listrik dan Gas dengan nilai sekitar 0,02% dan sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dengan nilai sekitar 0,08%. Nilai secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel IV.2.14
Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (persen), 2018-2022

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	17,76	18,31	24,27	23,32	21,44
B	Pertambangan dan Penggalian	52,20	50,16	35,30	38,76	43,02
C	Industri Pengolahan	7,16	7,04	9,00	8,27	7,98
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,08	0,08	0,07
F	Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran;	4,24	4,55	5,88	5,76	5,14
G	Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,92	7,34	9,20	8,79	8,45
H	Transportasi dan Pergudangan	1,17	1,22	1,49	1,24	1,44
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,37	0,39	0,45	0,42	0,39
J	Informasi dan Komunikasi	1,47	1,64	2,23	2,10	1,91
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,78	0,80	1,06	0,99	0,89
L	Real Estate	0,58	0,62	0,80	0,75	0,69
M,N	Jasa Perusahaan	1,24	1,34	1,72	1,57	1,63
0	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,22	2,35	2,97	2,75	2,36
P	Jasa Pendidikan	3,04	3,32	4,37	4,06	3,63
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,50	0,54	0,78	0,77	0,61
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,27	0,30	0,38	0,35	0,33
Produk Domestik Regional Bruto		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Angka 2023

4.2.1.9 Pariwisata

Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggi merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap daerah. Namun manfaat tersebut harus juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, aspek pemerataan juga menjadi pertimbangan penting dalam keberhasilan pembangunan.

Untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat salah satu upaya yang dilakukan yaitu meningkatkan kualitas wisata yang ada di Kabupaten Tanjung jabung Timur. Potensi pariwisata yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur didominasi berada di Kecamatan Sadu dengan jumlah destinasi wisata sebanyak 6 (enam) destinasi wisata, Kecamatan Berbak memiliki 2 (dua) destinasi wisata, 3(tiga) destinasi wisata yang berada di Kecamatan Muara Sabak Barat, 1 (satu) destinasi wisata berada di Kecamatan Mendahara Ulu, Kecamatan Muara Sabak Timur memiliki 1 (satu) destinasi wisata, Kecamatan Geragai memiliki 1 (destinasi wisata),

Kecamatan Kandis memiliki 1 (satu) destinasi wisata dan Kecamatan Kuala Jambi memiliki 1 (satu) destinasi wisata. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV.2.15
Wisata Yang Berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

No	Nama Wisata	Lokasi
1	Cagar Alam Hutan Bakau Pantai Timur	Kecamatan Sadu
2	Pantai Cemara	Kecamatan Sadu
3	Pulau Berhala	Kecamatan Sadu
4	Pantai Air Hitam	Kecamatan Sadu
5	Wisata Air Hitam	Kecamatan Sadu
6	Pulau Penyu	Kecamatan Sadu
7	Taman Nasional Berbak	Kecamatan Berbak
8	Makam Rang Kayo Hitam	Kecamatan Berbak
9	Crocodile Safari	Kecamatan Muara Sabak Barat
10	Kawasan Perkantoran Bupati dan Masjid Agung Nur Addarojat	Kecamatan Muara Sabak Barat
11	Taman PKK Muara Sabak	Kecamatan Muara Sabak Barat
12	Ekosistem Hutan Desa Berbasis Konservasi	Kecamatan Mendahara Ulu
13	Taman Selaras Pinang Masak	Kecamatan Muara Sabak Timur
14	Sumber Mata Air Panas	Kecamatan Geragai
15	Kota Kandis	Kecamatan Dendang
16	Kampung Laut	Kecamatan Kuala Jambi

Sumber:https://tempatwisataseru.com/rekreasi-ke-tempat-wisata-di-tanjung-jabung timurjambi/

Dalam konteks isu, sektor pariwisata di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dikatakan belum terlalu berkembang dan berkonribusi terhadap sektor ekonomi wilayah. Namun sayangnya, belum ada data yang dapat dirujuk untuk dapat ditampilkan dalam menunjukan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pada dasarnya, Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki potensi pengembangan wisata karena posisi geografisnya yang berada di daerah pesisir. Posisi geografis ini juga menjadikan Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki sejarah panjang tentang bermulanya dan berkembangnya peradaban di wilayah pesisir



Provinsi Jambi ini, sehingga Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga memiliki kebudayaan yang khas. Potensi kebudayaan sangat berpotensi memberi dukungan terhadap perkembangan sektor pariwisata, karena dapat dijadikan sebagai atraksi wisata. terdapat beberapa potensi kebudayaan yang dimiliki Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Salah satu destinasi yang dapat diunggulkan karena dapat memadukan objek wisata dengan atraksi wisata adalah kawasan Pantai Air Hitam Laut.

Penamaan desa air hitam laut ini diambil dari nama sungai pasang surut yang membelah desa menjadi dua bagian, yaitu kawasan Parit kanan di sebelah utara dan kawasan Parit kiri dibagian selatan, serta air sungai nya jika dilihat dari pinggir Sungai berwarna hitam seperti kopi karena humusnya yang mengendap dari akar akar gambut sepanjang hilir sungai dan bermuara kelaut, sungai ini berukuran sedang mengalir dari arah barat (darat) ke arah laut (laut). Mungkin karena sungai ini sangat dominan dalam wilayah desa, maka desa pun diberi nama yang sama dengan nama sungai ini Desa air hitam.

Air Hitam Laut adalah salah satu desa di Kecamatan Sadu, Nipah Panjang & Muaro Sabak, 1 km dari Muaro Sabak, Kawasan dengan luas ± 6.500 ha ini memiliki keanekaragaman flora & fauna serta keindahan panorama. Merupakan kawasan obyek penelitian ekosistem hutan mangrove, habitat burung-burung air & burung migran, serta pengamatan satwa lainnya, terutama di Desa Remao Bakotuo dan Desa Cemara.

Di kawasan Air Hitam Laut terdapat dua ritual kebudayaan yaitu ritual cuci parit dan ritual mandi safar. Ritual Cuci parit merupakan tradisi masyarakat Desa Air Hitam laut sebagai bentuk Syukur kepada Alloh SWT yang telah memberikan berbagai

kesuburan pada hasil panennya, kegiatan ini dilaksankan pada awal Bulan Januari dimulai dari parit-parit yang ada sampai acara puncaknya di lapangan Desa.

Ritual mandi shafar merupakan ritual adat di desa Air hitam Laut Masyarakat air hitam laut dan desa sekitarnya melaksakan mandi bersama dengan di dampingi tokoh masyarakat dan tetua adat sambil mengarak menara safar yg dihiasi berbagai aksesoris makanan yang akan dilemparkan kepada masyarakat kembali sebagai symbol kecintaan pemimpin terhadap masyarakatnya.

Ritual Mandi Shafar adalah suatu upaya spiritual ke arah pendekatan diri kepada Allah yang dilakukan oleh sebagian masyarakat muslim di beberapa wilayah di Indonesia, di antaranya di beberapa wilayah di Nusa Tenggara Barat, Sulawesi, Kepulauan Riau, Maluku, Kalimantan, termasuk di salah satu wilayah di daerah Jambi.ritual ini dihadiri dan diikuti oleh ratusan bahkan ribuan warga masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, orang tua maupun orang muda yang datang dari desa-desa sekitar maupun dari daerah lainnya. Di antara masyarakat pelaku ritual ini, meskipun antara satu tempat dengan tempat yang lain mungkin ada beberapa perbedaan dalam proses pelaksanaannya, mereka percaya bahwa ritual mandi shafar dapat mencegah atau bahkan menghilangkan segala macam kesialan, wabah penyakit menular, bencana atau musibah yang akan atau telah datang, khususnya pada bulan Shafar. Hal ini tentunya di motivasi oleh sebuah kepercayaan di kalangan masyarakat luas bahwa Allah akan menurunkan dua belas ribu macam ujian atau cobaan kepada umat manusia pada bulan hafar, tepatnya pada hari Rabu minggu terakhir bulan Shafar.



4.2.1.10 Transportasi

Rencana sistem jaringan jalan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur meliputi jaringan jalan nasional, jaringan jalan provinsi, jaringan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten.

1. Jaringan Jalan Nasional

   Jaringan jalan nasional berupa jalan arteri primer meliputi :

   a) Batas Muaro Jambi/Tanjung Jabung Timur – Simpang Tuan – Simpang Tiga Betara;
   b) Batas Muaro Jambi/Tanjung Jabung Timur – Zona V (Simpang Pelabi) – Pelabuhan Muara sabak; dan
   c) Ruas Desa Simpang (Berbak) – Sungai Rambut – Pelabuhan Ujung Jabung.

2. Jaringan Jalan Provinsi

   Jaringan jalan provinsi berupa jalan kolektor primer dua (JKP-2) meliputi :

   a) Ruas Simpang Lagan – Simpang Pelabi/Zona V;
   b) Suak Kandis – Desa Simpang – Muara Sabak; dan
   c) Ruas Desa Simpang/Berbak – Simpang Jembatan Muara Sabak.

3. Jaringan Jalan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten

   Jaringan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten berupa jalan lokal primer meliputi :

   a) Ruas Bandar Jaya – Nipah Panjang;
   b) Ruas Simpang Desa – Simpang Datuk;
   c) Ruas Nipah Panjang – Simpang Datuk - Sungai Lokan;
   d) Ruas Muara Sabak Timur– Alang-alang – Simbur Naik – Pemusiran – Nipah Panjang;
   e) Ruas Muara Sabak Timur – Kota Raja - Alang-alang;
   f) Ruas Lagan Tengah – Manunggal Makmur - Teluk Majelis;
   g) Ruas Mendahara Ilir – Sungai Tawar – Teluk Gora – Simpang Pandan Sejahtera;
   h) Ruas Koto Kandis – Tri Mulyo – Sungai Raya – Teluk Kizing - Pemusiran;

i) Kampung Lama – Parit 6 Pangkal Duri – Parit 2 Pangkal Duri – Sinar Kalimantan;
j) Tanjung Solok – Kuala Lagan – Lagan Ilir;
k) Sungai Apung – Lagan Ilir;
l) Parit Palatuang – Sungai Tawar;
m) Pelabuhan Samudera – Teluk Majelis – Kampung Laut;
n) Rantau Rasau – Pematan Mayan – Rantau Makmur – Telaga Lima;
o) Ruas Muara Sabak – Pandan Jaya – Mendahara Ilir
p) Rencana jaringan jalan baru meliputi:
   - Ruas Rawasari – Koto Kandis Dendang – Rantau Indah;
   - Ruas Sungai Lokan - Air Hitam – Sungai Cemara – Sungai Benuh - Batas Sumsel;
   - Ruas Simpang Datuk – Sungai Jambat;
   - Ruas Kampung Lama – Bhakti Idaman;
   - Ruas Rantau Indah (SK III Koto Kandis) – Koto Kandis Dendang;
   - Ruas Rantau Indah – Kuala Dendang;
   - Ruas Catur Rahayu – Jati Mulyo – Koto Kandis Dendang;
   - Ruas Mendahara Ilir – Pangkal Duri – Batas Tanjung Jabung Barat; dan
   - Ruas Mencolok – Sungai Toman.

4. Terminal Penumpang

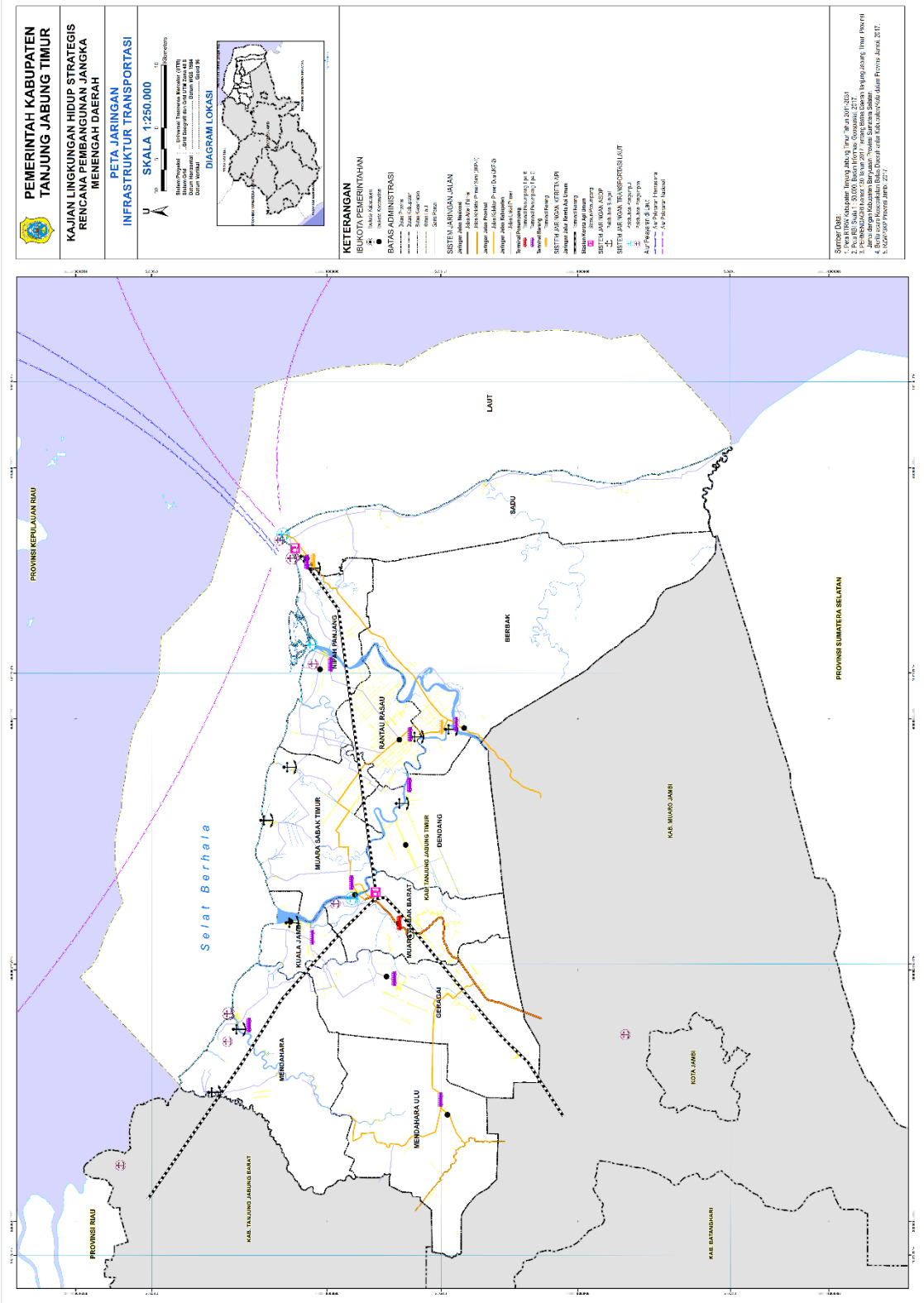
   Terminal penumpang meliputi :

   a) Terminal Tipe B di Kecamatan Muara Sabak Barat; dan
   b) Terminal Tipe C meliputi Kecamatan Mendahara, Kecamatan Mendahara Ulu, Kecamatan Geragai, Kecamatan Dendang, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kecamatan Kuala Jambi, Kecamatan Rantau Rasau, Kecamatan Berbak, Kecamatan Nipah Panjang, dan Kecamatan Sadu.

5. Terminal Barang

   Terminal barang meliputi terminal barang di Simpang Desa Kecamatan Berbak dan Kecamatan Sadu.

Kondisi jalan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2022 dengan jenis permukaan jalan Aspal/Beton sepanjang 235,165 km, kerikil sepanjang 831,437 km, tanah sepanjang 116,171 km dan jalan lainnya sepanjang 52.397 km. Kondisi jalan baik yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sepanjang 160,665 km dengan kondisi rusak berat sepanjang 206,92 km.



Gambar 4.2.10
Peta Jaringan Infrastruktur Jalan

Tabel IV.2.16
Matrik Interaksi dan Analisis Antara Sintesa Isu PB

NO	ISU PB	Karakteristik Wilayah	Tingkat Pentingnya Dampak LH	Keterkaitan antar ISU PB	Keterkaitan dengan IndikatorTPB	Muatan RPPLH	KLHS KRP Hierarki Atas	Kesimpulan hasil Analisis
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(10)*
1	Kesetaraan Gender	Indeks Kesetaraan Gender Kabupaten Tanjung Jabung Timur cenderung mengalami peningkatan. Pada Tahun 2017 IPG Kabupaten Tanjung Jabung Timur 85,56 dan pada Tahun 2020 meningkat 87,5	• **Jumlah penduduk yang terkena dampak ;** masyarakat pada administrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur • **Luas Wilayah Penyebaran Dampak ;** bersifat menyeluruh • **Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;** cukup sering dan signifikan • **Banyaknya Komponen LH yang terkena dampak;** - • **Sifat Kumulatif dampak ;** Cukup signifikan seluruh kawasan • **Berbalik atau tidak berbalik dampaknya ;** berpengaruh terhadap keanekaragaman hayati • **Kriteria Lain ;** berpengaruh terhadap kualitas hidup, keselamatan dan dampak ekonomi masyarakat	• Sumberdaya manusia	- (5.5.1*) Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah	-	KLHS RTRW Tanjabtim	**strategis**
2	Sumberdaya Manusia	• IPM Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus mengalami peningkatan, walaupun besaran peningkatan yang terjadi setiap tahunnya tidak selalu konsisten. Pada Tahun 2016 angka IPM Kabupaten Tanjung	• **Jumlah penduduk yang terkena dampak;** masyarakat pada administrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur • **Luas Wilayah Penyebaran Dampak ;** bersifat menyeluruh • **Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;** cukup sering dan signifikan • **Banyaknya Komponen LH yang terkena dampak;** - • **Sifat Kumulatif dampak ;** Cukup signifikan	• Kesetaraan Gender	- (4.1.2*) Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat. - (4.1.2(a) Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/sederajat, SMP/sederajat,	-	KLHS RTRW Tanjabtim	**strategis**

NO	ISU PB	Karakteristik Wilayah	Tingkat Pentingnya Dampak LH	Keterkaitan antar ISU PB	Keterkaitan dengan IndikatorTPB	Muatan RPPLH	KLHS KRP Hierarki Atas	Kesimpulan hasil Analisis
		Jabung Timur adalah 61,68 dan terus mengalami peningkatan sampai Tahun 2022 pada angka 65,71. Peningkatan tertinggi terjadi dari Tahun 2021 ke Tahun 2022, yaitu sebesar 1,23%. • dilihat dari perbandingan dengan wilayah kabupaten sekitar/berbatasan, angka IPM di Kabupaten Tanjung Jabung Timur memang masih lebih rendah	• **Berbalik atau tidak berbalik dampaknya ;** berpengaruh terhadap keanekaragaman hayati • **Kriteria Lain ;** berpengaruh terhadap kualitas hidup, keselamatan dan dampak ekonomi masyarakat		dan SMA/ sederajat. - (4.2.2*) Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin.			
3	Resiko Rawan Bencana	• Banjir; • Tanah Longsor;Dan • Karhutla	• **Jumlah penduduk yang terkena dampak ;** sebagian Masyarakat sekitar DAS dan kawasan gambut • **Luas Wilayah Penyebaran Dampak ;** karhutla menimbulkan asap berdampak signifikan • **Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;** cukup sering • **Banyaknya Komponen LH yang terkena dampak;** Tanah, air, dan udara • **Sifat Kumulatif dampak ;** cukup signifikan	• Tata Guna Lahan • Perubahan Iklim • Persampahan	(1.5.1*) Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	- Perlindungan kualitas lingkungan hidup - Pelestarian sumberdaya alam - Mitigasi terhadap perubahan iklim	KLHS RTRW Tanjabtim	**strategis**

NO	ISU PB	Karakteristik Wilayah	Tingkat Pentingnya Dampak LH	Keterkaitan antar ISU PB	Keterkaitan dengan IndikatorTPB	Muatan RPPLH	KLHS KRP Hierarki Atas	Kesimpulan hasil Analisis
			• **Berbalik atau tidak berbalik dampaknya ;** berpengaruh terhadap kesehatan manusia • **Kriteria Lain ;** berpengaruh terhadap keselamatan dan mutu hidup masyarakat					
4	Alih Fungsi Lahan	• Perubahan fungsi lahan sawah menjadi lahan Perkebunan karena orientasi ekonomi	• **Jumlah penduduk yang terkena dampak ;** masyarakat pada administrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur • **Luas Wilayah Penyebaran Dampak ;** berpengaruh terhadap kesediaan pangan di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur • **Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;** signifikan • **Banyaknya Komponen LH yang terkena dampak;** mempengaruhi kualitas Tanah dan air • **Sifat Kumulatif dampak ;** Cukup signifikan • **Berbalik atau tidak berbalik dampaknya ;** berpengaruh terhadap ketersediaan pangan • **Kriteria Lain ;** berpengaruh terhadap kualitas hidup, keselamatan dan dampak ekonomi masyarakat	• Investasi dan Permodalan	(2.a.1*) Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah	- Mitigasi terhadap perubahan iklim	KLHS RTRW Tanjabtim	**strategis**
5	Permukiman Layak Huni	• Kecenderungan titik tumbuh permukiman di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berorientasi kepada aliran Sungai ataupun muara;	• **Jumlah penduduk yang terkena dampak ;** masyarakat di pesisir (Mendahara, Kuala Jambi, Nipah Panjang, Sadu, Muara Sabak Timur, Dendang) • **Luas Wilayah Penyebaran Dampak ;** berdampak terhadap Kawasan disekitar dan mempengaruhi Kesehatan Masyarakat	• Kualitas SDM • Investasi dan Permodalan • Transportasi	• (6.4.2(a)) Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya • (6.4.2(b) Proporsi pengambilan air baku bersumber	- Pencadangan Keanekaragaman Hayati - Perlindungan kualitas lingkungan hidup - Pelestarian sumberdaya alam	KLHS RTRW Tanjabtim	**strategis**

NO	ISU PB	Karakteristik Wilayah	Tingkat Pentingnya Dampak LH	Keterkaitan antar ISU PB	Keterkaitan dengan IndikatorTPB	Muatan RPPLH	KLHS KRP Hierarki Atas	Kesimpulan hasil Analisis
		• Memanfaatkan lahan tidak sesuai daya dukung karena berada di aliran Sungai, sempadan, dan/atau daerah terpapar pasang surut.	• **Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;** cukup sering dan signifikan • **Banyaknya Komponen LH yang terkena dampak;** mempengaruhi kualitas Tanah, air dan udara • **Sifat Kumulatif dampak ;** Cukup signifikan • **Berbalik atau tidak berbalik dampaknya ;** berpengaruh terhadap kesehatan manusia • **Kriteria Lain ;** berpengaruh terhadap kualitas hidup, keselamatan dan dampak ekonomi masyarakat		dari air tanah terhadap ketersediaanya	- Mitigasi terhadap perubahan iklim		
6	Investasi dan Permodalan	• Struktur ekonomi masih didominasi sektor primer • Sektor pertanian 21,44% • Sektor pertambangan dan galian 43,02%	• **Jumlah penduduk yang terkena dampak ;** masyarakat pada administrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur • **Luas Wilayah Penyebaran Dampak ;** berdampak terhadap seluruh kawasan dalam wilayah kabupaten • **Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;** sering • **Banyaknya Komponen LH yang terkena dampak;** mempengaruhi kualitas Tanah, air dan udara • **Sifat Kumulatif dampak ;** siginifikan • **Berbalik atau tidak berbalik dampaknya ;** berpengaruh terhadap Kesejahteraan manusia • **Kriteria Lain ;** berpengaruh terhadap kualitas hidup dan dampak ekonomi masyarakat	• SDM • Alih Fungsi Lahan • Transportasi -	• (8.1.1*) Laju pertumbuhan PDB perkapita • (8.1.1.a*) PDB per kapita • (8.2.1*) Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	- Pencadangan Keanekaragaman Hayati - Perlindungan kualitas lingkungan hidup - Pelestarian sumberdaya alam Mitigasi terhadap perubahan iklim -	KLHS RTRW Tanjabtim	**strategis**

NO	ISU PB	Karakteristik Wilayah	Tingkat Pentingnya Dampak LH	Keterkaitan antar ISU PB	Keterkaitan dengan IndikatorTPB	Muatan RPPLH	KLHS KRP Hierarki Atas	Kesimpulan hasil Analisis
7	Pariwisata	• Sebagai daerah yang berada di wilayah pesisir, potensi wisata yang dimiliki adalah potensi pesisir. Salah satu yang utama adalah pantai yang terdapat di Kecamatan Sadu, yaitu Pantai Cemara, berikut dengan atraksi budaya	• **Jumlah penduduk yang terkena dampak ;** sebagian masyarakat sekitar objek wisata • **Luas Wilayah Penyebaran Dampak ;** berdampak terhadap Kawasan disekitar objek wisata • **Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;** tidak sering • **Banyaknya Komponen LH yang terkena dampak;** tidak signifikan • **Sifat Kumulatif dampak ;** tidak ada • **Berbalik atau tidak berbalik dampaknya ;** tidak ada • **Kriteria Lain ;** -	• Tata Guna Lahan • SDM • Investasi dan Permodalan	• (8.1.1*) Laju pertumbuhan PDB perkapita	-	KLHS RTRW Tanjabtim	Tidak Strategis
8	Transportasi	• Kondisi fisik dasar, sebaran kawasan permukiman yang berorientasi badan air, mengelompok, dan tersebar menyebabkan kesulitan dalam penyediaan prasarana jalan yang memadai yang disebabkan oleh tingginya biaya pembangunan dan rehabilitasi yang dibutuhkan	• **Jumlah penduduk yang terkena dampak ;** meliputi seluruh masyarakat • **Luas Wilayah Penyebaran Dampak ;** berdampak terhadap Kawasan permukiman/kawasan terbangun • **Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;** sering • **Banyaknya Komponen LH yang terkena dampak;** tidak signifikan • **Sifat Kumulatif dampak ;** ada • **Berbalik atau tidak berbalik dampaknya ;** berpengaruh terhadap ekonomi • **Kriteria Lain ;** -	• Tata Guna Lahan • SDM • Investasi dan Permodalan	• (8.1.1*) Laju pertumbuhan PDB perkapita • 9.1.1. (a) Kondisi mantap jalan nasional.	-	KLHS RTRW Tanjabtim	Tidak Strategis

Tabel IV.2.17
Tingkat Penting Isu PB

NO	SINTESA ISU PB	ANALISIS ISU PB DENGAN KRITERIA TINGKAT PENTINGNYA POTENSI DAMPAK	KESIMPULAN HASIL ANALISIS
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1	Kesetaraan Gender	**a) Kapasitas D3TLH ;** - **b) Perkiraan Dampak resiko LH;** - **c) Kinerja JE;** - **d) Status Mutu dan ketersediaan SDA;** - **e) Ketahanan dan Potensi Kehati;** - **f) Kerentanan Kapasitas terhadap Adaptasi Perubahan iklim;** -	Tidak Strategis
2	Sumberdaya Manusia	**a) Kapasitas D3TLH ;** Berdampak terhadap pengetahuan dan pandangan terhadap D3TLH. **b) Perkiraan Dampak resiko LH;** Berdampak terhadap pengetahuan dan pandangan terhadap kualitas lingkungan hidup. **c) Kinerja JE;** - **d) Status Mutu dan ketersediaan SDA;** SDM dapat berpengaruh terhadap Penurunan mutu SDA. **e) Ketahanan dan Potensi Kehati;** SDM dapat berpengaruh terhadap Penurunan Potensi Kehati.	**Strategis**
3	Resiko Rawan Bencana	**a) Kapasitas D3TLH ;** • Penurunan kualitas air permukaan; • Kerusakan lahan pertanian. **b) Perkiraan Dampak resiko LH;** • Penurunan kualitas udara • Penurunan lahan layak pengembangan permukiman.	**Strategis**

NO	SINTESA ISU PB	ANALISIS ISU PB DENGAN KRITERIA TINGKAT PENTINGNYA POTENSI DAMPAK	KESIMPULAN HASIL ANALISIS
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
		c) Kinerja JE; Jasa ekosistem tata Kelola berada di kategori sangat rendah hingga sedang. **d) Status Mutu dan ketersediaan SDA;** Penurunan luas lahan layak perkembangan permukiman **e) Ketahanan dan Potensi Kehati;** Kerusakan kehati di sempadan sungai dan paparan banjir lainnya. **f) Kerentanan Kapasitas terhadap Adaptasi Perubahan iklim;** Penurunan luas hijau yang terpapar banjir dan selanjutnya berdampak penurunan penyerapan karbon	
4	Alih Fungsi Lahan	**a) Kapasitas D3TLH ;** Penurunan daya dukung pangan; **b) Perkiraan Dampak resiko LH;** Dampak ekonomi dan sosial penduduk hingga finansial pemerintah daerah. **c) Kinerja JE;** Jasa ekosistem penyediaan pangan berpotensi menurun. **d) Status Mutu dan ketersediaan SDA;** Penurunan luas lahan pertanian tanaman pangan **e) Ketahanan dan Potensi Kehati;** Kerusakan kehati terhadap perubahan kawasan hutan mejadi perkebunan. **f) Kerentanan Kapasitas terhadap Adaptasi Perubahan iklim;** Penurunan luas hijau selanjutnya berdampak penurunan penyerapan karbon	**Strategis**
5	Permukiman Layak Huni	**a) Kapasitas D3TLH ;** Dampak terhadap daya tampung air terhadap sampah dan limbah lainnya, yang tidak terkelolaa (dibuang ke badan air/dihampar di tanah) **b) Perkiraan Dampak resiko LH;** Pencemaran air permukaan dan resiko kesehatan Masyarakat dan selanjutnya peningkatan pengeluaran/konsumsi untuk rehabilitasi kesehatan. **c) Kinerja JE;** Penurunan jasa ekosistem tata kelola air dan tempat tinggal. **d) Status Mutu dan ketersediaan SDA;**	**Strategis**

NO	SINTESA ISU PB	ANALISIS ISU PB DENGAN KRITERIA TINGKAT PENTINGNYA POTENSI DAMPAK	KESIMPULAN HASIL ANALISIS
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
		Penurunan mutu kualitas air tanah dan air permukaan **e) Ketahanan dan Potensi Kehati;** Kerusakan kehati di sungai. **f) Kerentanan Kapasitas terhadap Adaptasi Perubahan iklim;** Tumpukan sampah di udara terbuka mengeluarkan gas metana, salah satu gas yang bertanggung jawab atas pemanasan global	
6	Investasi dan Permodalan	**a) Kapasitas D3TLH ;** Peningkatan kegiatan ekonomi-peningkatan lalu lintas-Peningkatan emisi berdampak lebih lanjut terhadap Kualitas udara buruk berpotensi dampak terhadap . kerusakan fisiologis tanaman pertanian pangan, seperti nekrosis daun, akibat partikulat dan senyawa-senyawa kimia beracun dalam udara. **b) Perkiraan Dampak resiko LH;** • Pembangunan tidak sesuai daya dukung lingkungan hidup berdampak terhadap penurunan kualitas lingkungan permukiman; • peningkatan emisi karbon **c) Kinerja JE;** Penurunan jasa layanan ekosistem terutama kelompok penyediaan dan pengaturan akibat peningkatan tutupan lahan/perubahan rona eksisting **d) Status Mutu dan ketersediaan SDA;** Penurunan mutu udara **e) Ketahanan dan Potensi Kehati;** perubahan guna lahan dari non terbangun menjadi terbangun, berpotensi dampak terhadap menurunnya tempat hidup flora dan fauna, serta peningkatan sedimen yang mendukung pendangkalan DAS dan Sub Das. **f) Kerentanan Kapasitas terhadap Adaptasi Perubahan iklim;** potensi penurunan lahan hijau dan selanjutnya menurunkan penyerap karbon	**Strategis**
7	Pariwisata	**a) Kapasitas D3TLH ;** -. **b) Perkiraan Dampak resiko LH;** peningkatan lalu lintas-Peningkatan emisi berdampak lebih lanjut terhadap Kualitas udara buruk **c) Kinerja JE;**	**Tidak Strategis**

NO	SINTESA ISU PB	ANALISIS ISU PB DENGAN KRITERIA TINGKAT PENTINGNYA POTENSI DAMPAK	KESIMPULAN HASIL ANALISIS
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
		- **d) Status Mutu dan ketersediaan SDA;** - **e) Ketahanan dan Potensi Kehati;** Potensi gangguan terhadap pola migrasi burung di pantai timur. **f) Kerentanan Kapasitas terhadap Adaptasi Perubahan iklim;** -	
8	Transportasi	**a) Kapasitas D3TLH ;** peningkatan lalu lintas-Peningkatan emisi berdampak lebih lanjut terhadap Kualitas udara buruk berpotensi dampak terhadap . kerusakan fisiologis tanaman pertanian pangan, seperti nekrosis daun, akibat partikulat dan senyawa-senyawa kimia beracun dalam udara. **b) Perkiraan Dampak resiko LH;** Penurunan kualitas udara **c) Kinerja JE;** - **d) Status Mutu dan ketersediaan SDA;** Penurunan mutu udara **e) Ketahanan dan Potensi Kehati;** Jaringan jalan dapat memicu perubahan guna lahan dari non terbangun menjadi terbangun, berpotensi dampak terhadap menurunnya tempat hidup flora dan fauna, serta peningkatan sedimen yang mendukung pendangkalan DAS dan Sub Das. **f) Kerentanan Kapasitas terhadap Adaptasi Perubahan iklim;** potensi penurunan lahan hijau dan selanjutnya menurunkan penyerap karbon	**Strategis**

Sumber: Pokja KLHS RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tabel IV.2.18
Analisis Isu PB Paling Strategis

No	Sintesa ISU PB	Analisis Isu PB Dengan Kriteria Tingkat Pentingnya Potensi Dampak										Jumlah	Kesimpulan Hasil Analisis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Kesetaraan Gender	-	-	-	-	-	-	-	√	-	–	**1**	Tidak Strategis
2	Sumberdaya Manusia	-	-	-	-	√	√	√	√	√	–	**5**	Tidak Strategis
3	Resiko Bencana	√	√	√	√	√	√	√	√	√	–	**9**	**Strategis**
4	Alih Fungsi Lahan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	–	**9**	**Strategis**
5	Investasi dan Permodalan	√	√	√	√	√	√	√	√	–	–	**8**	**Strategis**
6	Permukiman Layak Huni	√	√	√	√	√	√	√	√	√	–	**9**	**Strategis**
7	Pariwisata	-	-	-	-	-	-	-	√	-	√	**2**	Tidak Strategis
8	Transportasi	√	√	√	-	√	√	√	√	√	-	**7**	**Strategis**

Keterangan :

1. Kapasitas D3TLH ;
2. Perkiraan Dampak resiko LH;
3. Kinerja JE;
4. Intensitas dan Cakupan wilayah bencana Alam;
5. Status Mutu dan ketersediaan SDA;
6. Ketahanan dan Potensi Kehati;
7. Kerentanan Kapasitas terhadap Adaptasi Perubahan iklim;
8. Tingkat dan Status Jumlah penduduk miskin;
9. Resiko terhadap Kesehatan dan Keselamatan masyarakat;
10. Ancaman Terhadap Perlindungan Kawasan tertentu oleh masyarakat hukum adat;

Setelah melalui proses kajian dan penilaian berdasarkan keempat kriteria yang ditetapkan diatas, Tim Kerja KLHS menetapkan Isu Pembangunan Berkelanjutan Paling Strategis di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terutama terkait dengan berbagai aspek terlihat berkaitan dominan dengan Tingkat pentingnya dampak lingkungan hidup, oleh karena itu Isu pembangunan berkelanjutan disepakati mencakup keseluruhan isu yang terlah dipusatkan, dengan urutan sebagai berikut :

1. Resiko Bencana Alam;
2. Alih Fungsi Lahan;
3. Investasi dan Permodalan;
4. Permukiman Layak Huni; dan
5. Transportasi;



BAB V
ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR TPB PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Updating Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDG's Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggunakan data tahun dasar 2022 dan data capaian tahun 2022. Data capaian pada 2022 berasal dari Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab pada capaian indikator tujuan pembangunan berkelajutan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG`s) Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan kebijakan yang bersifat strategis Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka mendukung komitmen pencapaian target-target TPB/SDG`s ditingkat nasional sebagaimana telah dijabarkan dalam tujuan, target, dan indikator. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's) yang menjadi kewenangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur berisikan 15 tujuan dengan 111 indikator. Pencapaian indikator TPB pada organisasi perangkat daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai berikut:

1. Tujuan 1 Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun, untuk mencapai Tujuan 1 tersebut dapat dilihat dari capaian indikator diterjemahkan kedalam 5 target dengan 10 indikator.

   Rerata capaian Tujuan 1 pada tahun 2022 sebesar 10% tercapai, 30% belum tercapai, 30% perlu perhatian khusus dan 30% belum tersedia data.

   Pencapaian kinerja target pada tujuan 1 ini menjadi kewenangan/tugas fungsi dari Dinas Sosial, Bappeda, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Tabel V.1
Keterkaitan TPB Terhadap Program Organisasi Perangkat Daerah

Tujuan	Indikator		Program	OPD
Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk di Manapun	1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim.	1. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	1. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.2.2*	Presentase laki – laki, perempuan dan anak – anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definsi nasional.	1. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.3.1*	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan
	1.3.1 (a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan
	1.3.1 (b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan
	1.4.1*	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.	• Program Pengelolaan Pendidikan • Program pemenuhan Upaya kesehatan perorangan Dan upaya Kesehatan Masyarakat • Program pengelolaan Sumber daya air (SDA) • Program pengembangan Perumahan	Dinas Kesehatan/Dinas Pendidikan/Dinas PUPR/Dinas Perkim
	1.4.2*	Proporsi dan penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan	Program penyelesaian Sengketa tanah Garapan	Sekretariat Daerah

Tujuan	Indikator		Program	OPD
		tipe kepemilikan.		
	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.5.4*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana daerah yang selaras dengan strategi pengurangan risiko bencana nasional	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Berdasarkan hasil rekapitulasi capaian TPB dan tabel diatas, dapat diketahui bahwa pada tujuan 1 belum mencapai target dan terdapat beberapa indicator tidak memiliki data. Untuk itu perlu adanya penambahan dan peningkatan program untuk memaksimalkan target capaian TPB.

- Pencapaian indikator 1.1.1*,1.2.1*, dan 1.2.2* belum mencapai target pada tahun 2022 dan belum memiliki target untuk indicator 1.2.2*. Dengan program yang dimiliki yaitu Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial untuk memaksimalkan target capaian TPB oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Pencapaian indikator 1.3.1*, 1.3.1 (a) dan 1.3.1.(b) belum mencapai target, perlu perhatian khusus dan tidak memiliki target pada tahun 2022 untuk indikator 1.3.1*, 1.3.1 (a). Dengan program yang dimiliki yaitu Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan masyarakat untuk memaksimalkan target capaian TPB oleh Dinas Kesehatan.
- Pencapaian indikator 1.4.1* masih tergolong rendah pada tahun 2022. Untuk itu perlu adanya penambahan program untuk memaksimalkan target capaian TPB oleh beberapa instansi seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas PUPR dan Dinas Perkim.
- Pencapaian indikator 1.4.2* sudah mencapai target nasional dengan program pada tahun 2022 yaitu Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

target pada tahun 2022. Indikator ini menjadi kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- Pencapaian indikator 1.5.1* belum mencapai target dan perlu perhatian khusus dengan program pada tahun 2022 yaitu Program Penanggulangan Bencana . Untuk itu perlu adanya penambahan program untuk memaksimalkan target capaian TPB oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- Pencapaian indikator 1.5.4* menjadi kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah melaksanakan program Penanganan Bencana. Namun capaian indikator tersebut belum ditargetkan sebelumnya dan data capaian tersebut tidak tersedia.

2. Tujuan 2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan, untuk mencapai Tujuan 2 tersebut dapat dilihat dari capaian indikator diterjemahkan kedalam 3 target dengan 3 indikator.

   Rerata capaian Tujuan 2 pada tahun 2022 sebesar 0% tercapai, 0% belum tercapai, 33,33% perlu perhatian khusus dan 66,67% belum tersedia data Pencapaian kinerja target pada tujuan 2 ini menjadi kewenangan/tugas fungsi dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Tabel V.2
Keterkaitan TPB Terhadap Program Organisasi Perangkat Daerah

Tujuan	Indikator		Program	OPD
Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	2.4.1 (a)	Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas PUPR Kabupaten Tanjung Jabung Timur
	2.a.1*	Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah	Program Pengelolaan Sumber Ekonomi Untuk Kadaulatan Dan Kemandirian Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
	2.c.1*	Indikator anomali harga pangan	• Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat • Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan • Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat; • Program Penanganan Kerawanan Pangan; • Program Pengawasan Keamanan Pangan.	Dinas Ketahanan Pangan

Berdasarkan hasil rekapitulasi capaian TPB dan tabel diatas, dapat diketahui bahwa pada indikator 2.4.1 (a), indicator 2.a.1* dan Indikator 2.c.1* belum mencapai target dan tidak memiliki target pada tahun 2022. Untuk itu perlu adanya penambahan program untuk memaksimalkan target capaian TPB oleh Dinas PUPR Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

3. Tujuan 3 Menjamin Kehidupan Yang Sehat Dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia, untuk mencapai Tujuan 3 tersebut dapat dilihat dari capaian indikator diterjemahkan kedalam 7 target dengan 14 indikator.

   Rerata capaian Tujuan 3 pada tahun 2022 sebesar 14,29% tercapai, 14,29% belum tercapai, 14,29% perlu perhatian khusus dan 57,14% belum tersedia data.

Pencapaian kinerja target pada tujuan 3 ini menjadi kewenangan/tugas fungsi dari Dinas Kesehatan dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Tabel V.3
Keterkaitan TPB Terhadap Program Organisasi Perangkat Daerah

Tujuan	Indikator		Program	OPD
Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dinas Kesehatan
	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dinas Kesehatan
	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1.000 orang	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan
	3.3.4*	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan
	3.3.5	Jumlah orang yang memerlukan intervensi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	Dinas Kesehatan

Tujuan	Indikator		Program	OPD
		terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta	Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
	3.4.1 (a)	Persentase merokok pada penduduk usia 10-18 tahun.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Dinas Kesehatan
	3.4.1 (b)	Prevalensi tekanan darah tinggi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - engelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Dinas Kesehatan
	3.4.1 (c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.	Dinas Kesehatan
	3.5.1 (b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi	• Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial/Eks Narapidan, PSK, Narkoba dan Lainnya • Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, Pms Dan Hiv Aids	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	3.8.1*	Cakupan pelayanan kesehatan essensial	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
	3.8.1 (a)	Unmet Need Pelayanan Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
	3.8.2	Cakupan Jaminan	Program Pemenuhan Upaya	Dinas Kesehatan

Tujuan	Indikator		Program	OPD
	(a)	Kesehatan Nasional (JKN).	Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Dinas Kesehatan
	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan - Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan

Berdasarkan hasil rekapitulasi capaian TPB dan tabel diatas, dapat diketahui bahwa pada tujuan 3 terdapat beberapa indicator yang belum mencapai target dan tidak memiliki data. Untuk itu perlu adanya penambahan dan peningkatan program untuk memaksimalkan target capaian TPB.

- Pencapaian indikator 3.1.1* menjadi kewenangan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dimana pada tahun 2022 belum memiliki target nasional dengan program yang dimilki yaitu Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin. Untuk itu perlu adanya penambahan program.
- Pencapaian indikator 3.1.2*, 3.3.3*, 3.3.4*, 3.3.5*, 3.4.1.(a), 3.4.1.(b) dan 3.4.1.(c) menjadi kewenangan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dimana pada tahun 2022 1 indikator tersebut Hampir mencapai target, 4 indikator belum tersedia data dan 2 indikator masih perlu perhatian khusus. Maka dari itu dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung

Jabung Timur diharapkan menambah program yang lebih spesifik untuk mencapai target.

- Pencapaian indikator 3.5.1.(b) menjadi kewenangan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dimana pada tahun 2022 indikator tersebut belum tersedia data dan telah melaksanakan program, Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial/Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Lainnya, Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, Pms Dan Hiv Aids Untuk itu perlu adanya pendataan untuk mengetahui tercapai atau tidak tercapainya indikator 3.5.1.(b)
- Pencapaian indikator 3.8.1*, 3.8.1.(a) dan 3.8.2.(a) terdapat 1 indikator yang tercapai, dan 2 indikator yang tidak memiliki data. Program yang dimilki yaitu Program Pemenuhan Upaya Kesehatan - Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk - UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dari dinas Kesehatan.
- Pencapaian indikator 3.a.1 menjadi kewenangan dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dimana pada tahun 2022 sudah terdapat data tetapai belum mencapai target, dengan program yang di milkiki yaitu Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar.
- Pencapaian indikator 3.c.1 menjadi kewenangan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dimana pada tahun 2022 tidak ada data. Untuk itu perlu adanya penambahan program oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

4. Tujuan 4 Menjamin Kualitas Pendidikan Yang Inklusif Dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Untuk Semua, untuk mencapai Tujuan 4 tersebut dapat dilihat dari capaian indikator diterjemahkan kedalam 6 target dengan 8 indikator.

   Rerata capaian Tujuan 4 pada tahun 2022 sebesar 25% tercapai, 25% belum tercapai, 37,50% perlu perhatian khusus dan 12,50% belum tersedia data.

   Pencapaian kinerja target pada tujuan 4 ini menjadi kewenangan/tugas fungsi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Tabel V.4
Keterkaitan TPB Terhadap Program Organisasi Perangkat Daerah

Tujuan	Indikator		Program	OPD
Menjamin Kualitas Pendidikan Yang Inklusif Dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Untuk Semua	4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat.	Program Pengelolaan Pendidikan, Program pendidik dan Tenaga kependidikan	Dinas Pendidikan
	4.1.2 (a)	Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/ sederajat	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan - Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan
	4.2.2*	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin.	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
	4.3.1*	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin	Program Pengelolaan Pendidikan - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan
	4.3.1 (a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	• Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
	4.4.1 (a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	• Program Pengelolaan Pendidikan • Program pendidik dan Tenaga kependidikan	Dinas Pendidikan

Tujuan	Indikator		Program	OPD
	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/laki-laki, (b) pedesaan/perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
	4.6.1 (a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	program Pengelolaan Pendidikan - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan

Berdasarkan hasil rekapitulasi capaian TPB dan tabel diatas, dapat diketahui bahwa pada tujuan 4 masih terdapat indikator yang mencapai target dan beberapa indikator tidak memiliki data. Untuk itu perlu adanya penambahan dan peningkatan program untuk memaksimalkan target capaian TPB.

- Pencapaian indikator 4.1.2*, 4.1.2.(a) dan 4.2.2* menjadi kewenangan dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dimana pada tahun 2022 perlu perhatian khusus terhadap capaian target nasional.
- Pencapaian indikator 4.2.2* dan 4.3.1* menjadi kewenangan dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dimana pada tahun 2022 sudah terdapat data namun belum terdapat capaian target.
- Pencapaian indikator 4.3.1.(a) dan 4.6.1 (a) dimana pada tahun 2022 sudah mencapai target terhadap target nasional..
- Pencapaian indikator 4.4.1.(a) dan 4.5.1* menjadi kewenangan dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dimana pada tahun 2022 sudah terdapat data namun belum belum mencapai target terhadap target nasional.

5. Tujuan 5 Mencapai Kesetaraan Gender Dan Memberdayakan Kaum Perempuan, untuk mencapai Tujuan 5 tersebut dapat dilihat dari capaian indikator diterjemahkan kedalam 3 target dengan 3 indikator.

Rerata capaian Tujuan 5 pada tahun 2022 sebesar 33,33% tercapai, 33,33% belum tercapai dan 33,3% belum tersedia data.

Pencapaian kinerja target pada tujuan 5 ini menjadi kewenangan/tugas fungsi dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Tabel V.5
Keterkaitan TPB Terhadap Program Organisasi Perangkat Daerah

Tujuan	Indikator		Program	OPD
Mencapai Kesetaraan Gender Dan Memberdayakan Kaum Perempuan	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah	Program Pengarustamaan Gender Dan Permberdayaan Perempuan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	5.6.2*	Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan Pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	5.b.1*	Proporsi individu yang memiliki telepon genggam.		Dinas Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan hasil rekapitulasi capaian TPB dan tabel diatas, dapat diketahui bahwa pada tujuan 5 masih terdapat indikator yang mencapai target dan beberapa indikator tidak memiliki data. Untuk itu perlu adanya penambahan dan peningkatan program untuk memaksimalkan target capaian TPB.

- Pencapaian indikator 5.5.1* menjadi kewenangan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2022 perlu perhatian khusus.
- Pencapaian indikator 5.6.2* menjadi kewenangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dimana pada tahun 2022 tidak ada data dan belum terdapat target nasional. Untuk itu perlu adanya penambahan program oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

- Pencapaian indikator 5.b.1* menjadi kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2022 sudah mencapai target terhadap target nasional.

6. Tujuan 6 yaitu menjamin ketersediaan dan pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berbasis untuk semua, untuk mencapai Tujuan 6 dapat dilihat dari capaian indikator diterjemahkan kedalam 4 target dengan 5 indikator.

   Rerata capaian Tujuan 6 pada tahun 2022 sebesar 20% tercapai, 20% belum tercapai, 40% perlu perhatian khusus dan 20% belum tersedia data.

   Pencapaian kinerja target pada tujuan 6 ini menjadi kewenangan/tugas fungsi dari Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tabel V.6
Keterkaitan TPB Tujuan 6 Terhadap Program Organisasi Perangkat Daerah

Tujuan	Indikator		Program	OPD
AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK	6.1.1	Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman	1. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	6.2.1	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	1. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah 2. Program pemberdayaan Masyarakat bidang kesehatan	Dinas Kesehatan
	6.3.1 (a)	Persentase limbah cair industri cair yang diolah secara aman	1. Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengeloaan lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup
	6.4.2. (a)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Perumahan dan Permukiman
	6.4.2. (b)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air tanah terhadap ketersediaanya	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Perumahan dan Permukiman

Berdasarkan hasil rekapitulasi capaian TPB dan tabel diatas, dapat diketahui bahwa pada tujuan 6 belum mencapai target dan terdapat beberapa indicator

tidak memiliki data. Untuk itu perlu adanya penambahan dan peningkatan program untuk memaksimalkan target capaian TPB.

- Pencapaian indikator 6.1.1 dan 6.2.1 menjadi kewenangan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dimana pada tahun 2022 terdapat 1 indikator yang mencapai target dan 1 indikator belu mencapai target. Telah melaksanakan program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dan program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah. 1 indikator telah ditargetkan pada target nasional dan 1 indikator belum ditargetkan namun capaian nilai pada tahun 2022.
- Pencapaian indikator 6.3.1 (a) menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dimana pada tahun 2022 tidak memiliki data dengan program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengeloaan lingkungan, namun capaian target dan realisasi indikator belum termuat pada program tersebut.
- Pencapaian indikator 6.4.2 (a) dan indikator 6.4.2 (b) menjadi kewenangan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur, namun realisasi indikator tersebut ada tahun 2022 perlu perhatian khusus, serta tidak ditargetkan pada target nasional tahun 2022.

7. Tujuan 7 yaitu menjamin akses energi yang terjangkau,andal, berkelanjutan dan modern untuk semua, untuk mencapai Tujuan 7 dapat dilihat dari capaian indikator diterjemahkan kedalam 2 target dengan 3 indikator.

   Rerata capaian Tujuan 7 pada tahun 2022 sebesar 33,33% tercapai, 66,67% belum tercapai dan 0% perlu perhatian khusus dan 0% belum tersedia data.

   Pencapaian kinerja target pada tujuan 7 ini menjadi kewenangan/tugas fungsi dari Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tabel V.7
Keterkaitan TPB Tujuan 7 Terhadap Program Organisasi Perangkat Daerah

Tujuan	Indikator		Program	OPD
ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU	7.1.1*	menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern	Program Prekonomian Dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
	7.1.2 (a)	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga	1. Belum Memiliki Program	Sekretariat Daerah
	7.1.2 (b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga	1. Belum Memiliki program	Sekretariat Daerah

Berdasarkan hasil rekapitulasi capaian TPB dan tabel diatas, dapat diketahui bahwa pada tujuan 7 terdapat 2 indikator yang belum mencapai target dan 1 indikator mencapai target pada tahun 2022.

8. Tujuan 8 yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua, untuk mencapai Tujuan 8 dapat dilihat dari capaian indikator diterjemahkan kedalam 2 target dengan 3 indikator.

   Rerata capaian Tujuan 8 pada tahun 2022 sebesar 0% tercapai, 0% belum tercapai dan 100% belum tersedia data.

   Pencapaian kinerja target pada tujuan 8 ini menjadi kewenangan/tugas fungsi dari Badan keuangan Daerah dan Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Tabel V.8
Keterkaitan TPB Tujuan 8 Terhadap Program Organisasi Perangkat Daerah

Tujuan	Indikator		Program	OPD
PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB perkapita	1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Keuangan Daerah/Bappeda
	8.1.1 (a)	PDB per kapita	1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Keuangan Daerah/ Bappeda
	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Keuangan Daerah/Bappeda

Berdasarkan hasil rekapitulasi capaian TPB dan tabel diatas, dapat diketahui bahwa pada tujuan 8 terdapat 3 indikator yang Perlu perhatian khusus, 2 indikator belum ditargetkan pada target nasional dan 1 indikator telah ditargetkan pada tahun 2022.

9. Tujuan 9 yaitu membangun infrastruktur yang Tangguh, meningkatkan industry inklusif yang berkelanjutan, serta mendorong inovasi, untuk mencapai Tujuan 9 dapat dilihat dari capaian indikator diterjemahkan kedalam 2 target dengan 3 indikator.

   Rerata capaian Tujuan 9 pada tahun 2022 sebesar 0% tercapai, 33,33% belum tercapai, 33% perlu perhatian khusus dan 33,33% belum tersedia data.

   Pencapaian kinerja target pada tujuan 9 ini menjadi kewenangan/tugas fungsi dari Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Perhubungan, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Tabel V.9
Keterkaitan TPB Tujuan 9 Terhadap Program Organisasi Perangkat Daerah

Tujuan	Indikator		Program	OPD
INDUSTRI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	9.1.1 (a)	Kondisi mantap jalan nasional.	1. Program penyelenggaraan jalan	Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman
	9.1.2*	Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi	1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan 2. Program pengelolaan pelayaran	Dinas Perhubungan
	9.2.1 (a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perindustrian dan perdagangan

Berdasarkan hasil rekapitulasi capaian TPB dan tabel diatas, dapat diketahui bahwa pada tujuan 9 belum mencapai target dan terdapat 1 indicator tidak memiliki data. Untuk itu perlu adanya penambahan dan peningkatan program untuk memaksimalkan target capaian TPB.

- Pencapaian indikator 9.1.1 (a) menjadi kewenangan Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dimana pada tahun 2022 realisasi indikator hampir mencapai target dengan program penyelenggaraan jalan.
- Pencapaian indikator 6.9.2* menjadi kewenangan Dinas Perhubungan, dimana pada tahun 2022 belum memiliki data dan belum ditargetkan pada target nasional. Namum indicator ini telah memiliki program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan program pengelolaan pelayaran . namun capaian target dan realisasi indikator belum tertuang pada program tersebut.
- Pencapaian indikator 9.2.1 (a) menjadi kewenangan Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dimana pada tahun 2022 telah melaksanakan Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, namun capaian target masih perlu perhatian khusus.

10. Tujuan 10 yaitu mengurangi kesenjangan intra dan antar negara, untuk mencapai Tujuan 10 dapat dilihat dari capaian indikator diterjemahkan kedalam 6 target dengan 11 indikator.

    Rerata capaian Tujuan 10 pada tahun 2022 sebesar 18,18% tercapai, 0% belum tercapai, 9,09% perlu perhatian khusus dan 72,73 % belum tersedia data.

    Pencapaian kinerja target pada tujuan 10 ini menjadi kewenangan/tugas fungsi dari Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Polres Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Tanjung Jabung Timur, Badan Keuangan Daerah , dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tab el V.10
Keterkaitan TPB Tujuan 10 Terhadap Program Organisasi Perangkat Daerah

Tujuan	Indikator		Program	OPD
BERKURANGNYA KESENJANGAN	10.1.1 (a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.		Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	10.1.1 (f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	1. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang	1. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tujuan	Indikator		Program	OPD
		difabilitas.		
	10.3.1 (b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).		Polres Kabupaten Tanjung Jabung Timur
	10.3.1 (c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan	• Program Pengarusutamaan gender dan Pemberdayaan perempuan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	10.3.1 (d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM internasional	1. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
	10.4.1 (b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	1. Program hubungan industrial 2. Program pemberdayaan sosial	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Tanjung Jabung Timur
	10.4.2	Dampak redistributif dari kebijakan fiskal.		Badan Keuangan Daerah
	10.5.1 (a)	Indikator Kesehatan Perbankan.		Bank Indonesia
	10.7.2 (a)	Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan	1. Program Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tujuan	Indikator		Program	OPD
		pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan		
	10.7.2 (b)	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi	• Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja • Program Penempatan Tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Berdasarkan hasil rekapitulasi capaian TPB dan tabel diatas, dapat diketahui bahwa pada tujuan 10 masih terdapat indikator yang mencapai target dan beberapa indikator tidak memiliki data. Untuk itu perlu adanya penambahan dan peningkatan program untuk memaksimalkan target capaian TPB.

- Pencapaian indikator 10.1.1 (a) menjadi kewenangan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dimana pada tahun 2022 perlu perhatian khusus dengan penambahan program agar capaian target terpenuhi terhadap target nasional.
- Pencapaian indikator 10.1.1 (f), 10.2.1*, dan 10.3.1.(b) menjadi kewenangan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dimana pada tahun 2022 tidak ada data dan belum terdapat capaian target dengan Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial. Namun capaian target belum tertuang dalam program tersebut. Akan tetapi terdapat 1 indikator belum memiliki program
- Pencapaian indikator 10.3.1 (b) menjadi kewenangan Polres Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dimana pada tahun 2022 tidak ada data dan belum terdapat capaian target.
- Pencapaian indikator 10.3.1 (c) menjadi kewenangan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dimana pada tahun 2022 indikator tersebut telah mencapai

target dan telah melaksanakan Program Pengarusutamaan gender dan Pemberdayaan perempuan.

- Pencapaian indikator 10.3.1 (b) menjadi kewenangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dimana pada tahun 2022 tidak ada data dan belum terdapat capaian target.
- Pencapaian indikator 10.4.1 (b) menjadi kewenangan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Tanjung Jabung Timur dimana pada tahun 2022 indikator telah mencapai target dengan Program hubungan industrial dan Program pemberdayaan social.
- Pencapaian indikator 10.4.2 menjadi kewenangan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dimana pada tahun 2022 tidak ada data dan belum terdapat capaian target.
- Pencapaian indikator 10.5.1.(a) menjadi kewenangan Bank Indonesia, dimana pada tahun 2022 tidak ada data dan belum terdapat capaian target serta program. Untuk itu perlu adanya penambahan program oleh Bank Indonesia.
- Pencapaian indikator 10.7.2 (a) dan 10.7.2 (a) menjadi kewenangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dimana pada tahun 2022 tidak ada data dan belum terdapat capaian. Dengan program Hubungan Industrial dan Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja namun capaian target belum dituangkan dalam program tersebut.

11. Tujuan 11 yaitu menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, Tangguh dan berkelanjutan, untuk mencapai Tujuan 11 dapat dilihat dari capaian indikator diterjemahkan kedalam 7 target dengan 11 indikator.

    Rerata capaian Tujuan 11 pada tahun 2022 sebesar 0% tercapai, 0% belum tercapai, 9,09% perlu perhatian khusus dan 90,91% belum tersedia data.

    Pencapaian kinerja target pada tujuan 11 ini menjadi kewenangan/tugas fungsi dari Sekretariat Daerah, Dinas Pariwisata, Badan Penanggulangan

Bencana. Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Sosial, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Pemadam Kebakaran dan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Tabel V.11
Keterkaitan TPB Tujuan 11 Terhadap Program Organisasi Perangkat Daerah

Tujuan	Indikator		Program	OPD
KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN	11.3.1 (a)	Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas PUPR
	11.4.1 (a)	Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (non-PPP)		Badan Keuangan Daerah
	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	1. Program penanganan bencana	Badan Penanggulangan Bencana.
	11.5.2 (a)	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB	1. Program penanganan bencana	Badan Penanggulangan Bencana
	11.6.1 (a)	Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya	• Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional • Program pengelolaan persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
	11.6.1 (b)	Persentase sampah nasional yang terkelola	Program pengelolaan persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
	11.6.2 (a)	Rata-rata tahunan materi partikular halus PM 10	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
	11.6.2 (b)	Indeks Kualitas Udara	Program pengendalian penceamran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup
	11.7.1 (a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas PUPR

Tujuan	Indikator		Program	OPD
	11.b.2*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana	Program penanggulangan bencana	Badan Penanggulangan Bencana dan Dinas Pemadam Kebakaran
	11.c.1 (a)	Persentase Daerah yang memiliki Perda Bangunan Gedung yang Berkelanjutan, Berketahanan, dan menggunakan Material Lokal		Dinas PUPR

Berdasarkan hasil rekapitulasi capaian TPB dan tabel diatas, dapat diketahui bahwa pada tujuan 11 masih terdapat indikator yang mencapai target dan beberapa indikator tidak memiliki data. Untuk itu perlu adanya penambahan dan peningkatan program untuk memaksimalkan target capaian TPB.

- Pencapaian indikator 11.3.1 (a) dan indicator 11.c.1. (a) menjadi kewenangan Dinas PUPR Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dimana pada tahun 2022 tidak ada data, 1 indikator telah ditargetkan pada target nasional dan 1 indikator belum ditargetkan, 1 indikator memiliki program Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat dan 1 indikator belum memiliki program.
- Pencapaian indikator 11.4.1 (a) menjadi kewenangan Badan Keuangan Daerah Tanjung Jabung Timur, dimana pada tahun 2022 belum memiliki program dan belum ditargetkan pada target nasional.
- Pencapaian indikator 11.5.1*, indicator 11.5.2 (a) dan indikator 11.b.2* menjadi kewenangan Badan Penanggulangan Bencana dan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dimana pada

tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana dan Dinas Pemadam Kebakaran telah melaksanakan program berupa program penanganan becana, namun capaian target belum tertuang pada program tersebut dan perlu adanya penambahan program oleh Badan Penanggulangan Bencana dan Dinas Pemadam Kabupaten Tanjung Jabung Timur

- Pencapaian indikator 11.6.1 (a), indicator 11.6.1 (b), indicator11.6.2. (a), dan indikator 11.6.2. (b) menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dimana pada tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan program berupa program pengembangan sistem dan pengelolaan persapahan regional dan program pengelolaan persampahan, namun capaian target dan realisasi indikator belum termuat pada program-program tersebut dan terdapat 1 indiaktor perlu perhatian khusus.
- Pencapaian indikator 11.7.1 (a) menjadi kewenangan Dinas PUPR Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dimana pada tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan program berupa Program Penyelenggaraan Penataan Ruang namun indikator tersebut belum mencapai target dan belum ditargetkan sebelumnya.

12. Tujuan 12 Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan, untuk mencapai Tujuan 12 tersebut dapat dilihat dari capaian indikator diterjemahkan kedalam 4 target dengan 8 indikator.

    Rerata capaian Tujuan 12 pada tahun 2022 belum tersedia data sebesar 100%. Pencapaian kinerja target pada tujuan 12 ini menjadi kewenangan/tugas fungsi dari Dinas Lingkungan Hidup, Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Dinas Kesehatan/ Satpol PP/ Dinas Sosial, dan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.

Tabel V.12
Keterkaitan TPB Tujuan 12 Terhadap Program Organisasi Perangkat Daerah

Tujuan	Indikator		Program	OPD
KONSUMSI DAN PRODUKSI BERTANGGUNG JAWAB	12.3.1.(a)	Persentase Sisa Makanan		Dinas Lingkungan Hidup
	12.4.1.(a)	Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan Merkuri	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
	12.4.2.*	(a) Limbah B3 yang dihasilkan per kapita; dan (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengelolaannya	Program Pegendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Dinas Lingkungan Hidup
	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
	12.6.1*	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Kab. Tanjung Jabung Timur
	12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Program pembinaan dan Pengawasan terhadap izin Lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup
	12.8.1.(b)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan	Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Satpol PP dan Dinas Sosial
	12.b.1(a)	Jumlah lokasi penerapan sustainable tourism development	• Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata • Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Berdasarkan hasil rekapitulasi capaian TPB dan tabel diatas, dapat diketahui bahwa pada tujuan 12 indikator tidak memiliki data. Untuk itu perlu adanya capaian dalam program yang telah dituangkan

- Pencapaian indikator 12.3.1 (a) menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup, dimana pada tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup belum melaksanakan program, sehingga capaian target belum tertuang pada program tersebut dan perlu adanya penambahan program oleh Dinas Lingkungan Hidup.
- Pencapaian indikator 12.4.1(a) menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup, dimana pada tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup belum melaksanakan program dan capaian target belum tertuang pada program tersebut.
- Pencapaian indikator 12.4.2.* menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup, dimana pada tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan program berupa Program Pegendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan berbahaya dan Beracun (Limbah B3) namun capaian belum termuat pada program tersebut dan perlu adanya penambahan program oleh Dinas Lingkungan Hidup.
- Pencapaian indikator 12.5.1 (a) menjadi kewenangan Dinas Dinas Lingkungan Hidup, dimana pada tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan program berupa Program Pengelolaan Persampahan, namun capaian belum termuat pada program tersebut dan perlu adanya penambahan program oleh Dinas Lingkungan Hidup.
- Pencapaian indikator 12.6.1 (a) menjadi kewenangan inspektorat daerah, dimana pada tahun 2022 inspektorat kota sudah melaksanakan program Program Penyelenggaraan pengawasan.
- Pencapaian indikator 12.8.1 (b) menjadi kewenangan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Satpol PP dan Dinas Sosial PPPA, dimana pada tahun 2022 Dinas Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial belum melaksanakan program dan indikator tersebut belum mencapai target dan belum ditargetkan sebelumnya.
- Pencapaian indikator 12.b.1 (a) menjadi kewenangan Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga dimana pada tahun 2022 Dinas

Pariwisata telah melaksanakan program berupa Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, namun indikator tersebut belum ditargetkan sebelumnya.

13. Tujuan 13 Mengambil Tindakan Cepat Untuk Perubahan Iklim Dan Dampaknya, untuk mencapai Tujuan 13 tersebut dapat dilihat dari capaian indikator diterjemahkan kedalam 4 target dengan 2 indikator.
Rerata capaian Tujuan 12 pada tahun 2022 belum tersedia data sebesar 100%. Pencapaian kinerja target pada tujuan 13 ini menjadi Badan Penanggulangan Bencana dan Dinas Pemadam Kebakaran.

Tabel V.13
Keterkaitan TPB Tujuan 13 Terhadap Program Organisasi Perangkat Daerah

Tujuan	Indikator		Program	OPD
PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM	13.1.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	1. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial 2. Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana dan Dinas Pemadam Kebakaran
	13.1.3*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana	1. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial 2. Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana dan Dinas Pemadam Kebakaran

- Pencapaian indikator 13.1.1.* dan indicator 13.1.2.* menjadi kewenangan Badan Penanggulangan Bencana dan Dinas Pemadam Kebakaran dimana pada tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana dan Dinas Pemadam Kebakaran, memiliki Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial,, namun indikator tersebut belum mencapai target dan belum ditargetkan sebelumnya.

14. Tujuan 16 Menguatkan Masyarakat Yang Inklusif Dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, Dan Membangun Kelembagaan Yang Efektif, Akuntabel, Dan Inklusif Disemua Tingkatan, untuk mencapai Tujuan 16 tersebut dapat dilihat dari capaian indikator diterjemahkan kedalam 4 target dengan 20 indikator.

Rerata capaian Tujuan 16 pada tahun 2022 sebesar 30% tercapai, dimana nilai capian dengan kategori belum tercapai sebesar 5%, 5% perlu perhatian khusus dan belum tersedia data sebesar 60%. Pencapaian kinerja target pada tujuan 16 ini menjadi kewenangan/tugas fungsi dari Polres, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, BPS, Inspektorat Kab.Tanjung Jabung Timur, Sekretariat DPRD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Tabel V.14
Keterkaitan TPB Tujuan 16 Terhadap Program Organisasi Perangkat Daerah

Tujuan	Indikator		Program	OPD
PERDAMAIAN KEADILAN DAN KELEMBAGAAN TANGGUH	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.		Polres
	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.		Polres
	16.2.2*	Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi.	1. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	16.3.1.(b)	Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tujuan	Indikator		Program	OPD
	16.3.2.(a)	Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.	1. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
	16.3.3.(a)	Indeks Akses terhadap Keadilan (Access to Justice Index)	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
	16.6.1.(a)	Persentase instansi pemerintah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	BPK
	16.6.1.(b)	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ≥ B	1. Program Penyelenggaraan Pengawasan 2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Inspektorat Kab.Tanjung Jabung Timur
	16.6.1.(c)	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ≥ B	1. Program Penyelenggaraan Pengawasan 2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Inspektorat Kab.Tanjung Jabung Timur, Sekretariat Daerah
	16.6.2.(a)	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.	1. Program Penyelenggaraan Pengawasan 2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Inspektorat Kab.Tanjung Jabung Timur
	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD
	16.7.1.(b)	Persentase	1. Program Kepegawaian Daerah	Badan

Tujuan	Indikator		Program	OPD
		keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).		Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil menurut umur	1. Program Pencatatan Sipil 2. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah.	1. Program Pencatatan Sipil 2. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun.	1. Program Pencatatan Sipil 2. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	16.10.1(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	1. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
	16.10.1 (c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan	Program perlindungan Dan jaminan sosial	Dinas Sosial PPPA
	16.10.2.(a)	Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif.	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
	16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang		Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Tujuan	Indikator		Program	OPD
		diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.		

Berdasarkan hasil rekapitulasi capaian TPB dan tabel diatas, dapat diketahui bahwa pada tujuan 12 masih terdapat indikator yang mencapai target dan beberapa indikator tidak memiliki data. Untuk itu perlu adanya penambahan dan peningkatan program untuk memaksimalkan target capaian TPB.

- Pencapaian indikator 16.1.1.(a) menjadi kewenangan polres, namun realisasi indikator tersebut ada tahun 2022 tidak ada data, serta tidak ditargetkan pada tahun 2022. Untuk itu perlu adanya penambahan program oleh Polres Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- Pencapaian indikator 16.1.2.(a) menjadi kewenangan polres, namun realisasi indikator tersebut ada tahun 2022 tidak ada data, serta tidak ditargetkan pada tahun 2022. Untuk itu perlu adanya penambahan program oleh Polres Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Pencapaian indikator 16.2.2.* menjadi kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dimana pada tahun 2022 tidak ada data dan belum terdapat capaian target serta program. Untuk itu perlu adanya penambahan program oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Pencapaian indikator 16.3.1.(b) menjadi kewenangan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dimana pada tahun 2022 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak ada data dan belum terdapat capaian. Untuk itu perlu adanya penambahan program oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

- Pencapaian indikator 16.3.2 (a) menjadi kewenangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dimana pada tahun 2022 Bagian Hukum Sekretariat Daerah tidak ada data dan belum terdapat capaian target. Untuk itu perlu adanya penambahan program oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Pencapaian indikator 16.3.3 (a) menjadi kewenangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dimana pada tahun 2022 Bagian Hukum Sekretariat Daerah tidak ada data dan belum terdapat capaian target. Untuk itu perlu adanya penambahan program oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Pencapaian indikator 16.5.1 (a) menjadi kewenangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dimana pada tahun 2022 Bagian Hukum Sekretariat Daerah tidak ada data dan belum terdapat capaian target. Untuk itu perlu adanya penambahan.
- Pencapaian indikator 16.6.1 (a) menjadi kewenangan BPK Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dimana pada tahun 2022 BPK telah melaksanakan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan program Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, capaian target dan realisasi indikator yaitu WTP.
- Pencapaian indikator 16.6.1 (b) menjadi kewenangan Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dimana pada tahun 2022 Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah melaksanakan program berupa Program Penyelenggaraan Pengawasan, Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
- Pencapaian indikator 16.6.1 (c) menjadi kewenangan Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dimana pada tahun 2022 Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah melaksanakan program berupa Program penataan kelembagaan dan ketataletaksanaan kegiatan Reformasi pelayanan Publik, dan Program Penguatan Birokrasi dan

Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi, dengan capaian target pada tahun 2022 adalah 70% dan realisasi indikator sebesar 63,23%.

- Pencapaian indikator 16.6.2.(a) menjadi kewenangan Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, namum tidak ada data dan belum terdapat capaian target serta program. Untuk itu perlu adanya penambahan program oleh Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Pencapaian indikator 16.7.1.(a) menjadi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dimana pada tahun 2022 Sekretariat DPRD telah melaksanakan program berupa Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur , namun belum memiliki capaian target pada tahun 2022.
- Pencapaian indikator 16.9.1*, indikator 16.9.1.(a) dan indikator 16.9.1.(b) menjadi kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dimana pada tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melaksanakan program berupa Program Pencatatan Sipil. Terdapat 2 indikator yang telah mencapai target nasional dan 1 indikator belum mencapai target.
- Pencapaian indikator 16.10.1.(b), indikator 16.10.1.(c) dan indicator 16.b.1.(a) menjadi kewenangan Bagian Hukum Sekretariat Daearah, dan Dinas Sosial PPPA, dimana pada tahun 2022 OPD Bagian Hukum Sekretariat Daerah memiliki program berupa Program Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat, namum hanya 1 indikator yang mencapai target dan 2 indikator tidak ada data dan belum terdapat capaian target.
- Pencapaian indikator 16.10.2.(a) menjadi kewenangan secretariat daerah, dimana pada tahun 2022 secretariat daerah, memiliki program berupa Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat, namum tidak ada data dan belum terdapat capaian target.

15. Tujuan 17 Menguatkan Sarana Pelaksanaan Dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan, untuk mencapai Tujuan 17 tersebut dapat dilihat dari capaian indikator diterjemahkan kedalam 4 target dengan 7 indikator. Rerata capaian Tujuan 17 pada tahun 2022 sebesar 14,29% tercapai, dimana nilai capian dengan kategori belum tersedia data sebesar 42,86%. Pencapaian kinerja target pada tujuan 17 ini menjadi kewenangan/tugas fungsi dari Dinas Badan Keuangan Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika,Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Bagian Organisasi Setda, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

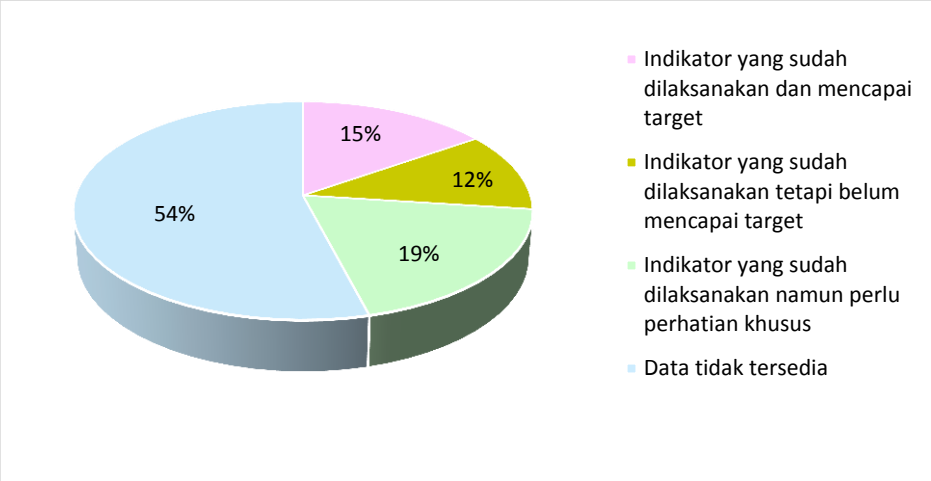
Tabel V.15
Keterkaitan TPB Terhadap Tujuan 17 Program Organisasi Perangkat Daerah

Tujuan	Indikator		Program	OPD
KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN	17.1.1.*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Keuangan Daerah
	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB	1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Keuangan Daerah
	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Keuangan Daerah
	17.8.1*	Persentase pengguna internet.	1. Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
	17.17.1.(b)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).		Sekretariat Daerah
	17.17.1.(c)	Jumlah nilai investasi proyek KPBU berdasarkan tahap perencanaan, penyiapan dan transaksi.		Sekretariat Daerah
	17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register).	1. Program Pencatatan Sipil 2. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 3. Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Pencapaian indikator 17.1.1*, indicator 17.1.1.(a), indicator 17.1.2* menjadi kewenangan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dimana pada tahun 2022 Badan Keuangan Daerah telah melaksanakan program berupa Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, namun hanya 2 indikator yang perlu perhatian khusus dan 1 indikator belum memilki data.
- Pencapaian indikator 17.8.1* menjadi kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dimana pada tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah melaksanakan program berupa Program Informasi Dan Komunikasi Publik dengan capaian target pada tahun 2022 sebesar 61,27% artinya status capaian belum mencapai target.
- Pencapaian indikator 17.17.1.(b) dan indikator 17.17.1.(c) menjadi kewenangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, namun Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak ada data dan belum terdapat capaian target serta program. Untuk itu perlu adanya penambahan program oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Pencapaian indikator 17.18.2.(b) menjadi kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dimana pada tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki program berupa Program Pencatatan Sipil, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Program Pengelolaan Profil Kependudukan dengan capaian target terpenuhi.

Tabel V.16
Rekapitulasi Status Capaian Indikator Berdasarkan Target SDGs Nasional Tahun 2022

No	TPB	Jumlah Indikator Menjadi TUSI	Kondisi Ketercapaian			
			Mencapai Target Nasional	Belum Tercapai akan tetapi Membaik	Perlu Perhatian Khusus	N/A
1	Tanpa Kemiskinan	10	1	3	3	3
2	Tanpa Kelaparan	3	0	0	1	2
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	14	2	2	2	8
4	Pendidikan Berkualitas	8	2	2	3	1
5	Kesetaraan Gender	3	1	0	1	1
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	5	1	1	2	1
7	Energi Bersih dan Terjangkau	3	1	2	0	0
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan ekonomi	3	0	0	3	0
9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	3	0	1	1	1
10	Berkurangnya kesenjangan	11	2	0	1	8
11	Kota dan permukiman berkelanjutan	11	0	0	1	10
12	Konsumsi dan produksi bertanggung jawab	8	0	0	0	8
13	Penanganan perubahan iklim	2	0	0	0	2
14	Ekosistim lautan	0	0	0	0	0
15	Ekosistem daratan	0	0	0	0	0
16	Perdamaian keadilan dan kelembagaan tangguh	20	6	1	1	12
17	Kemitraan untuk mencapai tujuan	7	1	1	2	3
Jumlah		**111**	**17**	**13**	**21**	**60**



Gambar 5.1
Grafik Persentase Capaian Indikator SDGs Kabupaten Tanjung Jabung Timur Terhadap Target Nasional

Tabel V.17
Kewenangan OPD Dalam Capaian Indikator di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

No	OPD	Jumlah Indikator	Indikator		Program Pembangunan Terkait TPB Yang Dilaksanakan (Bab VI RPJMD versi review)	Program/Kegiatan Dalam Permendagri 90/2019 Terkait TPB yang belum dilaksanakan (belum tertuang dalam RPJMD Sebelumnya)	
						Kode	Program
1	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11	1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	**1.06.05**	**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**:
						1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
			1.2.2*	Presentase laki – laki, perempuan dan anak – anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definsi nasional.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	**1.06.05**	**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**:
						1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
			1.2.2*	Presentase laki – laki, perempuan dan anak – anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definsi nasional.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	**1.01.02**	**Program Pengelolaan Pendidikan**
						1.01.02.1.01	- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
						1.01.02.1.02	- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Kejuruan
						1.01.02.1.03	- Pengelolaan Pendidikan Khusus
						1.01.02.2.01	- Pengelolaan Pendidikan Dasar
						1.01.02.2.02	- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
						1.01.02.2.03	- Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
						1.01.02.2.04	- Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ kesetaraan
						1.01.04	**Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan**
						1.01.4.1.01	- Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi
						1.02.02	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**
						1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota
			3.5.1 (b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi	• Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial/Eks Narapidan, PSK, Narkoba dan	**1.06.04**	**Program Rehabilitasi Sosial**
						1.06.4.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta

No	OPD	Jumlah Indikator	Indikator		Program Pembangunan Terkait TPB Yang Dilaksanakan (Bab VI RPJMD versi review)	Program/Kegiatan Dalam Permendagri 90/2019 Terkait TPB yang belum dilaksanakan (belum tertuang dalam RPJMD Sebelumnya)	
						Kode	Program
					Lainnya • Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, Pms Dan Hiv Aids		Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
						1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial
			5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah	Program Pengarustamaan Gender Dan Permberdayaan Perempuan	**2.08.02**	**Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**
						2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
			10.1.1 (f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	1. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	**1.06.05**	**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**:
						1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
			10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	1. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	**2.14.04**	**Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**
						2.14.04.2.01	- Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
			10.3.1 (c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan	Program Pengarusutamaan gender dan Pemberdayaan perempuan	**2.08.03**	**Program Perlindungan Perempuan**
						2.08.03.2.01	- Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
						2.08.03.2.02	- Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
						2.08.03.2.03	- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			16.2.2*	Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial		
			16.3.1.(b)	Persentase orang miskin yang	Belum Memiliki Program	**1.05.02**	**Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban**

No	OPD	Jumlah Indikator	Indikator		Program Pembangunan Terkait TPB Yang Dilaksanakan (Bab VI RPJMD versi review)	Program/Kegiatan Dalam Permendagri 90/2019 Terkait TPB yang belum dilaksanakan (belum tertuang dalam RPJMD Sebelumnya)	
						Kode	Program
				menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi			**Umum**
						1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			16.10.1 (c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Umum	**2.08.03**	**Program Perlindungan Perempuan**
						2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
						2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
						2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	Dinas Kesehatan	20	1.3.1*	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan masyarakat	**1.06.05**	**Program perlindungan dan jaminan Sosial**
			1.3.1 (a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan masyarakat	**1.02.02**	**Program pemenuhan upaya kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan Masyarakat**
						1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
						1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
			1.3.1 (b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Program Penanganan Bencana - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Jd;	**2.07.03**	**Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**
						2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
						2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah

No	OPD	Jumlah Indikator	Indikator		Program Pembangunan Terkait TPB Yang Dilaksanakan (Bab VI RPJMD versi review)	Program/Kegiatan Dalam Permendagri 90/2019 Terkait TPB yang belum dilaksanakan (belum tertuang dalam RPJMD Sebelumnya)	
						Kode	Program
					Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan masyarakat		Kabupaten/kota
						2.07.04	**Program Penempatan Tenaga Kerja**
						2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
						2.07.04.2.03	Pengelolaan informasi Program Kerja
						2.07.05	**Program Hubungan Sosial**
						2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			1.4.1*	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.	• Program Pengelolaan Pendidikan • Program pemenuhan Upaya kesehatan perorangan Dan upaya Kesehatan Masyarakat • Program pengelolaan Sumber daya air (SDA) • Program pengembangan Perumahan	**1.01.02**	**Program Pengelolaan Pendidikan**
						1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
						1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Kejuruan
						1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus
						1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Dasar
						1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
						1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
						1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ kesetaraan
						1.01.04	**Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan**
						1.01.4.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi
						1.02.02	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**
						1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota
			3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Pengelolaan	**1.02.02** 1.02.02.2.02 1.02.02.2.02.01 1.02.02.2.02.02	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatanperorangan Dan Upaya Kesehatanmasyarakat** Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

No	OPD	Jumlah Indikator	Indikator		Program Pembangunan Terkait TPB Yang Dilaksanakan (Bab VI RPJMD versi review)	Program/Kegiatan Dalam Permendagri 90/2019 Terkait TPB yang belum dilaksanakan (belum tertuang dalam RPJMD Sebelumnya)	
						Kode	Program
					Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		
			3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	**1.02.02** 1.02.02.2.02 1.02.02.2.02.02	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatanperorangan Dan Upaya Kesehatanmasyarakat** Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
			3.3.3*	Kejadian Malaria per 1.000 orang	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	**1.02.02**	**Program pemenuhan upaya kesehatan**
							Perorangan dan upaya kesehatan Masyarakat
						1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
						1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
			3.3.4*	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	**1.02.02**	**Program pemenuhan upaya kesehatan**
							Perorangan dan upaya kesehatan Masyarakat
						1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
						1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
			3.3.5	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	**1.02.02**	**Program pemenuhan upaya kesehatan**
							Perorangan dan upaya kesehatanMasyarakat
						1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
						1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak

No	OPD	Jumlah Indikator	Indikator		Program Pembangunan Terkait TPB Yang Dilaksanakan (Bab VI RPJMD versi review)	Program/Kegiatan Dalam Permendagri 90/2019 Terkait TPB yang belum dilaksanakan (belum tertuang dalam RPJMD Sebelumnya)	
						Kode	Program
					Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Menular
			3.4.1 (a)	Persentase merokok pada penduduk usia 10-18 tahun	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	**1.02.02**	**Program pemenuhan upaya kesehatan**
							Perorangan dan upaya Kesehatan Masyarakat
						1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
						1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
			3.4.1 (b)	Prevalensi tekanan darah tinggi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	**1.02.02**	**Program pemenuhan upaya kesehatan**
							Perorangan dan upaya Kesehatan Masyarakat
						1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
						1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
			3.4.1 (c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun	Belum Memiliki Program	**1.02.02**	**Program pemenuhan upaya kesehatan**
							Perorangan dan upaya Kesehatan Masyarakat
						1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
						1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
						1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
			3.8.1*	Cakupan pelayanan kesehatan essensial	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Penyediaan Fasilitas Pelayanan	**1.02.02**	**Program pemenuhan upaya kesehatan**
							Perorangan dan upaya Kesehatan Masyarakat
						1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

No	OPD	Jumlah Indikator	Indikator		Program Pembangunan Terkait TPB Yang Dilaksanakan (Bab VI RPJMD versi review)	Program/Kegiatan Dalam Permendagri 90/2019 Terkait TPB yang belum dilaksanakan (belum tertuang dalam RPJMD Sebelumnya)	
						Kode	Program
					Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota.
						1.02.02.2.02.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
						1.02.02.2.02.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
						1.02.02.2.02.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
			3.8.1 (a)	Unmet Need Pelayanan Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**1.02.02**	**Program pemenuhan upaya kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan Masyarakat**
			3.8.2 (a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	**1.02.02**	**Program pemenuhan upaya kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan Masyarakat**
						1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
						1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
			3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	**1.02.02**	**Program pemenuhan upaya kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan Masyarakat**
						1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
						1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
						1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
			3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan -	**1.02.03**	**Program peningkatan kapasitas sumber Daya manusia Kesehatan**

No	OPD	Jumlah Indikator	Indikator		Program Pembangunan Terkait TPB Yang Dilaksanakan (Bab VI RPJMD versi review)	Program/Kegiatan Dalam Permendagri 90/2019 Terkait TPB yang belum dilaksanakan (belum tertuang dalam RPJMD Sebelumnya)	
						Kode	Program
					Pemberian Izin Praktik Tenaga Wilayah Kabupaten/Kota Kesehatan di	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota
						1.02.03.2.02	Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
			6.1.1	Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman	1. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	**1.03.03**	**Program pengelolaan dan Pengembangan sistem air limbah**
						1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
			6.2.1	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	1. 1. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	**1.03.05**	**Program pengelolaan dan Pengembangan sistem air limbah**
						1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
			12.8.1.(b)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan	**1.02.02**	**Program pemenuhan upaya kesehatan**
							Perorangan dan upaya kesehatan Masyarakat
						1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
						5.01.02	**Program perencanaan, pengendalian dan**
							Evaluasi pembangunan daerah
						5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah
3	Bappeda	3	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB perkapita	1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	**3.26.04**	**Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Hak Kekayaan Intelektual Pemanfaatan Dan Perlindungan**
						3.26.04.2.01	Penyediaan Prasarana (Zona kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota
						5.01.04	**Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam**
						5.01.04.2.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

No	OPD	Jumlah Indikator	Indikator		Program Pembangunan Terkait TPB Yang Dilaksanakan (Bab VI RPJMD versi review)	Program/Kegiatan Dalam Permendagri 90/2019 Terkait TPB yang belum dilaksanakan (belum tertuang dalam RPJMD Sebelumnya)	
						Kode	Program
							Bidang Perekonomian
						5.01.04.2.03	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam
						5.02.02	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**
						5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
						5.05.02	**Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah**
						5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
						5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
			8.1.1 (a)	PDB per kapita	1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	**3.26.04**	**Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Hak Kekayaan IntelektualPemanfaatan Dan Perlindungan**
						3.26.04.2.01	Penyediaan Prasarana (Zona kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota
						5.01.04	**Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam**
						5.01.04.2.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian
						5.01.04.2.03	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam
						5.02.02	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**
						5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
						5.05.02	**Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah**
						5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
						5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan

No	OPD	Jumlah Indikator	Indikator		Program Pembangunan Terkait TPB Yang Dilaksanakan (Bab VI RPJMD versi review)	Program/Kegiatan Dalam Permendagri 90/2019 Terkait TPB yang belum dilaksanakan (belum tertuang dalam RPJMD Sebelumnya)	
						Kode	Program
							Pembangunan
			8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	**2.07.03**	**Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**
						2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
						2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/kota
						2.07.04	**Program Penempatan Tenaga Kerja**
						2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
						2.07.04.2.03	Pengelolaan informasi Program Kerja
						5.05.02	**Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah**
						5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
						5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Program Penanggulangan Bencana	**1.04.02**	**Program Pengembangan Perumahan**
						1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
						1.05.03	**Program Penanggulangan Bencana**
						1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
						1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
						1.05.04	**Program Penanggulangan Kebakaran**
						1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
			1.5.4*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana	Program Penanggulangan Bencana	**1.05.03**	**Program Penanggulangan Bencana**
						1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
						1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap bencana

No	OPD	Jumlah Indikator	Indikator		Program Pembangunan Terkait TPB Yang Dilaksanakan (Bab VI RPJMD versi review)	Program/Kegiatan Dalam Permendagri 90/2019 Terkait TPB yang belum dilaksanakan (belum tertuang dalam RPJMD Sebelumnya)	
						Kode	Program
				daerah yang selaras dengan strategi pengurangan risiko bencana nasional		1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
						1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
						1.06.06	**Program Penanganan Bencana**
						1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
			13.1.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	1. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial 2. Program Penanggulangan Bencana	**1.04.02**	**Program Pengembangan Perumahan**
						1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
						1.05.03	**Program Penanggulangan Bencana**
						1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
						1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
						1.05.04	**Program Penanggulangan Kebakaran**
						1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
			13.1.3*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana	1. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial 2. Program Penanggulangan Bencana	**1.05.03**	**Program Penanggulangan Bencana**
						1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
						1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap bencana
						1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
						1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
						1.06.06	**Program Penanganan Bencana**
						1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
5	Dinas Ketahanan Pangan	2	2.a.1*	Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah	Program Pengelolaan Sumber Ekonomi Untuk Kadaulatan Dan	**3.27.03**	**Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**

No	OPD	Jumlah Indikator	Indikator		Program Pembangunan Terkait TPB Yang Dilaksanakan (Bab VI RPJMD versi review)	Program/Kegiatan Dalam Permendagri 90/2019 Terkait TPB yang belum dilaksanakan (belum tertuang dalam RPJMD Sebelumnya)	
						Kode	Program
					Kemandirian Pangan	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian
						3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian
						3.27.03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota
			2.c.1*	Indikator anomali harga pangan	• Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat • Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan • Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat; • Program Penanganan Kerawanan Pangan; • Program Pengawasan Keamanan Pangan.	**3.27.02**	**Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**
						3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
						3.27.03	**Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**
						3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian
						3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian
						3.27.03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota
						3.27.07	**Program Penyuluhan Pertanian**
						3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
6	Dinas Pendidikan	9	1.4.1*	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.	• Program Pengelolaan Pendidikan • Program pemenuhan Upaya kesehatan perorangan Dan upaya Kesehatan Masyarakat • Program pengelolaan Sumber daya air (SDA) • Program pengembangan Perumahan	**1.01.02**	**Program Pengelolaan Pendidikan**
						1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
						1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Kejuruan
						1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus
						1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Dasar
						1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
						1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
						1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ kesetaraan
						1.01.04	**Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan**
						1.01.4.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi
						1.02.02	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**
						1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota

No	OPD	Jumlah Indikator	Indikator		Program Pembangunan Terkait TPB Yang Dilaksanakan (Bab VI RPJMD versi review)	Program/Kegiatan Dalam Permendagri 90/2019 Terkait TPB yang belum dilaksanakan (belum tertuang dalam RPJMD Sebelumnya)	
						Kode	Program
			4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat.	Program Pengelolaan Pendidikan - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dan Program Pengelolaan Pendidikan - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	**1.01.02**	**Program Pengelolaan Pendidikan**
						1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
						1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Kejuruan
						1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Dasar
						1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
			4.1.2 (a)	Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/ sederajat	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan - Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	**1.01.02**	**Program Pengelolaan Pendidikan**
						1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
						1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Kejuruan
						1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Dasar
						1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
						1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
			4.2.2*	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin.	Program Pengelolaan Pendidikan	**1.01.02**	**Program Pengelolaan Pendidikan**
						1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
						1.01.03	**Program Pengembangan Kurikulum**
						1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
						1.01.04	**Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan**
						1,01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
						1.01.05	**Program Pengendaluan Perizinan Pendidkan**
						1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
			4.3.1*	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin	Program Pengelolaan Pendidikan - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	**1.01.02**	**Program Pengelolaan Pendidikan**
						1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan
						1.01.03	**Program Pengembangan Kurikulum**
						1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
						1.01.04	**Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan**
						1,01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan

No	OPD	Jumlah Indikator	Indikator		Program Pembangunan Terkait TPB Yang Dilaksanakan (Bab VI RPJMD versi review)	Program/Kegiatan Dalam Permendagri 90/2019 Terkait TPB yang belum dilaksanakan (belum tertuang dalam RPJMD Sebelumnya)	
						Kode	Program
							Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
			4.3.1 (a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	Program Pengelolaan Pendidikan	**1.01.02**	**Program Pengelolaan Pendidikan**
						1.01.03	**Program Pengembangan Kurikulum**
			4.4.1 (a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Belum Memiliki Program		
			4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/laki-laki, (b) pedesaan/perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas	program Pengelolaan Pendidikan	**1.01.02**	**Program Pengelolaan Pendidikan**
						1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
						1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Kejuruan
						1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Dasar
						1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
						1.01.03	**Program Pengembangan Kurikulum**
			4.6.1 (a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	program Pengelolaan Pendidikan - Pengelolaan Pendidikan Sekolah DasarPendidikan Sekolah Dasar	**1.01.03**	**Program Pengembangan Kurikulum**
						1.01.04	**Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan**
7	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	5.6.2*	Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi reproduksi.perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan Pendidikan terkait kesehatan seksual dan	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	**5.05.02**	**Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah**
						5.0502.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
						2.14.03	**Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**
						2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	2	5.b.1*	Proporsi individu yang memiliki telepon genggam.	Belum Memiliki Program	**4.01.02**	**Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**
						4.01.02.2.02	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

No	OPD	Jumlah Indikator	Indikator		Program Pembangunan Terkait TPB Yang Dilaksanakan (Bab VI RPJMD versi review)	Program/Kegiatan Dalam Permendagri 90/2019 Terkait TPB yang belum dilaksanakan (belum tertuang dalam RPJMD Sebelumnya)	
						Kode	Program
			17.8.1*	Persentase pengguna internet.	1. Program Informasi Dan Komunikasi Publik	**2.20.02**	**Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**
9	Dinas Lingkungan Hidup	10	6.3.1 (a)	Persentase limbah cair industri cair yang diolah secara aman	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengeloaan lingkungan	**2.11.03**	**Program pengendalian pencemaran Dan/atau kerusakan lingkungan hidup**
						2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
						2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
			11.6.1 (a)	Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya	1. Program pengembangan sistem dan pengelolaan persapahan regional 2. Program pengelolaan persampahan	**1.03.04**	**Program pengembangan sistem dan Pengelolaan persampahan regional**
						1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
			11.6.1 (b)	Persentase sampah nasional yang terkelola	Program pengelolaan persampahan	**1.03.04**	**Program pengembangan sistem dan Pengelolaan persampahan regional**
						1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
			11.6.2 (a)	Rata-rata tahunan materi partikular halus PM 10	Program pengendalian peceamran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	**2.11.03**	**Program pengendalian pencemaran Dan/atau kerusakan lingkungan hidup**
						2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
						2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
			11.6.2 (b)	Indeks Kualitas Udara	Program pengendalian penceamran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	**2.11.03**	**Program pengendalian pencemaran Dan/atau kerusakan lingkungan hidup**
						2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
						2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
			12.3.1.(a)	Persentase Sisa Makanan	Belum Memiliki Program	**1.03.04**	**Program pengembangan sistem dan Pengelolaan persampahan regional**
						1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan

No	OPD	Jumlah Indikator	Indikator		Program Pembangunan Terkait TPB Yang Dilaksanakan (Bab VI RPJMD versi review)	Program/Kegiatan Dalam Permendagri 90/2019 Terkait TPB yang belum dilaksanakan (belum tertuang dalam RPJMD Sebelumnya)	
						Kode	Program
							di Daerah Kabupaten/Kota
			12.4.1.(a)	Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan Merkuri	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	**2.11.05**	**Program pengendalian bahan berbahaya Dan beracun (b3) dan limbah bahan Berbahaya dan beracun (limbah b3)**
			12.4.2.*	(a) Limbah B3 yang dihasilkan per kapita; dan (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengelolaannya	Program Pegendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	**2.11.05**	**Program pengendalian bahan berbahaya Dan beracun (b3) dan limbah bahan Berbahaya dan beracun (limbah b3)**
						2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3
						2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
			12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Program Pengelolaan Persampahan	**1.03.04**	**Program pengembangan sistem dan**
							Pengelolaan persampahan regional
						1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
			12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Program pembinaan dan Pengawasan terhadap izin Lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)		
10	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	6	2.4.1 (a)	Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	**1.03.12**	**Program penyelenggaraan penataan Ruang**
						1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
						1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
						3.27.06	**Program Perizinan Usaha Pertanian**

No	OPD	Jumlah Indikator	Indikator		Program Pembangunan Terkait TPB Yang Dilaksanakan (Bab VI RPJMD versi review)	Program/Kegiatan Dalam Permendagri 90/2019 Terkait TPB yang belum dilaksanakan (belum tertuang dalam RPJMD Sebelumnya)	
						Kode	Program
						3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota
			6.4.2. (a)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	**1.03.02**	**Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**
						1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			6.4.2. (b)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air tanah terhadap ketersediaanya	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	**1.03.02**	**Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**
						1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			9.1.1 (a)	Kondisi mantap jalan nasional.	Program penyelenggaraan jalan	**1.03.10**	**Program Penyelenggaraan Jalan**
						1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
			11.3.1 (a)	Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	**1.03.12**	**Program penyelenggaraan penataan Ruang**
						1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
						1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
			11.7.1 (a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	**2.11.04**	**Program pengelolaan keanekaragaman**
						2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
11	Dinas Perumahan dan Permukiman	5	6.1.1	Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	**1.03.03**	**Program pengelolaan dan Pengembangan sistem air limbah**
						1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
			6.4.2. (a)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	**1.03.02**	**Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**
						1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			6.4.2. (b)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air tanah terhadap ketersediaanya	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	**1.03.02**	**Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**
						1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			9.1.1 (a)	Kondisi mantap jalan nasional.	Program penyelenggaraan jalan	**1.03.10**	**Program Penyelenggaraan Jalan**

No	OPD	Jumlah Indikator	Indikator		Program Pembangunan Terkait TPB Yang Dilaksanakan (Bab VI RPJMD versi review)	Program/Kegiatan Dalam Permendagri 90/2019 Terkait TPB yang belum dilaksanakan (belum tertuang dalam RPJMD Sebelumnya)	
						Kode	Program
						1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
			11.c.1 (a)	Persentase Daerah yang memiliki Perda Bangunan Gedung yang Berkelanjutan, Berketahanan, dan menggunakan Material Lokal	Belum memiliki program	**1.03.08**	**Program Penataan Bangunan Gedung**
						1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
12	Sekretariat Daerah	8	1.4.2*	Proporsi dan penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.	Program Program penyelesaian Sengketa tanah Garapan	**2.10.09**	**Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah**
						2.10.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah
			7.1.1*	menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern	Program Prekonomian Dan Pembangunan		**Tidak ada Kewenangan Kabupaten/Kota**
			7.1.2 (a)	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga	Belum Memiliki Program		**Tidak ada Kewenangan Kabupaten/Kota**
			7.1.2 (b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga	Belum Memiliki Program		**Tidak ada Kewenangan Kabupaten/Kota**
			16.6.1.(b)	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ≥ B	Program Penyelenggaraan Pengawasan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	**4.01.04**	**Program Administrasi Umum**
						4.01.04.2.01	Pelaksanaan Administrasi Umum
						5.05.02	**Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah**
						5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang
			16.10.2.(a)	Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif.	Program Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi	**5.05.02**	**Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah**
						5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi
						5.06.02	**Program Pelayanan Penghubung**
						5.06.02.2.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung Kabupaten/Kota
			17.17.1.(b)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Belum Memiliki Program	**1.03.11**	**Program Pengembangan Jasa Konstruksi**
						1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

No	OPD	Jumlah Indikator	Indikator		Program Pembangunan Terkait TPB Yang Dilaksanakan (Bab VI RPJMD versi review)	Program/Kegiatan Dalam Permendagri 90/2019 Terkait TPB yang belum dilaksanakan (belum tertuang dalam RPJMD Sebelumnya)	
						Kode	Program
			17.17.1.(c)	Jumlah nilai investasi proyek KPBU berdasarkan tahap perencanaan, penyiapan dan transaksi.	Belum Memiliki Program	**1.03.11**	**Program Pengembangan Jasa Konstruksi**
						1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
13	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	6	10.3.1 (d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM internasional	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	**4.01.02**	**Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat**
						4.01.02.2.03	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah
			16.3.2.(a)	Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	**1.05.02**	**Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum**
						1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			16.3.3.(a)	Indeks Akses terhadap Keadilan (Access to Justice Index)	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat		
			16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Belum Memiliki Program		
			16.10.1(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	Program Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	**1.05.02**	**Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum**
						1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan
							Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Belum Memiliki Program	**4.01.02**	**Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat**
						4.01.02.2.03	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah
14	Badan Keuangan Daerah	8	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB perkapita	1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	**3.26.04**	**Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**
						3.26.04.2.01	Penyediaan Prasarana (Zona kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspresi,

No	OPD	Jumlah Indikator	Indikator		Program Pembangunan Terkait TPB Yang Dilaksanakan (Bab VI RPJMD versi review)	Program/Kegiatan Dalam Permendagri 90/2019 Terkait TPB yang belum dilaksanakan (belum tertuang dalam RPJMD Sebelumnya)	
						Kode	Program
							Berpromosi dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota
						5.01.04	**Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam**
						5.01.04.2.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian
						5.01.04.2.03	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam
						5.02.02	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**
						5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
						5.05.02	**Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah**
						5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
						5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
			8.1.1 (a)	PDB per kapita	Program Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	**3.26.04**	**Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Hak Kekayaan IntelektualPemanfaatan Dan Perlindungan**
						3.26.04.2.01	Penyediaan Prasarana (Zona kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota
						5.01.04	**Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam**
						5.01.04.2.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian
						5.01.04.2.03	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam
						5.02.02	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**

No	OPD	Jumlah Indikator	Indikator		Program Pembangunan Terkait TPB Yang Dilaksanakan (Bab VI RPJMD versi review)	Program/Kegiatan Dalam Permendagri 90/2019 Terkait TPB yang belum dilaksanakan (belum tertuang dalam RPJMD Sebelumnya)	
						Kode	Program
						5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
						5.05.02	**Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah**
						5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
						5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
			8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	**2.07.03**	**Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**
						2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
						2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/kota
						2.07.04	**Program Penempatan Tenaga Kerja**
						2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
						2.07.04.2.03	Pengelolaan informasi Program Kerja
						5.05.02	**Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah**
						5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
						5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
			10.4.2	Dampak redistributif dari kebijakan fiskal	Belum Memiliki Program	**5.02.02**	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**
						5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
			17.1.1.*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	**5.02.02**	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**
						5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
						5.02.04	**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**
						5.02.04.2.02	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah
			17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	**5.02.04**	**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**
						5.02.04.2.02	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan

No	OPD	Jumlah Indikator	Indikator		Program Pembangunan Terkait TPB Yang Dilaksanakan (Bab VI RPJMD versi review)	Program/Kegiatan Dalam Permendagri 90/2019 Terkait TPB yang belum dilaksanakan (belum tertuang dalam RPJMD Sebelumnya)	
						Kode	Program
							Evaluasi Pendapatan Daerah
			17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Program Pengelolaan Pendapatan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah	**5.02.04**	**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**
						5.02.04.2.02	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah
15	Dinas Perhubungan	1	9.1.2*	Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi	1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan 2. Program pengelolaan pelayaran	**2.15.02**	**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**
						2.15.03	**Program Pengelolaan Pelayaran**
16	Dinas Perindustrian dan perdagangan	1	9.2.1 (a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan		
17	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	10.1.1 (a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok	Belum Memiliki Program	**1.06.05**	**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**:
						1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
			16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil menurut umur	1. Program Pencatatan Sipil 2. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	**2.12.04**	**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**
						2.12.04.2.01	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
			16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah.	1. Program Pencatatan Sipil 2. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	**2.12.04**	**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**
						2.12.04.2.01	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
			16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun.	1. Program Pencatatan Sipil 2. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	**2.12.04**	**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**
						2.12.04.2.01	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
			17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register).	1. Program Pencatatan Sipil 2. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 3. Program Pengelolaan Profil Kependudukan	**2.12.04**	**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**
						2.12.04.2.01	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
						2.12.05	**Program Pengelolaan Profil Kependudukan**
						2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan

No	OPD	Jumlah Indikator	Indikator		Program Pembangunan Terkait TPB Yang Dilaksanakan (Bab VI RPJMD versi review)	Program/Kegiatan Dalam Permendagri 90/2019 Terkait TPB yang belum dilaksanakan (belum tertuang dalam RPJMD Sebelumnya)	
						Kode	Program
						2.12.03	**Program Pencatatan Sipil**
						2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil
18	Polres	3	10.3.1 (b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	Belum Memiliki Program	**1.05.02**	**Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**
						1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
						2.08.03	**Program Perlindungan Perempuan**
						2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
						2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
			16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Belum Memiliki Program	**1.05.02**	**Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**
						1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
			16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Belum Memiliki Program	**8.01.06**	**Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**
19	BPK	1	16.6.1.(a)	Persentase instansi pemerintah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	**4.02.02**	**Program Layanan Dan Administrasi Keuangan**
						4.02.03.2.02	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
20	Bank Indonesia	1	10.5.1 (a)	Indikator Kesehatan Perbankan.	Belum Memiliki Program		
21	Inspektorat Kab.Tanjung Jabung Timur	4	12.6.1*	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya	Program Penyelenggaraan Pengawasan	**6.01.02**	**Program Penyelenggaraan Pengawasan**
						6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal
			16.6.1.(b)	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ≥ B	1. Program Penyelenggaraan Pengawasan 2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	**4.01.04**	**Program Administrasi Umum**
						4.01.04.2.01	Pelaksanaan Administrasi Umum
						5.05.02	**Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah**
						5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang

No	OPD	Jumlah Indikator	Indikator		Program Pembangunan Terkait TPB Yang Dilaksanakan (Bab VI RPJMD versi review)	Program/Kegiatan Dalam Permendagri 90/2019 Terkait TPB yang belum dilaksanakan (belum tertuang dalam RPJMD Sebelumnya)	
						Kode	Program
							Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
			16.6.1.(c)	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ≥ B	1. Program Penyelenggaraan Pengawasan 2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	**4.01.04**	**Program Administrasi Umum**
						4.01.04.2.01	Pelaksanaan Administrasi Umum
						5.05.02	**Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah**
						5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
			16.6.2.(a)	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.	1. Program Penyelenggaraan Pengawasan 2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	**4.01.04**	**Program Administrasi Umum**
						4.01.04.2.01	Pelaksanaan Administrasi Umum
						5.05.02	**Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah**
						5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
22	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	1	12.b.1(a)	Jumlah lokasi penerapan *sustainable tourism development*	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**3.26.05**	**Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif**
						3.26.02.2.1	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
						3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
23	Sekretariat DPRD	1	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DRRD	**4.02.03**	**Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Program Kepegawaian Daerah		
25	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2	10.7.2 (a)	Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara	Program Hubungan Industrial	**2.07.04**	**Program Penempatan Tenaga Kerja** Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di
						2.07.04.2.04	Daerah Kabupaten/Kota

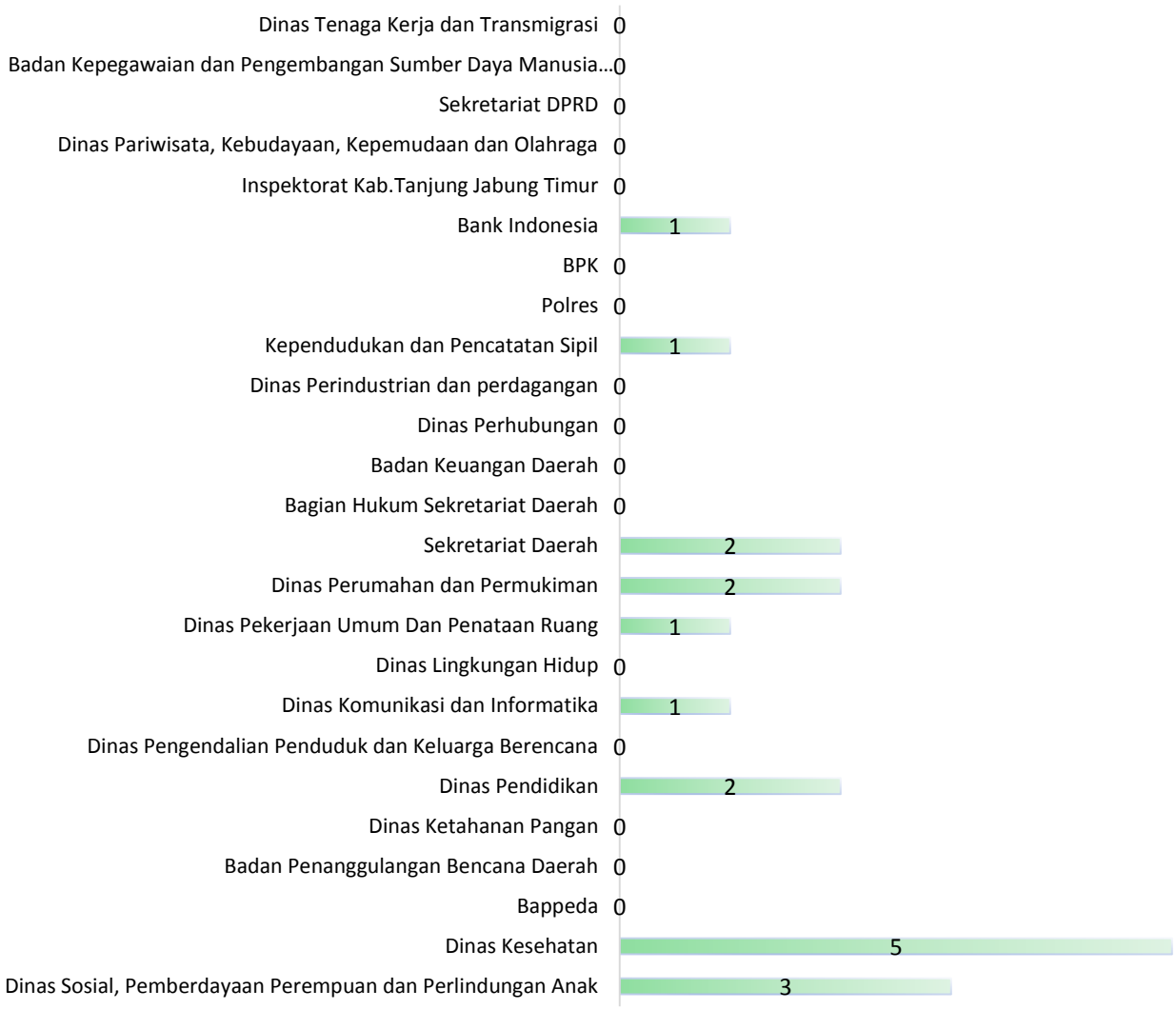
No	OPD	Jumlah Indikator	Indikator		Program Pembangunan Terkait TPB Yang Dilaksanakan (Bab VI RPJMD versi review)	Program/Kegiatan Dalam Permendagri 90/2019 Terkait TPB yang belum dilaksanakan (belum tertuang dalam RPJMD Sebelumnya)	
						Kode	Program
				tujuan penempatan			
			10.7.2 (b)	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	**4.01.02**	**Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat**
						4.01.02.2.4	Fasilitasi Kerjasama Daerah

Tabel V.18
Kondisi Capaian TPB Berdasarkan OPD yang Bertanggung Jawab

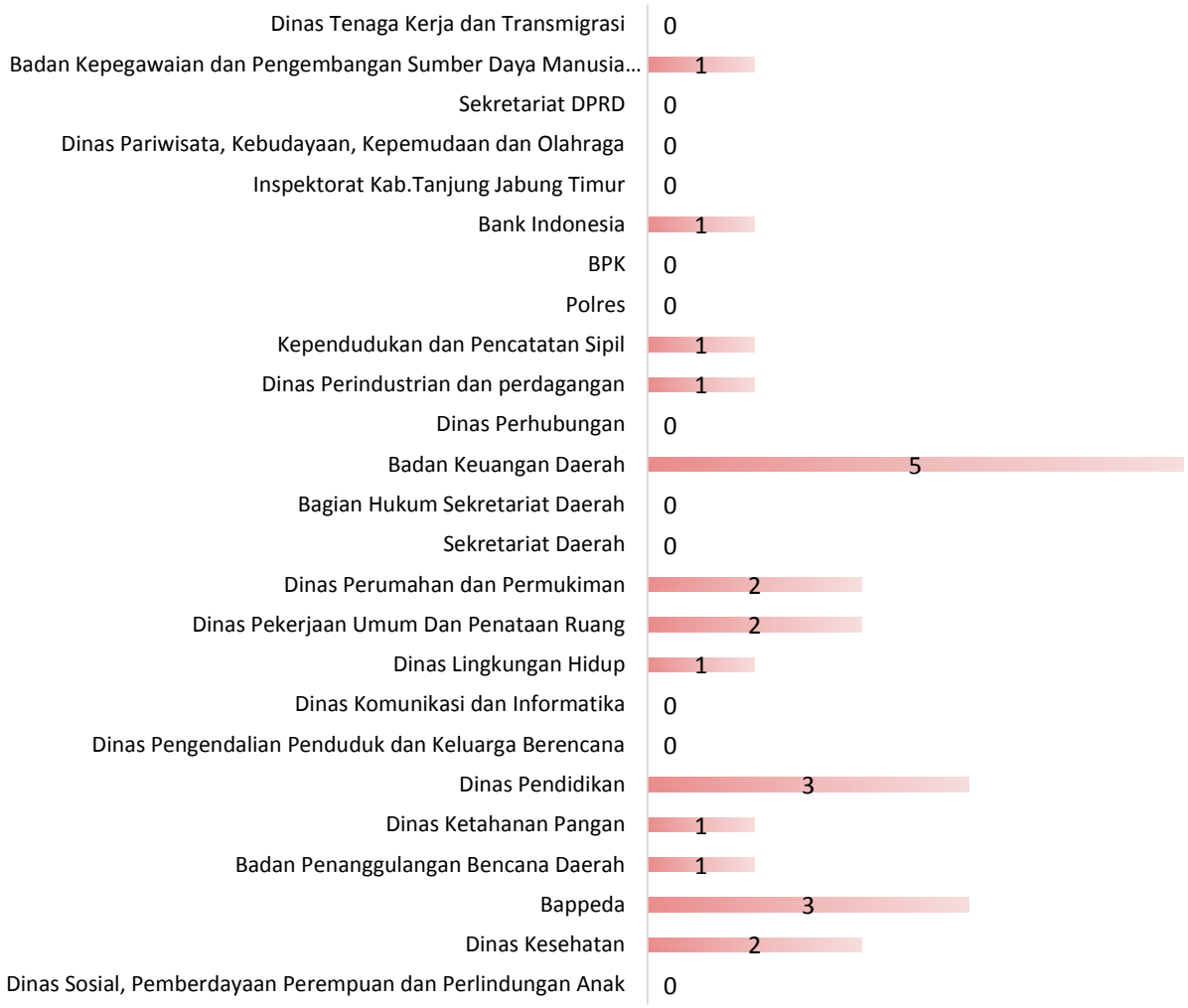
No	Dinas	Jumlah Indikator Mencapai Terget	Jumlah Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target	Jumlah Indikator TPB yang sudah dilaksanakan namun perlu perhatian khusus	Jumlah Indikator TPB yang Belum dilaksanakan	Jumlah Indikator N/A
1	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2	3	0	0	6
2	Dinas Kesehatan	3	5	2	0	10
3	Bappeda	0	0	3	0	0
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	0	1	0	3
5	Dinas Ketahanan Pangan	0	0	1	0	1
6	Dinas Pendidikan	2	2	3	0	2
7	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0	0	0	0	1
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	1	0	0	0
9	Dinas Lingkungan Hidup	0	0	1	0	9
10	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	0	1	2	0	3
11	Dinas Perumahan dan Permukiman	0	2	2	0	1
12	Sekretariat Daerah	3	2	0	0	3
13	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	0	0	0	0	6
14	Badan Keuangan Daerah	0	0	5	0	3
15	Dinas Perhubungan	0	0	0	0	1
16	Dinas Perindustrian dan perdagangan	0	0	1	0	0
17	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3	1	1	0	0
18	Polres	0	0	0	0	3
19	BPK	1	0	0	0	0
20	Bank Indonesia	0	1	1	0	0
21	Inspektorat Kab.Tanjung Jabung Timur	1	0	0	0	3
22	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	0	0	0	0	1
23	Sekretariat DPRD	1	0	0	0	0
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0	0	1	0	0
25	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0	0	0	0	2
Jumlah		**17**	**18**	**24**	**0**	**58**



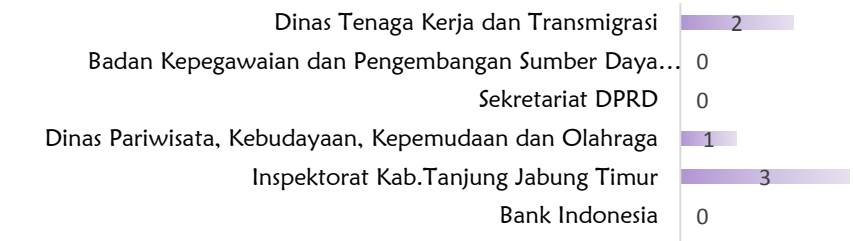
Gambar 5.2
Grafik Jumlah Indikator Mencapai Terget Pada Perangkat Daerah (PD)



Gambar 5.3
Grafik Jumlah Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target Pada Perangkat Daerah (PD)



Gambar 5.4
Grafik Indikator TPB yang sudah dilaksanakan namun perlu perhatian khusus Pada Perangkat Daerah (PD)



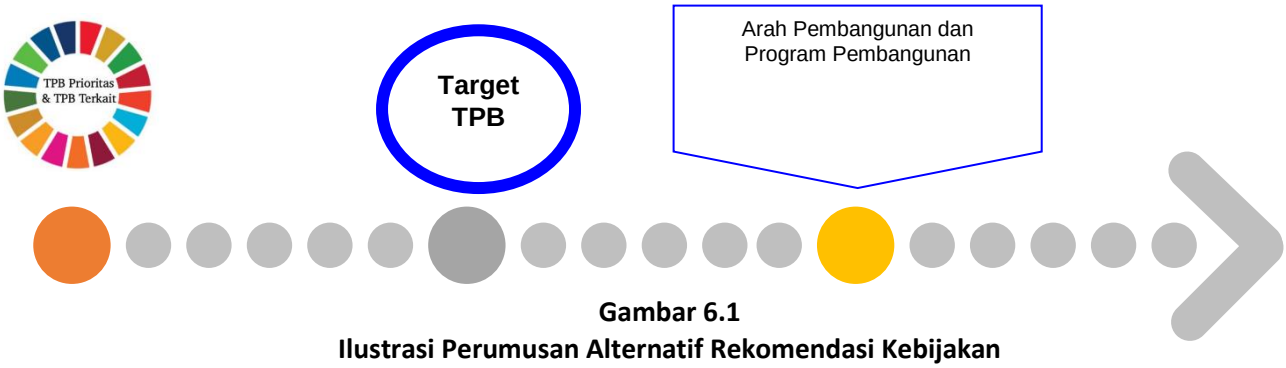
Gambar 5.5
Grafik Indikator TPB yang Tidak Memiliki Data (N/A) Pada Perangkat Daerah (PD)

BAB VI
ALTERNATIF SKENARIO DAN REKOMENDASI

Skenario dan rekomendasi merupakan masukan yang dapat diberikan dalam penyusunan rancangan awal RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur selanjutnya berdasarkan hasil pengkajian daya dukung daya tampung lingkungan hidup, isu strategis Pembangunan berkelanjutan, dan kondisi ketercapaian indikator TPB.

Perumusan skenario pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) didasarkan pada hasil analisis hubungan antara kesenjangan (gap)/masalah dan TPB lainnya. Analisis gap/permasalahan TPB diuraikan berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah dibahas sebelumnya dan dinilai penting untuk ditangai dalam konteks pembangunan daerah selama kurun waktu 20 (duapuluh) tahun kedepan. Secara terstruktur, rumusan topik dalam TPB masing-masing prioritas menjadi dasar penentuan pencapaian hasil yang diharapkan dalam rumusan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada masa yang akan datang.

Perumusan dilakukan dengan serangkaian kegiatan, yaitu: penyiapan draft alternatif yang selanjutnya dibahas bersama. Rangkaian rekomendasi disampaikan melalui ilurtrasi sebagai berikut:



Gambar 6.1
Ilustrasi Perumusan Alternatif Rekomendasi Kebijakan

Perumusan rekomdendasi diawali dengan melihat keterkaitan Isu PB strategis dengan indikator terkait. Konsep ini dimaksudkan agar Isu PB yang sudah disepakati dan dirumuskan dapat memberikan pengaruh selain kondisi capaian indikator TPB. Matriks keterkaitan antara Isu PB stragis dengan kondisi capaian Indikator TPB diuraikan dengan tabel berikut ini:

Tabel VI.1
Matriks Keterkaitan Isu PB Strategis dengan Indikator TPB

SU PB	Deskripsi Isu	6 Muatan KLHS	Sasaran Yang Diharapkan	Indikator TPB Terkait	
				Butuh Upaya Tambahan	BAU
Alih Fungsi Lahan	Perubahan fungsi lahan sawah menjadi lahan Perkebunan karena orientasi ekonomi	**a) Kapasitas D3TLH ;** Penurunan daya dukung pangan; **b) Perkiraan Dampak resiko LH;** Dampak ekonomi dan sosial penduduk hingga finansial pemerintah daerah. **c) Kinerja JE;** Jasa ekosistem penyediaan pangan berpotensi menurun. **d) Status Mutu dan ketersediaan SDA;** Penurunan luas lahan pertanian tanaman pangan **e) Ketahanan dan Potensi Kehati;** Kerusakan kehati terhadap perubahan kawasan hutan mejadi perkebunan. **f) Kerentanan Kapasitas terhadap Adaptasi Perubahan iklim;** Penurunan luas hijau selanjutnya berdampak penurunan penyerapan karbon	1. Penetapan dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan; 2. Perlindungan lahan basah dan gambut dalam; 3. Perlindungan kawasan sempadan sungai dan danau; 4. Rehabilitasi Mangrove Pantai Timur; 5. Pengembangan kegiatan budidaya di lahan sesuai daya dukung; 6. Pengembangan permukiman yang aman (bebas bencana), nyaman, dan berwawasan lingkungan; 7. Peningkatan ketersediaan ruang terbuka hijau kawasan pusat-pusat permukiman	• 2.a.1* Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah • 2.c.1* Indikator anomali harga pangan • 2.4.1.(a) Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan, • (11.6. 2(b))Indeks Kualitas Udara	• (1.4.2*) Proporsi dan penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.
Resiko Bencana	• Banjir; • Tanah Longsor; dan • Karhutla	**a) Kapasitas D3TLH ;** • Penurunan kualitas air permukaan; • Kerusakan lahan pertanian.	• Kerentanan bencana yang dapat diminimalisir • Kejadian bencana termitigasi dengan baik.	• 1.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	

SU PB	Deskripsi Isu	6 Muatan KLHS	Sasaran Yang Diharapkan	Indikator TPB Terkait	
				Butuh Upaya Tambahan	BAU
		b) Perkiraan Dampak resiko LH; • Penurunan kualitas udara • Penurunan lahan layak pengembangan permukiman. **c) Kinerja JE;** Jasa ekosistem tata Kelola berada di kategori sangat rendah hingga sedang. **d) Status Mutu dan ketersediaan SDA;** Penurunan luas lahan layak perkembangan permukiman **e) Ketahanan dan Potensi Kehati;** Kerusakan kehati di sempadan sungai dan paparan banjir lainnya. **f) Kerentanan Kapasitas terhadap Adaptasi Perubahan iklim;** Penurunan luas hijau yang terpapar banjir dan selanjutnya berdampak penurunan penyerapan karbon			
Permukiman Layak Huni	a) Kecenderungan titik tumbuh permukiman di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berorientasi kepada aliran Sungai ataupun muara; b) Memanfaatkan lahan tidak sesuai daya dukung karena berada di aliran Sungai, sempadan, dan/atau daerah terpapar pasang	**a) Kapasitas D3TLH ;** Dampak terhadap daya tampung air terhadap sampah dan limbah lainnya, yang tidak terkelolaa (dibuang ke badan air/dihampar di tanah) **b) Perkiraan Dampak resiko LH;** Pencemaran air permukaan dan resiko kesehatan Masyarakat dan selanjutnya peningkatan	• Perkembangan permukiman di zona sesuai daya dukung dan peraturan perundang-undangan; • Perkembangan permukiman dengan akses air minum dan sanitasi baik; • Kepadatan bangunan tertata dan sehat	• 6.4.2 (a) Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya • 6.4.2 (b) Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air tanah terhadap ketersediaanya	6.1.1 Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman (6.2.1) Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun

SU PB	Deskripsi Isu	6 Muatan KLHS	Sasaran Yang Diharapkan	Indikator TPB Terkait	
				Butuh Upaya Tambahan	BAU
	surut.	pengeluaran/konsumsi untuk rehabilitasi kesehatan. **c) Kinerja JE;** Penurunan jasa ekosistem tata kelola air dan tempat tinggal. **d) Status Mutu dan ketersediaan SDA;** Penurunan mutu kualitas air tanah dan air permukaan **e) Ketahanan dan Potensi Kehati;** Kerusakan kehati di sungai. **f) Kerentanan Kapasitas terhadap Adaptasi Perubahan iklim;** Tumpukan sampah di udara terbuka mengeluarkan gas metana, salah satu gas yang bertanggung jawab atas pemanasan global			
Investasi dan Permodalan	• Struktur ekonomi masih didominasi sektor primer • Sektor pertanian 21,44% • Sektor pertambangan dan galian 43,02%	**a) Kapasitas D3TLH ;** Peningkatan kegiatan ekonomi-peningkatan lalu lintas-Peningkatan emisi berdampak lebih lanjut terhadap Kualitas udara buruk berpotensi dampak terhadap . kerusakan fisiologis tanaman pertanian pangan, seperti nekrosis daun, akibat partikulat dan senyawa-senyawa kimia beracun dalam udara. **b) Perkiraan Dampak resiko LH;** • Pembangunan tidak sesuai daya dukung lingkungan hidup berdampak terhadap penurunan	• Perkembangan ekonomi dan peningkatan pendapatan Masyarakat; • Perkembangan sektor sekunder dan tersier untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemanfaatan sumberdaya alam	• 8.1.1* Laju pertumbuhan PDB perkapita • 8.1.1 (a) PDB per kapita • 8.2.1* Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	• 1.1.1* Tingkat Kemiskinan Ekstrim • 1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.

SU PB	Deskripsi Isu	6 Muatan KLHS	Sasaran Yang Diharapkan	Indikator TPB Terkait	
				Butuh Upaya Tambahan	BAU
		kualitas lingkungan permukiman; • peningkatan emisi karbon **c) Kinerja JE;** Penurunan jasa layanan ekosistem terutama kelompok penyediaan dan pengaturan akibat peningkatan tutupan lahan/perubahan rona eksisting **d) Status Mutu dan ketersediaan SDA;** Penurunan mutu udara **e) Ketahanan dan Potensi Kehati;** perubahan guna lahan dari non terbangun menjadi terbangun, berpotensi dampak terhadap menurunnya tempat hidup flora dan fauna, serta peningkatan sedimen yang mendukung pendangkalan DAS dan Sub Das. **f) Kerentanan Kapasitas terhadap Adaptasi Perubahan iklim;** potensi penurunan lahan hijau dan selanjutnya menurunkan penyerap karbon			

SU PB	Deskripsi Isu	6 Muatan KLHS	Sasaran Yang Diharapkan	Indikator TPB Terkait	
				Butuh Upaya Tambahan	BAU
Transportasi	Kondisi fisik dasar, sebaran kawasan permukiman yang berorientasi badan air, mengelompok, dan tersebar menyebabkan kesulitan dalam penyediaan prasarana jalan yang memadai yang disebabkan oleh tingginya biaya pembangunan dan rehabilitasi yang dibutuhkan	**a) Kapasitas D3TLH ;** peningkatan lalu lintas-Peningkatan emisi berdampak lebih lanjut terhadap Kualitas udara buruk berpotensi dampak terhadap . kerusakan fisiologis tanaman pertanian pangan, seperti nekrosis daun, akibat partikulat dan senyawa-senyawa kimia beracun dalam udara. **b) Perkiraan Dampak resiko LH;** Penurunan kualitas udara **c) Kinerja JE;** - **d) Status Mutu dan ketersediaan SDA;** Penurunan mutu udara **e) Ketahanan dan Potensi Kehati;** Jaringan jalan dapat memicu perubahan guna lahan dari non terbangun menjadi terbangun, berpotensi dampak terhadap menurunnya tempat hidup flora dan fauna, serta peningkatan sedimen yang mendukung pendangkalan DAS dan Sub Das. **f) Kerentanan Kapasitas terhadap Adaptasi Perubahan iklim;** potensi penurunan lahan hijau dan selanjutnya menurunkan penyerap karbon	- Konektivitas antar kawasan permukiman dengan kawasan pusat-pusat; - Kondisi jalan mantap - Transportasi Sungai yang aman.		9.1.1. (a) Kondisi mantap jalan nasional.

Dari tabel diatas, dapat terlihat bahwa terdapat 8 (delapan) indikator TPB yang butuh upaya tambahan dan terkait dengan Isu PB strategis. 8 (delapan) indikator TPB tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel VI.2
Rekapitulasi Indikator TPB yang Perlu Perhatian Khusus
Yang Terkait Dengan Isu PB Strategis

Tujuan	Indikator TPB Perlu Perhatian Khusus
Tujuan 1	• 1.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang
Tujuan 2	• 2.a.1* Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah • 2.c.1* Indikator anomali harga pangan • 2.4.1.(a) Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan,
Tujuan 6	• (6.2.1) Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun • 6.4.2 (a) Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya • 6.4.2 (b) Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air tanah terhadap ketersediaanya
Tujuan 8	• 8.1.1* Laju pertumbuhan PDB perkapita • 8.1.1 (a) PDB per kapita • 8.2.1* Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun
Tujuan 11	• (11.6. 2(b))Indeks Kualitas Udara

Sumber: Tim Penyusun

6.1 ALTERNATIF SKENARIO DAN REKOMENDASI DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG DAERAH

6.1.1 Alternatif dan Rekomendasi Daya Dukung Pangan

Dengan tujuan melakukan antisipasi terhadap pertumbuhan jumlah penduduk dan jumlah kebutuhan pangan yang memiliki kecenderungan meningkat setiap tahunnya, maka perlu dilakukan upaya dalam mempertahankan status daya dukung pangan agar tidak terlampaui dengan beberapa rekomendasi diantaranya :

Tabel VI.1.1
Alternatif dan Rekomendasi Daya Dukung Pangan

Isu PB Prioritas	TPB	Indikator Dengan Upaya Tambahan	Arah kebijakan	Program
Alih Fungsi Lahan	TPB 2: Tanpa Kelaparan	• 2.a.1* Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah • 2.c.1* Indikator anomali harga pangan • 2.4.1.(a) Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan,	• Updating dan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan; • Membangun dan mengembangkan sistem jaringan irigasi • Membangun dan mengembangkan sistem jaringan jalan usaha tani • Mengembangkan sistem pasca panen tanaman pangan • Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada sektor pertanian dan perikanan • Peningkatan kerjasama di berbagai sektor untuk pembangunan dan peningkatan pendapatan Masyarakat petani dan nelayan • Peningkatan akses pemodalan petani dan nelayan	• Program Penyelenggaraan Penataan Ruang • Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati • Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian • Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian • Program Pengelolaan Sumber Ekonomi Untuk Kadaulatan Dan Kemandirian Pangan • Program Pengelolaan Sumberdaya Air
Ekonomi, Investasi Permodalan	TPB 8 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi n	• 8.1.1* Laju pertumbuhan PDB perkapita • 8.1.1 (a) PDB per kapita • 8.2.1* Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun		

6.1.2 Alternatif dan Rekomendasi Daya Dukung Air

Adanya potensi alih fungsi lahan yang tinggi menyebabkan penurunan kualitas lahan, khususnya kawasan belum terbangun seperti resapan air yang berdampak kepada penurunan kualitas air, beberapa skenario dan rekomendasi yang dapat dilakukan dalam mempertahankan JE daya dukung air di Kabupaten Tanjung Jabung Timur diantaranya adalah :

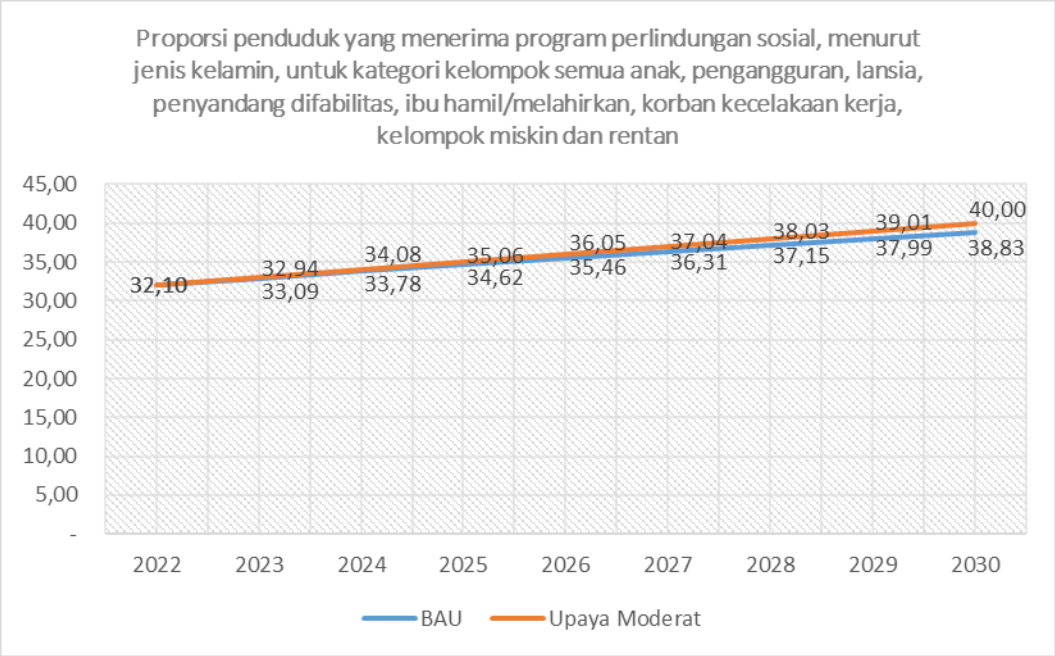
Tabel VI.1.2
Alternatif dan Rekomendasi Daya Dukung Air

Isu PB Prioritas	TPB	Indikator Dengan Upaya Tambahan	Arah kebijakan	Program
Permukiman Layak Huni (LH5)	TPB 6 : menjamin ketersediaan dan pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berbasis untuk semua	• 6.4.2 (a) Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya • 6.4.2 (b) Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air tanah terhadap ketersediaanya	• Pengendalian pemanfaatan ruang sempadan Sungai dan sempadan pantai • Peningkatan kapasitas produksi IPA • Pengembangan dan rehabilitasi jaringan distribusi perpipaan • Penngembangan SPAM non perpipaan • Pembangunan dan pengembangan SPAL-D skala permukiman • Peningkatan akses pelayanan persampahan • Penerapan mitigasi bencana dan perubahan iklim • Menarik perkembangan permukiman menjauh dari DAS/sempadan sungai	• Program penyelenggaraan penataan ruang • Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum-Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten/Kota • Program pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah Domestik • Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan • Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)-Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai dan Wilayah Sungai (WS) dalam 1(satu) daerah Kabupaten/Kota • Program Penataan Bangunan Gedung • Program pengembangan permukiman • Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

6.2 ALTERNATIF SKENARIO DAN REKOMENDASI PADA TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB) DENGAN UPAYA TAMBAHAN

1. Tujuan 1 : Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun

Analisis Proyeksi Pencapaian TPB



Gambar 6.2.1
Proporsi Penduduk Yang Menerima Program Perlindungan Sosial, Menurut Jenis Kelamin, Untuk Kategori Kelompok Semua Anak, Pengangguran, Lansia, Penyandang Difabilitas, Ibu Hamil/Melahirkan, Korban Kecelakaan Kerja, Kelompok Miskin Dan Rentan

Tabel VI.2.1
Proyeksi Proporsi Penduduk Yang Menerima Program Perlindungan Sosial, Menurut Jenis Kelamin, Untuk Kategori Kelompok Semua Anak, Pengangguran, Lansia, Penyandang Difabilitas, Ibu Hamil/Melahirkan, Korban Kecelakaan Kerja, Kelompok Miskin Dan Rentan

Indikator	Indikator	Proyeksi	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.3.1*	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan	BAU	32,10	32,94	33,78	34,62	35,46	36,31	37,15	37,99	38,83
		Upaya Tambahan Moderat	7,40	7,03	6,66	6,29	5,92	5,55	5,18	4,81	4,44

Gap Pencapaian TPB

- (1.1.1*) Tingkat Kemiskinan Ekstrim.
- (1.2.1*) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.
- (1.3.1(a)) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.
- (1.5.1*) Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang

a. Keterkaitan TPB 1

Tabel VI.2.2
Keterkaitan TPB Tujuan 1 Terhadap Indikator TPB Yang Berkorelasi Kuat

Tujuan	Indikator TPB
Tujuan 1 : Tanpa Kemiskinan	• (2.a.1*) Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah • (8.1.1*) Laju pertumbuhan PDB perkapita • (8.1.1.a*) PDB per kapita • (8.2.1*) Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun. • (9.2.1 (a)) Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur. • (10.1.1 (a)) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. • (17.1.1.*) Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya. • (17.1.1.(a)) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.

b. Sasaran Dan Arah Kebijakan

Tabel VI.2.3
Sasaran dan Arah Kebijakan TPB Tujuan 1

Sasaran	Arah Kebijakan 2025-2030
• Penurunan Kemiskinan di Segala Dimensi • Peningkatan ketahanan pangan terhadap masyarakat miskin dan rentan • Peningkatan infrastruktur untuk meningkatan ekonomi Masyarakat • Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia • Peningkatan akses permodalan usaha • Peningkatan akses terhadap sumber daya ekonomi dan pelayanan dasar terhadap masyarakat miskin dan rentan • Perlindungan sosial dan layanan kesehatan terhadap kelompok miskin, rentan dan disabilitas	Mewujudkan transformasi ekonomi dan sosial: • Membangun dan mengembangkan sistem jaringan irigasi • Membangun dan mengembangkan sistem jaringan jalan usaha tani • Mengembangkan sistem pasca panen tanaman pangan • Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada sektor pertanian dan perikanan • Peningkatan kerjasama di berbagai sektor untuk pembangunan dan peningkatan pendapatan Masyarakat petani dan nelayan • Peningkatan akses pemodalan petani dan nelayan; • Meningkatkan pemerataan akses pendidikan • Meningkatkan pemerataan akses fasilitas dan tenaga kesehatan • Meningkatkan jumlah kepesertaan jaminan sosial • Mengembangkan balai Latihan kerja • Meningkatkan jaringan internet untuk akses platform digital • Pengembangan koperasi dan UMKM t 1 | t 2 | t3 | t4 | t5 √ | √ | √ | √ | √

Tabel VI.2.4
Sasaran, Arah Kebijakan dan alternatif rekomendasi skenario

Tujuan	Indikator	Isu PB Strategis	Rekomendasi Program	OPD yang bertanggung jawab
Tujuan 1 : Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk di Manapun	(1.1.1*) Tingkat Kemiskinan Ekstrim.	Ekonomi, investasi permodalan (LH6)	• Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan • Program Perlindungan dan Jaminan Sosial • Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja • Program Pengembangan Koperasi dan UMKM	• Bappeda • Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak • Dinas Perindustrian dan Perdagangan • Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
	(1.2.1*) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Ekonomi, investasi permodalan (LH6)	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	• Bappeda • Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
	(1.3.1(a)) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Ekonomi, investasi permodalan (LH6)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat-Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat daerah Kabupaten/Kota	• Dinas Kesehatan
	(1.5.1*) Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Resiko Rawan Bencana (LH3)	• Program Penanganan Bencana-perlindungan Sosial Korban bencana alam dan sosial Kabupaten/Kota • Program Penanggulangan Bencana	• Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak • Badan Penanggulangan Bencana Daerah

2. Tujuan 2 : Tanpa Kelaparan

Gap Pencapaian TPB

- (2.a.1*) Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah

a. Keterkaitan TPB 2

Tabel VI.2.5
Keterkaitan TPB Tujuan 2 Terhadap Indikator TPB Yang Berkorelasi Kuat

Tujuan	Indikator TPB
Tujuan 2 : Tanpa Kemiskinan	• (1.3.1*) Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan. • (1.3.1(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan • (1.4.2*) Proporsi dan penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan. • (1.5.1*) Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. • (1.5.4*) Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana daerah yang selaras dengan strategi pengurangan risiko bencana nasional • (2.a.1*) Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah • (8.1.1*) Laju pertumbuhan PDB perkapita • (8.1.1.a*) PDB per kapita • (8.2.1*) Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun. • (9.2.1 (a)) Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur. • (10.1.1 (a)) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. • (17.1.1.*) Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya. • (17.1.1.(a)) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.

b. Sasaran Dan Arah Kebijakan

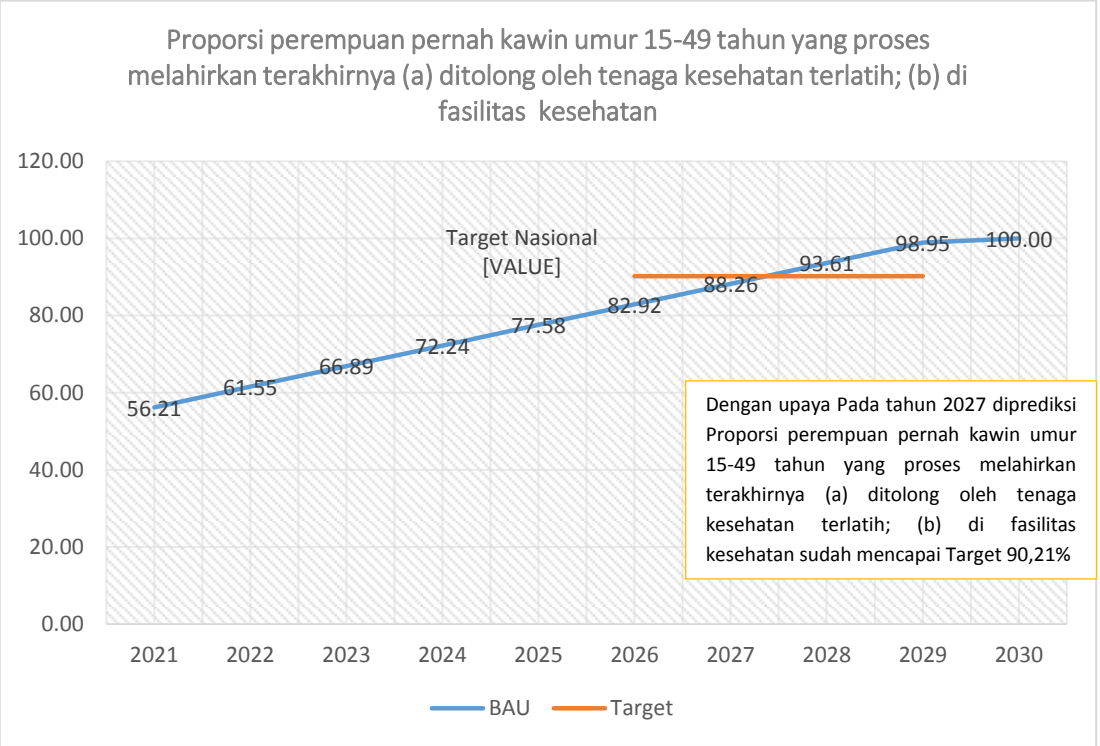
Tabel VI.2.6
Sasaran dan Arah Kebijakan TPB Tujuan 2

Sasaran	Arah Kebijakan 2025-2030
• Penghapusan kelaparan dan peningkatan akses terhadap makanan bergizi • Penurunan kemiskinan di semua dimensi • Penurunan Kemiskinan di Segala Dimensi • Peningkatan ketahanan pangan terhadap masyarakat miskin dan rentan • Peningkatan infrastruktur untuk meningkatan ekonomi masyarakat • Peningkatan akses terhadap sumber daya ekonomi dan pelayanan dasar terhadap masyarakat miskin dan rentan • Perlindungan sosial dan layanan kesehatan terhadap kelompok miskin, rentan dan disabilitas	Mewujudkan transformasi ekonomi dan sosial: • Updating dan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan; • Membangun dan mengembangkan sistem jaringan irigasi • Membangun dan mengembangkan sistem jaringan jalan usaha tani • Mengembangkan sistem pasca panen tanaman pangan • Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada sektor pertanian dan perikanan • Peningkatan kerjasama di berbagai sektor untuk pembangunan dan peningkatan pendapatan Masyarakat petani dan nelayan • Peningkatan akses pemodalan petani dan nelayan; • Meningkatkan pemerataan akses pendidikan • Meningkatkan pemerataan akses fasilitas dan tenaga kesehatan • Meningkatkan jumlah kepesertaan jaminan sosial • Mengembangkan balai Latihan kerja • Meningkatkan jaringan internet untuk akses platform digital • Pengembangan koperasi dan UMKM t1 | t2 | t3 | t4 | t5 √ | √ | √ | √ | √

Tabel VI.2.7
Sasaran, Arah Kebijakan dan alternatif rekomendasi skenario

Tujuan	Indikator	Isu PB Strategis	Rekomendasi Program	OPD yang bertanggung jawab
Tujuan 2 : Tanpa Kelaparan	(2.a.1*) Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah	Ekonomi, Investasi Permodalan (LH6)	• Program Penyelenggaraan Penataan Ruang • Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian • Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian • Program Pengelolaan Sumber Ekonomi Untuk Kadaulatan Dan Kemandirian Pangan • Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk Kedaulatan dan kemandirian pangan • Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan Pangan Masyarakat • Program Penanganan Kerawanan Pangan • Program Pengawasan Keamanan Pangan • Program Penyelenggaraan Penataan Ruang • Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati • Program pengelolaan perikanan tangkap • Program pengelolaan perikanan budidaya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan Dinas Perikanan

3. Tujuan 3 : Kehidupan Sehat dan Sejahtera



Gambar 6.2.2
Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas Kesehatan

Tabel VI.2.8
Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas Kesehatan

Indikator	Indikator	Proyeksi	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan	BAU	61,55	66,89	72,24	77,58	82,92	88,26	93,61	98,95	100,00
		Target Nasional	90,21								

Gap Pencapaian TPB

- (3.1.1*) Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan.
- (3.a.1*) Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.

a. Keterkaitan TPB 3

Tabel VI.2.9
Keterkaitan TPB Tujuan 3 Terhadap Indikator TPB Yang Berkorelasi Kuat

Tujuan	Indikator TPB
Tujuan 3 : Kehidupan Sehat dan Sejahtera	• (4.1.2*) Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat. • (4.1.2(a)) Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/ sederajat. • (4.2.2*) Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin.

b. Sasaran Dan Arah Kebijakan

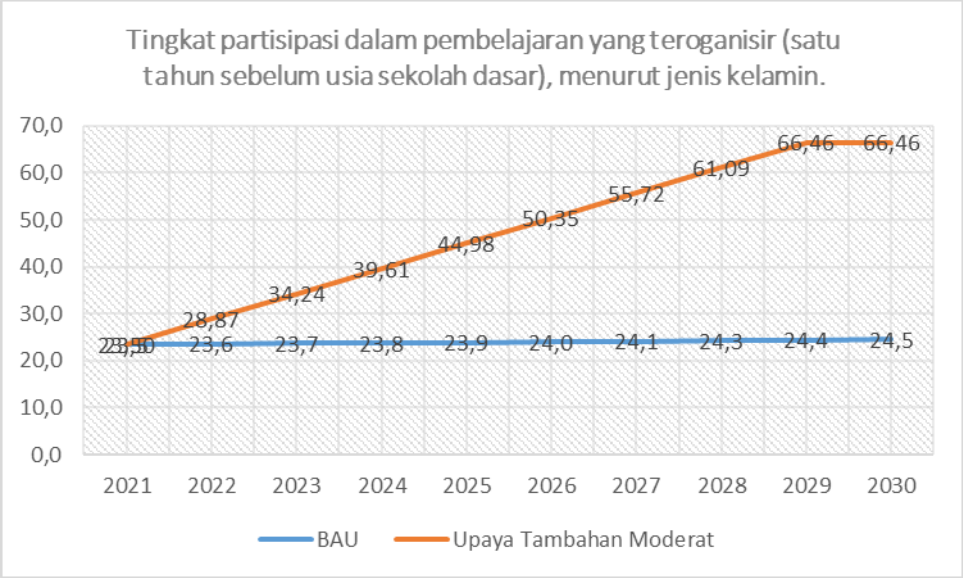
Tabel VI.2.10
Sasaran dan Arah Kebijakan TPB Tujuan 3

Sasaran	Arah Kebijakan 2025-2030
• Penurunan Angka kematian Ibu dan Anak • Peningkatan Akses Layanan Kesehatan • Penurunan jumlah kematian akibat penyakit menular • Penyediaan sarana pendidikan merata untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia • Peningkatan penyediaan layanan publik pada sektor pendidikan	Mewujudkan transformasi sosial t1 | t2 | t3 | t4 | t5 √ | √ | √ | √ | √

Tabel VI.2.11
Sasaran, Arah Kebijakan dan alternatif rekomendasi skenario

Tujuan	Indikator	Isu PB Strategis	Rekomendasi Program	OPD yang bertanggung jawab
Tujuan 3 : Kehidupan Sehat dan Sejahtera	(3.1.1*) Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan.		• Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat • Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
	(3.a.1*) Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan

4. Tujuan 4 : Pendidikan Berkualitas



Gambar 6.2.3
Grafik Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin

Tabel VI.2.12
Proyeksi Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin. Tahun 2022-2030 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Indikator	Indikator	Proyeksi	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4.2.2*	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin.	BAU	23,6	23,7	23,8	23,9	24,0	24,1	24,3	24,4	24,5
		Upaya Tambahan	28,87	34,24	39,61	44,98	50,35	55,72	61,09	66,46	66,46

Gap Pencapaian TPB

- (4.1.2*) Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat.
- (4.1.2(a)) Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/ sederajat.
- (4.2.2*) Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin.
- (4.3.1 (a)) Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).

- (4.4.1(a)) Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
- (4.5.1*) Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/laki-laki, (b) pedesaan/perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas.

a. Keterkaitan TPB 4

Tabel VI.2.13
Keterkaitan TPB Tujuan 4 Terhadap Indikator TPB Yang Berkorelasi Kuat

Tujuan	Indikator TPB
Tujuan 4 : Pendidikan Berkualitas	• 1.1.1*-Tingkat Kemiskinan Ekstrim • 1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.

b. Sasaran Dan Arah Kebijakan

Tabel VI.2.14
Sasaran dan Arah Kebijakan TPB Tujuan 4

Sasaran	Arah Kebijakan 2025-2045
• Penyediaan sarana pendidikan merata untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia • Peningkatan penyediaan layanan publik pada sektor pendidikan • Penurunan Angka kematian Ibu dan Anak • Peningkatan Akses Layanan Kesehatan • Penurunan jumlah kematian akibat penyakit menular	Mewujudkan transformasi sosial t1: √ | t2: √ | t3: √ | t4: √ | t5: √

Tabel VI.2.15
Sasaran, Arah Kebijakan dan alternatif rekomendasi skenario

Tujuan	Indikator	Isu PB Strategis	Rekomendasi Program	OPD yang bertanggung jawab
Tujuan 4 : Pendidikan Berkualitas	(4.1.2*) Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat.		• Program Pengelolaan Pendidikan - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar • Program Pengelolaan Pendidikan - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan
	(4.1.2(a)) Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/ sederajat.		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan - Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan
	(4.2.2*) Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin.		Program Pengelolaan Pendidikan - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan
	(4.3.1 (a)) Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).		-	-
	(4.4.1(a)) Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).		Program Pengelolaan Pendidikan - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan
	(4.5.1*) Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/laki-laki, (b) pedesaan/perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas.		• Program Pengelolaan Pendidikan - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar • Program Pengelolaan Pendidikan - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan

5. Tujuan 5 : Kesetaraan Gender

Gap Pencapaian TPB

- (5.5.1) Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah

a. Keterkaitan TPB 5

Tabel VI.2.16
Keterkaitan TPB Tujuan 5 Terhadap Indikator TPB Yang Berkorelasi Kuat

Tujuan	Indikator TPB
Tujuan 5 : Kesetaraan Gender	• (4.1.2*) Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat. • (4.1.2(a)) Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/ sederajat. • (4.2.2*) Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin. • (16.7.1.(b)) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)

b. Sasaran Dan Arah Kebijakan

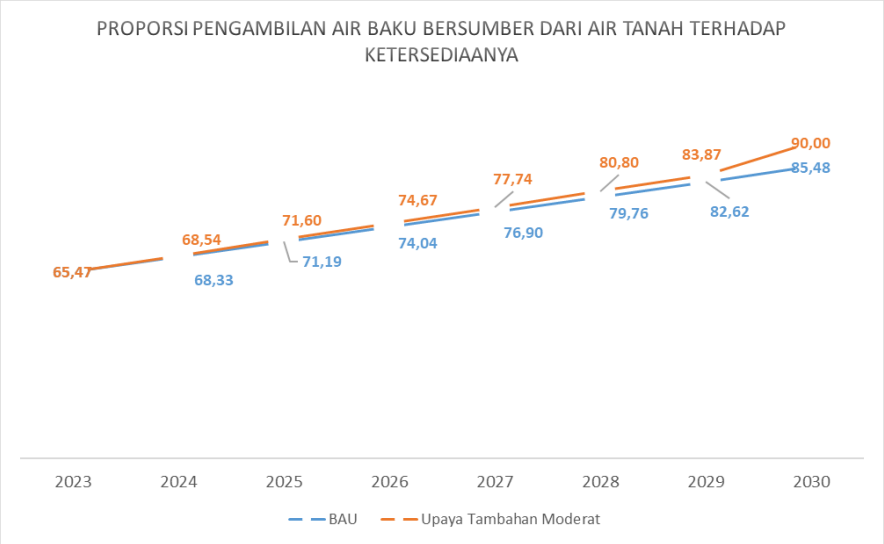
Tabel VI.2.17
Sasaran dan Arah Kebijakan TPB Tujuan 5

Sasaran	Arah Kebijakan 2025-2030
• Penyediaan sarana pendidikan merata untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia • Peningkatan penyediaan layanan publik pada sektor pendidikan • Peningkatan partisipasi gender dalam pemerintahan • Peningkatan pengarus utamaan gender	Mewujudkan transformasi sosial t1: √ | t2: √ | t3: √ | t4: √ | t5: √

Tabel VI.2.18
Sasaran, Arah Kebijakan dan alternatif rekomendasi skenario

Tujuan	Indikator	Isu PB Strategis	Rekomendasi Program	OPD yang bertanggung jawab
Tujuan 5 : Kesetaraan Gender	(5.5.1) Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah		• Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

6. Tujuan 6 : Air Bersih dan Sanitasi Layak



Gambar 6.2.4
Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air tanah terhadap ketersediaanya

Tabel VI.2.19
Proyeksi Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air tanah terhadap ketersediaanya

Indikator	Indikator	Proyeksi	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
6.4.2(b)	Proyeksi Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air tanah terhadap ketersediaanya	BAU	65,47	68,33	71,19	74,04	76,90	79,76	82,62	85,48
		Upaya Tambahan	65,47	68,54	71,60	74,67	77,74	80,80	83,87	90,00

Gap Pencapaian TPB

- (6.1.1) Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman
- (6.4.2 (a) Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya
- (6.4.2(b)) Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air tanah terhadap ketersediaanya

a. Keterkaitan TPB 6

Indikator TPB yang berkorelasi kuat :

Tabel VI.2.20
Keterkaitan TPB Tujuan 6 Terhadap Indikator TPB Yang Berkorelasi Kuat

Tujuan	Indikator TPB
Tujuan 6 : Air Bersih dan Sanitasi Layak	• (11.6. 2(b))Indeks Kualitas Udara.

b. Sasaran Dan Arah Kebijakan

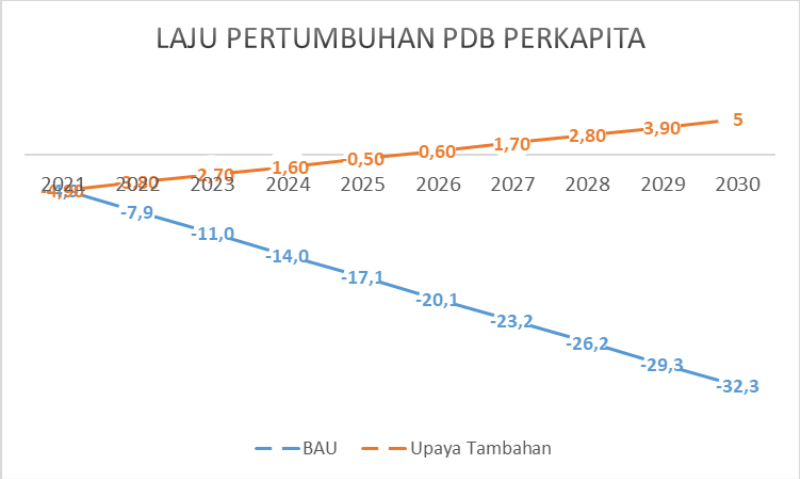
Tabel VI.2.21
Sasaran dan Arah Kebijakan TPB Tujuan 6

Sasaran	Arah Kebijakan 2025-2030
• Peningkatan akses layanan air minum perpipaan yang merata • Peningkatan akses sanitasi bersih untuk semua • Peningkatan pengelolaan lumpur tinja • Pengelolaan sumber daya air • Perlindungan DAS dan sumber air	Mewujudkan transformasi sosial dan ekologi t1 | t2 | t3 | t4 | t5 √ | √ | √ | √ | √

Tabel VI.2.22
Sasaran, Arah Kebijakan dan alternatif rekomendasi skenario

Tujuan	Indikator	Isu PB Strategis	Rekomendasi Program	OPD yang bertanggung jawab
Tujuan 6 : Air Bersih dan Sanitasi Layak	(6.1.1) Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman	Permukiman Layak Huni	• Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum-Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten/Kota • Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan	• Dinas Perumahan dan Permukiman • Dinas Kesehatan
	(6.2.1) Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun		• Program Penyelenggaraan Air Limbah	• Dinas Perumahan dan Permukiman
	(6.4.2(a)) Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya		• Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)-Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai dan Wilayah Sungai (WS) dalam 1(satu) daerah Kabupaten/Kota • Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan-Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	• Dinas Perumahan dan Permukiman • Dinas Lingkungan Hidup
	(6.4.2(b)) Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air tanah terhadap ketersediaanya		• Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)-Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai dan Wilayah Sungai (WS) dalam 1(satu) daerah Kabupaten/Kota • Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan-Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	• Dinas Perumahan dan Permukiman • Dinas Lingkungan Hidup

7. Tujuan 8 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi



Gambar 6.2.5
Grafik Laju pertumbuhan PDB perkapita di Tanjung Jabung Timur

Tabel VI.2.23
Proyeksi Laju pertumbuhan PDB Tahun 2022-2045 perkapita di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Indikator	Indikator	Proyeksi	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB perkapita	BAU	-7,9	-11,0	-14,0	-17,1	-20,1	-23,2	-26,2	-29,3	-32,3
		Upaya Tambahan	-3,80	-2,70	-1,60	-0,50	0,60	1,70	2,80	3,90	5

Gap Pencapaian TPB

- (8.1.1*) Laju pertumbuhan PDB perkapita
- (8.1.1.a*) PDB per kapita
- (8.2.1*) Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.

a. Keterkaitan TPB 8

Tabel VI.2.24
Keterkaitan TPB Tujuan 8 Terhadap Indikator TPB Yang Berkorelasi Kuat

Tujuan	Indikator TPB
Tujuan 8 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	• (1.3.1*) Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan. • (1.3.1(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan • (1.4.2*) Proporsi dan penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan. • (1.5.1*) Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. • (1.5.4*) Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana daerah yang selaras dengan strategi pengurangan risiko bencana nasional • (2.a.1*) Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah • (9.2.1 (a)) Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur. • (10.1.1 (a)) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. • (17.1.1.*) Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya. • (17.1.1.(a)) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.

b. Sasaran Dan Arah Kebijakan

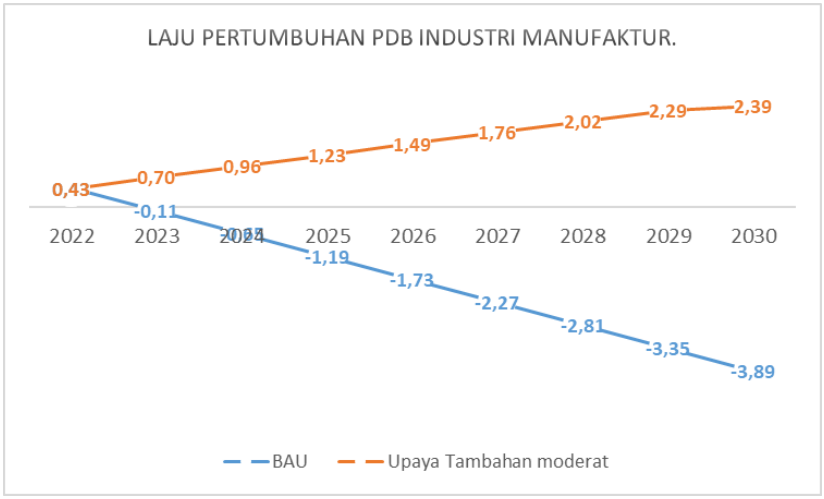
Tabel VI.2.25
Sasaran dan Arah Kebijakan TPB Tujuan 8

Sasaran	Arah Kebijakan 2025-2030
• Meningkatkan pertumbuhan ekonomi per kapita • Meningkatkan produktifitas ekonomi yang lebih baik • Peningkatan akses pelayanan kerja dan layanan jasa keuangan • Penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat usia muda • Penguatan kapasitas lembaga keuangan domestik • Penghapusan kelaparan dan peningkatan akses terhadap makanan bergizi • Penurunan kemiskinan di semua dimensi • Peningkatan ketahanan pangan terhadap masyarakat miskin dan rentan • Peningkatan infrastruktur untuk meningkatan ekonomi masyarakat • Peningkatan akses terhadap sumber daya ekonomi dan pelayanan dasar terhadap masyarakat miskin dan rentan • Perlindungan sosial dan layanan kesehatan terhadap kelompok miskin, rentan dan disabilitas	Mewujudkan transformasi ekonomi dan sosial menuju Tanjung Jabung Timur emas t1 | t2 | t3 | t4 | t5 √ | √ | √ | √ | √

Tabel VI.2.26
Sasaran, Arah Kebijakan dan alternatif rekomendasi skenario

Tujuan	Indikator	Isu PB Strategis	Rekomendasi Program	OPD yang bertanggung jawab
Tujuan 8 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	(8.1.1*) Laju pertumbuhan PDB perkapita (8.1.1(a) PDB per kapita (8.2.1*) Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	Ekonomi, investasi permodalan (LH6)	• Program Pengelolaan Keuangan Daerah • Program Pengelolaan Pendapatan Daerah • Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual • Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam • Program Pengelolaan Keuangan Daerah • Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah • Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja • Program Penempatan Tenaga Kerja • Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	• Bappeda

8. Tujuan 9 : Industri Inovasi dan Infrastruktur



Gambar 6.2.6
Grafik Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tabel VI.2.27
Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Indikator	Indikator	Proyeksi	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(9.2.1 (a))	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	BAU	0,43	-0,11	-0,65	-1,19	-1,73	-2,27	-2,81	-3,35	-3,89
		Upaya Tambahan	0,43	0,70	0,96	1,23	1,49	1,76	2,02	2,29	2,39

Gap Pencapaian TPB

- (9.1.1(a)) Kondisi mantap jalan nasional.
- (9.2.1(a)) Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.

a. Keterkaitan TPB 9

Tabel VI.2.28
Keterkaitan TPB Tujuan 9 Terhadap Indikator TPB Yang Berkorelasi Kuat

Tujuan	Indikator TPB
Tujuan 9 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	• (2.a.1*) Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah • 8.1.1*) Laju pertumbuhan PDB perkapita • (8.1.1.a*) PDB per kapita • (8.2.1*) Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.

b. Sasaran Dan Arah Kebijakan

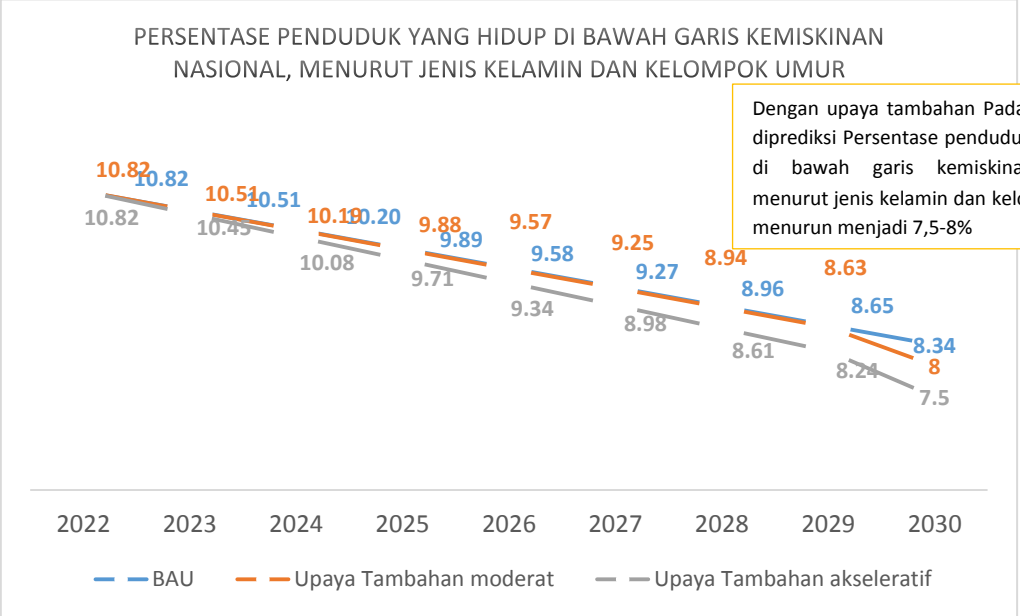
Tabel VI.2.29
Sasaran dan Arah Kebijakan TPB Tujuan 9

Sasaran	Arah Kebijakan 2025-2030
• Pengembangan infrastruktur yang berkualitas untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan • Peningkatan kualitas infrastruktur jaringan jalan yang lebih baik • Peningkatan pelayanan transportasi publik • Meningkatkan pertumbuhan ekonomi per kapita • Meningkatkan produktifitas ekonomi yang lebih baik • Peningkatan akses pelayanan kerja dan layanan jasa keuangan • Penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat usia muda • Penguatan kapasitas lembaga keuangan domestik • Penghapusan kelaparan dan peningkatan akses terhadap makanan bergizi • Penurunan kemiskinan di semua dimensi • Peningkatan ketahanan pangan terhadap masyarakat miskin dan rentan • Peningkatan infrastruktur untuk meningkatan ekonomi masyarakat • Peningkatan akses terhadap sumber daya ekonomi dan pelayanan dasar terhadap masyarakat miskin dan rentan • Perlindungan sosial dan layanan kesehatan terhadap kelompok miskin, rentan dan disabilitas	Mewujudkan transformasi ekonomi t1 t2 t3 t4 t5 √ √ √ √ √

Tabel VI.2.30
Sasaran, Arah Kebijakan dan alternatif rekomendasi skenario

Tujuan	Indikator	Isu PB Strategis	Rekomendasi Program	OPD yang bertanggung jawab
Tujuan 9 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	(9.1.1(a)) Kondisi mantap jalan nasional.	Ekonomi, investasi permodalan (LH6)	Program penyelenggaraan jalan	• Dinas PUPR • Dinas Perumahan dan Permukiman
	(9.2.1(a)) Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.		• Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan • Program perencanaan dan Pembangunan industri	Dinas Perindustrian dan perdagangan

9. Tujuan 10 : Berkurangnya Kesenjangan



Gambar 6.2.7
Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tabel VI.2.31
Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Indikator	Indikator	Proyeksi	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
10.1.1 (a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	BAU	10,82	10,51	10,20	9,89	9,58	9,27	8,96	8,65	8,34
		Upaya Tambahan moderat	10,82	10,51	10,19	9,88	9,57	9,25	8,94	8,63	8
		Upaya Tambahan Akseleratif/optimis	10,82	10,45	10,08	9,71	9,34	8,98	8,61	8,24	7,5

Gap Pencapaian TPB

- (10.1.1 (a)) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.

a. Keterkaitan TPB 10

Tabel VI.2.32
Keterkaitan TPB Tujuan 10 Terhadap Indikator TPB Yang Berkorelasi Kuat

Tujuan	Indikator TPB
Tujuan 10 : Berkurangnya Kesenjangan	• (1.3.1*) Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan. • (1.3.1(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan • (2.a.1*) Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah • 8.1.1*) Laju pertumbuhan PDB perkapita • (8.1.1.a*) PDB per kapita • (8.2.1*) Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun. • (9.2.1 (a)) Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur. • (10.1.1 (a)) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. • (17.1.1.*) Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya. • (17.1.1.(a)) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB. (8.2.1*) Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun. • (9.1.1(a)) Kondisi mantap jalan nasional. • (9.1.2*) Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi.. • (11.5.2 (a)) Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB • (17.1.1*) Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya. • (17.1.1(a)) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB • (17.1.2*) Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik. • (17.17.1 (b)) Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). • (17.17.1.(c)) Jumlah nilai investasi proyek KPBU berdasarkan tahap perencanaan, penyiapan dan transaksi.

b. Sasaran Dan Arah Kebijakan

Tabel VI.2.33
Sasaran dan Arah Kebijakan TPB Tujuan 10

<table>
<tr><th>Sasaran</th><th>Arah Kebijakan 2025-2030</th></tr>
<tr><td>

Pengembangan infrastruktur yang berkualitas untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan
Peningkatan kualitas infrastruktur jaringan jalan yang lebih baik
Peningkatan pelayanan transportasi publik
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi per kapita
Meningkatkan produktifitas ekonomi yang lebih baik
Peningkatan akses pelayanan kerja dan layanan jasa keuangan
Penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat usia muda
Penguatan kapasitas lembaga keuangan domestik
Penghapusan kelaparan dan peningkatan akses terhadap makanan bergizi
Penurunan kemiskinan di semua dimensi
Penurunan Kemiskinan di Segala Dimensi
Peningkatan ketahanan pangan terhadap masyarakat miskin dan rentan
Peningkatan infrastruktur untuk meningkatan ekonomi masyarakat
Peningkatan akses terhadap sumber daya ekonomi dan pelayanan dasar terhadap masyarakat miskin dan rentan
Perlindungan sosial dan layanan kesehatan terhadap kelompok miskin, rentan dan disabilitas

</td><td>
Mewujudkan transformasi ekonomi dan sosial
<table>
<tr><th>t1</th><th>t2</th><th>t3</th><th>t4</th><th>t5</th></tr>
<tr><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Tabel VI.2.34
Sasaran, Arah Kebijakan dan alternatif rekomendasi skenario

Tujuan	Indikator	Isu PB Strategis	Rekomendasi Program	OPD yang bertanggung jawab
Tujuan 10 : Berkurangnya Kesenjangan	(10.1.1 (a)) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Ekonomi, investasi permodalan (LH6)	• Program Perlindungan dan Jaminan Sosial • Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan • Program Perlindungan dan Jaminan Sosial • Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja • Program Pengembangan Koperasi dan UMKM	• Bappeda • Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak • Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah • Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

10. Tujuan 11 : Kota dan Permukiman Berkelanjutan

Gap Pencapaian TPB

- (11.3.1 (a)) Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk

a. Keterkaitan TPB 11

Tabel VI.2.35
Keterkaitan TPB Tujuan 11 Terhadap Indikator TPB Yang Berkorelasi Kuat

Tujuan	Indikator TPB
Tujuan 11 : Kota dan Permukiman Berkelanjutan	• (6.4.2(a)) Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya • (6.4.2(b) Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air tanah terhadap ketersediaanya

b. Sasaran Dan Arah Kebijakan

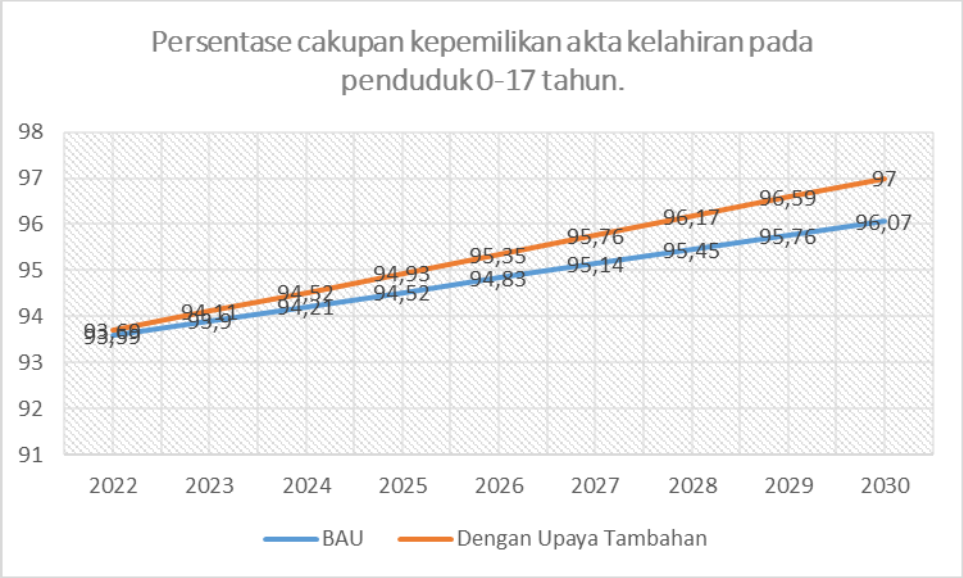
Tabel VI.2.36
Sasaran dan Arah Kebijakan TPB Tujuan 11

Sasaran	Arah Kebijakan 2025-2030
• Peningkatan akses perumahan dan pelayanan dasar • Peningkatan akses sanitasi bersih untuk semua • Peningkatan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan • Peningkatan pengelolaan kota dan pengembangan permukiman berkelanjutan pada lahan sesuai daya dukung, tertata, dan sehat. • Peningkatan kualitas lingkungan hidup • Peningkatan kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau	Mewujudkan transformasi ekologi dan sosial t1 | t2 | t3 | t4 | t5 √ | √ | √ | √ | √

Tabel VI.2.37
Sasaran, Arah Kebijakan dan alternatif rekomendasi skenario

Tujuan	Indikator	Isu PB Strategis	Rekomendasi Program	OPD yang bertanggung jawab
Tujuan 11 : Kota dan Permukiman Berkelanjutan	(11.3.1(a) Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk.	• Alih fungsi Lahan • Permukiman Layak Huni	• Program penyelenggaraan penataan Ruang • Program Penataan Bangunan Gedung • Program Pengembangan Perumahan • Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum • Program Kawasan Permukiman serta Kawasan Permukiman Kumuh	• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang • Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

11. Tujuan 16 : Perdamaian, keadilan dan kelembagaan Tangguh



Gambar 6.2.8
Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun

Tabel VI.2.38
Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun

Indikator	Indikator	Proyeksi	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun.	BAU	93,59	93,9	94,21	94,52	94,83	95,14	95,45	95,76	96,07
		Upaya Tambahan moderat	93,69	94,11	94,52	94,93	95,35	95,76	96,17	96,59	97

Gap Pencapaian TPB

- (16.7.1.(b)) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).
- (16.9.1.(b)) Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun.

a. Keterkaitan TPB 16

Tabel VI.2.39
Keterkaitan TPB Tujuan 16 Terhadap Indikator TPB Yang Berkorelasi Kuat

Tujuan	Indikator TPB
Tujuan 16 : Perdamaian, keadilan dan kelembagaan tangguh	• (4.1.2*) Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat. • (4.1.2(a)) Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/ sederajat. • (4.2.2*) Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin.

b. Sasaran Dan Arah Kebijakan

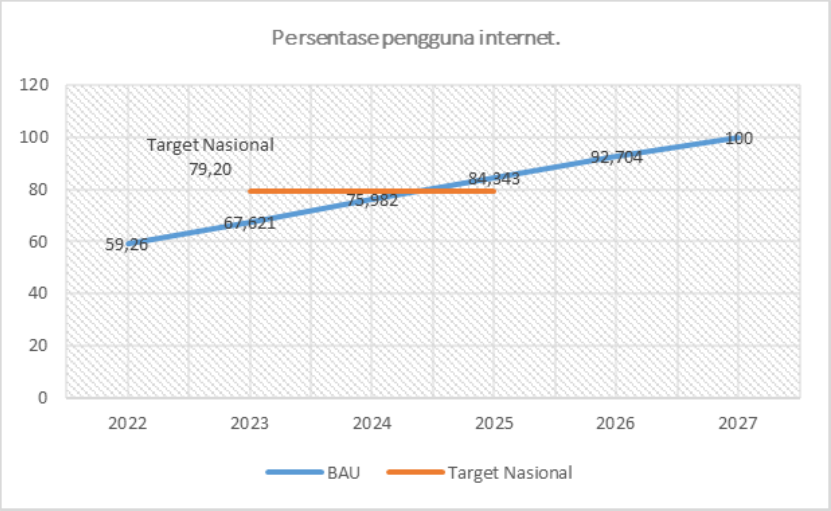
Tabel VI.2.40
Sasaran dan Arah Kebijakan TPB Tujuan 16

Sasaran	Arah Kebijakan 2025-2030				
• Peningkatan layanan administrasi kependudukan	Mewujudkan transformasi sosial				
	t1	t2	t3	t4	t5
	√	√	√	√	√

Tabel VI.2.41
Sasaran, Arah Kebijakan dan alternatif rekomendasi skenario

Tujuan	Indikator	Isu PB Strategis	Rekomendasi Program	OPD yang bertanggung jawab
Tujuan 16 : Perdamaian, keadilan dan kelembagaan tangguh	(16.9.1.(b)) Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun.		• Program Kepegawaian Daerah	• Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah • Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			• Program Pencatatan Sipil • Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

12. Tujuan 17 : Kemitraan untuk mencapai Tujuan



Gambar 6.2.9
Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun

Tabel VI.2.42
Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun

Indikator	Indikator	Proyeksi	2022	2023	2024	2025	2026	2027
17.8.1*	Persentase pengguna internet	BAU	59,26	67,621	75,982	84,343	92,704	100,00

Gap Pencapaian TPB

- (17.1.1*) Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.
- (17.1.1(a)) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB
- (17.8.1*) Persentase pengguna internet.

a. Keterkaitan TPB 17

Tabel VI.2.43
Keterkaitan TPB Tujuan 17 Terhadap Indikator TPB Yang Berkorelasi Kuat

Tujuan	Indikator TPB
Tujuan 17 : Kemitraan untuk mencapai Tujuan	• (10.1.1 (a)) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.

b. Sasaran Dan Arah Kebijakan

Tabel VI.2.44
Sasaran dan Arah Kebijakan TPB Tujuan 17

Sasaran	Arah Kebijakan 2025-2030
• Meningkatkan sumber daya domestik melalui penerimaan pajak • Meningkatkan akses tetap pitalebar (fixedboard) doi perkotaan • Peningkatan penyediaan layanan publik sektor pendidikan • Peningkatan penyediaan layanan publik sektor kesehatan • Peningkatan pelayanan masyarakat pada sektor ekonomi • Peningkatan penyediaan layanan administrasi pemerintahan • Peningkatan partisipasi gender dalam pemerintahan	Mewujudkan transformasi sosial dan ekonomi t1: √ | t2: √ | t3: √ | t4: √ | t5: √

Tabel VI.2.45
Sasaran, Arah Kebijakan dan alternatif rekomendasi skenario

Tujuan	Indikator	Isu PB Strategis	Rekomendasi Program	OPD yang bertanggung jawab
Tujuan 17 : Kemitraan untuk mencapai Tujuan	• (17.1.1*) Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya. • (17.1.1(a)) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB • (17.8.1*) Persentase pengguna internet.	Ekonomi, investasi permodalan	• Program Pengelolaan Keuangan Daerah • Program Pengelolaan Pendapatan Daerah • Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual • Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam • Program Pengelolaan Keuangan Daerah • Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah • Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja • Program Penempatan Tenaga Kerja • Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah • Program Informasi Dan Komunikasi Publik	• Bappeda • Dinas Komunikasi dan Informatika

6.3 ALTERNATIF SKENARIO DAN REKOMENDASI PADA TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB) TANPA UPAYA TAMBAHAN

Alternatif skenario tanpa upaya tambahan adalah indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah tercapai target nasional. Alternatif skenario tersebut direkomendasikan untuk dipertahankan, adapun target tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel VI.3.1
Alernatif skenario direkomendasikan untuk dipertahankan

Tujuan	Target	Indikator	Rekomendasi Program Pembangunan
Tujuan 1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	(1.4.2*) Proporsi dan penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.	Program penyelesaian Sengketa tanah Garapan
Tujuan 3	Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian	(3.1.1*) Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar	(3.8.2 (a)) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Penyediaan Layanan

Tujuan	Target	Indikator	Rekomendasi Program Pembangunan
	yang baik, dan akses terhadap obat – obatan dan vaksin, berkualitas dan terjangkau bagi semua orang		Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
Tujuan 4	Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan lakilaki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.	(4.3.1*) Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin	Program Pengelolaan Pendidikan - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	(4.6.1(a)) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	Program Pengelolaan Pendidikan - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
Tujuan 5	Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan..	(5.b.1*)Proporsi individu yang memiliki telepon genggam.	-
Tujuan 6	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan	(6.2.1) Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	• Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah • Program pemberdayaan Masyarakat bidang kesehatan
Tujuan 7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.	(7.1.2 (b)) Rasio penggunaan gas rumah tangga	-
Tujuan 10	Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi,	(10.3.1(c)) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan	Program Pengarusutamaan gender dan Pemberdayaan perempuan

Tujuan	Target	Indikator	Rekomendasi Program Pembangunan
	kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.		
	Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	(10.4.1.(b)) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	• Program hubungan industrial • Program pemberdayaan sosial
Tujuan 16	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	(16.6.1.(a)) Persentase instansi pemerintah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). (16.6.1.(b)) Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ≥ B	• Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. • Program Penyelenggaraan Pengawasan • Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	(16.7.1.(a))Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	(16.9.1*) Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil menurut umur.	• Program Pencatatan Sipil • Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		(16.9.1.(a))Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40%	• Program Pencatatan Sipil • Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
	Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.	(16.10.1(c))Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan	Program perlindungan Dan jaminan sosial
Tujuan 17	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik	(17.19.2.(b)) Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	• Program Pencatatan Sipil • Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan • Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Tujuan	Target	Indikator	Rekomendasi Program Pembangunan
	Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.		

6.4 ARAHAN VISI, MISI DAN RINGKASAN ARAHAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Visi misi yang di terjemahkan dalam arahan kebijakan pembangunan yang telah dijabarkan pada pembahasan diatas adalah :

VISI RPJMD 2025-2030

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG MERATA DAN BERKELANJUTAN

TAWARAN POKOK MISI

Ekonomi 01	Sosial 02	Ekologi 03	Tata Kelola 04
Mewujudkan Transformasi Ekonomi	**Mewujudkan transformasi Sosial**	**Ketahanan Ekologi dan Kemampuan adaptasi terhadap bencana dan perubahan iklim**	**Tata kelola yang berintegritas dan melayani**
Sasaran: • Peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan perikanan • Peningkatan PAD • menurunkan Kemiskinan ekstrim • Peningkatan akses pelayanan dasar • Peningkatan pertumbuhan ekonomi pada sektor pertanian dan perikanan • Peningkatan kerjasama di berbagai sektor untuk pembangunan dan peningkatan pendapatan masyarakat • Peningkatan akses pemodalan masyarakat • Pengembangan prasarana transportasi meningkatkan konektivitas • Peningkatan Agrowisata dan Wisata Bahari • Pengembangan ekonomi UMKM berbasis Platform Digital	Sasaran: • Peningkatan dan pemerataan layanan kesehatan • Peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan • Peningkatan akses layanan air bersih yang berkualitas dan merata • pemerataan akses jaminan sosial untuk semua • peningkatan Indeks Penyetaraan Gender	Sasaran: • Perlindungan lahan basah dan gambut dalam; • Perlindungan terhadap kawasan resapan air • Perlindungan kawasan sempadan sungai dan danau; • Rehabilitasi Mangrove Pantai Timur; • penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan • Peningkatan penyediaan permukiman tertata, aman, dan berkelanjutan • Pengelolaan Sumber Daya Air • Peningkatan penyediaan air minum aman • Peningkatan pengelolaan sanitasi permukiman • Peningkatan penyediaan Ruang terbuka Hijau yang merata • Peningkatan akses pelayanan persampahan • Penerapan mitigasi bencana dan perubahan iklim • Pengembangan energi baru dan terbaharukan	• Peningkatan SDM Aparatur • Peningkatan Pelayanan Publik • Mengurangi kesenjangan • Peningkatan daya saing sektor pertanian dan perikanan • Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi berbasis TIK • Peningkatan fasilitas publik yang menerapkan standar pelayanan masyarakat • Peningkatan kerjasama antara pemerintah dalam penanganan masalah Sosial, Ekonomi dan Lingkungan dengan perguruan tinggi dan swasta • Peningkatan indeks perilaku anti korupsi

BAB VII
KESIMPULAN

Dalam Pelaksaannya penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang telah melalui tahapan proses kegiatan, diawali dari proses pelingkupan isu, penyepakatan isu PB Strategis, analisis TPB hingga penyusunan rekomendasi dan program.

Berikut adalah beberapa kesimpulan utama yang dapat disampaikan berdasarkan hasil rangkaian proses penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur:

1. Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jambi yang berada di wilayah pesisir pantai timur, dengan karakteristik fisik dasar didominasi lahan bergambut, dan perkembangan permukimannya diawali dengan oberorientasi terhadap Sungai/muara Sungai, sehingga cenderung tersebar dan mengelompok. Sebagian kawasan permukiman berada di zona sempadan ataupun wilayah terkena pengaruh pasang surut yang menyebabkan rendahnya kualitas lingkungan;
2. Beberapa isu Pembangunan berkelanjutan yang dianggap paling strategis, meliputi:
    a. Resiko Bencana Alam;
    b. Alih Fungsi Lahan;
    c. Investasi dan Permodalan;
    d. Permukiman Layak Huni; dan
    e. Transportasi;

3. Dari 111 indikator TPB, baru 11,32% yang sudah mencapai target, sementara indikator yang belum mencapai target sebesar 11,71% namun trennya mengarah ke perbaikan. Untuk inkator yang trennya menurun dan perlu perhatian khusus ada sekitar 18,92% dan 54,05% lainnya belum ada data.
4. Beberapa indikator TPB yang butuh perhatian khusus dan sangat terkait dengan Isu Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebagai berikut:
    a. 2.a.1* Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah
    b. 2.c.1* Indikator anomali harga pangan
    c. 2.4.1.(a) Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan,
    d. (11.6. 2(b))Indeks Kualitas Udara
    e. 1.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang
    f. 6.4.2 (a) Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya
    g. 6.4.2 (b) Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air tanah terhadap ketersediaanya
    h. 8.1.1* Laju pertumbuhan PDB perkapita
    i. 8.1.1 (a) PDB per kapita
    j. 8.2.1* Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun



PENCAPAIAN TPB/SDG'S

A. Kondisi Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Pada bagian ini akan dipaparkan capaian tujuan dan sasaran pembangunan berkelanjutan per tujuan. Setiap tujuan terdiri atas indikator – indikator capaian yang disepakati oleh Pemerintah Daerah dengan merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2020 tersebut. Daftar indikator yang dituangkan dalam substansi ini adalah indikator yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten. Pembagian indikator yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten tersebut didasarkan kepada buku metadata TPB Indonesia dan juga berdasarkan dengan hasil koordinasi dengan Sekretarian SDGs Bappenas.

MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN

Tujuan global pertama SDGs yang ingin dicapai adalah tanpa kemiskinan. Secara rinci berikut adalah capaian sasaran dan indikator SDGs tujuan 1 yang dapat diukur di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Tabel 1
Status Capaian Tujuan ke – 1 SDGS Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Target dan Indikator TPB		Base Line 2018	Base Line 2019	Base Line 2020	Base Line 2021	Target Nasional 2022	Capaian Target			GAP	Status	Instansi
							Belum Terpenuhi	Hampir Terpenuhi	Terpenuhi			
Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari.												
1.1.1*	Tingkat Kemiskinan Ekstrim	12,38	11,54	10,95	11,39	2,5	10,91			8,41	▶	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.												
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	26,99	25,35	24,23	24,42	9,57	23,42			13,85	▶	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.2.2*	Presentase laki – laki, perempuan dan anak – anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definsi nasional.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.												
1.3.1*	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan	24,46	34,89	55,65	16,50	N/A	38,10				▼	Dinas Kesehatan
1.3.1 (a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	28,52 %	33,93 %	39,16%	33,69 %	N/A	41,60%				▶	Dinas Kesehatan
1.3.1 (b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	5,01%	2,54%	2,80%	3,04%	57,46%	2,05%			55,41	▼	Dinas Kesehatan
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.												
1.4.1*	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.	N/A	N/A	N/A	N/A	44,94% 80,92% 79,33%					-	Dinas Kesehatan/Dinas Pendidikan/Dinas PUPR/Dinas Perkim
1.4.2*	Proporsi dan penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.	92,99	91,84	95,49	91,98	83,99% (Milik Sendiri) 6,13% (Bukan Milik Sendiri			93,22		●	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.												
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	N/A	Terkena Dampak : 768	Terkena Dampak : 132	Terkena Dampak : 235	N/A	Terkena Dampak : 138				▼	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.2*	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP.											Bukan Disagresi Kabupaten
1.5.3*	Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030											Bukan Disagresi Kabupaten
1.5.4*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana daerah yang selaras dengan strategi pengurangan risiko bencana nasional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.												
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.											Bukan Disagresi Kabupaten
1.a.2*	Pengeluaran untuk											Bukan Disagresi

Target dan Indikator TPB		Base Line 2018	Base Line 2019	Base Line 2020	Base Line 2021	Target Nasional 2022	Capaian Target			GAP	Status	Instansi
							Belum Terpenuhi	Hampir Terpenuhi	Terpenuhi			
	layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.											Kabupaten
Membuat kerangka kebijakan yang kuat di tingkat nasional, regional dan internasional, berdasarkan strategi pembangunan yang memihak pada kelompok miskin dan peka terhadap isu gender untuk mendukung investasi yang cepat dalam Tindakan pemberantasan kemiskinan.												
1.b.1	Proporsi pengeluaran rutin dan pembangunan pada sektor-sektor yang memberi manfaat pada kelompok perempuan, kelompok miskin dan rentan.											Bukan Disagresi

Tercapai Akan Tercapai/ membaik Perlu Perhatian Khusus - Data tidak tersedia

- **TPB Perlu Perhatian Khusus**

  Pada analisis capaian TPB Tujuan ke-1 Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun, terdapat beberapa indikator yang memerlukan perhatian khusus diantaranya adalah indikator 1.1.1* Tingkat Kemiskinan Ekstrim, 1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur, 1.3.1* Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan, 1.3.1. (a) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan, 1.3.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan dan indikator 1.5.1 Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang,

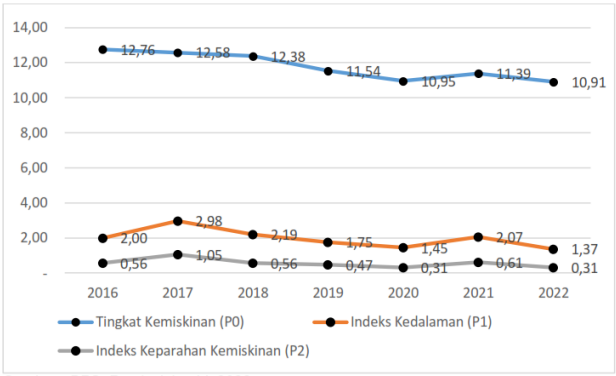
- **TPB Perlu Adanya Pendalaman**

  Sedangkan capaian indikator yang tidak memiliki data perlu adanya pendalaman, data tidak tersedia disebakan oleh beberapa hal seperti kegiatan tidak *match* dengan nomenklatur indikator TPB atau Indikator TPB tidak dengan kewenangan daerah. Sehingga indikator yang tidak memiliki data perlu perhatian khusus untuk mencapai trend capaian membaik. Capaian TPB yang tidak memiliki data terdapat pada indikator 1.2.2* Presentase laki – laki, perempuan dan anak – anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definsi nasional, 1.4.1* Proporsi

penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar, dan indikator 1.5.4* Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana daerah yang selaras dengan strategi pengurangan risiko bencana nasional.

a) Target 1.1.1* *(Tingkat kemiskinan ekstrim)*

Permasalahan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari tingkat kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan atau Poverty Gap Index (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan atau Distributionally Sensitive Index (P2) yang dirumuskan oleh Foster-Greer-Thorbec (FGT). P1 merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, angka P1 yang semakin mendekati 0 menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. P2 memberikan gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, angka P2 yang semakin mendekati 0 menunjukkan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin secara umum semakin kecil. Indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur disajikan pada Gambar berikut ini.

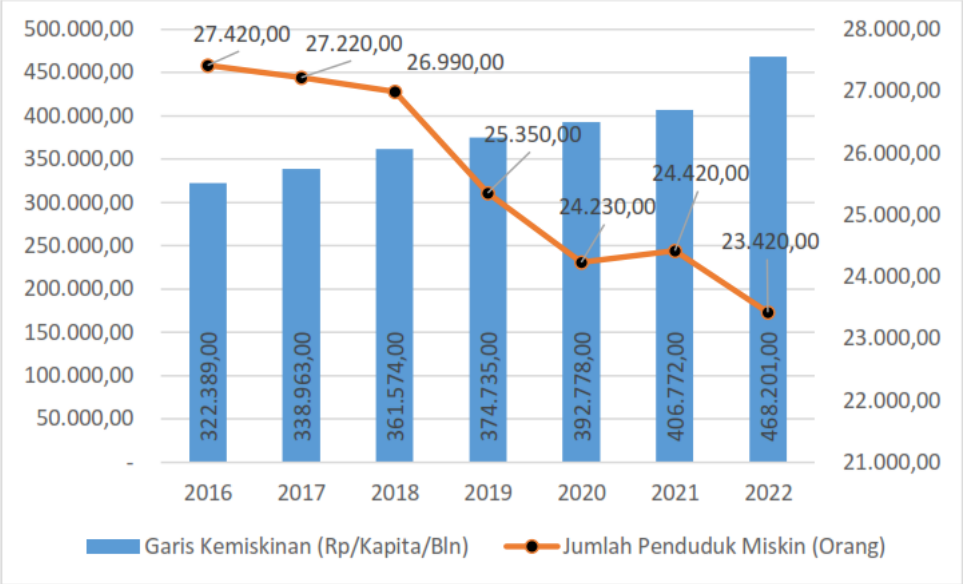


Gambar 1
Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan
di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2022
Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2023

Tingkat Kemiskinan (P0), Indeks kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) berfluktuatif cenderung menurun selama periode 2016 sampai dengan 2022, dimana pada tahun 2016 P1 berada di posisi 2,00 persen mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 1,45 persen dan meningkat pada tahun 2021 menjadi sebesar 2,07. Namun Kembali mengalami penurunan menjadi 1,37 persen. Demikian pula Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) turun dari 0,56 tahun 2016 menjadi 0,31 pada tahun 2020, meningkat menjadi 0,61 tahun 2021 dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2022 menjadi 0,31. Tingkat Kemiskinan (P0) pada tahun 2016 sebesar 12,76 persen menurun sampai dengan tahun 2020 menjadi 10,95 persen,mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 11,39 persen dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 10,91 persen.

b) Target 1.2.1* *(Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur)*

Jumlah Penduduk miskin Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam kurun tahun 2016 sampai dengan 2022 menunjukkan tren angka menurun, namun terjadi sedikit peningkatan pada tahun 2021. Pada tahun 2016 penduduk miskin berjumlah 27.420 orang. Pada Tahun 2017 sampai dengan 2020 angka kemiskinan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menurun dengan jumlah 27.220 orang pada tahun 2017, 26.990 pada tahun 2018, 25.350 pada tahun 2019, 24.230 orang pada tahun 2020. Pada Tahun 2021 sedikit mengalami peningkatan menjadi 24.420 orang, dan kembali mengalami penurunan pada Tahun 2022 menjadi 23.420 orang atau mengalami penurunan sebanyak 1.000 orang.



Gambar 2
Grafik Perkembangan Antar Waktu Jumlah Penduduk miskin Dengan Garis Kemiskinan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2022
Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2023

c) Target 1.2.2* (*Presentase laki – laki, perempuan dan anak – anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definsi nasional.)*

DIMENSI #1 KESEHATAN

1. *Imunisasi dasar : Persentase imunisasi dasar pada penduduk usia 12 - 23 bulan, terjadi deprivasi jika ada penduduk usia 12-23 tahun yang tidak mendapatkan imunisasi dasar.*
2. *Gizi : Prevalensi of Undernourishment (tingkat kekurangan gizi), terjadi deprivasi jika ada anggota rumah tangga yang kekurangan gizi*
3. *Indikator Morbilitas : persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan.*

DIMENSI #2 PENDIDIKAN

4. *Lama sekolah: Persentase ART usia 25 – 60 tahun yang tidak tamat SMP, terjadi deprivasi jika ada anggota rumahtangga yang tidak menyelesaikan pendidikan SMP pada usia 25 – 60 tahun.*

5. *Lama sekolah: Persentase ART usia 25 – 60 tahun yang tidak tamat SMP, terjadi deprivasi jika ada anggota rumahtangga yang tidak menyelesaikan pendidikan SMP pada usia 25 – 60 tahun.*

DIMENSI #3. STANDAR HIDUP

6. *Listrik: Persentase rumah tangga yang sumber penerangan utamanya bukan listrik, terjadi deprivasi jika tanpa listrik.*
7. *Air minum: Persentase rumah tangga tanpa akses pada air minum bersih, terjadi deprivasi jika rumahtangga tanpa akses pada air minum bersih atau air bersih yang dapat diperoleh tidak lebih dari 30 menit jalan kaki dari rumah.*
8. *Sanitasi: Persentase rumahtangga tidak mempunyai WC layak, terjadi deprivasi jika jika rumahtangga tidak mempunyai WC layak atau menggunakan WC bersama.*
9. *Lantai: PPersentase rumah tangga dengan jenis lantai terluas adalah tanah atau luas lantai per kapita kurang dari 8 m2, terjadi deprivasi jika rumah berlantai tanah, pasir atau lantai tercampur kotoran ternak atau luas lantai per kapita kurang dari 8m.*
10. *Bahan bakar memasak: Persentase rumah tangga dengan Bahan bakar memasak menggunakan elpiji 3kg, terjadi deprivasi jika memasak menggunakan elpiji 3kg.*
11. *Aset: Persentase rumah tangga yang tidak punya asset produktif, terjadi deprivasi jika rumahtangga tidak mempunyai sepeda atau sepeda motor, ternak, lahan, TV, tabung gas, lemari es, emas, mobil.*
12. *Akta kelahiran: Persentase penduduk yang berusia 0-17 tahun yang tidak memiliki akta kelahiran, terjadi deprivasi jika ada anggota rumahtangga yang berusia 0-17 tahun yang tidak memiliki akta kelahiran.*
13. *Akses internet: Persentase rumah tangga yang tidak punya akses internet, terjadi deprivasi jika tidak ada anggota rumahtangga yang bisa mengakses internet.*
14. *Pekerjaan: Persentase rumah tangga dengan anggota rumah tangga bekerja, terjadi deprivasi jika tidak ada anggota rumah tangga yang bekerja atau semua anggota rumah tangga yang bekerja kurang dari 20 jam seminggu.*

d) Target 1.3.1* (Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan)

Presentase penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan pada tahun 2022 sebanyak 38,10 sedangkan penduduk dengan kelompok pengeluaran 40% terbawah sebanyak 30,12%.

Tabel 2
Presentase Penduduk Yang Menggunakan Jaminan Kesehatan Untuk Berobat Jalan Menurut Karakteristik Tahun 2022

Katakteristik	Menggunakan Jaminan Kesehatan Untuk Berobat Jalan
(1)	(2)
Jenis Kelamin	
Laki-laki	35,15
Perempuan	40,64
Kelompok Pengeluaran	
40% Terbawah	30,12
40% Tengah	44,57
20% Teratas	35,48
Kabupaten Tanjung Jabung Timur	38,10

Sumber : Statistik Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2022

e) Target 1.3.1 (a) (*Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan*)

Presentase penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang memiliki jaminan Kesehatan pada tahun 2022 sebanyak 28,52%.

Tabel 3
Presentase Penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Jenis Jaminan Kesehatan Tahun 2022

Jenis Jaminan Kesehatan	(%)
BPJS Kesehatan	28,52
Jamkesda	60,61
Asuransi Swasta	0,60
Perusahaan/Kantor	0,82
Tidak Punya	22,76

Sumber : Statistik Kesejahteraan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2022

f) Target 1.3.1 (b) (*Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan*)

Jumlah kepemilikikan jaminan sosial bidang ketenagakerjaan pada penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur di tahun 2022 sebesar 2,05%.

Tabel 4
RSE Presentase Rumah Tangga menurut jenis Jaminan Sosial, 2022

Jenis Jaminan Sosial	Presentase Rumah Tangga
Jaminan Pensiun/hari tua*	2,05
Asuransi/PHK**	1,28

* Jaminan pensiun/hari tua terdiri dari: Jaminan pensiun dan Jaminan hari tua

** Asuransi/PHK terdiri dari: Asuransi kematian, Jaminan kecelakaan kerja, & Pesangon PHK

g) Target 1.4.1* (Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar)

Data Tidak Tersedia.

h) Target 1.4.2* (Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan)

Status kepemilikan bangunan tempat tinggal yang ditempati menurut Susenas meliputi rumah milik sendiri, kontrak/sewa, dan lainnya (bebas sewa, dinas, dan lainnya). Pada tabel dibawah ini memperlihatkan bahwa persentase status bangunan tempat tinggal milik sendiri (93,22 persen) sudah jauh lebih tinggi dibanding status bangunan kontrak/sewa (6,78 persen).

Berdasarkan hasil Susenas 2022, kepemilikan bangunan tempat tinggal milik sendiri dan kontrak/sewa dapat dikaitkan dengan pendidikan kepala rumah tangga

dan status ekonomi rumah tangga. Rumah tangga dengan tingkat pendidikan kepala rumah tangga yang lebih rendah, cenderung menempati rumah milik sendiri.

Tabel 5
Persentase Rumah Tangga Menurut Karakteristik dan Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati Tahun 2022

Karakteristik	Status Kepemilikan Bangunan	
	Milik Sendiri	Bukan milik Sendiri*
Jenis Kelamin KRT		
Laki-laki	92,86	7,14
Perempuan	96,17	3,83
Kelompok Pengeluaran		
40% Terbawah	90,81	9,19
40% Tengah	92,04	7,96
20% Teratas	98,56	1,44
Pendidikan Tertinggi KRT		
SD ke bawah	95,77	4,23
SMP ke atas	90,02	9,98
Kabupaten Tanjung Jabung Timur	93,22	6,78

**) Termasuk rumah lainnya adalah rumah dinas, rumah adat, dll*

i) Target 1.5.1 (Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang)*

Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, rekapitulasi kejadian bencana di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2022 terdapat korban terkena dampak bencana sebanyak 352 jiwa, akibat bencana Kebakaran Permukiman, tanah longsor, abrasi dan puting beliung. Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah adalah daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas dalam hal penguatan pengurangan risiko bencana daerah.

Tabel 6
Kejadian Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022

No	Jenis Bencana	Tanggal	Tempat	Keterangan
1	Kebakaran Permukiman	19 Januari 2022	Jl. Papadaan 1 RT. 15 RW. 05 Kel. Mendahara Ilir Kec. Mendahara	10 KK / 30 Jiwa
		8 April 2022	RT. 04 Dusun Sulawesi Kel. Mendahara Kec. Mendahara	7 KK / 24 Jiwa
		13 April 2022	Desa Sungai Jambat Kec. Sadu	1 KK / 5 Jiwa
		06 Maret 2022	Desa Labuhan Pering Kec. Sadu	11 KK
		11 Maret 2022	Parit 11 Pantai Galang RT. 26 RW. 09 Kec. Nipah Panjang	1 KK
		23 April 2022	Kel. Pandan Jaya RT. 24 RW.05 Kec. Geragai	2 KK/5 Jiwa
		02 Mei 2022	RT. 04 Dusun Sulawesi Desa. Mendahara Tengah Kec. Mendahara	1 KK
		20 Mei 2022	Jl. Pahlawan Santung RT. 06 RW. 02 Kel. Tanjung Solok Kec. Kuala Jambi	2 KK/ 7 Jiwa
		10 Agustus 2022	Parit 9 RT.01 Dusun 3 Desa Pangkal Duri Kec. Mendahara	1 KK/4 Jiwa
		13 Agustus 2022	RT. 03 Dusun Makmur Desa Kuala Dendang Kec. Dendang	2 KK/6 Jiwa
		19 Agustus 2022	RT. 10 Dusun 3 Desa Pematang Mayan Kec. Rantau Rasau	1 KK/ 1 Jiwa
		24 Agustus 2022	Kota Harapan Kec. Muara Sabak Timur	1 KK/6 Jiwa
		31 Agustus 2022	RT. 19 Gudang Indah Desa Sungai Beras Kec. Mendahara Ulu	2 KK/6 Jiwa
		01 September 2022	RT. 19 Dusun Sungai Papan Desa Sungai Beras Kec. Mendahara Ulu	1 KK/1 Jiwa
		10 September 2022	Parit Sabar Desa Bhakti Idaman Kec. Mendahara	2 KK/5 Jiwa
		01 November 2022	RT. 01 RW. 01 Kel. Bandar Jaya Kec. Rantau Rasau	1 KK/3 Jiwa
		5 Desember 2022	Parit senang Dusun 4 RT. 02 Desa Kota Raja	4 KK/18 Jiwa
2.	Lahan Kebakaran Hutan dan	04 Februari 2022	Desa Sungai Sayang Parit 7 Kanan Dusun 2	3 Ha
		19 April 2022	Kelurahan Tanjung Solok Kec. Kuala Jambi	1 Ha
3.	Abrasi	16 Februar2022	RT. 05 Dusun Sulawesi Kel. Mendahara Ilir Kec. Mendahara	5 KK/14 Jiwa
		25 April 2022	RT. 02 Dusun Mawar Melati Desa Kuala Lagan	6 KK/22 Jiwa
		-	Desa Kuala Lagan Kec. Kuala Jambi	2 KK

No	Jenis Bencana	Tanggal	Tempat	Keterangan
4.	Puting Beliung	23 Februari 2022	Desa Catur Rahayu	8 KK/31 jiwa
		10 April 2022	RT. 10 Kel. Kampung Laut Kec. Kuala Jambi	22 KK / 6 Jiwa
		04 Juni 2022	RT. 12 Kel. Tanjung Solok Kec. Kuala Jambi	3 KK / 15 Jiwa
		-	RT. 08 Kel. Kampung Laut Kec. Kuala Jamb	-
		04 November2022	Kel. Mendahara Ilir	5 KK / 17 Jiwa
5.	Tanah Longsor	20 Mei 2022	RT. 07 dan RT. 16 Jl. Seroja Kel. Mendahara Ilir Kec. Mendahara	10 KK / 32 Jiwa

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2022

Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. Cara Perhitungan Korban Terluka: Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana akibat bencana dibagi jumlah penduduk pada periode yang sama dikali 100.000 dan dinyatakan dengan satuan orang.

$$JKL_{SR} = \left(\frac{JKL}{JP}\right) x\ 100.000$$

JKL SR : Jumlah korban mengungsi per 100.000 Orang

KU : Jumlah korban mengungsi akibat bencana

JP : Jumlah penduduk

Jumlah korban mengungsi per 100.000 Orang = $\frac{325}{234154}$x 100.000 orang

Maka diketahui Tahun 2022 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdapat 138 korban per 100.000 orang

j) Target 1.5.4* (Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana daerah yang selaras dengan strategi pengurangan risiko bencana nasional)

Data tidak tersedia.



MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN

Tujuan ke-2 adalah menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.

Tabel 7
Status Capaian Tujuan ke – 2 SDG's Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Target dan Indikator TPB		Base Line 2018	Base Line 2019	Base Line 2020	Base Line 2021	Target Nasional 2022	Capaian Target			GAP	Status	Instansi
							Belum Terpenuhi	Hampir Terpenuhi	Terpenuhi			
Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.												
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).											Bukan Disagresi Kabupaten
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.											Bukan Disagresi Kabupaten
Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.												
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.											Bukan Disagresi Kabupaten
2.2.2*	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.											Bukan Disagresi Kabupaten
2.2.2. (a)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).											Bukan Disagresi Kabupaten
2.2.3*	Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun.											Bukan Disagresi Kabupaten
Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.												
2.3.1*	Volume produksi per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/peternakan/ perikanan/ kehutanan											Bukan Disagresi Kabupaten
2.3.1 (a)	Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/perikanan/ kehutanan											Bukan Disagresi Kabupaten
2.3.2*	Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil menurut subsektor.											Bukan Disagresi Kabupaten
Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian												
2.4.1	Proporsi areal pertanian produktif dan berkelanjutan.											Bukan Disagresi Kabupaten
2.4.1 (a)	Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					-	Dinas PUPR Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Pada tahun 2020, mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimana yang disepakati secara internasional.												
2.5.1*	Jumlah sumber daya genetik tanaman dan hewan untuk pangan dan pertanian yangdisimpan di fasilitas konservasi, baik jangka menengah ataupun jangka panjang.											Bukan Disagresi Kabupaten
2.5.2*	Proporsi ras ternak lokal yang berisiko punah.											Bukan Disagresi Kabupaten
Meningkatkan investasi, termasuk melalui kerjasama internasional yang kuat, dalam infrastruktur pedesaan, layanan kajian dan perluasan pertanian, pengembangan teknologi dan bank gen untuk tanaman dan ternak, untuk meningkatkan kapasitas produktif pertanian di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang.												
2.a.1*	Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1,09				▼	Dinas Ketahanan Pangan
2.a.2*	Total bantuin Pembangunan (ODA) dan bantuin lain untuk sektor pertanian.											
Memperbaiki dan mencegah pembatasan dan distorsi dalam pasar pertanian dunia, termasuk melalui penghapusan secara bersamaan segala bentuk subsidi ekspor pertanian dan semua tindakan ekspor dengan efek setara, sesuai dengan amanat the Doha Development Round.												
2.b.1*	Subsidi ekspor pertanian.											Bukan Disagresi Kabupaten
Mengadopsi langkahlangkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrim.												
2.c.1*	Indikator anomali harga pangan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					-	Dinas Ketahanan

Target dan Indikator TPB		Base Line 2018	Base Line 2019	Base Line 2020	Base Line 2021	Target Nasional 2022	Capaian Target			GAP	Status	Instansi
							Belum Terpenuhi	Hampir Terpenuhi	Terpenuhi			
												Pangan

Tercapai Akan Tercapai/ membaik Perlu Perhatian Khusus - Data tidak tersedia

➢ **TPB Perlu Adanya Pendalaman**

Sedangkan capaian indikator yang tidak memiliki data perlu adanya pendalaman, data tidak tersedia disebakan oleh beberapa hal seperti kegiatan tidak *match* dengan nomenklatur indikator TPB atau Indikator TPB tidak dengan kewenangan daerah. Sehingga indikator yang tidak memiliki data perlu perhatian khusus untuk mencapai trend capaian membaik. Capaian TPB yang tidak memiliki data terdapat pada indikator 2.4.1.(a) Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan, 2.a.1* Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah dan indikator 2.c.1* Indikator anomali harga pangan.

a) Target 2.4.1 (a) (Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan)

Diketahui luas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur seluas … Ha dan luas lahan Pertanian keselurhan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur seluas … Ha. Maka proporsi luas lahan Pertanian yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebesar …. %.

b) Target 2.a.1* (Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah)

Diketahui total anggaran yang dialokasikan untuk urusan pertanian sebesar Rp. 31.810.007.018, terdiri dari Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura dengan Anggaran sebesar Rp21.611.963.852,00 dan Dinas Perkebunan dan Peternakan dengan Anggaran sebesar Rp10.198.043.166,00. sedangkan nilai tambah Pertanian pada PDRB sebesar 2897,868 miliar rupiah pada tahun 2022. Jadi nilai Indeks orientasi Pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah sebesar 1,09 %.

c) Target 2.c.1 (Indikator anomali harga pangan)

Data tidak tersedia.

MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA

Tujuan 3 (Tiga) adalah menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.

Tabel 8
Status Capaian Tujuan ke – 3 SDG's Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Target dan Indikator TPB		Base Line 2018	Base Line 2019	Base Line 2020	Base Line 2021	Target Nasional 2022	Capaian Target			GAP	Status	Instansi
							Belum Terpenuhi	Hampir Terpenuhi	Terpenuhi			
Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.												
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	4	N/A	N/A	N/A	N/A			5		●	Dinas Kesehatan
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan	Tenaga Kesehatan : Fasilitas Kesehatan : 42,39	Tenaga Kesehatan : Fasilitas Kesehatan : 31,54	Tenaga Kesehatan : 96,11 Fasilitas Kesehatan : 72,19	Tenaga Kesehatan : 95,5 Fasilitas Kesehatan : 47,65	95,79 ; 90,21		Tenaga Kesehatan : 93,04 Fasilitas Kesehatan : 55,91		Tenaga Kesehatan : 2,75 Fasilitas Kesehatan : 34,3	▶	Dinas Kesehatan
Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.												
3.2.1*	(a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.											Bukan Disagresi Kabupaten
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.											Bukan Disagresi Kabupaten
Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.												
3.3.1*	Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi.											Bukan Disagresi Kabupaten
3.3.2*	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.											Bukan Disagresi Kabupaten
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1.000 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	1,58					-	Dinas Kesehatan
3.3.3.[a]	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.											Bukan Disagresi Kabupaten
3.3.4*	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.	0,1	N/A	N/A	N/A	1,64					-	Dinas Kesehatan
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta	N/A	N/A	N/A	Filariasis : N/A Kusta : 100%	59%					-	Dinas Kesehatan
3.3.5.[a]	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta.											Bukan Disagresi Kabupaten
3.3.5.[b]	Jumlah kabupaten/ kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi.											Bukan Disagresi Kabupaten
Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.												
3.4.1	Kematian akibat penyakit kardiovaskuler, kanker, diabetes atau penyakit pernapasan kronis.											Bukan Disagresi Kabupaten
3.4.1 (a)	Persentase merokok pada penduduk usia 10-18 tahun.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					-	Dinas Kesehatan
3.4.1 (b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	N/A	N/A	N/A	25,95%	N/A	35,50%				▼	Dinas Kesehatan
3.4.1 (c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	N/A	N/A	N/A	32,5%	N/A	26%				▼	Dinas Kesehatan
3.4.2	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.											Bukan Disagresi Kabupaten
Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alcohol yang membahayakan												
3.5.1	Cakupan intervensi pengobatan (farmakologi, psikososial, rehabilitasi dan layanan pasca intervensi) bagi gangguan penyalahgunaan zat.											Bukan Disagresi Kabupaten
3.5.1 (a)	Jumlah penyalahguna napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis											Bukan Disagresi Kabupaten
3.5.1	Jumlah yang mengakses layanan pasca	0,27%	N/A	N/A	N/A	5.405					-	Dinas Sosial,

Target dan Indikator TPB		Base Line 2018	Base Line 2019	Base Line 2020	Base Line 2021	Target Nasional 2022	Capaian Target			GAP	Status	Instansi
							Belum Terpenuhi	Hampir Terpenuhi	Terpenuhi			
(b)	rehabilitasi					jiwa						Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3.5.2*	Konsumsi alcohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.											Bukan Disagresi Kabupaten
Pada tahun 2020, mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas.												
3.6.1	Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas.											Bukan Disagresi Kabupaten
Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.												
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern.											Bukan Disagresi Kabupaten
3.7.2*	Angka kelahiran remaja (umur 1014 tahun; umur 15-19tahun) per 1000 Perempuan di kelompok umur yang sama.											Bukan Disagresi Kabupaten
3.7.2. [a]	Total Fertility Rate (TFR).											Bukan Disagresi Kabupaten
Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat – obatan dan vaksin, berkualitas dan terjangkau bagi semua orang												
3.8.1*	Cakupan pelayanan kesehatan essensial	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					-	Dinas Kesehatan
3.8.1 (a)	Unmet Need Pelayanan Kesehatan	N/A	N/A	N/A	N/A	6,09					-	Dinas Kesehatan
3.8.2*	Proporsi populasidengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga atau pendapatan.											Bukan Disagresi Kabupaten
3.8.2 (a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	77,24 %	88,67 %	56,46%	32,93%	86,96%			92,11%		●	Dinas Kesehatan
Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.												
3.9.1	Angka kematian akibat rumah tangga dan polusi udara ambien.											Bukan Disagresi Kabupaten
3.9.2	Angka kematian akibat air tidak aman, sanitasi tidak aman, dan tidak higienis.											Bukan Disagresi Kabupaten
3.9.3	Angka kematian akibat keracunan.											Bukan Disagresi Kabupaten
Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat												
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	N/A	29,25 %	29,94%	26,78%	28,26%		27,52%		0,74%	▶	Dinas Kesehatan
Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Publik Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas AspekAspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.												
3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional.											Bukan Disagresi Kabupaten
3.b.2*	Total Official Development Assistant (ODA) untuk penelitian medis dan sektor kesehatan dasar.											Bukan Disagresi Kabupaten
3.b.3*	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat essensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan.											Bukan Disagresi Kabupaten
Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil												
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	N/A	N/A	N/A	N/A	0,435					-	Dinas Kesehatan
Memperkuat kapasitas semua negara, khususnya negara berkembang tentang peringatan di 088ni, pengurangan risiko dan manajemen risiko kesehatan nasional dan global.												
3.d.1*	Regulasi Kesehatan internasional dan kesiapsiagaan darurat kesehatan.											Bukan Disagresi Kabupaten
3.d.2	Persentase infeksi aliran darah akibat organisme antimikroba-resisten terpilih/tertentu.											Bukan Disagresi Kabupaten

● Tercapai ▶ Akan Tercapai/ membaik ▼ Perlu Perhatian Khusus - Data tidak tersedia

- **TPB Perlu Perhatian Khusus**

  Pada analisis capaian TPB Tujuan ke-3 Menjamin Kehidupan Yang Sehat Dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia, terdapat beberapa indikator yang memerlukan perhatian khusus, meliputi:

  1. 3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI);
  2. 3.1.2* Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas Kesehatan;
  3. 3.4.1.(b) Prevalensi tekanan darah tinggi; dan
  4. 3.4.1.(c) Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.

- **TPB Perlu Adanya Pendalaman**

  Sedangkan capaian indikator yang tidak memiliki data perlu adanya pendalaman, data tidak tersedia disebakan oleh beberapa hal seperti kegiatan tidak *match* dengan nomenklatur indikator TPB atau Indikator TPB tidak dengan kewenangan daerah. Sehingga indikator yang tidak memiliki data perlu perhatian khusus untuk mencapai trend capaian membaik, meliputi :

  1. 3.3.3* Kejadian Malaria per 1.000 orang;
  2. 3.3.4* Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk;
  3. 3.3.5* Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyaki tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta;
  4. 3.4.1.(a) Persentase merokok pada penduduk usia 10-18 tahun;
  5. 3.5.1.(b) Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi;
  6. 3.8.1 Cakupan pelayanan kesehatan essensial;
  7. 3.8.1.(a) Unmet Need Pelayanan Kesehatan; dan
  8. 3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga Kesehatan.

a) Target 3.1.1* (Angka Kematian Ibu (AKI))

Indikator menurunkan kasus kematian Ibu melahirkan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ditargetkan sebanyak 0 kasus dan terealisasi sebanyak 5 kasus.

Indikator ini diukur dari jumlah kematian ibu melahirkan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan penyebab kematian faktor penyakit dari ibu melahirkan.

Tabel 9
Angka Kematian Ibu Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Jumlah Kematian Ibu
Kerinci	7
Merangin	6
Sarolangun	6
Batang Hari	8
Muaro Jambi	9
Tanjab Timur	**5**
Tanjab Barat	5
Tebo	8
Bungo	9
Kota Jambi	4
Kota Sungai Penuh	3
Provinsi Jambi	**70**

Sumber : Seksi Kesga dan Gizi Masyarakat Bidang Kesmas,2022

b) Target 3.1.2 (Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan)*

Proporsi kelahiran yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 10
Persentase Perempuan Berumur 15 - 49 Tahun yang Pernah Kawin di Daerah Perkotaan dan Perdesaan menurut Kabupaten/Kota dan Penolong Proses Kelahiran Terakhir, Provinsi Jambi

Kabupaten/Kota	Penolong Proses Kelahiran Terakhir			
	Tenaga Medis	Perawat/Bidan	Non Tenaga Medis	Jumlah
Kerinci	20,75	71,01	0,98	100,00
Merangin	17,88	62,39	6,18	100,00
Sarolangun	29,58	68,60	3,57	100,00
Batanghari	36,60	65,89	6,21	100,00
Muaro Jambi	29,35	57,92	6,96	100,00
Tanjung Jabung Timur	**23,58**	**72,89**	**6,96**	**100,00**
Tanjung Jabung Barat	32,71	71,31	8,26	100,00
Tebo	30,29	60,59	4,37	100,00
Bungo	35,32	71,61	3,89	100,00
Kota Jambi	43,03	47,93	0,00	100,00
Kota Sungai Penuh	30,33	71,32	0,00	100,00
Provinsi Jambi	32,34	63,07	4,59	100,00

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jambi 2022

Demi menjaga keselamatan dan kesehatan ibu dan anak maka proses persalinan diharuskan berada pada fasilitas-fasilitas kesehatan yang sudah disediakan oleh pemerintah. Berdasarkan data Susenas Provinsi Jambi Tahun 2022, persentase perempuan pernah kawin berusia 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya di fasilitas kesehatan sebesar 55,91%. Namun persentase perempuan berumur 15 – 49 tahun yang pernah kawin dan melahirkan anak hidup paling besar pada tahun 2022 proses kelahirannya bertempat dirumah sebesar 44,09%.

Tabel 11
Persentase Perempuan Berumur 15 - 49 Tahun yang Pernah Kawin di Daerah Perkotaan dan Perdesaan menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Melahirkan Anak Hidup yang Terakhir, Provinsi Jambi

Kabupaten/Kota	Tempat melahirkan anak lahir hidup yang terakhir			
	Fasilitas Kesehatan	Rumah	Lainnya	Jumlah
Kerinci	92,77	7,23	0,00	100,00
Merangin	68,56	30,54	0,90	100,00
Sarolangun	86,27	13,73	0,00	100,00
Batanghari	83,38	16,62	0,00	100,00
Muaro Jambi	79,03	20,97	0,00	100,00
Tanjung Jabung Timur	**55,91**	**44,09**	0,00	**100,00**
Tanjung Jabung Barat	70,27	29,73	0,00	100,00
Tebo	83,04	16,96	0,00	100,00
Bungo	82,56	17,44	0,00	100,00
Kota Jambi	98,77	1,23	0,00	100,00
Kota Sungai Penuh	91,80	2,60	5,60	100,00
Provinsi Jambi	**81,14**	**18,60**	0,26	**100,00**

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jambi 2022

c) Target 3.3.3 (Kejadian Malaria per 1.000 orang)

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 jumlah penderita penyakit malaria di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Tahun 2018 sebanyak 1.449 dengan tipe malaria klinis dan kasus positif malaria sebanyak 2 orang. Angka kesakitan malaria (malaria berdasarkan gejala klinis) per 1000 penduduk dalam 1 tahun yang dinyatakan dalam permil di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Tahun 2018 sebesar 6.68 dan Angka kesakitan malaria (malaria berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium) per 1000 penduduk dalam 1 tahun yang dinyatakan dalam permil di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Tahun 2018 sebesar 0.1.

d) Target 3.3.4 (Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk)

Data tidak tersedia.

e) Target 3.3.5 (Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta)

Angka Pencapaian Pengobatan Penyakit Filariasis didefinisikan sebagai jumlah orang di kabupaten/kota endemis yang telah melaksanakan Pemberian Obat Massal Pencegahan (POMP) Filariasis sekali setahun selama 5 tahun berturut-turut dengan cakupan POPM Filariasis minimal 85% dari jumlah penduduk di kabupaten/kota atau 65% dari jumlah sasaran POPM kabupaten/kota, kemudian dilakukan survei darah jari dan hasilnya angka mikrofilarianya < 1%. Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdapat 79 jiwa yang menderita penyakit Filariasis. Data jumlah pasien yang mendapakan POPM Filariasis sebanyak dan jumlah penduduk dengan mikrofilaria rate > 1% pada sampel darah penduduk di sekitar kasus filariasiss di Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum diketahui

Jumlah kasus baru kusta tanpa cacat yang ditemukan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Tahun 2020 sebanyak 26 jiwa dan diobati sebanyak 26 jiwa. Maka proporsi kasus kusta yang ditemukan dan diobati sebesar 100%.

f) Target 3.4.1 (a) (Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun)

Data tidak tersedia.

g) Target 3.4.1 (b) Prevalensi tekanan darah tinggi

Berdasarkan data LKPJ Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022, jumlah penduduk yang berusia ≥ 18 Tahun yang melakukan pengukuran tekanan darah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur baru mencapai 56.879 jiwa dan yang mendapatkan pelayanan sebanyak 10.610 jiwa.

Cara perhitungan prevalensi tekanan darah tinggi yaitu Jumlah penduduk umur ≥18 tahun yang dilakukan pengukuran tekanan darah dengan hasil pengukuran tekanan darah sistolik lebih besar atau sama dengan 140 mmHg dan atau tekanan darah diastolik lebih besar atau sama dengan 90 mmHg dibagi dengan jumlah penduduk umur ≥18 tahun dan dinyatakan dalam satuan persen (%). Maka diketahui pravelensi tekanan darah tinggi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 35,50%.

h) Target 3.4.1 (c) Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun

Berdasarkan data LKPJ Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 tercatat 26% dari pengunjung puskesmas yang memiliki Indeks Masa Tubuh (IMT) tergolong obesitas.

i) Target 3.5.1 (b) (Jumlah yang mengakses layanan pascarehabilitasi)

Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdapat 16 (enam belas) orang yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi social didalam panti social sesuai standar pelayanan. Dengan rincian 6 (enam) orang berada di Balai rehab lido Bogor, 7 (tujuh) orang di Rehab Batam dan 3 (tiga) orang di IPWL AL Jannah Batanghari.

Sementara itu jumlah Lembaga rehabilitasi social untuk korban penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan atau dibantu terdapat 1 (satu) Lembaga yaitu Pondok pesantren Hidayatullahfalah SK 12 yang berada di Kecamatan Rantau Rasau.

Terhitung dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 Pravalensi penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tercatat sebesar 0,27%.

j) Target 3.8.1* (*Cakupan pelayanan kesehatan essensial)*

Data tidak tersedia.

k) Target 3.8.1 (a) (*Unmet Need Pelayanan Kesehatan*)

Data tidak tersedia.

l) Target 3.8.2 (a) *(Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN))*

Jaminan Kesehatan terdiri dari BPJS kesehatan, Jamkesda, Asuransi Swasta, Perusahaan/Kantor. Berdasarkan data Statistik kesejahteran Rakyat Provinsi Jambi Tahun 2022, persentase dari berbagai jenis jaminan kesehatan di Kabupaten

Tanjung Jabung Timur yaitu BPJS kesehatan sebesar 41,60%, Jamkesda sebesar 50,16%, Asuransi Swasta sebesar 0% dan perusahaan/kantor sebesar 0,34%.

Tabel 12
Presentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Jaminan Kesehatan, 2022

Kabupaten/Kota	BPJS Kesehatan	Jamkesda	Asuransi Swasta	Perusahaan/Kantor	Tidak Punya
Kerinci	38,42	0,41	0,25	0,78	60,34
Merangin	42,57	0,21	0,06	0,46	56,74
Sarolangun	53,63	1,76	0,03	1,54	43,19
Batang Hari	63,04	2,24	0,79	2,73	31,21
Muaro Jambi	50,09	0,35	0,08	3,24	46,64
Tanjung Jabung Timur	**41,60**	**50,16**	**0,00**	**0,34**	**10,83**
Tanjung Jabung Barat	42,77	0,26	0,00	1,80	55,16
Tebo	38,97	0,00	0,00	0,29	60,75
Bungo	41,97	1,22	0,09	1,56	55,19
Kota Jambi	69,44	1,37	0,97	3,14	25,44
Kota Sungai Penuh	74,85	0,85	0,46	0,74	23,10
Provinsi Jambi	50,46	3,74	0,28	1,75	44,09

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jambi 2022

Berdasarkan LKPJ Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019, Persentase kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terealisasi sebanyak 150.583, angka tersebut telah mencapai target yang direncanakan yaitu sebanyak 78.500.

m) Target 3.a.1 (Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun)*

Indikator Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun. merupakan proksi untuk memonitor pelaksanaan Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) WHO di Indonesia, dimana prevalensi tinggi penduduk yang merokok dapat berisiko terhadap kondisi kesehatan masyarakat. Pada tahun 2022 persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merokok sebesar 27,52%

Tabel 13
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Merokok dan Rata-rata Batang Rokok yang Dihisap per Minggu menurut Karakteristik Tahun 2022

Karakteristik	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Merokok	Rata-Rata Batang Rokok yang Dihisap per Minggu
Kelompok Pengeluaran		
40 persen terbawah	22,99	130,55
40 persen tengah	27,35	145,21
20 persen teratas	35,68	137,22
Pendidikan tertinggi		
SD Ke bawah	28,44	137,50
SMP Ke atas	26,71	139,02
Kab. Tanjab Timur	27,52	138,28

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kab. Tanjab Timur Tahun 2022

n) Target 3.c.1 *(Kepadatan dan distribusi tenaga Kesehatan)*

Tenaga kesehatan terdiri dari tenaga medis, tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknis biomedika, tenaga kesehatan tradisional, dan tenaga kesehatan lain (UU Kesehatan No.36 Tahun 2014). Indicator Kepadatan dan distribusi tenaga Kesehatan dapat digunakan sebagai landasan perencanaan untuk pengembangan dan pemetaan tenaga kesehatan khususnya di daerah terpencil.

Tabel 14
Banyaknya Tenaga Kesehatan menurut Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019

Kecamatan	Dokter	Perawat	Bidan	Jumlah
Mendahara	3	21	42	66
Mendahara Ulu	2	11	32	45
Geragai	2	8	43	53
Dendang	1	13	29	43
Muara Sabak Barat	1	17	42	60
Muara Sabak Timur	5	33	48	86
Kuala Jambi	2	15	16	33
Rantau Rasau	2	22	38	62
Berbak	2	15	17	34
Nipah Panjang	4	33	53	90
Sadu	5	32	38	75
RSUD Nurdin Hamzah	12	48	15	75
Tanjung Jabung Timur	**41**	**268**	**413**	**712**

Sumber : Dinas Kesehatan Tanjung Jabung Timur

MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA

Tujuan 4 (empat) adalah menjamin kualitas Pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.

Tabel 15
Status Capaian Tujuan ke – 4 SDG's Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Target TPB dan Indikator TPB		Base Line 2018	Base Line 2019	Base Line 2020	Base Line 2021	Target Nasional 2022	Capaian Target			GAP	Status	Instansi
							Belum Terpenuhi	Hampir Terpenuhi	Terpenuhi			
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan SD- SMP tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.												
4.1.1	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standarkemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.											Bukan Disagresi Kabupaten
4.1.1. (a)	Proporsi anak-anak dan remaja di: (1) kelas 5 (b) kelas 8, dan (c) usia 15 tahun yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.											Bukan Disagresi Kabupaten
4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat.	SD : 38,36 SMP : 15,30 SMA : 17,48	SD : 37,47 SMP : 14,12 SMA : 15,13	SD : 38,40 SMP : 14,58 SMA : 14,26	SD : 37,47 SMP : 13,92 SMA : 15,68	SD : 97,37 SMP: 90,13 SMA: 65,94	SD : 35,53 SMP : 12,82 SMA : 12,27			SD : 61,84 SMP : 77,31 SMA : 53,67	▼	Dinas Pendidikan
4.1.2 (a)	Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/ sederajat.	28,75	32,40	32,17	32,73	SD : 0,71 SMA : 22,52 SMP: 6,94	38,79%			28,73	▼	Dinas Pendidikan
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan lakilaki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan prasekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.												
4.2.1*	Proporsi anak usia 24-59 bulan yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran, dan psikososial, menurut jenis kelamin.											Bukan Disagresi Kabupaten
4.2.2*	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin.	23,79%	21,65 %	24,52%	23,21%	95,1%	18,31%			76,79	▼	Dinas Pendidikan
Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan lakilaki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.												
4.3.1*	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.	perempuan 90,10% ; laki-laki 81,27%	N/A	perempuan 84,63% ; laki-laki 85,95%	perempuan 90,40% ; laki-laki 80,51%	47,21			perempuan 80,4% ; laki-laki 79,4%		●	Dinas Pendidikan
4.3.1 (a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	N/A	N/A	N/A	N/A	31,16					-	Dinas Pendidikan
Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.												
4.4.1	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).											Bukan Disagresi Kabupaten
4.4.1 (a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	27,81	33,66	39,60	50,35	N/A		61,27			▶	Dinas Pendidikan
Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.												
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/laki-laki, (b) pedesaan/perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas	SD 99,60% SMP 92,42% SMA 63,28% PT	N/A	SD 99,18% SMP 91,63% SMA 56,79% PT	SD 99,45% SMP 93,25 SMA 57,05 PT	APM SD 100,01% APK SMP 100,75% SMA/SMK 100,74%		SD 99,47% SMP 89,54% SMA 57,14%		SD 0,54% SMP 11,21 % SMA 43,6%	▶	Dinas Pendidikan
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.												
4.6.1	Persentase remaja/dewasa pada kelompok usia tertentu, paling tidak mahir/mampu pada level tertentu dalam keterampilan (i)											Bukan Disagresi Kabupaten

Target TPB dan Indikator TPB		Base Line 2018	Base Line 2019	Base Line 2020	Base Line 2021	Target Nasional 2022	Capaian Target			GAP	Status	Instansi
							Belum Terpenuhi	Hampir Terpenuhi	Terpenuhi			
	membaca dan (ii) menghitung, menurut jenis kelamin.											
4.6.1 (a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	92,60%	93,84 %	95,08%	95,68 %	96,35%			96,88%		●	Dinas Pendidikan
Pada tahun 2030, menjamin semua peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan, termasuk antara lain, melalui pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang berkelanjutan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, promosi budaya damai dan non kekerasan, kewarganegaraan global dan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya dan kontribusi budaya terhadap pembangunan												
4.7.1	Pengarusutamaan pada semua jenjang pendidikan, (i) pendidikan kewargaan dunia, (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan termasuk kesetaraan gender dan hak asasi manusia pada (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru, (d) penilaian siswa.											Bukan Disagresi Kabupaten
Membangun dan meningkatkan fasilitas Pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.												
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).											Bukan Disagresi Kabupaten
4.a.1. [a]	Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir.											Bukan Disagresi Kabupaten
Pada tahun 2020, secara signifikan memperluas secara global, jumlah beasiswa bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, dan negara-negara Afrika, untuk mendaftar di pendidikan tinggi, termasuk pelatihan kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, program teknik, program rekayasa dan ilmiah, di negara maju dan negara berkembang lainnya.												
4.b.1*	Jumlah bantuan resmi Pemerintah Indonesia kepada mahasiswa asing penerima beasiswa kemitraan negara berkembang.											Bukan Disagresi Kabupaten
Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.												
4.c.1*	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan.											Bukan Disagresi Kabupaten

● Tercapai ▶ Akan Tercapai/ membaik ▼ Perlu Perhatian Khusus - Data tidak tersedia

➢ **TPB Perlu Perhatian Khusus**

Pada analisis capaian TPB Tujuan ke-4 Menjamin Kualitas Pendidikan Yang Inklusif Dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Untuk Semua, terdapat beberapa indikator yang memerlukan perhatian khusus diantaranya adalah indikator 4.1.2* Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat, 4.1.2.(a) Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/ sederajat dan indikator 4.2.2* Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin.

➢ **TPB Perlu Adanya Pendalaman**

Sedangkan capaian indikator yang tidak memiliki data perlu adanya pendalaman, data tidak tersedia disebakan oleh beberapa hal seperti kegiatan

tidak match dengan nomenklatur indikator TPB atau Indikator TPB tidak dengan kewenangan daerah. Sehingga indikator yang tidak memiliki data perlu perhatian khusus untuk mencapai trend capaian membaik. Capaian TPB yang tidak memiliki data terdapat pada indikator 4.3.1.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).

a) Target 4.1.2 (Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat)*

Indikator ini mengukur persentase anak dan remaja yang berhasil menyelesaikan jenjang pendidikan yang sesuai dengan rentang usianya. Rentang usia yang termasuk dalam perhitungan ini adalah antara 1 sampai dengan 3 tahun sejak usia kelulusan jenjang pendidikan pada umumnya. Berdasarkan usia wajib belajar yang dimulai sejak 7 tahun, maka dengan asumsi siswa belajar penuh waktu dan tidak tinggal kelas, mereka lulus SD/sederajat pada usia sekitar 12 tahun. Oleh karena itu rentang usia yang digunakan untuk penghitungan tingkat ketuntasan SD/sederajat adalah anak atau remaja usia 13 tahun (12 + 1 tahun) sampai dengan 15 tahun (12 + 3 tahun).

Pada tahun 2022 diketahui penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur berumur 7-24 tahun 35,53% sudah menyelesaikan pendidikan tingkat SD, 12,82% sudah menyelesaikan Pendidikan tingkat SMP dan 12,27% sudah menyelesaikan pendidikan tingkat SMA.

Tabel 16
Presentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun Menurut Karakteristik Dan Status Pendidikan Tahun 2022

Karakteristik	Masih Bersekolah		
	SD/sederajat	SMP/sederajat	SMA/keatas
Jenis Kelamin			
Laki-laki	35,19	13,89	12,66
Perempuan	35,90	11,69	11,85
Kelompok Pengeluaran			
40% terbawah	35,71	12,15	11,67
40% tengah	37,55	16,48	22,91
40% teratas	29,70	5,07	14,91
Kabupaten Tanjung Jabung Timur	**35,53**	**12,82**	**12,27**

Sumber : BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022

b) Target 4.1.2 (a) Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat

Anak tidak sekolah adalah anak-anak dan remaja usia sekolah sesuai dengan jenjang Pendidikan anak usia dini (PAUD), SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat yang tidak terdaftar dalam satuan pendidikan tersebut. Pada tahun 2022 diketahui sebanyak 38,79% penduduk berumur 7-24 tahun tidak bersekolah lagi.

Tabel 17
Presentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun Tidak Bersekolah Lagi Tahun 2022

Karakteristik	Tidak Bersekolah Lagi (%)
Jenis Kelamin	
Laki-laki	37,83
Perempuan	39,80
Kelompok Pengeluaran	
40% terbawah	40,02
40% tengah	33,10
40% teratas	50,33
Kabupaten Tanjung Jabung Timur	**38,79**

Sumber : BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022

c) Target 4.2.2 (Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin)*

Pada tahun 2022 tercatat 22,69% anak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berpartisipasi dalam keikutsertaan pendidikan prasekolah.

Tabel 18
Presentase penduduk 0-6 Tahun menurut Keikutsertaan Pendidikan Prasekolah Tahun 2022 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Keikutsertaan Pendidikan Prasekolah	Jumlah (%)
Masih Mengikuti Prasekolah TA 2020/2021	18,31
Pernah Mengikuti Prasekolah TA 2020/2021 dan Sebelum TA 2020/2021	6,37
Tidak/Belum Pernah Mengikuti Prasekolah	75,32

Sumber : BPS Provinsi Jambi Tahun 2022

d) Target 4.3.1 (Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin)*

Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, menurut jenis kelamin perempuan sebanyak 80,4% dan jenis kelamin laki-laki sebanyak 79,4%.

Tabel 19
Angka Partispasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK) Formal dan Nonformal Penduduk menurut Karakteristik dan Jenis Kelamin, 2022

Karakteristik	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
APS			
7-12 tahun	99,96	98,96	99,47
13-15 tahun	82,32	93,63	86,93
16-18 tahun	55,92	48,61	51,95
APM			
SD	99,96	98,96	99,47
SMP	77,36	88,48	81,89
SMA	51,09	46,30	48,49
APK			
SD	107,36	109,18	108,26
SMP	85,73	95,09	89,54
SMA	64,02	51,36	57,14

Sumber : BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022

e) Target 4.3.1 (a) (Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT))

Data tidak tersedia.

f) Target 4.4.1 (a) Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)

Diketahui proporsi penduduk yang memiliki keterampilan teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada tahun 2022 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebanyak 61,27% sangat meningkat dari tahun 2018 sebanyak 27,81%.

Tabel 20
Presentase Anggota Rumah Tangga Berusia 5 Tahun Keatas Mengakses Internet selama Tiga Bulan Terakhir, 2022

Karakteristik	Mengakses Internet
Jenis Kelamin KRT	
Laki-laki	62,24
Perempuan	49,76
Kuintil Pengeluaran	
40% Terbawah	57,24
40% Tengah	59,92
20% Teratas	71,74
Pendidikan Tertinggi ART	
SD ke bawah	53,27
SMP ke atas	71,18
Kabupaten Tanjung Jabung Timur	**61,27**

Sumber : BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022

g) Target 4.5.1* (Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/laki-laki, (b) pedesaan/perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan angka partisipasi penduduk bersekolah di jenjang tertentu sesuai kelompok usia pada jenjang tersebut. Berdasarkan data BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Angka Partisipasi Murni (APM) pada tahun 2022 ada yang mengalami peningkatan dan ada yang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan APM tahun 2021. APM SD/MI pada tahun 2021 sebesar 99,45 kemudian naik menjadi 99,47 di tahun 2022. APM SMP/MTS pada tahun 2021 sebesar 82,24 kemudian meningkat menjadi 81,89 di tahun 2022. APM SMA/MA pada tahun 2021 sebesar 48,80 kemudian pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 48,49.

Angka Partisipasi Kasar merupakan angka partisipasi dan akses penduduk bersekolah di jenjang tertentu tanpa memperhatikan usia. Berdasarkan data dari

BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI sebesar 108,26 dan APK SMP/MTS sebesar 89,54 dan APK SMA/SMK/MA sebesar 57,14.

Tabel 21
Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2021dan 2022

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)		Angka Partisipasi Kasar (APK)	
	2021	2022	2021	2022
SD/MI	99,45	99,47	109,20	108,26
SMP/MTS	82,24	81,89	93,25	89,54
SMA/SMK/MA	48,80	48,49	57,05	57,14

Sumber: : BPS Tanjung Jabung Timur 2022

h) Target 4.6.1 (a) (Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun)

Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang mencapai standar kemampuan minimum dalam membaca dan matematika di Kabupaten Tanjab Timur tercatat sebanyak 96,88%.

Tabel 22
Presentase Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Karakteristik dan Kemampuan Membaca dan Menulis Tahun 2022

Karakteristik	Huruf Latin	Huruf Lainnya*
Jenis Kelamin		
Laki-laki	98,84	73,47
Perempuan	94,82	74,86
Kelompok Pengeluaran		
40% Terbawah	95,67	65,86
40% Tengah	97,39	76.86
20% Teratas	98,02	83,51
Kabupaten Tanjung Jabung Timur	**96,88**	**74,14**

Sumber: : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022



MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN

Tujuan Global kelima pembangunan berkelanjutan memiliki fokus mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Secara rinci bahasan capaian untuk tujuan 5 SDGs di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebagai berikut.

Tabel 23
Status Capaian Tujuan ke – 5 SDG's Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Target dan Indikator TPB		Base Line 2018	Base Line 2019	Base Line 2020	Base Line 2021	Target Nasional 2022	Capaian Target			GAP	Status	Instansi
							Belum Terpenuhi	Hampir Terpenuhi	Terpenuhi			
Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadapkaum perempuan dimanapun.												
5.1.1*	Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.											Bukan Disagresi Kabupaten
Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya												
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 1564 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.											Bukan Disagresi Kabupaten
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 1564 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.											Bukan Disagresi Kabupaten
Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.												
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20 - 24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.											Bukan Disagresi Kabupaten
5.3.2	Persentase anak perempuan dan perempuan berusia 15-49 tahun yang telah menjalani FGM/C, menurut kelompok umur.											Bukan Disagresi Kabupaten
Mengenali dan menghargai pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial, dan peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara nasional.												
5.4.1	Proporsi waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan, berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan lokasi.											Bukan Disagresi Kabupaten
Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.												
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah	N/A	N/A	26,7%	26,67 %	N/A	26,7%				▼	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.											Bukan Disagresi Kabupaten
Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensikonferensi tersebut.												
5.6.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan.											Bukan Disagresi Kabupaten
5.6.2*	Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan Pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional.												
5.a.1*	(1) Proporsi penduduk pertanian yang memiliki hak atas tanah pertanian; (2) Proporsi perempuan penduduk pertanian sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas tanah pertanian, menurut jenis kepemilikan.											Bukan Disagresi Kabupaten
5.a.2*	Ketersediaan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak											Bukan Disagresi

Target dan Indikator TPB		Base Line 2018	Base Line 2019	Base Line 2020	Base Line 2021	Target Nasional 2022	Capaian Target			GAP	Status	Instansi
							Belum Terpenuhi	Hampir Terpenuhi	Terpenuhi			
	perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak kontrol.											Kabupaten
Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan..												
5.b.1*	Proporsi individu yang memiliki telepon genggam.	62,08 %	58,38	58,70%	62,79 %	67,88%		72,48%			●	Dinas Komunikasi dan Informatika
Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundangundangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan disemua tingkatan.												
5.c.1*	Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.											Bukan Disagresi Kabupaten

● Tercapai ▶ Akan Tercapai/ membaik ▼ Perlu Perhatian Khusus - Data tidak tersedia

- **TPB Perlu Perhatian Khusus**

  Pada analisis capaian TPB Tujuan ke-5 Mencapai Kesetaraan Gender Dan Memberdayakan Kaum Perempuan, terdapat beberapa indikator yang memerlukan perhatian khusus diantaranya adalah indikator 5.5.1* Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah.

- **TPB Perlu Adanya Pendalaman**

  Sedangkan capaian indikator yang tidak memiliki data perlu adanya pendalaman, data tidak tersedia disebakan oleh beberapa hal seperti kegiatan tidak match dengan nomenklatur indikator TPB atau Indikator TPB tidak dengan kewenangan daerah. Sehingga indikator yang tidak memiliki data perlu perhatian khusus untuk mencapai trend capaian membaik. Capaian TPB yang tidak memiliki data terdapat pada indikator 5.6.2* Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan Pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.

a) Target 5.5.1 (Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah)

Setiap partai politik harus mengisi kuota perempuan minimal 30 persen, hal ini terangkum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 7/2013 pasal 27 ayat (1) huruf b menyangkut kuota 30 persen keterwakilan calon legislatif (caleg) perempuan di setiap daerah pemilihan (dapil). Ketentuan 30 persen caleg harus perempuan ini dimaksudkan untuk memberikan akses yang memadai bagi kaum

perempuan agar dapat berpartisipasi dalam proses politik dan bernegara. Berdasarkan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam Angka 2022, jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Menurut Partai Politik yaitu, jumlah keikutsertaan perempuan dalam partai politik PAN sebanyak 17 jiwa, Golkar sebanyak 4 jiwa dan PDIP sebanyak 3 jiwa sehingga total keikutsertaan perempuan dalam partai politik sebanyak 30 jiwa.

Tabel 24
Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin Tahun 2021

Partai Politik	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
PAN	12	5	17
GOLKAR	2	2	4
PDIP	2	1	3
PBB	1	0	1
GERINDRA	2	0	2
HANURA	1	0	1
NASDEM	2	0	2
Tanjung Jabung Timur	22	8	30

Sumber : Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam Angka 2022

b) Target 5.6.2* (Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi)

Data tidak tersedia.

c) 5.b.1* (Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam)

Berdasarkan data Susenas Provinsi Jambi Tahun 2022, Persentase penduduk 5 tahun keatas yang memiliki/menguasai telepon selular/nirkabel di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 67,32%.

Tabel 25

Persentase Penduduk 5 Tahun Ke Atas yang Memiliki Telepon Selular (HP) dalam 3 bulan terakhir menurut Kabupaten/Kota, Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin di Provinsi Jambi Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
Kerinci	73,98	61,35	67,69
Maerangin	75,83	54,91	65,53
Sarolangun	74,62	59,36	67,15
Batang Hari	71,58	57,25	64,55
Muaro Jambi	74,74	61,39	68,34
Tanjab Timur	**78,67**	**66,03**	**72,48**
Tanjab Barat	75,33	57,30	66,61
Tebo	73,79	53,05	63,69
Bungo	74,95	59,59	67,38
Kota Jambi	84,51	80,60	82,57
Kota Sungai Penuh	80,82	68,85	74,82
Provinsi Jambi	**76,51**	**52,50**	**69,64**

Sumber : Statistik Kesejahteraan Provinsi Jambi Tahun 2022

MENJAMIN KETERSEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERBASIS UNTUK SEMUA

Tujuan global yang keenam dari pembangunan berkelanjutan memiliki fokus pada masalah ketersediaan air bersih dan sanitasi bagi seluruh penduduk. Pada tujuan keenam ini dijabarkan menjadi 3 sasaran global. Untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel 26
Status Capaian Tujuan ke – 6 SDG's Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Target TPB	Indikator TPB	Baseline				Targrt Nasional 2022	Capaian Target			GAP	Status	Instansi
		2018	2019	2020	2021		Belum Terpenuhi	Hampir Terpenuhi	Terpenuhi			
	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.											
6.1.1	Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman	74,97	32,78	85,42	85,91%	91,05%		83,71%		7,43	▶	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.											
6.2.1	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	20,12%	66,90%	N/A	82,51%	N/A			75,84%		▼	Dinas Kesehatan
	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.											
6.3.1	Proporsi limbah cair rumah tangga dan industri cair yang diolah secara aman											Bukan Disagresi Kabupaten
6.3.1 (a)	Persentase limbah cair industri cair yang diolah secara aman	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					-	Dinas Lingkungan Hidup
6.3.2	Proporsi badan air dengan kualitas air ambien yang baik.											Bukan Disagresi Kabupaten
6.3.2 (a)	Kualitas air permukaan sebagai air baku											Bukan Disagresi Kabupaten
6.3.2 (b)	Kualitas air tanah sebagai air baku											Bukan Disagresi Kabupaten
	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.											
6.4.1	Perubahan efisiensi penggunaan air dari waktu ke waktu											Bukan Disagresi Kabupaten
6.4.2	Tingkat water stress: proporsi pengambilan (withdrawal) air tawar terhadap ketersediannya											Bukan Disagresi Kabupaten
6.4.2 (a)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya	48,73%	40,79%	0,09%	26,97%	N/A	26,91%				▼	Dinas Perumahan dan Permukiman
6.4.2 (b)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air tanah terhadap ketersediaanya	46,66%	55,41%	63,86%	59,69%	N/A	58,82%				▼	Dinas Perumahan dan Permukiman
	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas sesuai kepantasan											
6.5.1*	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100)											Bukan Disagresi Kabupaten
6.5.2*	Proporsi wilayah cekungan lintas batas dengan pengaturan kerja sama sumberdaya air yang operasional											Bukan Disagresi Kabupaten
	Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau											
6.6.1*	Perubahan tingkat											Bukan Disagresi

Target TPB	Indikator TPB	Baseline				Targrt Nasional 2022	Capaian Target			GAP	Status	Instansi
		2018	2019	2020	2021		Belum Terpenuhi	Hampir Terpenuhi	Terpenuhi			
	sumber daya air terkait ekosistem dari waktu ke waktu.											Kabupaten
	Pada tahun 2030, memperluas kerjasama dan dukungan internasional dalam hal pembangunan kapasitas bagi negara-negara berkembang, dalam program dan kegiatan terkait air dan sanitasi, termasuk pemanenan air, desalinasi, efisiensi air, pengolahan air limbah, daur ulang dan teknologi daur ulang											
6.a.1	Jumlah ODA terkait air dan sanitasi yang menjadi bagian rencana belanja pemerintah											Bukan Disagresi Kabupaten
	Mendukung dan memperkuat partisipasi masyarakat lokal dalam meningkatkan pengelolaan air dan sanitasi											
6.b.1	Proporsi unit pemerintah lokal yang menerbitkan dan melaksanakan kebijakan dan prosedur terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air dan sanitasi											Bukan Disagresi Kabupaten

Tercapai Akan Tercapai/ membaik Perlu Perhatian Khusus - Data tidak tersedia

- **TPB Perlu Perhatian Khusus**

  Pada analisis capaian TPB terdapat beberapa indikator yang memerlukan perhatian khusus diantaranya adalah indikator 6.2.1 Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun, 6.4.2 (a) Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya, 6.4.2 (b) Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air tanah terhadap ketersediaanya.

- **TPB Perlu Adanya Pendalaman**

  Sedangkan indikator yang tidak memiliki data perlu adanya pendalaman, data yang tidak tersedia disebabkan oleh beberapa hal seperti ketiatan yang tidak cocok dengan nomenklatur indikator TPB atau indikator TPB bukan kewenangan dari daerah, sehingga indikator yang tidak memiliki data perlu adanya perhatian khusus untuk mencapai trend capaian membaik. Adapun indikator yang butuh adanya pendalaman yaitu indikator 6.3.1 (a) Persentase limbah cair industri cair yang diolah secara aman

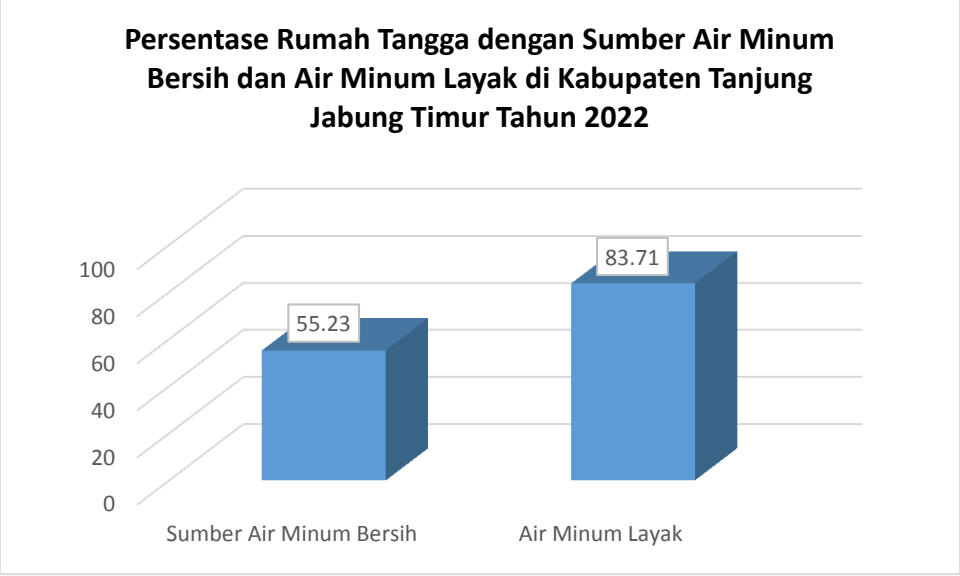
a) Target 6.1.1 (Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara ama n)

Berdasarkan data dari Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jambi Tahun 2022, Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum bersih dan air minum layak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Tahun 2022 sebesar 83,71%.

Tabel 27
Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota, Sumber Air Minum Bersih, dan Sumber Air Minum Layak, Provinsi Jambi, 2022

Kabupaten/Kota	Sumber Air Minum Bersih	Air Minum Layak
Kerinci	67,86	81,16
Merangin	48,76	51,26
Sarolangun	52,05	72,01
Batang Hari	67,97	83,35
Muaro Jambi	68,93	74,15
Tanjab Timur	**55,23**	**83,71**
Tanjab Barat	48,78	92,85
Tebo	71,55	74,24
Bungo	75,18	77,36
Kota Jambi	89,46	95,30
Kota Sungai Penuh	92,06	93,67
Provinsi Jambi	**67,28**	**79,19**

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jambi 2022



Gambar 3
Grafik Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih dan Akses Air Minum Layak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022

Berdasarkan data statistik kesejahteraan Provinsi Jambi Tahun 2022, presentase rumah tangga dengan akses terhadap air minum layak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 sebesar 83,71%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 akses air minum layak mengalami penurunan sebesar 2,2% hal ini dapat terjadi akibat adanya penambahan perumahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang belum mendapatkan akses air minum layak.

b) *Target 6.2.1 (Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun)*

Mencuci tangan dengan air saja tidak cukup. Menurut penelitian, perilaku mencuci tangan pakai sabun merupakan intervensi kesehatan yang paling murah dan efektif dilakukan dibandingkan dengan cara lainnya untuk mengurangi risiko penularan penyakit. Berdasarkan data dari LKPJ Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022, Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak sebesar 75,84%.

c) *Target 6.3.1 (a) (Persentase limbah cair industri cair yang diolah secara aman)*

Data tidak tersedia

d) *Target 6.4.2 (a) (Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya)*

Pada tahun 2022 persentase rumah tangga dengan Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga untuk Mandi/Cuci/dll dari air permukaan sebanyak 5,59%.

Tabel 28
Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga untuk Mandi/Cuci/dll Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Leding	Sumur Bor/Pompa	Sumur Terlindung, Sumur Tak Terlindung	Mata Air Terlidnung, Mata Air Tak Terlindung	Lainnya*	Jumlah
Kerinci	32,36	3,26	6,70	0,52	20,42	100,00
Maerangin	6,13	2,31	36,09	29,12	16,89	100,00
Sarolangun	8,23	8,11	48,60	23,98	8,44	100,00
Batang Hari	12,68	5,07	59,27	14,89	5,97	100,00
Muaro Jambi	5,23	21,40	43,75	24,51	1,71	100,00
Tanjab Timur	11,44	50,46	8,36	**5,59**	**21,32**	100,00
Tanjab Barat	13,68	31,99	18,32	12,81	21,73	100,00
Tebo	9,84	9,27	51,27	19,73	7,03	100,00
Bungo	6,32	11,03	53,71	13,72	9,44	100,00
Kota Jambi	40,75	13,14	40,41	5,00	0,13	100,00
Kota Sungai Penuh	70,75	5,23	12,96	1,16	5,32	100,00
Provinsi Jambi	**17,26**	**16,25**	**50,81**	**6,06**	**9,79**	**100,00**

Catatan: *) Lainnya termasuk Air Permukaan, Air Hujan, dan Lainnya

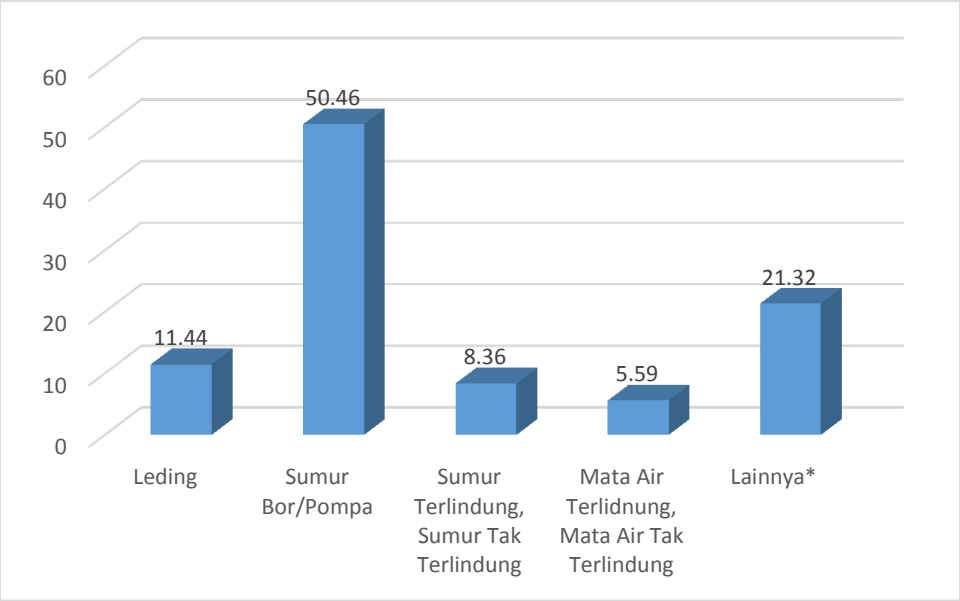
e) Target 6.4.2 (b) (Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air tanah terhadap ketersediaanya)

Pada tahun 2022 persentase rumah tangga dengan Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga untuk Mandi/Cuci/dll dari air tanah sebanyak 58,82%.

Tabel 29
Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga untuk Mandi/Cuci/dll Tahun 2022

Kabupaten/ Kota	Leding	Sumur Bor/Pompa	Sumur Terlindung, Sumur Tak Terlindung	Mata Air Terlidnung, Mata Air Tak Terlindung	Lainnya*	Jumlah
Kerinci	32,36	3,26	6,70	0,52	20,42	100,00
Maerangin	6,13	2,31	36,09	29,12	16,89	100,00
Sarolangun	8,23	8,11	48,60	23,98	8,44	100,00
Batang Hari	12,68	5,07	59,27	14,89	5,97	100,00
Muaro Jambi	5,23	21,40	43,75	24,51	1,71	100,00
Tanjab Timur	11,44	**50,46**	**8,36**	5,59	21,32	100,00
Tanjab Barat	13,68	31,99	18,32	12,81	21,73	100,00
Tebo	9,84	9,27	51,27	19,73	7,03	100,00
Bungo	6,32	11,03	53,71	13,72	9,44	100,00
Kota Jambi	40,75	13,14	40,41	5,00	0,13	100,00
Kota Sungai Penuh	70,75	5,23	12,96	1,16	5,32	100,00
Provinsi Jambi	**17,26**	**16,25**	**50,81**	**6,06**	**9,79**	**100,00**

Catatan: *) Lainnya termasuk Air Permukaan, Air Hujan, dan Lainnya



Gambar 4
Persentase Rumah Tangga berdasarkan Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga untuk Mandi/Cuci/dll Tahun 2022 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur



MENJAMIN AKSES ENERGI YANG TERJANGKAU, ANDAL, BERKELANJUTAN, DAN MODERN UNTUK SEMUA

Tujuan global pembangunan berkelanjutan yang ketujuh berfokus pada akses penduduk terhadap energi yang terjangkau dan berkelanjutan.

Tabel 30
Status Capaian Tujuan ke – 7 SDG's Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Target TPB	Indikator TPB	Baseline				Target Nasional2022	Capaian Target			GAP	Status	Instansi
		2018	2019	2020	2021		Belum Terpenuhi	Hampir Terpenuhi	Terpenuhi			
	Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.											
7.1.1*	Rasio elektrifikasi	92,50%	88,51%	89,92%	99,46%	100%		98,83%		1,17	▶	Sekretariat Daerah
7.1.1 (a)	Konsumsi listrik per kapita.											Bukan Disagresi Kabupaten
7.1.2	Proporsi penduduk dengan sumber energi utama pada teknologi dan bahan bakar yang bersih.											Bukan Disagresi Kabupaten
7.1.2 (a)	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga.	191.395	197.502	227.055	227.600	N/A		231.424			▶	Sekretariat Daerah
7.1.2 (b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga	87,63%	89,78%	98,80%	98,20%	87,12%		98,20%			●	Sekretariat Daerah
	Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global											
7.2.1*	Bauran energi terbarukan											Bukan Disagresi Kabupaten
	Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat											
7.3.1*	Intensitas energi primer											Bukan Disagresi Kabupaten
	Pada tahun 2030, memperkuat kerjasama internasional untuk memfasilitas akses pada teknologi dan riset energi bersih, termasuk energi terbarukan, efisiensi energi, canggih, teknologi bahan bakar fosil lebih bersih, dan mempromosikan investasi di bidang infrastruktur energi dan teknologi energi bersih											
7.a.1	Bantuan keuangan internasional ke negara-negara berkembang untuk mendukung penelitian dan pengembangan energi bersih dan produksi energi terbarukan, termasuk sistem hibrida											Bukan Disagresi Kabupaten
	Pada tahun 2030, memperluas infrastruktur dan meningkatkan teknologi untuk penyediaan layanan energi modern dan berkelanjutan bagi semua negaranegara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil dan negara berkembang											
7.b.1	Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik dari Energi Terbarukan dalam watt per kapita)											Bukan Disagresi Kabupaten

● Tercapai ▶ Akan Tercapai/ membaik ▼ Perlu Perhatian Khusus - Data tidak tersedia

➢ **TPB Perlu Perhatian Khusus**

Pada analisis capaian TPB terdapat indikator yang memerlukan perhatian khusus yaitu indikator 7.1.b belum memiliki target untuk dicapai, sehingga tidak dapat diketahui nilai yang tercapai apakah sudah mencapai target atau belum.

a) Target 7.1.1 (Rasio elektrifikasi)*

Rasio elektrifikasi merupakan perbandingan antara jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan baik dari listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun listrik non-PLN dengan jumlah rumah tangga. Data Rasio Elektrifikasi digunakan untuk mengetahui jumlah rumah tangga yang sudah mendapatkan akses listrik. Berdasarkan data Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jambi pada tahun 2022 persentase Rumah Tangga berdasarkan sumber penerangan Listrik PLN pada daerah perkotaan dan perdesaan sebesar 98,83% dan sumber penerangan NonPLN sebesar 0,45%. Maka Rasio elektrifikasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 100%.

Tabel 31
Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota, Daerah Tempat Tinggal, dan Sumber Penerangan, Provinsi Jambi, 2022

Kabupaten/ Kota	Perkotaan + perdesaan			
	Listrik PLN	Listrik Non PLN	Bukan Listrik	Jumlah
Kerinci	95,22	1,69	3,10	100.00
Merangin	97,34	2,66	0,00	100.00
Sarolangun	97,69	1,37	0,94	100.00
Batang Hari	99,33	0,17	0,50	100.00
Muaro Jambi	98,56	1,34	0,09	100.00
Tanjab Timur	**98,83**	**0,45**	**0,72**	**100.00**
Tanjab Barat	97,50	1,72	0,78	100.00
Tebo	99,31	0,30	0,39	100.00
Bungo	98,90	0,52	0,58	100.00
Kota Jambi	99,55	0,45	0,00	100.00
Kota Sungai Penuh	100,00	0,00	0,00	100.00
Provinsi Jambi	98,39	1,04	0,57	100.00

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jambi 2022



Gambar 5
Grafik Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Penerangan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2022

b) Target 7.1.2 (a) (Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga) dan Target 7.1.2 (b) (Rasio penggunaan gas rumah tangga)

Jumlah sambungan jaringan gas (jargas) untuk rumah tangga merupakan indikator dalam program prioritas nasional yaitu pembangunan jaringan distribusi gas untuk rumah tangga yang bertujuan untuk diversifikasi energi, pengurangan subsidi, dan penyediaan energi bersih. Pengguna jaringan gas untuk memasak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebanyak 32.649 jiwa, dengan persentase rumah tangga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang menggunakan Gas Kota/Biogas sebanyak 98,20%.

Tabel 32
Persentase Rumah Tangga di Daerah Perkotaan dan Perdesaan menurut Kabupaten/Kota dan Bahan Bakar/Energi Utama yang Digunakan untuk Memasak, Provinsi Jambi, 2022

Kabupaten/ Kota	Listrik	Elpiji/Gas Kota/ Biogas	Minyak Tanah/Briket/ Arang/ Kayu Bakar/Lainnya	Tidak Memasak	Jumlah
Kerinci	0,72	77,53	21,69	0,06	100,00
Merangin	0,00	78,92	20,94	0,14	100,00
Sarolangun	0,00	90,11	9,89	0,00	100,00
Batang Hari	0,21	98,06	1,73	0,00	100,00
Muaro Jambi	2,10	95,59	2,12	0,20	100,00
Tanjung Jabung Timur	**0,45**	**98,20**	**1,35**	**0,00**	**100,00**
Tanjung Jabung Barat	0,45	96,52	3,03	0,00	100,00
Tebo	0,00	93,40	6,60	0,00	100,00
Bungo	0,65	888,60	10,75	0,00	100,00
Kota Jambi	0,73	96,77	1,98	0,52	100,00
Kota Sungai Penuh	0,52	70,15	28,95	0,39	100,00
Provinsi Jambi	**0,60**	**91,05**	**8,21**	**0,13**	100,00

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jambi 2022



MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA

Tujuan pembangunan berkelanjutan yang kedelapan memiliki fokus pada isu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi bagi seluruh penduduk. Deskripsi sasaran dan indikator yang terukur dalam menjelaskan capaian SDGs tujuan 8 Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebagai berikut.

Tabel 33
Status Capaian Tujuan ke – 8 SDG's Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Target TPB	Indikator TPB	Baseline				Target Nasional 2022	Capaian Target			GAP	Status	Instansi
		2018	2019	2020	2021		Belum Terpenuhi	Hampir Terpenuhi	Terpenuhi			
Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.												
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB perkapita	2,97	4,21	-3,87	-4,51	N/A	-0,46				▼	Badan Keuangan Daerah/ Bappeda
8.1.1 (a)	PDB per kapita	17.241,20 miliar	17.697,59 miliar	17.349,98 miliar	17.373,62 miliar	Rp 71,03	25.606,19 miliar			45,42 miliar	▼	Badan Keuangan Daerah/ Bappeda
Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.												
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	-89,29	932,25	-6,97	3,93	N/A	42,97%				▼	Badan Keuangan Daerah/ Bappeda
Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan												
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin											Bukan Disagresi Kabupaten
8.3.1 (a)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan											Bukan Disagresi Kabupaten
Meningkatkan secara progresif, hingga 2030, efisiensi sumber daya global dalam konsumsi dan produksi, serta usaha melepas kaitan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan, sesuai dengan the 10-Year Framework of Programs on Sustainable Consumption and Production, dengan negara-negara maju sebagai pengarah												
8.4.1	Jejak material (material footprint) yang dihitung selama tahun berjalan.											Bukan Disagresi Kabupaten
8.4.1 (a)	Rencana dan implementasi Strategi pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan											Bukan Disagresi Kabupaten
8.4.2	Konsumsi material domestik (domestic material consumption).											Bukan Disagresi Kabupaten
Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya												
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja											Bukan Disagresi Kabupaten
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur											Bukan Disagresi Kabupaten
8.5.2 (a)	Persentase setengah pengangguran											Bukan Disagresi Kabupaten
Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan												
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)											Bukan Disagresi Kabupaten
Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya												
8.7.1	Persentase dan jumlah anak usia 5-17 tahun, yang bekerja, dibedakan											Bukan Disagresi Kabupaten

Target TPB	Indikator TPB	Baseline				Target Nasional 2022	Capaian Target			GAP	Status	Instansi
		2018	2019	2020	2021		Belum Terpenuhi	Hampir Terpenuhi	Terpenuhi			
	berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (dibedakan berdasarkan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak)											
8.7.1 (a)	Persentase dan jumlah anak usia 10-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur											Bukan Disagresi Kabupaten
Melindungi hakhak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya												
8.8.1	Tingkat frekuensi kecelakaan kerja fatal dan non-fatal, berdasarkan jenis kelamin, sektor pekerjaan dan status migran											Bukan Disagresi Kabupaten
8.8.1 (a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3											Bukan Disagresi Kabupaten
8.8.2	Peningkatan kepatuhan atas hak-hak pekerja (kebebasan berserikat dan perundingan kolektif) berdasarkan sumber tekstual ILO dan peraturan perundang undangan negara terkait											Bukan Disagresi Kabupaten
Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk local												
8.9.1*	Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi Pariwisata terhadap PDB											Bukan Disagresi Kabupaten
8.9.1 (a)	Jumlah wisatawan mancanegara											Bukan Disagresi Kabupaten
8.9.1 (b)	Jumlah kunjungan wisatawa nusantara.											Bukan Disagresi Kabupaten
8.9.1 (c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.											Bukan Disagresi Kabupaten
Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua												
8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa											Bukan Disagresi Kabupaten
8.10.1 (a)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit											Bukan Disagresi Kabupaten
Meningkatkan bantuan untuk mendukung perdagangan bagi negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, termasuk melalui the Enhanced Integrated Framework for Trade-Related Technical Assistance bagi negara kurang berkembang												
8.a.1	Bantuan untuk komitmen Perdagangan dan pencairan pendanaan											Bukan Disagresi Kabupaten
Pada tahun 2020, mengembangkan dan mengoperasionalkan strategi global untuk ketenagakerjaan pemuda dan menerapkan the Global Jobs Pact of the International Labour Organization												
8.b.1	Adanya strategi nasional terkait ketenagakerjaan pemuda yang sudah dikembangkan dan operasional sebagai strategi khusus atau sebagai bagian dari strategi ketenagakerjaan nasional											Bukan Disagresi Kabupaten

● Tercapai ▶ Akan Tercapai/ membaik ▼ Perlu Perhatian Khusus - Data tidak tersedia

➢ **TPB Perlu Perhatian Khusus**

Pada analisis capaian TPB terdapat beberapa indikator yang memerlukan perhatian khusus diantaranya adalah indikator 8.1.1* Laju pertumbuhan PDB perkapita dan indikator 8.2.1 Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.

a) Target 8.1.1 (Laju pertumbuhan PDB perkapita) dan 8.1.1 (a) (PDRB Per Kapita)*

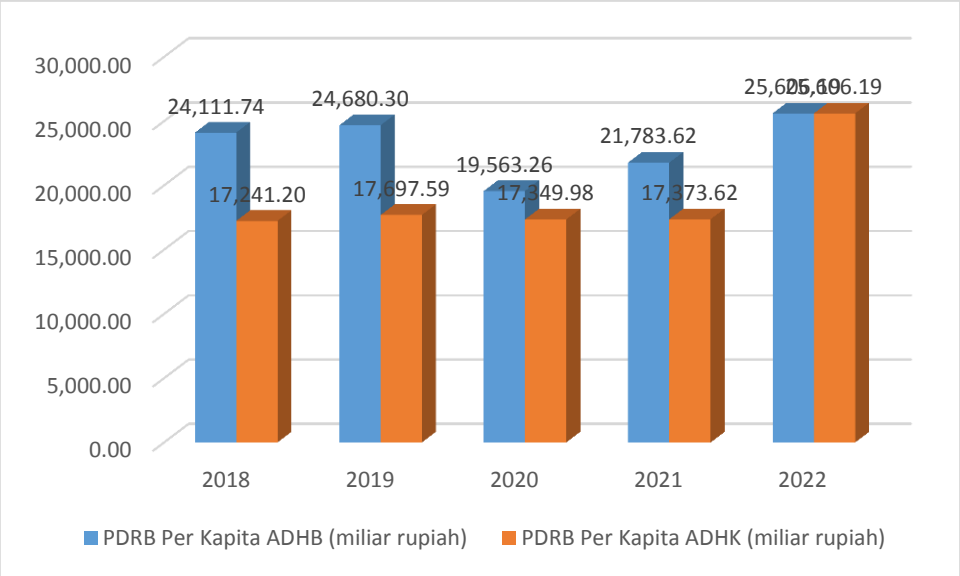
Tingkat kemakmuran suatu daerah juga dapat dihitung dengan menggunakan angka PDRB Perkapita yaitu dengan cara nilai total PDRB dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun. Dengan cara ini dapat diketahui pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun tertentu baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Walaupun secara teoritis angka yang diperoleh merupakan indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan suatu daerah, namun dari angka ini belum dapat melihat tingkat pemerataan pendapatan penduduk daerah tersebut.

PDRB perkapita Kabupaten Tanjung Jabung Timur baik ADHB maupun ADHK mengalami pertumbuhan positif diperiode 2018-2019, namun mengalami penurunan pada tahun 2020-2022. Pada tahun 2022 PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar Rp. 25.606,19 miliar rupiah turun sebesar -0,46 persen dari tahun 2021 yang sebesar Rp. 19.475,30 miliar rupiah, begitu juga dengan PDRB perkapita ADHK juga mengalami peningkatan sebesar 0,13 persen pada tahun 2021 sehingga pada tahun 2021 mencapai sebesar Rp. 21.783,62 miliar rupiah, Yang perlu menjadi perhatian adalah PDRB perkapita sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan PDRB dan besaran jumlah penduduk. Dengan demikian selain upaya-upaya peningkatan aktivitas perekonomian daerah, upaya pengendalian jumlah penduduk tetap diperlukan.

Tabel 34
PDRB Perkapita di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018-2022

Tahun	PDRB Per Kapita ADHB (miliar rupiah)	PDRB Per Kapita ADHK (miliar rupiah)	Pertumbuhan PDRB per kapita ADHK
2018	24.111,74	17.241,20	2,97
2019	24.680,30	17.697,59	4,21
2020	19.563,26	17.349,98	-3,87
2021	21.783,62	17.373,62	-4,51
2022	25.606,19	25.606,19	-0,46

Sumber: Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Angka Tahun 2022



Gambar 6
Grafik PDRB Perkapita Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018-2022

b) Target 8.2.1* (Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun)

Berdasarkan data BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Tahun 2023 jumlah penduduk yang bekerja dengan usia 15 tahun keatas sebanyak 178.867 jiwa, sedangkan jumlah penduduk yang tidak bekerja dengan usia 15 tahun keatas adalah 55.297 jiwa. Untuk mengetahui laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja per tahun dapat diketahui dengan rumus berikut:

$$LP\ PDBptk = \left(\frac{PDBptk\ t - PDBptk\ t-1}{pdbptk\ t-1}\right) x\ 100\%$$

Dengan:

$$PDBptk = \frac{PDB}{PB}$$

Keterangan:

LP PDBptk	: laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (%)
$PDBptk_t$	: PDB per tenaga kerja pada periode t (ribu rupiah)
$PDBptk_{t-1}$	: PDB per tenaga kerja pada periode t-1 (ribu rupiah)
PDB	: Produk Domestik Bruto dengan harga konstan (ribu rupiah)
PB	: jumlah penduduk yang bekerja (orang)

$$LP\ PDBptk = \left(\frac{215.019.061 - 150.398.816}{150.398.816}\right) x\ 100\%$$

$$LP\ PDBptk = 42{,}97\%$$

Berdasarkan perhitungan diatas dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2022 sebesar 42,97%. Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja ini dilakukan untuk memantau tingkat produktivitas tenaga kerja dalam menghasilkan nilai tambah ekonomi.



MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF YANG BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI

Tujuan global yang kesembilan pembangunan berkelanjutan berfokus pada isu industri, inovasi dan infrastruktur. Deskripsi sasaran dan indikator yang terukur dalam menjelaskan capaian SDGs tujuan 9 Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebagai berikut.

Tabel 35
Status Capaian Tujuan ke – 9 SDG's Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Target TPB	Indikator TPB	Baseline				Target Nasional 2022	Capaian Target			GAP	Status	Instansi
		2018	2019	2020	2021		Belum Terpenuhi	Hampir Terpenuhi	Terpenuhi			
Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.												
9.1.1*	Populasi penduduk desa yang tinggal dalam jarak 2 km terhadap jalan yang layak.											Bukan Disagresi Kabupaten
9.1.1. (a)	Kondisi mantap jalan nasional.	N/A	N/A	N/A	N/A	92,22%		64,47%		27,75	▶	Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman
9.1.1 (b)	Panjang pembangunan jalan tol.											Bukan Disagresi Kabupaten
9.1.1 (c)	Panjang jalur kereta api.											Bukan Disagresi Kabupaten
9.1.2*	Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					-	Dinas Perhubungan
9.1.2 (a)	Jumlah bandara.											Bukan Disagresi Kabupaten
9.1.2 (b)	Jumlah pelabuhan penyeberangan											Bukan Disagresi Kabupaten
9.1.2 (c)	Jumlah pelabuhan strategis											Bukan Disagresi Kabupaten
Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.												
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita											Bukan Disagresi Kabupaten
9.2.1 (a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	4,35	0,28	1,25	-0,2	4,89%	1,89			3%	▼	Dinas Perindustrian dan perdagangan
9.2.2 *	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur											Bukan Disagresi Kabupaten
Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar												
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.											Bukan Disagresi Kabupaten
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.											Bukan Disagresi Kabupaten
Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masingmasing.												
9.4.1*	Rasio emisi CO2/											Bukan

Target TPB	Indikator TPB	Baseline				Target Nasional 2022	Capaian Target			GAP	Status	Instansi
		2018	2019	2020	2021		Belum Terpenuhi	Hampir Terpenuhi	Terpenuhi			
	emisi gas rumah kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur											Disagresi Kabupaten
9.4.1 (a)	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor industri.											Bukan Disagresi Kabupaten
9.4.1 (b)	Intensitas emisi sektor industri.											Bukan Disagresi Kabupaten
Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.												
9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.											Bukan Disagresi Kabupaten
9.5.2*	Jumlah sumber daya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (peneliti, perekayasa, dan dosen) pada instansi pemerintah dan perguruan tinggi per satu juta penduduk.											Bukan Disagresi Kabupaten
9.5.2 (a)	Proporsi sumberdaya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan gelar Doktor (S3)											Bukan Disagresi Kabupaten
Memfasilitasi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan tangguh di negara berkembang, melalui peningkatan keuangan, teknologi dan dukungan teknis bagi negara-negara Afrika, negara-negara kurang berkembang, negaranegara berkembang terkurung daratan dan negara-negara pulau kecil												
9.a.1	Total dukungan resmi internasional (bantuan resmi pembangunan ditambah aliran bantuan resmi biaya) untuk infrastruktur.											Bukan Disagresi Kabupaten
Mendukung pengembangan teknologi domestik, riset dan inovasi di negaranegara berkembang, termasuk dengan memastikan lingkungan kebijakan yang kondusif, antara lain untuk diversifikasi industri dan peningkatan nilai tambah komoditas												
9.b.1	Proporsi nilai tambah teknologi menengah dan tinggi terhadap total nilai tambah.											Bukan Disagresi Kabupaten
9.b.1 (a)	Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi											Bukan Disagresi Kabupaten
Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negaranegara kurang berkembang pada tahun 2020.												
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband											Bukan Disagresi Kabupaten

● Tercapai ▶ Akan Tercapai/ membaik ▼ Perlu Perhatian Khusus - Data tidak tersedia

- **TPB Perlu Perhatian Khusus**

  Pada analisis capaian TPB terdapat beberapa indikator yang memerlukan perhatian khusus diantaranya adalah indikator 9.2.1 Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.

- **TPB Perlu Adanya Pendalaman**

  Sedangkan indikator yang tidak memiliki data perlu adanya pendalaman, data yang tidak tersedia disebabkan oleh beberapa hal seperti ketiatan yang tidak cocok dengan nomenklatur indikator TPB atau indikator TPB bukan

kewenangan dari daerah, sehingga indikator yang tidak memiliki data perlu adanya perhatian khusus untuk mencapai trend capaian membaik. Adapun indikator yang butuh adanya pendalaman diantaranya yaitu indikator 9.1.2* Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi.

a) Target 9.1.1 (a) (Kondisi mantap jalan nasional)

Berdasarkan data LKPJ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2022, target rasio jalan status Kabupaten dalam kondisi mantap sebesar 64,49%. Adapun realisasi tahun 2022 rasio jalan status kabupaten dalam kondisi mantap terealisasikan sebesar 64,47%. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi mantap jalan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2022 hampir memenuhi targetnya.

b) Target 9.2.1 (a) (Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur)

Berdasarkan data BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022, laju pertumbuhan PDB industri manufaktur mengalami penurunan dan peningkatan, dimana pada tahun 2018-2019 mengalami penurunan dari 4,35% menjadi 0,28% dan pada tahun 2021-2022 mengalami peningkatan sebesar 2,09% pada tahun 2022. Namun data yang digunakan pada tahun 2021 dan 2022 merupakan data sementara. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 7

Grafik Laju Pertumbuhan PDRB Industri Manufaktur di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018-2022



MENGURANGI INTRA DAN ANTAR NEGARA

Tujuan kesepuluh pembangunan berkelanjutan memiliki fokus untuk mengurangi ketimpangan dalam negeri dan antar negara.

Tabel 36
Status Capaian Tujuan ke – 10 SDG's Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Target TPB	Indikator TPB	Baseline				Target Nasional 2022	Capaian Target			GAP	Status	Instansi
		2018	2019	2020	2021		Belum Terpenuhi	Hampir Terpenuhi	Terpenuhi			
Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.												
10.1.1*	Rasio Gini.											Bukan Disagresi Kabupaten
10.1.1 (a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	12,38%	11,54%	10,95%	11,39%	9,57%	10,91%			1,34%	▼	Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10.1.1 (b)	Jumlah desa tertinggal.											Bukan Disagresi Kabupaten
10.1.1 (c)	Jumlah Desa Mandiri.											Bukan Disagresi Kabupaten
10.1.1 (d)	Jumlah daerah tertinggal.											Bukan Disagresi Kabupaten
10.1.1 (e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.											Bukan Disagresi Kabupaten
10.1.1 (f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	N/A	N/A	N/A	23,42%	N/A					-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.												
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	N/A	N/A	N/A	N/A	10,16					-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.												
10.3.1	Proporsi penduduk yang melaporkan merasa didiskriminasikan atau dilecehkan dalam kurun 12 bulan terakhir atas dasar larangan diskriminasi sesuai hukum internasional Hak Asasi Manusia											Bukan Disagresi Kabupaten
10.3.1 (a)	Indeks Kebebasan											Bukan Disagresi Kabupaten
10.3.1. (b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	N/A	N/A	N/A	100%	N/A					-	Polres Kabupaten Tanjung Jabung Timur
10.3.1. (c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan	N/A	N/A	N/A	100%	N/A			100%		●	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10.3.1. (d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM internasional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					-	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.												
10.4.1	Proporsi upah dan subsidi perlindungan sosial dari pemberi kerja terhadap PDB											Bukan Disagresi Kabupaten
10.4.1 (a)	Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat											Bukan Disagresi Kabupaten

Target TPB	Indikator TPB	Baseline				Target Nasional 2022	Capaian Target			GAP	Status	Instansi
		2018	2019	2020	2021		Belum Terpenuhi	Hampir Terpenuhi	Terpenuhi			
10.4.1. (b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	23,72%	26,28%	34,43%	23,62%	35,49%			36,87%		●	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Tanjung Jabung Timur,
10.4.2	Dampak redistributif dari kebijakan fiskal.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					-	Badan Keuangan Daerah
Memperbaiki regulasi dan pengawasan pasar dan 54embaga keuangan global, dan memperkuat pelaksanaan regulasinya												
10.5.1	Financial Soundness Indicator.											Bukan Disagresi Kabupaten
10.5.1 (a)	Indikator Kesehatan Perbankan.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					-	Bank Indonesia
Memastikan peningkatan representasi dan suara bagi negara berkembang dalam pengambilan keputusan di lembagalembaga ekonomi dan keuangan internasional global, untuk membentuk kelembagaan yang lebih efektif, kredibel, akuntabel dan terlegitimasi.												
10.6.1	Proporsi anggota dan hak suara negaranegara berkembang di organisasi internasional											Bukan Disagresi Kabupaten
Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan terkelola dengan baik.												
10.7.1	Proporsi biaya rekrutmen yang ditanggung pekerja terhadap pendapatan tahunan di negara tujuan											Bukan Disagresi Kabupaten
10.7.2	Jumlah negara yang mengimplementasikan kebijakan migran yang baik.											Bukan Disagresi Kabupaten
10.7.2. (a)	Jumlah dokumen Kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
10.7.2 (b)	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
10.7.3	Jumlah orang yang meninggal atau hilang dalam proses migrasi menuju tujuan internasional											Bukan Disagresi Kabupaten
10.7.4	Proporsi penduduk yang mengungsi menurut negara asal											Bukan Disagresi Kabupaten
Menerapkan prinsip perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang, khususnya negara yang kurang berkembang, sesuai dengan kesepakatan World Trade Organization												
10.a.1	Besaran nilai tarif yang diberlakukan untuk mengimpor dari negara kurang berkembang/ berkembang dengan tarif nol persen.											Bukan Disagresi Kabupaten
Mendorong bantuan pembangunan dan arus keuangan yang resmi, termasuk investasi asing secara langsung, ke negara-negara yang paling membutuhkan, terutama negara kurang berkembang, negara-negara Afrika, negara berkembang pulau kecil dan negara terkurung daratan, sesuai dengan rencana dan program nasional mereka.												
10.b.1	Total aliran sumberdaya yang masuk untuk pembangunan, terpilah berdasarkan negara-negara penerima dan donor serta jenis aliran (misalnya, bantuan Pembangunan resmi, investasi asing langsung, serta aliran yang lain)											Bukan Disagresi Kabupaten
Memperbesar pemanfaatan jasa keuangan bagi pekerja												
10.c.1	Proporsi biaya remitansi dari jumlah yang dikirimkan.											Bukan Disagresi Kabupaten

● Tercapai ▶ Akan Tercapai/ membaik ▼ Perlu Perhatian Khusus - Data tidak tersedia

- **TPB Perlu Perhatian Khusus**

Pada analisis capaian TPB terdapat beberapa indikator yang memerlukan perhatian khusus diantaranya adalah indikator 10.1.1 (a) Persentase penduduk

yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.

- **TPB Perlu Adanya Pendalaman**

  Sedangkan indikator yang tidak memiliki data perlu adanya pendalaman, data yang tidak tersedia disebabkan oleh beberapa hal seperti ketiatan yang tidak cocok dengan nomenklatur indikator TPB atau indikator TPB bukan kewenangan dari daerah, sehingga indikator yang tidak memiliki data perlu adanya perhatian khusus untuk mencapai trend capaian membaik. Adapun indikator yang butuh adanya pendalaman diantaranya:

  - 10.1.1 (f) Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal;
  - 10.2.1* Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas;
  - 10.3.1 (b) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM);
  - 10.3.1 (d) Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM internasional;
  - 10.4.2 Dampak redistributif dari kebijakan fiskal;
  - 10.5.1 (a) Indikator Kesehatan Perbankan;
  - 10.7.2 (a) Jumlah dokumen Kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan; dan
  - 10.7.2 (b) Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi.

a) Target 10.1.1 (a) (Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur)

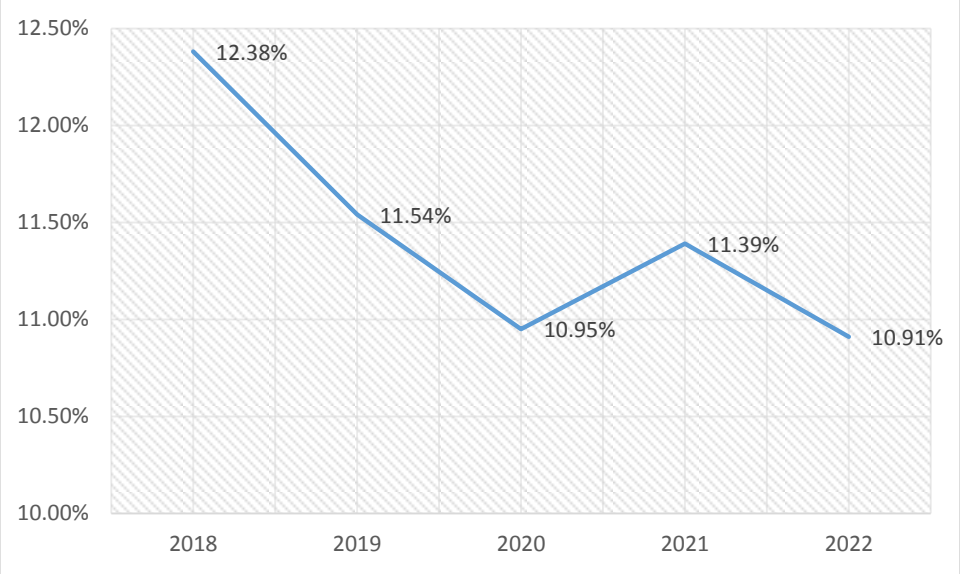
Penduduk miskin Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam kurun tahun 2014 sampai dengan 2020 menunjukan tren angka menurun. Sedangkan tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 jumlah penduduk miskin menunjukkan adanya peningkatan dengan jumlah 24.230 jiwa kemudian meningkat hingga pada tahun 2021 berjumlah 24.420 jiwa. Pada Tahun 2014 sampai dengan 2022 presentase

penduduk miskin di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menurun dengan jumlah 13,55% pada tahun 2014 dan 10,91% pada tahun 2022.

Tabel 37
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2014-2022

Tahun	Garis Kemiskinan (Rupiah/kapita/bulan)	Jumlah penduduk miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
2014	239.057	28,,79	13,55
2015	301.563	30,18	14,17
2016	322.389	27,42	12,76
2017	338.963	27,22	12,58
2018	361.574	26,99	12,38
2019	374.735	25,35	11,54
2020	392.778	24,23	10,95
2021	406.772	24,42	11,39
2022	468.201	23,42	10,91

Sumber : Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Angka Tahun 2023



Gambar 8
Grafik Perkembangan Presentase Penduduk Miskin
Di Tanjung Jabung Timur, Tahun 2018-2022
Sumber : Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Angka Tahun 2023

b) Target 10.1.1 (f) (Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal)

Status Desa yang terdapat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdiri dari Desa Maju, Desa Berkembang, Desa sangat tertinggal dan desa tertinggal. Terdapat

12 Desa dengan status desa tertinggal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2022.

c) ***Target 10.2.1* (Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas)***

Data tidak tersedia.

d) ***Target 10.3.1 (b) (Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM))***

Data tidak tersedia.

e) ***Target 10.3.1 (c) (Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan)***

Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2022 sebanyak 16 kasus dan penanganan pengaduan pelanggaran HAM perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan terpenuhi sebanyak 100%.

f) ***Target 10.3.1 (d) (Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM internasional)***

Data tidak tersedia.

g) ***Target 10.4.1 (b) (Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan)***

Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi sosial yang bersifat wajib berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak kepada setiap orang yang telah membayar iuran apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, mengalami kecelakaan kerja, memasuki usia lanjut/pensiun, atau meninggal dunia. Jumlah kepemilikikan jaminan sosial bidang ketenagakerjaan pada penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur di tahun 2022 sebesar 36,87%.

Tabel 38
RSE Presentase Rumah Tangga menurut Jenis Jaminan Sosial, 2022

Jenis Jaminan Sosial	Presentase Rumah Tangga
Jaminan Pensiun/hari tua*	31,94%
Asuransi/PHK**	36,87%

* Jaminan pensiun/hari tua terdiri dari: Jaminan pensiun dan Jaminan hari tua

** Asuransi/PHK terdiri dari: Asuransi kematian, Jaminan kecelakaan kerja, & Pesangon PHK

Manfaat dari indikator ini adalah menunjukkan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, mengalami kecelakaan kerja, memasuki usia lanjut/pensiun, atau meninggal dunia.

h) Target 10.5.1 (a) (Indikator Perbankan)

Data tidak tersedia.

i) Target 10.7.2 (a) (Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan)

Data tidak tersedia.

j) Targer 10.7.2 (b) (Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi)

Data tidak tersedia.



KOTA DAN PERMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN

Tujuan kesebelas pembangunan berkelanjutan memiliki fokus terhadap masalah kota dan permukiman berkelanjutan. Sebagaimana pada pembahasan – pembahasan sebelumnya beberapa sasaran tidak dapat terukur di Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena ketersediaan data yang masih terbatas.

Tabel 39
Status Capaian Tujuan ke – 11 SDG's Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Target TPB	Indikator TPB	Baseline				Target Nasional 2022	Target Sasaran			GAP	Status	Instansi
		2018	2019	2020	2021		Belum Terpenuhi	Hampir Terpenuhi	Terpenuhi			
Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh												
11.1.1	Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak											Bukan Disagresi Kabupaten
11.1.1 (a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau											Bukan Disagresi Kabupaten
Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua												
11.2.1	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik, terpilah menurut jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang disabilitas											Bukan Disagresi Kabupaten
11.2.1 (a)	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik											Bukan Disagresi Kabupaten
11.2.1 (b)	Persentase penduduk terlayani transportasi umum											Bukan Disagresi Kabupaten
Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.												
11.3.1	Rasio laju peningkatan konsumsi tanah dengan laju pertumbuhan penduduk											Bukan Disagresi Kabupaten
11.3.1 (a)	Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk	N/A	N/A	N/A	N/A	16,34					-	Dinas PUPR
11.3.2	Proporsi kota dengan struktur partisipasi langsung masyarakat sipil dalam perencanaan dan manajemen kota yang berlangsung secara teratur dan demokratis											Bukan Disagresi Kabupaten
Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.												
11.4.1	Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam											Bukan Disagresi Kabupaten

Target TPB	Indikator TPB	Baseline				Target Nasional 2022	Target Sasaran			GAP	Status	Instansi
		2018	2019	2020	2021		Belum Terpenuhi	Hampir Terpenuhi	Terpenuhi			
	(dengan Purchase Power Parity, PPP)											
11.4.1 (a)	Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (non-PPP)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					-	Badan Kaeungan Daerah
Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relative terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan 60ocus melindungi orang miskin dan orangorang dalam situasi rentan												
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					-	Badan Penanggulangan Bencana.
11.5.2	Kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP, termasuk kerusakan bencana terhadap infrastruktur yang kritis dan gangguan terhadap pelayanan dasar											Bukan Disagresi Kabupaten
11.5.2 (a)	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					-	Badan Penanggulangan Bencana
Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.												
11.6.1	Proporsi limbah padat perkotaan yang dikumpulkan secara teratur dengan pemrosesan akhir yang baik terhadap total limbah padat perkotan yang dihasilkan oleh suatu kota											Bukan Disagresi Kabupaten
11.6.1 (a)	Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					-	Dinas Lingkungan Hidup
11.6.1 (b)	Persentase sampah nasional yang terkelola	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					-	Dinas Lingkungan Hidup
11.6.2	Rata-rata tahunan materi partikular halus (PM 2,5 dan PM 10) di Perkotaan (dibobotkan jumlah penduduk)											Bukan Disagresi Kabupaten
11.6.2. (a)	Rata-rata tahunan materi partikular halus PM 10	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					-	Dinas Lingkungan Hidup
11.6.2. (b)	Indeks Kualitas Udara	N/A	N/A	N/A	N/A	88,06	172 AQI US			83,94	▼	Dinas Lingkungan Hidup
Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.												
11.7.1	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua, menurut kelompok usia, jenis kelamin dan penyandang disabilitas.											Bukan Disagresi Kabupaten
11.7.1 (a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					-	Dinas Perumahan dan Permukiman
11.7.2	Proporsi orang yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual menurut jenis kelamin, usia, status disabilitas, dan tempat kejadian (12 bulan terakhir)											Bukan Disagresi Kabupaten
11.7.2 (a)	Proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir											Bukan Disagresi Kabupaten
Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015- 2030.												
11.a.1	Jumlah negara yang											Bukan

Target TPB	Indikator TPB	Baseline				Target Nasional 2022	Target Sasaran			GAP	Status	Instansi
		2018	2019	2020	2021		Belum Terpenuhi	Hampir Terpenuhi	Terpenuhi			
	memiliki kebijakan perkotaan nasional atau rencana pembangunan daerah yang (a) merespon dinamika penduduk; (b) memastikan keseimbangan perencanaan wilayah; dan (c) meningkatkan ruang fiskal daerah.											Disagresi Kabupaten
11.a.1 (a)	Proporsi penduduk yang tinggal di daerah dengan RTRW yang sudah dilengkapi KLHS											Bukan Disagresi Kabupaten
11.b.1*	Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030											Bukan Disagresi Kabupaten
11.b.2*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					-	Badan Penanggulangan Bencana dan Dinas Pemadam Kebakaran
Memberikan dukungan kepada negara-negara kurang berkembang, melalui bantuan keuangan dan teknis, dalam membangun bangunan yang berkelanjutan dan 61angguh, dengan memfaatkan bahan lokal.												
11.c.1. (a)	Persentase Daerah yang memiliki Perda Bangunan Gedung yang Berkelanjutan, Berketahanan, dan menggunakan Material Lokal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					-	Dinas PUPR

● Tercapai ▶ Akan Tercapai/ membaik ▼ Perlu Perhatian Khusus - Data tidak tersedia

- **TPB Perlu Perhatian Khusus**

  Pada analisis capaian TPB terdapat beberapa indikator yang memerlukan perhatian khusus diantaranya adalah indikator 11.6.2 (b) Indeks Kualitas Udara.

- **TPB Perlu Adanya Pendalaman**

  Sedangkan indikator yang tidak memiliki data perlu adanya pendalaman, data yang tidak tersedia disebabkan oleh beberapa hal seperti ketiatan yang tidak cocok dengan nomenklatur indikator TPB atau indikator TPB bukan kewenangan dari daerah, sehingga indikator yang tidak memiliki data perlu adanya perhatian khusus untuk mencapai trend capaian membaik. Adapun indikator yang butuh adanya pendalaman diantaranya:

  - 11.3.1 (a) Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk;

- 11.4.1 (a) Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (non-PPP);
- 11.5.2 (a) Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB;
- 11.6.1 (a) Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya;
- 11.6.1 (b) Persentase sampah nasional yang terkelola;
- 11.6.2 (a) Rata-rata tahunan materi partikular halus PM 10;
- 11.7.1 (a) Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua;
- 11.b.2* Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana; dan
- 11.c.1 (a) Persentase Daerah yang memiliki Perda Bangunan Gedung yang Berkelanjutan, Berketahanan, dan menggunakan Material Lokal.

a) ***Target 11.3.1 (a) (Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk)***

Data tidak tersedia.

b) ***Target 11.4.1 (a) (Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (non-PPP))***

Data tidak tersedia.

c) ***Target 11.5.1* (Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.)***

Data tidak tersedia.

d) ***Target 11.5.2 (a) (Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB)***

Data tidak tersedia.

e) ***Target 11.6.1 (a) (Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya)***

Data tidak tersedia.

f) ***Target 11.6.1 (b) (Persentase sampah nasional yang terkelola)***

Data tidak tersedia.

g) ***Target 11.6.2 (a) (Rata-rata tahunan materi partikular halus PM 10)***

Data tidak tersedia.

h) Target 11.6.2 (b) (Indeks Kualitas Udara)

Indeks Kualitas Udara (IKU) merupakan gambaran atau nilai hasil transformasi parameter-parameter (indicator) individual polusi udara yang saling berhubungan seperti NO_2, SO_2, SPM, O, dan CO. Indeks kualitas udara di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi saat ini sangat buruk dengan indeks kualitas udara sebesar 172 AQI US, yang diklasifikasikan sebagai "Tidak Sehat".

i) Target 11.7.1 (a) (Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua)

Ruang terbuka perkotaan adalah lahan terbangun yang bisa berupa ruang publik, jalan serta ruang di sekitar jalan di kawasan perkotaan. Kawasan perkotaan yang dimaksud adalah kawasan perkotaan fungsional yang berarti kawasan di mana kegiatan ekonomi utamanya adalah perdagangan dan jasa serta luas kawasannya tidak terbatas pada batas administratif.

j) Target 11.b.2* (Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana).

Data tidak tersedia.

k) Target 11.c.1 (a) (Persentase Daerah yang memiliki Perda Bangunan Gedung yang Berkelanjutan, Berketahanan, dan menggunakan Material Lokal).

Data tidak tersedia.

MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKELANJUTAN

Tujuan kedua belas pembangunan berkelanjutan berfokus pada permasalahan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Sebagaimana pada pembahasan – pembahasan sebelumnya beberapa sasaran tidak dapat terukur di Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena ketersediaan data yang masih terbatas. Oleh karena itu hanya beberapa sasaran saja yang dapat dirinci ke dalam pembahasan berikut.

Tabel 40
Status Capaian Tujuan ke – 12 SDG's Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Kode Indikator	Nama Indikator	*Baseline*				Target Nasional2022	Capaian Target			GAP	Status	Instansi
		2018	2019	2020	2021		Belum Terpenuhi	Hampir Terpenuhi	Terpenuhi			
Melaksanakan *the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns*, dengan semua negara mengambil tindakan, dipimpin negara maju, dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas negara berkembang												
12.1.1*	Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan											Bukan Disagresi Kabupaten
Pada tahun 2030, mengurangi separuh jumlah dari sampah pangan global perkapita pada tingkat retail dan konsumen dan mengurangi kerugian makanan sepanjang produksi dan rantai penawaran, termasuk kerugian paska panen.												
12.3.1.(a)	Persentase Sisa Makanan	N/A	N/A	N/A	N/A	41,55%					-	Dinas Lingkungan Hidup
Pada tahun 2020, mencapai pengelolaan berwawasan lingkungan, atas bahan kimia dan semua jenis limbah lainnya di sepanjang siklus hidupnya,sesuai dengan kerangka kerja internasional yang telah disepakati, dan secara signifikan mengurangi pelepasan bahan-bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.												
12.4.1*	Peran aktif dalam mengikuti kesepakatan multilateral internasional tentang bahan kimia dan limbah berbahaya.											Bukan Disagresi Kabupaten
12.4.1.(a)	Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan Merkuri	N/A	N/A	N/A	N/A	20%					-	Dinas Lingkungan Hidup
12.4.1.(b)	Persentase penurunan tingkat konsumsi perusak ozon dari baseline.											Bukan Disagresi Kabupaten
12.4.2.*	(a) Limbah B3 yang dihasilkan per kapita; dan	N/A	N/A	N/A	N/A	97,50%					-	Dinas Lingkungan Hidup
	(b) Proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengelolaannya	N/A	N/A	N/A	100%	97,50%					-	Dinas Lingkungan Hidup
Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.												
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	N/A	N/A	N/A	100%	10,84%					-	Dinas Lingkungan Hidup
Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka												
12.6.1*	Jumlah perusahaan yang mempublikasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A						Inspektorat Kab.Tanjung Jabung Timur

Kode Indikator	Nama Indikator	*Baseline*				Target Nasional2022	Capaian Target			GAP	Status	Instansi
		2018	2019	2020	2021		Belum Terpenuhi	Hampir Terpenuhi	Terpenuhi			
	laporan keberlanjutannya											
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	N/A	N/A	N/A	N/A	2,634					-	Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatkan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.												
12.7.1*	Tingkatan *(degree)* kebijakan pengadaan publik dan implementasi rencana aksi											Bukan Disagresi Kabupaten
12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah											Bukan Disagresi Kabupaten
12.7.1.(b)	Jumlah Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk pengadaann Barang dan Jasa											Bukan Disagresi Kabupaten
Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.												
12.8.1.(a)	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup											Bukan Disagresi Kabupaten
12.8.1.(b)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	N/A	N/A	N/A	N/A	15					-	Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kab.Tanjung Jabung Timur /Satpol PP / Dinas Sosial
Mendukung negara-negara berkembang untuk memperkuat kapasitasilmiah dan teknologi mereka untuk bergerak ke arah pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan.												
12.a.1*	Kapasitas pembangkit energi terbarukan yang terpasang (dalam watt per kapita)											Bukan Disagresi Kabupaten
Mengembangkan dan mengimplementasikan alat untuk memonitor dampak pembangunan berkelanjutan untuk pariwisata yang berkelanjutan yang dapat menciptakan lapangan kerja dan mendukung budaya dan produk lokal.												
12.b.1(a)	Jumlah lokasi penerapan *sustainable tourism development*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					-	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Merasionalisasi subsidi bahan bakar fosil tidak efisien yang mendorong pemborosan konsumsi dengan menghilangkan distorsi pasar, sesuai dengan keadaan nasional, termasuk dengan restrukturisasi pajak dan penghapusan secara bertahap jika ada subsidi berbahaya , yang dicerminkan oleh dampak lingkungannya, dengan sepenuhnya memperhitungkan kebutuhan dan kondisi khusus negara-negara berkembang dan meminimalkan dampak negatif yang bisa terjadi pada pembangunannya dengan cara yang melindungi rakyat miskin dan masyarakat yang terkena dampak.											
12.c.1*	(a) Jumlah subsidi bahan bakar fosil sebagai persentase dari PDB; dan											Bukan Disagresi Kabupaten
	(b) Jumlah subsidi bahan bakar fosil sebagai proporsi dari total pengeluaran nasional untuk bahan bakar fosil.											Bukan Disagresi Kabupaten

Tercapai Akan Tercapai/membaik Perlu Perhatian Khusus - Data Tidak Tersedaia

- **TPB Perlu Perhatian Khusus**

Pada analisis capaian TPB Tujuan ke-12 Menjamin Pola Produksi Dan Konsumsi Yang Berkelanjutan terdapat beberapa indikator yang memerlukan perhatian khusus diantaranya adalah Indikator

- **TPB Perlu Adanya Pendalaman**

Sedangkan capaian indikator yang tidak memiliki data perlu adanya pendalaman, data tidak tersedia disebakan oleh beberapa hal seperti kegiatan tidak match dengan nomenklatur indikator TPB atau Indikator TPB tidak dengan kewenangan daerah. Sehingga indikator yang tidak memiliki data perlu perhatian khusus untuk mencapai trend capaian membaik. Capaian TPB yang tidak memiliki data terdapat pada indikator :

- 12.3.1 (a) Persentase Sisa Makanan;
- 12.4.1 (a) Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan Merkuri;
- 12.4.2* (a) Limbah B3 yang dihasilkan per kapita;
- 12.4.2* (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengelolaannya;
- 12.5.1 (a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang;
- 12.6.1* Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya;
- 12.6.1 (a) Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001;
- 12.8.1 (b) Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister; dan
- 12.b.1 (a) Jumlah lokasi penerapan sustainable tourism development.

a) Target 12.3 (Pada tahun 2030, mengurangi separuh jumlah dari sampah pangan global perkapita pada tingkat retail dan konsumen dan mengurangi kerugian makanan sepanjang produksi dan rantai penawaran, termasuk kerugian paska panen)

1) Indikator 12.3.1* (Persentase Sisa Makanan)

Data tidak tersedia.

b) **Target 12.*4* *(Pada tahun 2020, mencapai pengelolaan berwawasan lingkungan, atas bahan kimia dan semua jenis limbah lainnya di sepanjang siklus hidupnya,sesuai dengan kerangka kerja internasional yang telah disepakati, dan secara signifikan mengurangi pelepasan bahan-bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan)***

1) **Indikator 12.4.1.(a) - Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan merkuri**

   Data tidak tersedia.

2) **Indikator 12.4.2* - (a) Limbah B3 yang dihasilkan per kapita; dan (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengelolaannya**

   Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) merupakan sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mempunyai sifat, konsentrasi, dan atau jumlahnya dapat mencemarkan dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung (PP No. 101/2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun). Pengelolaan limbah B3 meliputi rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan, dan pengolahan termasuk penimbunan hasil pengolahan limbah B3 tersebut. Limbah B3 yang terkelola sesuai peraturan perundangan adalah seluruh timbulan limbah B3 dari berbagai kegiatan industri yang dikelola selama tahun berjalan. Sedangkan limbah B3 yang diolah sesuai dengan peraturan perundangan adalah timbulan limbah B3 yang dikurangi dan atau dihilangkan sifat bahaya dan atau sifat racunnya

   menurut jenis pengolahan tertentu sesuai dengan peraturan perundangan.

Semakin besarnya proporsi limbah B3 yang tidak dikelola mengindikasikan semakin banyak pula limbah B3 yang dikelola tanpa izin, diserahkan ke pihak ketiga yang tidak berizin, dan dibuang tanpa izin.

c) Target 12.5 (Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.)

***1)* Indikator 12.5.1.(a) (Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang)**

Pengolahan sampah merupakan bagian dari penanganan sampah dan menurut UU no 18 Tahun 2008 didefinisikan sebavai proses perubahan bentuk sambah dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah. Pengolahan sampah merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk mengurangi jumlah sampah, disamping memanfaatkan nilai yang masih terkandung dalam sampah itu sendiri. Pengolahan sampah dapat dilakukan berupa : pengomposan, *recycling*/daur ulang, pembakaran (insinersi), dan lain-lain.

d) Target 12.6 (Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka)

1) **Indikator 12.6.1* - Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya**
2) **Indikator 12.6.1.(a) - Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.**

e) Target 12.8 (Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam)

1) Indikator 12.8.1.(b) - Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.

Tabel 41
Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022

No	Uraian	Sasaran	Target	Capaian
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD		65,61	80,75%
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar		91,02%	95,30%

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2022

Tabel 42
Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Dinas Kesehatan Kab.Tanjung Jabung Timur Tahun 2022

No	Uraian SPM	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100	88,04	88,04
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100	70,13	70,13
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100	91,86	91,86
4	Pelayanan Kesehatan Balita	100	64,10	64,10
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100	74,24	74,24
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100	21,23	21,23
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	100	80,02	80,02
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100	18,56	18,56
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus (DM)	100	113,31	113,31
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	100	94,54	95,54
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100	56,19	56,19
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia	100	49,34	49,34

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2022

Tabel 43
Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Satpol PP pada Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	81	79,2	98%
2	Peningkatan Kondusifitas Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat	100%	100%	100%
3	Peningkatan Pencegahan	70%	100%	100%

No	Sasaran Strategis	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
	dan Penanggulangan bahaya kebakaran			

Sumber: LKPJ Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Tanjung Jabung Timur, 2022

Tabel 44
Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Tahun 2022

No	Uraian SPM	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %
1	Peningkatan Pelayanan Sosial untuk PMKS / PPKS	55	72	100
2	Peningkatan Kapabilitas dan Partisipas Perempuan di Bidang Politik dan Ekonomi	75	69,28	92,37
3	Peningkatan Pemenuhan hak dan perlindungan terhadap perempuan dan anak	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanjung Jabung Timur,2022

f) Target 12.b (Mengembangkan dan mengimplementasikan alat untuk memonitor dampak pembangunan berkelanjutan untuk pariwisata yang berkelanjutan yang dapat menciptakan lapangan kerja dan mendukung budaya dan produk lokal)

1) Indikator 12.b.1.(a) - Jumlah lokasi penerapan sustainable tourism development.

MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA

Tujuan ke-tiga belas pembangunan berkelanjutan memiliki fokus dalam hal penanganan perubahan iklim. Capaian sasaran pada tujuan 13 SDG's di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebagai berikut.

Tabel 45
Status Capaian Tujuan ke – 13 SDG's Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Kode Indikator	Nama Indiaktor	*Baseline*				Target Nasional 2022	CapaianTarget			GAP	Status	Instansi
		2018	2019	2020	2021		Belum Terpenuhi	Hampir Terpenuhi	Terpenuhi			
Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.												
13.1.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	N/A	N/A	N/A	Terkena dampak 533 jiwa	N/A					-	Badan Penanggulangan Bencana dan Dinas Pemadam Kebakaran
13.1.2*	Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan *the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction* 2015–2030											Bukan Disagresi Kabupaten
13.1.3*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					-	Badan Penanggulangan Bencana dan Dinas Pemadam Kebakaran
13.2.1*	Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan verifikasi emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen *Biennial Update Report* (BUR) dan National *Communications*											Bukan Disagresi Kabupaten
13.2.2*	Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun											Bukan Disagresi Kabupaten
13.2.2.(a)	Potensi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)											Bukan Disagresi Kabupaten
13.2.2.(b)	Potensi penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)											Bukan Disagresi Kabupaten
Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim.												
13.3.1.(a)	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup.											Bukan Disagresi Kabupaten
Melaksanakan komitmen negara maju pada *the United Nations Framework Convention on Climate Change* untuk tujuan mobilisasi dana bersama sebesar 100 miliar dolar Amerika per tahun pada tahun 202dari semua sumber untuk mengatasi kebutuhan negara berkembandalam konteks aksi mitigasi yang bermanfaat dan transparansi dalam pelaksanaannya dan mengoperasionalisasi secara penuh *the Green Climate Fund* melalui kapitalisasi dana tersebut sesegera mungkin.												
13.a.1.(a)	Jumlah dana publik *(budget tagging)* untuk pendanaan perubahan iklim.											Bukan Disagresi Kabupaten

- **TPB Perlu Adanya Pendalaman**

Pada analisis capaian TPB Tujuan 13 Mengambil Tindakan Cepat Untuk Perubahan Iklim Dan Dampaknya terdapat dua indikator yang menjadi kewenangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dari dua indikator terdapat satu indikator yang belum tersedia data yaitu indikator 13.1.1* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang dan 13.1.3* Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi

Tercapai Akan Tercapai/membaik Perlu Perhatian Khusus - Data Tidak Tersedaia

penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana.

a) Target 13.1 (Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara)

1) Indikator 13.1.1* (Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang)

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana). Jumlah korban meninggal adalah jumlah orang yang dilaporkan tewas atau meninggal dunia akibat bencana (Perka BNPB No. 8/2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan). Jumlah korban hilang adalah jumlah orang yang dilaporkan hilang atau tidak ditemukan atau tidak diketahui keberadaannya setelah terjadi bencana (Perka BNPB No. 8/2011). Jumlah korban terdampak adalah jumlah orang atau sekelompok orang yang menderita akibat dampak buruk bencana, seperti kerusakan dan/atau kerugian harta benda, namun masih dapat menempati tempat tinggalnya (Perka BNPB No. 8/2011).

Berdasarkan data LKPJ Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdapat 533 korban jiwa akibat bencana kebakaran permukiman, kebakaran hutan dan lahan, banjir, abrasi, puting beliung dan rumah disambar petir. Bencana alam yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 semuanya berskala lokal seperti kebakaran (Rumah maupun Lahan) dan banjir.

2) Indikator 13.1.3* (Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana)

Selaras dengan Rencana/Strategi Nasional bahwa strategi penanggulangan bencana yang diadopsi dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah sejalan atau "selaras" dengan rencana atau strategi nasional. Ini menjamin konsistensi dan koordinasi antara tingkat pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dalam menghadapi risiko bencana. Pengukuran persentase dalam konteks ini akan menunjukkan bahwa pemerintah Kab.Tanjung Jabung Timur dalam penanggulangan bencana telah mencapai angka 100% dapat dianggap sebagai indikator positif bahwa banyak pemerintah daerah mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan pedoman dan perencanaan nasional untuk mengurangi dampak bencana.



MELESTARIKAN DAN MEMANFAATKAN SECARA BERKELANJUTAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN SAMUDERA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Tujuan ke-empat belas melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan. Capaian sasaran pada tujuan 14 SDG's di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebagai berikut.

Tabel 46
Status Capaian Tujuan ke – 14 SDG's Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Kode Indikator	Nama Indikator	*Baseline*				Target Nasional 2022	Capaian Target			Status	Instansi
		2018	2019	2020	2021		Tidak Terpenuhi	Hampir Terpenuhi	Terpenuhi		
Mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi pada tahun 2025											
14.1.1.(a)	Persentase penurunan sampah terbuang ke laut										Bukan Disagresi Kabupaten
Mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan,termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif											
14.2.1*	Penerapan pendekatan berbasis ekosistem dalam pengelolaan areal lautan										Bukan Disagresi Kabupaten
14.2.1.(a)	Terkelolanya 11 Wilayah PengelolaanPerikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) secara berkelanjutan										Bukan Disagresi Kabupaten
Secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan 74nstrum dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya											
14.4.1*	Proporsi tangkapan jenis ikan laut yang berada dalam batasan biologis yang aman.										Bukan Disagresi Kabupaten
Melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia pada tahun 2020.											
14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan laut.										Bukan Disagresi Kabupaten
Melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan,menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada *the World Trade Organization* (WTO) pada tahun 2020.										
14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha.										Bukan Disagresi Kabupaten
Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar											
14.b.1*	Tingkat penerapan kerangka hukum/regulasi/ kebijakan/kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil										Bukan Disagresi Kabupaten
14.b.1.(a)	Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan										Bukan Disagresi Kabupaten
14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi										Bukan Disagresi Kabupaten
Meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya dengan menerapkan hukum internasional yang tercermin dalam *the United Nations Convention on the Law of the Sea*, yang menyediakan kerangka hukum untuk pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya, seperti yang tercantum dalam ayat 158 dari *"The future we want"*.											
14.c.1*	Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS *(the United Nations Convention on the Law of theSea)*										Bukan Disagresi Kabupaten



MELINDUNGI, MERESTORASI DAN MENINGKATKAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN, MENGELOLA HUTAN SECARA LESTARI, MENGHENTIKAN PENGGURUNAN, MEMULIHKAN DEGRADASI LAHAN, SERTA MENGHENTIKAN

Tujuan 15 (lima belas) adalah melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.

Tabel 47
Status Capaian Tujuan ke – 15 SDG's Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Kode Indikator	Nama Indikator	Baseline				Target 2022	Capaian Target			Status	Instansi
		2018	2019	2020	2021		Tidak terpenuhi	Hampir Terpenuhi	Terpenuhi		
Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.											
15.1.1*	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan.										Bukan Disagresi Kabupaten
15.1.2.(a)	Luas Kawasan Bernilai KonservasiTinggi (HCV).										Bukan Disagresi Kabupaten
Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan aforestasi dan reforestasi secara global.											
15.2.1.(a)	Jumlah KPH yang Masuk Kategori Maju										Bukan Disagresi Kabupaten
Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.											
15.3.1*	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan.										Bukan Disagresi Kabupaten
Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan,termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan.											
15.4.1*	Situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan konservasi										Bukan Disagresi Kabupaten
15.4.2*	Indeks tutupan hijau pegunungan.										Bukan Disagresi Kabupaten
Melakukan tindakan cepat dan signifikan untuk mengurangi degradasi habitat alami, menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, dan, pada tahun 2020, melindungi dan mencegah lenyapnya spesies yang terancam punah.											
15.5.1*	Indeks Daftar Merah (Red-list index)										Bukan Disagresi Kabupaten
Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional.											
15.6.1*	Kerangka kerja legislasi, administratif dan kebijakan untuk memastikan pembagian manfaat yang adil dan merata.										Bukan Disagresi Kabupaten
Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal.											
15.7.1.(a)	Jumlah kasus										Bukan

Kode Indikator	Nama Indikator	Baseline				Target 2022	Capaian Target			Status	Instansi
		2018	2019	2020	2021		Tidak terpenuhi	Hampir Terpenuhi	Terpenuhi		
	perburuan atau perdagangan illegal Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL).										Disagresi Kabupaten
Pada tahun 2020, memperkenalkan langkah-langkah untuk mencegah masuknya dan secara signifikan mengurangi dampak dari jenis asing invasif pada ekosistem darat dan air, serta mengendalikan atau memberantas jenis asing invasif prioritas.											
15.8.1*	Kerangka legislasi nasional yang relevan dan memadai dalam pencegahan atau pengendalian jenis asing invasive (JAI)										Bukan Disagresi Kabupaten
Pada tahun 2020, mengitegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.											
15.9.1.(a)	Rencana pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Aichi 2 dariRencana Strategis.										Bukan Disagresi Kabupaten
Memobilisasi sumber daya penting dari semua sumber dan pada semua tingkatan untuk membiayai pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan memberikan insentif yang memadai bagi negara berkembang untuk memajukan pengelolaannya, termasuk untuk pelestarian dan reforestasi.											
15.a.1.(a)	Bantuan pembangunan resmi untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan.										Bukan Disagresi Kabupaten
Memobilisasi sumber daya penting dari semua sumber dan pada semua tingkatan untuk membiayai pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan memberikan insentif yang memadai bagi negara berkembang untuk memajukan pengelolaannya, termasuk untuk pelestarian dan reforestasi.											
15.b.1.(a)	Bantuan pembangunan resmi untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan										Bukan Disagresi Kabupaten
Meningkatkan dukungan global dalam upaya memerangi perburuan dan perdagangan jenis yang dilindungi, termasuk dengan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal mengejar peluang mata pencaharian yang berkelanjutan.											
15.c.1.(a)	Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal TSL										Bukan Disagresi Kabupaten

Tercapai Akan Tercapai/membaik Perlu Perhatian Khusus - Data Tidak Tersedaia



MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN INKLUSIF DISEMUA TINGKATAN.

Fokus tujuan global keenam belas pembangunan berkelanjutan adalah masalah perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Berikut secara rinci Update Capaian SDGs di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan indikator yang disepakati.

Tabel 48
Status Capaian Tujuan ke – 16 SDG's Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Kode Indikator	Nama Indikator	Baseline				Target Nasional 2022	Capaian Target			GAP	Status	Instansi
		2018	2019	2020	2021		Tidak Terpenuhi	Hampir Terpenuhi	Terpenuhi			
Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimana pun.												
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					-	Polres
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					-	Polres
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.											Bukan Disagresi Kabupaten
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.											Bukan Disagresi Kabupaten
Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.												
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik											Bukan Disagresi Kabupaten
16.2.1.(b)	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya											Bukan Disagresi Kabupaten
16.2.2*	Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami											Bukan Disagresi Kabupaten

Kode Indikator	Nama Indikator	Baseline				Target Nasional 2022	Capaian Target			GAP	Status	Instansi
		2018	2019	2020	2021		Tidak Terpenuhi	Hampir Terpenuhi	Terpenuhi			
	kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.											
Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.												
16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.											Bukan Disagresi Kabupaten
16.3.1.(b)	Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi	N/A	N/A	N/A	N/A	84,91% (Angka Litigasi) 82,18% (Angka Non Litigasi)					-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
K16.3.1.(c)	Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkara											Bukan Disagresi Kabupaten
16.3.2.(a)	Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					-	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
16.3.3.(a)	Indeks Akses terhadap Keadilan (*Access to Justice Index*)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					-	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.												
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	N/A	N/A	N/A	N/A	4,03					-	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.												
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.											Bukan Disagresi Kabupaten
16.6.1.(a)	Persentase instansi pemerintah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP			WTP			BPK
16.6.1.(b)	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ≥ B	N/A	N/A	N/A	C	72,05%			B			Inspektorat Kab.Tanjung Jabung Timur
16.6.1.(c)	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ≥ B	N/A	N/A	N/A	N/A	45%					-	Inspektorat Kab.Tanjung Jabung Timur
16.6.2.(a)	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.	N/A	N/A	N/A	N/A	53					-	Inspektorat Kab.Tanjung Jabung Timur
Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.												

Kode Indikator	Nama Indikator	Baseline				Target Nasional 2022	Capaian Target			GAP	Status	Instansi
		2018	2019	2020	2021		Tidak Terpenuhi	Hampir Terpenuhi	Terpenuhi			
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	N/A	N/A	N/A	27%	15,53%			27%		●	Sekretariat DPRD
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	N/A	N/A	N/A	2,85%	N/A	2,94%				▼	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
16.7.2.(a)	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi											Bukan Disagresi Kabupaten
16.7.2.(b)	Indeks Aspek Kebebasan.											Bukan Disagresi Kabupaten
16.7.2.(c)	Indeks Kesetaraan											Bukan Disagresi Kabupaten
	Memperluas dan meningkatkan partisipasi negara berkembang di dalam lembaga tata kelola global.											
16.8.1.(a)	Jumlah keanggotaan dan kontribusi dalam forum dan organisasi internasional											Bukan Disagresi Kabupaten
	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.											
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil menurut umur.	77,69%	80,24%	79,89%	83,59%	81,34%			83,19%		●	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah.	93,68%	N/A	93,41%	91,22%	86,87%			93,83%		●	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun.	92,55%	N/A	92,37%	93,68%	97,00%		94,51%		2,49%	▶	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.												
16.10.1(a)	Indikator Kebebasan dari kekerasan bagi jurnalis dan awak media.											Bukan Disagresi Kabupaten
16.10.1(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					-	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
16.10.1(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			100%		●	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16.10.2*	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan											Bukan Disagresi Kabupaten

Kode Indikator	Nama Indikator	Baseline				Target Nasional 2022	Capaian Target			GAP	Status	Instansi
		2018	2019	2020	2021		Tidak Terpenuhi	Hampir Terpenuhi	Terpenuhi			
	konstitusi, statutori, dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi.											
16.10.2.(a)	Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					-	Sekretariat Daerah
16.10.2.(b)	Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.											Bukan Disagresi Kabupaten
Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.												
16.a.1*	Tersedianya lembaga hak asasi manusia (HAM) nasional yang independen yang sejalan dengan *Paris Principles.*											Bukan Disagresi Kabupaten
Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.												
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					-	Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Tercapai Akan Tercapai/membaik Perlu Perhatian Khusus - Data Tidak Tersedia

- **TPB Perlu Perhatian Khusus**

  Pada Analisis Capaian TPB Tujuan Ke-16 Menguatkan Masyarakat Yang Inklusif Dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, Dan Membangun Kelembagaan Yang Efektif, Akuntabel, Dan Inklusif Disemua Tingkatan terdapat indikator yang memerlukan perhatian khusus yaitu Indikator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan 16.7.1 (b) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).

- **TPB Perlu Adanya Pendalaman**

  Sedangkan indikator yang tidak memiliki data perlu adanya pendalaman, data yang tidak tersedia disebabkan oleh beberapa hal seperti kegiatan yang tidak cocok dengan nomenklatur indikator TPB atau indikator TPB bukan

kewenangan dari daerah, sehingga indikator yang tidak memiliki data perlu adanya perhatian khusus untuk mencapai trend capaian membaik. Adapun indikator yang butuh adanya pendalaman diantaranya:

- 16.1.1 (a) Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir;
- 16.1.2 (a) Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk;
- 16.2.2* Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi;
- 16.3.1 (b) Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi;
- 16.3.2 (a) Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan;
- 16.3.3 (a) Indeks Akses terhadap Keadilan (Access to Justice Index);
- 16.5.1 (a) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK);
- 16.6.1 (c) Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ≥ B;
- 16.6.2 (a) Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.
- 16.10.1 (b) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
- 16.10.2 (a) Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif; dan
- 16.b.1 (a) Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.

a) Target 16.1 (Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimana pun)

1) Indikator 16.1.2.(a) - Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.

Jumlah laporan kejahatan dan pelanggaran dalam kurun waktu 1 tahun yaitu dari bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022 sebanyak 0,33.

Tabel 49
Persentase Penduduk Menjadi Korban Kejahatan Pencurian, Penganiayaan, Pencurian dengan Kekerasan, Pelecehan Seksual, atau Lainnya sejak 1 Januari - 31 Desember 2021 menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2022

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
Kerinci	1,24	0,63	0,94
Merangin	0,34	0,20	0,27
Sarolangun	0,29	0,13	0,22
Batang Hari	0,43	0,44	0,44
Muaro Jambi	0,30	0,43	0,36
Tanjung Jabung Timur	0,23	0,45	0,33
Tanjung Jabung Barat	0,34	0,28	0,31
Tebo	0,63	0,23	0,44
Bungo	1,57	0,79	1,19
Kota Jambi	0,53	0,46	0,49
Kota Sungai Penuh	0,70	0,28	0,49
Provinsi Jambi	**0,59**	**0,40**	**0,50**

2) Indikator 16.1.2.(a) - Kematian disebabkan konflik per 100.000 Penduduk

Kasus kematian yang disebabkan konflik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhitung pada tahun 2022 terakhir sebanyak…. kasus.

b) Target 16.2 (Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak)

1) Indikator 16.2.2* - Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi.

c) Target 16.3 (Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua)

1) *Indikator 16.3.1.(b) - Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi*

2) Indikator 16.3.2.(a) - Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.

3) *Indikator 16.3.3.(a) - Indeks Akses terhadap Keadilan (Access to Justice Index)*

d) Target 16.5 (Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya)

1) Indiaktor 16.5.1.(a) - Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).

IPAK disusun berdasarkan dua dimensi, yaitu dimensi persepsi dan dimensi pengalaman. Dimensi persepsi bertujuan untuk melihat penilaian atau pendapat terhadap kebiasaan perilaku antikorupsi di masyarakat. Sementara itu, dimensi pengalaman bertujuan untuk melihat perilaku antikorupsi dari sisi pengalaman masyarakat ketika menggunakan atau berinteraksi dengan layanan publik dan pengalaman lainnya.

Tujuan SPAK adalah untuk mengukur tingkat permisifitas masyarakat terhadap perilaku antikorupsi dengan menggunakan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). Survei ini mengukur perilaku masyarakat dalam tindakan korupsi skala kecil (*petty corruption*) dan tidak mencakup korupsi skala besar (*grand corruption*). Data yang dikumpulkan mencakup pendapat terhadap kebiasaan di masyarakat dan pengalaman berhubungan dengan layanan publik dalam hal penyuapan (*bribery*), gratifikasi (*graft/gratuities*), pemerasan (*extortion),* nepotisme (*nepotism*), dan [9 (sembilan) nilai antikorupsi.

Berdasarkan data LKPJ Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2022, Opini dari BPK atas Laporan Keuangan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah WTP.

Berdasarkan data LKPJ OPD Kab. Tanjung Jabung Timur 2022 pengeluaran utama pemerintah Daerah terhadap anggaran yang disetujui pada tahun 2021 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menurut OPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp.115.825.803.345,20 atau sebesar 47,36% dari total anggaran belanja langsung daerah yang disetujui sebesar Rp. 244.544.117.910,00

e) Target 16.6 (Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat)

1) **Indiaktor 16.6.1.(a) - Persentase instansi pemerintah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).**

   Pemeriksaan atas Laporan Keuangan dilakukan dengan tujuan untuk memberikan opini (pernyataan pendapat) atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan mendasarkan pada kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektifitas Sistem Pengendalian Intern (SPI). Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2022 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat mempertahankan opini WTP untuk ketujuh kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2017-2022.

2) **Indiaktor 16.6.1.(b) - Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ≥ B**

   Berdasarakan data LKPJ Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nilai SAKIP instansi pemerintah dengan target 2022 B() teralisasi (B) pada tahun 2022. Artinya nilai SAKIP yang tinggi menunjukkan bahwa instansi pemerintah tersebut telah berhasil dalam mencapai tujuan-tujuannya dan mengelola sumber daya dengan efisien. Sebaliknya, nilai SAKIP yang rendah dapat menunjukkan adanya kelemahan dalam pengelolaan kinerja dan sumber daya. Nilai SAKIP mencerminkan sejauh mana suatu instansi pemerintah telah mencapai tujuan-tujuannya dan seberapa baik kinerjanya telah diukur dan dinilai berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Penilaian ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti efisiensi penggunaan anggaran, pencapaian target, pelayanan publik, dan sebagainya.

3) **Indiaktor 16.6.1.(c) - Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ≥ B**

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam penyelenggaraan pemerintahan berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akutanbilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat berdasarkan amanat undang-undang. Untuk mencapai hal tersebut, salah satu bentuk yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan melakukan pengawasan terhadap berbagai penyelenggaraan pemerintah daerah. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan

pemerintahan sepenuhnya dilaksanakan oleh Inspektorat. Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara berkala dan menginformasikan hasilnya kepada publik.

Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat bersifat internal dalam rangka meningkatkan kinerja urusan pembangunan daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, obyek pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan kebijakan kepala daerah. Pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah dilakukan dengan pemeriksaan terhadap laporan penyelenggaraan pemerintah dan tindaklanjut atas rekomendasi hasil pengawasan. Salah satu tugas dan fungsi lain dari pelaksanaan pengawasan di daerah adalah menindak lanjuti hasil temuan dari instansi pemeriksa dari tingkat pusat,dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK salah satunya akan menghasilkan temuan-temuan atas tindakan pengelolaan keuangan di daerah. Temuan-temuan tersebut kemudian harus ditindak lanjuti oleh

Inspektorat. Sampai tahun 2022, rasio temuan BPK yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah mencapai 76,98%. Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah mampu menunjukkan kecenderungan perbaikan dan/atau sebagian besar target yang relavan terpenuhi.

Tabel 50
Indikator Urusan Pengawasan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian
1.	Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1. Nilai IKM (Indeks kepuasan Masyarakat) 2. Predikat AKIP inspektorat 3. Laporan Keuangan Sesuai	82 70,50 Sesuai	70 71 Sesuai	85 100 100
2.	Meningkatnya Pengawasan InternPemerintah	Level Maturitas SPIP	Level 2	Level 2	100
2.1	Peningkatan Level Kapabilitas APIP	Skor IACM (Nilai Evaluasi Penilaian Mandiri atas Kapabilitas APIP	Level 2	Level 2	100
2.2	Penguatan Nilai SAKIP	Nilai SAKIP Pemda	B	B	100
2.3	Penyelesaian Temuan Hasil Pemeriksaan BPK	Persentase nilai temuan keuangan yang ditindaklanjuti	50%	76,98	100

Sumber : LKPJ Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2022

4) Indiaktor 16.6.2.(a) - Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik

Berdasarakan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 15 dan Bab V, memiliki kepentingan untuk memastikan penyelenggara pelayanan publik mematuhi kewajiban menyusun dan menyediakan standar pelayanan, maklumat pelayanan, siste informasi pelayanan publik, sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan publik, pelayanan khusus, pengelolaan pengaduan, dan sistem pelayanan terpadu.

Tingkat kepatuhan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah terhadap implementasi Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, khususnya kewajiban penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi komponen standar pelayanan publik dengan cara mengetahui hak-hak masyarakat dalam pelayanan publik, seperti

ada/atau tidaknya persyaratan pelayanan, kepastian waktu dan biaya, prosedur dan alur pelayanan, sarana pengaduan, pelayanan yang ramah dan nyaman, dll.

f) Target 16.7 (Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan)

1) Indikator 16.7.1.(a) - Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Setiap partai politik harus mengisi kuota perempuan minimal 30 persen, hal ini terangkum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 7/2013 pasal 27 ayat (1) huruf b menyangkut kuota 30 persen keterwakilan calon legislatif (caleg) perempuan di setiap daerah pemilihan (dapil). Ketentuan 30 persen caleg harus perempuan ini dimaksudkan untuk memberikan akses yang memadai bagi kaum perempuan agar dapat berpartisipasi dalam proses politik dan bernegara. Berdasarkan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam Angka 2022, jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Menurut Partai Politik yaitu, jumlah keikutsertaan perempuan dalam partai politik PAN sebanyak 5 jiwa, Golkar sebanyak 2 jiwa dan PDIP sebanyak 1 jiwa sehingga total keikutsertaan perempuan dalam partai politik sebanyak 7 jiwa.

Tabel 51
Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin Tahun 2022

Partai Politik	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
PAN	12	5	17
GOLKAR	2	2	4
PDIP	2	1	3
PBB	1	0	1
GERINDRA	2	0	2
HANURA	1	0	1
NASDEM	2	0	2
Tanjung Jabung Timur	22	8	30

Sumber : Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam Angka 2023

2) Indikator 16.7.1.(b) - Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).

Perempuan diposisi kepemimpinan seperti pemerintah di tingkat eksekutif, legislatif, peradilan dan penegak hukum, serta perusahaan milik publik atau swasta. Jabatan manajer menurut Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI) 2014 BPS meliputi: Pimpinan Eksekutif, Pejabat Tinggi Pemerintah dan Pejabat Pembuat Peraturan Perundang-undangan, Manajer Administrasi dan Komersial ; Manajer Produksi dan Pelayanan Khusus ; dan Manajer Jasa Perhotelan, Perdagangan, dan Jasa Lainnya. Perempuan di posisi kepemimpinan pemerintah (Menteri, Gubernur, pemerintah (Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota, Eselon I-II) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 2,85%.

Tabel 52
Jumlah Pegawai Negri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2022

Jabatan	Laki – laki	Perempuan	Jumlah
Fungsional tertentu	771	1.285	2.056
Fungsional Umum	612	403	1.015
Struktural	427	186	613
Eselon V	-	-	-
Eselon IV	273	160	433
Eselon III	119	25	144
Eselon II	34	1	35
Eselon I	-	-	-
Jumlah	**2.236**	**2.060**	**4.296**

Sumber : BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023

g) Target 16.9 (Pada tahun 2030, memberikan identitas yang sah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran)

1) Indikator 16.9.1* - Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil menurut umur.

Akta kelahiran merupakan bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Setiap anak lahir berhak memiliki akta kelahiran sebagai bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahirannya. Berdasarkan data Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 persentase penduduk yang memiliki akte kelahiran sebesar 94,51%.

Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. Yang dimaksud dengan lembaga pencatatan sipil berdasar pada UU No. 24 Tahun 2013 adalah instansi pelaksana yaitu perangkat pemerintah kabupaten yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan. Akta Kelahiran merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara bagi individu yang baru lahir. Jumlah Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil pada tahun 2022 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 83,19% yang memiliki akta kelahiran dan sebanyak16,81% tidak memiliki akta kelahiran.

2) Indikator 16.9.1.(a) - Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah.

Berdasarkan data statistic kesejahteraan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2022, presentase penduduk berumur 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran dengan karakteristik pendapatan 40% terbawah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebanyak 93,83%.

Tabel 53
Presentase Penduduk berumur 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran menurut karakteristik tahun 2022

Karakteristik	Memiliki Akta Kelahiran
Jenis Kelamin	
Laki-laki	94,75
Perempuan	94,27
Kelompok Pengeluaran	
40 persen terbawah	**93,83**
40 persen tengah	96,01
20 persen teratas	92,37
Pendidikan tertinggi KRT	
SD ke bawah	93,69
SMP ke atas	95,40
Tanjung Jabung Timur	**94,51**

Sumber : Statistik Kesejahteraan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023

3) **Indikator 16.9.1.(b) - Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun.**

Berdasarkan data statistik kesejahteraan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2022, presentase penduduk berumur 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebanyak 94,51%.

h) Target 16.10 (Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional)

1) **Indikator 16.10.1.(b) - Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).**
2) **Indikator 16.10.1.(c) - Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.**

Tindak kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga masih dianggap sebagai masalah pribadi dan bisa menimbulkan aib keluarga, sehingga banyak warga yang tidak berani melaporkan permasalahan tersebut. Kekerasan ini terjadi mayoritas karena masalah ekonomi keluarga serta usia pernikahan dini yang menyebabkan secara mental masih cukup labil. Seiring dengan sosialisasi dan perlatihan terkait dengan penanganan korban kekerasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanjung Jabung Timur masyarakat sudah berani untuk melaporkannya bila terjadi tindak kekerasan baik dari korban maupun dari warga setempat kejadian.

Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak-anak dari tindakan kekerasan pada tahun 2022 dapat diselesaikan 100%.

3) **Indikator 16.10.2.(a) - Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif**

i) Target 16.b (Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan)

1) Indikator 16.b.1.(a) - Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.

MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.

Fokus dari tujuan terakhir dari pembangunan berkelanjutan adalah membina kemitraan global untuk meraih tujuan pembangunan berkelanjutan. Secara rinci capaian RAD Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk sasaran ke 17 adalah sebagai berikut:

Tabel 54

Status Capaian Tujuan ke – 17 SDG's Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Kode Indikator	Nama Indikator	Baseline				Target Nasional 2022	Target Capaian			GAP	Status	Sumber Data
		2018	2019	2020	2021		Tidak Terpenuhi	Hanpir Terpenuhi	Terpenuhi			
Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.												
17.1.1.*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	N/A	N/A	N/A	N/A	10,18%	0,33%			9,85	▼	Badan Keuangan Daerah
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB	N/A	N/A	N/A	N/A	8,37	0,13%			8,24	▼	Badan Keuangan Daerah
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	N/A	N/A	N/A	N/A	52,24					-	Badan Keuangan Daerah
Negara-negara maju melaksanakan secara penuh komitmen atas bantuan pembangunan (Official Development Assistance ODA) termasuk komitment dari banyak negara maju untuk mencapat target 0.7 persen dari pendapatan nasional bruto untuk pembangunan (ODA/GNI) bagi negara berkembang dan 0.15 samapi 0,2 persen ODA/GNI kepada negara kurang berkembang penyedia ODA didorong untuk mempertimbangkan penetapan target untuk memberikan paling tidak 0,20 persen dari ODA/GNI untuk negera kurang berkembang												
17.2.1.(a)	Proporsi ODA terhadap PDB dan PNB											Bukan Disagresi Kabupaten
Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber.												
17.3.2.(a)	Proporsi volume remitansi PMI (dalam US dollars) terhadap PDB.											Bukan Disagresi Kabupaten
Membantu negara berkembang untuk mendapatkan keberlanjutan utang jangka panjang melalui kebijakan-kebijakan yang terkoordinasi yang ditujukan untuk membantu pembiayaan utang, keringanan utang dan restrukturisasi utang, yang sesuai, dan menyelesaikan utang luar negeri dari negara miskin yang berutang besar untuk mengurangi												
17.4.1*	Proporsi pembayaran utangdan bunga (*Debt Service*) terhadap ekspor barang dan jasa.											Bukan Disagresi Kabupaten
Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.												
17.6.1.(a)	Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar (*fixed broadband*) terhadap total rumah tangga											Bukan Disagresi Kabupaten
17.6.1.(b)	Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif).											Bukan Disagresi Kabupaten
Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.												
17.8.1*	Persentase pengguna internet.	27,81%	33,66%	39,60%	50,35%	79,2%		61,27%		17,93%	▶	Dinas Komunikasi dan Informatika
Meningkatkan dukungan internasional untuk melaksanakan pembangunan kapasitas yang efektif dan sesuai target di negara berkembang untuk mendukung rencana nasional untuk melaksanakan seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan triangular												
17.9.1.(a)	Jumlah pendanaan kegiatan kerja sama pembangunan internasional											Bukan Disagresi Kabupaten

Kode Indikator	Nama Indikator	Baseline				Target Nasional 2022	Target Capaian			GAP	Status	Sumber Data
		2018	2019	2020	2021		Tidak Terpenuhi	Hanpir Terpenuhi	Terpenuhi			
	termasuk KSST											
17.9.1.(b)	Jumlah program/kegiatan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular											Bukan Disagresi Kabupaten
Menggalakkan sistem perdagangan multilateral yang universal, berbasis aturan, terbuka, tidak diskriminatif dan adil di bawah *the World Trade Organization* termasuk melalui kesimpulan dari kesepakatan di bawah *Doha Development Agenda.*												
17.10.1.(a)	Jumlah PTA/FTA/CEPA yang disepakati											Bukan Disagresi Kabupaten
Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020.												
17.11.1.(a)	Pertumbuhan ekspor produk nonmigas.											Bukan Disagresi Kabupaten
Meningkatkan stabilitas makroekonomi global, termasuk melalui koordinasi kebijakan dan keterpaduan kebijakan.												
17.13.1*	Tersedianya *Dashboard Makroekonomi.*											Bukan Disagresi Kabupaten
Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.												
17.17.1.(a)	Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek KPBU (DRK) yang diterbitkan setiap tahun.											Bukan Disagresi Kabupaten
17.17.1.(b)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					-	Sekretariat Daerah
17.17.1.(c)	Jumlah nilai investasi proyek KPBU berdasarkan tahap perencanaan, penyiapan dan transaksi.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					-	Sekretariat Daerah
Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkansecara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.												
17.18.1.(a)	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.											Bukan Disagresi Kabupaten
17.18.1.(b)	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.											Bukan Disagresi Kabupaten
17.18.2*	Jumlah negara yang memiliki undang-undang statistik nasional yang tunduk pada Prinsip-prinsip fundamental Statistik Resmi											Bukan Disagresi Kabupaten
17.18.3*	Jumlah negara dengan Perencanaan Statistik Nasional yang didanai dan melaksanakan rencananya berdasar sumber pendanaan.											Bukan Disagresi Kabupaten
Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.												
17.19.1.(a)	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan											Bukan Disagresi Kabupaten

Kode Indikator	Nama Indikator	Baseline				Target Nasional 2022	Target Capaian			GAP	Status	Sumber Data
		2018	2019	2020	2021		Tidak Terpenuhi	Hanpir Terpenuhi	Terpenuhi			
	rekomendasi kegiatan statistik.											
17.19.1.(b)	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar.											Bukan Disagresi Kabupaten
17.19.2.(a)	Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020.											Bukan Disagresi Kabupaten
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (*Vital Statistics Register*).	N/A	N/A	N/A	N/A	Ada			Tersedia		●	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

● Tercapai ▶ Akan Tercapai/membaik ▼ Perlu Perhatian Khusus - Data Tidak Tersedia

- **TPB Perlu Perhatian Khusus**

  Pada analisis capaian TPB Tujuan ke-17 Menguatkan Sarana Pelaksanaan Dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan, terdapat beberapa indikator yang memerlukan perhatian khusus diantaranya adalah Indikator 17.1.1* Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya dan 17.1.1 (a) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.

- **TPB Perlu Adanya Pendalaman**

  Sedangkan capaian indikator yang tidak memiliki data perlu adanya pendalaman, data tidak tersedia disebakan oleh beberapa hal seperti kegiatan tidak match dengan nomenklatur indikator TPB atau Indikator TPB tidak dengan kewenangan daerah. Sehingga indikator yang tidak memiliki data perlu perhatian khusus untuk mencapai trend capaian membaik. Capaian TPB yang tidak memiliki data terdapat pada indikator :

  - 17.1.2* Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestic;
  - 17.17.1 (b) Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU); dan
  - 17.17.1 (c) Jumlah nilai investasi proyek KPBU berdasarkan tahap perencanaan, penyiapan dan transaksi.

a) Target 17.1 (Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya)

1) Indikator 17.1.1* - Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022, Total pendapatan pemerintah *Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022* sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya sebesar 5,32% dan rasio penerimaan pajak terhadap PDRB sebesar 0,10%.

Mengukur sejauh mana pendapatan yang diterima oleh pemerintah, baik melalui pajak, pungutan, maupun sumber-sumber pendapatan lainnya, dalam hubungannya dengan Total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Konsep dalam analisis ekonomi dan kebijakan publik karena membantu dalam memahami sejauh mana pemerintah dapat mengumpulkan sumber daya untuk membiayai layanan publik, program sosial, infrastruktur, dan kebutuhan lainnya berdasarkan ukuran ekonomi suatu wilayah.

Berdasarkan data BPS Kab.Tanjung Jabung Timur 2023 pendapatan asli daerah pada tahun 2022 sebesar Rp. 59.181.062.322,07 dengan PDRB pada tahun 2022 sebesar Rp.17.471.905.000.000 Jadi total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya adalah 0,33% Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 55
Pendapatan Pemerintah Terhadap PDRB Menurut Jenisnya

No	Uraian	Tahun	
		2021	2022
Pendapatan Asli Daerah (PAD)		**83.151.030.599,45**	**59.181.062.322,07**
1	Pajak Daerah	19.776.698.793,50	23.152.323.336,80
2	Retribusi Daerah	1.855.564.808,43	1.331.496.540,00
3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	7.088.808.214,73	8.078.242.319,72
4	Lain-lain PAD yang sah	54.429.958.782,79	26.619.000.125,55
Pendapatan Lainnya		**1.050.089.360.137**	**1.068.545.584.370,00**
5	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	994.128.081.892	1.005.170.844.623,00
6	Pendapatan Transfer Antar Daerah	55.961.278.245	63.374.739.747,00

Sumber : LKPJ dan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022

2) **Indikator 17.1.1.(a) - Rasio penerimaan pajak terhadap PDB**

Indikator yang mengukur sejauh mana penerimaan pajak (termasuk berbagai jenis pajak seperti pajak pendapatan, pajak penjualan, pajak properti, dan lainnya) dari pemerintah suatu wilayah dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) wilayah tersebut. Rasio ini adalah alat penting dalam analisis ekonomi dan kebijakan fiskal. Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB merupakan salah satu indikator yang penting untuk memahami kesehatan keuangan pemerintah dan dampak pajak terhadap perekonomian suatu wilayah.

Rasio penerimaan pajak PDRB dengan total penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 23.152.323.336,80 terhadap PDRB sebesar Rp.17.471.905.000.000 pada tahun 2022 maka rasio pajak terhadap PDB sebesar 0,13%

3) **17.1.2* Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.**

b) Target 17.8 (Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi)

1) **Indikator 17.8.1* - Persentase Pengguna Internet**

Berdasarkan data statistik kesejahteraan rakyat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022, persentase penduduk 5 tahun keatas yang memiliki telepon selular (HP) dalam 3 bulan terakhir di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 83,65% dan persentase penduduk 5 tahun ke atas yang mengakses internet dalam 3 bulan terakhir sebesar 61,27%.

Tabel 56
Persentase Anggota Rumah Tangga Berusia 5 Tahun Ke Atas menurut Karakteristik dam Penggunaan Teknologi Informasi selama Tiga Bulan Terakhir, 2022

Karakteristik	Menggunakan Telepon Seluler (HP)/Nirkabel atau computer(PC/Desktop,Laptop/Note book,Tablet)	Menggunakan Internet (Termasuk Facebook, Twitter, Youtube, Instragram, Whatsapp, dll)
Jenis Kelamin KRT		
Laki-laki	84,30	62,24
Perempuan	75,81	49,76
Kuintil Pengeluaran		
40 persen terbawah	81,10	57,24
40 persen tengah	83,00	59,92
20 persen teratas	89,84	71,74
Pendidikan tertinggi ART		
SD ke bawah	81,81	53,27
SMP ke atas	85,92	71,18
Tanjung Jabung Timur	**83,65**	**61,27**

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022

c) Target 17.17 (Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama)

2) Indikator 17.17.1.(b) - Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) adalah sebuah model kerjasama di mana pemerintah bekerja sama dengan badan usaha atau sektor swasta untuk melaksanakan proyek infrastruktur atau proyek lainnya. Proyek-proyek yang dapat dijalankan dengan skema KPBU biasanya adalah proyek-proyek besar yang memerlukan investasi signifikan.

3) Indikator 17.17.1.(c) - Jumlah nilai investasi proyek KPBU berdasarkan tahap perencanaan, penyiapan dan transaksi.

d) Target 17.19 (Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang)

1) **Indikator 17.19.2.(b) - Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (*Vital Statistics Register*).**

TFR (*Total Fertility Rate*) yang merupakan ukuran jumlah rata-rata anak yang diharapkan akan dilahirkan oleh seorang wanita selama hidup reproduktifnya. TFR mencerminkan tingkat fertilitas rata-rata dalam suatu populasi. Jika TFR lebih dari 2,1, ini menunjukkan bahwa populasi tersebut memiliki tingkat kelahiran yang cukup tinggi untuk mempertahankan atau meningkatkan jumlah penduduk. Sebaliknya, jika TFR kurang dari 2,1, ini menunjukkan tingkat kelahiran di bawah tingkat kesuburan yang diperlukan untuk pertumbuhan.

Tabel 57
Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur

Kabupaten/Kota	Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur					
		15-19	20-24	25-29	35-39	40,44	45,49
Kerinci	2,20	47,20	104,90	144,30	82,10	45,50	13,00
Merangin	2,18	2,18	40,60	104,50	138,60	89,00	48,70
Sarolangun	2,64	2,64	62,10	115,60	145,30	110,30	64,50
Batang Hari	2,27	2,27	50,10	107,50	100,90	115,20	46,80
Muaro Jambi	2,19	2,19	21,70	101,00	140,60	94,60	60,30
Tanjab Timur	**2,36**	2,36	63,00	102,30	120,30	107,10	48,90
Tanjab Barat	2,39	2,39	50,80	116,70	130,80	105,80	56,10
Tebo	2,45	2,45	46,80	127,30	131,80	95,30	59,30
Bungo	2,23	2,23	38,60	107,90	124,20	99,80	51,70
Kota Jambi	2,08	2,08	17,50	95,30	134,30	93,70	57,20
Kota Sungai Penuh	2,19	2,19	17,40	88,60	155,70	104,90	57,00
Provinsi Jambi	***2,28***	***2,28***	***50,47***	***101,37***	***130,47***	***99,26***	***52,25***

Sumber :BPS Provinsi Jambi, Tahun 2023

Tabel 58
Angka Kematian Ibu Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Jumlah Kematian Ibu
Kerinci	7
Merangin	6
Sarolangun	6
Batang Hari	8
Muaro Jambi	9
Tanjab Timur	**5**
Tanjab Barat	5
Tebo	8
Bungo	9
Kota Jambi	4
Kota Sungai Penuh	3
Provinsi Jambi	**70**

Sumber : Seksi Kesga dan Gizi Masyarakat Bidang Kesmas,2022

Tabel 59
Angka Kematian Bayi, Anak, dan Angka Kematian Balita Menurut Kabupaten/Kota,Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Angka Kematian Bayi (IMR)	Angka Kematian Anak (CMR)	Angka Kematian Balita (USMR)
Kerinci	19,60	5,51	25,11
Merangin	16,11	2,67	18,78
Sarolangun	18,30	4,70	23,00
Batang Hari	14,73	2,53	17,27
Muaro Jambi	14,05	2,29	16,34
Tanjab Timur	**16,82**	2,77	19,59
Tanjab Barat	19,31	3,56	22,87
Tebo	18,22	3,08	21,31
Bungo	17,77	2,99	20,76
Kota Jambi	13,02	2,07	15,09
Kota Sungai Penuh	16,84	2,98	19,82
Provinsi Jambi	**19,60**	**5,51**	**25,11**

Sumber :BPS Provinsi Jambi, Tahun 2023